Jill Steans &
Lloyd Pettiford

Hubungan Internasional

Perspektif dan Tema

Jill Steans &
Lloyd Pettiford

Hubungan Internasional

Perspektif dan Tema

HUBUNGAN INTERNASIONAL: PERSPEKTIF DAN TEMA
Jill Steans & Lloyd Pettiford

Judul Asli:
International Relations: Perspectives and Themes
© **Pearson Education Limited**, Edinburgh Gate, Harlow, Essex CM20 2JE, England.
ISBN : 0-582-32211-1

Cetakan I, **Februari 2009**

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording and/or otherwise, without the prior written permission of the publisher.

Edisi bahasa Indonesia untuk pertama kali diterbitkan oleh:
PENERBIT PUSTAKA PELAJAR
© PUSTAKA PELAJAR, 2009

Penerjemah: Deasy Silvya Sari
Penyunting: Eka Adinugraha
Desain Cover: Haitamy el Jaid
Pemeriksa Aksara: Ratih
Penata Aksara: Bima Bayu Atijah

Penerbit:
PUSTAKA PELAJAR
Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167
Telp. (0274) 381542, Fax. (0274) 383083
E-mail: pustakapelajar@telkom.net
pustakapelajar@yahoo.com

ISBN 978-602-8300-81-0

Kata Pengantar

Buku ini bukan hanya sebuah pengantar pertama bagi HI. Ia merupakan pengantar yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan juga kelima, dan selama proses menulisnya saya juga telah belajar satu atau dua hal. Dalam menggali serangkaian tema dan perspektif kami berharap semua mahasiswa akan menemukan buku kami tidak hanya berguna, tapi juga pantas dijadikan pertimbangan. Kami sepenuhnya berharap bahwa masing-masing mahasiswa dapat memperoleh hasil yang berbeda-beda dari membaca karya ini; dan pokok bahasan satu per satu tentang asal usul, asumsi-asumsi, tema-tema, kritik-kritik dan kesalahpahaman umum (dijelaskan secara lebih lengkap dalam pendahuluan) disusun, tidak hanya untuk membuat jelas, tapi juga untuk mendorong perbandingan dan refleksi. Kami tidak bertujuan atau mengaku melakukan segalanya, tapi berusaha untuk mencari suatu penjelasan yang jelas dari teori HI yang komprehensif namun juga menarik.

Ada dua poin utama mengenai teks ini yang layak untuk dibuat dari awal. Poin *pertama* adalah mengenai pendekatan kami terhadap pembuatan referensi dan *kedua* berkaitan dengan penggunaan istilah 'Hubungan Internasional'/'hubungan internasional' dan 'HI'. Kedua hal itu, agar

keduanya tidak dilupakan karena antusiasme, juga dimasukkan sebagai 'kotak' dalam bagian pendahuluan dan juga sama-sama dijelaskan. Penggunaan kotak merupakan tampilan yang penting dari buku ini secara keseluruhan; mereka menambahi dan memisahkan antarteks, dan juga memberikan pemahaman-pemahaman, informasi, dan klarifikasi penting dengan sendirinya.

Pertama, referensi. Sejak awal kami berharap banyak pihak akan menggunakan buku ini, bukan hanya para mahasiswa dari disiplin HI (dan jika buku ini bermaksud memberikan pengantar pada beberapa mahasiswa yang baru dengan pembahasan ini), maka sangatlah penting menekankan beberapa kaidah utama pembuatan referensi dan menjelaskan pendekatan yang telah kami ambil di sini karena mungkin tidak sesuai dengan aturan dari beberapa sarjana/ penulis. *Pertama,* kami memahami pentingnya pereferensian karya-karya mahasiswa dengan menggunakan salah satu dari sejumlah sistem yang telah diterima yang dapat dipelajari dari bertanya pada seorang tutor, mengonsultasikannya pada buku-buku dan, mungkin, dari sebuah pelayanan perpustakaan dan informasi. *Kedua,* bahwa karya seharusnya selalu mempunyai sebuah bibliografi dari semua sumber yang digunakan (tidak hanya mengutip) di bagian akhirnya.

Dalam konteks ini Anda mungkin bertanya mengapa kami menjaga referensi seminimal mungkin, meski pada saat sama memberikan sebuah bibliografi dalam bentuk bacaan yang lebih lanjut? Alasan kami, yang beberapa orang menerima dan sebagian lagi mempertanyakannya, adalah bahwa dalam pengalaman kami, terlalu sedikit para mahasiswa yang mengonsultasikan bacaannya dengan teks-teks

asli. Ketika karya pengantar sangat banyak referensinya, sering kali digunakan gaya yang sangat penting bagi saya, yaitu ide-ide kunci dan bibliografi tambahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kami merasa perlu untuk merujuk otoritas kunci dalam setiap bidang pembahasan sehingga teks tidak perlu dianggap sebagai pemikiran dari Steans dan Pettiford yang pada kenyataannya sering kami bahas seputar ide-ide yang telah ada.

Jadi, kami ingin teks ini membantu para mahasiswa memahami ide-ide kunci yang kami perkenalkan, tapi lebih menggunakan karya kami yang memungkinkan mereka untuk memahami beberapa karya 'klasik' HI dan karya-karya baru dan lanjutan yang cukup bernilai di lapangan, daripada hanya sebagai satu cara menghindari pembahasan tentang semua topik tersebut. Hal ini bukanlah sebuah pendekatan yang tidak kontroversial tapi salah satu pendekatan yang didasarkan pada pengalaman mengajar yang luas dan suatu pendekatan yang mencoba memerhatikan sebuah kesediaan yang telah tampak untuk menerima teori 'tangan kedua' pada sebagian besar dari mahasiswa kami.

Kini kita bahas perbedaan di antara berbagai bentuk pengejaan 'HI'. Meski hal ini tidak digunakan oleh semua penulis di bidang studi ini, buku ini menggunakan hal yang kami percaya menjadi suatu sistem yang cukup beralasan untuk diterima dalam membicarakan tentang 'HI: sebuah Disiplin Ilmu'. Ketika kami menggunakan frasa 'Hubungan Internasional', maka kami sedang merujuk pada suatu disiplin akademis —pada teori dan studi (dan kami juga menggunakan huruf kapital pada disiplin-disiplin ilmu lainnya). Ketika kami menggunakan 'hubungan internasional' (atau 'Hubungan internasional' pada permulaan kalimat),

maka kami sedang merujuk pada praktik politik, ekonomi dunia, dan sebagainya. Sementara 'HI' bisa digunakan sebagai singkatan bagi keduanya, kami akan menggunakan nya ketika kami perlu merujuk pada Hubungan Internasional (dengan huruf kapital) maupun hubungan internasional (dengan huruf non-kapital) secara simultan atau bersamaan. Perbedaan ini, tentu saja, biasanya sangat terasa menurut konteks bacaan, dan tidak terlalu memengaruhi alur bacaan pembaca. Kami berusaha menggambarkan karena ia berguna sebagai 'alat', terutama bagi para mahasiswa, untuk menjamin jelasnya pengertian dan pemahaman mereka.

Buku ini mempunyai sejarah yang panjang sebelum dipublikasikan. Idenya berasal pada masa sebagai seorang mahasiswa dan sejak pengalaman mengajar tahun pertama saya di Universitas Nottingham, ketika Jill Steans, selama beberapa waktu, merupakan rekan kerjaku. Terima kasih banyak saya ucapkan pada orang-orang yang telah membantu selama proses pengerjaan buku ini; sudah seharusnya jika saya memulainya dari Alan Russel yang telah memberiku kesempatan untuk belajar sebuah subjek menarik seperti itu untuk pertama kali! Pada awal proses ini Cedric Rawlings, Chris May, dan Nana Poku memberi saya dorongan antusiasme atas penulisan buku ini yang juga kemudian diberikan oleh Chris Harrison (kini di Cambridge University Press). Bagaimanapun juga, proyek ini dapat menjadi bentuk yang seperti ini ketika Jill Steans setuju untuk menjadi penulis pendamping; gaya-gaya dan karya kami telah melengkapi satu sama lain dengan baik, dan saya sangat berterima kasih padanya terutama bagi dukungannya yang sangat besar terhadap buku ini. Sama halnya dengan proses penulisan, editing, dan sebagainya dia juga telah meluang-

kan waktunya untuk memberikan dorongan dan menunjukkan keyakinan akan sebuah penulisan buku ini bahkan ketika dia mempunyai begitu banyak jadwal lain yang juga membutuhkan perhatiannya.

Kami berdua telah sangat bergantung dalam hal waktu maupun sumber-sumber tulisan dari keluarga, teman-teman dan rekan kerja. Pertama-tama, kami ingin berterima kasih pada orang-orang yang telah membaca draf ataupun membantu dalam penyiapan manuskrip: Tanya Matthewson, Cedric Rawlings, John MacMillan, Christopher May, Andrew Linklater, Stephen Chan, Caroline Arnold, Gillian Youngs, Mat Paterson, Elvind Hovden, Christopher Farrands, Hidemi Suganami, John Barry dan Cindy Weber. Dalam menyelesaikan bagian ini hingga akhir buku, saya sangat berharap tidak melupakan sebuah nama pun! Orang-orang yang saya sebutkan di sini bebas mengakui keterlibatannya yang terbukti pada bobot buku ini, tapi tentunya tidak seharusnya bertanggung jawab bagi kelemahan yang terdapat dalam karya ini.

Ada beberapa teman lainnya (termasuk keluarga) yang juga layak menerima ungkapan terima kasih kami atas dorongan mereka dan dukungan moral yang terus-menerus. Ucapan terima kasih Jill akan disampaikan di bawah. Saya ingin berterima kasih terutama pada Caroline, Ibu dan Ayah, Owen, Karsten dan Caroline, Peter Wilkin, Chris May, Jane McNeil, Melissa Curley, dan, tentu saja, Matt Le Tiss! Meski demikian, saya tetap berutang pada banyak orang baik di rumah ataupun di tempat kerja saya daripada ini. Terima kasih untuk semuanya.

Terakhir, terima kasih tentunya untuk penerbit kami, dan terutama Emma Mitchell, atas antusiasmenya terhadap ke-

majuan kami, untuk rasa simpatinya terhadap tekanan-tekanan lain yang kami hadapi dan atas kesabarannya ketika karya kami menjadi lambat.

Lloyd Pettiford, Clifton

Sebagai tambahan dari ucapan terima kasih di atas, saya ingin berterima kasih pada ibu saya, Joyce, atas bantuan praktisnya yang tak ternilai selama masa-masa yang sangat sibuk, serta Luke dan Ria untuk cinta dan dukungan yang terus-menerus. Saya juga ingin berterima kasih pada Lloyd atas antusiasmenya yang konstan dan selera humornya yang menyenangkan, yang membuat penulisan buku ini menjadi menyenangkan. ✦

Jill Steans, Keele

Pengantar Penerjemah

Kian lama, studi Hubungan Internasional (HI) kian luas cakupannya. Sulit bagi mereka yang untuk pertama kali mempelajari HI, mengerti pengertian HI yang sebenarnya. Ilmu macam apa ia; untuk apa kita mempelajarinya? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang terus berkecamuk dalam benak saya saat pertama kali menginjakkan kaki di Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Padjajaran. Saya pikir, saya akan belajar untuk menjadi seorang Diplomat. Bagaimana harus menjalankan 'rapat-rapat' seperti di Jenewa, misalnya; bagaimana taktik berperang dan strategi 'ngomong' untuk meredakan perang; bagaimana kita basa-basi tentang gaya hidup menjadi diplomat, saya pikir seperti itulah yang akan saya pelajari.

Namun ternyata, untuk pertama kalinya, malah saya dihadapkan dengan serangkaian teori mulai dari Perang Dunia I yang rata-rata semuanya berbicara tentang interaksi antarnegara. Semester demi semester, kian rumit pula hal yang saya pelajari. Saya mulai mengetahui tentang Hukum Internasional, Ekonomi Politik Global —yang 'sepertinya' menjadi mata kuliah wajib bagi mereka yang berada di belahan Dunia Ketiga, Resolusi konflik, cara memahami kurs valuta asing atau motivasi-motivasi yang mendasari bantu-

an luar negeri sebuah negara (baik itu hibah ataupun utang luar negeri), tentang Globalisasi dan cara untuk tetap bertahan hidup di dalam situasi tersebut, yang kesemuanya itu membuat semakin kabur pemahaman saya mengenai HI.

Dari semua itu satu hal penting yang saya pahami adalah bahwa semuanya berakar dari perspektif. Aktor-aktor internasional —apa pun tindakan mereka— bergantung pada cara pandang yang mereka pahami mengenai dunia. Sehingga, untuk memahami alasan Amerika Serikat yang 'sepertinya' bersikeras untuk menjadi 'jagoan' dunia, kita harus mengetahui perspektif yang mendasari orang-orang Amerika Serikat, terutama para elit politik yang menjalankan pemerintahan di Amerika Serikat. Jika yang mendasari mereka adalah realisme, haruslah diketahui dengan jelas jenis atau macam realisme yang dipakai di sana. Seandainya liberalisme, pemahaman liberalisme yang dianut Amerika Serikat, misalnya, harus diketahui dengan jelas. Jika kita sudah memahami akar-akar perspektifnya dengan rinci, maka sedikitnya kita mampu menafsirkan tingkah laku Amerika Serikat.

Memahami perspektif yang terdapat dalam studi HI tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Meskipun sejak pertama mempelajari HI saya sudah dihadapkan dengan serangkaian teori, namun hingga skripsi terjilid pun mempelajari satu saja —apalagi semua— perspektif yang ada dalam HI sangatlah sulit. Karenanya, memilih buku pengantar bagi studi HI dari Jill Steans dan Lloyd Pettiford ini untuk memahami perspektif-perspektif dalam HI sangatlah berguna. Dalam buku ini, kedua penulisnya sudah menempatkan satu persatu perspektif, realisme misalnya, dalam satu bab tersendiri. Kemudian dari bab realisme ini

diuraikan proses kemunculan perspektif ini dalam bagian 'Asal Usul'; pandangan perspektif tersebut secara umum terhadap dunia dalam bagian 'Asumsi-asumsi'; kemudian cara perspektif ini memandang peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia, isu-isu yang berkembang dalam 'Tema-Tema'. Hal inilah yang menjadi kelebihan dari buku ini: sebuah kemudahan dalam mempelajari berbagai perspektif.

Namun, sedikitnya perspektif yang dibahas —hanya tujuh perspektif— serta sedikitnya tema-tema yang diajukan —hanya lima tema— menjadikan buku ini serasa singkat. Namun, dengan melihat cara kedua penulis buku ini dalam membahas 'dunia' dengan perspektif-perspektif yang mereka suguhkan membuat kita, khususnya saya, dapat memahami kerangka pengaplikasian suatu perspektif terhadap 'dunia'.

Tidak salah jika Anda memilih buku ini untuk mempelajari HI karena kemudahan dan kesederhanaan yang disuguhkan oleh kedua penulis buku ini membuat kita 'terbuka' atas berbagai perspektif yang mendasari tingkah laku aktor-aktor internasional.

Terima kasih saya haturkan kepada Zaenal Muttaqin, suami sekaligus partner setia dalam proses penerjemahan; terima kasih pula untuk Bapak Chandra Purnama atas dukungan dan bimbingannya selama ini; untuk Rafi dan keluarga, mohon maaf atas tersitanya waktu dan perhatian Ummu; serta untuk teman-teman, *especially* Teh Viani: terima kasih untuk dukungannya.

Saran dan kritik yang membangun berkaitan dengan penerjemahan isi dari buku ini, sangat saya harapkan. Silakan layangkan saran dan kritik Anda ke e-mail: deasy_ss @plasa.com. ✦

Daftar Isi

Kata Pengantar — v
Pengantar Penerjemah — xi
Daftar Isi — xiv

Pendahuluan — 1

Tentang Buku ini — 8
Beberapa Perspektif dan Tema — 19
Asal Usul — 23
Asumsi-asumsi — 24
Tema-tema — 30
Kesimpulan, Kritik-Kritik, Kesalahpahaman Umum, dan Bacaan Lebih Lanjut — 35
Bacaan Lebih Lanjut — 39

Bab 1. Realisme — 41

Pendahuluan — 41
Asal Usul — 53
Asumsi — 57
Tema — 59
Negara dan Kekuasaan — 59
Konflik dan Kekerasan — 66
Perdamaian dan Keamanan — 69

Institusi dan Tatanan Dunia — 71
Identitas dan Komunitas — 78
Kesenjangan dan Keadilan — 78
Kesimpulan — 80
Kritik — 82
Kesalahpahaman Umum — 87
Bacaan Lebih Lanjut — 90

Bab 2. Liberalisme — 93

Pendahuluan — 93
Asal Usul — 101
Asumsi-asumsi — 111
Tema-tema — 112
Perdamaian dan Keamanan — 112
Negara dan Kekuasaan — 117
Institusi-institusi dan Tatanan Dunia — 125
Identitas dan Komunitas — 136
Kesenjangan dan Keadilan — 139
Konflik dan Kekerasan — 141
Kesimpulan — 141
Kritik — 143
Kesalahpahaman Umum — 145
Bacaan Lebih Lanjut — 147

Bab 3. Strukturalisme — 149

Pendahuluan — 149
Asal Usul — 152
Asumsi-asumsi — 173
Tema-tema — 174
Negara dan Kekuasaan — 174

Institusi-institusi dan Tatanan Dunia — 182
Kesenjangan dan Keadilan — 188
Identitas dan Komunitas — 193
Konflik dan Kekerasan — 198
Perdamaian dan Keamanan — 201
Kesimpulan — 201
Kritik — 203
Kesalahpahaman Umum — 205
Bacaan Lebih Lanjut — 207

Bab 4. Teori Kritis — 209

Pendahuluan — 209
Asal Usul — 218
Asumsi-asumsi — 231
Tema-tema — 232
Negara dan Kekuasaan — 232
Institusi-institusi dan Tatanan Dunia — 240
Identitas dan Komunitas — 243
Kesenjangan dan Keadilan — 248
Konflik dan Kekerasan — 250
Perdamaian dan Keamanan — 250
Kesimpulan — 251
Kritik — 253
Kesalahpahaman Umum — 255
Bacaan Lebih Lanjut — 257

Bab 5. Posmodernisme — 259

Pendahuluan — 259
Asal Usul — 268
Asumsi-asumsi — 289
Tema-tema — 290

Negara dan Kekuasaan — 291
Perdamaian dan Keamanan — 297
Konflik dan Kekerasan — 300
Identitas dan Komunitas — 300
Kesenjangan dan Keadilan — 304
Kesimpulan — 308
Kritik-kritik — 309
Kesalahpahaman Umum — 313
Daftar Pustaka — 316

Bab 6. Feminisme 319

Pendahuluan — 319
Asal Usul — 326
Asumsi-asumsi — 339
Tema-tema — 340
Negara dan Kekuasaan — 340
Identitas dan Komunitas — 347
Lembaga-lembaga dan Tatanan Dunia — 352
Kesenjangan dan Keadilan — 356
Konflik dan Kekerasan — 359
Perdamaian dan Keamanan — 362
Kesimpulan — 366
Kritik — 367
Kesalahpahaman Umum — 369
Daftar Pustaka — 372

Bab 7. *Green Thought* — 375

Pendahuluan — 375
Asal Usul — 384
Asumsi — 395
Tema-tema — 396

Negara dan Kekuasaan — 396
Konflik dan Kekerasan — 401
Lembaga-lembaga dan Tatanan Dunia — 404
Perdamaian dan Keamanan — 412
Kesenjangan dan Keadilan — 416
Identitas dan Komunitas — 420
Kesimpulan — 425
Kritik — 427
Daftar Pustaka — 430

Kesimpulan — 433

Perdebatan Pospositivis dalam HI — 433
Bagaimanakah Karakteristik Dunia? Apa yang Bisa Dikatakan Eksis? — 435
Apa yang Bisa Kita 'Tahu'? — 440
Apakah yang Dimaksud Teori HI? Apa Fungsinya? — 452
Apakah jadi Persoalan Pilihan Perspektif Saya? — 457
Akhir Kata —Apakah Buku Ini Berharga? — 462

Daftar Pustaka — 464
Daftar Istilah-Istilah Kunci atau Sulit — 469
Indeks — 495

Pendahuluan

Cerita tentang asal usul Hubungan Internasional biasanya dimulai dengan penjelasan tentang Perang Besar (1914-1918), sebuah perang yang begitu menyeramkan hingga banyak orang percaya bahwa itulah perang terakhir dari seluruh peperangan. Kehancuran dan penderitaan, kerja fisik dan ekonomi dihabiskan pada peristiwa pembunuhan dan pembantaian sadis terhadap suatu generasi secara keseluruhan, terutama para anak muda, terjadi pada skala yang sulit untuk terbayangkan sebelum 1914. Studi Hubungan Internasional tumbuh dari kepercayaan bahwa perang merupakan masalah paling serius yang dihadapi umat manusia dan sesuatu harus dilakukan untuk menjamin bahwa tidak akan ada lagi 'generasi-generasi yang hilang'.

Optimisme sebelumnya bahwa perang bisa dicegah, ternyata sangatlah singkat. Hanya dalam waktu 20 tahun kemudian, dunia sekali lagi masuk ke dalam kancah peperangan. Di ambang Perang Dunia II, para sarjana Hubungan Internasional terus memusatkan perhatian pada hakikat hubungan internasional atau hubungan antarnegara sebagai upaya mereka untuk memahami penyebab-penyebab perang. Sebagai akibat dari konflik, muncul upaya-upaya baru untuk mengatur perdamaian yang melahirkan Per-

satuan Bangsa-Bangsa tahun 1945. Namun, kerangka berpikir pada saat itu kurang optimis. Tatanan dunia yang ada setelah Perang Dunia II sangat berbeda dibanding masa tahun 1920-an dan 1930-an. Bangsa Jerman hampir seluruhnya hancur oleh perang dan negara-negara berkuasa di Eropa lainnya, seperti Inggris dan Prancis, membutuhkan paket bantuan yang besar untuk membangun kembali infrastruktur perekonomian dan fisik mereka yang hancur. Sebaliknya, Amerika Serikat dan Uni Soviet muncul setelah peperangan tersebut sebagai 'superpower', meskipun Uni Soviet juga mengalami penderitaan seperti halnya negara-negara lain. Pada masa yang ditandai dengan penuhnya kehati-hatian, jika tidak dikatakan sinis, beberapa sarjana memunculkan pandangan bahwa peniadaan perang itu mustahil, sehingga mereka memusatkan perhatian untuk mencari cara terbaik untuk membatasi dan mewadahi konflik. ketika hubungan antara dua raksasa militer semakin memburuk, dalam atmosfer keraguan dan ketidakpercayaan serta kesadaran atas potensi kehancuran yang besar karena pertumbuhan senjata-senjata nuklir, para politikus, para pembuat strategi, dan juga sarjana mengubah perhatian mereka pada kebutuhan mendesak untuk menjaga hal yang dikenal sebagai *'balance of terror'* antara AS dan USSR, guna mencegah Perang Dunia III dan 'kerusakan secara bersama-sama (*Mutually Assured Destruction*).

Contoh Dunia

Bom

Pada 8 Mei 1945, perang di Eropa secara resmi telah berakhir. Pada saat Jerman menyerah, umumnya dipercaya bahwa Sekutu pada akhirnya menang atas Jepang di Pasifik. Sangat sedikit sekali yang tersisa dari kekuatan angkatan laut Jepang dan kekuatan udara Jepang, seolah-olah sudah terlihat berada pada titik kehancuran. Bagaimanapun, Jepang telah terbukti menjadi lawan yang ulet dan hebat, dan hal itu sama sekali tidak menjamin bahwa kemenangan akan segera diraih. Pada jam 8.16 di pagi hari pada 6 Agustus 1945, seorang bomber Amerika yang bernama Enola Gay menjatuhkan bom atom pertama di kota Jepang, Hiroshima. Tiga hari kemudian bom atom kedua menghancurkan Pangkalan Angkatan Laut Nagasaki. Dampak dramatis penggunaan bom atom pada persepsi orang-orang tentang perang digambarkan oleh kutipan berikut. Dalam jangka panjang, pengaruh bom mengubah pemikiran tentang hakikat dan tujuan peperangan, strategi, dan diplomasi, serta membuka perdebatan sengit tentang moralitas maupun kemampuhan senjata-senjata nuklir.

> Kilatan pertama menghasilkan serangkaian malapetaka. Diawali dengan udara panas. Panas ini sebenarnya hanya berlangsung secara instan tetapi begitu hebat hingga melelehkan atap, meleburkan kristal-kristal kuarsa pada bebatuan granit, membakar bagian-bagian yang tidak terlindungi dari tiang-tiang telepon hampir sejauh dua mil dan membakar habis para manusia di sekitarnya, sangat menyeluruh hingga hampir tak sedikit pun yang tersisa kecuali bayangan-bayangan mereka, yang melegam di jalan-jalan aspal dan dinding-dinding batu (Kutipan dari Fletcher Knebel dan Charles Baileys, *No high Ground,* diproduksi di dalam *History of the Twentieth Century*-nya Purnell, London, Purnell Publications, 1968).

Berbagai peristiwa ini melatarbelakangi perkembangan sebuah disiplin akademis. Bagaimanapun, banyak yang telah berubah sejak Perang Dunia II. Uni Soviet pecah, ketegangan etnis dan nasionalis telah melanda kembali berbagai wilayah bumi, sementara Rusia kini berdiri di ambang kejatuhan secara ekonomi dan politik. Banyak negara di benua Eropa yang telah menikmati masa kekayaan ekonomi yang tak terkira sebelumnya, kini menghadapi tantangan-tantangan reunifikasi Pasca-perang Dingin. Amerika Serikat, untuk waktu yang begitu lama telah menikmati posisi yang 'berpengaruh tanpa lawan' dalam urusan-urusan dunia, kini harus menghadapi ancaman Jepang, negara-negara industri baru (terutama di Asia Tenggara), dan mungkin Cina; sepertinya saat ini kita memasuki 'Abad Pasifik'. Afrika telah lepas dari penjajahan formal, tetapi terus disibukkan dengan masalah-masalah kemiskinan dan ketidakstabilan politik. Timur Tengah juga telah bangkit dari masa penjajahan yang panjang; tetapi, pada saat yang sama cadangan-cadangan kekayaan minyak di kawasan tersebut membuatnya menjadi kepentingan strategis yang cukup penting artinya bagi orang di seluruh dunia, yang dapat memicu campur tangan pihak luar dalam urusan-urusan kawasan yang bisa memperburuk ketegangan-ketegangan yang telah ada (yang kian dirumitkan oleh politik kelangkaan air). Beberapa bagian negara di Amerika Latin telah mengalami penderitaan dengan pergantian rezim-rezim militer yang telah merampas sumber daya-sumber daya nasional serta melakukan pelanggaran hak asasi manusia atas nama pembangunan nasional.

HI/hi ?

Meski hal ini (istilah HI/hi) tidak digunakan oleh semua penulis di dalam kajian Hubungan Internasional, buku ini menggunakan suatu sistem yang beralasan untuk diterima dalam membicarakan HI. Ketika kami menggunakan 'hubungan internasional' (atau 'Hubungan internasional' pada permulaan kalimat), maka kami sedang merujuk pada praktik politik, ekonomi dunia, dan sebagainya. Sementara 'HI' bisa digunakan sebagai singkatan bagi keduanya, kami akan menggunakannya ketika kami perlu merujuk pada Hubungan Internasional (dengan huruf kapital) maupun hubungan internasional (dengan huruf non-kapital) secara simultan atau bersamaan. Perbedaan ini, tentu saja, biasanya sangat terasa menurut konteks bacaan, dan jangan sampai frasa-frasa ini terlalu memengaruhi alur bacaan Anda, tetapi kami menyebutkannya agar Anda tidak menjadi bingung oleh pengertian yang kami maksudkan.

Kini, 'kutukan perang' berlanjut menghantui kehidupan banyak orang di dunia. Bagaimanapun, bukan lagi ancaman peperangan yang dipercaya mengancam perdamaian, keamanan, dan stabilitas dunia. Agenda politik dunia telah berubah secara radikal; populasi telah tumbuh dengan sangat cepat, kemiskinan telah meningkat secara dramatis, teknologi telah berkembang begitu cepat dan dengan cara yang tak terbayangkan, hubungan-hubungan ekonomi telah menjadi terglobalkan dalam pengertian bahwa ketika terjadi resesi ekonomi di suatu negara maka depresi tersebut dapat menyebar ke seluruh dunia, 'ambang laut' telah naik sebagai akibat dari pemanasan global, ketika polusi dan penggunaan berbagai sumber daya alam dunia secara cepat dan tanpa pilih-pilih telah menimbulkan ancaman bencana lingkungan hidup yang sudah di depan mata. Pada saat yang sama, istilah hak asasi manusia telah menjadi sebuah wacana global,

yang mengisi kekosongan ideologi yang telah ditinggalkan pada akhir Perang Dingin dan memberikan kekuatan bagi para pekerja, perempuan, orang-orang pribumi, etnis minoritas serta kelompok-kelompok terpinggirkan lainnya akan dengan suatu kosakata baru yang dengannya mereka menyuarakan keberatan-keberatan dan tuntutan-tuntutan mereka.

Kotak Konsep

Tatanan Dunia Baru

Istilah ini digunakan setelah Perang Dunia II oleh Woodrow Wilson dan Lenin, yang keduanya, dengan cara mereka sendiri, menggambarkan kemungkinan sebuah masyarakat dunia universal. Setelah akhir Perang Dingin, Presiden AS, George Bush kembali menggunakan istilah ini, setelah Perang Teluk guna menyatakan sebuah masa depan yang damai dan stabilitas bagi semua melalui aturan hukum internasional, sebuah sistem keamanan bersama dan kemunculan kesepakatan global tentang hak asasi manusia. Namun, bagi kebanyakan orang, mimpi liberalnya Bush tampaknya hanya menjadi mimpi buruk dan pihak lainnya (misalnya, Komisi Selatan) telah menyatakan pengertian yang berbeda mengenai bentuk atau wujud dari tatanan dunia 'baru' ini. Lihat bab 3.

Tidaklah mengherankan, kemudian, jika pada saat ini kita menemukan adanya tantangan-tantangan terhadap suatu pemahaman mengenai dunia yang *melulu state-based* dan didominasi perang. Seperti Hubungan Internasional pada awal abad ini merefleksikan perhatian dan kecenderungan yang sesuai dengan masa itu, bidang disiplin ini juga telah berkembang dan berubah setiap saat sebagai tanggapan atas perubahan definisi terhadap hal-hal yang saat ini dianggap penting dan mendesak bagi umat manusia

saat ini. Apa yang dimaksud dengan hal ini adalah bahwa para mahasiswa yang mempelajari Hubungan Internasional untuk pertama kali, tidak hanya harus berjuang menghadapi masalah yang tampak sangat rumit , tetapi juga harus mengembangkan pemahaman atas hakikat perubahan 'tatanan dunia', berbagai cakupan isu-isu dan perhatian-perhatian yang telah masuk ke dalam agenda urusan-urusan dunia kontemporer saat ini dan mau mendengar bagi 'suara-suara' yang minta didengar. Hubungan Internasional kontemporer melibatkan permasalahan tentang pentingnya lingkungan hidup dan ekonomi, sama pentingnya dengan perang, perdamaian, dan keamanan. Hal ini berarti, kita harus memikirkan tentang kebutuhan-kebutuhan, perhatian-perhatian, dan nilai intrinsik dalam berbagai masyarakat serta budaya, sebagaimana ketika kita mempertanyakan tindakan-tindakan dan motif-motifnya 'para pemain besar' dunia. Hal ini berarti mempertanyakan: apakah kita seharusnya lebih memikirkan proses-proses globalisasi dan global, ketimbang sebuah sistem atau masyarakat negara-bangsa? Hal itu juga menuntut kita menghadapi permasalahan mengenai hakikat dan tujuan pengetahuan dan pemahaman manusia. Singkatnya, perdebatan-perdebatan dalam disiplin modern berkaitan dengan: (1) hal yang menjadi pusat perhatiannya; (2) cara memahami dunia; dan (3) metode-metode apa yang seharusnya kita adopsi dalam studi kita.

Contohnya, haruskah kita berupaya untuk mempelajari dunia 'secara objektif' dan tidak fanatik, mungkin dengan cara yang sama seperti seorang fisikawan mempelajari sebuah atom? Atau, haruskah kita mengakui bahwa nilai-nilai kita akan selalu memengaruhi cara kita memandang dunia dan sehingga kita menggunakan suatu agenda normatif

yang berpusat, mungkin, pada permasalahan kesenjangan, keadilan, dan hak-hak? Pada saat beberapa perusahaan multinasional memegang kekuasaan dan pengaruh yang besar terhadap pemerintah, haruskah kita terus memusatkan perhatian pada negara atau haruskah kita juga memasukkan serangkaian 'aktor non-negara' lainnya dalam bahasan kita? Menghadapi pertanyaan, 'mengapa kita mempelajari hubungan internasional?' mendorong kita merefleksikan ada atau tidaknya harapan kita untuk berperan dalam membawa perubahan-perubahan positif atau, sebaliknya, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain mencapai sebuah pemahaman yang lebih baik tentang masalah-masalah yang sulit yang melanda kondisi manusia.

HI kontemporer mungkin membingungkan bagi para mahasiswa yang mempelajarinya untuk pertama kali. Bidang studi ini benar-benar sulit dan menantang, berasal dari dan bercampur dengan beberapa disiplin serta membahas serangkaian isu dan ide yang, meski mereka memiliki konteks global, sangatlah berbeda dari perhatian-perhatian utama disiplin-disiplin ilmu yang memengaruhinya. Para pelajar HI saat ini dihadapkan dengan bertambah luasnya cakupan pendekatan-pendekatan dibandingkan 10 tahun yang lalu dan disiplin ini hampir-hampir tak terakui dari 20 sampai 30 tahun yang lalu.

Tentang Buku ini

Terdapat begitu banyak pengantar yang berkualitas baik bagi Hubungan Internasional tetapi pengantar ini merupakan salah satu usaha untuk melakukan sesuatu yang tidak dilakukan teks-teks lain: memberikan sebuah pengantar *awal* bagi berbagai perspektif teori yang berhubungan

dengan hubungan internasional. Sebelum kita mulai mempelajari hubungan internasional, kita perlu menanyakan tentang segala sesuatu yang termasuk dalam studi kita. Dengan kata lain, aktor-aktor, isu-isu, dan proses-proses apa yang kita anggap sebagai sesuatu yang penting atau signifikan? Studi hubungan internasional kontemporer bahkan makin menantang dengan kurangnya kesepakatan dalam hal ini. Salah satu definisi sempit tentang subjek studi ini adalah bahwa hubungan internasional berkaitan dengan negara-negara dan cara mereka saling berhubungan. Definisi seperti ini jelas menguntungkan dalam mengenali dan membatasi pokok permasalahan serta perhatian utama disiplin ilmu ini, dengan memusatkan perhatian pada negara sebagai aktor utama dan membatasi studi kita pada mekanisme negara-negara ini menjalankan hubungan mereka dengan 'negara lain', melalui kebijakan luar negeri, diplomasi, dan perang, misalnya.

Bagaimanapun, definisi ini tidak akan memuaskan sebagian besar para sarjana HI saat ini dan nyatanya akan menyingkirkan berbagai isu dan wilayah-wilayah pembahasan yang di dalamnya berbagai pendekatan baru dan agenda-agenda penelitian telah menghasilkan pemahaman yang lebih 'segar'. Sebuah definisi yang sangat luas tentang subjek HI, misalnya, bahwa disiplin Hubungan Internasional berkaitan dengan kondisi manusia dalam skala global. Definisi ini menguntungkan atas sifat inklusifnya. Definisi ini secara persuasif menunjukkan nilai nyata Hubungan Internasional sebagai satu-satunya wilayah ilmu sosial yang mempertimbangkan penduduk dunia sebagai satu kesatuan. Di sisi lain, definisi ini menyuguhkan batasan yang kabur antara disiplin Hubungan Internasional dengan wilayah-

wilayah ilmu-ilmu sosial dan manusia lainnya, seperti politik, sosiologi, ekonomi, sejarah, hukum, dan geografi. Hubungan Internasional selalu cenderung untuk menjadi sesuatu yang inter-(atau sedikitnya multi-) disiplin, mencakup unsur-unsur Geografi, Ekonomi, Sejarah dan Politik secara khusus.

Beberapa sarjana lebih suka mempelajari dunia dengan membaginya secara geografis ke dalam ikatan wilayah yang jelas memiliki batas, seperti negara-bangsa dan kawasan (misalnya Asia Pasifik, Amerika Latin, Eropa Timur) dan tidak membuat pembedaan yang jelas antara Hubungan Internasional dengan Politik Perbandingan. Para sarjana lainnya berpendapat bahwa terdapat kesulitan untuk memberikan pembenaran dalam usaha membuat pembedaan-pembedaan yang tegas antara internasional, regional, dan nasional dan lebih suka untuk mempergunakan istilah-istilah yang 'lebih bebas' seperti politik 'dunia' atau 'global' untuk menjelaskan wilayah studi mereka. Masih terdapat cara-cara lain dalam mendekati subjek studi, yaitu memusatkan perhatian pada isu-isu kunci, seperti kesehatan, air, populasi, produksi nuklir, perdagangan, dan sebagainya. Terdapat juga sejumlah sub-bidang yang cukup jelas cakupannya dalam Hubungan Internasional, seperti Studi Perdamaian, Ekonomi Politik Internasional, Sejarah Diplomasi atau Studi Strategi. Seperti yang bisa Anda lihat, cakupan dari berbagai isu, pusat perhatian, dan orientasi penelitian yang bisa dimasukkan ke dalam cakupan studi ini berpotensi sangat luas tentunya.

Selanjutnya, kita juga perlu mempertanyakan cara kita akan memahami sebuah dunia yang kompleks dan, tentu saja, alasan atau hal yang melatarbelakangi kesediaan kita

terlibat dalam kegiatan ini. Dengan kata lain, kita perlu mempertanyakan perhatian dan motivasi khusus apa yang mendasari dan membentuk kegiatan kita? Sekali kita mulai untuk dapat memutuskan antara hal yang kita pikir sesuatu yang penting atau tidak penting, signifikan atau tidak, mengandaikan bahwa kita dituntut untuk mempertanyakan lebih jauh tentang dasar yang kita pakai ketika membuat anggapan-anggapan tersebut. Misalnya, seruan beberapa kaum feminis untuk melakukan penelitian tentang status politik, ekonomi, dan sosial perempuan di seluruh dunia, mungkin akan ditolak oleh beberapa kantung feminis karena dianggap sebagai sikap ketundukan. Para kaum feminis, sebaliknya, menunjukkan bahwa jumlah perempuan meliputi lebih dari 50% populasi dunia dan bahwa marginalisasi terhadap perempuan dan kehidupan mereka merupakan akibat dari ketidakpedulian dan, mungkin, sikap mementingkan diri sendiri dari orang yang berkuasa, yang sebagian besar adalah laki-laki. Begitu juga, pemanasan global mungkin dianggap sebagai sebuah 'isu' dalam hubungan internasional yang secara perlahan masuk ke dalam agenda politik internasional, meski isu tersebut hanya akan sejauh-jauhnya menjadi prioritas kedua para 'pemain' besar dunia, seperti AS atau Jepang. Bagaimanapun, pemanasan global mungkin akan dilihat sebagai masalah yang serius bagi orang-orang yang tinggal di negara-negara kecil Kepulauan Pasifik, yang sedang menghadapi ancaman naiknya ambang-laut. Pada kasus ini, pemanasan global mungkin dipandang sebagai fokus keamanan yang vital.

Kotak Refleksi

Di Planet Apa Anda tinggal sekarang!

Ketika kita bepergian, kita menemui beragam budaya, kebiasaan dan ritual yang seolah-olah terasa sangat asing, bahkan tak logis, ketika dilihat dari 'sisi luar'. Kita bahkan sering makin tak mampu memahami atau menjelaskan cerita-cerita tentang peradaban kuno yang mengorbankan bayi untuk menenangkan kemarahan Tuhan-tuhan atau mencegah gempa bumi. Kita tinggal di planet yang sama tetapi sepanjang sejarah dan di berbagai tempat di bumi, orang-orang hidup dalam berbagai jenis kehidupan yang berbeda-beda dan, oleh karenanya, cara-cara mereka dalam membuat pengertian tentang dunia mereka sangatlah berbeda. Pengalaman-pengalaman kita, model-model pemikiran, dan bahasa yang kita gunakan untuk mengungkapkan ide-ide kita, tidak akan banyak membantu dalam suatu lingkungan tertentu. Kebiasaan budaya tertentu ditanamkan dengan pengertian dan makna simbolis yang tidak akan dapat ditembus oleh pihak luar. Tidak ada kerangka referensi bersama, sehingga pemahaman bersama sangatlah sulit terjadi atau, bahkan, tidak mungkin.

Pemikiran tentang 'banyak dunia' ini tidak hanya diterapkan pada berbagai ragam cara kehidupan yang ada di seluruh bumi. Pemahaman bahwa seseorang berangkat dari pengalaman-pengalaman dan mitos-mitos tertentu guna memberikan arti pada tindakan-tindakan mereka tidak hanya diterapkan di negara-negara dan budaya-budaya yang berbeda-beda. Bahkan, logat sehari-hari bisa mendukung ide tentang 'banyak dunia'. Seseorang sering kali mengungkapkan ketidakpercayaan, atau bahkan permusuhan terhadap mereka yang mempunyai pandangan atau pendapat yang sangat berbeda terhadap suatu hal, terutama pada subjek atau isu-isu yang mereka merasa sangat yakin dengannya. Kita semua, mungkin telah mengalami frustrasi, atau bahkan marah karena kita merasa bahwa kita tidak didengarkan, atau pemahaman kita benar-benar tidak dipahami atau terwakili. Beberapa kaum feminis percaya bahwa perempuan mempunyai berbagai cara yang

sangat berbeda dalam memandang dunia dan membuat pengertian tentang berbagai proses atau peristiwa tertentu yang berasal dari pengalaman-pengalaman hidup yang sangat berbeda-beda. Karl Marx terkenal karena menggunakan istilah ideologi untuk menjelaskan sistem-sistem kepercayaan dan pandangan-pandangan dunia dari kelas-kelas sosial yang berbeda. Para pemikir pos-strukturalis (lihat bab 5) berpendapat bahwa kita tidak bisa sepenuhnya menangkap inti atau kebenaran tentang dunia; hal ini disebabkan karena kita menggunakan bahasa untuk menanamkan arti tindakan-tindakan kita dan untuk mengomunikasikannya dengan yang lain; tetapi bahasa itu tidak tetap; pengertian tentang kata-kata atau istilah-istilah —arti-arti dan simbol-simbol tidak pernah tetap, tetapi selalu berubah.

Pemahaman bahwa terdapat 'banyak dunia' menimbulkan pertanyaan tentang cara dalam mengevaluasi atau menggolongkan perspektif-perspektif atau pandangan-pandangan yang berbeda-beda tersebut. Dengan kata lain, bisakah kita memisahkan 'fakta' dari 'nilai' atau 'kebenaran' dari 'ideologi', atau bisakah kita membuat penilaian tentang 'kebenaran' atau 'kesalahan' sistem-sistem kepercayaan yang berbeda-beda? Apakah pandangan-pandangan dunia itu tidak dapat didamaikan atau tidak dapat diperbandingkan? Ia (baca: pengertian 'banyak dunia') juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tentang proses hubungan kekuasaan dipengaruhi oleh 'klaim pengetahuan'. Dengan kata lain, kita perlu mempertimbangkan apakah penjelasan atau cerita tertentu tentang dunia itu diterima karena mereka secara intrinsik lebih baik —seolah-olah memiliki kemasan yang lebih baik tentang 'realitas'— atau karena mereka secara internal konsisten, logis, dan sebagainya, atau apakah kesediaan kita untuk menerima salah satu penafsiran peristiwa-peristiwa (daripada yang lainnya) itu dipengaruhi oleh status dan kekuasaan dari 'mereka yang tahu' (*knower*)?

Tidak sepenuhnya mengherankan jika kemudian ditemukan bahwa Hubungan Internasional telah tumbuh menjadi suatu disiplin yang sangat luas dengan beragam pendekatan yang berbeda satu sama lain, yang masing-

masing memusatkan perhatian pada aspek-aspek tertentu tentang dunia, memunculkan isu-isu tertentu, dan didorong oleh perhatian-perhatian tertentu. Hal ini, tentu saja, berarti bahwa di samping luasnya hakikat cakupan subjek kajian, para mahasiswa juga harus menghadapi luas dan beragamnya cakupan perspektif-perspektif teori yang telah lama berhubungan dengan kajian Hubungan Internasional. Perspektif-perspektif dalam buku ini mewakili apa yang mungkin dianggap menjadi perspektif yang telah mapan dalam Hubungan Internasional dan juga, apa yang telah kita kenal sebagai sesuatu yang relatif baru tetapi 'awal mula' yang bernilai di lapangan studi ini. Kami, penulis, hanya terlalu menyadari tentang hakikat subjek studi yang benar-benar menantang dan telah mencoba menghasilkan sebuah buku yang secara berhati-hati mencoba bersifat komprehensif, di satu sisi, dan mudah dipahami, di sisi lain.

Tujuan utama buku ini adalah memberikan pengantar bagi sejumlah perspektif teori. Sebuah teori adalah suatu usaha untuk menjelaskan sesuatu —suatu peristiwa atau kegiatan. Contohnya, suatu teori mungkin mencoba menjelaskan penyebab terjadinya perang dan alasan atau kondisi-kondisi tertentu yang membuat negara-negara terlibat dalam strategi-strategi kerja sama perdagangan. Sebuah teori dengan demikian merupakan seperangkat ide, yang masuk akal, yang konsisten di dalamnya, dan mengaku mempunyai beberapa perbendaharaan mengenai hakikat dunia dan cara kerjanya. Sebuah perspektif merupakan suatu representasi dari realitas tertentu. Sebuah perspektif teori, dengan demikian, merupakan suatu upaya untuk membangun sebuah penjelasan yang masuk akal terhadap suatu fenomena tertentu, yang pada gilirannya menyandarkan diri pada suatu

sistem kepercayaan yang lebih luas, atau pada anggapan-anggapan dasar tertentu, tentang hakikat dunia. Bukanlah suatu keanehan bila kita menemukan mahasiswa agak skeptis terhadap nilai suatu teori, serta memercayai bahwa banyak di antara yang kita amati di dalam dunia merupakan 'pandangan umum' atau bahwa kita seharusnya lebih berkonsentrasi terhadap fakta-fakta. Apa pun perasaan mereka, para mahasiswa Hubungan Internasional kian diharapkan menghubungkan karya mereka dengan teori guna mencapai tahapan yang paling tinggi. Hal ini memberikan sebuah pembenaran untuk menghasilkan sebuah buku dari jenis seperti ini dan suatu motif untuk membelinya! Di samping motif-motif pragmatis seperti itu, hal yang cukup penting adalah alasan yang melatarbelakangi Anda untuk harus memikirkan teori-teori tersebut. Pada dasarnya, Anda tidak bisa menganggap bahwa 'fakta-fakta' berbicara bagi diri mereka sendiri dengan beberapa cara tertentu dan, sebagaimana disebut 'pandangan umum', hal ini sering kali bisa menjadi 'tirai-asap' yang digunakan untuk menyamarkan sebuah titik pandang yang parsial atau tertentu yang menarik.

Kotak Analogi

Aku ingin memercayaimu, tetapi...

Teori juga mempunyai arti karena ia memengaruhi tindakan atau 'kebiasaan'. Cara kita memahami dan menafsirkan dunia mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting. Hubungan antara teori dan praktik sangatlah kompleks dan akan dibahas secara lebih mendalam pada bab-bab berikutnya. Tapi pada tahap ini, contoh yang diambil dalam kehidupan sehari-hari mungkin bisa membantu. Bayangkan jika, berdasarkan pengalaman saya sebelumnya tentang sebuah hubungan, saya khawatir kalau saya

membina suatu hubungan dengan seseorang, maka dia akan tidak setia. Saya memang menjalin suatu hubungan. Bagaimanapun juga ketidaknyamanan yang berasal dari pengalaman masa lalu membuat saya bersikap sangat cemburuan. Hasilnya, hubungan itu pun berakhir.

Di sini hubungan antara 'teori saya' tentang sikap manusia dengan praktik saya (tindakan) sangat erat dan mempunyai konsekuensi-konsekuensi tertentu. Dihadapkan pada suatu permasalahan (kebutuhan untuk bertindak dalam konteks ketidakpastian), saya mengambil pengalaman-pengalaman masa lalu guna memahami hakikat dari masalah tersebut dan bagaimana harus bertindak. Teori saya membuat saya mengonstruksikan akar 'permasalahan' tersebut sebagai masalah ketidaksetiaan manusia. Tentu saja, saya tidak yakin benar apakah teori saya itu benar. Saya perlu mempertimbangkan kemungkinan bahwa rangkaian kejadian menyerupai semacam ramalan yang *self-fulfilling* (terjadi karena kita ucapkan dan perkirakan atau harapkan —Peny.) atau firasat. Andai teori saya menuntun saya untuk percaya bahwa seseorang bisa dipercaya dan memberikan respons baik untuk percaya, saya mungkin telah membangun akar 'permasalahannya' lebih sebagai satu ketidakamanan, daripada ketidaksetiaan. Dalam lingkungan seperti itu, tindakan saya akan berbeda dan hasilnya mungkin sangat berbeda sehingga hubungan saya pun berhasil.

Pada awalnya, ketidaknyamanan, kecemburuan, dan malapetaka yang sering kali menghiasi hubungan-hubungan antarpersonal mungkin terlihat sama sekali tidak berhubungan dengan hubungan internasional. Hubungan internasional merupakan suatu wilayah yang sering dihadirkan sebagai sesuatu yang mempunyai karakteristik kekerasan pikir atau sifat realistis, rasionalitas, dan perhitungan yang cermat berbagai kepentingan. Kita juga akan berharap bahwa para pembuat teori itu tidak sepenuhnya bergantung pada pengalaman personal saat sedang mencoba untuk mengenali hakikat 'masalah-masalah' dan memikirkan tanggapan yang harus diberikan. Jika hal tersebut dapat dilakukan, maka suatu analogi yang berguna dapat dihadirkan di sini. Beberapa teori tentang tingkah-laku antarnegara berasal dari kepercayaan-kepercayaan yang sangat

mendalam tentang hakikat manusia. Lebih jauh, kebutuhan untuk membuat keputusan dan bertindak dalam konteks ketidakpastian, rendahnya tingkat kepercayaan, dianggap menjadi sebuah dilema yang tetap bagi negara-negara serta merupakan sebuah tema yang sedang terjadi dalam literatur Hubungan Internasional. Bayangkan jika kita dipercaya untuk menjamin bahwa negara kita aman dari serangan. Kita berada di dalam posisi memiliki senjata-senjata pemusnah massal. Namun, hal ini tidak berarti dengan sendirinya menjamin keamanan kita, karena negara-negara lain pun mungkin mempunyai kapasitas militer yang sama. Kita tidak tahu pasti apakah negara-negara ini menjadi ancaman yang nyata bagi kita, tetapi kita tidak bisa yakin kalau mereka juga akan bersikap baik-baik saja. Dalam lingkungan seperti itu, sebuah teori tentang proses-proses dan kekuatan-kekuatan besar yang mendorong tingkah laku kita dan tingkah laku dari (yang berpotensi menjadi) pihak yang mungkin menjadi musuh kita nanti benar-benar hal yang penting dan, lebih penting lagi, vital untuk memastikannya.

Seandainya kita percaya bahwa negara-negara sangatlah mungkin bersikap agresif, maka kepercayaan yang semacam itu adalah 'hakikat manusia'. Dalam situasi yang seperti itu, kita mungkin akan merekomendasikan sebuah strategi bertahan (*defence strategy*) yang selalu memungkinkan negara kita untuk bernegosiasi dari posisi yang kuat. Masalahnya, tentu saja, tindakan kita kemudian bisa ditafsirkan sebagai suatu bentuk serangan oleh 'lawan-lawan' kita. Dalam lingkungan seperti itu, hubungan sangat cepat mengarah ke dalam bentuk ketakutan, kehilangan kepercayaan, dan sikap agresif. Di sisi lain, jika teori kita lebih mengatakan pada kita bahwa 'masalah' sebenarnya adalah rasa tidak aman dan kehilangan kepercayaan, daripada maksud agresif yang sebenarnya, maka tindakan kita akan sangat berbeda. Daripada terlibat dalam perlombaan senjata, kita mungkin membuka hubungan diplomatik, menegosiasikan kesepakatan pembatasan senjata menyarankan berbagai prosedur verifikasi atau langkah-langkah membangun kepercayaan yang akan membantu menguatkan tingkat kepercayaan dalam hubungan negara-negara tersebut.

Kita tidak akan menghabiskan waktu untuk membahas hubungan antara teori dan praktik di sini, cukup dikatakan bahwa mengetahui bahwa teori-teori mungkin tidak akan terlalu menjelaskan sebuah dunia 'di luar sana' yang tidak bermasalah sebagai bangunan 'realitas' dengan cara-cara tertentu. Hal ini mempunyai konsekuensi-konsekuensi tentang pengenalan 'masalah-masalah' dan penafsiran peristiwa dan hal ini, pada gilirannya, mempunyai konsekuensi yang penting mengenai cara kita bertindak. Perspektif-perspektif teori itu dengan sendirinya bersifat selektif. Mereka tidak bisa memasukkan semua hal dalam cakupan mereka, dan tidak juga mereka dapat menjelaskan segalanya. Perspektif-perspektif teori biasanya hanya memberikan gambaran atau representasi tentang dunia yang sepotong-potong. Lebih lanjut, terdapat kemungkinan aksi dan reaksi yang dihasilkan akan ditafsirkan secara selektif untuk memberikan 'bukti' dalam rangka mendukung keberadaan teori kita. Dengan demikian, memiliki suatu pemahaman dasar teori-teori dan konsekuensi praktis ketika mengadopsi perspektif-perspektif tertentu merupakan hal yang lebih penting dari banyak lain hal pada permulaan studi.

Buku ini memakai pendekatan yang secara teoretis lebih terfokus daripada beberapa pendekatan yang bersifat pengantar. Buku ini disusun untuk membantu para mahasiswa menghadapi kerumitan teoretis dari sebuah disiplin yang terus mengalami perubahan dengan sangat cepat yang akan mereka selami. Hal ini tidak berarti bahwa para mahasiswa akan mampu menggunakan buku ini tanpa mengembangkan pengetahuan umum di sekitar urusan internasional dan tanpa suatu ketertarikan terhadap perkembangan sejarah dari praktik politik dunia. Oleh karenanya, buku ini disusun sebagai suatu pengantar pertama bagi subjek studi ini, yang ditujukan bagi para mahasiswa tingkat pertama tetapi juga berguna sebagai suatu referensi/sumber penjelasan bagi semua pelajar. Jika dalam beberapa hal,

kami bertujuan untuk mendorong suatu tingkat pembelajaran yang independen, maka buku ini juga disusun untuk digunakan secara bersamaan dengan sebuah program studi. Kami berharap, pada akhirnya, buku ini akan membuat Anda tidak asing lagi dengan istilah-istilah yang mungkin muncul sebagai bagian dari program studi tersebut. Dalam rangka membantu Anda lebih jauh lagi, kami telah memasukkan sebuah 'Daftar istilah-istilah Kunci atau Sulit' pada akhir buku.

Beberapa Perspektif dan Tema

Guna membuat sebuah pengantar komprehensif dan untuk membantu dalam proses pemahaman, bahasan tentang perspektif-perspektif teori disusun secara terbatas seputar tema-tema kunci. Dalam menyusun sebuah buku yang diharapkan menjadi suatu pengantar awal, kami juga mengakui bahwa kegiatan pembuatan teori merupakan suatu proses yang kompleks dan bahwa teori-teori yang dihasilkannya sering kali cukup rumit. Perspektif-perspektif teori yang akan Anda temukan dalam buku ini akan sering menggunakan perbendaharaan kata yang asing, atau mengandung ilmu pengetahuan yang lebih daripada dibutuhkan para pemula. Beberapa teks buku pengantar juga mungkin membingungkan para pembaca dalam rangka menceritakan sebuah kisah tentang Hubungan Internasional yang mencakup semua catatan dan nuansa.

Mungkin sebuah analogi yang cocok bagi upaya-upaya kami di sini adalah bahwa buku ini serupa dengan sebuah buku belajar bahasa. Jika Anda pernah mencoba mempelajari suatu bahasa hanya dari sebuah buku, atau bahkan kaset-kaset, Anda akan menyadari bahwa pembelajaran yang

sesungguhnya bermula sejak pertama kali Anda mencoba mempraktikkan pengetahuan Anda. Bagaimanapun, tahap awal buku-pelajaran bahasa sangat berguna karena tahap tersebut mengarahkan seseorang untuk mulai memahami dan mulai berbicara. Perbincangan-perbincangan yang aktual kemudian akan memperkenalkan kosakata baru, yang sering dipelajari secara kontekstual, dan seseorang bisa juga belajar dari kesalahan-kesalahan yang dibuatnya. Teori-teori Hubungan Internasional mempunyai bahasa mereka sendiri, suatu kosakata khusus dan seperangkat konsep-konsep, yang digunakan untuk membangun pengetahuan tentang dunia. Teori-teori ini konon bisa dikatakan menjadi bagian yang sulit dari bahasa Hubungan Internasional dan buku ini disusun untuk memudahkan Anda berbicara dalam bahasa ini.

Seperti halnya sebuah bahasa (meski perbandingan ini tidaklah tepat) komunikasi adalah kuncinya. Jika Anda salah mengerti memahami 'Je voudrais *une* café' (daripada *un* café), maka hal ini tidak akan menghalangi komunikasi; pada saatnya nanti Anda akan memperbaiki kesalahan Anda. Sejalan dengan itu, kami tidak menganggapnya sebagai kelemahan serius, tetapi lebih sebagai sebuah kekuatan, karena kami mencoba untuk untuk menyederhanakan Hubungan Internasional sehingga Anda bisa mulai mendiskusikannya. Dengan diskusi, kesalahpahaman akan tampak, ide-ide akan berkembang dan bacaan lebih lanjut kemudian akan mampu dipahami dan, pada gilirannya, memberikan kontribusi pada diskusi-diskusi Anda. Buku ini memperkenalkan perbendaharaan kosakata yang terbatas dan menjelaskan seperangkat ide yang juga terbatas, yang disusun seputar tema-tema tertentu. Kami sedang mencoba untuk mengungkap-

kan beberapa hal tentang perbedaan dan cakupan Hubungan Internasional, dengan menawarkan pada Anda bab-bab pengantar dalam sejumlah perspektif kunci, meski dicirikan dengan suatu tingkatan penyederhanaan. Buku ini tidak mengaku memiliki seluruh kekayaan pemahaman atas subjekyang dibahasnya. Hal ini karena seperti jika terdapat terlalu banyak kosakata, maka terus-menerus merujuk pada kamus, mungkin akan mengecilkan hati para mahasiswa bahasa, kami sedang berusaha menjelaskan Hubungan Internasional —yang mempunyai bahasanya sendiri— dalam sebuah cara yang akan lebih mudah untuk dimengerti dan mendorong langkah awal para mahasiswa. Ketika sebuah kosakata khusus diperkenalkan, maka konsepsi yang dikandung dalam kata tersebut akan benar-benar dijelaskan.

Objek utama kedua buku ini adalah untuk memperlengkapi Anda dengan pengetahuan dan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan bagi pembelajaran lebih lanjut. Saat Anda mencapai akhir dari teks buku ini, kami berharap Anda tidak hanya akan mempunyai suatu pemahaman tentang kekayaan, kompleksitas dan, tentunya, segala kesulitan dalam studi Hubungan Internasional, tetapi Anda juga akan merasa bahwa Anda telah cukup mempelajari bahasa-bahasa dan mencapai pemahaman yang cukup tentang asumsi-asumsi dasar dan panduan ide-ide dari setiap pendekatan populer untuk segera kemudian berurusan dengan studi yang lebih mendalam dengan kepercayaan diri yang lebih menyala-nyala. Dalam bagian kesimpulan pada tiap bab, kami kembali kepada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hakikat dan tujuan dari teori, tetapi pada bagian ini, kami mengarahkan pertanyaan-pertanyaan ini dengan lebih terperinci.

Pada contoh pertama, kami akan menyarankan Anda untuk membaca bab-bab dalam buku ini secara berurutan. Berbagai kotak telah disusun berdasar pada anggapan bahwa Anda akan, misalnya, memperkenalkan kepada diri Anda sendiri pada dasar-dasar realisme, sebelum kemudian berkenalan dengan dasar-dasar pemahaman liberalisme. Akan tetapi, kami juga berharap bahwa setelah membaca teks ini sekali, Anda kemudian akan mampu untuk menyelaminya dari waktu ke waktu, seperti Anda memiliki sebuah buku bahasa, untuk mengingatkan diri Anda sendiri tentang pembahasan-pembahasan kunci atau untuk menjamin bahwa Anda sedang menggunakan sebuah istilah dalam konteks yang tepat.

Bahkan, ketika kita masih mempelajari teori-teori HI tingkat dasar dan mencoba untuk terlibat dalam pertukaran-pertukaran yang berarti dengan yang lainnya mengenai subjek, maka kita akan menggunakan wacana-wacana tentang dunia yang mempunyai suatu bahasa tersendiri, yang mempunyai suatu sejarah, yang merujuk tradisi-tradisi intelektual tertentu dan yang telah dikonstruksikan dalam konteks kepentingan-kepentingan serta perhatian-perhatian tertentu. Pada tahap ini, sasaran-sasaran kami adalah: untuk mengenalkan dan menjelaskan istilah-istilah yang berhubungan dengan teori-teori; merunut asal usul intelektual teori-teori tersebut; menguraikan asumsi-asumsi dasar dari tiap-tiap teori dengan suatu cara yang mudah dipahami; menunjukkan bahwa perbedaan asumsi-asumsi ini dapat membawa kita pada pandangan yang berbeda-beda atas konsep-konsep kunci dan tema-tema dari disiplin ini; dan membuat sketsa beberapa cara untuk mengkritisi teori-teori tersebut (meski Anda tidak seharusnya menarik kesimpulan bahwa

para pengarang *benar-benar* setuju dengan semua kritik yang ditawarkan).

Asal Usul

Setiap bab berikut sebenarnya mempunyai struktur yang sama. Untuk kejelasan dan penyederhanaan, maka di hampir semua pembahasan, kami membahas realisme atau teori kritis misalnya, seolah-olah tidak ada ketidaksepakatan tentang hakikat mereka. Pembenaran kami dalam menggunakan pendekatan ini adalah ketidakinginan kami membuat seorang pun merasa frustrasi atau rumit dalam perkenalan mereka dengan berbagai pendekatan dalam studi HI. Sehingga, sebagai contoh misalnya, kami sering kali membahas liberalisme seolah-olah hanya ada satu versi, sementara pada kenyataannya ada banyak aliran yang berbeda-beda. Anda harus sadar bahwa tidak semua teks yang akan Anda temui bisa secara pas dimasukkan dalam kategori atau dilabeli, misalnya, 'Marxis' atau 'posmodern'. Demikian pula, dalam literaturnya, setiap perspektif mungkin ditunjukkan sejumlah nama yang berbeda. Jika terasa sesuai, dalam bab-bab bersangkutan, kami akan mengarahkan perhatian Anda pada nama-nama dan penggunaan istilah-istilah yang berbeda-beda. Bagaimanapun, sementara secara mendasar bertujuan menyederhanakan teori-teori, kami juga mencoba untuk menyiapkan Anda pada sedikitnya beberapa nuansa dari setiap mazhab pemikiran. Hal ini dapat dicapai dengan me-*review* sekilas asal usul pendekatan teori tertentu. Hal ini juga akan mengarahkan Anda untuk menilai lebih luas 'beberapa aliran' pemikiran feminis, atau '*green thought*' dan cara mereka membuka masalah-masalah dan wilayah per-

hatian dalam cakupan studi Hubungan Internasional yang lebih luas lagi.

Asumsi-asumsi

Semua tindakan manusia didasarkan pada kepercayaan tertentu tentang hakikat dunia dan tujuan kehidupan. Seperti kata-kata yang terkenal dari seorang Marxis Italia, Antonio Gramsci bahwa semua orang itu seorang 'teoretisi'. Dalam wacana kehidupan kita sehari-hari, kita berusaha untuk memberi artian pada tindakan-tindakan kita dengan mencerminkan motif-motif tertentu yang kami miliki dalam menjalankan suatu tindakan dan tujuan yang ingin kami capai. Kami juga, tanpa ragu, akan menaksir berbagai kesulitan dalam mewujudkan sasaran kami. Bagaimanapun, sebagian besar refleksi kami tidak akan melebar pada asumsi-asumsi dasar yang sedang kami buat tentang hakikat dunia dan tujuan dari pengetahuan manusia, dan menyerahkan 'pertanyaan-pertanyaan lebih besar' pada para filsuf dan para pemikir besar dunia.

Sebaliknya, para teoretisi mencurahkan banyak sekali waktu dan kemampuan intelektual mereka dalam merenungkan pertanyaan-pertanyaan yang sama ini. Setiap perspektif terdiri dari sejumlah asumsi tentang hakikat permasalahan dunia dan, berhubungan dengan hal itu, cara-cara mengatasi berbagai permasalahan tersebut.

Kaum realis, liberal, dan Marxis, contohnya, telah mengembangkan pendekatan-pendekatan mereka yang berbeda-beda demi mempelajari Hubungan Internasional. Mereka memetakan lapangan pembelajaran ini secara konseptual, mengenali pihak-pihak yang diperkirakan menjadi aktor-aktor utama dan isu-isu besar dalam hubungan

internasional. Meski akan ada beberapa perbedaan dalam cara penerapan ide-ide dasar tertentu pada HI dalam tiap perspektif, semua liberalis atau realis, misalnya, memiliki asumsi-asumsi dasar tertentu yang sama. Asumsi-asumsi ini merepresentasikan titik permulaan kaum liberalis atau realis dalam menjelaskan dunia. Dalam setiap bab kami menyoroti beberapa asumsi dasar yang menyokong perspektif-perspektif dalam Hubungan Internasional. Untuk membantu Anda, kami berusaha agar pembahasan pada tahap pertama mengenai asumsi-asumsi ini tetap sederhana. Kami membagi asumsi-asumsi kami dalam sejumlah kategori:

1. Mungkin, asumsi paling dasar dari setiap perspektif berhubungan dengan hal-hal tertentu yang menyusun hakikat manusia. Dengan kata lain, apakah hakikat manusia itu tidak berubah (tetap)? Atau apakah kepercayaan-kepercayaan dan tindakan-tindakan menjadi beragam menurut konteks sosial dan budaya yang lebih luas dan sepanjang waktu? Contohnya, perspektif kritis berpendapat bahwa hal yang sering kita anggap sebagai karakteristik hakikat manusia yang tidak terbantahkan pada kenyataannya menjelaskan tingkah laku manusia pada sebuah periode sejarah tertentu. Jadi, setelah mendapat pengalaman di zaman ini kita mungkin percaya bahwa manusia itu fitrahnya 'materialistis' dan rakus. Bagaimanapun, para pemikir kritis berpendapat bahwa manusia dikondisikan untuk bertindak dalam suatu perilaku yang mementingkan diri sendiri dan punya kecenderungan mengumpulkan harta kekayaan lebih dari yang mereka butuhkan karena kapitalisme merupakan suatu sistem sosial yang bersifat memecah-belah yang menghasilkan konflik,

persaingan, dan ketidakamanan. Dari pemahaman semacam ini, maka dapat diasumsikan bahwa hakikat manusia tidaklah tetap, tetapi berubah-ubah sesuai dengan kondisi-kondisi sosial dan politik suatu periode tertentu.

2. Kami juga menyoroti asumsi dasar bahwa tiap perspektif memformulasikan 'aktor-aktor' dan 'proses-proses' utama. Contohnya, para kaum realis berpendapat bahwa proses utama dalam hubungan internasional adalah penggunaan kekuasaan. Negara-negara menggunakan segala kekuasaan yang mereka miliki untuk meningkatkan atau melindungi kepentingan nasional. Sehingga, menurut pemikiran kaum realis, negara merupakan *aktor kunci* dan kekuasaan merupakan *proses utama,* sedangkan 'kepentingan nasional' adalah sebuah *konsep kunci*. Perspektif liberal menyoroti banyak aktor, mencakup negara-negara, NGO-NGO (Non-governmental Organisations), dan perusahaan-perusahaan multinasional (MNCs), dan menekankan hakikat kerja sama hubungan internasional yang sangat penting dalam sebuah dunia yang makin saling tergantung.
3. Kami juga mungkin bertanya: dari suatu perspektif tertentu, adakah pemisahan yang jelas antara ruang 'domestik' dan 'internasional'? Sehingga, contohnya, kaum realis memandang negara sebagai komunitas yang secara wilayah dan nasional 'dibatasi' dengan batas-batas yang jelas. Urusan domestik (dalam negeri) jelas terpisah dari urusan internasional (luar negeri). Di sisi lain, kelompok *Greens* (kelompok pemikir yang berkecenderungan ekologis —Peny.) berpendapat bahwa perhatian yang berpusat pada batas-batas politik

dan kewilayahan yang artifisial yang ada di dunia (meski tidak dapat dilihat dari ruang angkasa!), pada dasarnya mengurangi pentingnya hakikat saling keterhubungan dan saling ketergantungan semua (eko)-sistem kehidupan dalam planet.

4. Berbagai perspektif juga memahami hakikat dan tujuan pengetahuan manusia yang berbeda-beda, sehingga kita mungkin bertanya: apakah perspektif ini mengaku 'bebas nilai' atau netral? Atau apakah ia mengaku menjelaskan tingkah laku/tindakan dari semua orang di setiap masa? (dengan kata lain, apakah pengakuan yang perspektif buat itu merupakan pengakuan yang bersifat universal?)
5. Kami mungkin juga mengalihkan perhatian pada implikasi-implikasi yang dirujukkan perspektif (menurutnya, apa yang harus dilakukan?). Jadi, sekali lagi, kaum realis cenderung mempunyai sebuah pandangan yang sangat pesimistik terhadap kemungkinan-kemungkinan dalam menciptakan sebuah dunia yang lebih baik, dan memandang 'teori' sebagai sesuatu yang pada intinya memberikan panduan bagi para *negarawan*, pemimpin-pemimpin militer, atau para diplomat tentang tindakan-tindakan yang harus diambil dalam sebuah dunia yang tidak aman. Petunjuk mereka —jika mereka punya— adalah berupa 'peringatan'. Kaum Liberalis, Feminis, dan para pemikir Kritis, di sisi lain, berpendapat bahwa dengan meraih suatu pemahaman yang lebih baik tentang kondisi manusia, kita diberi kekuasaan untuk mengubahnya dan sering kali menyarankan hal yang harus dilakukan untuk mengubah kondisi tersebut.

6. Berkaitan dengan nomor 5, kami adakalanya juga akan menyinggung cara setiap perspektif memandang hubungan-hubungan antara batasan-batasan dalam tingkah laku dan kemungkinan perubahan-perubahan. Kami juga akan menanyakan, bagaimana perspektif ini memandang hubungan antara batasan-batasan dalam tindakan manusia (struktur) dan kemungkinan-kemungkinan bagi orang-orang untuk memengaruhi (menghasilkan) perubahan-perubahan dalam 'tatanan' yang ada dan cara mereka menghidupi kehidupan mereka (agensi)? Implikasi-implikasi yang dirujukkan (sebagai akibatnya, rekomendasi-rekomendasi) dari sebuah 'teori' mungkin bisa revolusioner. Dengan kata lain, kita mungkin dituntut untuk menyimpulkan bahwa satu-satunya solusi dari masalah-masalah yang menyibukkan umat manusia adalah perubahan mendasar dalam berbagai masyarakat —termasuk masyarakat bernegara— diatur, dan suatu perubahan radikal dalam cara orang bertindak. Pada saat yang sama, kita mungkin dituntut untuk mengakui bahwa tindakan kita dibatasi oleh keberadaan dari lembaga-lembaga dan kebiasaan nyata yang mendukung tatanan yang ada. Hal ini mungkin membawa kita untuk menyimpulkan bahwa meski perubahan itu mungkin dan layak diperjuangkan, dalam suatu periode sejarah tertentu akan ada batas-batas tertentu tentang sesuatu yang mungkin kita raih.

Asumsi-asumsi ini benar-benar menjadi kunci dalam memahami berbagai jenis atau aliran-aliran teori yang ada dalam cakupan kajian Hubungan Internasional yang sangat

luas. Kami tidak akan mencoba menyelidiki segala permasalahan menyangkut 'objektivitas' atau 'subjektivitas' atau 'universalisme' atau 'partikularisme' pada tahap ini. Hal ini merupakan bahasa teori yang sulit dan tidak bisa ditangani hingga Anda telah menguasai kosakata dasar. Hal yang jauh lebih tepat adalah meninjau kembali isu-isu ini dalam bab kesimpulan. Jadi, kami akan membatasi diri sendiri untuk lebih menyoroti persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan di antara perspektif-perspektif seiring pengerjaan teks ini dan akan sering kali meminta Anda untuk merefleksikan proses berbagai macam kepentingan dan perhatian tertentu dapat membentuk tiap aliran pemikiran. Pada saat yang sama, kami berharap bahwa Anda akan senantiasa mampu melangkah 'keluar' dari debat-debat tertentu ini dan melakukan refleksi atas berbagai isu dan perhatian yang *diabaikan* oleh, katakanlah, realisme, liberalisme, atau strukturalisme. Dengan cara ini Anda akan menjadi sadar akan adanya batasan-batasan sebagaimana pula kemungkinan-kemungkinan 'penjelasan' dan 'pemahaman' yang terkandung dalam setiap perspektif.

Kami akan senang jika Anda mampu menemukan cara sendiri melalui berbagai diskusi tentang berbagai perspektif dan tema, guna menguasai kosakata dasar dan mendapatkan suatu pengertian yang sangat luas tentang gagasan-gagasan yang mereka tawarkan dalam, katakanlah, keamanan atau konflik. Akan tetapi, kami juga berharap Anda akan memperoleh suatu pemahaman tentang asal mula dan asumsi-asumsi masing-masing perspektif karena hal ini memungkinkan kita untuk membandingkan dan menunjukkan dengan jelas pendukung-pendukung umum dan beragam dan juga mempersiapkan latar belakang bagi studi yang

lebih mendalam. Berbagai refleksi mengenai asumsi-asumsi dasar berbagai perspektif selalu kami tekankan. Anda akan menemukan sejumlah kotak refleksi yang tersebar di sana-sini di seluruh bagian buku ini.

Tema-tema

Setelah menguraikan asal usul dan asumsi-asumsi dari setiap perspektif, diskusi ini kemudian bergerak ke dalam pemahaman-pemahaman tertentu yang ditawarkan oleh perspektif tersebut ke dalam berbagai aspek dalam hubungan internasional. Diskusi ini disusun untuk membahas serangkaian tema khusus. Dalam aktivitas memusatkan perhatian pada tema-tema kunci tertentu, kami tidak sedang mengklaim bahwa kami telah mengenali 'inti' dari hubungan internasional. Penyusunan diskusi dari berbagai perspektif teori seputar tema-tema kunci itu dilakukan untuk alasan-alasan yang lebih bersifat pedagogis, daripada intelektual; yakni mampu memberikan metode pembelajaran dan pengajaran yang lebih baik daripada alasan untuk menangkap setiap nuansa. Hal ini memungkinkan Anda untuk membuat perbandingan-perbandingan dan perbedaan-perbedaan dengan cepat dan mudah antara berbagai pendekatan dan sehingga dapat membantu pembelajaran. Bagaimanapun, kami telah memilih tema-tema tertentu yang kami punyai karena tema-tema tersebut telah diakui para sarjana pada masa lalu dan terus menarik perhatian dari para sarjana Hubungan Internasional saat ini. Terdapat berbagai tingkatan pembahasan tema-tema dalam berbagai bab yang saling terpisah. Bagaimanapun, meski kami hanya mempunyai suatu diskusi yang relatif singkat tentang perdamaian dan keamanan dalam bab strukturalisme, kami

tidak sedang menyatakan bahwa kaum strukturalis tidak punya suatu apa pun untuk dikatakan tentang topik ini. Malahan, kami sedang menawarkan pada Anda sebuah bantuan pada studi yang mengidentifikasi perhatian utama karya para kaum strukturalis di bidang studi ini, yang telah membentuk cara perspektif ini muncul dan berkembang, dalam konteks Hubungan Internasional. Pasti, nantinya Anda akan menemukan ada beberapa 'wilayah abu-abu' dalam kerangka orientasi intelektual dan berbagai perhatian kunci.

Struktur dari bab-bab itu sendiri mengikuti suatu pola yang dapat memudahkan perbandingan-perbandingan dan lintas referensi. Pada bagian-bagian dari teks ini, Anda kadang kala akan diundang untuk mempertimbangkan persamaan-persamaan antara berbagai cara berpikir tentang hakikat keamanan atau masalah-masalah kesenjangan dan keadilan. Sebagai gantinya, Anda mungkin diminta untuk memikirkan secara mendalam pemahaman yang berbeda tentang hubungan antara wilayah-wilayah 'nasional' dan 'internasional', yang ditawarkan oleh kaum liberalis atau realis. Seperti yang terlihat dalam Kotak Refleksi berikut:

Kotak Refleksi

Transnasionalisme dan Interdependensi

* Apa implikasi dari transnasionalisme terhadap pemahaman kita tentang hakikat hubungan internasional?
* Bagaimana karya Morse menantang pandangan kaum realis tentang negara?

Tak pelak lagi, beragam tema telah digambarkan secara panjang lebar oleh berbagai pemikir dan di berbagai zaman berbeda-beda dalam sejarah teori Hubungan Internasional. Kami akan senantiasa menawarkan Anda diskusi singkat mengenai bahasan yang kami pikir menarik dan diskusi yang relevan dengan hak asasi manusia atau perdamaian yang diambil dari beberapa teks Hubungan Internasional yang berpengaruh. Setiap disiplin akan mempunyai teks-teks klasik atau pertamanya; teks-teks semacam ini adalah karya-karya yang setiap mahasiswa atau sarjana diharapkan untuk membiasakan diri dengannya. Adakalanya dalam menghadirkan ide-ide kunci dari sebuah teks tertentu kami mengindikasikan bahwa teks tersebut dianggap sebagai salah satu dari buku-buku itu sehingga Anda harus memeriksa lebih jauh ide-ide pengarang tertentu. Maka, untuk keperluan tersebut, kami akan memperlihatkannya seperti dalam 'Kotak Pengarang' berikut:

Kotak Pengarang

David Ricardo

Ricardo berpendapat bahwa negara-negara yang individual mempunyai suatu keuntungan komparatif dalam menghasilkan jenis-jenis barang dan jasa tertentu. Berkaitan permasalahan yang berhubungan dengan sumber daya alam atau iklim, atau disebabkan oleh komposisi dan skill tertentu tenaga kerja, beberapa negara akan selalu mampu memproduksi jenis-jenis barang tertentu secara lebih murah dan efisien daripada yang lainnya. Ricardo berpendapat bahwa karena alasan itu, maka sangatlah masuk akal jika negara-negara melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang dan jasa tertentu dan menjalin hubungan perdagangan antara satu negara dengan lainnya. Perdagangan menjadi upaya yang positif untuk dianjurkan, karena meskipun

tidak semua individu, kelompok, dan negara sama-sama diuntungkan, tetapi perdagangan bersifat menguntungkan bagi kesejahteraan setiap orang secara keseluruhan.

Selain itu, kami juga akan menggambarkan beberapa contoh kami dengan bahasan tentang perdebatan kunci yang mengaku berdasar pada data statistik, bukti atau merepresentasikan beberapa versi peristiwa yang 'disetujui'. Kami menyebut hal ini sebagai kotak-kotak informasi atau sejarah. Sebuah kotak ini terlihat seperti berikut:

Kotak Informasi

Bencana-bencana dan kecelakaan-kecelakaan Lingkungan Hidup —sebuah kronologi yang sangat selektif

1960 —Pestisida DDT ditemukan telah mencemari seluruh planet.
1979 —Three Mile Island (peristiwa nuklir di AS).
Akhir 1970-an —lubang ditemukan pada lapisan ozon. Pendingin CFCs merek 'Mirage' menjadi pihak yang disalahkan.
1984 —Bhopal (ledakan dan kebocoran pabrik kimia di India, membunuh sekitar 2000 orang).
1986 — Peristiwa nuklir Chernobyl (efek lanjutan dari Three Mile Island).

Sebelum dan sejak daftar di atas, telah terjadi banyak kejadian —ledakan-ledakan, kebocoran, kandasnya kapal-kapal pengangkut minyak, kelangkaan stok makanan— tetapi semua hal ini pada akhirnya menjadi isu-isu lingkungan hidup yang masuk ke dalam wilayah publik pada akhir 1980-an. Ingat, mereka hanyalah puncak gunung es (meski tentu saja pemanasan global sedang mencairkan gunung es!)

Terakhir, tentu saja, 'berbagai tema' muncul dari berbagai proses, kecenderungan, atau masalah dalam 'dunia nyata'. Disiplin Hubungan Internasional muncul segera

sesudah Perang Dunia I, ketika kebutuhan untuk memahami tragedi atas konflik manusia, sebagai langkah pertama dalam menciptakan suatu tatanan dunia yang lebih stabil dan adil, menjadi sangat penting sekali. Beberapa sarjana telah memusatkan perhatian untuk memecahkan masalah yang dihadapkan oleh senjata-senjata nuklir, atau tertarik untuk menemukan pola-pola atau siklus kejadian-kejadian dunia. Tentu saja, semua menganggap bahwa ada sebuah dunia nyata 'di luar sana' yang membentuk objek dari studi mereka. Benar atau tidaknya anggapan bahwa terdapat sebuah dunia nyata di luar sana, atau hanya gambaran-gambaran dan cerita-cerita yang berbeda-beda tentang dunia, merupakan suatu pertanyaan yang menarik dan penting yang akan didiskusikan secara lebih mendalam pada bab-bab berikutnya (terutama bab 5). Pada tahap ini, kami hanya menawarkan beberapa contoh kejadian yang ditafsirkan sebagai sesuatu yang penting dan menandai tren-tren atau proses-proses tertentu dalam hubungan internasional, atau yang telah ditawarkan sebagai sesuatu yang membuktikan 'kebenaran-kebenaran' yang pasti dan mendalam tentang kondisi manusia. Dalam pengerjaan tahap ini, kami mencoba untuk mengungkapkan sebuah pengertian bahwa diskusi-diskusi teoretis sepenuhnya dibentuk oleh konteks dan lingkungan sejarah. Suatu kotak "Contoh Dunia" terlihat seperti berikut:

Contoh Dunia

Krisis Minyak

Pada 1973 negara-negara utama penghasil minyak memutuskan bahwa jika mereka bekerja sama, maka mereka bisa mengontrol suplai dan harga minyak, dengan membentuk sebuah kartel

yang disebut OPEC. Dengan cara ini, OPEC mampu menyuplai minyak kepada para pembelinya empat kali lebih banyak hanya dalam semalam. Pengaruhnya adalah kelangkaan minyak mentah dan kepanikan. Krisis minyak menjadi penting sekali untuk dua alasan. *Pertama*, ia menandakan makin meningkatnya kepentingan ekonomi dalam HI. *Kedua*, baik dampak langsung ataupun lanjutan dari krisis minyak memberikan suatu demonstrasi yang jelas tentang adanya kemungkinan bahwa suatu negara dapat tiba-tiba menjadi sedemikian lemah bahkan saat batas-batas mereka dijaga, dipertahankan, dan diamankan. Sangatlah jelas bahwa negara-negara eksis dalam suatu dunia di mana perekonomian kian lama menjadi kian terinternasionalisasikan. Dalam suatu situasi yang saling bergantung seperti itu, negara-negara kian kehilangan kontrol. Krisis harga minyak pada 1973 (dan terulang lagi tahun 1979) hanyalah salah satu alasan terjelaskannya suatu fakta bagi beberapa sarjana bahwa suatu konsentrasi terhadap kapabilitas militer benar-benar tidak cukup untuk dapat memahami sepenuhnya kompleksitas HI. Bangkitnya kecenderungan ekonomi juga makin membuat klaim bahwa negara-negara bukanlah satu-satunya aktor yang paling penting dalam hubungan internasional menjadi suatu yang terasa makin benar. Jadi, ketika puncak Perang Dingin tahun 1950-an dan tahun 1960-an, pendekatan-pendekatan Liberal gagal membuat suatu serangan yang serius ke dalam dominasi realisme dalam disiplin ini, selama tahun 1970-an dan 1980-an perspektif Liberal, dan lebih khusus lagi pluralisme-liberal, baru kemudian dapat tergabung ke dalam *mainstream* HI.

Kesimpulan, Kritik-Kritik, Kesalahpahaman Umum, dan Bacaan Lebih Lanjut

Setiap bab akan memasukkan sebuah daftar kesimpulan yang mencantumkan poin-poin utama yang dibuat dalam tiap perspektif. Setelah klarifikasi seperti itu, oleh karena Hubungan Internasional dikarakterisasikan dengan ketidaksepakatan di antara para sarjana, setiap bab mencari kritik-

kritik yang mungkin ditawarkan terhadap setiap perspektif. Untuk membantu proses pemahaman, setiap bab juga memasukkan sebuah kotak 'halaman' tentang kesalahpahaman umum dan juga panduan tentang bacaan lebih lanjut; membaca teks-teks asli sangatlah penting agar Anda benar-benar memahami ide-ide dan asumsi-asumsi dasar yang menjelaskan setiap pendekatan.

Pada akhir buku Anda akan menemukan sebuah 'daftar istilah-istilah kunci atau sulit' yang akan memasukkan sebagian besar kata-kata yang tidak dengan mudah dipahami bagi seorang pemula dalam HI atau ilmu-ilmu sosial pada umumnya.

Terakhir, kita harus menyadari betul bahwa pengertian-pengertian yang dihasilkan oleh teori-teori HI dikondisikan oleh konteks tertentu, tempat perdebatan teoretis tersebut berlangsung. Hanya dengan mencapai sebuah pengertian proses dan latar belakang makin berkembangnya teori-teori HI, maka kita bisa benar-benar menghargai paham-paham yang mereka tawarkan pada kita.

Referensi

Terakhir, hanya sebuah kata tentang referensi. Kami berharap bahwa banyak orang akan memakai buku ini tetapi buku ini ditujukan terutama pada para mahasiswa dari disiplin ini. Jika buku ini menyediakan para mahasiswa pengantar pertama mereka kepada studi ini, maka penekanan beberapa kaidah tentang referensi dan menjelaskan pendekatan yang kami bahas di sini, karena hal itu ia mungkin tidak mendapat persetujuan dari semua sarjana/tutor.

Pertama, karya Anda harus secara benar direferensikan dengan menggunakan salah satu dari sejumlah sistem yang diterima. Dalam hal ini Anda bisa belajar dengan bertanya pada seorang tutor, mengonsultasikannya dengan buku-buku atau,

mungkin, dari perpustakaan dan pelayan informasi. *Kedua*, karya Anda seharusnya selalu mempunyai sebuah bibliografi dari semua bahan-bahan yang digunakan (tidak hanya pilihan) pada bagian akhir.

Anda mungkin bertanya, mengapa kita harus tetap menjaga referensi seminimal mungkin ketika kita memberikan sebuah bibliografi dalam bentuk bacaan lebih lanjut? Alasan kami, yang sebagian menerima dan yang lainnya mempertanyakan, yakni bahwa dalam pengalaman kita, sedikit sekali para mahasiswa yang memeriksa teks-teks asli. Ketika karya pendahuluan dijadikan referensi utama, maka karya itu terlalu sering digunakan dalam metode alat atas sumber ide-ide kunci dan bibliografi tambahan.

Kami ingin Anda memahami ide-ide di atas, tetapi lebih untuk menggunakan karya kami yang memungkinkan Anda untuk memahami beberapa karya 'klasik' HI, bukan malah menjauhinya. Hal ini bukanlah sebuah pendekatan yang tidak kontroversial tetapi salah satu pendekatan yang didasarkan pada pengalaman mengajar yang luas dan suatu pendekatan yang mencoba memerhatikan sebuah kesediaan yang telah tampak untuk menerima teori 'tangan kedua' pada sebagian besar dari para mahasiswa kami. Setiap kami mengutip teks-teks secara langsung atau langsung diikuti argumen maka sumber-sumber kami itu dapat dilacak. Jikapun tidak, para pengarang dan karya-karya kunci terdaftar dalam bacaan lebih lanjut.

Setelah memberikan penjelasan tentang kerangka dasar intelektual dan pedagogis dari teks ini serta menjelaskan strukturnya, sekarang kami akan beralih pada perspektif HI pertama yang cukup dominan, yaitu realisme.

Kesalahpahaman Umum

Hubungan Internasional adalah Politik Internasional. Politik Internasional adalah salah satu aspek dalam Hubungan Internasional. Dalam HI kami mungkin juga berbicara tentang Ekonomi Internasional, Sosiologi Dunia, Studi Budaya Internasional dan

sebagainya. HI telah melibatkan unsur-unsur dari semua ini tetapi juga telah berkembang dengan caranya tersendiri.

Hubungan Internasional adalah urusan-urusan terkini. Kebanyakan apa yang kita lihat dalam berita-berita mempunyai suatu dimensi internasional; kebanyakan dari mereka membuat penilaian tentang yang 'baik' dan 'buruk'. Bagaimanapun, Hubungan Internasional benar-benar lebih dari sekadar apa yang terjadi —ia adalah tentang cara kita memahami apa yang terjadi dan bahkan latar belakang hingga kita (dan yang memasukkan program-program berita) sampai menganggap beberapa peristiwa internasional sebagai ulasan yang lebih berguna daripada yang lainnya.

Hubungan Internasional mempunyai sebuah definisi yang jelas. HI bisa menjadi berbagai hal yang berbeda bagi orang-orang yang berbeda. Terlepas dari perbedaan tekanan oleh berbagai perspektif, bagaimanapun juga, sering menjadi suatu kesepakatan untuk membagi HI ke dalam 'Hubungan Internasional' (teori dan disiplin itu sendiri) dan 'hubungan internasional' (peristiwa-peristiwa dari politik dunia, ekonomi transnasional dan sebagainya).

Teori itu membuang-buang waktu. Teori HI itu memang terkadang terasa sulit dan mungkin sering kali terlihat seolah-olah benar-benar akademis. Para pengujinya, bagaimanapun juga, sedang mencari tingkat penyempurnaan pembahasan teoretis dan dalam rangka menandai penggunaan teori sedikit mungkin akan lebih berhasil daripada ribuan fakta-fakta tanpa makna (membeo). ✦

Bacaan Lebih Lanjut

Baylis, J. dan Rengger, N.J. (1992), *Dilemmas of World Politics,* Oxford: Clarendon Press.

Baylis, J. dan Smith, S. (ed) (1997), *Globalization and World Politics,* Oxford: Oxford University Press.

Berridge, G. (1992), *International Politics* (edisi II), Harlow, Prentice Hall.

Bretherton, C. dan Ponton, G. (ed) (1996), *Global Politics: An Introduction,* Oxford: Blackwell.

Brown, C. (1997), *Understanding International Relations,* London: Macmillan.

Burchill, S. and Linklater, A. (1996), *Theories of International Relations,* Basingstoke: Macmillan.

Calvocoressi, P. (1991), *World Politics Since 1945,* Harlow: Longman.

Evans, G. and Newnham, J. (1991), *The Dictionary of World Politics,* Harlow, Prentice Hall.

Frankel, J. (1988), *International Relations in a Changing World,* Oxford: Oxford University Press.

George, J. (1994), *Discourses of Global Politics: A Critical Re(Introduction) to International Relations,* Boulder, CO: Lynne Reinner.

Goldstein, J. (1996), *International Politics* (edisi II), New York: Harper Collins.

Hocking, B. dan Smith, M. (1995), *World Politics: An Introduction to International Relations* (edisi II), Harlow, Prentice Hall.

Hollis, M. dan Smith S. (1990), *Explaining and Understanding International Relations*, Oxford: Clarendon Press.

Jackson, R. and Sorensenn G. (1999), *Introduction to International Relation*, Oxford: Oxford University Press.

Kegley, C. dan Wittkopf, E (1997), *World Politics: Trends and Transformation* (edisi VI), New York: St Martin's Press.

Kennedy, P. (1994), *Preparing for the 21st Century*, London: Fontana.

Little, R. dan Smith, M. (1991), *Perspectives on World Politics*, London: Routledge.

Nicholson, M. (1998), *International Relations: A Concise Introduction*, Basingstoke: Macmillan.

Russet, B dan Starr, H. (1996), *World Politics: The Menu for Choice* (edisi 5), New York: WH Freeman.

Smith, S., Booth, K. dan Zalewski, M. (1996), *International Theory: Positivism and Beyond*, Cambridge University Press.

Woods, N. (1995), *Explaining International Relations since 1945*, Oxford: Oxford University Press.

—✦✦—

Bab 1 Realisme

Pendahuluan

Realisme merupakan perspektif teori yang paling diakui dalam Hubungan Internasional. Realisme telah mendominasi Hubungan Internasional pada tingkatan hingga para mahasiswa, dan tentunya para sarjana, sering lupa pada fakta bahwa realisme hanyalah salah satu perspektif saja. Mereka juga menghadirkan realisme seolah-olah sudah menjadi "pandangan umum " di dunia dibandingkan semua perspektif lain yang seharusnya dipertimbangkan juga. Kita akan kembali membahas pengertian realisme sebagai pandangan umum ini pada bagian akhir buku ini. Sekarang, kita cukup menyoroti realisme sebagai sebuah perspektif, *bukan satu-satunya* perspektif.

Realisme merupakan sebuah tradisi pemikiran yang kompleks, kaya, dan Anda perlu menyadari nuansa-nuansanya. Hans Bartelsen, misalnya, berpendapat bahwa realisme lebih merupakan sebuah arena perdebatan daripada sebagai satu posisi tertentu. Dengan demikian, dalam konteks yang berbeda, Kristen meliputi seperangkat kepercayaan tertentu tetapi terdapat variasi-variasi di dalam kepercayaan ter-

sebut; demikian pula, di dalam realisme kita mengenal versi klasiknya dan ilmiah, dan kaum realis yang menyebut diri mereka sebagai neo-realis atau realis struktural, dan sebagainya.

Selain terdapat berbagai perbedaan dan nuansa, sejumlah karya tulis dan para penulis dalam studi Hubungan Internasional, umumnya dilabeli 'realis' karena mereka memberikan sejumlah asumsi umum dan ide-ide kunci. Seiring dengan keinginan kami untuk menyederhanakan sesuatu sebagai tahap awal dalam proses pemahaman, maka dalam bab ini kami akan menghadirkan realisme sebagai sebuah posisi koheren atau perspektif dalam Hubungan Internasional. Untuk tujuan penyederhanaan dan kejelasan dalam proses pemahaman tersebut, maka kami memusatkan pada dua versi realisme, yaitu realisme klasik dan neorealisme.

Hubungan Internasional berawal dari akibat buruk Perang Dunia I. Ketika konflik tersebut begitu menyeramkan, para sarjana Hubungan Internasional pada awalnya begitu optimis tentang kemungkinan-kemungkinan mengakhiri kekejaman perang.

Kotak Literatur

Siegfried Sassoon

Puisi seperti dari Sassoon ini benar-benar mengungkapkan horor, tragedi, dan penderitaan kehidupan manusia selama Perang Dunia I dan berkontribusi pada tumbuhnya simpati-simpati kaum pasifis pada periode pasca-perang.

ATTACK

At dawn the ridge emerge massed and dun
In the wild purple of the glowering sun
Smouldering through spouts of drifting smoke that shroud
The menacing scarred slope; and, one be one,
Tanks creep and topple forward to the wire.
The barrage roars and lifts.
Them clumsy bowed
With bombs and guns and shovels and battle-gear,
Men jostle and climb to meet the bristling fire.
Lines of grey, muttering faces, masked with fear,
They leaves their trenches, going over the top,
While time ticks blank and busy on their wrists
And hope, with furtive eyes and grappling fists,
Flounders in mud.
O Jesu, make it stop!

Sassoon 1918

Kegiatan kaum idealis —yang akan didiskusikan secara detail dalam bab berikutnya, mengenai kepercayaan bahwa semenjak masyarakat pada umumnya sudah jenuh dengan perang dan tidak ada hal lain yang dibutuhkan kecuali mengakhirinya, adalah menghormati aturan hukum dan institusi-institusi yang stabil yang bisa menyediakan seperangkat tatanan internasional yang menghasilkan perdamaian dan keamanan. Inilah pemikiran bahwa usaha mengakhiri peperangan tersebut bisa diraih melalui Liga Bangsa-Bangsa (lihat kotak).

Contoh Dunia

Liga Bangsa-Bangsa

Sebelum Perang Dunia I setiap negara menganut pandangan bahwa pemerintah merupakan representasi resmi dari negara-

negara berdaulat dan bahwa semua negara-negara berdaulat mempunyai hak untuk memutuskan tanpa mempermasalahkan kepentingan-kepentingan mereka sendiri dan mengejar kepentingan-kepentingan ini melalui susunan kebijakan luar negeri yang independen, melalui negosiasi —diplomasi— dan, jika perlu, melalui tindakan militer. Lebih-lebih, di antara para elit berlaku pandangan bahwa 'kepentingan nasional' dan fokus keamanan menuntut supaya hubungan diplomasi diarahkan secara rahasia dan kebijakan luar negeri dijaga dari penelitian dan kritik publik. Kengerian Perang Dunia I melahirkan perubahan yang sulit dibayangkan dalam sikap di antara para elit politik dan seksi-seksi publik yang berpengaruh di seluruh Benua Eropa. Bahkan sebelum berakhirnya perang, prinsip kedaulatan sedang menjadi subjek bagi tantangan-tantangan kritis. Masyarakat Liga Bangsa-Bangsa yang dibentuk di London pada 1915 dan badan-badan sejenis tumbuh di sejumlah negara-negara di Eropa termasuk Prancis dan, bahkan, Jerman. Di Inggris ide tentang pembentukan Liga Bangsa-Bangsa memenangkan dukungan dari seluruh spektrum politik karena para pemimpin bergabung bersama untuk mendesak pembentukan sebuah sistem internasional baru yang akan menjamin perdamaian, jika perlu oleh usaha bersama dari kekuasaan 'para pecinta damai'.

Liga Bangsa-Bangsa dibentuk pada akhir Perang Dunia I. Tujuan dari Liga adalah menyediakan sistem keamanan bersama dan menahan negara-negara agresor dari mengejar 'kepentingan nasional' mereka dengan mengorbankan tetangga-tetangga mereka yang lebih kecil dan lebih lemah. Ide dasar yang mendukung keamanan bersama adalah anggapan bahwa jika satu negara anggota merasa menjadi korban dari serangan tetangga yang lebih kuat, maka semua anggota dari organisasi secara bersamaan akan bergabung bersama dalam sebuah usaha yang ditentukan untuk menahan atau memukul mundur si agresor. Idenya adalah untuk membuat kekerasan menjadi hal yang tidak sah sebagai sebuah pilihan bagi negara-negara dan bagi negara lainnya untuk bergabung dan menantang setiap negara yang menggunakan kekerasan sebagai alat bagi penyelesaian perselisihan-perselisihannya dalam hubungan inter-

nasional. Ketika diakui bahwa hal ini pada akhirnya mungkin meminta kekuatan bersenjata, umumnya dipercaya bahwa 'opini publik dunia' akan, dengan sendirinya, terbukti menjadi hal pencegah yang sangat kuat bagi siapa pun yang akan menjadi negara yang suka berperang. Diakui bahwa jika Liga Bangsa-Bangsa itu sukses, maka Amerika Serikat akan perlu untuk mengakhiri masa 'isolasi'nya dan memainkan sebuah peran 'pimpinan' dalam urusan-urusan dunia. Sayangnya, hal ini tidak terjadi. Meski Presiden AS Woodrow Wilson memainkan peran terkemuka dalam pembuatan konsep dan perencanaan awal dari Liga, Senat AS menolak untuk meratifikasi Perjanjian Liga Bangsa-Bangsa, yang dari sini mencegah keanggotaan AS. Dari sini Liga mengalami tekanan moral dan politik yang besar. Akan tetapi, Liga terus berfungsi selama periode *'inter-war'*. Lembaga ini bertindak sebagai sebuah forum penting bagi diplomasi dengan memfasilitasi pertemuan-pertemuan reguler antara para kepala negara. Liga juga secara bertahap meluaskan peran-nya dalam urusan-urusan dunia, menyusun, di antara hal-hal lainnya, sebuah Pengadilan tetap dari Keadilan Internasional untuk menyelesaikan perselisihan internasional.

Meskipun keberadaan Liga merupakan tantangan kuat bagi pandangan bahwa negara-negara bebas dari perdebatan dan kritik publik dalam hubungan mereka dengan negara-negara lain, penguasa utama enggan untuk menyelesaikan perselisihan mereka sendiri pada Liga. Demikian pula, tindakan untuk mencapai perlucutan senjata umumnya tidak berhasil. Tentu saja, pada akhir 1930-an peristiwa-peristiwa dalam perpolitikan dunia telah menentukan tanda Liga dilahirkan, seperti tingkah laku dari beberapa negara yang gagal menghidupkan harapan-harapan kaum idealis. Pada 1931 Jepang menyerang Cina, dan kemudian menarik Liga di bawah artikel 11. Liga mengirimkan komisi-komisi dan memberikan isu penghukuman, tetapi serangan Jepang tidak dijatuhi hukuman. Italia menyerang Abysinia (Ethiopia) sebagai usaha untuk menetapkan Italia sebagai satu-satunya penguasa imperial Eropa. Hal ini membawa pada sanksi ekonomi dan protes Liga, tetapi tanpa dukungan dari sanksi-sanksi militer, hal ini menjadi tidak efektif. Di Jerman, Hitler mengirimkan pasukan ke zona

demiliterisasi (zona yang dikosongkan dari pasukan militer. Pen.) di Rhineland pada 1936 tetapi para konsultan Liga, tidak tegas, malah membiarkan Hitler berhasil meloloskan diri dengan pasukan militer yang sangat besar dan spekulasi politik. Politik kekuasaan terlihat menjadi makin berkembang dari hari ke hari dan dengan berakhirnya dekade, dunia memasuki perang sekali lagi.

Menyoroti kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dan pecahnya Perang Dunia II yang sangat menyengsarakan banyak orang, maka tidak mengherankan jika sebuah pandangan yang lebih pesimis tentang politik dunia muncul pada masa pasca-perang Dunia II. Realisme mengaku lebih realistis dibandingkan dengan 'utopianismenya idealisme. Beberapa eksponen utama realisme berpendapat bahwa perhatian atau keputusasaan moral pribadi mereka pada dunia, bukan berarti bahwa kita bisa mengubahnya. Beberapa aspek dari tingkah laku manusia itu bersifat abadi seiring ruang dan waktu. Kaum realis berpendapat bahwa ada hukum-hukum yang tidak berubah yang mengatur tingkah laku individu dan negara; negara, layaknya laki-laki, fitrahnya itu egois dan agresif serta akan mengejar kepentingan-kepentingan mereka sehingga merugikan orang lain serta tidak memandang batasan-batasan hukum atau moralitas apa pun. Kaum realis menyatakan bahwa masalah utama dalam hubungan internasional salah satunya adalah 'anarki'. Anarki berlaku karena dalam hubungan internasional tidak ada otoritas kedaulatan yang bisa memaksakan aturan hukum dan menjamin 'yang bersalah' dihukum. Liga Bangsa-Bangsa sebenarnya merupakan pengganti yang lemah bagi sebuah kekuatan yang benar-benar berdaulat yang memiliki sistem hukum dan militer di bawah kontrol satu pemerintahan

berdaulat. Namun, mereka terus berpendapat bahwa penyusunan sebuah pemerintahan yang benar-benar 'mendunia' merupakan hal yang kurang mungkin karena negara-negara tidak akan menyerahkan kedaulatan mereka pada sebuah badan internasional. Dengan demikian, kaum realis berpendapat bahwa perang sama sekali tidak bisa dicegah. Oleh karena itu, perlu kiranya bersiap siaga menghadapi perang. Hanya dengan cara ini perang sebenarnya bisa ditahan atau sedikitnya dikontrol.

Kotak Konsep

Sebuah 'Masyarakat Internasional' (*Society of States*)?

Hubungan internasional sering kali dikonseptualisasikan sebagai sebuah 'sistem' atau 'masyarakat' negara-negara. Istilah sistem-negara secara sederhana menunjukkan munculnya negara-negara sebagai bentuk dominan dari organisasi politik pada abad XVII di Eropa, segera sesudah kemunduran feodalisme. Sistem-negara modern muncul sebagai sebuah konsekuensi dari Perjanjian Westphalia, pada 1648. Kemunculan dari sistem-negara mendorong pertumbuhan hubungan diplomasi dengan pertukaran duta-duta besar, negosiasi kesepahaman, dan kemunculan aliansi-aliansi. Semua karakteristik ini terus menjadi ciri penting hubungan internasional saat ini. Pengertian dari 'masyarakat' negara-negara mengindikasikan sesuatu yang lebih daripada sekadar keberadaan negara-negara merdeka yang terlibat dalam hubungan-hubungan pada beragam tingkatan. Pengertian dari masyarakat menyatakan secara tidak langsung keyakinan dan/atau aturan yang mengatur tingkah laku atau pengakuan secara sadar atas norma-norma yang mengatur tingkah laku.

Konsep masyarakat negara-negara, atau masyarakat internasional, dihubungkan terutama dengan apa yang disebut Mazhab *English* (lihat daftar istilah di bagian akhir buku ini —Peny.) dalam Hubungan Internasional. Dari sisi luar, Mazhab

English mirip dengan realisme dalam kecenderungannya yang menekankan sentralitas negara. Bagaimanapun, konsep masyarakat internasional ini sangat berbeda dari pandangan yang lebih mekanistik tentang negara-negara sebagai kesatuan otonom dan mementingkan diri sendiri yang mengejar kepentingan mereka di bawah kondisi anarki. Dalam kenyataannya, salah seorang tokoh yang paling terkenal dari Mazhab *English*, Hedley Bull, membuat istilah 'masyarakat anarki' untuk menunjukkan kemungkinan adanya semacam tatanan dalam pengertian pemahaman dan ketundukan bersama pada norma-norma dan prosedur-prosedur, bahkan dalam kekosongan (*absent*) pemerintah pusat.

Setelah Perang Dunia II, Realisme muncul sebagai pandangan bersama dalam Hubungan Internasional. Para penganut aliran ini berpendapat bahwa sejarah panjang perpolitikan dunia menunjukkan bahwa sejarah politik dunia bukanlah sebuah latihan dalam menuliskan hukum-hukum dan perjanjian-perjanjian atau dalam membentuk organisasi-organisasi internasional. Akan tetapi, hal tersebut merupakan perjuangan atas kekuasaan yang berlangsung di bawah kondisi "sebuah negara untuk kami" (*every country for itself*). Melalui referensi, mereka menyebut diri mereka sebagai kaum realis dan menamai pendekatan sebelumnya sebagai idealisme. Kaum realis berpendapat bahwa fokus penelitian politik dunia seharusnya terletak pada proses menemukan berbagai pendorong penting yang menggerakkan hubungan-hubungan antar-negara-negara. Mereka percaya bahwa pengejaran terhadap kekuasaan dan kepentingan nasional adalah kekuatan utama yang menggerakkan perpolitikan dunia. Bagi mereka, dengan meletakkan perhatian pada kekuatan-kekuatan penting ini, dapat kemudian diketahui bahwa para pemimpin negara kurang mempunyai kebebas-

an untuk mengatur dunia dan memecahkan permasalahan-nya. Meskipun mereka menerima bahwa hukum dan moralitas merupakan bagian dari kinerja politik dunia, tetapi penghargaan pada hukum hanya akan dapat dicapai jika hukum tersebut disertai dengan ancaman kekuatan. Penganut paham ini juga menekankan bahwa kewajiban utama negara lebih kepada dirinya sendiri, bukan kepada sebuah 'komunitas internasional' yang lebih abstrak.

Kotak Penulis

E.H. Carr

Reaksi terhadap idealisme menghasilkan sejumlah karya yang sangat berpengaruh mengenai Hubungan Internasional yang menandai kemunculan Realisme sebagai pandangan dunia yang dominan pada periode pasca-perang. Salah satunya adalah karya E.H. Carr, *The Twenty Years' Crisis*, diterbitkan tahun 1939. Carr melontarkan kritik keras terhadap asumsi-asumsi utama Idealisme, berpendapat bahwa peristiwa-peristiwa tragis pada 1930-an adalah bukti kerapuhan lembaga-lembaga internasional, fakta nyata yang mendasari perebutan kekuasaan di antara negara-negara, serta kesalahan pendapat publik dunia yang mendukung pasifisme. Carr juga menolak dasar normatif idealisme (perhatian terhadap masalah-masalah hukum, moralitas dan keadilan) dan mengusulkan 'ilmu politik internasional'.

Kaum realis berpendapat bahwa daripada memusatkan perhatian pada gencatan senjata sebagai dasar perdamaian dan keamanan, negara malah harus bersiap-siap untuk perang. Mereka percaya bahwa konflik itu tak terelakkan sehingga kemungkinan terbaik untuk mencegah perang adalah dengan 'menjadi kuat' untuk menghadapi kemungkinan adanya agresi asing. Kaum realis mengklaim bahwa kepercayaan pada logika dalam menyelesaikan masalah

perang merupakan hal yang utopis dan mengabaikan kebenaran-kebenaran objektif tertentu tentang perpolitikan dunia.

Kotak Penulis

Hans Morgenthau

Politics among Nations karya Hans Morgenthau, yang diterbitkan di Amerika Serikat pada 1948, menghendaki agar ilmu hubungan internasional melangkah sedikit lebih jauh. *Politics among Nations* umumnya dianggap sebagai usaha pertama untuk mengembangkan sebuah 'studi ilmiah' tentang hubungan di antara negara-negara berdasarkan pada sebuah pengakuan terhadap berbagai realitas kekuasaan. Morgenthau mengusahakan perhitungan sistematik dan komprehensif yang pertama terhadap tingkah laku negara, mendesak bahwa studi Hubungan Internasional seharusnya menjadi studi yang empiris dan teoretis daripada sekadar berpusat pada perhatian normatif terhadap keadilan.

Meskipun masih dalam masa pertumbuhannya, namun pada saat itu teori Hubungan Internasional menunjukkan karakteristik awal yang nantinya akan menjadi sebuah karakteristik utama; karakteristik ini berevolusi melalui serangkaian perdebatan. Misal, Perang Dunia II berhasil menyusun perdebatan besar pertama dalam Hubungan Internasional yang berpihak pada kaum realis. Perang Dingin benar-benar memperkuat pandangan pesimis ini dan memberikan jalan pada realisme untuk terus mendominasi ilmu pengetahuan Hubungan Internasional selama tahun 1950-an dan 1960-an.

Kotak Sejarah

Perang Dingin

Fase Perang Dingin ini menjelaskan periode sejarah dari akhir 1940-an hingga akhir 1980-an. Pada periode ini setidaknya dua negara superpower (AS dan USSR) serta sekutu mereka membentuk blok atau kubu yang bertentangan dalam politik dunia. Perang Dingin menjadi penyebab berlanjutnya perselisihan pada tahapan yang sangat tajam. Akan tetapi, penyebab utama ketegangan-ketegangan yang timbul kemudian adalah serangkaian sengitnya perdebatan tentang status Jerman setelah Perang Dunia II. Pada akhir perang, Uni Soviet (USSR), Amerika Serikat (AS), Prancis, dan Inggris mengambil bagian-bagian tertentu dari wilayah kependudukan Jerman. Uni Soviet dan sekutunya kemudian memulai serangkaian pertemuan untuk bernegosiasi atas apa yang akan terjadi pada Jerman segera setelah perang berakhir. Untuk menjamin segala sesuatunya, Uni Soviet percaya bahwa penting untuk menjamin Jerman tidak lagi memiliki potensi ancaman bagi Uni Soviet di masa yang akan datang. Mereka menuntut agar Jerman dicegah untuk menjadi sebuah kekuatan penting secara ekonomi dan militer lagi. Lebih jauh, mereka percaya bahwa Uni Soviet berhak atas sejumlah besar kompensasi atas kerusakan perang yang diakibatkan oleh Jerman. Di sisi lain, Sekutu (AS) percaya bahwa perbaikan ekonomi Jerman sendiri penting bagi kesejahteraan masa depan Benua Eropa. Lebih-lebih, tidak diragukan bahwa Sekutu juga percaya bahwa kebangkitan kembali Jerman akan mencegah Uni Soviet menjadi penguasa dominan Eropa pada masa pasca-perang. Jelasnya, tujuan masa damai dari dua kubu itu bertentangan.

Secara mendasar, Perang Dingin sering kali dijelaskan sebagai sebuah perang ideologi. Meski asal mula Perang Dingin berakar pada konflik-konflik kepentingan yang nyata, tetapi tak dapat diragukan bahwa pertentangan sistem nilai dan pandangan dunia dari Uni Soviet dan Amerika Serikat makin menambah ketegangan-ketegangan, yang menghasilkan berbagai kecurigaan di kedua belah pihak dan membuatnya makin

sulit untuk mencapai kesepakatan. Tentu saja, Jerman dan kebanyakan negara di Benua Eropa pada masa itu terbagi antara Barat dan Timur hingga lebih dari 40 tahun. Konflik ini merupakan perang 'Dingin' karena Pasukan-pasukan AS dan USSR tidak terlibat dalam pertempuran langsung yang mana kontak seperti itu dikhawatirkan meningkat ke dalam konflik nuklir. Perang Dingin dengan cepat menjadi perebutan pengaruh di seluruh dunia, dengan bentuk hubungan yang berkisar antara tahap pertemanan yang relatif, seperti halnya periode *détente* (kebijakan pengurangan ketegangan antara 2 atau lebih negara yang bertikai —Peny.) tahun 1970-an, dan masa-masa 'permusuhan', termasuk apa yang disebut 'Perang Dingin kedua' pada awal 1980-an. Perang Dingin berakhir dengan jatuhnya komunisme Eropa Timur pada 1989, yang ditandai dengan runtuhnya Tembok Berlin.

Singkatnya, poin-poin penting perspektif realis adalah:

1. Negara berdaulat merupakan aktor kunci dalam hubungan internasional;
2. Negara-negara dimotivasi oleh sebuah dorongan untuk kekuasaan serta mengejar 'kepentingan nasional';
3. Masalah utama dalam hubungan internasional adalah kondisi anarki, yang berarti tiadanya sebuah otoritas kedaulatan pusat untuk mengatur berbagai hubungan di antara negara-negara;
4. Niat agresif dari berbagai negara, ditambah dengan tidak adanya pemerintah dunia, yang berarti bahwa konflik merupakan realitas yang selalu ada dalam hubungan internasional;
5. Sebuah persamaan mengenai tatanan dan keamanan bisa dipelihara dengan membentuk aliansi-aliansi antar-negara yang mencegah satu negara mana pun untuk menjadi adikuasa dan, sehingga, menjadi ancam-

an bagi perdamaian dan keamanan bagi negara-negara lainnya;

6. Institusi-institusi dan hukum internasional memainkan peran penting dalam hubungan internasional, tetapi hanya bisa efektif jika didukung oleh kekuatan atau sanksi efektif.

Asal Usul

Meskipun realisme mulai mendominasi disiplin akademis Hubungan Internasional, yang relatif masih muda, setelah Perang Dunia II, realisme mengklaim bahwa realisme bukanlah sesuatu yang baru dan menghubungkan paham-pahamnya pada beragam jenis sumber. Bagian asal usul ini menggambarkan ide-ide dari kaum realis tersebut, baik mereka yang telah menulis tentang Hubungan Internasional atau yang telah menerapkan ide-ide pada Hubungan Internasional. Karya tulis yang dipilih di sini memang tidak terlalu lengkap, tetapi berusaha untuk mencapai poin dasar bahwa realisme membuat sebuah klaim yang bukan hanya sah berlaku di seluruh tempat di dunia tetapi juga sepanjang waktu, kalau bisa. Untuk menekankan poin ini, kaum realis cenderung menarik asal usul intelektual mereka pada 2500 tahun yang lalu dan melalui tulisan-tulisan Thucydides.

Kotak Penulis

Thucydides

Arahan ide-ide dan asumsi-asumsi dasar dari tradisi pemikiran realis, sedikitnya datang dari beberapa tulisan Thucydides, terutama *Peloponnesians Wars*, yakni peperangan antara negara-

negara kota Yunani, yaitu Athena dan Sparta. Thucydides menggunakan perang untuk menunjukkan bagaimana logika politik kekuasaan (pengejaran atas kekuasaan dan kepentingan nasional) lebih menandai hubungan dan konflik antar-negara daripada kerja sama atau tindakan yang diarahkan oleh prinsip-prinsip yang lebih bermoral.

Sering kali dikatakan bahwa para mahasiswa saat ini tidak banyak tahu tentang tingkah laku negara dibandingkan yang dulu diketahui Thucydides. Studinya menunjukkan bahwa 'penguasa' melakukan apa yang mereka mampu dan yang kurang berkuasa hanya menerimanya. Seruan pada prinsip-prinsip yang lebih tinggi seperti halnya yang dilakukan oleh orang-orang di Melos hingga ke Athena berhadapan dengan tinju besi sama yang telah menjadi nasib bagi kebanyakan orang-orang yang kurang berkuasa di seluruh abad XX.

Pemikiran-pemikiran Niccolo Machiavelli, seorang pemikir Italia abad XVI, dan seorang filsuf Inggris abad XVII, Thomas Hobbes, juga mulai menunjukkan bagaimana realisme diduga ditemukan pada masa 'kebijaksanaan masa lampau' (*old age wisdom*). Niccolo Machiavelli terkenal, atau mungkin lebih tepatnya *notorius*, atas nasihat praktisnya bagi para negarawan yang akan menjamin para negarawan akan tetap berkuasa dan mampu mencapai tujuan-tujuan mereka. Machiavelli mengusulkan serangkaian panduan yang dapat memaksimalkan kekuasaan para negarawan. Nasihatnya mencakup instruksi bahwa janji-janji harus dilanggar jika terdapat keuntungan yang dapat diperoleh dari tindakan tersebut. Karena hal semacam inilah Machiavelli sering dituduh sebagai seorang pemikir yang *immoral*. Istilah *Machiavellian* digunakan dalam percakapan sehari-hari untuk menyebut tingkah laku yang sinis dan tak berprinsip, atau digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang pandai menipu dan licik, yang memanipulasi situasi-situasi secara

tidak bermoral untuk mendapatkan keuntungan mereka sendiri.

Barangkali, lebih tepat menggambarkan pemikiran Machiavelli sebagai *amoral* (tidak bermoral), daripada *immoral* (tak sopan) karena ia meyakini bahwa tingkah laku moral atau etika hanya mungkin terwujud di bawah kondisi-kondisi tertentu dari keberadaan umat manusia dan negarawan benar-benar tidak punya pilihan lain lagi selain bertindak hati-hati dan benar-benar memerhatikan kerapuhan tatanan politik dan sosial. Meskipun Machiavelli tidak secara tegas memusatkan perhatian pada etika atau keadilan, tetapi jelas ia menganggap prinsip-prinsip moral atau keadilan hanyalah sebagai pilihan-pilihan yang telah ditetapkan dari penguasa. Tak dapat diragukan lagi bahwa Machiavelli mempunyai pandangan yang sangat suram tentang karakteristik manusia. Kaum realis terus mengatakan tidak ada tempat bagi kebenaran atau sentimen dalam politik dan mereka mengacu pada kebijakan Machiavelli dalam menjelaskan maksud tersebut.

Karya Thomas Hobbes juga amat penting dan menjadi kunci bagi para kaum realis. Hobbes berpengaruh karena ia merupakan orang pertama di antara para pemikir politik lainnya yang terus-menerus membahas karakteristik kekuasaan dan otoritas sekuler (non-religius = tak beragama).

Kotak Penulis

Sebuah '*State of Nature*' Internasional? (kondisi kemanusiaan tanpa atau sebelum pemerintahan —Peny.)

Hobbes hidup saat terjadi perubahan sosial dan ketidakstabilan politik yang hebat. Mungkin, tidak mengherankan, kemudian,

salah satu perhatian utamanya menyangkut karakteristik kekuasaan politik, dasar sistem politik, dan, terutama, asal usul negara sebagai kekuasaan pusat yang berkuasa penuh. Guna menjelaskan logika dan pembenaran bagi negara dan pemerintah, Hobbes mengemukakan keberadaan sebuah *nature of state*, kondisi yang di dalamnya semua orang menikmati kebebasan dari pengekangan, namun sebagai konsekuensinya, kehidupan terasa 'keji, kasar, dan singkat'. Kondisi-kondisi kehidupan yang tidak menyenangkan tersebut disebabkan karena karakteristik dari manusia yang mencoba menguasai dan menekan yang lainnya. Hanya kelemahan yang mutual (semua manusia pada dasarnya lemah karena mereka pasti butuh tidur) dan naluri penjagaan diri sendiri yang memberikan alasan bagi pembentukan sebuah lembaga yang punya otoritas atau kekuasaan yang akan menjamin kondisi-kondisi yang diperlukan bagi kehidupan beradab. Bagaimanapun, meski manusia mungkin dibujuk untuk memberikan kebebasan dasar yang mereka miliki bagi keberlangsungan lembaga yang berkuasa tadi, wilayah internasional akan tetap menjadi medan perang semua melawan semua (*all against all*) karena kondisi-kondisi yang dapat memaksa orang untuk menyerahkan kebebasan dasar mereka bagi keamanan dalam *the state of nature* tidak akan pernah bisa terwujud dalam konteks internasional. Singkatnya, negara tidak perlu tidur demikian pun tidak mudah kena serang. Karya klasik Hobbes *Leviathan* tetap menjadi salah satu tulisan yang paling berpengaruh dalam karakteristik mengenai kedaulatan dan anarki internasional. Tentu saja, hubungan internasional sering kali dihubungkan pada 'karakteristik negara'.

Pada saat itu Hobbes muncul untuk membangkitkan gambaran dengan menganjurkan pengaruh dan simpati-simpati religius —termasuk misalnya, setan atau kejahatan. Namun, kepercayaannya tentang inti bisikan hati seorang manusia, sebenarnya berasal dari hal yang dipahaminya sebagai pemahaman ilmu modern. Sebuah kondisi yang padanya kita bisa memahami hukum-hukum ilmiah yang

membantu kita menjelaskan tingkah laku individu atau sosial, atau sebuah kondisi yang padanya analogi tentang individu dalam *the state of nature* bisa diterapkan dalam negara dalam wilayah internasional merupakan hal yang masih dapat diperdebatkan. Bagaimanapun, secara bersamaan, kedua asumsi utama ini mendukung pendapat kaum realis tentang perlunya negara-negara bersikap egois dalam hubungan internasional. Pandangan tersebut memberikan kesan bahwa negara adalah aktor yang satu kesatuan, punya tujuan, dan rasional dalam hubungan internasional dalam pengertian sebagaimana individu-individu di dalam masyarakat. Kita mungkin mempertanyakan pantas atau tidaknya gambaran semacam ini. Untuk memutuskan layak dan berguna atau tidaknya analogi-analogi ini, maka kita perlu menguraikan asumsi-asumsi kunci realisme secara lebih jauh.

Asumsi

Meski terdapat berbagai varian dalam realisme dan berbagai perbedaan yang seolah remeh namun penting di antara varian-varian tersebut, perspektif ini mempunyai beberapa asumsi utama yang disetujui bersama. Hal terpenting dari asumsi-asumsi ini (atau tentunya dari setiap asumsi-asumsi tersebut) adalah bahwa meski kaum realis menyatakan bahwa mereka mendasarkan pemahaman mereka pada pengamatan-pengamatan tentang 'dunia nyata', penting untuk diperhatikan bahwa asumsi dasar kita tentang dunia ternyata mewarnai gambaran kita tentang realitas. Sehingga asumsi-asumsi yang berbeda akan menuntun pada sebuah pandangan atau pemahaman dunia yang sangat berbeda. Dalam partisipasinya memengaruhi pemahaman dunia yang ber-

usaha dijelaskannya, realisme telah memicu munculnya beberapa kritik yang cukup berkualitas, yang akan kita bahas pada bab berikutnya.

Jadi, apa ide-ide dan asumsi kunci yang mendasari pemikiran kaum realis? Secara ringkas, asumsi-asumsi realisme adalah sebagai berikut.

1. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk *selfish* (mementingkan diri sendiri). Negara, layaknya manusia, bertingkah-laku mementingkan diri sendiri.
2. Negara merupakan aktor utama. Studi Hubungan Internasional, dengan demikian, merupakan studi tentang negara-negara dan tindakan atau aksi mereka. Dua hal penting tentang negara-negara adalah:
   (a) Negara itu berdaulat. Kedaulatan adalah konsep kunci dalam Hubungan Internasional.
   (b) Negara dimotivasi oleh kepentingan nasional. Mereka mengarahkan kebijakan luar negeri untuk meraih kepentingan nasional.
3. Kekuasaan merupakan kunci untuk memahami tingkah laku internasional dan motivasi negara.
4. Hubungan internasional sebenarnya penuh konflik. Klaim ini didasarkan pada salah satu dari tiga latar belakang yang berbeda, yaitu:
   (a) Seorang manusia itu mementingkan diri sendiri dan bertindak untuk meningkatkan keuntungan diri yang mereka bisa raih bahkan jikapun tindakan tersebut mungkin merugikan orang lain dan menyebabkan konflik. Karakteristik manusia itu tidak berubah dan tidak ada harapan bahwa tingkah laku seperti ini akan berubah. Atau

(b) Pada tingkatan negara, hubungan-hubungan dikonstruksikan dengan cara tertentu hingga tindakan mengejar kepentingan nasional mau tidak mau mengarahkan pada benturan-benturan nasionalistik (terkadang perang) dengan negara-negara lain. Atau

(c) Masalaḥnya bukanlah pada 'karakteristik manusia' itu sendiri, tetapi pada ketiadaan otoritas pusat dalam kenyataan internasional. Hal ini melahirkan anarki dan ketidakamanan sehingga negara-negara terpaksa bertindak hati-hati serta memprioritaskan kepentingan nasional. Daripada menunjukkan kejahatan atau agresivitas negara, pandangan ini menunjukkan pemikiran tentang tragedi.

Kotak Refleksi

Anda akan mencatat penggunaan dari bahasa gender dalam bab ini. Ini merupakan jenis dari realisme, meski tidak dianjurkan dalam esai-esai Anda. Menurut Anda mampukah realisme menjelaskan tingkah laku dari semua orang di sepanjang waktu?

Tema

Negara dan Kekuasaan

Barangkali tema inti realisme adalah sentralitas negara. Tentu saja, negara-negara dan hubungan-hubungan antarnegara merupakan tema utama yang sangat definitif dalam subjek HI. Ciri utama negara modern adalah bahwa negara mempunyai wilayah yang jelas, sebuah pemerintahan yang diberi otoritas kedaulatan serta pelaksanaan kekuasaan terhadap rakyat. Beberapa komentator menambahkan ciri keempat: Pengakuan. Pengakuan berarti bahwa klaim negara

terhadap wilayah tertentu dan haknya untuk menjalankan kedaulatan terhadap rakyatnya diakui oleh negara-negara lain. Pengakuan bisa dalam berbagai bentuk, tetapi umumnya pengakuan mencakup pembukaan hubungan diplomasi atau keikutsertaan dalam berbagai perjanjian dengan negara lain.

Oleh karena itu, maka ciri utama negara adalah kedaulatan. Ada dua jenis kedaulatan yang berkaitan dengan negara: kedaulatan internal berarti penyelenggaraan otoritas di dalam sebuah wilayah tertentu dan terhadap orang-orang tertentu; sementara itu, kedaulatan eksternal meliputi pengakuan dari negara-negara lain sebagai pihak yang sah yang berhak bertindak bebas di dalam urusan-urusan internasional, yakni misalnya, untuk membuat aliansi-aliansi, menyatakan perang, dan sebagainya.

Tema utama kedua realisme dalam Hubungan Internasional adalah kekuasaan. Kekuasaan pada dasarnya bisa dianggap sebagai konsep persaingan, yakni, sesuatu yang atasnya terdapat berbagai ketidaksepakatan mendasar. Lebih jauh, kekuasaan merupakan sebuah kata yang seolah-olah sangat mirip dengan kata-kata lainnya, seperti otoritas, pengaruh, dan paksaan. Realisme banyak berbicara tentang konsep kekuasaan dalam hubungan internasional.

Kotak Konsep

Apakah yang Disebut Sebagai Sebuah 'Negara'?

Meskipun terdapat sentralitas tentang konsep negara dalam Hubungan Internasional, terdapat sebuah ketidaksepakatan yang tajam tentang, *pertama*, karakteristiknya dan, *kedua*, nilai pentingnya yang relatif terhadap 'aktor-aktor' lain. Perbedaan-perbedaan ini akan menjadi jelas jika kita meningkatkan pe-

mahaman kita melalui teks. Ada beberapa masalah lain mengenai pengertian negara sebagai aktor, atau dalam memahami hubungan internasional sebagai sebuah sistem atau masyarakat dari negara-bangsa yang merdeka atau otonom. Tidak semua jelas bahwa sebuah negara mempunyai wilayah yang benar-benar jelas guna menjadi negara. Contohnya, batas-batas negara Israel itu ditentang hampir oleh seluruh tetangga Arabnya. Lebih jauh, para anggota pemerintah Israel mungkin mempunyai masa yang sulit dalam mengenali secara tepat di mana batas-batas negara mereka dimulai dan berakhir! Pada saat yang sama, para pemimpin dunia biasanya bertemu dengan perwakilan-perwakilan negara Palestina, meskipun tidak ada batasan wilayah yang jelas pada peta yang menunjukkan seseorang wilayah negara Palestina.

Untuk masa yang sangat lama, AS dan beberapa negara Barat menolak berhubungan dengan pemerintah Komunis Cina dan terus mengakui 'pemerintah' nasionalis buangan di Taiwan sebagai perwakilan sah dari orang Cina. Lebih-lebih, ada sejumlah contoh dari negara-negara di seluruh dunia yang benar-benar tidak diakui pemerintahannya sebagai pihak yang sah oleh bagian yang cukup besar dari populasinya. Komunitas orang nasionalis di Irlandia Utara adalah salah satu contohnya. Secara sekilas, hal ini mungkin terkesan sebagai kasus isolasi atau pengecualian, tetapi pada kenyataannya, ada wilayah-wilayah yang luas di bumi yang batas-batasnya diperebutkan dan pengungkapan 'kepentingan nasional' dominan ditentang. Apakah 'realitas' yang lebih morat-marit ini mengubah konsep kaum realis mengenai sebuah sistem atau masyarakat aktor-aktor negara yang bersatu, terikat, dan koheren sebagai sesuatu yang problematis?

Realisme tidak mengklaim mengatur semua jenis kekuasaan maupun semua jenis hubungan kekuasaan, tetapi realisme mengklaim mengenali dasar yang menyusun kekuasaan dalam hubungan internasional. Para kaum realis telah sangat berhati-hati dalam memberikan definisi tentang kekuasaan dan menunjukkan cara memperkirakannya

serta, yang penting sekali, pihak yang menguasainya. Bagi realisme, esensi kekuasaan adalah kemampuan untuk mengubah tingkah laku/untuk mendominasi. Beberapa kaum realis memaknai kekuasaan dalam istilah *zero-sum* (situasi yang di dalamnya kemenangan yang diperoleh pihak tertentu merupakan kekalahan bagi pihak lain —Peny.) yang ekstrem. Individu, seperti negara, mempunyai kekuasaan yang tidak dimiliki pihak lain. Secara tradisional, penganut realisme melihat kapabilitas militer sebagai esensi kekuasaan dengan alasan-alasan yang sangat jelas. Kapasitas untuk bertindak secara militer memberikan negara-negara kemampuan untuk menangkal serangan terhadap mereka, dengan demikian, menjamin keamanan mereka. Kemampuan semacam ini juga memungkinkan mereka untuk melancarkan serangan terhadap pihak-pihak lain untuk tujuan-tujuan tertentu. Kaum realis menganggap kapabilitas militer merupakan kemampuan yang sangat penting. Kapabilitas militer merepresentasikan hal yang paling mendasar, penengah akhir berbagai pertentangan internasional. Kekuasaan merupakan tujuan dalam dirinya sendiri (*end in itself*) maupun sebagai alat untuk mencapai tujuan (*means to an end*), akan menahan serangan dari pihak luar atau memberikan kemampuan mengakuisisi wilayah di luar negeri.

Dalam dunia yang terdiri dari negara-negara merdeka, kekuatan telah dianggap sebagai penengah akhir dalam penyelesaian berbagai perbedaan. Oleh karena itu, potensi atas kemampuan militer —dan dengan ini kekuasaan— tergantung pada sejumlah faktor seperti ukuran populasi, ketersediaan sumber daya alam, faktor-faktor geografis dan tipe pemerintahan.

Kotak Konsep

Perimbangan Kekuasaan

Kaum realis telah mengembangkan analisis tentang mekanisme pendistribusian kekuasaan dalam sistem internasional. Ide ini mengacu pada hal yang disebut sebagai 'perimbangan kekuasaan'. Definisi sederhana dari perimbangan kekuasaan adalah mekanisme yang bekerja untuk mencegah dominasi dari satu negara mana pun dalam sistem internasional. Perimbangan kekuasaan sering kali dilihat sebagai sebuah fenomena yang benar-benar sedang terjadi, atau situasi yang terjadi secara kebetulan saja. Namun, pada saat lain hal ini dianggap sebagai sebuah strategi yang sengaja diusahakan oleh negara-negara. Negara-negara menjalankan keseimbangan seperti itu untuk mencegah berbagai ancaman dari negara-negara berkuasa dan juga demi menjamin kelangsungan hidup mereka sendiri.

Perimbangan kekuasaan biasanya diukur dari sudut pandang kekuatan militer. Bagi para kaum realis, tujuan utama dari perimbangan kekuasaan bukanlah untuk menjaga perdamaian, melainkan untuk melindungi keamanan dari negara-negara (besar), jika perlu dengan cara perang. Perimbangan kekuasaan adalah sesuatu yang paling baik yang pernah dicapai oleh kaum realis dalam usahanya menguraikan sebuah tatanan internasional yang damai, dan selama definisi damai dipahami secara negatif sebagai ketiadaan perang.

Pada abad XIX, situasi di Eropa ditandai dengan lima atau enam negara-negara yang sama-sama berkuasa. Negara-negara ini sangat berhasil dalam mencegah perang, baik dengan membuat aliansi-aliansi atau karena negara yang paling berkuasa, Inggris Raya, menempatkan dirinya sebagai sebuah perimbang kekuasaan. Sayangnya, sistem aliansi yang telah 'mapan' pada awal abad XX melihat Eropa pada akhirnya terlibat dalam Perang Dunia I.

Meski ide-ide mengenai kekuatan militer tersebut mudah dipatahkan berdasarkan banyaknya negara di dalam dunia modern saat ini, sebuah negara dikatakan mem-

punyai kekuasaan jika dia mempunyai populasi yang besar, sumber daya alam yang melimpah, serta wilayah yang luas, daerah pegunungan atau tampilan fisik lainnya yang membuat negara tersebut sukar diserang. Terdapat sebuah masa yang pada masa tersebut ide yang sangat matematis yang mengemukakan bahwa penambahan dan pengurangan kekuatan dan kelemahan di dalam wilayah-wilayah tersebut yang akan menghasilkan perhitungan akurat tentang potensi kekuasaan negara. Ternyata, hal tersebut tidaklah sesederhana itu karena populasi yang besar tidak selalu menganugerahkan kekuasaan jika banyak 'mulut-mulut' yang tidak bisa diberi makan. Terlebih lagi, pada saat ini, kontrol terhadap sumber daya alam tak diragukan lagi jauh lebih penting daripada kekayaan. Situasinya menjadi kian dibuat rumit oleh faktor-faktor lain, seperti moral, kualitas kepemimpinan, kesiapan dan ukuran kekuatan tentara, serta kemampuan untuk mengubah sipil menjadi alat militer, termasuk juga memobilisasi orang.

Contoh Dunia

Populasi

Konsep kekuasaan kaum realis itu dapat ditentang dengan cara yang sangat sederhana jika kita melihat pada populasi. Para kaum realis menganggap bahwa populasi yang besar bisa menyediakan tentara dan, dengan demikian, unsur-unsur kekuasaan nasional. Jika kita lihat Cina dan pengorbanan sangat besar yang dibutuhkannya, katakanlah, di Perang Korea (1950-1953), ada sejumlah bukti bagi kasus seperti itu. Bagaimanapun, bagi beberapa negara, saat ini ukuran dan pertumbuhan populasi menciptakan serangkaian masalah. Orang adalah mulut yang harus diberi makan dan otak untuk dididik hingga menempatkan beban yang terlalu berat bagi sumber daya alam. Jika kita

berpendapat bahwa kekuasaan, bahkan kekuasaan militer, pasti mempunyai dasar ekonomi, sebuah populasi yang besar merupakan sebuah sumber kelemahan yang besar bagi sebuah negara seperti Bangladesh. Bahkan bagi Cina, ukuran populasi yang besar seperti pedang bermata dua.

Pada kenyataannya, kaum realis meyakini bahwa hanya dengan cara mengujikan kekuasaan dalam sebuah perang dapatlah segera diketahui dengan pasti besaran kekuasaan negara-negara yang relatif dan, bahkan kemudian, kekuatan militer tidak akan memengaruhi jikapun terdapat alasan-alasan tidak atau tidak akan digunakannya kekuatan tersebut. Contohnya, hanya sedikit orang yang meragukan kalau Amerika Serikat (AS) memiliki kekuatan militer yang lebih hebat secara militer daripada Vietnam, meskipun AS tidak mampu mengalahkan Vietnam dalam konflik sebelumnya selama tahun 1960-an hingga 1970-an, disebabkan oleh berbagai faktor seperti bobot pendapat publik Amerika Serikat serta perbedaan-perbedaan dalam kepemimpinan, taktik, dan kepercayaan diri kedua belah pihak. Selain itu, besarnya kekuasaan yang dapat dipraktikkan oleh sebuah negara dalam pertemuan tertentu, bergantung pada isu atau wilayah yang dijadikan bahan pembahasan. Contohnya, sebagian besar negara-negara yang tergabung dalam OPEC (*Organisation of Petroleum Exporting Countries*) mempunyai 'otot militer' yang tidak seberapa kuat jika dibandingkan dengan AS dan beberapa Negara Eropa, tetapi secara kolektif mereka mampu menetapkan kehendak mereka terhadap dunia Barat dengan meningkatkan harga minyak secara dramatis, seperti pada awal 1970-an. Seperti yang akan kita lihat pada bab berikutnya, ada beberapa dan beragam cara dalam memahami relasi-relasi kekuasaan.

Selain mengembangkan pandangan tentang kekuasaan sebagai semacam kapasitas dan sumber daya yang dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh negara-negara, seperti yang akan kita bahas di bawah nanti, kaum neo-realis telah mengembangkan sebuah konsepsi tentang kekuasaan yang menekankan faktor-faktor ekonomi secara lebih mendalam daripada realisme tradisional. Pada kajian berikutnya akan membahas kembali perbedaan konsepsi kaum realis dan neo-realis tentang kekuasaan.

Kotak Refleksi

Jika Anda berpikir sejenak tentang negara-negara termasuk sebagai penguasa, daftar Anda mungkin akan mencakup beberapa negara, seperti Jepang dan Jerman yang tidak terlalu kuat secara militer. Negara-negara lain seperti Cina dan Rusia, yang sangat kuat secara militer kini kian sadar bahwa stabilitas mereka bisa membahayakan tanpa meningkatkan *performance* ekonomi. Dalam dunia saat ini, tidak hanya kekuasaan alami tetapi juga pengaruh kian menjadi fenomena yang kompleks.

Konflik dan Kekerasan

Konflik mungkin hanya didefinisikan sebagai ketidaksepakatan-ketidaksepakatan yang diusahakan penyelesaiannya oleh berbagai pihak untuk kepuasan diri mereka sendiri. Menurut definisi tersebut, konflik tidak perlu menjadi kekerasan dan tampaknya menjadi bagian yang tak terelakkan dalam interaksi umat manusia termasuk argumen-argumen seperti: pergi ke bioskop atau menonton sepak bola, kecemburuan dalam hubungan, perkelahian di pub dan sebagainya. Interaksi manusia seolah-olah mengarah pada berbagai ketidaksepakatan. Bagi kaum realis (dalam konteks HI, peny.), konflik yang menarik adalah jenis

tertentu konflik antar-negara yang bercirikan kekerasan; biasanya adalah —tetapi tidak selalu— peperangan.

Dengan kerangka pikir yang demikian, kaum realis membatasi perhatian mereka pada penyebab dan karakteristik peperangan. Ada beberapa perbedaan pendapat mengenai penempatan atau pengaplikasian fokus jika kita sedang membicarakan tentang penyebab-penyebab yang lebih umum daripada penyebab-penyebab khusus. Sebagian sarjana mengusulkan untuk berkonsentrasi pada karakteristik umat manusia; sementara yang lainnya menganjurkan fokus pada negara; dan yang lainnya lagi lebih memilih untuk menyalahkan kinerja sistem internasional secara keseluruhan atas konflik yang terjadi. Jika kita kemudian berpendapat bahwa ketiga pendapat tersebut layak dipertimbangkan.

Kotak Penulis

Kenneth Waltz

Pengertian '*three images*' biasanya dihubungkan dengan karya Kenneth Waltz, terutama bukunya yang terkenal *Mans, the State and War*, yang pertama kali diterbitkan pada 1959. *Image* pertama yang diajukan Waltz berfokus pada karakteristik manusia sebagai akar penyebab perang. Pandangan ini menyatakan bahwa sebagai seekor spesies, kita (manusia) pada dasarnya rakus, agresif, mementingkan diri sendiri, dan umumnya jahat. Ada banyak sekali bukti yang mendukung klaim ini tetapi banyak juga yang menyangkalnya. *Image* kedua berfokus pada level negara, yang menyatakan bahwa negara-negara dikonstruksikan dalam kondisi yang akan menuntun tiap negara yang mengejar kepentingan nasionalnya pada benturan-benturan nasionalistik dengan negara-negara lain. *Image* ketiga adalah bahwa struktur sistem internasional menyebabkan timbulnya konflik karena menekan negara-negara untuk bertindak dengan cara tertentu.

Waltz sering kali disebut sebagai seorang 'realis struktural' karena ia memberi penekanan pada '*Image* ketiga'. Meski penggunaan kata 'struktural' bisa menyebabkan masalah-masalah bagi beberapa mahasiswa, alasannya bahwa struktur hubungan internasional yang anarkis benar-benar menekan negara-negara untuk bertindak seperti yang seharusnya mereka lakukan (istilah struktur ini tidak perlu dihubungkan dengan strukturalisme yang kami bahas secara rinci pada bab 3). Daripada memberikan penekanan pada kejahatan atau agresivitas negara-negara, pandangan ini mengungkapkan sebuah tragedi. Pandangan 'agresif dari realisme melihat konflik pada dasarnya berasal dari usaha-usaha untuk dapat mencapai kepentingan nasional yang melibatkan penggunaan atau didukung penuh dengan kekuatan militer. Sebaliknya, paham 'tragis' dari pemikiran realis ini melihat konflik akan terjadi sebagai sebuah konsekuensi dari anarki.

Para penganut realisme lebih sering mencari penyebab konflik yang konkret dan khusus, sebagai contoh, argumen-argumen 'ekonomi' seperti perang dagang, perbedaan-perbedaan ideologi (yaitu, perbedaan nilai-nilai), perbedaan etnis atau perbedaan agama, bahkan karena tekanan dari para pemimpin tertentu. Kebanyakan konflik berdarah dalam sejarah saat ini terjadi sehubungan dengan akses terhadap sumber daya. Kita akan menjelaskan proses meningkatnya berbagai konflik yang disebabkan akses terhadap sumber daya ini dan degradasi lingkungan hidup pada bab 7.

Contoh Dunia

Timur Tengah

Timur Tengah merupakan kawasan yang telah mengalami konflik yang luas pada abad XX. Meski air tidak biasanya

disebutkan sebagai penyebab konflik secara khusus, dalam kebanyakan kasus para analis percaya bahwa air melatarbelakangi konflik. Kebutuhan bangsa Israel akan air, contohnya, bisa jadi alasan yang paling kuat bagi tiadanya perdamaian jangka panjang dengan rakyat Palestina. Air adalah sumber berharga dan menjadi lebih langka ketika populasi terus bertambah. Dengan pembentukan batas-batas sungai di seluruh region dan biasanya mengalir melalui lebih dari satu negara, usaha-usaha untuk mengontrol air di satu negara (katakanlah melalui proyek dam) mungkin akan mengurangi pasokan air di negara lainnya. Masalah-masalah seperti itu memperumit hubungan Arab-Israel dan juga menyingkap perpecahan-perpecahan dalam ikatan kebangsaan Arab itu sendiri.

Perdamaian dan Keamanan

Dalam pemikiran realis, perdamaian dipandang secara negatif. Hal ini adalah untuk mengatakan bahwa perdamaian merupakan kondisi yang ditandai dengan ketiadaan perang daripada keberadaan sesuatu. Para penganut paham ini memusatkan perhatian pada kondisi-kondisi yang diperlukan untuk mencegah peperangan. Hubungan antara kekuasaan, keamanan, dan konflik sangatlah erat. Keamanan adalah sebuah kata yang digunakan dalam berbagai konteks dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai jenis pengertian yang mencakup isu-isu tentang emosi personal, atau pada mencukupi atau tidaknya sesuatu itu telah diikat atau dikencangkan ikatannya, hingga ide-ide tentang keselamatan, dan kekebalan. Bagi kaum realis, dalam Hubungan Internasional, keamanan terkait dengan negara dan sebuah negara kurang lebih akan aman pada tingkatan ketika negara tersebut bisa memastikan keberlangsungan hidupnya dalam sistem internasional. Hubungan antara perdamaian dan keamanan kemudian tidaklah sederhana.

Bagi mereka kaum realis, keamanan adalah tentang kelangsungan hidup (negara). Bagi mayoritas negara-negara yang tidak mampu menjamin keselamatan diri mereka sendiri dengan kekuatan-kekuatan militer mereka sendiri, perimbangan kekuasaan menghadirkan harapan yang cukup beralasan untuk merasa aman dalam hubungan internasional. Para kaum realis berpendapat bahwa, berbeda dengan politik domestik (di mana terdapat pemerintahan yang bertanggung jawab menegakkan hukum), dalam politik dunia tidak ada pemerintahan yang menegakkan hukum dan, sehingga, setiap negara harus menjamin keamanan mereka sendiri. Perlindungan diri sendiri di dalam kondisi seperti itu menuntut negara untuk mampu melindungi diri sendiri karena negara tersebut tidak bisa bergantung pada pertolongan negara-negara lain. Kemudian, Para pembuat kebijakan, menurut kaum realis, harus mengusahakan kekuasaan bagi negara mereka. Di sisi lain, hal tersebut akan mengundang perang dan penaklukan, seperti halnya negara-negara lain akan mengambil keuntungan dari 'kesalahan pertimbangan ini' dengan menyerang Anda. Mereka berpendapat bahwa menciptakan institusi-institusi, seperti halnya Liga Bangsa-Bangsa, dengan menganggap negara-negara tertarik untuk bekerja sama, adalah hal yang bodoh dan berpotensi gagal.

Kotak Analogi

Analogi Rusa Jantan/Kelinci

Analogi ini kadang digunakan untuk menggambarkan 'dilema keamanan' dan masalah-masalah kerja sama dalam hubungan internasional. Sekelompok pemburu primitif terisolasi di se-

buah pulau. Mereka setuju bahwa jika mereka dapat membunuh seekor rusa jantan maka mereka akan punya cukup makanan untuk diberikan pada mereka semua, tetapi untuk melakukan hal ini mereka harus bekerja sama karena perburuan itu akan membutuhkan usaha mereka semua untuk menjerat dan membunuh binatang tersebut. Mereka berangkat untuk menangkap rusa jantan. Singkat cerita, salah seorang pemburu melihat seekor kelinci, yang tentunya akan cukup untuk menghilangkan lapar seseorang. Dalam keputusannya meninggalkan perburuan rusa jantan untuk menangkap kelinci, si pemburu memastikan bahwa dia akan dapat memuaskan kebutuhannya akan makanan. Bagaimanapun, dengan membuat keputusan yang semacam itu ia akan sangat mungkin memberikan kelonggaran kepada rusa jantan melarikan diri dan anggota kelompoknya yang lain akan menderita kelaparan. Kerja sama di antara semua pemburu seharusnya akan menghasilkan solusi yang optimal hingga semua orang akan makan. Bagaimanapun, pemburu kelinci tadi menghadapi dilema karena tidak yakin benar bahwa kelompoknya tadi akan menangkap seekor rusa jantan. Lebih jauh, dia tidak bisa yakin kalau anggota kelompok yang lainnya tidak akan mengkhianati kesepakatan sebelumnya dengan malah memburu kelinci, yang jika tidak melakukannya terdapat kemungkinan ia akan kelaparan. Dalam konteks ketidakpastian, kemudian, masuk akal untuk bertindak dalam kerangka kepentingan diri sendiri. Arti dari analogi rusa jantan/kelinci ini adalah untuk menggambarkan bahwa di bawah kondisi ketidakpastian (anarki) perilaku mementingkan diri sendiri merupakan sebuah tindakan yang masuk akal (meski hal ini bukanlah pembenaran). Tragedi dari hubungan internasional adalah bahwa di bawah kondisi anarki bahkan kepentingan bersama tidak menjamin kerja sama.

Institusi dan Tatanan Dunia

Setelah memusatkan perhatian pada masalah negara, kekuasaan, konflik, dan keamanan, tidaklah mengherankan jika dalam sejarahnya, kerja sama telah menjadi fokus kedua bagi kaum realis. Secara umum, realisme cenderung

mengesampingkan wilayah-wilayah yang tidak terlalu berhubungan dengan hubungan internasional dan, sehubungan dengan ini, berpendapat bahwa kerja sama internasional itu penting hanya ketika kerja sama tersebut menguntungkan bagi negara-negara yang terlibat. Asumsi dasar realisme mencakup sebuah kepercayaan bahwa meski banyak hal yang bisa membuat kita tertarik tentang dunia, semua itu tidak seharusnya membuat kita lupa pada tampilan intinya. Dalam menyatakan bahwa dalam hubungan internasional terdapat beberapa bagian yang sifatnya tidak berubah, kaum realis tradisional selalu memisahkan antara *'high politics'* yang melingkupi kebijakan luar negeri, diplomasi, dan perang dengan *'low politics'* tentang ekonomi. Hal ini berarti bahwa *high politics* dianggap lebih penting daripada *low politics*.

Secara sekilas, maka perspektif yang berdasar pada asumsi-asumsi mengenai kedaulatan negara, pengutamaan kepentingan nasional, dan karakteristik konflik yang penuh kekerasan, tidak akan punya banyak penjelasan mengenai institusi internasional. Dalam batasan tertentu, institusi-institusi memang tidak menjadi perhatian utama dalam karya kaum realis, tetapi hal ini tidak berarti bahwa mereka tidak punya pandangan mengenai karakter dan peranan dari institusi-institusi dalam hubungan internasional. Neorealisme telah mengembangkan eksposisi yang rinci tentang karakteristik institusi-institusi seperti IMF (*International Monetary Fund*) dan Bank Dunia(*World Bank*). Kaum realis tidak menafikan PBB atau Uni Eropa, sama halnya mereka juga tidak menyangkal bahwa secara terbatas kerja sama itu memang terjadi dan bahwa institusi-institusi internasional mungkin memfasilitasi kerja sama ini dalam beberapa hal.

Kotak Penulis

Hedley Bull

Hedley Bull berpendapat bahwa organisasi-organisasi supra-nasional seperti Uni Eropa bisa dianggap sebagai 'negara-negara yang sedang menunggu'. Dengan kata lain, mereka mungkin memperoleh identitas atas diri mereka seperti mereka menjadi tempat bertumpunya loyalitas tertinggi dari warga negara mereka. Dalam pengertian seperti itu, meski negara-negara yang kini ada di Eropa, misalnya seperti Jerman atau Prancis, hanya menjadi wilayah dari negara-bangsa Eropa, aturan-aturan atau logika mendasar dari HI tetap tidak berubah.

Namun, kaum realis tidak pernah melupakan pentingnya negara sebagai aktor utama dalam politik dunia. Mereka percaya bahwa negara-negara hanya bergabung ke dalam institusi-institusi internasional dan terlibat ke dalam kesepakatan-kesepakatan kerja sama ketika hal tersebut cocok bagi negara-negara tersebut. Sehingga kesepakatan seperti kesepakatan aliansi atau kerja sama bisa dilanggar atau diingkari, jika dan ketika kesepakatan tersebut bertentangan dengan kepentingan nasional, semudah seorang pemburu, dalam analogi seperti di dalam kotak, meninggalkan pengejarannya terhadap seekor rusa agar dapat menangkap seekor kelinci. Hal yang paling penting adalah, bagi kaum realis, bahwa institusi-institusi internasional itu penting hanya pada tahapan institusi-institusi tersebut mengarahkan negara-negara untuk mengejar kepentingan-kepentingan mereka.

Konon, salah satu perbedaan yang paling penting antara realisme klasik dengan neo-realisme adalah bahwa neo-realisme telah mengembangkan analisis yang lebih

mendalam tentang kerja sama dan peranan institusi-institusi dalam hubungan internasional, terutama menyangkut pemerintahan dalam perekonomian global. Jika benar bahwa interdependensi ekonomi antar-negara kian meluas dan kompleks, bagaimana kegiatan perekonomian yang melintasi batas-batas negara bisa dikoordinasi secara efektif? Lebih-lebih, bagaimana tatanan internasional dan perekonomian dapat dikontrol dengan ketiadaan pemerintahan?Titik tolak kaum realis dalam menjawab permasalahan ini terasa cukup ortodoks: masalah-masalah yang dihasilkan oleh sistem internasional yang benar-benar anarkis. Meskipun begitu, neo-realis juga mengadopsi teori-teori ekonomi liberal klasik yang menyarankan bahwa pada tahapan tertentu pemerintahan itu diperlukan untuk mengarahkan berlangsungnya perdagangan bebas dan pertumbuhan yang dinamis. Para teoretisi ekonomi klasik mengakui bahwa negara mempunyai peran penting dan diperlukan, tetapi harus tetap dijaga seminimum mungkin. Usaha-usaha untuk memadukan analisis tentang pertumbuhan dan perluasan perekonomian internasional yang liberal dengan analisis mencari manifestasi kekuasaan yang berlangsung dalam sistem negara internasional, menghasilkan versi revisi realisme —yaitu neo-realisme.

Dengan meningkatnya ketertarikan terhadap semua hal yang terkait dengan perekonomian ini akhirnya mendorong munculnya Ekonomi Politik Internasional (EPI) sebagai sebuah sub-disiplin yang tersendiri dalam domain Hubungan Internasional yang lebih luas sebagaimana para sarjana HI berusaha memahami dan mengatasi makin kompleksnya berbagai bentuk interdependensi makin banyaknya institusi-institusi dan rezim guna mengatur pertukaran ekonomi

internasional. Konsep inti IPE neo-realis adalah hegemoni, kata yang berasal dari bahasa Yunani untuk 'dominasi' atau 'kepemimpinan'. Kaum realis memandang peperangan sebagai usaha dari berbagai negara untuk mengukuhkan dominasi hegemoni. Kaum neo-realisme selalu menyebutkan dua fase utama dominasi hegemoni (*pax-Britania* dan *pax-Americana*) yang menguraikan periode dominasi Inggris atas perekonomian global pada abad XIX dan awal abad XX serta dominasi Amerika Serikat pada masa setelah Perang Dunia II.

Neo-realisme menggabungkan beberapa ide kaum realis yang cukup tradisional mengenai kekuasaan dan sentralitas negara dalam hubungan internasional, dengan ide-ide kaum liberal tentang rasionalitas dan kerja sama ekonomi. Uraian yang lebih rinci tentang persamaan dan perbedaan antara kaum neo-realis dan neo-liberal tentang pemerintahan akan dibahas pada bab berikutnya. Pada bagian ini kita akan lebih memusatkan perhatian pada cara para kaum neo-realis mengembangkan pandangan tentang pemerintahan berdasarkan analisis peran yang dimainkan oleh negara-negara dominan dalam mempertahankan tatanan ekonomi internasional.

Kaum neo-realis telah menemukan konsep hegemoni yang sangat bermanfaat dalam menjelaskan mekanisme perekonomian internasional yang berdasar utamanya pada prinsip-prinsip liberal dan praktik-praktik ekonomi liberal bisa diterapkan secara efektif dalam dunia yang di dalamnya otoritas politik dimiliki secara sah oleh negara-bangsa. Dalam kosongnya 'pelayanan publik' internasional yang akan mengarahkan perekonomian internasional berjalan lancar, konsep hegemoni digunakan untuk menjelaskan perlunya semacam regulasi atau pemerintahan.

Kaum neo-realis percaya bahwa negara-negara bertujuan untuk memaksimalkan kekayaan, dan cara terbaik untuk meraihnya adalah dengan menjamin perekonomian internasional pasar-bebas yang sangat liberal. Dengan berpura-pura memusatkan perhatian dalam memahami interkoneksi antara ekonomi dan politik, kaum neo-realis terus mendekat pada penekanan neo-realisme atas 'kepentingan diri sendiri'. Hal ini mempunyai konsekuensi-konsekuensi tertentu. Misalnya, meskipun para sarjana menjadi lebih tertarik pada kegiatan-kegiatan perusahaan-perusahaan multinasional (MNCs), namun MNCs tidak dianggap sebagai aktor independen atau otonom dalam perekonomian internasional, tetapi lebih dilihat sebagai perpanjangan tangan negara atau alat kebijakan luar negeri. Keberadaan MNCs, kemudian, tidak menjadi kekuatan yang signifikan secara ekonomi dan politik menurut hak diri mereka sendiri, tetapi sebagai ukuran dan refleksi dari kekuasaan dan —mungkin— dari negara-negara tertentu.

Kotak Refleksi

Banyak analisis Ekonomi Politik Internasional (EPI) yang realis telah dijadikan kerangka dalam pengertian AS dan dominasi AS atas sistem internasional. menurut Anda tepatkah untuk memandang MNCs sebagai sebuah kepanjangan tangan dari kekuasaan Negara? Apa pengaruh-pengaruh dalam melihat dunia dari perspektif negara-negara dominan?

Mungkin sumbangan terbesar neo-realisme bagi studi ekonomi politik internasional adalah teori stabilitas hegemonis, yang ide awalnya dikembangkan oleh Charles Kindleberger pada 1973 yang mencoba menjelaskan keruntuhan tatanan moneter internasional. Teori stabilitas

hegemonis menyatakan bahwa selalu ada kecenderungan untuk 'tidak stabil' dalam sistem internasional, namun hal ini bisa dicegah jika negara 'dominan' memainkan peran kepemimpinan atau hegemonis. Peran ini mencakup penciptaan dan pembentukan sistem aturan yang memberikan dasar hukum bagi tatanan dan kerja sama internasional di bawah kondisi-kondisi anarki. Dengan cara ini nilai-nilai dan norma-norma liberal bisa dipelihara dan diterapkan. Para 'Hegemon' tersebut mampu mengontrol keuangan, perdagangan dan sebagainya. Sistem Bretton Woods yang meliputi *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD), dan *International Monetary Fund* (IMF) memberikan sebuah sistem tentang aturan-aturan, nilai-nilai, dan norma-norma, yang secara umum berdasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi liberal (lihat bab 2).

Kotak Penulis

Robert Gilpin

Robert Gilpin, mungkin seorang sarjana EPI neo-realis paling besar, mengembangkan sebuah analisis mengenai hegemoni AS yang berpijak pada premis bahwa ada hubungan langsung antara kekuasaan AS dengan stabilitas tatanan ekonomi internasional. Sistem Bretton Woods akhirnya jatuh karena kemunduran dari kekuasaan dan pengaruh AS, kemunduran yang tercermin dalam pergantian ke rezim nilai tukar mengambang (nilai tukar sebuah mata uang yang ditentukan oleh mekanisme pasar —Peny.) tahun 1971. AS tidak bisa lebih lama lagi menjaga mata uangnya yang pada takaran nilai yang relatif tinggi terhadap nilai mata uang perekonomian pesaingnya. Gilpin berpendapat bahwa realitas ekonomi pada akhirnya menghasilkan suatu penyesuaian dalam sistem, sehingga AS pada akhirnya

akan mundur dari komitmennya pada multilateralisme sistem Bretton Woods sebagai kebijakan luar negeri AS yang disesuaikan dengan realitas-realitas perekonomian yang keras. Hal ini membawa pengaruh-pengaruh nyata bagi stabilitas tatanan perekonomian dan politik internasional.

Identitas dan Komunitas

Kaum realis berpendapat bahwa seseorang memahami identitasnya, yang pertama kali dan terutama, adalah dengan negara-bangsanya. Artinya, kebanyakan orang-orang lebih melihat diri mereka sendiri sebagai orang Inggris atau orang Prancis atau orang Kanada, daripada sebagai bagian dari 'ras manusia' atau suatu 'komunitas internasional' yang abstrak. Bagi kaum realis, komunitas yang paling signifikan dalam hubungan internasional hanyalah negara-bangsa. Negara juga ada untuk menjadi nilai moral, karena negara adalah bentuk komunitas politik paling baik yang telah ditemukan oleh ras manusia. Ada satu pengertian yang kuat dalam karya-karya kaum realis, bahwa berbagai isu keamanan nasional, terutama pada saat perang, memberikan satu pengertian dari tujuan politik yang sama. Dengan demikian, pembicaraan tentang kepentingan nasional yang terpenting yang menentukan tingkah laku negara terutama dalam hubungan-hubungannya dengan 'pihak asing' merupakan hal yang sangat penting. Negara harus memusatkan perhatian, pertama dan terutama, pada keamanan nasional karena fokus kebanyakan negara adalah kekuatan militer.

Kesenjangan dan Keadilan

Alasan-alasan kaum realis sering kali menekankan bahaya yang terkandung dalam tindakan untuk tidak ber-

sedia menerima hal yang kita tidak bisa ubah. Misalnya, mereka melihat bahaya-bahaya besar bagi sistem internasional dalam penekanan mereka terhadap permasalahan keadilan sosial dan hak asasi manusia. Kaum realis menekankan prinsip kedaulatan sebagai batu pertama dari sistem internasional. Kita sudah membahas secara garis besar kritik-kritik mereka tentang hukum internasional dan masalah-masalah yang mengarah pada hubungan-hubungan antar-negara-negara berdasarkan prinsip-prinsip moral dan tidak akan membicarakannya lagi. Kedaulatan memberikan yurisdiksi eksklusif terhadap suatu wilayah dan rakyat. Campur tangan dalam urusan-urusan negara-negara lain akan berisiko merusak independensi kedaulatan dan otonomi negara-negara lain. Untuk alasan ini, kaum realis juga berpendapat bahwa negara-negara tidak punya alasan untuk memberikan komentar atau mengkritik tatanan politik domestik, sosial, dan ekonomi negara-negara lain. Negara-negara relatif berdiam diri mengenai hak-hak kewarganegaraan dari negara lain dan sudah seharusnya bertindak seperti itu. Jika semua isu seperti itu diurusi oleh semua negara, dengan kata lain jika kedaulatan internal tidak diterima, ketidakstabilan yang berskala besar mungkin akan terjadi jika negara-negara ikut campur urusan-urusan negara-negara lainnya. Dengan kata lain, menutup mata adalah juga tindakan yang sama buruknya. Dengan demikian, kita mungkin keberatan dengan otoritarianisme di Burma, komunisme di Cina, atau hukuman mati di Amerika Serikat tetapi, pada akhirnya, kita tidak punya 'hak', baik secara politik ataupun moral, untuk menghukum tindakan-tindakan negara-negara lain terhadap rakyat mereka sendiri. Tentu saja, pada akhirnya hal ini bisa mengarah pada konflik internasional.

Jika pada awalnya kaum realis terlihat memberikan lampu hijau pada kediktatoran dan penindasan, mereka mungkin beralasan dalam pembelaannya bahwa prinsip kedaulatan melindungi 'si lemah' dalam beberapa hal. Apa pun realitas kekuasaan dan pengaruh dalam sistem internasional, kedaulatan sedikitnya menjamin suatu persamaan formal tertentu di antara negara-negara yang ada. Sebaliknya, para sarjana Mazhab *English* yang mendukung konsepsi tentang masyarakat internasional atau masyarakat dari berbagai negara menunjukkan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia sedang menjadi norma yang diterima dalam masyarakat internasional dan mungkin, dalam kasus-kasus tertentu, membentuk dasar bagi 'intervensi'. Secara umum, sah-sah saja jika dikatakan bahwa kebanyakan kaum realis mengikuti pandangan tentang kedaulatan sebagai fondasi dari sistem internasional dan juga menekankan prinsip yurisdiksi domestik dan non-intervensi ke dalam berbagai urusan domestik dari negara-negara lain.

Kaum realis bukan tidak menyadari isu-isu mengenai kesenjangan sosial dan ekonomi serta ketidakadilan. Namun, mereka lebih menerima dunia seperti apa adanya daripada mencoba untuk mengubahnya. Mereka percaya bahwa tujuan-tujuan tertentu bagi pemberantasan kemiskinan oleh aparat pemerintahan dunia, misalnya, mengandung di dalamnya benih-benih bencana atau secara sederhana merupakan hal yang tidak mungkin terjadi.

Kesimpulan

1. Realisme merupakan salah satu perspektif dalam Hubungan Internasional.

2. Realisme merupakan suatu nama yang ditujukan pada aliran pemikiran tertentu. Namun, di dalamnya terdapat paham-paham yang berbeda.
3. Realisme sering kali diidentikkan dengan sesuatu seperti 'Politik Kekuasaan', pendekatan Hobbesian pada Hubungan Internasional atau 'Model Bola Biliar'.
4. Realisme berkembang dalam Hubungan Internasional sebagai penolakan atas idealisme pada periode pasca-Perang Dunia II.
5. Akar intelektual realisme merujuk pada pemikiran di masa jauh lebih ke belakang lagi. Realisme mendasari pandangannya dengan mengacu pada serangkaian penulis dan peristiwa beberapa milenium ke belakang.
6. Realisme adalah suatu nama yang diberikan pada seperangkat asumsi tertentu tentang hubungan internasional yang menekankan pentingnya negara-negara, yang didorong oleh kepentingan nasional dan digerakkan oleh kekuasaan.
7. Realisme tidak mengklaim menjelaskan semua aspek dalam hubungan internasional. Realisme bertujuan untuk menangkap esensi dari satu aspek khusus dunia —misalnya politik kekuasaan.
8. Realisme mengklaim menjelaskan sebuah dunia yang tidak mungkin diubah dan mengarahkan kita tentang cara 'bertahan' dalam dunia tersebut.
9. Dengan demikian, realisme mengklaim berdasarkan pada 'kebenaran-kebenaran' mendasar tertentu mengenai kondisi manusia.
10. Kaum realis membuat pemisahan yang jelas antara wilayah 'domestik' dan 'internasional'.

11. Neo-realisme muncul sebagai tanggapan terhadap kebutuhan untuk menjelaskan karakteristik hubungan internasional yang makin interdependen; suatu interdependensi yang sebagian besar digerakkan oleh perkembangan dalam perekonomian internasional.
12. Tema-tema utama dalam realisme adalah negara dan kekuasaan, konflik serta keamanan. Belum lama ini, kaum neo-realis telah memberikan beberapa kontribusi pada pemahaman kita tentang karakteristik dan tujuan dari institusi-institusi internasional dan proses-proses pemerintahan.

Kritik

Menurut sejarah, realisme telah menjadi tradisi yang dominan dalam Hubungan Internasional dan, barangkali karena alasan tersebut, realisme telah menjadi sasaran dari begitu banyak kritik. Liberalisme dan strukturalisme keduanya dapat digunakan untuk mengembangkan suatu kritik terhadap realisme. Beberapa periode lalu, realisme juga telah menjadi sasaran sekian banyak kritik dari berbagai teoretisi kritis, posmodernis, feminis, dan kelompok '*Green*'. Hal ini terlihat dalam buku ini di bab 4-7 dan bab mengenai realisme ini akan sangat berguna untuk dikaji ulang setelah apresiasi terhadap pemahaman 'teori-teori' kritis tadi sepenuhnya telah dipahami dan diasimilasikan. Beberapa kritik tajam terhadap realisme dan neo-realisme membahas kerangka epistemologis dan ontologis yang mendasarinya. Hal ini merupakan bahasa teori yang sulit dan dengan demikian, sangatlah pas untuk mampir ke perdebatan ini dalam bab penutup buku ini. Pada tahap ini, bagaimanapun juga,

kita bisa mempertimbangkan beberapa kekurangan atau kelemahan dari pendekatan realisme.

Pertama, fakta bahwa realisme itu sederhana dan mudah dipahami dihadirkan sebagai satu kekuatan dari perspektif ini. Bagaimanapun, salah satu pendapat yang bertentangan akan menyatakan bahwa realisme itu terlalu sederhana, mengurangi realitas dunia perpolitikan yang kompleks menjadi sejumlah kecil hukum-hukum umum yang katakanlah mampu dipakai sepanjang ruang dan waktu dan dengan demikian menghilangkan banyak di antara perhatian dan sejumlah nilai penting dari analisis kita.

Kedua, realisme —dalam menekankan prinsip politik kekuasaan dan ciri-ciri sistem internasional yang masih bertahan hingga kini— gagal memberikan kesempatan bagi kemungkinan perubahan yang nyata. Kaum realis menyatakan bahwa 'negara-negara adikuasa muncul dan tumbang, peperangan datang dan berhenti, tetapi aturan-aturan dasar permainan tidak bisa berubah. Dalam kegagalannya memasukkan ide-ide perubahan–perubahan yang substantif, maka realisme itu sebenarnya bersifat konservatif dan antipembaruan, yang berarti bahwa realisme sangatlah menarik bagi —dan secara politik gampang dibentuk atau dipengaruhi oleh—orang-orang yang ingin membiarkan segala sesuatunya berlanjut seperti apa adanya (para pendukung status-quo —Peny.).

Ketiga, meski kaum realisme mempunyai pandangan sejarah yang berputar (pengulangan pola tingkah laku), realisme telah gagal membuat prediksi-prediksi khusus apa pun. Kebanyakan kaum realis gagal dalam hal memperkirakan akhir dari Perang Dingin; setelah mengetahui kepura-puraannya untuk menjadi —jika tidak ilmiah, mini-

mal berguna—, kegagalan tersebut merupakan suatu kelemahan yang sangat serius. Realisme tidak membantu kita dalam menjelaskan keputusan-keputusan paling tepat yang semestinya diambil oleh para perwakilan negara, tetapi hanya pada alasan mendasar keputusan-keputusan itu akan dibuat. Jadi, rakyat-negara akan membuat keputusan-keputusan secara rasional dan berdasarkan hanya pada kepentingan nasional. Bagaimanapun, kita tahu apakah menyerang Negara B merupakan kepentingan nasional Negara A? Mungkin justru akan lebih membantu kepentingan nasional jika A menunda menyerang B atau mencari suatu aliansi dengan Negara C. Apakah kepentingan nasional itu sesuatu yang jelas dengan sendirinya? Setelah kejadian, Negara A menyerang Negara B, kaum realis bisa mengatakan bahwa penyerangan Negara A itu berdasarkan pada perhitungan rasional yang berdasar atas kepentingan nasional (bahkan jika nantinya Negara A dihancurkan oleh senjata nuklir rahasia Negara B), tetapi kaum realis tidak memberikan cara dalam memutuskan pilihan mana yang sebenarnya merupakan kepentingan nasional dan dengan mudah mengatakan pada kita bahwa motivasi penyerangan (peperangan) tersebut.

Keempat, jika kita menerima kemungkinan bahwa asumsi-asumsi realisme itu relevan hanya pada konteks tertentu, maka besar sekali bahayanya ketika kita menganggap asumsi-asumsi tersebut sebagai kebenaran universal, dengan kata lain, dapat diterapkan kapan pun dan di mana pun. Jauh dari memberikan kebenaran universal, realisme sebenarnya terlihat sebagai cara yang paling tepat dalam memandang satu fase sejarah yang singkat; ide tentang kebenaran universal mungkin harus menghambat ilmu

pengetahuan yang akan membawa kita terbebas dari keputusasaan kaum realis.

Kelima, dalam menekankan sentralitas negara dan kepentingan nasional, realisme mendorong orang-orang untuk melihat dunia dari perspektif etnosentris yang sangat dangkal.

Keenam, realisme mengabaikan atau menyepelekan pentingnya tahapan yang mungkin dibutuhkan oleh negara-negara untuk menyalurkan kepentingan-kepentingan kolektif atau timbal balik, dan juga begitu meremehkan lingkup untuk kerja sama dan perubahan yang menentukan dalam hubungan internasional.

Ketujuh, kita harus mempertanyakan rasional atau tidaknya kebijakan luar negeri diarahkan dan hal yang secara tidak langsung dinyatakan dalam ide rasionalitas. Rasionalitas tampaknya tidak mungkin sama bagi para pemimpin dari negara-negara dengan dasar ideologi dan agama yang kuat dengan para pemimpin dari negara demokrasi liberal. Lebih lanjut, bahkan di dalam negara-negara demokrasi liberal, misalnya, bisakah kita yakin bahwa dalam dunia yang penuh hiruk-pikuk kebijakan luar negeri, keputusan-keputusan selalu dibuat secara rasional? Para pembuat keputusan mungkin dibanjiri dengan berbagai macam informasi, tidak tidur, dan diminta untuk membuat beberapa pilihan pada saat yang bersamaan; setidaknya ada banyak kemungkinan bahwa rasionalitas akan dikompromikan, dipengaruhi oleh *mood,* dimodifikasi oleh keputusan yang spontan, dan sebagainya.

Kedelapan, asal usul realisme modern barangkali telah dibaca secara selektif atau diinterpretasikan secara bias. Karena orang cenderung menyukai berbicara dalam hubungan dengan statistik, jika Anda memilih bukti Anda

dengan cukup teliti terdapat suatu kemungkinan bagi Anda untuk membuktikan hampir segala sesuatunya. Kita bisa secara sederhana memerhatikan dalam tahap ini suatu pemilihan tertentu dalam rujukan sejarah realisme.

Meski dalam bentuknya yang disederhanakan realisme dapat menghadirkan diri sebagai suatu target berbagai kritik, musuh-musuh realisme, yang berhasrat untuk membuka cacat-cacatnya, sering kesulitan untuk melakukannya! Modifikasi-modifikasi realisme telah diusulkan oleh berbagai penulis dan muncul banyak sekali perbedaan dalam kategorian realis yang cukup luas. Lebih-lebih, kaum realis mengakui bahwa dunia itu berubah dan menyadari adanya ancaman-ancaman ekologi, isu-isu gender, dan sebagainya. Bagaimanapun, dan penting sekali, kaum realis memercayai bahwa asumsi-asumsi dasar mereka menangkap esensi hubungan internasional yang sebenar-benarnya, sehingga mereka berpendapat bahwa mereka diberi keistimewaan untuk menguasai beberapa area dan isu dalam kajian hubungan internasional, dan tentu saja, meminggirkan perspektif lainnya. Meski hal ini sering diperdebatkan, seperti apakah buku-buku dan wacana-wacana harus dimulai dengan realisme, atau bahkan membahas tentang realisme dalam pemahaman bahwa aliran pemikiran ini ketinggalan zaman, amoral, dan sebagainya, namun akan sangatlah sulit untuk meruntuhkan dekade penuh dominasi oleh realisme dalam disiplin hubungan internasional dan kecenderungan menganggap realisme sebagai suatu titik awal yang alami, bahkan bagi mereka yang bersemangat mengkritik realisme atau menawarkan kerangka kerja analisis yang lebih tepat. Lebih jauh, ketika realisme mungkin diserang dari segala sisi dalam lingkaran akademis, namun realisme terus men-

dapat persetujuan atau dukungan di antara para pembuat keputusan dan pejabat negara, dan dengan demikian, secara implisit realisme terdapat di dalam rasionalisasi kebijakan yang ditawarkan oleh para pembuat keputusan kebijakan luar negeri. Kami telah memilih realisme sebagai titik awal dengan alasan sederhana, yakni realisme telah memberikan latar belakang bagi sekian banyak bahasan dalam teori Hubungan Internasional. Pada suatu tingkatan hal ini sejalan dengan komentar pembuka kita tentang kelaziman realisme dan tingkatan di mana realisme telah menjadi pijakan awal dari berbagai teori internasional yang kritis.

Kesalahpahaman Umum

Aliran pemikiran ini disebut Realisme karena ia realistis. Beberapa dari Anda mungkin menganggap bahwa 'realisme' dalam Hubungan Internasional sebagai hal yang sangat *tidak* realistis. Para pendukung realisme jelas menganggap realisme sebagai suatu penjelasan yang realistis tentang dinamika dunia tempat kita tinggal dan sebutan tersebut merepresentasikan keuntungan yang tidak adil dalam hal reaksi awal para mahasiswa terhadap realisme. Bagaimanapun, 'realisme' sebaiknya dianggap hanya sebagai sebuah nama dari suatu cara-pikir tertentu tentang dunia; sebuah sebutan yang dipahami mengandung asumsi-asumsi dasar tertentu. Andalah yang kemudian memutuskan realistis atau tidaknya aliran pemikiran ini.

Kaum Realis mengabaikan begitu banyak hal. Sekali Anda memahami asumsi-asumsi dasar realisme dan hal yang dianggapnya penting dalam hubungan internasional, Anda mungkin menyimpulkan bahwa realisme gagal mengalamatkan beberapa isu yang krusial. Degradasi lingkungan

hidup, penganiayaan, perkosaan, dan berbagai isu lainnya diabaikan oleh orang realis karena aliran ini memusatkan perhatian pada negara, kepentingan negara, dan kekuasaan militer. Kaum realis sebenarnya bukanlah tidak peduli dalam pengertian ini, mereka tidak menyangkal keberadaan aktor-aktor, kepentingan-kepentingan, dan isu-isu lainnya. Bagaimanapun, mereka menyatakan agar HI seharusnya lebih memfokuskan diri pada berbagai aspek yang benar-benar krusial dalam hubungan internasional, sehingga membatasi wilayah analisis mereka sebagai upaya untuk memahami secara lebih baik hal yang benar-benar vital dalam hubungan internasional.

Kaum realis adalah orang-orang keji. Dari paparan di atas mungkin terlihat bahwa kaum realis adalah orang-orang yang tak berperasaan yang tidak peduli dengan kelaparan, penindasan, sepanjang keberlangsungan sistem internasional tetap berjalan dan peperangan dapat dimengerti dan —barangkali— dibatasi atau dikontrol sebisa mungkin. Meski kita yakin bahwa kaum realis yang keji itu ada, tidaklah kemudian menyebabkannya benar. Beberapa kaum realis sebenarnya hanya pesimis tentang karakteristik manusia atau sistem negara internasional dalam pandangannya bahwa perspektif-perspektif lain utopis belaka. Sebagai akibatnya, mereka berpendapat bahwa apa yang kita inginkan tidaklah sama dengan apa yang kita dapatkan.

Realisme struktural sama dengan strukturalisme. Tidak. Realisme struktural tidak terkait dengan strukturalisme, kecuali sejauh keduanya memusatkan perhatian pada ide 'struktur' sebagai hal yang krusial dalam hubungan internasional. Bagaimanapun, bagi kaum realis struktural, ketertarikan mereka terletak pada struktur dari sistem antar-

negara dan struktur yang memaksa tingkah laku negara, yang menekan negara-negara untuk bertindak dengan cara-cara tertentu.

Anarki berarti chaos. Bagi para mahasiswa yang dewasa di era 'punk', pertengahan dan akhir 1970-an, pemikiran seperti ini dapat dipahami. Bagaimanapun, anarki sebenarnya berarti ketiadaan pemerintahan, suatu situasi yang menjadi karakter hubungan internasional ketika tidak ada pemerintahan dunia. Jadi, negara-negara eksis dalam keadaan anarki. Meski demikian, dengan keberadaan hukum internasional tidak berarti bahwa tatanan pemerintah sepenuhnya tidak ada; inilah salah satu alasan penting mengapa beberapa penulis membicarakan tentang 'masyarakat anarkis'. ✦

Bacaan Lebih Lanjut

Anda barangkali akan ingin atau perlu untuk membaca buku lain yang direkomendasikan oleh para tutor yang bisa didapatkan di toko buku. Namun, penting pula bagi Anda untuk membaca karya-karya dasar klasik yang melatarbelakangi Aliran Realisme. Buku-buku berikut merupakan buku yang paling penting dan Anda disarankan untuk membacanya.

Aron, R. (1966), *Peace and War: A Theory of International Relations,* London: Weidenfeld and Nicolson.

Beard, C. (1966), *The Idea of National Interest: An Analytical Study in American Foreign Policy,* Chicago: Quadrangle.

Bull, H. (1977), *The Anarchical Society: A Study of World Order in Politics,* Basingstoke: Macmillan.

Carr, E.H. (1946), *The Twenty Year's Crisis 1919-1939: An Introduction to the Study of International Relations,* London: Macmillan.

Clausewitz, C.Von (1943), *On War,* Modern Library Education.

Herz, J. (1951), *Political Realism and Political Idealism,* Chicago: University of Chicago Press.

Hobbes, T. (1904), *Leviathan* (disunting oleh A.R. Waller), Cambridge: Cambridge University Press.

Keohane, R. (1986), *Neorealism and Its Critics,* New York: Columbia University Press.

Lippman, W. (1943), *US Foreign Policy,* Boston: Little, Brown and Company.

Machiavelli, N. (1988), *The Prince* (disunting oleh Q. Skinner), Cambridge: Cambridge University Press.

Morgenthau, H. (1978), *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace,* New York: Knopf.

Niebuhr, R. (1932), *Moral Man and Immoral Society,* New York: Charles Scribner's Sons.

Niebuhr, R. (1953), *Christian Realisme and Political Problems,* New York: Charles Scribner's Sons.

Sassoon, S. (1918), 'Attack' from *Collected Poems of Siegfried Sassoon,* London/New York: Viking Penguin.

Schelling, T. (1960), *The Strategy of Conflict,* Cambridge, MA: Harvard University Press.

Spykman, N. (1942), *America's Strategy in World Politics: The United States and the Balance of Power,* New York: Harcourt, Brace and Company.

Thucydides (1988), *The Peloponnesian War,* (terjemahan yang baru oleh W. Blanco, dan disunting oleh W. Blanco dan J. Tolbert Roberts), New York: Norton.

Waltz, K. (1959), *Man, the State and War: A Theoretical Analysis,* London: Colombia University Press.

Waltz, K. (1979), *Theory of International Politics,* Reading, MA: Addison-Wesley.

Wight, M. (1979), *Power Politics,* Harmondsworth: Pelican.

Wolfers, A. (1962), *Discord and Collaboration: Essays on International Politics,* Baltimore: John Hopkin Press.

—✦✦—

Bab 2 Liberalisme

Pendahuluan

Terdapat tradisi panjang dalam pemikiran liberal tentang karakteristik hubungan internasional. Pada abad XVIII dan XIX, para filsuf dan pemikir politik berdebat tentang berbagai masalah demi menetapkan aturan hubungan antarperson yang adil, teratur, dan damai. Salah satu penjelasan yang paling sistematis dan mendalam tentang masalah perdamaian dunia dibahas oleh Filsuf Jerman, Immanuel Kant pada 1795 dalam sebuah esai yang berjudul *Perpetual Peace* (perdamaian abadi). Pemikiran Kantian sangat berpengaruh dalam perkembangan dari hal yang sekarang kita kenal sebagai teori liberal (lihat kotak).

Kotak Penulis

Immanuel Kant

Berawal dari premis bahwa sistem internasional merupakan sesuatu yang berhubungan erat dengan suatu *'state of nature'* internasional (kondisi kemanusiaan tanpa atau sebelum pemerintahan —Peny.), Kant berpendapat bahwa cara satu-satu-

nya agar situasi ini bisa diatasi adalah menemukan sebuah 'perdamaian negara'. Kant tidak membayangkan pembentukan pemerintahan dunia atau bahkan menyatukan kedaulatan, tetapi lebih kepada sebuah federasi yang lebih 'longgar' terdiri dari negara-negara bebas yang diperintah oleh aturan hukum. Dia tidak melihat situasi ini terwujud secara kebetulan saja atau dengan cepat. Meski penerapan pemikiran Kantian dalam hubungan internasional telah dinyatakan sebagai sesuatu yang 'utopis', namun penting untuk dicatat bahwa Kant mengakui bahwa guna mencapai sebuah tatanan dunia yang adil, diperlukan kondisi-kondisi tertentu, termasuk pendirian-pendirian republik, sebagai lawan dari monarki atau kediktatoran dan, mungkin, sebuah komitmen universal yang dekat dengan demokrasi liberal. Tentu saja, Kant menyatakan bahwa hanya negara-negara sipil, yaitu negara-negara yang telah diperintah oleh sebuah sistem hukum dan yang para warga negaranya merasa menjadi warga negara yang bebas daripada sekadar menjadi subjek, yang akan merasa terdorong untuk meninggalkan negara yang tanpa hukum yang mengarakterisasikan *state of nature* internasional. Terdapat beberapa perdebatan mengenai cara Kant memandang hubungan antara republik dan bentuk-bentuk pemerintahan lainnya. Bagaimanapun, Kant sering kali ditafsirkan sebagai seseorang yang menyatakan bahwa di negara-negara yang pendukungnya tidak merasa menjadi warga negara bebas, tetapi berada di bawah aturan seorang raja, atau seorang diktator, maka mereka lebih cenderung agresif dan pecinta perang. Jika kasusnya seperti ini, secara logika ia mengikuti premis bahwa suatu federasi dunia hanya mungkin dicapai ketika semua negara itu republik.

Berbagai solusi terhadap masalah perang tidak terjawab, bahkan oleh para pemikir terkenal sekalipun. Pada abad XIX, para sarjana cukup puas dengan hanya menjelaskan peristiwa-peristiwa sejarah dan studi tentang urusan-urusan internasional umumnya terbatas pada bidang sejarah diplomasi. Dengan meletusnya Perang Dunia I, kebutuhan untuk menemukan cara-cara guna mencegah

konflik terlihat semakin penting daripada sebelumnya. Pembantaian yang kejam yang menandai konflik ini melahirkan determinasi baru bahwa logika harus lebih dipilih dari emosi. Serombongan sarjana Hubungan Internasional generasi baru sangat tertarik terhadap konsepsi yang mendukung hubungan kerja sama di antara negara-negara dan mengarah pada realisasi suatu tatanan yang adil, seperti berdirinya Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Meluasnya sentimen anti-perang pada saat itu, terlihat memberikan dukungan publik luas yang diperlukan bagi keberhasilan institusi seperti itu.

Idealisme kemudian mendominasi studi akademis Hubungan Internasional antara Perang Dunia I dan II. Bagaimanapun, keyakinan dasar idealisme tentang potensi kebaikan umat manusia —suatu pandangan positif terhadap karakteristik manusia— hancur karena tindakan agresif dari Jerman, Italia dan Jepang pada 1930-an yang mencemooh otoritas LBB, seolah-olah tanpa berpikir panjang dan tanpa memerhatikan masalah legalitas atau 'hak' moral.

Setelah Perang Dunia II, idealisme meredup untuk waktu yang cukup lama. Akan tetapi, pada 1970-an, generasi baru para sarjana liberal —yang disebut kaum pluralis liberal karena alasan-alasan yang akan dibahas nanti— mulai membuat serangan-serangan terhadap dominasi realisme dalam HI. Perkembangan yang cepat dalam teknologi, pertumbuhan organisasi-organisasi seperti Komunitas Eropa, dan pengaruh dari berbagai peristiwa seperti krisis minyak 1973 semua itu membuktikan tumbuhnya interdependensi dalam hubungan internasional. Pada 1970-an juga muncul salah satu literatur kaum liberal tentang hubungan 'transnasional' dan 'masyarakat dunia'. Literatur-literatur ini membuat terobosan yang signifikan terhadap pemisahan-pemisahan

karakteristik yang kaku, seperti *inside/outside* (baca: pihak dalam/pihak luar), domestik/internasional yang dipraktikkan Realisme. Lebih lanjut, kaum pluralis liberal menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan dari perusahaan-perusahaan multinasional (MNCs), *NGOs* (LSM), dan *pressure groups* (sekelompok orang yang bekerja sama memengaruhi pemikiran pemerintah atau pihak berwenang guna mencapai hasil yang mereka inginkan —Peny.) sebagai bukti bahwa negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor penting dalam hubungan internasional. Kaum pluralis liberal percaya bahwa kekuasaan dan pengaruh dalam politik dunia kini dijalankan oleh serangkaian aktor. Lebih lanjut lagi, pada waktu itu konflik tidaklah lagi merupakan proses utama dalam hubungan internasional sebagaimana, semakin meningkatnya, kerja sama dalam mengejar kepentingan-kepentingan bersama, merupakan ciri utama politik dunia. Di tahun-tahun selanjutnya, kaum liberal telah memberikan kontribusi penting bagi studi hubungan internasional dalam wilayah tatanan internasional, institusi-institusi, hak asasi manusia, studi keadilan dan perdamaian.

Pada bab ini, kami ingin menyoroti berbagai cara yang telah diberikan oleh pemikiran liberal kontribusinya pada Hubungan Internasional, namun sebelumnya diperlukan sedikit kualifikasi dan klarifikasi. *Pertama,* Liberalisme seharusnya tidak disalahpahami begitu saja dengan idealisme. Dalam pengertian sehari-hari, istilah *kaum idealis* sering kali digunakan dalam pengertian negatif atau bertentangan, untuk menjelaskan seseorang yang dianggap tidak realistis —atau seorang pemimpin. Bagaimanapun, istilah idealis mempunyai pengertian khusus dalam filsafat, yaitu menunjukkan kepercayaan-kepercayaan tertentu

tentang pemahaman atas karakteristik dunia dan manusia. Lebih lanjut, istilah kaum idealis juga melukiskan para filsuf seperti Hegel yang sangat berpengaruh bagi Karl Marx (lihat bab berikutnya). Ditambah lagi banyak di antara pemikiran liberal berakar pada tradisi utilitarian atau kaum empiris cukup berbeda dengan idealisme. Konon, komitmen Kant untuk mewujudkan perdamaian dan mengukuhkan sebuah tatanan internasional yang adil dengan hukum internasional yang mengatur tindakan-tindakan negara, tersebar luas di antara kaum liberal saat ini. Jelas, seperti yang Kant percayai bahwa suatu keadaan 'perdamaian abadi' (*perpetual peace*) tidak akan terwujud dalam waktu dekat, kaum liberal kontemporer memercayai adanya hambatan-hambatan dalam usaha untuk mencapai keadilan dan aturan hukum di dalam kondisi-kondisi anarki, tetapi seperti halnya Kant, kebanyakan di antara mereka menuntut bahwa hal ini merupakan sesuatu yang ideal untuk diperjuangkan.

Kotak Penulis

Francis Fukuyama

Sesuatu yang agak ironis, mungkin, yakni sebuah karya yang dinyatakan paling populer pada akhir Perang Dingin, *The End of History and The Last Man* karya Francis Fukuyama (diterbitkan dalam berbagai bentuk pada awal 1990-an) berisi banyak hal yang tidak asing lagi dengan Kant. Fase dramatis Fukuyama, "*End of History*', tidak dimaksudkan untuk menyatakan secara tidak langsung bahwa kita menghadapi masa depan yang penuh dengan kehancuran. Sebaliknya, dalam istilah yang sederhana, Fukuyama berpendapat bahwa sejarah manusia telah digerakkan oleh konflik dan perjuangan terhadap sistem nilai dan berbagai usaha untuk mengatur masyarakat. Kekuatan penggerak di balik Perang Dingin merupakan perjuangan ideologi antara

Timur dan Barat, komunisme dan kapitalisme. Menurut Fukuyama, akhir dari Perang Dingin telah memperlihatkan hasil akhir dari kapitalisme Barat dan demokrasi liberal. Nilai-nilai liberal kemudian, yang sekarang diterima luas —jika tidak diterapkan secara luas— di seluruh dunia, dan, sejak komunisme terlihat kehilangan kepercayaan, tidak ada lagi bentuk organisasi sosial, politik dan ekonomi alternatif lainnya yang dapat dipercaya. Tesis Fukuyama merupakan sebuah *twist* ironis atas visi Marx tentang komunisme sebagai bentuk organisasi manusia paling tinggi dan, dengan demikian, arah atau tujuan akhir dari sejarah manusia (lihat bab 3).

Juga, fakta yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa istilah 'liberal' telah diterapkan dalam berbagai kepercayaan politik masyarakat luas. Kaum liberal mempunyai pandangan tentang organisasi ekonomi masyarakat misalnya; yakni, kita bisa mengenali suatu pembagian dalam pemikiran liberal antara mereka yang berpolitik 'sayap kanan', yang percaya bahwa kebebasan individu harus diperluas ke dalam wilayah ekonomi. Dengan kata lain, seseorang harus bebas untuk membeli dan menjual tenaga dan keahlian mereka sama halnya seperti barang dan jasa dalam pasar bebas yang diatur dengan regulasi atau aturan yang minimal. Sebaliknya, kaum liberal 'sayap kiri' menyatakan bahwa prinsip-prinsip kebebasan politik dan persamaan hak bisa terancam oleh sentralitasi kekuasaan ekonomi dan kekayaan. Aliran liberalisme ini mendukung peran intervensi bagi negara dalam penentuan regulasi perekonomian, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia dan memperluas kesempatan-kesempatan bagi orang-orang yang selama ini tersisih. Seperti yang akan kita lihat nanti, kedua aliran dalam pemikiran liberal ini ter-

kandung dalam pendekatan neo-klasik dan Keynesian pada ekonomi politik internasional.

Kotak Literatur

Laporan Brandt

Laporan *North-South: A Programme for Survival*, yang diterbitkan oleh Komisi Brandt pada 1980 merupakan contoh dari sentimen kaum internasionalis liberal dan praktik filsafat ekonomi kaum Keynesian. 'Laporan Brandt' menunjukkan berbagai penjelasan atas interdependensi ekonomi yang telah membuat orang-orang di dunia lemah terhadap resesi ekonomi dan suatu krisis ekonomi dunia yang menakutkan. Seiring dengan awal mula kejatuhan sistem ekonomi Bretton Woods (lihat pada bahasan setelah ini) dan, dalam beberapa hal, mengantisipasi krisis utang dan resesi tahun 1980-an, laporan keren ini meminta kerja sama seluruh pihak di dunia dan intervensi politik yang aktif guna melindungi negara-negara paling terpukul akibat resesi ini dan untuk menghidupkan kembali perekonomian dunia.

Banyak sekali inovasi-inovasi dalam teori liberal dan inovasi-inovasi tersebut tercermin di dalam berbagai aliran dalam pemikiran liberal dalam Hubungan Internasional. Contohnya, pendekatan-pendekatan idealisme, interdependensi, transnasionalisme, internasionalisme liberal, teori Perdamaian liberal, institusionalisme neo-liberal dan 'masyarakat dunia'. Lebih lanjut, banyak istilah-istilah yang sedang ngetren dalam Hubungan Internasional kontemporer (dan dalam media), seperti globalisasi atau multikulturalisme, meski sebenarnya bukan istilah liberal namun mempunyai pengikut atau penafsiran liberal. Pada bab ini kami akan menghadirkan liberalisme sebagai suatu perspektif atau pandangan dunia yang koheren. Justifikasi kami dalam anggapan tersebut adalah bahwa meski terdapat berbagai

perbedaan, namun terdapat etos liberal yang cukup berpengaruh dan melingkupi berbagai aliran pemikiran liberal tersebut. Liberalisme sebagai sebuah 'isme', merupakan sebuah teori politik, ekonomi, sosial, dan suatu filsafat. Liberalisme adalah ideologi yang mencakup segalanya. Liberalisme banyak membahas tentang semua aspek kehidupan manusia. Liberalisme adalah sebuah filsafat yang berdasarkan pada kepercayaan tentang nilai akhir kebebasan individu dan peluang kemajuan manusia. Liberalisme berbicara tentang bahasa rasionalitas, otonomi moral, hak asasi manusia, demokrasi, kesempatan, dan pilihan serta dibangun berdasarkan komitmen pada prinsip-prinsip kebebasan dan persamaan, diperjuangkan atas nama individualitas dan rasionalitas. Secara politis, hal ini diterjemahkan sebagai dukungan bagi pemerintah terbatas dan pluralisme politis.

Poin-poin utama perspektif liberal dapat diketahui dari ringkasan poin-poin sebagai berikut: (1) rasionalitas merupakan ciri universal yang tegas dari umat manusia; (2) secara rasional orang-orang mengejar kepentingan-kepentingan mereka sendiri, tetapi ada satu keselarasan kepentingan yang potensial di antara masing-masing orang; (3) kerja sama adalah ciri utama dari semua hubungan manusia, termasuk hubungan internasional; (4) pemerintah itu diperlukan, tetapi sentralisasi kekuasaan tidaklah baik; (5) kebebasan individu merupakan kepentingan politik yang utama. Dari kelima proposisi dasar ini, kita dapat menyimpulkan atau memperkirakan sejumlah proposisi lain yang terus memperkenalkan pendekatan-pendekatan liberal tentang hubungan internasional. Misalnya, ketika kita melihat adanya keselarasan kepentingan di antara orang-orang,

maka kita mungkin dapat menyimpulkan bahwa jika mereka disuruh memutuskan sendiri, orang-orang tidak tertarik turut serta dalam peperangan. Jika sentralisasi kekuatan itu buruk, maka pluralisme politis dan demokrasi pasti menjadi bentuk organisasi politik yang superior. Begitu juga, kita akan berharap bahwa kaum liberal akan lebih menekankan distribusi kekuasaan dan pengaruh di antara serangkaian aktor, daripada memusatkan sepenuhnya pada negara. Terakhir, jika kemampuan logika atau pikiran adalah ciri paling nampak dari ras manusia, maka semua orang harus mempunyai hak asasi manusia yang tidak dijamin oleh hukum. Kita akan membahas kembali proposisi-proposisi ini nanti. Namun, pertama, kita perlu membahas lebih jauh asal usul sejarah dan intelektual dari pemikiran liberal.

Asal Usul

Pada bagian ini kita akan membahas secara garis besar sejumlah nama yang mempunyai pengaruh penting dalam HI liberal, seperti Immanuel Kant, Adam Smith, David Ricardo, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan John Maynard Keynes. Guna menyederhanakan dan makin memperjelas bagian ini, kami telah membagi asal usul pemikiran liberal menjadi aliran 'politik' dan 'ekonomi'. Kemudian kita akan menggunakan kedua divisi besar ini untuk mengontekstualisasikan bahasan tema-tema kunci dari perspektif liberal dalam kerangka Hubungan Internasional yang luas. Kami berharap dibuatnya pemisahan antara liberalisme politik dan ekonomi ini akan membantu Anda melewati berbagai literatur yang sebenarnya sangat banyak. Namun, Anda harus menyadari adanya kondisi tumpang tindih yang

tak terelakkan antara aliran pemikiran liberal ekonomi dan politik.

Liberalisme ekonomi berasal dari tradisi intelektual —yang jika diurut— berasal dari karya Adam Smith dan David Ricardo. Sekarang, Anda mungkin bersedia meninjau kembali lagi bahasan kami tentang karya Ricardo pada 'kotak' bab pendahuluan. Asumsi-asumsi kunci liberalisme klasik abad XIX adalah bahwa, pada saatnya nanti, keuntungan akan diperoleh oleh semua pihak jika pasar dibiarkan bekerja dengan bebas tanpa intervensi negara dan jika negara-negara mampu melakukan perdagangan secara terbuka dan bebas dengan negara-negara lain. Hal ini disebabkan karena pasar dilihat sebagai alat yang paling efisien untuk mengatur produksi dan pertukaran yang dilakukan manusia, yang bekerja hampir seperti *'invisible hand'* yang mengarahkan dan mengoordinasi aktivitas perekonomian.

Kaum liberal juga menganggap bahwa manusia bertindak secara rasional. Dalam hal ini, rasionalitas dibuktikan dengan kemampuan seseorang untuk mempertimbangkan untung ruginya setiap tindakan. Menurut para pemikir 'utilitarian' seperti Bentham, seseorang yang bertindak secara rasional akan selalu bertindak untuk memaksimalkan kegunaan atau keuntungan mereka. Jika pada awalnya pendapat ini terkesan seperti perilaku yang mementingkan diri sendiri yang berakar pada pandangan pesimistik tentang karakteristik manusia, maka kaum liberal menawarkan suatu justifikasi moral yang mengarahkan berlangsungnya situasi semacam itu. Meski individu sebenarnya mengejar kepentingan sendiri (*self-interested*), secara kolektif jenis perilaku seperti ini dianggap memberikan hasil-hasil yang

menguntungkan. Menurut Bentham, keputusan kita seharusnya didasarkan pada apa yang 'benar' atau 'salah', atau 'baik' atau 'buruk' dalam bertindak sejauh apa pun untuk menjamin kebahagiaan orang sebanyak mungkin.

Hal ini tidak berarti bahwa kaum liberal melihat tidak ada peran negara dalam perekonomian. Seorang liberalis seperti Adam Smith, menerima dengan baik bahwa pasar tidak perlu sepenuhnya memenuhi begitu banyak kebutuhan 'barang-barang kebutuhan publik' dan bahwa pemerintah perlu menyediakan barang-barang tersebut. Negara juga diperlukan karena mereka memberikan kerangka peraturan —sebuah sistem legal— untuk, misalnya, menegakkan hukum terhadap korupsi dan melindungi persaingan tidak sehat. Bagaimanapun, liberalisme klasik menyatakan bahwa suatu situasi yang menguntungkan orang banyak —dalam jangka waktu lama— akan muncul jika campur tangan negara dijaga pada batas minimum. Menurut kaum liberal, keuntungan dari pasar bebas tidak hanya terbatas pada perekonomian domestik. Perekonomian pasar bebas menghasilkan suatu kebutuhan bagi 'input' —seperti bahan-bahan mentah— ke dalam proses produksi dan sejumlah bahan-bahan tersebut harus diimpor dari luar negeri. Perusahaan-perusahaan juga secara terus-menerus mencari pasar-pasar baru bagi barang dan jasa mereka. Dengan cara ini, perdagangan antar-negara terdorong. Menurut kaum Liberal, keuntungan perdagangan itu sangatlah besar. Hal ini, tentu saja, merupakan pendapat yang sangat bertentangan dengan proteksionisme —yang menurut perspektif liberal— merupakan konsekuensi tindakan negara dalam jangka pendek dan konsepsi 'kepentingan nasional' yang buruk. Dengan membiarkan berjalan sendiri, perdagangan akan terbukti

bermanfaat dengan, misalnya, menimbulkan interdependensi di antara negara-negara dan menciptakan kesejahteraan, yang keduanya akan mampu mengurangi kemungkinan timbulnya konflik.

Beberapa tahun kemudian, teori ekonomi neo-klasik atau neo-liberal sangat berpengaruh dalam teori maupun praktik pembangunan di negara-negara yang disebut dengan Dunia Ketiga. Kepercayaan bahwa perekonomian pasar bebas merupakan penyedia sumber daya yang paling efisien, distributor-distibutor penghasilan yang paling baik, dan sarana paling efektif bagi keberlangsungan pertumbuhan ekonomi secara luas terus dipertahankan di antara para elite di IMF, World Bank dan agen-agen pembangunan pemerintah di luar negeri.

Contoh Dunia

Program-program Penyesuaian Struktural

Saat ini, ide-ide liberalisme klasik sekali lagi telah menjadi populer dan berpengaruh dalam hubungan internasional. Teori ekonomi neo-liberal atau neo-klasik telah digunakan untuk membenarkan Program-program Penyesuaian Struktural (SAPs) dalam perkembangan dunia, meskipun dengan konsekuensi-konsekuensi sosial mungkin sangat keras tentunya. SAPs secara luas telah 'direkomendasikan' bagi negara-negara Dunia Ketiga oleh IMF dan World Bank sebagai suatu alat efektif guna mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan kemiskinan dan utang. Idenya yakni negara pengutang seharusnya mencoba untuk mengekspor sebagai cara keluar dari utang mereka. Sama halnya ketika banyaknya kebutuhan mata uang asing untuk menutupi utang luar negeri, strategi-strategi pertumbuhan berorientasi ekspor diadakan untuk mendorong persaingan, dinamisasi, dan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan mendatangkan manfaat bagi semua sektor di masyarakat. Pada

saat yang sama, negara-negara berkembang dianjurkan untuk memotong subsidi kesejahteraan oleh negara, yang secara efektif dengan melakukan ketentuan privatisasi pada pelayanan kesehatan dan pendidikan. Disarankan bahwa pada akhirnya hal ini akan membuat perekonomian menjadi lebih efisien. Dalam pengertian yang singkat 'pengencangan ikat pinggang' ini berarti pengurangan pegawai pemerintahan, tidak membeli obat-obatan, tidak membangun sekolah-sekolah, dan pemotongan dana-dana kesejahteraan. Sementara itu 'pendapatan lebih' ini bisa berupa pengurangan gaji, penebangan hutan-hutan, penjualan aset-aset ke perusahaan-perusahaan luar negeri pada tingkat harga rata-rata, dan sebagainya.

Meski sebelumnya para teoretisi ekonomi liberal abad XIX menentang intervensi negara dan regulasi perekonomian, namun pada abad XX kaum liberal telah mengurangi permusuhan terhadap intervensi negara. Pada kenyataannya, tatanan ekonomi yang muncul setelah Perang Dunia II —dalam perekonomian di Barat setidaknya— memperlihatkan bahwa negara memainkan peran yang lebih besar dalam mengarahkan kegiatan ekonomi individu-individu dan firma-firma, dan memberikan subsidi kesejahteraan bagi para warga negaranya —atau yang dikenal sebagai 'negara sejahtera'. Pada pertengahan akhir abad XX Keynes mempunyai pengaruh penting dalam pemikiran Liberal HI maupun dalam praktik keseharian dalam hubungan internasional. Teori ekonomi Keynesian —yang mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang melakukan intervensi guna mengatur perekonomian pasar bebas— membentuk dasar bagi ide-ide yang menyokong Sistem Bretton Woods.

Contoh Dunia

Sistem Bretton Woods

Hal ini mengacu pada serangkaian rezim, institusi, dan kesepakatan yang berasal dari diskusi multilateral di Bretton Woods, AS tahun 1944. Tujuan Sistem Bretton Woods adalah memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan perdagangan dengan menyediakan suatu kerangka kerja yang tetap bagi aktivitas ekonomi internasional. Setelah Perang Dunia II pelajaran yang dipetik adalah bahwa penyebab perang adalah keruntuhan ekonomi dan resesi dunia pada 1930-an yang menciptakan suatu iklim yang tidak stabil, masa ketika nasionalisme ekstrem bermunculan. Terdapat sebuah kepercayaan bahwa ketika iklim ekonomi memburuk negara-negara pada akhirnya mengambil tindakan untuk melindungi perekonomian mereka sendiri. Umumnya, hal ini melibatkan tindakan untuk melindungi pasar domestik, misalnya dengan meningkatkan cukai. Efek pukulan balik dari tindakan mementingkan diri ini merupakan perlambatan kegiatan perdagangan dunia dan, pada akhirnya, menuju resesi internasional. Sistem Bretton Woods disusun untuk menciptakan suatu kerangka kerja yang akan mempersulit negara-negara untuk bertindak dengan cara mementingkan diri sendiri ketika keadaan menjadi sulit dengan cara bersegera menjalankan proteksionisme dan untuk memberikan bantuan bagi negara-negara yang berada dalam kesulitan-kesulitan ekonomi temporer.

Sistem Bretton Woods terdiri atas IBRD atau Bank Dunia (*International Bank for Reconstruction and Development*), GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*), IMF (*International Moneter Fund*) dan , yang kini menjadi WTO (*World Trade Organisation*). Pada tahun pertama keberadaannya, dibayangkan bahwa IBRD akan memainkan suatu peran penting dalam mendistribusikan bantuan bagi perekonomian-perekonomian yang hancur di Eropa Barat. Pada tahun-tahun belakangan World Bank telah dipakai sebagai suatu sumber investasi, bantuan, dan pinjaman bagi perkembangan dunia. IMF didesain untuk menjamin likuiditas dalam perekonomian internasional. Hal ini ber-

arti bahwa, sebagai pengaruhnya, negara-negara yang mengalami kesulitan jangka pendek terhadap neraca perdagangannya dapat meminjam uang dan melanjutkan perdagangan secara efektif. Pada jangka panjang, jika sebuah negara tertentu tengah mengalami defisit neraca pembayaran yang terus-menerus —atau struktural, maka IMF bisa mendesak perubahan kebijakan perekonomian domestik negara tersebut, termasuk juga devaluasi mata uang, sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman segar. GATT disusun untuk menghasilkan suatu penurunan yang bertahap dalam pembatasan-pembatasan perdagangan di seluruh dunia. Institusi-institusi ini semuanya memainkan suatu peran penting dalam mengatur perekonomian dunia. Pemain kunci dari sistem ini adalah dolar AS. Dolar AS dipakai sebagai mata uang utama perdagangan dunia. Nilai relatif dari semua mata uang lainnya di dunia ditetapkan dalam hubungannya dengan dolar AS. Sejak, periode pasca-perang, perekonomian AS dengan mudah menjadi perekonomian yang paling besar dan paling berkuasa di dunia, dan dipercaya bahwa penetapan semua mata uang terhadap dolar AS akan menjamin kepercayaan dalam sistem ekonomi internasional.

Sistem Bretton Woods telah digambarkan sebagai tatanan perekonomian yang di dalamnya prinsip-prinsip liberalisme yang sangat luas dikandungnya. Sistem institusi-institusi yang multilateral, nilai tukar mata uang yang ditentukan, kontrol kapital, dan regulasi perdagangan, semua ditujukan untuk mendorong liberalisasi perdagangan yang progresif antar-negara dan untuk mempromosikan prinsip-prinsip perekonomian perdagangan bebas secara luas. Bagaimanapun, tak satu pun dari institusi ataupun aturan ini yang tidak sejalan dengan intervensi negara dan pengaturan perekonomian domestik. Hal ini berarti bahwa meski mendorong berlangsungnya perdagangan bebas yang berskala besar dan membuka persaingan, negara dapat mengejar tujuan-tujuan kesejahteraan liberal atau demokrasi sosial, seperti tingkat pengangguran yang sangat rendah dan ketersediaan barang-barang kebutuhan.

Sejalan dengan liberalisme ekonomi yang memiliki berbagai paham, liberalisme politik juga tidak terdiri dari

satu jenis paham saja. Beberapa kaum liberal telah menerapkan ide-ide dasar pemikiran liberal dalam pemahaman mereka mengenai komunitas dan kewajiban politik dan mengenai karakteristik dan peran pemerintah. Pendapat yang menyatakan bahwa individu adalah pihak yang menentukan segala sesuatu yang terbaik menurut kepentingan-kepentingan mereka, merupakan suatu pendapat yang sangat kuat menentang bentuk-bentuk pemerintahan otoriter (diktator). Kaum liberal umumnya mengusulkan suatu pemerintahan representatif yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi.

Salah seorang pemikir liberal yang paling diakui pada abad XIX, John Stuart Mill, berpendapat bahwa pemerintah itu merupakan sosok ancaman yang diperlukan *(a necessary evil)*. Dengan kata lain, pemerintah diperlukan guna melindungi kebebasan individu, tetapi dapat menjadi opresif dan tirani jika kekuasaannya tidak dikontrol. Untuk itu, kaum liberal biasanya mengusulkan adanya 'pemisahan kekuasaan' dan '*check and balance*' yang menjamin bahwa tak seorang pemimpin politik atau aparat pemerintah pun yang bisa mendominasi. Ide dasar ini menjadi asal usul pluralisme politik, yang berarti distribusi atau penyebaran kekuasaan dalam serangkaian institusi atau di antara sejumlah aktor. Pluralisme liberal sangat berpengaruh dalam Hubungan Internasional, meskipun penggunaan istilah 'pluralisme' dalam konteks ini sangatlah berbeda. Kita akan membahas pengertian ini pada bagian akhir bab ini.

Sebagai tambahan pada konsepsi kaum utilitarian tentang rasionalitas, terdapat aliran pemikiran liberal lain yang —meski berkomitmen pada prinsip kebebasan dan, mendukung konsepsi kemajuan— mempunyai pandangan agak berbeda mengenai otonomi dan rasionalitas manusia.

Aliran liberal ini memandang rasionalitas atau esensi logika atau pikiran lebih sebagai kemampuan umat manusia untuk memahami prinsip-prinsip moral daripada dalam kerangka pengertian 'alat-tujuan' atau 'untung-rugi. Aliran pemikiran ini biasanya dikaitkan dengan Kant. Untuk tujuan kita, cukup dikatakan bahwa kaum liberal percaya bahwa kemampuan untuk berpikir dan untuk memahami prinsip-prinsip moral merupakan hal yang universal, dengan kata lain, merupakan sesuatu yang dimiliki oleh semua umat manusia. Secara bersamaan, kepercayaan terhadap rasionalitas manusia, kemungkinan suatu kemajuan, kebebasan individu, dan bahaya dari kekuasaan yang tidak dikontrol, memunculkan pemikiran kaum liberal mengenai hak asasi manusia universal.

Kotak Konsep

Hak Asasi Manusia

Meski ide tentang hak asasi manusia terlihat seolah-olah telah 'jelas' dalam beberapa pengertian, namun sangatlah mengejutkan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan oleh ide ini. Meski prinsip bahwa hak-hak tertentu yang dimiliki seseorang kini hampir mendapat persetujuan universal, banyak pendapat mengenai bobot relatif dari masing-masing jenis hak (secara ekonomi atau politik, misalnya) dan pihak yang pantas memiliki hak-hak tersebut (individu atau kelompok-kelompok tertentu). Beberapa pakar bahkan berpendapat bahwa konsepsi hak asasi manusia terasa terlalu dangkal sebagai suatu kategori moral dan bahwa konsep hak-hak seharusnya juga diterapkan pada binatang, sama halnya pada umat manusia. (konsep yang berkaitan dengan 'kewajiban' sering dianggap lebih penting dalam tradisi-tradisi tertentu).

PBB, yang telah menjadi sesuatu yang sangat penting dalam perannya mempromosikan hak asasi manusia sebagai suatu

kewajiban resmi negara-negara, sangat mengakui bahwa hak-hak semacam ini tidak seharusnya dibatasi dalam batas-batas nasional dan menetapkan serangkaian standar internasional. Perjanjian PBB asli berbunyi 'prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri oleh masing-masing individu' dan 'hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua tanpa pembedaan' (pasal 1 dan 55). Pada akhir 1948 Deklarasi Universal PBB tentang HAM telah ditetapkan setelah sekian sering ditentang oleh negara-negara komunis seperti USSR, negara-negara religius seperti Arab Saudi, dan negara-negara lainnya seperti Afrika Utara, yang merasa takut kalau-kalau mereka akan dituduh melanggar hak asasi manusia bagi beberapa rakyat mereka. Demikian juga, dengan mengesampingkan beberapa penentangan sebelumnya, penetapan tersebut terbukti hanya menjadi awal dari suatu proses panjang yang melelahkan. Pada 1966, contohnya, lahir deklarasi-deklarasi lebih lanjut tentang hak-hak sipil dan politik dan hak-hak tentang ekonomi, sosial, dan budaya. Saat ini telah berdiri berbagai konvensi penting yang memayungi hak-hak orang-orang minoritas dan pribumi asli, hak-hak anak, dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Beberapa komentator berpendapat bahwa perluasan yang bertahap dari berbagai ketetapan hak asasi manusia telah menghasilkan sebuah situasi kesepakatan global tentang hak asasi manusia, seperti yang sekarang kita alami. Bagaimanapun, hal yang penting untuk dicatat adalah bahwa beberapa negara telah menolak untuk meratifikasi konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian tertentu. Lebih lanjut lagi, kekerasan terhadap hak asasi manusia masih tersebar luas di seluruh dunia meski banyak kemajuan penting telah dibuat dalam hukum internasional.

Variasi berbagai paham atau aliran dalam pemikiran liberal telah memberikan kontribusi bagi studi Hubungan Internasional dengan berbagai cara. Berikut ini akan kita lihat pandangan kaum liberal tentang tema-tema kunci kita. Namun, pertama-tama, akan sangat membantu untuk mengetahui asumsi-asumsi liberalisme.

Asumsi-asumsi

1. Kaum liberal percaya bahwa seluruh umat manusia adalah makhluk rasional. Rasionalitas bisa digunakan dalam dua cara yang berbeda:
   (a) Dalam pengertian instrumen, sebagai kemampuan untuk mengungkapkan pikiran dan mengejar 'kepentingan' seseorang.
   (b) Kemampuan untuk memahami prinsip-prinsip moral dan hidup berdasarkan aturan hukum.
2. Kaum liberal menilai kebebasan individu di atas segala-galanya.
3. Liberalisme berpandangan positif atau progresif tentang karakteristik manusia. Kaum liberal percaya bahwa perubahan-perubahan positif dalam hubungan internasional merupakan hal yang sangat mungkin dicapai.
4. Kaum liberal menekankan kemungkinan bagi agensi manusia untuk memengaruhi perubahan.
5. Dengan berbagai cara, liberalisme menentang pembagian antara wilayah domestik dan internasional:
   (a) Liberalisme merupakan doktrin yang universalis dan juga berkomitmen pada beberapa konsepsi tentang suatu komunitas umat manusia yang universal yang melampaui pengidentifikasian diri dengan dan keanggotaan dari komunitas negara-bangsa.
   (b) Konsep kaum liberal tentang interdependensi dan masyarakat dunia menyatakan bahwa dalam dunia kontemporer batas-batas antar-negara menjadi lebih mudah ditembus.

Kotak Refleksi

Banyak kritik menuduh kaum liberal telah menafikan pentingnya perbedaan-perbedaan yang ada antara satu orang dengan yang lain, di dalam maupun di antara negara-negara, seperti, misalnya, kelas, gender, agama, dan budaya. Kaum liberal berpendapat bahwa meski terdapat berbagai perbedaan tersebut, seharusnya tidak mengaburkan persamaan-persamaan —khususnya kapasitas pemikiran dan tindakan rasional, yang merupakan karakteristik *universal*. Apakah Anda percaya bahwa perbedaan sosial dan budaya membatalkan klaim kaum liberal yang menyatakan bahwa semua umat manusia mempunyai hak asasi yang mutlak?

Tema-tema

Perdamaian dan Keamanan

Liberalisme merupakan suatu doktrin yang percaya terhadap kapasitas umat manusia untuk memecahkan masalah-masalah yang terlihat sulit melalui tindakan kolektif. Pemikiran bahwa umat manusia memahami prinsip-prinsip moral, menunjukkan bahwa usaha untuk meninggikan 'politik kekuasaan' dan mengatur hubungan di antara orang-orang dengan menggunakan norma-norma resmi, prinsip-prinsip moral, dan menurut pengertian tentang 'benar' dan 'adil' merupakan sesuatu yang bernilai untuk diperjuangkan. Namun, liberalisme seharusnya tidak disamakan dengan 'pasifisme'. Meski beberapa kaum liberal mungkin benar-benar seorang pasifis, itu tidak harus berarti bahwa suatu komitmen terhadap pemecahan konflik secara damai selalu diikuti dengan penolakan mutlak terhadap penggunaan kekuatan apa pun alasannya. Pada kenyataannya, bahkan orang-orang dan negara-negara 'pecinta damai' tidak bisa

diharapkan untuk menolak hak menggunakan kekuatan guna mempertahankan diri dari serangan musuh, atau mungkin, jika tidak ada lagi cara lain untuk membenarkan yang salah.

Perdamaian dan keamanan berkaitan erat dalam pemikiran liberal. Liga Bangsa-Bangsa dianggap bisa menjamin keamanan negara-negara melalui satu sistem yang mampu mengidentifikasi ancaman bagi 'perdamaian dan keamanan' dan mengarahkan tindakan kolektif yang ditujukan kepada negara-negara yang agresif untuk menghalangi atau menghentikan mereka. Hal yang tidak bisa disangkal adalah bahwa karena 'ketidakamanan' itu sendirinya mungkin menjadi penyebab perang, maka satu sistem keamanan kolektif akan memperkuat tatanan internasional sehingga perdamaian merupakan sesuatu yang mungkin untuk diciptakan. Liga Bangsa-Bangsa juga mempunyai Pengadilan Internasional untuk mengakhiri perselisihan dan juga memberikan sarana untuk memecahkan berbagai konflik secara damai. Meskipun Liga Bangsa-Bangsa itu sendiri runtuh, namun ide bahwa suatu organisasi internasional memang diperlukan untuk memberikan semacam sistem pertahanan kolektif dan suatu pengadilan arbitrasi, terwujud di dalam Persatuan Bangsa-Bangsa, yang didirikan setelah Perang Dunia Kedua.

Kotak Sejarah

Persatuan Bangsa Bangsa

Persatuan Bangsa Bangsa berdiri setelah konferensi Dumbarton Oaks tahun 1944, guna 'menjaga keberlangsungan para generasi penerus dari bencana peperangan'. Pada waktu itu, konferensi

tersebut hanya dihadiri oleh Amerika Serikat dan sekutu perangnya waktu itu, termasuk Inggris dan Prancis, Uni Soviet dan Cina, tetapi selain terbatasnya jumlah perwakilan, hampir semua bentuk-bentuk dasar dari organisasi baru disetujui dalam pertemuan tersebut. PBB tetap identik dengan jiwa Liga Bangsa-Bangsa dalam tujuan yang ditetapkannya tentang memelihara perdamaian dan keamanan melalui penyelesaian konflik secara damai dan mendukung kerja sama dalam perdagangan, ekonomi, dan sosial. PBB juga memasukkan pembangunan ekonomi dan sosial serta mendukung hak asasi manusia sesuai dengan tujuan-tujuan yang ditetapkannya. Bagaimanapun, meski dalam beberapa hal perserikatan ini mirip dengan LBB, namun para pendiri PBB menyadari bahwa mereka harus memerhatikan kegagalan-kegagalan LBB agar organisasi ini tidak meniru kekurangan dan kelemahan pendahulunya. Di atas semua itu, organisasi baru ini haruslah lebih universal, dan harus memasukkan keanggotaan Uni Soviet maupun AS. Ia juga perlu 'bergigi' guna menjamin efektivitas tindakan daripada hanya tergantung pada kekuatan 'opini dunia'.

Kedua organisasi ini sangat mirip dalam struktur. Seperti LBB, PBB juga mempunyai sebuah majelis, Majelis Umum yang bertindak secara luas sebagai suatu badan konsultatif; Mahkamah Pengadilan, yang bertempat di Hague; dan sebuah dewan (Dewan keamanan) yang merupakan badan eksekutif organisasi ini. PBB juga mempunyai sebuah sekretariat yang dikepalai oleh Sekretaris Jenderal, yang bertugas untuk mengidentifikasi dan memberikan sinyal kepada Dewan Keamanan terhadap 'ancaman-ancaman terhadap perdamaian dan keamanan'.

Meskipun berbeda ideologi, AS dan Uni Soviet mampu menyetujui isu-isu nyata yang berkaitan dengan struktur dan pengoperasian dari organisasi baru ini. Bagaimanapun, mereka sering kali tidak sependapat mengenai struktur dan peran khusus Dewan Keamanan. Pada akhirnya, perbedaan-perbedaan ini diselesaikan ketika disetujui bahwa negara-negara yang disebut *'the big five'* (AS, Uni Soviet, Cina, Prancis, dan Inggris) akan menikmati perwakilan tetap dalam Dewan Keamanan dan mempunyai hak veto terhadap tindakan-tindakan Dewan Ke-

amanan. Mungkin, konsesi atas realitas-realitas kekuasaan politik inilah yang secara efektif melumpuhkan Dewan Keamanan, hampir-hampir mencegahnya sama sekali untuk mengambil tindakan efektif selama masa Perang Dingin.

Tidak seperti kaum realis yang berpandangan negatif tentang perdamaian (yakni, perdamaian berarti ketiadaan perang), kaum liberal telah mengembangkan 'teori perdamaian' tersendiri yang menyatakan bahwa perdamaian hanya bisa terjamin jika sumber-sumber konflik juga diselesaikan. Teori perdamaian liberal kembali menjadi sebuah tema yang cukup dikenal bahwa orang-orang tidak tertarik untuk berperang. Berangkat dari pernyataan tersebut, peperangan umumnya adalah hasil agresi-agresi dari sebagian para pemimpin atau negara yang cenderung berperang (*belligerent*) untuk mengejar kepentingan tertentu. Beberapa teoretisi perdamaian liberal memandang bahwa hanya pada saat tirani berakhir di seluruh permukaan bumi, adanya demokrasi liberal universal, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, maka sebuah perdamaian internasional bisa terwujud. Selama demokrasi akan juga mengontrol kekuasaan para pemimpin dan negara-negara, peperangan mungkin menjadi kurang lazim jika demokrasi tersebar di seluruh dunia. Dengan demikian, sebuah tatanan dunia yang penuh damai akan seperti suatu kondisi yang di dalamnya hak asasi manusia dihormati dan ditegakkan. Seperti pernyataan Kant, perdamaian abadi (*Perpectual Peace*) tidak bisa terwujud dalam suatu dunia yang tidak adil. Namun, karya Kant ini masih diperdebatkan dan beberapa kaum liberal menyatakan bahwa adanya berbagai jenis (pemerintahan) negara berbeda yang hidup berdampingan secara damai merupakan suatu hal yang sangat mungkin.

Kotak Penulis

Michael Doyle

Apakah demokrasi bertentangan satu sama lain? Sejak dulu telah ada perdebatan yang cukup panjang dalam HI tentang benar atau tidaknya asumsi bahwa negara-negara demokrasi itu sebenarnya lebih damai daripada jenis-jenis rezim yang lain. Michael Doyle telah mengembangkan proposisi bahwa negara-negara yang menganut demokrasi liberal tidak bertentangan satu sama lain. Hal ini tidak berarti bahwa berbagai macam demokrasi itu tidak bertentangan sama sekali. Perang Dunia II secara luas dipandang sebagai suatu peperangan menentang fasisme dan, dengan demikian, demi demokrasi. Hal yang lebih kontroversial adalah bahwa alasan kebijakan perang guna melindungi nilai-nilai 'kebebasan' dunia menjadi pembenaran bagi perang Vietnam tahun 1960-an dan 1970-an. Argumen yang dipakai adalah anggapan bahwa negara-negara yang berdemokrasi liberal cenderung lebih mengarahkan hubungan mereka satu sama lain dalam dasar perdamaian dan menurut hukum internasional. Berangkat dari pemikiran ini, disimpulkan bahwa cara terbaik untuk menjamin perdamaian yang panjang dalam hubungan internasional adalah melalui penyebarluasan pemerintahan-pemerintahan demokrasi-liberal dalam skala global. Proposisi ini menjadi pokok perdebatan, daripada dianggap sebagai suatu 'kenyataan' dan mendapat banyak sanggahan. Secara keseluruhan, bukti-bukti empiris dan rekaman sejarah tampaknya amat mendukung statemen bahwa berbagai macam demokrasi itu tidak bertentangan satu sama lain —bahkan perdamaian demokratis telah dianggap sebagai hal yang paling dekat dalam usaha untuk menemukan suatu 'hukum' dalam hubungan internasional. Namun, masih ada sebuah perdebatan tentang apakah ketiadaan perang itu karena adanya demokrasi liberal atau karena beberapa faktor lain, seperti misalnya '*balance of power*' atau adanya 'musuh' bersama'.

Di samping aliran 'politik' dalam pemikiran liberal, 'liberalisme ekonomi' juga memberikan kontribusi bagi

pemahaman kita tentang perdamaian. Seiring kecenderungan jaman pada alasan moral dan kapasitas untuk berbuat baik pada umat manusia, setelah Perang Dunia I, kaum liberal juga mengembangkan pemikiran tentang 'harmoni berbagai kepentingan' yang dipopulerkan oleh Adam Smith dan David Ricardo. Internasionalisme liberal didasarkan pada ide 'harmoni berbagai kepentingan' di antara negara-negara dan penduduk di seluruh dunia, dan, sisi positifnya, kepentingan-kepentingan bersama ini berbasis pada keuntungan bersama yang diperoleh dari perdagangan. Namun, seperti halnya Smith yang mengakui adanya kebutuhan bagi 'barang-barang publik' tertentu, kaum liberal juga mengakui bahwa guna terciptanya perdamaian perlu ada usaha untuk mengukuhkan institusi-institusi internasional yang dapat mengatasi masalah anarki dan memfasilitasi kerja sama. Kita akan membahas tema-tema kerja sama dan peran institusi-institusi dalam memberikan pemerintahan yang sehat atau utuh dalam konteks hubungan internasional nanti. Pertama-tama, kita perlu melihat secara lebih eksplisit ide mengenai negara sebagaimana yang telah dikonseptualisasikan dan dipahami oleh kaum liberal.

Negara dan Kekuasaan

Secara sekilas, pandangan kaum liberal tentang karakteristik negara tampak sama dengan pandangan realisme, sejauh mereka menerima bahwa ciri utama dari negara adalah kedaulatan. Kaum liberal juga setuju dengan kaum realis tentang ciri dasar negara, yakni wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Bagaimanapun, dalam beberapa hal khusus, sebenarnya kaum liberal memandang negara secara berbeda dari kaum realis. Liberalisme menganggap negara sebaik-

baiknya sebagai 'sosok ancaman yang diperlukan' (*necessary evil*).Kaum liberal juga membuat suatu pembedaan di antara berbagai macam bentuk negara. Rezim otoritarian atau tiran yang kekuasaannya tidak dikontrol sangat berpeluang memiliki perilaku yang makin kejam atau agresif, sedikit sekali menghormati hak asasi manusia, atau peduli penderitaan manusia. Sebaliknya, di negara-negara demokrasi-liberal, keberadaan negara dipandang sebagai 'penengah netral' (*neutral arbiter*) di antara berbagai kepentingan yang saling bersaing dalam suatu masyarakat yang terbuka dan plural. Negara memberikan kerangka acuan (secara hukum dan politik) yang di dalamnya memungkinkan seseorang untuk menjalankan urusan sehari-hari dengan perasaan aman dari bahaya, sehingga berbagai jenis kesepakatan akan dilindungi dan orang-orang akan mampu mengejar berbagai tujuan dan kepentingan mereka tanpa ada larangan, namun dengan catatan bahwa mereka tidak membahayakan orang lain.

Pemikiran tentang kebutuhan atas kontrol kekuasaan negara ini memunculkan konsep pluralisme yang liberal. Pada awalnya penggunaan istilah pluralisme mengacu pada kepercayaan terhadap kebutuhan untuk mendistribusikan kekuasaan politik melalui beberapa institusi, yang tak satu pun berkuasa. Misalnya, dalam demokrasi liberal, pemerintah mempunyai kekuasaan eksekutif dan legislatif tertentu dan berkuasa atas kekuatan tentara atau kepolisian atau yang disebut sebagai badan kekuasaan negara yang punya kecenderungan untuk mengancam. Bagaimanapun, kekuasaan pemerintah terbagi ke dalam berbagai institusi. Misalnya, di AS: Presiden, Kongres (*House*), dan Senat, semuanya mempunyai kekuasaan dan harus melakukan

kompromi, persetujuan, dan kerja sama jika mereka ingin memerintah secara efektif. Lebih lagi, dalam negara-negara yang berdemokrasi liberal, kekuasaan eksekutif dikontrol oleh konstitusi (aturan tertulis ataupun tidak tertulis) yang menyusun batasan tentang wewenang pemerintah. Lembaga Peradilan mungkin juga memainkan peran dalam menafsirkan konstitusi dan kehakiman mempunyai beberapa hak kontrol terhadap tindakan pemerintah. Begitu juga, tindakan pemerintah menjadi sasaran bagi kritik dari partai-partai oposisi dan para pemilih. Beberapa kaum liberalis percaya bahwa negara dalam beberapa hal mencerminkan kepentingan dan urusan dari beberapa kelompok kepentingan. Dalam sistem politik yang didominasi oleh banyak partai, hal semacam ini tidak dapat dihindarkan. Lebih lanjut, ada juga elit-elit penguasa dalam birokrasi pemerintah, militer, dan sebagainya yang berusaha memaksimalkan kepentingan mereka sendiri. Bagaimanapun, kaum liberal menolak anggapan bahwa negara mencerminkan kepentingan seseorang, kelas sosial yang sangat dominan, atau salah satu kelompok elit mana pun. Pandangan bahwa negara sebagai suatu badan otonom merupakan tema sentral dalam pemikiran liberal. Dalam hal ini, otonom berarti bahwa negara adil dan tidak memihak, yang berfungsi sebagai 'penengah netral' dalam perselisihan dan membuat kebijakan bagi warga negaranya. Hal ini sangat berbeda dari pandangan kaum realis, strukturalis, dan beberapa aliran feminis, yang akan Anda temukan dalam bab 3 dan 6.

Kaum liberal sangat berhati-hati dalam membedakan antara negara (yang terdiri dari berbagai badan pemerintahan, kekuatan polisi, angkatan bersenjata, dan lembaga peradilan) dengan masyarakat sipil. Masyarakat sipil meng-

acu pada wilayah-wilayah kehidupan manusia yang di dalamnya berbagai individu terlibat dalam tindakan dan kegiatan kolektif, tetapi berada di luar wilayah tindakan negara atau tidak berada di dalam cakupan atau kontrol negara. Misalnya, suatu masyarakat sipil yang penuh dengan antusiasme mungkin suatu wilayah yang di dalamnya para individu membentuk berbagai perkumpulan, seperti klub olahraga atau ikatan dagang, atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial, budaya, atau politik 'bebas', seperti ikut bergabung dengan Greenpeace atau Amnesty Internasional.

Setelah menyatakan negara dan masyarakat (sipil) jelas terpisah dalam pemikiran liberal, kaum liberal mengakui bahwa negara dan masyarakat sipil itu saling berinteraksi. Negara memberikan kerangka regulasi yang mengatur dilangsungkannya aktivitas-aktivitas tersebut. Misalnya, sebuah 'perkumpulan sosial' mungkin akan meminta perizinan untuk beroperasi. Bahkan, polisi mungkin mengawasi beberapa kegiatan perkumpulan tersebut. Juga, setidaknya dalam Negara demokrasi, unsur-unsur masyarakat sipil akan mencoba secara aktif untuk memengaruhi aktivitas-aktivitas pemerintahan —sebagai badan utama dari negara.

Kotak Penulis

Edward Morse

Morse berpendapat bahwa fungsi-fungsi negara telah berubah seiring dengan masyarakat yang berkembang menjadi lebih 'modern' dan kompleks. Morse berpendapat bahwa sejalan dengan ekonomi yang bertumbuh dan masyarakat yang menjadi lebih kompleks secara teknologi dan politik, negara harus

memperluas perannya lebih dan lebih lagi ke dalam wilayah kehidupan manusia. Jadi, misalnya, negara terlibat dalam pemenuhan kesejahteraan, atau memainkan suatu peran yang lebih besar lagi dalam usaha mengatur bidang teknologi telekomunikasi. Negara semakin terlibat dalam berbagai bentuk *'low politics'*, seperti misalnya kesejahteraan dan peraturan teknis, demikian juga dalam *'high politics'* tradisional, seperti diplomasi dan kebijakan luar negeri. Untuk itu, Morse berpendapat bahwa pemisahan antara *'high' dan 'low' politics* sebenarnya telah diruntuhkan. Istilah *"high' dan 'low' politics* menyatakan secara tidak langsung sebuah hierarki sederhana menurut nilai penting relatif setiap wilayah; kontrol terhadap peredaran senjata lebih vital dibandingkan dengan negosiasi perdagangan. Bagaimanapun, Morse berpendapat bahwa legitimasi otoritas negara tidak lagi sepenuhnya terletak pada kemampuan untuk menjamin dan mempertahankan perbatasannya. Orientasi kesejahteraan dan karakteristik negara modern yang suka bercampur tangan berarti legitimasi negara semakin terletak pada kemampuannya untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan rakyatnya atas keamanan ekonomi dan sosial. Keamanan seseorang yang diancam oleh persaingan perdagangan dan resesi ekonomi tidak jauh berbeda dengan ketika diancam oleh pengembangan persenjataan dan kebutuhan untuk berdamai atau menghadapi para pemimpin yang sewenang-wenang. Hal ini bukan berarti bahwa seorang liberal seperti Morse berpikir kalau *"high politics'* itu tidak lagi penting, hanya bahwa saat ini bukanlah suatu hal yang mudah untuk memberikan pembenaran pemisahan dan hierarki yang terlalu tegas semacam itu. Terlebih lagi, perluasan peran negara ke dalam wilayah kehidupan yang lebih luas lagi membutuhkan pembuatan kebijakan yang lebih kompleks dan jaringan penerapan kebijakan. Hal ini akan membuka sangat banyak kemungkinan baik bagi para elit dan *pressure group* untuk memperluas pengaruh terhadap semua wilayah dari pembuatan kebijakan.

Pengertian pluralisme ini juga telah digunakan untuk menjelaskan distribusi kekuasaan dan pengaruh di antara serangkaian aktor di dalam hubungan internasional. Kaum

liberal berpendapat bahwa negara-negara berdaulat itu penting, tetapi mereka bukanlah satu-satunya aktor penting dalam hubungan internasional. Seperti halnya pemisahan kekuasaan yang berarti bahwa esensi kedaulatan itu sulit dipastikan atau ditemukan, maka kaum liberal berpendapat bahwa negara bisa menyerahkan beberapa unsur kedaulatan mereka kepada badan-badan lain, sebagai contoh, misalnya, PBB atau Uni Eropa. Lebih jauh, aktor-aktor seperti perusahaan-perusahaan multinasional; institusi-institusi internasional dan regional, seperti PBB, FIFA, Organisasi Uni Africa; organisasi internasional non-pemerintah (*NGOs*), seperti Greenpeace atau Amnesty International; gerakan-gerakan sosial baru dan bahkan kelompok-kelompok teroris bisa juga dikatakan berpengaruh atau 'berkuasa'. Kaum pluralis liberal merupakan yang pertama kali mengembangkan bidang teori Hubungan Internasional tentang aktor-aktor selain negara dan 'proses-proses' selain kebijakan luar negeri, perang, atau diplomasi, yang telah lama didominasi oleh para sarjana realis.

Pluralisme mengindikasikan atau merujukkan suatu difusi kekuasaan. Dalam negara-negara berdemokrasi liberal, kekuasaan berada di tangan rakyat, sejauh rakyat tersebut secara periodik mampu memilih untuk mengganti para pemimpin politik dari jabatannya. Bagaimanapun, konsep 'kekuasaan rakyat' (*people power*) adalah sesuatu yang jauh melebihi sekadar kemampuan untuk memilih atau mengganti pemerintah dari jabatannya secara periodik. Seperti uraian kami di atas, dalam suatu negara berdemokrasi maju dengan masyarakat sipil yang kuat, kita juga mungkin berharap untuk melihat rakyat lebih terlibat secara aktif dalam percaturan politik melalui keikutsertaan mereka dalam per-

gerakan-pergerakan sosial atau memberikan dukungan pada program kerja *NGOs*. Dalam masyarakat Barat, sudah biasa bagi orang-orang yang merasa sangat memahami suatu isu tertentu untuk terlibat di dalam kegiatan-kegiatan lobi yang untuk memengaruhi proses pembuatan keputusan. Orang-orang yang lain lebih memilih bekerja di luar struktur pemerintahan formal dan mengambil bagian dalam berbagai demonstrasi. Karena negara modern telah 'mencampuri' lebih dalam wilayah-wilayah kehidupan manusia, maka negara sangat memfasilitasi jenis politik seperti ini.

Kaum liberal sangat serius menanggapi gagasan bahwa rakyat —terkadang individu tetapi biasanya cenderung pada tindakan kolektif melalui kelompok atau institusi penekan— bisa meluaskan pengaruh. Sejauh kekuasaan dapat dilihat sebagai kapasitas untuk bertindak guna meningkatkan keuntungan atau untuk memengaruhi hasil suatu peristiwa atau sebuah keputusan, kaum liberal percaya bahwa kekuasaan disebarkan pada serangkaian institusi dan di antara berbagai negara dan aktor non-negara. Dalam Hubungan Internasional, istilah 'pluralisme' tidak begitu berhubungan dengan cara pengecekan dan perimbangan kekuasaan, tetapi lebih sebagai observasi empiris —pluralisme liberal menjelaskan bagaimana cara *power* sebenarnya didistribusikan dalam 'sistem' internasional.

Jelas, penekanan kaum realis mengenai negara dan kekuasaan ditentang oleh kaum pluralisme liberal dengan sejumlah alasan. *Pertama,* karena kaum pluralis liberal mempertahankan argumen bahwa kekuasaan militer tidak lagi efektif sehingga tidak lagi menjadi indikator yang dapat dipercaya kekuatan suatu negara dalam perpolitikan dunia.

Kedua, karena Realisme mengabaikan kekuasaan aktor-aktor non-negara. *Ketiga*, karena penekanan kaum realis mengenai persaingan kekuasaan politik telah membuat mereka buta terhadap sejumlah kerja sama yang terjadi di antara negara-negara dan aktor-aktor lainnya dalam politik dunia. Sehingga, kekuasaan tidak perlu dikonseptualisasikan secara sederhana dalam istilah '*zero sum*'. Sebaliknya kekuasaan mungkin dipandang secara positif sebagai kapasitas untuk bertindak secara kolektif guna mewujudkan 'kebaikan' bersama. *Keempat*, kekuasaan yang dimiliki seorang 'aktor' mungkin berbeda setiap waktu dan tergantung pada pertimbangan wilayah (lihat kotak).

Kotak Analogi

Model Jaring Laba-laba

Analogi 'jaring laba-laba' sering digunakan untuk menjelaskan keberagaman kompleksitas dari hubungan internasional. Gambaran yang diungkapkan model jaring laba-laba merupakan suatu matriks rumit dengan sejumlah tanda (yaitu titik-titik potong) yang mewakili cara sejumlah besar aktor dalam hubungan internasional terhubung satu sama lain. Sudut pandang seorang kaum pluralis liberal, beragam aktor saling berinteraksi dengan cara-cara yang banyak sekali. Kaum liberal berpendapat bahwa hubungan–hubungan ini ada dalam berbagai jenis dan tidak perlu dikarakterisasi dengan konflik. Karakteristik hubungan-hubungan tersebut yang memang spontan dan tanpa paksaan tampak menyatakan bahwa kerja sama berdasarkan kepentingan-kepentingan bersama merupakan suatu ciri utama hubungan internasional. Jelas, model jaring laba-laba menyatakan secara tidak langsung bahwa kekuasaan disebarkan secara luas dalam hubungan internasional. Bagaimanapun, salah satu masalah yang berkaitan dengan model ini dan, sesungguhnya, upaya-upaya serupa oleh kaum pluralis liberal untuk mengungkapkan

kompleksitas aktor-aktor dan interaksi-interaksi dalam hubungan internasional adalah bahwa model ini tidak memberikan kita pengertian apa pun tentang 'benang merah' atau tanda-tanda yang paling penting atau aktor-aktor mana yang lebih berkuasa dan berpengaruh.

Kotak Konsep

Kekuasaan

Pluralis liberal berpendapat bahwa satu hal yang sangat mungkin adalah untuk mengukur kekuasaan secara sederhana dalam pemahaman militer. Kekayaan ekonomi negara-negara seperti Jepang atau beberapa MNCs, seperti Shell, IBM, Nissan, dan sebagainya, jelas menjadi suatu faktor dalam memahami letak kekuasaan di dalam hubungan internasional. Lebih lanjut, 'para aktor' mungkin juga mempunyai kekuasaan yang lebih besar atau lebih sedikit tergantung pada wilayah isu yang menjadi pertimbangan. Contohnya, Norwegia adalah sebuah negara yang relatif kecil dan tidak memainkan suatu peran yang cukup dominan dalam organisasi internasional, seperti PBB. Meski demikian, Norwegia memiliki pengaruh yang sangat penting dalam negosiasi tentang larangan internasional atas penangkapan ikan paus sebagai salah satu negara terbesar penangkap ikan paus. Sesungguhnya, melakukan analisis dunia menurut perbedaan-perbedaan wilayah-wilayah isu memberikan kesan yang sangat berbeda, dan mungkin menyenangkan, tentang cara kekuasaan didistribusikan, dibandingkan dengan pendekatan-pendekatan seperti realisme. Misalnya, dalam negosiasi internasional tentang pembuangan limbah beracun, negara-negara berkembang —terutama yang menjadi target pembuangan bagi limbah semacam itu— telah mampu secara signifikan untuk memengaruhi negosiasi dan mencapai regulasi global terhadap aktivitas serupa itu.

Institusi-institusi dan Tatanan Dunia

Salah satu cara liberalisme telah memberikan kontribusi bagi pemahaman kita tentang hubungan internasional

adalah melalui berbagai karya tentang karakteristik institusi-institusi dan tatanan dunia. Tak pelak lagi, tema-tema tentang kerja sama dan interdependensi yang kompleks merupakan hal yang dilihat kaum pluralis liberal ketika melihat regulasi dan memfasilitasi peran yang dimainkan oleh institusi-institusi dalam hubungan internasional. Di tahun-tahun kemudian, kaum institusionalis neo-liberal telah mengembangkan analisis yang lebih canggih tentang karakteristik tatanan dunia dan peran krusial yang dimainkan oleh institusi-institusi dan berbagai rezim dalam mengatur hubungan antar-negara. Pada bagian ini, kita akan membahas ide-ide pluralis liberal dan neo-liberal secara lebih mendalam. Bagaimanapun, pertama-tama, kita perlu mempertimbangkan secara mendalam sebuah aliran pemikiran pendahulu yang —meski tidak secara tegas membicarakan 'liberal', namun— mengantisipasi berbagai pendapat mengenai karakteristik interdependensi dan kebutuhan bagi institusi-institusi yang nantinya dikembangkan oleh para teoretisi HI liberal.

Seperti kebanyakan ide dalam Hubungan Internasional, 'Fungsionalisme' mempunyai akar pemikiran yang sama seperti cabang-cabang ilmu sosial lainnya, yaitu Sosiologi. Bagaimanapun, karena ide dasar tersebut 'melintas batasnya', katakanlah demikian, pengertiannya berubah. Kaum Fungsionalis berpendapat bahwa interaksi di antara negara-negara dalam berbagai bidang menciptakan masalah-masalah yang membutuhkan kerja sama untuk memecahkannya; contoh yang paling jelas misalnya bidang telekomunikasi dan pelayanan pos. Keuntungan positif, dan kepercayaan bersama, yang muncul dari kerja sama di bidang mana pun akan menumpahi, mendorong kerja sama

dalam area yang lebih signifikan lainnya, seperti perdagangan. Kaum Fungsionalis berpendapat bahwa integrasi merupakan hal yang diperlukan karena negara-negara tidak mampu menghadapi berbagai pengaruh modernisasi. Institusi-institusi internasional makin dianggap penting sebagai pelengkap bagi keberadaan negara, yang makin menurun kemampuannya untuk menghadapi berbagai masalah yang disebabkan oleh teknologi baru. Kaum Fungsionalis yang percaya bahwa ketika tingkat kerja sama dan integrasi semakin meningkat, maka akan bertambah sulit bagi negara-negara untuk menarik diri dari komitmen-komitmen yang telah mereka buat karena rakyat mereka akan menyadari berbagai keuntungan yang diperoleh dengan bekerja sama. Interaksi fungsional seperti itu akan berpengaruh terhadap masyarakat internasional, meningkatkan perdamaian, dan membuat perang begitu mengganggu dan merugikan sehingga tidak akan lagi dianggap sebagai sarana 'rasional' bagi negara-negara untuk mewujudkan berbagai tujuan dan kepentingan mereka (lihat kotak).

Contoh Dunia

Uni Eropa

Ide-ide seperti fungsionalisme jelas didukung dan didorong oleh perkembangan dalam 'dunia nyata' —seperti, misalnya, integrasi Eropa— yang pada saat ini telah mencapai tahap dari Uni Eropa. Tentu saja, Uni Eropa memberikan suatu contoh tentang Fungsionalisme yang bisa dipandang sebagai suatu resep mengenai perlunya hubungan antar-negara harus didorong demikian juga sebagai suatu pengamatan tentang perkembangan-perkembangan yang diakui dalam politik internasional dan ekonomi internasional dunia. UE sering kali dianggap sebagai suatu contoh dari teori Fungsionalis dalam

praktiknya. Komunitas-komunitas Eropa (*The European Atomic Energy Agency, the European Coal and Steel Community* dan *the European Economic Community*) dilihat sebagai cara yang efektif dalam mencapai integrasi yang terus berlangsung dan fungsional yang meluas hingga meliputi seluruh jangkauan wilayah-wilayah kebijakan politik. Integrasi seperti itu akan menciptakan sebuah situasi yang di dalamnya antagonisme nasional yang berdasarkan pada pengalaman sejarah atau persaingan berbagai kepentingan, seperti halnya perselisihan batas-batas Prancis-Jerman, tidak akan lagi membawa konflik nyata. Perang sebagai alat untuk menyelesaikan perselisihan tidak hanya akan merusak dan merugikan, tetapi makin bertambah tidak mungkin sejak perekonomian negara-negara ini, dalam kasus ini Prancis dan German, akan terintegrasi secara fungsional. Dari kesepakatan-kesepakatan Eropa yang paling awal tentang pengurangan tarif dan perdagangan dalam wilayah-wilayah tertentu, komunitas Eropa telah berkembang melalui suatu kombinasi dari 'tumpahan', integrasi fungsional, dan kehendak politik, untuk menjadi kesatuan organisasi —Uni Eropa— dengan aturan-aturan bersama dan (saat ini, peny.) suatu mata uang bersama. Mengingat ketika perang pernah menjadi ciri biasa dalam hubungan internasional Eropa, banyak orang kini memperkirakan bahwa negara-negara anggota UE tidak akan pernah lagi berperang satu sama lain.

Pada 1970-an, perspektif pluralis liberal mulai memberikan kontribusi pada pemahaman kita tentang institusi-institusi dan tatanan dunia dalam hubungan internasional. Dari 1970-an, jelas sudah bahwa negara-negara menjadi lebih saling tergantung —lebih sensitif terhadap atau bahkan dipengaruhi oleh tindakan-tindakan dari aktor-aktor lain. Dalam area pembahasan tertentu dalam perpolitikan dunia, interaksi negara-negara dan aktor-aktor lainnya sangat memerlukan —dalam beberapa kasus, malah menjadi sasaran bagi— peraturan berdasarkan pada satu sistem aturan dan praktik (norma-norma). Pengertian interdependensi ini terus

bergema hingga saat ini. Misalnya, banyak di antara negara dan aktor non-negara memberikan masukan dalam perdebatan global tentang penebangan hutan melalui konferensi dan pertemuan-pertemuan regular lainnya. Menurut teori interdependensi pluralis liberal, politik dihadirkan sebagai sebuah proses yang memberi keuntungan bersama yang dengannya banyak aktor berusaha memecahkan berbagai masalah dalam hubungan internasional. Lebih lanjut lagi, kita sekarang tinggal dalam suatu dunia yang dipenuhi berbagai persilangan hubungan —tidak hanya pemerintah dengan pemerintah— tetapi juga antarmasyarakat. *NGOs* dan kelompok-kelompok elit semakin terlibat dalam ikatan hubungan dengan individu-individu atau kelompok yang sepemikiran dengan mereka di negara-negara lain, yang mengabaikan —atau mungkin bahkan menyubversi— pengawasan negara. Selain itu, perkembangan teknologi telah membuat batas-batas negara dapat dengan mudah ditembus. Contohnya, perkembangan senjata-senjata nuklir sangat berpengaruh terhadap keamanan perbatasan negara; resesi-resesi internasional secara periodik menunjukkan makin saling terhubungnya berbagai kegiatan ekonomi di seluruh bumi, sementara itu —beberapa waktu kemudian— pertumbuhan satelit televisi dan internet secara nyata telah menunjukkan begitu cepatnya ide-ide dan 'artefak-artefak' budaya bisa 'berjalan' ke seluruh dunia.

Dalam HI kontemporer, kaum liberal terus berpendapat bahwa interdependensi memaksa negara-negara untuk saling bekerja sama secara lebih ekstensif daripada sebelumnya. Seperti yang akan kita lihat di bawah ini, kini banyak sekali literatur institusionalis neo-liberal tentang karakteristik dan fungsi dari rezim-rezim dan institusi-

institusi dalam hubungan internasional. Neo-liberalisme juga membangun asumsi bahwa negara perlu mengembangkan strategi-strategi dan forum-forum bagi kerja sama meliputi seluruh rangkaian isu dan wilayah-wilayah baru. Hal mengenai benar atau tidaknya berbagai pemahaman liberal secara tepat menjelaskan karakteristik dan pengaruh interdependensi, masih merupakan hal yang belum lagi jelas dan kita akan membahasnya nanti. Bagaimanapun, tidak ada keraguan bahwa jumlah dan jenis rezim, perjanjian, dan institusi telah berlipat ganda dengan cepat pada dua dekade terakhir ini.

Sebagai langkah awal untuk memahami penjelasan-penjelasan neo-liberal tentang pertumbuhan berbagai rezim, perjanjian, dan institusi —akan sangat berguna untuk meninjau kembali uraian kita sebelumnya tentang negara dan hubungan relatif antara *'high'* dan *'low' politics*— dengan menggunakan ide-ide liberal yang telah familiar untuk menunjukkan pengaruh interdependensi yang sebenarnya pada tindakan negara. Menurut pepatah lama, dasar permasalahan kebijakan luar negeri bagi para pembuat kebijakan adalah menyusun suatu kebijakan yang mengarahkan negara untuk meraih keuntungan maksimum dalam pertukaran internasionalnya sementara juga meminimalkan kerugian. Jika negara dapat menarik diri dalam isolasi-diri atau kecukupan-diri tiap kali harga yang harus ditanggung dalam berhubungan dengan negara-negara lain menjadi terlalu memberatkan, maka tidaklah penting mempelajari pengaruh pola interaksi pada perpolitikan dunia dan perilaku negara-negara. Bagaimanapun, negara-negara secara sederhana tidak akan bisa menghindar untuk terlibat dalam hubungan dengan negara lainnya. Dalam dunia modern,

autarki (situasi atau kebijakan ekonomi suatu negara yang bebas dari ketergantungan perdagangan internasional dan impor barang-barang kebutuhan hidup —Peny.) bukanlah suatu pilihan. Terlebih lagi, sementara beberapa anggota dalam sistem internasional akan mengalami kesulitan-kesulitan yang jauh lebih besar daripada anggota-anggota yang lainnya dalam hal mengeksploitasi atau mengatasi keterhubungan ini, maka semua anggota lain akan mengalami perasaan 'lepas dari kendali' takdir mereka sendiri. Kombinasi interdependensi seperti inilah, ditambah perasaan 'lepas', merupakan ciri interdependensi dan mengarahkan negara bekerja sama dengan negara lainnya.

Kerugian dan keuntungan dari bekerja sama sebenarnya tidak terbagi secara merata. Adanya ketidakseimbangan antara kerugian dan keuntungan ini secara relatif memberikan kesempatan beberapa anggota sistem untuk memiliki kekuasaan dan pengaruh lebih besar daripada anggota lainnya dalam suatu dunia yang di dalamnya berlangsung interdependensi. Kerugian interdependensi bisa dikelompokkan ke dalam dua hal pokok: kerugian sensitivitas dan vulnerabilitas. Kerugian sensitivitas menunjuk pada cepatnya perubahan-perubahan dalam suatu negara membawa perubahan-perubahan di negara lain serta bentuk kerugian dari perubahan-perubahan tersebut. Kerugian vulnerabilitas menunjuk pada kerugian yang ditanggung negara, bahkan setelah negara tersebut mengubah kebijakan-kebijakannya untuk menanggulangi tindakan-tindakan negara lain. Dengan demikian, dalam suatu dunia yang berlangsung interdependensi, negara-negara sebenarnya tidak bisa mengandalkan diri sendiri dan dengan demikian prinsip '*self-help* (baca: swadaya)' pun mengalami penurunan.

Pertimbangan keamanan —yang didefinisikan sebagai pertahanan militer— kemudian digantikan oleh berbagai pertimbangan tentang kesejahteraan atau keselamatan.

Lebih lanjut, negara-negara modern itu tidak mampu memenuhi berbagai kebutuhan warga negara mereka yang kompleks dan beragam tanpa bekerja sama dengan negara-negara lain. Institusi-institusi dan rezim-rezim internasional pun diperlukan untuk mengatur kekuatan interdependensi yang lebih dari yang sebelumnya. Negara-negara yang besar dan kecil, berkembang, dan terbelakang, merupakan anggota-anggota dari institusi-institusi ini dan semuanya bisa dikatakan mendapat keuntungan dengan bekerja sama. Meskipun konflik itu selalu ada, namun institusi-institusi atau rezim-rezim menyediakan acuan bagi negara-negara untuk menyelesaikan berbagai perbedaan mereka tanpa harus terpaksa berperang.

Singkatnya, bagi kaum liberal, kerja sama adalah hal yang mungkin terjadi karena perkembangan ilmu pengetahuan abad XX, teknologi dan ekonomi telah menghasilkan interdependensi antara negara-negara dengan aktor-aktor lainnya, seperti *NGOs*, perusahaan-perusahaan multinasional atau institusi-institusi internasional. Dalam beberapa kasus, interdependensi telah memaksa negara menyerahkan sebagian kedaulatan dan independensi mereka kepada institusi-institusi internasional, seperti PBB dan Uni Eropa. Malah, negara-negara wajib atau terpaksa ikut serta dalam berbagai bentuk kerja sama yang lebih intensif, yang menyebabkan terus munculnya rezim-rezim baru. Konsep interdependensi berarti seperangkat keterhubungan yang relatif sejajar (simetris) antara negara-negara dan menjadikan fakta awal bahwa negara-negara anggota dalam sistem inter-

nasional yang saling terhubung sebagai pijakan awalnya. Dengan kata lain, tindakan dari negara-negara —baik itu berupa penetapan tarif, penandatanganan perjanjian damai, pemberian bantuan luar negeri, atau pembangunan sistem senjata-senjata baru— berpotensi menciptakan kesempatan-kesempatan dan, juga, tantangan-tantangan bagi anggota-anggota lain dalam sistem.

Kotak Refleksi

Apa pengaruh-pengaruh dari 'politik transnasional' dan 'interdependensi' bagi pemahaman kita mengenai hubungan antara wilayah domestik dan internasional? Bagaimana reaksi kaum realis menanggapi klaim bahwa pembagian-pembagian antara politik 'nasional' dan internasional mulai runtuh bersamaan dengan munculnya tekanan interdependensi?

Bagi kaum realis, masalah utama, atau tragedi, dalam hubungan internasional adalah anarki. Kaum realis terus berusaha menunjukkan bahwa ketika negara-negara berbagi kepentingan-kepentingan bersama, iklim ketidakpercayaan dan ketidakamanan yang berasal dari karakteristik anarki sistem internasional membuat kerja sama itu menjadi sangat sulit. Kaum realis cenderung berpikir bahwa organisasi-organisasi dan rezim-rezim internasional itu sebagai sesuatu yang lemah. Mereka akan selalu bisa dihancurkan oleh negara-negara yang lebih berkuasa. Reformulasi realisme yang mempertimbangkan meningkatnya kepentingan ekonomi, meski masih memberikan pada penekanan pada negara dan perjuangan kekuasaan, membawa pada kejatuhan perspektif liberal untuk sementara waktu pada 1970-an dan awal 1980-an. Selama Perang Dingin periode II ketegangan antara dua negara adidaya —AS dan Uni Soviet— menjadi

semakin tinggi. Pada iklim seperti itu, neo-realisme yang menekankan diteruskannya pentingnya peran negara dan usaha untuk mendapatkan kekuasaan dan pengaruh mulai mendapatkan perhatian dari banyak orang. Tentunya, anggapan kaum pluralis liberal bahwa meningkatnya interdependensi ekonomi dunia akan mengurangi konflik dan meningkatnya kerja sama terkesan utopis pada saat ketika utang besar-besaran, yang kebanyakan dari utang tersebut merupakan konsekuensi langsung dari pengeluaran besar-besaran untuk membiayai persenjataan dan teknologi militer, menjadi penyebab utama distorsi dalam perekonomian dunia dan menghasilkan masalah-masalah inflasi, kenaikan tingkat suku bunga dan resesi.

Bagaimanapun, kaum liberal bangkit untuk menantang neo-realisme. Kini, karya-karya kaum liberal yang berbicara tentang kerja sama, rezim-rezim, dan institusi-institusi telah diperbarui dengan adanya perkembangan institusionalisme neo-liberal. Tema penting lainnya dalam literatur interdependensi kaum pluralis liberal adalah bahwa sejak 1970-an AS telah mengalami kemunduran baik itu secara relatif maupun absolut dan tidak bisa lagi dianggap sebagai negara yang sepenuhnya dominan dan berkuasa. Tentu saja, pemikiran tentang menurunnya hegemoni AS ini juga merupakan suatu tema utama dalam tulisan-tulisan kaum neo-realis. Meskipun kekuasaan AS berkurang, namun tatanan ekonomi internasional yang ditetapkan di Bretton Woods tidak seluruhnya jatuh, seperti yang diperkirakan oleh seorang neo-realis, Robert Gilpin. Contohnya, Bank Dunia (*World Bank*) dan IMF (*International Monetary Fund*) masih bertahan. Lebih jauh lagi, sebuah organisasi perdagangan baru WTO (*Word Trade Organisation*) telah menggeser peran

GATT. Pada saat yang sama, telah terjadi kesepakatan dari rezim-rezim lain. Pada 1980-an, sebuah generasi baru para pemikir liberal menyusun percobaan untuk menjawab pertanyaan: mengapa institusi-institusi dan rezim-rezim terus melanjutkan fungsi mereka segera setelah melemahnya hegemoni AS?

Kaum institusionalis neo-liberal berpendapat bahwa keberhasilan kerja sama tidak sepenuhnya tergantung pada keberadaan suatu negara yang berhegemoni. Ada kepentingan-kepentingan bersama yang bisa dicapai melalui kerja sama. Berhasil atau gagalnya rezim-rezim tidak hanya tergantung pada kekuasaan hegemoni, tetapi lebih pada jumlah pemain yang terlibat dan berbagai keuntungan yang dirasakan dalam jangka waktu yang lama. Dalam pandangan ini, HI masih dilihat sebagai sesuatu yang secara mendasar anarkis, dengan negara-negara sebagai aktor dominan; tetapi karena kerja sama itu rasional dan menguntungkan bersama, organisasi-organisasi dan rezim-rezim akan terus bertahan dalam jangka waktu yang lama dan dalam peralihan kekuasaan maupun pengaruh antara negara-negara besar. Ide pokok institusionalisme neo-liberal adalah bahwa hubungan internasional pada dasarnya diinstitusionalisasikan —yang terdiri dari seperangkat aturan dan praktik-praktik yang kuat dan saling terhubung yang menentukan peran-peran perilaku, pembatasan aktivitas, dan membentuk harapan-harapan. Pada pandangan ini, negara-negara masih menjadi aktor dominan, tetapi pengaturan-pengaturan institusi berpengaruh penting terhadap hasil-hasil dalam berbagai wilayah. Umumnya, negara-negara merupakan agen yang berkuasa memaksimalkan keuntungan yang absolut, bukan memaksimalkan keuntungan relatif. Kini kerja sama menjadi

hal yang lebih masuk akal, dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi keuntungan absolut. Dalam hal inilah tersimpan penjelasan tentang kemunculan dan daya tahan berbagai organisasi, institusi, dan rezim internasional.

Identitas dan Komunitas

Pada awal kemunculannya, liberalisme sedikit sekali membahas tentang isu-isu komunitas dan identitas. Bagaimanapun, liberalisme memberikan penekanan lebih pada individu daripada kelompok. Tentu saja, para kritikus terhadap liberalisme terus-menerus berpendapat bahwa liberalisme menghadirkan suatu pandangan yang sangat atomistik tentang masyarakat manusia, sebagai makhluk terisolasi yang hanya berhubungan dengan manusia lainnya jika ada kepentingan-kepentingan bersama yang memberikan hasil yang menguntungkan. Pemikiran tentang komunitas didasarkan pada 'kontrak' yang memandang individu sedang melindungi kebebasan mereka atau mengatur hak-hak mereka secara berlawanan dengan sesama warga negara yang lain merupakan inti pemikiran liberal klasik mengenai peran negara dan kewajiban-kewajibannya terhadap pihak lain.

Meski demikian, liberalisme kontemporer mengakui pentingnya isu-isu tentang identitas dan komunitas serta hubungannya terhadap Hubungan Internasional. Pada awalnya kaum liberal telah menawarkan suatu konsepsi tentang komunitas dan identitas yang menjangkau seluruh planet bumi dan yang menentang batas-batas umum dari negara, bangsa, ras, etnis, budaya, kelas, dan gender. Inilah komunitas umat manusia, yang memiliki hak asasi yang tidak dapat dicabut oleh karena kapasitas universalnya untuk ber-

pikir secara logis. Kaum pluralis liberal telah menunjukkan komitmen terhadap 'masyarakat global' sebagai suatu sarana yang dengannya sistem negara berdaulat akan lebih dijunjung dan bentuk komunitas yang lebih inklusif dapat diwujudkan. 'Masyarakat Global' bisa dipahami dalam pengertian suatu kesepakatan normatif yang mengikat orang-orang secara bersamaan. Dalam pandangan ini, seseorang memiliki kewajiban-kewajiban terhadap 'orang-orang lain di seluruh dunia' daripada sekadar menjadi warga negara saja. Beberapa komentator berpendapat bahwa bentuk-bentuk interdependensi yang kompleks itu telah menghasilkan penyebaran nilai-nilai 'universal' secara global; contohnya, hak asasi manusia (lihat kotak di bawah) dan demokrasi.

Politik internasional dan pergerakan sosial yang bertambah makin penting di dalam politik dunia juga memunculkan berbagai isu tentang identitas dan komunitas. Transnasionalisme berarti bahwa orang-orang terkait di dalam sejumlah interaksi sosial yang mengikat orang-orang tersebut secara bersamaan melintasi batas-batas negara. Cara alternatif dalam menjelaskan konsep masyarakat global adalah sebagai serangkaian jenis jaringan hubungan-hubungan transnasional. Dalam pandangan ini, penemuan-penemuan teknologi dan meningkatnya 'arus' media massa, teknologi, dan keuangan, melahirkan disintegrasi bentuk-bentuk identitas dan keterikatan sebelumnya. Dalam gambaran Morse tentang negara yang 'dimodernisasi', berbagai kelompok kepentingan terwakili keberadaannya melalui institusionalisasi organisasi-organisasi non-pemerintahan (*NGOs*). Runtuhnya pembagian 'high' dan 'low' *politics*, meningkatnya birokratisasi dan politisasi massa secara luas, dengan sendirinya, telah mendorong bertambahnya jumlah *NGOs*

dan pertumbuhan transnasionalisme. Lebih lanjut, *NGOs* sendiri mencerminkan makin pentingnya 'hubungan sah' transnasional. Seorang liberal seperti Mansbach berpendapat bahwa umat manusia yang makin mengidentifikasi diri mereka sendiri secara politik dalam berbagai macam cara yang relevan, terlibat atau terjebak dalam berbagai jaringan otoritatif dan memiliki loyalitas terhadap berbagai otoritas. Pada kenyataannya, beberapa kaum liberal melihat adanya suatu politik yang terbuka dan bersifat partisipatoris yang muncul dari jaringan transnasional meliputi di berbagai masyarakat, yang melampaui batas negara.

Contoh Dunia

Liberalisme dan Multikulturalisme

Setelah mengetahui perhatian utama kaum liberal terletak pada kebebasan individu dan hak asasi manusia, kita akan berharap bahwa mereka akan mendukung hak seseorang untuk tidak diidentifikasikan dengan suatu kelompok dominan atau untuk mengelak dari suatu komunitas tertentu. Tentunya, sebuah hak dasar adalah hak untuk menyatakan identitas individu seseorang. Bagaimanapun, pada saat yang sama kaum liberal telah dipaksa untuk mengakui bahwa komunitas-komunitas tertentu mungkin juga mempunyai hak-hak yang perlu diakui dan dilindungi. Hak orang-orang pribumi untuk terus menikmati suatu cara hidup tradisional dan hak-hak golongan minoritas etnis atau agama tertentu dalam masyarakat di seluruh dunia, untuk menunjukkan ekspresi-ekspresi unik identitas dan komunitas mereka sendiri, keduanya kini dilindungi dalam hukum internasional—bahkan sekalipun jika dalam praktiknya mereka tidak selalu dihormati. Suatu dilema bagi kaum liberal bukanlah pada tindakannya untuk menerima konsep perbedaan atau hak untuk berbeda, tetapi pada tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi konflik secara langsung antara praktik-praktik budaya tertentu atau kepercayaan-kepercayaan agama dengan

hak individu untuk memilih. Contohnya, kita berharap kaum liberal akan mendukung hak seorang perempuan muslim untuk tidak mengikuti kebiasaan dan praktik ibadah yang berasal dari sistem kepercayaan Islam, misalnya dalam pernikahan atau keluarga, jika hal itu memang pilihannya. Bagaimanapun, umumnya, posisi dan peran perempuan sangatlah penting bagi ekspresi identitas kelompok. Pada lingkungan seperti itu, hak-hak 'kelompok' dan hak-hak individu mungkin menjadi bersitegang. Dalam kasus-kasus seperti itu hak-hak siapakah yang akan lebih diutamakan? Hal yang sama sekali belum lagi jelas adalah ada atau tidaknya arahan yang ditawarkan kaum liberal tentang cara memecahkan ketegangan tersebut.

Contoh Dunia

***NGOs* dan Lingkungan Hidup**

Mungkin contoh kegiatan *NGOs* transnasional yang paling umum saat ini adalah aktivitas mereka dalam wilayah politik lingkungan hidup. Beberapa kelompok tertentu telah menjalankan kampanye global secara efektif —seperti halnya Greenpeace yang menentang perusahaan penangkap ikan paus dan Friends of Earth menentang aerosol— dan kelompok-kelompok lain yang sedang mencari untuk menjalankan kegiatan-kegiatan mereka dalam lingkup transnasional, seperti misalnya Earth First!

Kesenjangan dan Keadilan

Secara tradisional kaum liberal memusatkan perhatian pada pentingnya kesetaraan formal antara orang satu dengan yang lain dan persamaan hak. Kaum idealis menuntut bahwa permasalahan keadilan dan hak merupakan tema utama dalam hubungan internasional. Kita juga telah melihat bahwa kaum liberal telah sangat aktif mendukung berbagai rezim hak asasi manusia melalui PBB. Bagaimanapun, terkait dengan konsep keadilan dan hak, pemisahan antara liberal 'sayap-kiri' dan 'sayap-kanan' sangatlah penting.

Kaum liberal dari spektrum politik kanan cenderung lebih memusatkan perhatian pada pentingnya kesetaraan formal dan kesempatan-kesempatan yang sama —hak setiap individu untuk diperlakukan sama di mata hukum dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam masyarakat atau bersaing di dalam pasar— daripada persamaan sebagai suatu hasil. Dari perspektif ini, dunia yang 'bebas' dan 'adil' merupakan suatu dunia tempat setiap orang mempunyai *kesempatan* untuk mencapai sukses. Kaum liberal 'sayap-kanan' tetap berpegang ide bahwa pasar bebas merupakan sarana paling efektif dalam mewujudkan 'kebahagiaan terbesar bagi orang banyak'. Dengan diberi kebebasan, maka orang-orang akan mengejar berbagai kepentingan mereka sendiri, sementara keadaan tersebut akan melahirkan masyarakat yang dinamis dan perekonomian yang cerah dan —dalam jangka panjang— keuntungan-keuntungan dari hal tersebut akan dirasakan oleh semua pihak. Sebaliknya, kaum liberal 'sayap-kiri' cenderung lebih menyetujui campur tangan negara dalam hal seperti kesenjangan sosial dan batasan terhadap berbagai persamaan kesempatan. Kaum liberal-kiri mengakui bahwa guna menciptakan suatu situasi yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk mencapai sukses, diperlukan jaminan bahwa semua orang itu terdidik atau memiliki tingkat keamanan sosial dan ekonomi secara mendasar. Penciptaan sebuah masyarakat yang di dalamnya memungkinkan dilakukan usaha-usaha bagi terwujudnya persamaan kesempatan mungkin membutuhkan campur tangan negara untuk menyediakan pendidikan, perawatan kesehatan, dan keamanan sosial. Bagaimanapun, pada umumnya, kaum liberal percaya bahwa lebih baik memperbaiki sistem pasar bebas

untuk mengurangi berbagai pengaruh buruknya —daripada membahayakan kebebasan individu dalam hal persamaan sosial dan ekonomi.

Konflik dan Kekerasan

Konflik dan kekerasan telah menjadi fokus utama HI liberal. Kami tidak akan membahasnya lebih jauh di sini, cukup dikatakan bahwa dengan cara-cara tersendiri, kaum liberal memandang diri mereka sebagai aktivis yang mendukung terciptanya perdamaian. Keinginan mereka untuk mengakhiri konflik dan kekerasan ini terlihat dalam teori perdamaian liberal dan pernyataan-pernyataan mereka mengenai perdamaian dan keamanan. Kaum liberal juga melihat institusi-institusi sebagai pemeran utama dalam menengahi dan memecahkan konflik. Liberalisme sering kali dicap sebagai utopis yang putus asa disebabkan oleh keinginan yang kuat untuk mewujudkan dunia yang minim tingkat kekerasan serta konfliknya. Namun demikian, sekali lagi, mereka tidak melihat hal ini akan terwujud dengan segera tanpa kehendak politik dan usaha manusia.

Kesimpulan

1. Pemikiran kaum liberal mempunyai tradisi intelektual yang panjang. Pemikiran kaum liberal tentang politik dan perdamaian internasional secara khusus banyak dipengaruhi oleh filsuf Jerman abad VIII, Immanuel Kant.
2. Dalam hal ekonomi, teori-teori liberal mengenai pasar, secara khusus dikaitkan dengan Adam Smith, David Ricardo, dan John Maynard Keynes.

3. Terdapat berbagai cara penerapan pemikiran liberal dalam studi HI, contohnya, pluralisme liberal, Masyarakat Dunia, interdependensi, dan institusionalisme neo-liberal, seperti halnya juga berbagai aliran pemikiran fungsionalisme dan idealisme terkait lainnya.
4. Kaum liberal cenderung optimistik tentang karakteristik manusia karena mereka percaya bahwa tingkah laku umumnya merupakan hasil dari berbagai interaksi dengan lingkungan sosial kita.
5. Karena itulah kaum liberal meyakini adanya kesempatan pendidikan, kemajuan manusia, dan tegaknya institusi-institusi yang jujur dan adil.
6. Kaum liberal percaya bahwa karakteristik utama umat manusia adalah rasionalitas. Kepercayaan semacam ini melahirkan pemikiran tentang nilai intrinsik hidup manusia, nilai moral individu, dan keberadaan hak asasi manusia yang tidak dapat dihindarkan.
7. Kaum liberal percaya bahwa peran pemerintah harus dibatasi, meski terdapat beberapa ketidaksepakatan tentang lingkup maupun tujuan campur tangan negara dalam masyarakat sipil.
8. Dalam wilayah internasional, kaum liberal memercayai kesempatan bekerja sama, dan menyatakan bahwa semua negara bisa meraih tujuan-tujuan mereka jika mereka benar-benar mengesampingkan ide-ide kepentingan diri mereka sendiri.
9. Kaum liberal percaya bahwa tidak hanya negara, tetapi juga *NGOs*, perusahaan-perusahaan, dan institusi-institusi multinasional yang merupakan 'aktor-aktor' yang penting dalam HI.

Kritik

Seperangkat kritik yang tertuju pada HI liberal berkisar pada kontradiksi mendasar antara kebebasan ekonomi dan politik. Kritik ini ditujukan pada kaum liberal yang mendukung pasar bebas dan institusi-institusi milik pribadi, yang keduanya menjadi inti konsepsi liberal tentang kebebasan dan pilihan. Para kritikus berpendapat bahwa berlangsungnya pasar bebas dan kepemilikan pribadi atas kekayaan dan sumber daya mengakibatkan pemusatan kekayaan hanya bagi segolongan kecil orang. Hal yang demikian ini akan mengarah pada pemusatan kekuasaan hanya di antara orang-orang kaya, yang terus membatasi kebebasan dan berbagai pilihan penting yang tersedia bagi kelompok-kelompok orang miskin. Kaum liberal sayap kiri menjawab kritik ini secara tertulis dan mendukung bentuk campur tangan dan kesejahteraan negara secara terbatas dalam hal redistribusi kekayaan. Sebaliknya, kaum liberal sayap-kanan, yang sering disebut juga sebagai neo-liberal atau liberal neo-klasik, berpendapat bahwa campur tangan negara selalu menjadi ancaman bagi kebebasan individu dan membenarkan berlangsungnya praktik pasar bebas dengan alasan bahwa pasar bebas akan meningkatkan kesejahteraan bagi semua pihak di dalam masyarakat yang kemudian 'tersebar' turun pada kelompok masyarakat miskin. Ada sedikit bukti empiris untuk mendukung pernyataan ini.

Pandangan kaum liberal dapat kemudian dengan cukup alasan dikritisi sebagai pandangan yang hanya memberikan pembenaran atas situasi yang sedang berlangsung; situasi yang hanya memberikan keuntungan pada sekelompok kecil orang. Contohnya, kaum pluralis liberal umumnya

memberikan pandangan positif tentang institusi-institusi internasional, MNCs, dan seluruh etos perdagangan bebas liberal yang mendominasi ekonomi politik internasional saat ini.

Kini, terdapat sejumlah serangan terhadap berbagai konsepsi universalisme yang ada dalam pemikiran liberal. Kita akan membahas hal ini pada bab-bab teori kritis, feminisme dan posmodernisme. Meski begitu, secara singkat telah dinyatakan bahwa karakteristik yang dianggap menjadi esensi 'manusia' sebenarnya hanya merujuk pada sekelompok orang tertentu pada periode sejarah tertentu saja. Sesuatu yang disebut dengan universalisme, sebenarnya menunjukkan pengalaman kelompok dominan tertentu di Barat. Liberalisme memberi kita suatu pandangan linear tentang kemajuan dan perkembangan manusia. Sekali lagi, hal ini karena liberalisme cenderung menguniversalkan pengalaman bangsa-bangsa Barat. Dalam teori Pembangunan, contohnya, kaum liberal berpendapat bahwa negara-negara yang lebih miskin jauh berada 'di belakang' di dalam proses pembangunan, namun sebenarnya negara miskin berada di jalan yang sama dan berjalan dengan arah yang sama seperti negara yang lebih kaya, negara-negara yang lebih berkembang. Bagaimanapun, terdapat sanggahan bahwa kebanyakan negara kaya saat ini merupakan bangsa-bangsa Barat yang menurut sejarahnya berdasarkan pada eksploitasi sumber daya-sumber daya alam dan tenaga kerja murah di Selatan. Para pemerhati lingkungan juga berpendapat bahwa strategi-strategi pembangunan kaum liberal sedang menghasilkan degradasi lingkungan hidup, sehingga makin menambah penderitaan negara-negara yang memang sudah miskin.

Pandangan kaum pluralis tentang hubungan internasional sebagai suatu rangkaian interaksi yang kompleks antara berbagai aktor, pada awalnya, kurang diperdebatkan. Meski demikian, pandangan ini disanggah oleh kaum realis, yang terus berpendapat tentang keutamaan atau dominasi negara dalam HI, dan oleh pemikir Marxis yang berpendapat bahwa pandangan kaum pluralis telah mengabaikan isu mendasar yakni kesenjangan di antara berbagai kelompok atau kelas yang berlangsung pada taraf internasional.

Kesalahpahaman Umum

Kaum liberal percaya bahwa masyarakat itu sebenarnya baik. Anggapan ini adalah sesuatu yang bersifat menyederhanakan dan cara pandang yang kuno mengenai liberalisme. Tentunya, kaum liberal menganggap 'karakteristik manusia' itu sebagai sesuatu yang sifatnya dapat ditempa/dibentuk dan mereka optimis tentang kemungkinan untuk mengatur kehidupan manusia secara lebih adil dan harmonis. Jadi, umat manusia itu *berpotensi* baik.

Negara-negara tidak penting. Kaum pluralis liberal tidak menyangkal peran negara dalam HI, tetapi menyoroti bahwa aktor-aktor lain juga mempunyai peran, baik itu besar maupun kecil.

Kerja sama berarti tidak ada konflik. Hal ini adalah pemahaman yang sangat salah. Kerja sama sebenarnya *berarti* konflik. Komitmen kaum liberal untuk membatasi pemerintah didasarkan pada kepercayaan bahwa dengan kontrol yang minimal, maka orang-orang akan bebas bertindak untuk mengejar kepentingan mereka sendiri, dan hal ini bisa menciptakan konflik. Hal ini memerlukan suatu kerangka hukum, tetapi umumnya spontanitas dan kebebasan adalah

cara terbaik untuk menciptakan kekayaan dan pertumbuhan. Keadaan yang serupa juga terjadi pada taraf internasional, bahwa jika kepentingan-kepentingan negara sangat bersepaham (dengan kata lain jika mereka harmonis), maka mereka tidak perlu bekerja sama. Kerja sama berlangsung dalam rangka memecahkan konflik (berbagai kepentingan). Kerja sama adalah salah satu cara pemecahan konflik.

'Greenpeace seharusnya dilibatkan dalam HI'. Banyak mahasiswa mempunyai kesan bahwa penerimaan perspektif pluralis liberal (dalam HI) secara otomatis berarti mempromosikan pelibatan aktor-aktor non-negara (seperti Greenpeace) dalam HI. Kaum pluralis liberal boleh saja berpendapat bahwa aktor-aktor non-negara tersebut penting dalam HI dan bahkan hal ini merupakan suatu hal yang baik, tetapi para teoretisi selayaknya lebih memerhatikan untuk mempertanyakan bagaimana dan mengapa hal ini terjadi daripada secara langsung mempromosikan para aktor non-negara.

Liberal berarti toleran dan plin-plan dalam pengertian politik. Sering kali dalam penggunaan sehari-hari, istilah liberal diartikan progresif atau sayap-kiri dan dalam perpolitikan AS biasanya untuk mempertentangkannya dengan aliran konservatif. Toleransi liberal bersifat paradoks dari universalisme yang dikandungnya, dan tentunya tidak semua liberalisme secara politik berarti progresif. ✦

Bacaan Lebih Lanjut

Claudė, I. (1956), *Swords into Plowshares: The Problems and Progress of International Organisation,* New York: Random House.

Doyle, M. (1986), 'Liberalisme and World Politics', *American Political Science Review,* Vol. 80, No. 4, hlm. 1151-1169.

Fukuyama, F. (1992), *The End of History and the Last Man,* New York: Free Press.

Hoffman, F. (1995), 'The Crisis of Liberal Internationalism', *Foreign Policy,* Vol. 98, Spring, hlm. 157-179.

Kant, I. (1991), *Political Writing* (diedit oleh Hans Reiss), Cambridge: Cambridge University Press.

Kegley, C. (ed.). (1995), *Controversies in International Relations,* New York: St Martin's Press.

Keohane, R. (1984), *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy,* Princeton: Princeton University Press.

Keohane, R. dan Nye, J. (1977), *Power and Interdependence: World Politics in Transition,* Boston: Little Brown.

Luard, E. (ed.). (1992), *Basic Texts in International Relations,* London: Macmillan.

Morse, E. (1976), *Modernisation and the Transformation of International Relations,* New York: Free Press.

Mitrany, D. (1948), 'The Functional Approach to World Organization', *International Affairs,* Vol. 24. hlm. 350-363.

Ricardo, D. (1971), *The Principles of Political Economy and Taxation,* Harmondsworth: Penguin.

Smith, A. (1910), *An Inqury into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (with and introduction by Edwin Seligman), London: J.M. Dent.

Bab 3 Strukturalisme

Pendahuluan

Meskipun saat ini strukturalisme berkurang popularitasnya, tetapi perspektif ini sangatlah penting dalam sejarah teori Hubungan Internasional, dan hingga kini masih tetap memiliki relevansi. *Pertama,* kaum strukturalis menghendaki agar keadilan terus dipahami oleh banyak orang, terutama di dunia berkembang. Strukturalisme bisa dilihat sebagai salah satu perspektif *'bottom up'* (transliterasinya, dari bawah ke atas —Peny.) di dunia, yang memprioritaskan pada gentingnya kondisi menyedihkan yang dialami orang-orang miskin, yang terpinggirkan, dan tertindas. (Penting untuk membedakan strukturalisme ini dari realisme struktural *'top down'* [lawan kata dari *bottom up* —Peny.]-nya Waltz —lihat bab 1). Kaum strukturalis berpendapat bahwa hubungan ekonomi global dirancang sedemikian rupa untuk menguntungkan kelas-kelas sosial tertentu, sehingga menghasilkan sebuah 'sistem-dunia' yang pada dasarnya tidak adil.

Kedua, strukturalisme mengajukan kritik penting terhadap liberalisme dan, juga, realisme. Strukturalisme secara

sekilas mirip dengan realisme karena keduanya sama-sama menekankan konflik sebagai proses utama dalam hubungan internasional. Terlebih lagi, neo-realisme dan strukturalisme sama-sama memandang bahwa konflik itu bersifat struktural karena kerangka kerja yang di dalamnya berlangsung hubungan ekonomi antar-negara. Strukturalisme juga mempunyai dasar yang sama dengan pendekatan pluralis liberal dalam penekanannya terhadap karakteristik hubungan ekonomi internasional yang secara mendalam saling terhubung dan terhadap pentingnya peran aktor-aktor non-negara. Meski demikian, strukturalisme lebih menekankan karakteristik perekonomian global yang rawan konflik dan hubungan dominasi dan dependensi yang bersifat struktural, daripada anarki sistem negara atau interdependensi yang kompleks.

Terakhir, strukturalisme menyoroti hubungan antara politik dan ekonomi. Kaum strukturalis menekankan pentingnya seluruh struktur hubungan yang di dalamnya berlangsung interaksi politik dan ekonomi dan proses-proses serta mekanisme yang mendukung struktur yang sama tersebut. Katakanlah bahwa, setiap bagian dari sistem dunia —negara-negara, MNCs, organisasi-organisasi transnasional, dan sebagainya— harus dipahami dalam hubungannya dengan posisi mereka dalam seluruh struktur kapitalisme global. Kaum strukturalis percaya bahwa negara-negara dan institusi internasional memiliki peran dalam 'mengatur' tatanan kapitalis global. Akan tetapi, mereka menganggap kelas (sosial) sebagai aktor *kunci* dalam tatanan kapitalis global. Dari perspektif kaum strukturalis, 'hubungan internasional' atau hubungan 'antar-negara' dikondisikan oleh karakteristik kapitalisme global/hubungan ekonomi.

Dalam pengertian ini, maka, sangatlah lebih masuk akal menganalisis hubungan internasional dengan lebih mengacu pada 'gambaran besarnya' daripada dengan menguji setiap dan semua aktor, tindakan, dan peristiwa. Pada bagian ini kita sedang menggunakan istilah strukturalisme yang menunjukkan pada ide bahwa setiap bagian hanya bisa dipahami di dalam hubungannya dengan sistem secara keseluruhan atau terhadap struktur berbagai hubungan yang tertata.

Pembahasan awal tentang strukturalisme bisa jadi sangat menantang. Pada awalnya, strukturalisme beranjak dari sejumlah nama. Strukturalisme sangat dipengaruhi oleh pemikiran Marxis dan, selanjutnya, sering disebut sebagai Marxisme struktural, Marxisme ilmiah atau neo-marxisme. Pada bagian 'Asal Usul, di bawah, kita akan memusatkan perhatian pada pengaruh utama Marx dalam pemikiran strukturalis —terutama kerangka karya-karya yang ditulisnya pada masa akhir hidupnya— yang sering disebut dengan ekonomi, determinisme ekonomi atau Marxisme ilmiah. Karyanya tersebut berbeda dengan tulisan-tulisan awal Marx (yang cenderung humanis) yang telah memberikan inspirasi bagi teori kritis.

Strukturalisme juga mempunyai nama lain, seperti teori dependensi, teori sistem-dunia, model pusat-pinggiran dan radikalisme. Strukturalisme mempunyai 'bahasa'nya sendiri yang tidak mudah untuk dipahami dan bisa jadi tidak mengenakkan. Usaha untuk memahami berbagai perbedaan yang tidak kentara di antara istilah-istilah ini sering kali menghalangi pemahaman umum tentang strukturalisme sebagai sebuah perspektif dengan wawasan-wawasan tertentu.

Sama halnya dengan pendekatan-pendekatan teoretis yang lain, kami menawarkan deskripsi atau penggambaran dari berbagai pemikiran mengenai perspektif ini, tanpa men-'jargon'-kan teks tersebut. Kami menyederhanakan dengan ide-ide dan asumsi-asumsi besar yang disetujui oleh berbagai penulis strukturalis. Kami jelaskan mengenai strukturalisme yang memberikan suatu analisis persuasif tentang beragam tema. Singkatnya, ajaran utama perspektif strukturalis adalah sebagai berikut (meskipun poin-poin ini membutuhkan penjelasan lebih lanjut yang akan kami paparkan seiring kita membahas bab ini): (1) karakteristik hubungan internasional sangat dibentuk oleh struktur perekonomian dunia yang kapitalis, atau sistem-dunia yang kapitalis (2) politik internasional dibentuk oleh —atau bahkan ditentukan oleh— faktor-faktor ekonomi; (3) aktor utama adalah negara-negara, perusahaan-perusahaan multinasional, dan transnasional, serta kelas-kelas sosial transnasional; (4) negara lebih mencerminkan kepentingan kelas-kelas dominan daripada keberadaan 'kepentingan nasional' yang murni; (5) kapitalisme pada dasarnya merupakan suatu tatanan sosial dan ekonomi yang tidak adil yang menghasilkan konflik dan ketidakharmonisan; (6) kapitalisme ditandai dengan kontradiksi-kontradiksi internal dan merupakan sasaran bagi krisis periodik.

Asal Usul

Tokoh yang paling berpengaruh di dalam strukturalisme adalah Karl Marx. Bagaimanapun, ide-ide utama Marx telah dikembangkan selama bertahun-tahun oleh para sarjana terkemuka lainnya. Di sini Kami hanya akan membahas beberapa sarjana strukturalis dan karya yang cukup

berpengaruh sebagai gambaran secara umum. Untuk itu, kami lebih memusatkan pembahasan pada teori dependensi dan teori sistem-dunia. Meski juga merujuk pada beberapa karya neo-Marxis lainnya yang cocok, namun keduanya telah dipilih karena mereka mengangkat contoh-contoh yang baik dari pemikiran strukturalis dengan cara yang relevan dengan hubungan internasional.

Kehidupan Marx yang cukup tragis kebanyakan didedikasikan pada karya tulis, filsafat,dan aktivismenya. Lebih jauh lagi, kematiannya pun tragis pula karena dari banyak yang telah dikerjakan dengan mengatasnamakan Marxisme dan membuatnya dikritisi atau dikecam di beberapa kelompok ilmiah tertentu tidak akan mendapatkan persetujuannya. Marx adalah seorang penulis produktif yang menghasilkan banyak sekali karya dalam hidupnya yang relatif singkat. Banyak dari karya-karya awal Marx memusatkan perhatian pada dan karakteristik hubungan materi sosial dan ekonomi yang terus berubah, karakteristik manusia atau subjektivitas, serta masalah-masalah alienasi (lihat bab 4). Strukturalisme memiliki asal usul pada karya-karya Marx pada masa-masa terakhir hidupnya, yang dihasilkan setelah 1857, dengan dikolaborasikan dengan Friedrich Engels.

Dalam masa terakhir hidupnya ini, Marx lebih mencurahkan perhatian pada karakteristik hubungan ekonomi dalam masyarakat kapitalis daripada masalah-masalah 'manusia' secara khusus. Marx berpendapat bahwa pengaturan perekonomian dan hubungan ekonomi —yang ia sebut sebagai 'model produksi'— membentuk dasar materi bagi masyarakat. Contoh kontemporer dari ungkapan 'model produksi' saat ini bisa dilihat dari orang-orang Barat yang hidup pada masa perekonomian yang secara umum

masih didasarkan pada produksi barang dan jasa manufaktur secara besar-besaran. Kapitalisme dibangun di atas prinsip-prinsip kepemilikan kekayaan pribadi dan pengejaran keuntungan. Sebagian besar orang bekerja setiap hari dalam seminggu di berbagai toko, pabrik, atau kantor, yang menghasilkan barang dan jasa bagi si'bos' (seorang pengusaha atau sebuah perusahaan multinasional besar), yang selanjutnya barang/jasa tersebut dijual untuk mendapatkan keuntungan di pasaran. Orang-orang tidak memiliki sendiri barang dan jasa yang mereka hasilkan, tetapi dibayar untuk kerja yang mereka lakukan. Lebih lanjut, perekonomian kontemporer ditandai dengan suatu pembagian tenaga kerja yang sangat kompleks sehingga produksi dari suatu komoditas, seperti mobil, misalnya, berlangsung di sejumlah pabrik, di beberapa negara yang berbeda, serta melibatkan begitu banyak orang dalam hubungan yang kompleks, pada berbagai tahap proses produksi yang berbeda. Secara umum, cara pemroduksian barang dan jasa (pembagian pekerja, produksi pabrik dan sebagainya) serta kondisi ketika barang dan jasa tersebut diproduksi (gaji buruh) menentukan 'dasar perekonomian' atau 'model produksi'.

Dalam serangkaian esainya, Marx mengembangkan teori nilai pekerja (*'labour theory of value'*) yang menunjukkan bahwa 'nilai tukar' dari barang dan jasa (sesuatu yang disebut sebagai 'harga' oleh orang-orang ekonomi kapitalis) sesungguhnya dibentuk dari kerja keras manusia. (Marxisme mengidentifikasi tiga kategori: nilai guna, nilai tukar, dan nilai tambah —mungkin Anda bisa mempelajarinya di tahap pembelajaran selanjutnya). Marx berpendapat bahwa para kapitalis membayar para pekerja lebih rendah daripada nilai sebenarnya dari yang mereka produksi. Di masa ketika

Marx masih hidup majikan membayar gaji yang akan, mungkin, mencukupi kebutuhan dasar pekerja. Marx menyebut perbedaan di antara hasil yang dapat diproduksi pegawai dengan bayaran yang mereka terima, sebagai *nilai tambah*. Sesuatu yang biasanya kita sebut sebagai *keuntungan* adalah nilai tambah yang diambilkan dari pekerja dan diambil alih oleh para kapitalis. Marx berpendapat bahwa kapitalisme digerakkan oleh akumulasi nilai tambah.

Akumulasi nilai tambah bisa dicapai dengan salah satu dari tiga cara berikut: para kapitalis mencari pasar-pasar baru untuk berbagai produk yang dihasilkan oleh pekerja; majikan bisa secara konstan menurunkan gaji untuk memperoleh nilai tambah dari para pekerja mereka; atau mereka bisa mengganti pekerja dengan teknologi baru (mesin-mesin). Marx percaya bahwa dalam beberapa hal strategi-strategi ini akan terus dilakukan dan cepat atau lambat kapitalisme akan runtuh, ketika para pekerja menjadi terlalu miskin untuk menyediakan barang-barang bagi pasar dan ketika pasar-pasar baru telah habis. Kapitalisme merupakan suatu sistem eksploitatif, yang diwarnai dengan berbagai tekanan, konflik, dan kontradiksi alami yang pada akhirnya akan menyebabkan kapitalisme jatuh.

Kotak Literatur

The Ragged Trousered Philantropists

Ide-ide Marx sangat berpengaruh dalam politik, sosiologi, sejarah, ekonomi, dan filsafat. Namun demikian, ide-ide Marx juga telah menginspirasi karya-karya fiksi besar. Novel Robert Tressel merupakan suatu pembelaan yang sangat menggerakkan dan informatif terhadap nilai-nilai sosialis suatu pesan yang

menyentuh hati. Novel itu berkisah tentang sekelompok tukang cat yang bekerja merenovasi sebuah rumah, yang dimiliki oleh sebuah keluarga kaya. Penceritaan novel ini dimulai dengan sebuah gambaran tentang kerja keras setiap hari, dalam kondisi keluarga yang miskin, demi mendapat upah yang kecil sekali, dan kehidupan yang ditandai oleh kekerasan kerja, dan ketidakamanan pekerjaan, serta dengan kesehatan yang buruk dan ketakutan. Novel tersebut menggambarkan proses perkembangan kesadaran kelas sosial dan karakteristik eksploitasi oleh kondisi-kondisi kehidupan secara terus-menerus. Beberapa ide Marx secara eksplisit dibahas, dijelaskan, atau disangkal oleh karakter-karakter utama di dalam novel tersebut.

Tentu saja hubungan manusia tidak hanya terdiri dari jenis hubungan ekonomi. Kita mungkin berhubungan dengan orang lain dari hari ke hari baik di rumah, universitas, atau di gereja. Hidup kita dan hubungan kita dengan orang lain lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah dan kita pun harus menuruti hukum. Kita juga berhubungan dengan orang lain secara tidak langsung ketika kita membaca tentang berbagai peristiwa yang terjadi jauh dari tempat kita atau menonton program acara di TV. Marx percaya bahwa 'dasar' perekonomian mendukung serangkaian institusi politik dan sosial lainnya, seperti negara, pengadilan, gereja, keluarga, sistem pendidikan, dan sesuatu yang kita kenal sebagai 'media massa'. Kaum Strukturalis kontemporer sering kali menunjukkan pada institusi-institusi tersebut sebagai 'superstruktur' masyarakat. superstruktur sangat terkait dengan —tetapi secara konsep berbeda dari— dasar perekonomian. Marx mencurahkan waktunya untuk mencoba menguraikan hubungan antara 'dasar' perekonomian dengan superstruktur politik, sosial, dan hukum. Dia percaya bahwa pada akhir-

nya kekuatan ekonomi akan menggerakkan (menentukan) perubahan sosial dan politik, dan banyak dari karyanya berhubungan dengan penjelasan tentang proses dan alasan terjadinya perubahan tersebut terjadi. Hubungan antara 'dasar' dan 'suprastruktur' telah banyak diperdebatkan di dalam Marxisme.

Dengan menggabungkan beberapa ide Marx tentang sejarah dan karakteristik perubahan masyarakat manusia —yang disebut sebagai 'materialisme sejarah'— dengan analisis ekonomi pemikir Marxis, maka membangun suatu analisis yang logis mengenai seluruh struktur masyarakat kapitalis yang kemudian bisa digunakan untuk memahami masing-masing 'bagian-bagiannya' sangatlah dimungkinkan. Untuk menyederhanakan pembahasan, cukup diketahui bahwa Marx menyatakan bahwa masyarakat manusia terdiri dari berbagai institusi dan bentuk-bentuk organisasi sosial yang mengisi fungsi atau peran tertentu dalam kerangka seluruh sistem sosial. Dia percaya bahwa seperti halnya masyarakat yang selalu berubah dari waktu ke waktu, maka begitu pula yang terjadi dengan bentuk-bentuk organisasi, praktik, dan institusi sosial.

Marx percaya bahwa kekuatan dinamis yang mendorong perubahan ini adalah ekonomi. Dengan kata lain, dinamika perubahan berakar dari 'model produksi' masyarakat tertentu. Marx percaya bahwa sebenarnya, kekuatan produktif berkembang setiap waktu seiring dengan manusia yang terus mengembangkan pengetahuan tentang alam. Seperti halnya dengan model produksi yang selalu meningkat dan berubah, maka superstruktur masyarakat juga berubah. Sehingga, pada periode sejarah yang berbeda, kita temukan berbagai model produksi yang berbeda-beda pula

—agrikultur, industri, dan sebagainya— dan suatu sistem dari berbagai bentuk organisasi hukum dan politik dengan hubungan sosial. Menurut Marx, hubungan sosial bisa dikenali dengan berbagai cara —feodal, borjuis, dan sebagainya.

Marx tidak sendirian dalam melihat hubungan dekat atau keterhubungan antara perekonomian, hubungan sosial, dan institusi politik. Pada periode sejarah yang sama, seorang pemikir 'fungsionalis', seperti Durkheim, juga berpendapat bahwa ruang sosial, politik, dan ekonomi kehidupan berhubungan sangat erat. Bagaimanapun, jika kaum fungsionalis melihat masyarakat seperti sebuah organisme hidup, Marx menganggap masyarakat dipenuhi dengan ketegangan-ketegangan/konflik-konflik internal. Marx berpendapat bahwa semua bentuk organisasi sosial dan ekonomi, hingga kini, didasarkan pada bentuk penindasan dan eksploitasi. Lebih lanjut, di dalam semua sistem terdapat kontradiksi-kontradiksi —berdasarkan karakteristik eksploitasi mereka— yang pada akhirnya akan membawa sistem tersebut ke dalam kejatuhannya. Marx percaya bahwa proses perubahan sejarah ini biasanya brutal. Selama masa transisi, muncullah 'kelas-kelas' yang berusaha untuk merebut kekuasaan dari tangan penguasa sebelumnya dan akan mengukuhkan dominasi mereka terhadap seluruh masyarakat.

Dari perspektif seorang Marxis —Revolusi Prancis dan periode kerusuhan sosial/kekacauan politik berikutnya— merupakan gambaran dari suatu proses yang menandai kemunculan suatu kelas sosial (borjuis) dan menggantikan kelas penguasa yang sah (rezim kuno atau aristokrasi). Para pemikir Marxis terus melihat kelas-kelas sosial dalam hubungan mereka dengan model produksi masyarakat.

Sehingga, kapitalisme kontemporer ditandai dengan kelas penguasa (borjuis) yang menguasai/mengontrol alat-alat produksi dan kelas pekerja (proletar) yang harus menjual tenaga mereka untuk bertahan hidup.

Sebelum membandingkan cara Marx dan Engels menyuguhkan suatu kerangka teoretis yang telah digunakan untuk mengembangkan analisis strukturalis tentang hubungan internasional, maka kami perlu menggambarkan cara digunakannya ide-ide Marx mengenai hubungan antara ekonomi, politik, dan masyarakat nantinya untuk mengembangkan analisis struktural yang mendetail dan kompleks terhadap kapitalisme (lihak kotak).

Kotak Penulis

Louis Althusser

Louis Althusser, Filsuf Prancis, merupakan contoh yang baik untuk menggambarkan seorang pemikir strukturalis. Althusser berpendapat bahwa kapitalisme merupakan sebuah sistem —seperangkat hubungan ekonomi, politik, sosial, dan hukum yang teratur— yang dikuatkan oleh serangkaian institusi-institusi, seperti keluarga, gereja, dan sistem pendidikan. Bagian-bagian dari sistem hanya bisa dipahami berkaitan dengan fungsi yang harus mereka penuhi di dalam sistem secara keseluruhan —dalam pengertian ini, institusi-institusi dan praktik-praktik tersebut harus dipahami menurut posisi mereka dalam keseluruhan sistem hubungan yang teratur. Struktur sistem kapitalis menentukan karakteristik/tujuan dari berbagai bagiannya.

Althusser juga dikenal lewat karyanya yang membicarakan tentang Aparat Negara yang Ideologis dan Aparat Negara yang Penindas. Dia berpendapat bahwa negara mempunyai perangkat 'penindas', seperti misalnya polisi atau militer, yang sewaktu-waktu bisa digunakan untuk memberantas pemberontak atau memadamkan kerusuhan sosial. Bagaimanapun, ke-

kuatan fisik adalah cara yang mahal dan sebenarnya tidak efisien dalam menghancurkan oposisi. Oleh karena itu, kelas penguasa berusaha untuk menguatkan pemerintahannya melalui sejumlah Aparat Negara yang Ideologis (ANI) yang memasukkan media massa dan sistem pendidikan. ANI ini menyebarluaskan ideologi kelas penguasa dan meyakinkan kelas pekerja bahwa posisi sosial merela yang berada di bawah kelas penguasa itu biasa, alami, dan adil. Sistem pendidikan, contohnya, memberikan para pekerja dan manager dengan skill-skill yang diperlukan untuk terus melanggengkan kapitalisme dan menanamkan seperangkat nilai dan kepercayaan yang melegitimasikan hubungan kelas kapitalis (lihat juga ide-ide Gramsci pada bab 4). Jika kapitalisme adalah sebuah sistem yang bersifat eksploitatif, yang menguntungkan kepentingan kelas penguasa dan merugikan kepentingan para pekerja, maka untuk tetap bertahan, kapitalisme harus terus-menerus mereproduksi kekuatan tenaga kerja. Hal ini melibatkan produksi yang tenaga kerja berkemampuan teknis dan ahli, yang tunduk dan patuh.

Marxisme sering dianggap 'ideologis', tetapi kaum strukturalis membuat berbagai pernyataan tentang hal yang mereka anggap sebagai analisis 'ilmiah'. Meski Marx tidak mampu memperhitungkan banyak faktor (dan oleh sebab itu ia 'salah'), dia sebenarnya sedang mencoba menyatakan bahwa segala yang terjadi waktu itu didasarkan pada proses tertentu yang dapat diamati dan tak mungkin dihindari. Sejarah 'ditentukan' dalam pengertian bahwa para kapitalis tidak bisa mencegah kehancuran mereka dan para pekerja ditakdirkan untuk mewarisi dunia dan membangun masa depan yang lebih baik dan lebih cerah. Ini adalah suatu kepercayaan yang tercermin dalam kata-kata terakhir dari novel Tressel *The Ragged Trousered Philantropists* (lihat kotak).

Kotak Refleksi

Manusia sebenarnya terus memikirkan diri mereka sendiri hidup dalam sejarah. Dengan kata lain, seseorang cenderung percaya bahwa sejarah akan berjalan ke suatu tempat sehingga hidup mereka mungkin akan menjadi lebih baik daripada ayah-ayah mereka. Lebih lanjut, sistem kepercayaan agama maupun ideologi sekuler modern keduanya cenderung meyakini tujuan akhir dalam kehidupan —ini disebut teleologi atau teleologika. Marxisme sangatlah berbeda dengan liberalisme. Meski demikian, pernahkah Anda perhatikan bagaimana keduanya sama-sama memandang sejarah *sebagai* kemajuan?

Kita telah membahas ide-ide Marx tentang karakteristik kapitalisme sebagai suatu sistem sosial ekonomi dan politik dan melihat bahwa karya Marx memengaruhi para penulis strukturalis. Kini kita kembali membahas cara Marx (dan kemudian para penulis strukturalis) mengembangkan berbagai konsep dan teori yang bisa digunakan untuk memahami studi hubungan internasional.

Marx tertarik dengan dinamisme kapitalisme dan cara-cara kapitalisme secara radikal mentransformasikan ranah ekonomi, sosial dan politik di seluruh Eropa. Sementara Marx meyakini bahwa krisis kapitalisme akan dialami oleh perekonomian industri yang relatif maju (seperti Inggris atau Jerman), Marx juga menyadari pengaruh dari krisis tersebut akan dirasakan oleh negara-negara lain di daratan Eropa. Marx juga merupakan seorang anggota Komunis Internasional, suatu organisasi yang didedikasikan untuk menumbuhkan kesadaran terhadap kepentingan kelas pekerja perusahaan transnasional, yang menyatukan kelas pekerja di seluruh Eropa, dan menekankan pentingnya solidaritas di antara orang-orang miskin dan tertindas di seluruh dunia.

Bagaimanapun, ide-ide Marx mengandung kekurangan penting jika seseorang mencoba menerapkannya ke dalam HI kontemporer. Marx tidak mengembangkan analisis yang berkelanjutan tentang sistem negara dan tidak bertujuan untuk itu. Hal yang lebih penting adalah bahwa idenya telah digunakan oleh orang lain dengan orientasi yang lebih internasionalis.

Karya Lenin merupakan batu loncatan penting antara analisis Marx tentang negara-negara kapitalis industri di Eropa Utara, dengan analisis tentang ekspansi kapitalis internasional serta konflik antar-negara. Ide-ide Lenin juga berasal dari seorang ekonom/sejarawan Inggris: Hobson. Marx percaya bahwa kapitalisme pada akhirnya akan mengalami kejatuhan seiring dengan makin menghilangnya para pekerja dan pasar-pasar telah mengalami kejenuhan. Hobson, dan kemudian juga Lenin, meski bukan berarti tidak setuju dengan tesis dasar Marx, namun demikian, mereka percaya bahwa Marx sangat meremehkan kemampuan sistem kapitalis untuk bertahan hidup dalam menghadapi krisis periodik. Dulu diyakini bahwa karakteristik kapitalisme adalah melakukan ekspansi agar mampu menemukan pasar-pasar baru dan menjamin berbagai sumber daya baru yakni bahan mentah dan tenaga kerja.

Pada saat yang sama, industrialisasi menyediakan bagi para elite dari negara-negara maju Eropa sarana-sarana yang diperlukan untuk menjalankan kampanye-kampanye ekspansi kolonial ke seluruh dunia. Hobson percaya bahwa kampanye-kampanye ini didesain untuk menjamin bahwa elite-elite kaya di negara-negara Eropa punya monopoli atas pasar (*captive market*: pasar yang para pembelinya dipaksa membeli barang tertentu dari seorang pemasok saja karena

barang tersebut tidak didapatkan di tempat lain —Peny.) dan bahwa kampanye-kampanye itu merupakan suatu bentuk eksploitasi. Lenin mengambil ide dasar tentang ekspansionisme ini dan —dengan menggunakan ide-ide panduan tentang karakteristik kapitalisme yang disuguhkan oleh Marx dan Engels— mengembangkan analisis lebih lanjut tentang imperialisme sebagai 'tahapan paling tinggi dari kapitalisme'.

Kotak Konsep

Imperialisme dan Kolonialisme

Imperialisme berarti perluasan kekuasaan melalui penaklukan. istilah ini merujuk pada perluasan kekuasaan/pengaruh hegemoni negara di luar batas-batas teritorinya sendiri, guna menjadi suatu kekaisaran —perluasan kedaulatan negara atas negara-negara lainnya. Kolonialisme merujuk pada suatu situasi yang di dalamnya sekelompok orang menempati teritori negara asing, menjalankan bentuk-bentuk dominasi terhadap warga pribumi, dan memelihara hubungan langsung dengan negara 'induk' mereka. Oleh karena, dominasi penjajah yang sukses secara terus-menerus tergantung terhadap loyalitas dari kelompok-kelompok tertentu di negara-negara bawahan, dalam kenyataannya, imperialisme dan kolonialisme mungkin terkait langsung.

Imperialisme konon menjadi tahap paling tinggi dalam perkembangan kaum kapitalis karena imperialisme akan melahirkan kejenuhan total pasar-pasar baru sesuai dengan prediksi Marx. Meski demikian, Lenin percaya bahwa jauh sebelum hal itu terjadi, kapitalisme akan jatuh karena dalam pencarian *captive market* dan sumber daya mentah malah sedang menghasilkan konflik-konflik di antara penguasa-negara-negara imperialis. Lenin percaya bahwa Perang Dunia I adalah hasil dari pertikaian tersebut dan bahwa

sejalan dengan kelas pekerja di negara-negara industrialis, orang-orang tertindas di seluruh dunia pada akhirnya akan memberontak dan melepaskan diri dari dominasi para imperialis, sehingga dunia jatuh dalam peperangan besar.

Ide-ide Lenin tentang akhir kapitalisme populer di kalangan intelektual selama masa *inter-war* (jeda antara Perang Dunia I dan II). Bagaimanapun, dengan adanya masa yang disebut sebagai tahun-tahun emas liberalisme (yakni, ledakan ekonomi setelah Perang Dunia II), ide-ide seperti itu segera menjadi tidak populer lagi, setidaknya di Barat, sehingga penjelasan-penjelasan ala 'strukturalis' tidak berperan penting pada awal perkembangan Hubungan Internasional. Kini kita membahas dua teori penting yang *telah* berpengaruh dalam pengembangan perspektif strukturalis di dalam disiplin kontemporer. Dua teori tersebut adalah teori ketergantungan (*dependency*) dan teori sistem-dunia (*world-system*).

Hanya sekitar akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an, ide-ide turunan dari pemikiran Marxis dikembangkan oleh komunitas Hubungan Internasional. Teori ketergantungan dan teori sistem-dunia menjadi penting dalam ranah ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi hanya pada saat ketika para sarjana HI pernah sangat tertarik terhadap hubungan antara ekonomi internasional dan politik internasional. Masa ini, secara umum, merupakan masa terjadinya ketidakpastian dan ketidakstabilan ekonomi. Pada awal 1970-an. Komunitas keuangan internasional mulai merasa ragu tentang sistem moneter yang disokong oleh dolar AS. Harga minyak meningkat drastis dan perekonomian dunia akhirnya jatuh dalam resesi yang sangat parah.

Pada sidang Majelis Umum PBB (UNGA) tahun 1974, negara-negara miskin di seluruh dunia bersama-sama menuntut suatu tatanan ekonomi internasional baru dan adil (NIEO: New and just International Ekonomi). Pada masa yang sama, berkurangnya ketegangan hubungan antara USA dan USSR mengalihkan perhatian para akademis pada hal-hal yang lebih berbasis ekonomi. Mungkin kita bisa bilang bahwa dari Marx ke Lenin, hingga munculnya teori ketergantungan dan teori sistem-dunia, ditambah dengan peningkatan dan penjernihan hubungan internasional, maka strukturalisme secara bertahap muncul sebagai suatu perspektif atau paradigma tersendiri di dalam Hubungan Internasional.

Teori ketergantungan menjadi populer pada 1960-an. Ia berkembang sebagai suatu kritik terhadap teori modernisasi liberal (lihat kotak). Selama 1950-an dan 1960-an negara-negara berkembang keluar dari penindasan kolonialisme/ imperialisme; mereka menuntut dan mencapai kemerdekaan. Meski demikian, semua ini terjadi dalam konteks Perang Dingin (lihat bagian 1); negara-negara Barat berusaha untuk menjaga negara-negara bekas jajahannya (atau dunia ketiga) agar tidak jatuh ke tangan rezim-rezim komunis dan mendukung negara-negara yang baru merdeka untuk mengembangkan perekonomian kapitalis. Hal ini sangat kentara dari sebuah teks penting karya Walts Rostow tentang pertumbuhan ekonomi/modernisasi yang berjudul '*A Non-Communist Manifesto*'. Negara-negara berkembang didorong untuk mengembangkan perusahaan terbuka dan untuk terlibat di dalam perdagangan bebas dalam masa 'tenang dunia' untuk mendorong persaingan, dinamisme, dan pertumbuhan ekonomi.

Kotak Konsep

Modernisasi

Konsep 'Modernisasi' merupakan suatu proses yang ditandai oleh saling keterhubungan perubahan secara ekonomi, teknologi, industri, sosial, budaya, dan politik. Masyarakat modern dan 'maju' yang dikontraskan dengan masyarakat tradisional yang 'terbelakang' diatur berdasarkan nilai-nilai sekuler dan individualistik. Di dalam masyarakat modern orang akan dinilai, diberi penghargaan, diberi peran, dan status tertentu menurut kecerdasan, prestasi, atau jasa individu, daripada berdasarkan hubungan kekeluargaan, gender, atau usia. Kekuasaan di dalam masyarakat modern terlihat dijalankan melalui mesin-mesin administrasi yang sejalan dengan abstraksi aturan-aturan yang ada. Bersama dengan institusi-institusi sekuler seperti negara modern dan institusi-institusi resmi, prosedur-prosedur dan proses-proses birokrasi harus menjamin bahwa masyarakat diperlakukan dengan adil.

Singkatnya, modernisasi biasanya dikaitkan dengan pembangunan dan industrialisasi kapitalis, penemuan teknologi, konsumerisme, ekonomi pasar, dan pertumbuhan populasi. Modernisasi juga dikaitkan dengan peningkatan jenjang pendidikan, perluasan peran negara, kemunculan pluralisme politik, penghormatan terhadap kebebasan sipil, hak-hak dan demokrasi, sebagai kebalikan dari bentuk-bentuk pemerintahan otoritarian.

Teori modernisasi telah disangkal baik berdasarkan klaim-klaim empiris dan teoretisnya yang cacat atau dengan alasan bahwa modernisasi, pada sisi paling baiknya, menggurui (*patronizing*) dan, sisi paling buruknya, merupakan suatu pembenaran kuat bagi bentuk neo-imperialisme. *Pertama,* kritik utama terhadap teori modernisasi yakni bahwa modernisasi belum berjalan, bahkan dalam masyarakat-masyarakat yang telah memakai nilai-nilai dan resep-resepnya. *Kedua,* dalam menyatakan bahwa mereka' bisa menjadi seperti 'kita', misalnya, orang miskin bisa menjadi seperti orang kaya, segera setelah itu

modernisme akan menganggap budaya, tradisi-tradisi dan sejarah-sejarah beberapa 'negara kurang berkembang' sebagai sesuatu yang tidak berarti.

Mazhab Dependensia (*Dependencia*) muncul sebagai usaha para intelektual Amerika Latin untuk memperkirakan ketidakmampuan yang ditunjukkan masyarakat mereka dalam 'mengejar' negara-negara kaya di Amerika Utara dan Eropa Barat, bahkan setelah negara-negara Amerika Latin pada umumnya mengikuti nasihat orang-orang Barat dan berusaha keras memodernisasi masyarakat mereka dan, juga, bergerak ke perekonomian pasar bebas. Teori ketergantungan menyerang teori modernisasi karena sangat menyesatkan dalam hal prediksi-prediksinya tentang prospek pembangunan di dunia ketiga. Pada kenyataannya, dengan pengecualian di beberapa bagian Asia Timur, pada pertengahan 1960-an kebanyakan dari dunia berkembang menemukan fakta bahwa *performance* ekonomi mereka sangatlah mengecewakan. Meski ditujukan pada teori modernisasi, teori ketergantungan juga menyuguhkan kritik terhadap analisis Lenin tentang imperialisme.

Iklim ekonomi/politik pada akhir 1960-an dan awal 1970-an adalah bahwa beberapa negara berkembang tertentu sangat terbuka terhadap kritik-kritik model-model pembangunan ala Barat. Ide kunci para teoretisi modernisasi adalah bahwa semua negara akan melalui tahap-tahap pembangunan dan bahwa cepat atau lambat semuanya akan menjadi negara maju dengan tingkat konsumsi tinggi. Meski demikian, teori modernisasi menolak/menyangkal kemungkinan bahwa faktor-faktor yang sangat struktural akan mencegah kemajuan ekonomi dan, lebih penting lagi, bahwa

karakteristik sistem internasional itu sendiri bisa menjadi masalah tersendiri bagi pembangunan suatu negara. Karena itu, teori ketergantungan mengembangkan suatu kritik terhadap teori modernisasi yang menekankan batasan-batasan struktural bagi pembangunan di Amerika Latin.

Para penulis utama Mazhab Dependensia, yang mencakup Andre Gunder Frank, Raul Prebisch, dan Henrique Fernando Cardoso dan Enzo Felatto, mengerjakan suatu analisis sejarah yang rinci tentang pola pertumbuhan dan pembangunan di Amerika Latin dan mengklaim menemukan bahwa Amerika Latin sebenarnya mencapai tingkat pertumbuhan dan pembangunan yang paling mengesankan pada saat terjadinya penurunan di dalam perdagangan dunia dan jaringan perdagangan dengan negara-negara berkembang rusak. Dengan menggunakan pengamatan empiris ini sebagai titik pijak, maka para teoretisi *dependencia* menyatakan bahwa hal ini terjadi karena struktur dasar perekonomian global seperti bekerja untuk meningkatkan keuntungan yang dapat diperoleh oleh perekonomian-perekonomian yang telah maju dan kaya di Barat (atau Utara), dan secara progresif memiskinkan negara-negara yang telah miskin (Selatan atau Dunia Ketiga). Struktur dasar perekonomian dunia, rezim perdagangan yang ada, karakteristik pasar untuk komoditas dasar dan sebagainya, pada dasarnya menentukan garis pembangunan masing-masing negara. Dengan demikian, meskipun sebagian besar negara-negara di dunia telah membebaskan diri dari imperialisme dan kolonialisme, namun Barat terus mendominasi dunia ketiga —oleh karena itu istilah neo-imperialisme dan neo-kolonialisme muncul. Teori ketergantungan bisa dianggap sebagai varian dari pemikiran strukturalis karena teori ke-

tergantungan mengingatkan bahwa kita hanya bisa mengerti, dalam contoh ini, Amerika Latin sebagai bagian dari perekonomian dunia, dalam hubungannya dengan sistem ekonomi dunia secara keseluruhan.

Teori ketergantungan juga bisa dianggap sebagai suatu bentuk dari determinisme ekonomi, selama para sarjana Dependensia masih terus menyatakan bahwa institusi-institusi politik dan hubungan sosial yang mencirikan negara-negara berkembang adalah suatu refleksi dari 'dasar' perekonomian —didominasi oleh para elit yang sebenarnya diuntungkan dari sistem ekonomi eksploitatif seperti itu. Teori ekonomi liberal menyatakan bahwa keberhasilan modernisasi dalam beberapa hal tergantung pada tingkat pertumbuhan kelas entrepreneur lokal. Sejalan dengan itu, strategi-strategi pembangunan biasanya mengarahkan potensi negara tersebut pada 'sekelompok elit masyarakat yang telah termodernisasi', memercayai bahwa seperti halnya negara yang mengalami industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi, maka kekayaan pun akan mengalir dari sekelompok elit ini kepada massa. Mereka juga percaya bahwa sekelompok elit ini akan menyebarkan nilai-nilai liberal, sosial, dan politik dan nilai-nilai ini akan secara bertahap menyebar dari kelas menengah yang telah maju ke kelas masyarakat awam. Para teoretisi ketergantungan berpendapat sebaliknya bahwa sementara elit-elit tentunya menikmati keuntungan dari posisi mereka di dalam sistem, efek menyebar (*trickle-down*) yang diharapkan tersebut tidak akan terwujud dan sepertinya meragukan untuk terjadi. Dalam kenyataannya, sementara negara 'seolah-olah maju', sebagian besar masyarakatnya secara progresif menjadi makin miskin.

Meski teori ketergantungan banyak berutang terhadap analisis kaum strukturalis, teori ini juga melontarkan kritik mengenai pemikiran Marxis yang menyatakan bahwa kelas-kelas tertentu memiliki kepentingan bersama yang terlepas dari nasionalitas mereka. Para teoretisi ketergantungan mengakui bahwa para elit transnasional memang berbagi beberapa kepentingan yang sama, tetapi mereka juga berpendapat bahwa dalam beberapa hal para pekerja di negara-negara berkembang —yang relatif dijerat dalam kemiskinan dan dieksploitasi— sebenarnya menikmati keuntungan dari eksploitasi di dunia ketiga. Para teoretisi imperialisme terdahulu telah mengakui bahwa kelas pekerja telah mendukung prinsip-prinsip yang diperjuangkan para nasionalis (terutama pada saat perang) dan, pada beberapa kasus, merupakan pendukung antusias kerajaan. Lebih lanjut, para teoretisi ketergantungan telah menunjukkan cara para borjuis di negara-negara kaya bisa mengeksploitasi negara miskin dan menggunakan keuntungan yang diperoleh untuk melemahkan tuntutan kelas proletarnya dengan memberikan kesejahteraan yang terbatas, misalnya. Dengan cara ini, para teoretisi ketergantungan menyatakan bahwa mungkin akan terdapat masalah bagi terwujudnya solidaritas pekerja, yang berasal dari berbagai kepentingan yang berbeda. Mereka mempertanyakan pemikiran Marxis tentang perbedaan pendapat yang sederhana mengenai kepentingan antara kelompok proletar (semua pekerja) dengan kelompok borjuis (semua pemilik).

Terakhir, kiranya pembahasan tentang asal usul strukturalisme tidak akan lengkap tanpa merujuk pada beberapa karya Immanuel Wallerstein. Wallerstein dikenal terutama dengan teori 'sistem-dunia (selanjutnya ditulis TSD). Sesuai

namanya, ide teori ini menyatakan bahwa unsur-unsur sistem dunia tidak bisa dipahami secara terpisah, sehingga diperlukan pendekatan secara holistik (menyeluruh). Logika TSD sangat sederhana untuk digambarkan. Pada saat tertentu, kita bisa membayangkan semua masyarakat sebagai sistem mini —unit-unit ekonomi, politik, dan sosial yang cukup-diri dengan satu budaya tunggal. Masyarakat ini ditandai oleh suatu pembagian kerja yang sederhana dan semua anggotanya mempunyai peran khusus— misalnya pemburu, petani, perawat, dan sebagainya. Kini, sedikit sekali contoh-contoh masyarakat seperti ini yang masih tersisa di dunia ini. Seiring waktu mereka telah ditelan oleh sistem organisasi sosial, ekonomi, dan politik yang lebih besar.

Sebuah sistem-dunia adalah sesuatu yang paling besar dan paling kompleks dari segalanya dan terdiri dari dua jenis —kerajaan-dunia (*world-empire*) dan ekonomi-dunia (*world-economy*). Menurut Wallerstein, sebelum kelahiran dan ekspansi kapitalisme telah terdapat contoh-contoh kerajaan-dunia yang menghidupi diri dengan penaklukan dan subordinasi terhadap orang di seluruh dunia. Kerajaan-dunia tentu saja berdasar eksploitasi ekonomi maupun dominasi politik. Contoh-contoh kerajaan-dunia seperti itu adalah mereka yang disebut dalam istilah 'peradaban besar' masa pra-modern, seperti Cina, Mesir, dan Romawi. Meski demikian, sekitar tahun 1500 sebuah jenis perekonomian-dunia baru lahir di Eropa dan secara bertahap meluas ke seluruh dunia (meski Anda harus menyadari bahwa tidak semua kaum Marxis dan strukturalis mencatat kemunculan kapitalisme dari tahun 1500). Teknologi transportasi baru memudahkan pasar-pasar yang amat luas untuk diraih dan dipelihara terutama ketika teknologi transportasi tersebut

digabungkan dengan teknologi militer Barat untuk mendikte dan memaksakan aturan-aturan dagang yang menguntungkan. Ketika 'kapitalisme' ini menyebar ke seluruh dunia, mulai berkembanglah sebuah 'pusat', yang terdiri dari kota-kota yang cukup maju, pabrik-pabrik terus bertumbuh, agrikultur yang maju teknologinya, tenaga kerja yang punya *skill* dan dibayar secara layak, dan sebuah 'pinggiran', tempat berasalnya bahan mentah yang diperlukan untuk kebutuhan ekspansi dan barang-barang primer utama tertentu, diperoleh. Dalam sistem seperti itu sangatlah penting menekan buruh untuk tetap menjaga biaya produksi. Dalam lingkungan seperti itu, pinggiran adalah tempat yang stagnan, kota-kotanya tidak berkembang, dan mereka yang memiliki uang, teknologi, dan *skill* akan berpindah ke 'pusat'.

Awalnya, perbedaan antara pusat dan pinggiran tidaklah terlalu kentara, tetapi secara bertahap kesenjangan semakin lama semakin meluas, negara-negara 'pusat' berfokus pada produksi barang-barang manufaktur, sedangkan pinggiran hanya menghasilkan produk primer dan komoditas dasar. Sejalan dengan itu, tidak meratanya pembangunan di seluruh dunia dan adanya pembagian dunia 'pertama' dan 'ketiga' bukanlah akibat dari ketertinggalan sejarah atau suatu masalah teknis, tetapi sebenarnya merupakan sebuah penerapan fungsi dari sistem-dunia yang kapitalis. Tidak seperti model Pusat-Pinggiran yang disuguhkan oleh teori ketergantungan, TSD juga mengajukan keberadaan istilah 'semi-pinggiran' —semua masyarakat menengah yang berperan penting dalam memfungsikan sistem-dunia sebagai sebuah keseluruhan (lihat di bawah). Ketika TSD diterapkan dalam hubungan internasional, bagiannya yang paling diutamakan adalah sebuah pernyataan bahwa unit-unit dengan

tingkat lebih rendah (negara, komunitas, individu) memang penting, tetapi tingkat paling tinggi (dari sistem-dunia) membatasi perilaku dengan berbagai cara (lihat kotak perdebatan struktur-agensi pada bab 4). Dengan demikian, tidak masalah jika kita memulai dari premis bahwa negara adalah unit dasar dari analisis dalam HI, atau mengajukan hipotesis bahwa negara adalah aktor otonom. Hal ini juga memperingatkan perihal institusi sosial secara terus-menerus berubah dan beradaptasi setiap waktu dan dalam konteks sistem-dunia yang dinamis.

Asumsi-asumsi

1. Karakteristik manusia tidaklah bersifat tetap dan esensial. Perhatian utama manusia adalah sosial dan sejarah. Meski demikian, karakteristik manusia dikondisikan oleh berbagai bentuk dari organisasi sosial, ekonomi dan politik yang ada. Seseorang adalah produk dari masyarakat mereka.
2. Subjek-subjek bisa dikelompokkan ke dalam berbagai kelompok yang dapat diidentifikasi yang mempunyai kepentingan konkret. Sementara mengakui karakteristik masyarakat manusia yang historis dan terus berubah, sebuah versi strukturalisme ini juga mengklaim dirinya 'ilmiah' dan 'objektif' dalam hal telah mengenali 'fakta-fakta' tertentu tentang dunia dan ketentuan objektif yang menentukan perjalanan sejarah.
3. "Strukturalisme sebagai ilmu pengetahuan' jelas berbeda dari sistem kepercayaan atau ideologi, dengan mengesampingkan kepercayaan moral mendalam dari mereka yang menggunakannya sebagai suatu teori penjelasan.

4. Kaum strukturalis tidak membuat pemisahan yang jelas antara nasional (dalam) dengan internasional (luar). Dari perspektif ini sistem-negara ditentukan oleh sistem kapitalis internasional, atau keduanya muncul secara bersamaan dan dengan demikian sama-sama penting.

Kotak Refleksi

Apakah strukturalisme menyangkal kemungkinan tindakan politik atau meremehkan usaha-usaha perjuangan-perjuangan heroik di seluruh dunia ketiga?

Tema-tema

Negara dan Kekuasaan

Negara adalah konsep inti dalam teori strukturalis, tetapi negara dipandang secara berbeda dari pendekatan realis dan liberalis. Strukturalis berbeda dalam melihat pentingnya negara-negara di dalam hubungan internasional dengan beberapa pendapat yang menyatakan bahwa analisis ekonomi dan politik internasional akan lebih baik jika difokuskan pada kelas-kelas sosial dan karakteristik aliansi-aliansi transnasional di antara kelompok-kelompok elit. Bagaimanapun, bahkan mereka yang lebih memilih analisis berbasis kelas pun mengakui pembagian dunia secara politis menjadi negara-negara dan peran yang dimainkan negara-negara ini dalam membantu mempertahankan kesenjangan berbasis kelas.

Secara sekilas, kaum strukturalis mirip dengan kaum realis dalam hal mengakui pentingnya negara dalam HI. Meski demikian, daripada melihat negara sebagai penguasa

berdaulat yang mewakili kepentingan 'bangsa' dalam hubungan internasional, kaum strukturalis meyakini bahwa negara dalam beberapa hal mencerminkan kepentingan kelas-kelas sosial yang dominan. Namun, terdapat ketidak-sepakatan di antara para pemikir strukturalis, seperti perihal benar atau tidaknya negara didominasi oleh kelas-kelas sosial elit atau menerapkan otonomi.

Menurut teori Marxisme klasik dan strukturalis awal, negara dilihat sebagai lembaga yang memaksa: aparat yang menindas yang mendukung tatanan sosial dan ekonomi yang eksploitatif dan mencerminkan kepentingan kelas-kelas dominan. Marx menggambarkan negara sebagai "komite eksekutif masyarakat kelas borjuis". Begitu juga kelompok instrumentalis, yang berpandangan sama dengan Marxisme klasik, menyatakan negara sebagai suatu instrumen langsung kelas penguasa. Aliran pemikiran instrumentalis ini mendukung bahwa kebijakan dan tindakan negara dibentuk untuk menguatkan dan membangun kembali posisi kelas dominan. Dalam masyarakat kapitalis sistem politik dan hukum mendukung kepemilikan terhadap kekayaan pribadi, mencakup kepemilikan pribadi terhadap alat-alat produksi. Sejak kapitalisme menghasilkan konflik, suatu sistem produksi harus dibuat untuk mengatur atau menekan konflik sosial. Kelas-kelas elit ini menggunakan kekuasaan untuk tujuan mereka sendiri dan merugikan mayoritas orang miskin yang tidak memiliki status sosial. Kaum strukturalis menunjukkan mekanisme institusi-institusi negara —pengadilan, polisi, militer, dan sistem ekonomi— bekerja untuk melindungi kepentingan pihak yang sedang berkuasa. Althusser melihat pengadilan, kekuatan polisi, dan militer sebagai sebuah bagian integral dari aparat

negara yang menindas, yang berlawanan dengan aparat negara yang ideologis. Negara sangat mewakili kelas penguasa. Jika perangkat aparat negara yang ideologis gagal, maka kekuatan aparat di bawah kontrol negara akan dipergunakan untuk menekan munculnya ketidakpuasan.

Contoh Dunia

El Salvador

Hubungan internasional penuh dengan contoh-contoh penindasan negara —hal yang sering kali disebut dengan terorisme negara. Dengan menyederhanakan sejarah yang kompleks, El Salvador adalah salah satu sekutu dekat AS pada saat Perang Dingin (lihat bab 1). Meski demikian, kebijakan-kebijakan anti-komunis dan pro-market ala AS di negara itu menciptakan kesenjangan yang sangat tinggi dalam masyarakat. Mayoritas penduduk hidup dalam kemiskinan karena kurangnya akses terhadap sumber daya atau uang. Antara 1970-an dan 1980-an, pemerintahan sayap-kanan yang pro-AS hanya menjaga kekuasaan mereka dengan penindasan besar-besaran terhadap para politikus sayap-kiri, kegiatan kesatuan perdagangan, dan aktivisme petani; militer memainkan peran vital dalam penindasan ini, yang meski kadang bersifat tertutup, tetapi sering kali terbuka. Pemilu-pemilu diselenggarakan dengan penuh kecurangan, para penguasa mempraktikkan korupsi dan orang-orang dihantui rasa takut. Negara, pada kenyataannya, merupakan pelayan dari sekelompok kecil elit yang dikenal sebagai '*the fourteen families*'.

Versi-versi strukturalisme yang terkini menyatakan bahwa negara dapat mempunyai otonomi yang terlepas dari kelas dominan. Negara tentu saja tidak dipandang sebagai 'penengah netral', tetapi dianggap relatif bebas dari berbagai kepentingan tertentu. Negara-negara jelas membuat pilihan-pilihan ketika sedang menyusun berbagai kebijakan.

Terlebih lagi, pilihan-pilihan yang sama ini kadang secara menyakitkan memengaruhi beberapa bagian dari permodalan. Banyak negara bahkan berjuang untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar untuk lepas dari kelas-kelas dominan. Hal ini mungkin sebagai tanggapan terhadap tekanan-tekanan ditegakkannya nilai demokrasi.

Seandainya saja kita menganggap bahwa negara mempunyai otonomi, bagaimanapun juga, negara terpaksa berhadapan dengan kontradiksi-kontradiksi politik dan ekonomi yang terkandung di dalam kapitalisme dan tidak pernah bisa sepenuhnya melepaskan batasan-batasan yang dipaksakan oleh sistem kapitalis global. Guna menyusun kebijakan-kebijakan berotonomi, negara membutuhkan sumber-sumber, termasuk sumber finansial yang bisa diperolehnya melalui pajak. Sangat beralasan jika kemudian, negara menjadi sangat bergantung pada kelas kapitalis untuk menyelenggarakan tingkat kegiatan ekonomi yang memuaskan, yang diperlukannya untuk mempertahankan pemerintahan.

Tentu saja, negara bisa meminjam uang dari bank atau mencoba menarik investasi dari berbagai perusahaan atau para investor asing. Pada kenyataannya, inilah kasus yang umumnya terjadi di beberapa negara dunia ketiga. Bagaimanapun, ketergantungan terhadap modal asing mengandung risiko karena sementara negara sedang meningkatkan otonominya terhadap kelas penguasa di dalam negara itu sendiri, ketergantungannya terhadap modal asing terus-menerus meningkat. Sumber-sumber asing umumnya berasal dari investasi asing langsung, yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional besar, yang dalam kasus tersebut investorlah yang memegang kontrol. Negara,

tentu saja, bisa mengambil utang dari bank pribadi atau, dalam keadaan tertentu, mengajukan bantuan pada International Monetary Bank (IMF) atau World Bank (WB). Pinjaman-pinjaman dari bank-bank swasta tidak membatasi otonomi negara, meski bank tersebut perlu diyakinkan bahwa uang tersebut tentunya akan dialokasikan secara bijak. Dengan kata lain, jika utang terbukti sulit dikembalikan, maka negara bisa terjebak ke dalam situasi ketergantungan dan kemudian pilihan-pilihannya kemudian menjadi terbatas, dan sumber-sumber kredit berikutnya akan segera mengering. Sejalan dengan hal ini, bahkan jika kita setuju kalau negara mempunyai otonomi terhadap kelas-kelas penguasa di dalam wilayahnya, tetap saja negara dibatasi berbagai kenyataan perekonomian global. Hal ini tentu saja berarti bahwa kebijakan pemerintahan, apa pun dasar ideologinya, sangat dibentuk oleh berbagai tekanan dari para kelompok elit maupun oleh tekanan-tekanan sistemik.

Contoh Dunia

Krisis Utang

Ini adalah pengetahuan mengenai tingkat pembatasan negara-negara berkembang secara keterlaluan oleh kekuatan pasar dunia, kelompok-kelompok dominan pemegang modal, *dan* institusi-institusi internasional.

Pada 1973 negara-negara penghasil/pengekspor minyak, OPEC, menggunakan 'kekuatan bersama' mereka untuk menaikkan harga satu barel minyak mentah secara dramatis di pasar dunia. Sejak negara-negara Barat pada umumnya (dan tentunya juga negara-negara berkembang) tergantung pada impor minyak untuk memenuhi kebutuhan energi mereka, mereka tidak punya alternatif lain selain membayar lebih.

Akibatnya, beberapa negara OPEC mendapati diri mereka sendiri tiba-tiba 'menjadi kaya' dengan tumpukan *'petrodollar'* yang nilainya sangat besar. Dana ini segera diinvestasikan kembali di bank-bank Barat. Pada saat itu, tingkat bunga di seluruh dunia menurun dan tingkat inflasi relatif tinggi. Untuk itu, banyak negara berkembang didorong untuk melakukan pinjaman secara besar-besaran —dengan kondisi yang ada saat itu, sebagai akibatnya mereka mendapatkan pinjaman-pinjaman bebas bunga. Negara-negara berkembang berharap pinjaman-pinjaman ini akan memberikan suntikan dana yang sangat besar bagi perekonomian mereka dan memberikan daya gerak bagi pembangunan ekonomi. Pada saat yang sama, bank-bank Barat mempunyai banyak persediaan *petrodollar* dan sedang mencari peluang-peluang investasi baru di saat negara-negara Barat enggan meminjam.

Bagaimanapun, dalam periode yang singkat, kondisi-kondisi perekonomian global telah berubah secara dramatis. Pada awalnya, negara-negara yang mengimpor minyak mengambil tindakan untuk melindungi perekonomian mereka sendiri dan mulai mencari cara untuk membatasi impor, sering kali dengan mengembangkan komoditas-komoditas substitusi yang sebelumnya telah diimpor. Akibatnya, harga pasar dunia dari beberapa komoditas dasar jatuh. Meningkatnya harga minyak juga mengakibatkan tekanan-tekanan inflasi di dalam perekonomian Barat, sehingga tingkat bunga meningkat sangat cepat. Beberapa negara berkembang kini mendapati diri mereka sendiri dalam suatu posisi yang sangat sulit; mereka mempunyai banyak utang, sedang menghadapi meningkatnya ketatnya proteksionisme dalam perekonomian Barat, sedang mengalami memburuknya *terms of trade* bagi komoditas-komoditas dasar yang mereka jual di pasar dunia, harus membayar harga minyak baru yang lebih tinggi, serta harus membayar tingginya tingkat suku bunga dari pinjaman mereka. Dengan keadaan seperti itu, tingkat utang dinaikkan dan beberapa negara mendapati bahwa mereka tidak mampu membayar bahkan jikapun hanya bunga utang mereka. Pada 1982, Meksiko mengumumkan moratorium (penundaan membayar) utangnya dan keuangan dunia pun jatuh ke dalam krisis.

Ketidakmampuan negara-negara berkembang untuk membayar kembali utang mereka mengejutkan institusi-institusi finansial global. Dengan kondisi seperti itu, bank-bank swasta enggan menawarkan pinjaman-pinjaman segar dan negara-negara berkembang dipaksa berpaling kepada sumber-sumber keuangan alternatif yang sebenarnya, IMF dan Bank Dunia. Institusi-institusi ini tentunya menyediakan negara-negara berkembang sumber-sumber kredit segar tetapi, sebagai gantinya, menetapkan kondisi-kondisi yang kejam. Negara-negara berkembang tidak punya banyak alternatif selain menerima paket 'penyesuaian struktural' yang ketat yang mencakup, beberapa di antaranya, devaluasi mata uang lokal, mengadopsi strategi pertumbuhan yang berorientasi ekspor dan memotong subsidi kesejahteraan. Krisis utang jelas menandakan pembatasan otonomi negara yang keterlaluan.

Dengan memerhatikan kekuatan perekonomian global sebagai faktor yang membatasi/menentukan tingkah laku negara, kaum strukturalis (misalnya, Wallerstein) membuat pemisahan antara negara-negara 'pusat' dan 'pinggiran' dengan berpendapat bahwa di pusat, negara relatif kuat, namun berfungsi untuk meningkatkan berbagai kepentingan kelas borjuis dengan mencegah negara-negara lain membangun berbagai rintangan politik terhadap berbagai aktivitas kelas borjuis ini untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian, negara-negara pusat membentuk pasar dunia dalam berbagai cara demi meningkatkan kepentingan para entrepreneur melawan kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok lain. Negara-negara pusat bekerja sama untuk memperluas dan memperdalam pengaruh sistem-dunia kapitalis. Negara-negara yang berpengaruh, misalnya, Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman saling bekerja sama (dan melalui pengaruh mereka dalam organisasi-organisasi internasional seperti Bank Dunia atau IMF) untuk menjamin

kelangsungan perekonomian kapitalis internasional, yang menguntungkan kelas-kelas elit di seluruh dunia.

Berdasarkan paparan tersebut, meski kaum strukturalis percaya bahwa negara-negara bernilai yang sangat penting, namun studi hubungan internasional juga harus memperluas perhatian pada serangkaian aktor lain seperti Bank Dunia, IMF, dan perusahaan-perusahaan multinasional. Negara-negara pusat juga mencari cara untuk menguatkan keuntungan-keuntungan para produser mereka dan untuk mengekalkan peran mereka dalam sistem dunia dengan memaksakan dominasi kultural mereka di dunia.

Dalam mengembangkan analisis tentang saling keterhubungan antara negara, sistem negara, dan kapitalisme global, kaum strukturalis telah menjelaskan konsep kunci tentang kekuasaan. Kekuasaan bagi mereka bukanlah tentang 'uji coba kekuatan' (misalnya, siapa yang memenangkan perang) tetapi sesuatu yang lebih enteng. Kekuasaan tertanam dalam hubungan-hubungan sosial; dengan kata lain, kekuasaan merupakan satu bagian dari struktur. Kekuasaan mencakup berbagai kesenjangan antara hubungan kelas kapitalis dengan hubungan pusat-pinggiran. Kekuasaan juga mencakup ide-ide yang tidak bisa dikatakan nyata, seperti persuasi atau pengaruh, dan mungkin juga 'tak terlihat'. Seseorang atau kelompok mungkin mempunyai kekuatan terhadap pihak lain tidak hanya melalui berbagai ancaman dan tekanan tetapi juga melalui ideologi dan manipulasi. Dengan cara ini, hubungan kekuatan mungkin mulai dilihat sebagai suatu tatanan 'alami' dari segala sesuatu; tak seorang pun menyadari bahwa kekuatan sedang diterapkan.

Kotak Analogi

'Budak Bahagia'

Cara kerja perekonomian kapitalis global tidak selalu terkesan berkonflik, penindas, atau eksploitatif karena hubungan-hubungan itu sering tidak jelas tegas. Meskipun pemikiran tentang 'budak bahagia' tidak langsung berasal dari pemikiran Marxis/strukturalis, namun berguna untuk menggambarkan kondisi disamarkannya hubungan kekuasaan dengan pintar.

'Budak Bahagia' mungkin mampu menggambarkan sebuah masyarakat tempat perbudakan merupakan sebuah hal yang biasa terjadi. Sebagai sebuah hal yang biasa terjadi orang tidak mempermasalahkan perbudakan sebagai bagian dari tatanan alami dari segala sesuatu yang ada. Di dalam masyarakat seperti ini seorang pemilik budak mungkin saja memberikan perawatan kesehatan, pendidikan, makanan, akomodasi, dan jam kerja yang wajar kepada para budak mereka. Budak, selanjutnya, mungkin merasa sangat bahagia dengan nasibnya. Meskipun sebagai pengamat luar, kita bisa melihat adanya hubungan kekuasaan, mungkin pemilik ataupun budak menganggap hubungan mereka bukan sebagai salah satu bentuk kekuasaan, tetapi lebih sebagai satu bentuk kebaikan dan saling hormat dalam konteks situasi yang biasa. Untuk memperluas analogi, kita tanyakan kemungkinan bahwa kekuasaan adalah salah satu aspek dari semua bentuk mulai dari pemilik pabrik dengan pekerja hingga suami dengan istrinya? (lihat bab 6).

Institusi-institusi dan Tatanan Dunia

Dapat diargumentasikan ide bahwa Marxisme tidak memberikan sumbangan nyata bagi teori Hubungan Internasional karena Marxisme banyak sekali membahas tentang ekonomi tetapi tak satu pun membahas tentang politik internasional. Para pemikir Marxis menolak ide ini karena ekonomi bukanlah suatu ruang aktivitas manusia yang terpisah dari aktivitas lainnya, tetapi terhubung dengan faktor-faktor

sosio-politik. Substruktur ekonomi mencakup model produksi dan hubungan-hubungan sosial dari produksi, dan superstruktur ekonomi mencakup penerapan kekuasaan (politik) oleh suatu kelas terhadap kelas lain. Kaum strukturalis mengikuti Marx dalam hal menekankan bahwa politik dan ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat. Tak heran kemudian, jika strukturalisme memberi kontribusi bagi pemahaman kita tentang tatanan dan institusi-institusi dunia. Pada bagian ini kita akan memerhatikan pengonseptualisasian tatanan dunia menurut teori ketergantungan dan teori sistem dunia, serta secara singkat membahas mengenai peran institusi-institusi.

Kaum strukturalis melihat tatanan dunia sebagai sebuah sistem kapitalis dari rangkaian berbagai hubungan sosial, ekonomi dan politik yang saling terhubung yang secara bersama-sama membentuk sebuah struktur. Dari perspektif seorang strukturalis, kapitalisme modern sekarang telah meluas menjadi suatu sistem global; perekonomian lokal, nasional, dan regional sekarang telah membentuk sebuah bagian dari suatu sistem ekonomi yang saling terhubung lebih luas dan yang dikondisikan oleh sistem tersebut. Juga, kondisi-kondisi kehidupan bagi individu, kelompok-kelompok sosial, dan bahkan negara-negara, ditentukan oleh posisi mereka di dalam sistem kapitalis global secara keseluruhan.

Intinya, kaum strukturalis melihat sistem kapitalis global ini sebagai suatu sistem yang distrukturkan secara vertikal-horizontal. Hubungan antar-negara distrukturkan secara hierarkis antara yang kaya dan berkuasa —pusat— dengan yang miskin dan tanpa pengaruh —pinggiran. Ada juga suatu struktur horizontal dari hubungan antar-kelas,

yakni berbagai hubungan yang muncul di antara para elit, di negara-negara pusat maupun pinggiran. Elit-elit di pihak kaya "Utara" dan di pihak si miskin "Selatan', berbagi berbagai kepentingan dasar dalam mendukung sistem ini karena para elit ini sebenarnya diuntungkan dari eksploitasi terhadap berbagai kelompok sosial lainnya.

Kotak Penulis

Immanuel Wallerstein (Sistem Dunia Modern)

Menurut Wallerstein, konsep dari suatu ekonomi dunia menganggap bahwa akan selalu muncul sebuah perekonomian di mana pun terdapat suatu pembagian kerja secara sosial yang terus-menerus meluas dan relatif lengkap dengan seperangkat proses-proses produksi yang terintegrasi yang berhubungan satu dengan yang lain melalui sebuah pasar. Wallerstein (meski yang lainnya tidak setuju) percaya bahwa sebuah perekonomian-dunia kapitalis hingga kini masih dianut setidaknya di sebagian dunia sejak kemunculannya di abad XVI. Kini kita telah mencapai tahap perkembangan dan ekspansi kapitalis ketika seluruh dunia beroperasi dalam kerangka satu-satunya pembagian kerja secara sosial (sistem kapitalis global). Oleh karena itu, amatlah penting kemudian untuk berarti membicarakan suatu ekonomi-dunia kapitalis.

Institusi-institusi sosial utama perekonomian dunia kapitalis adalah negara, kelas sosial, 'orang', dan rumah tangga. Wallerstein percaya bahwa semua institusi dan hubungan sosial tersebut sebenarnya dibentuk (atau bahkan diciptakan) oleh kinerja perekonomian dunia yang berlangsung terus-menerus. Dengan demikian, kita bisa berbicara tentang sebuah 'sistem-dunia'. Dinamika utama yang mendasari perekonomian dunia kapitalis adalah hubungan antara pemilik modal/buruh dan pengambilan *surplus* yang diciptakan oleh produser (tenaga kerja) langsung atau oleh pihak lain (pemilik modal) baik di tempat produksi secara langsung atau ketika barang-barang dipertukarkan di pasar. Prinsip tentang kepemilikan pribadi, yang

diatur oleh hukum dan dilaksanakan oleh negara, berarti bahwa para '*appropriator*' (para alokator modal) mengontrol modal dan bahwa hak-hak mereka terhadap *surplus* dijamin secara hukum. Kini,makin banyak *appropriator* yang bukan saja individu tetapi entitas kolektif, seperti perusahaan multinasional.

Jika analisis kelompok Marxis Ortodoks menekankan proses kesenjangan pertukaran antara modal dan kerja, Wallerstein mengenalkan pemikiran tentang pusat dan pinggiran dalam perekonomian dunia dan menyebut pertukaran barang yang mengandung sejumlah kerja sosial yang tidak adil sebagai hubungan pusat-pinggiran. Wallerstein berpendapat bahwa struktur perekonomian dunia membiarkan terjadinya pertukaran barang dan jasa yang tidak adil tersebut sebagaimana gambarannya bahwa sebagian besar 'nilai-surplus' yang diperoleh di wilayah pinggiran di dalam perekonomian dunia kemudian dipindahkan ke wilayah pusat. Akan tetapi, tidak seperti para teoretisi Dependensi, Wallerstein menempatkan keberadaan 'semi-pinggiran' di dalam perekonomian dunia atau sistem-dunia. Dia berpendapat bahwa beberapa negara tidak berada di wilayah pusat ataupun pinggiran dalam perekonomian dunia. Malah mereka bisa dianggap sebagai negara-negara semi-pinggiran. Negara-negara ini terlibat dalam kegiatan-kegiatan produksi, yang beberapa di antaranya 'seperti kegiatan produksi pusat' dan beberapa yang lain 'seperti pinggiran'. Contoh dari negara-negara ini mungkin seperti negara-negara industri baru (NICs) di Asia. Jadi, struktur perekonomian dunia terdiri dari tiga bagian, yaitu pusat, pinggiran dan semi-pinggiran. Negara-negara dan kelompok sosial bisa bergerak, dengan perlahan, dari satu kategori ke kategori lainnya, tetapi mereka tetap berada di dalam struktur perekonomian dunia secara keseluruhan.

Kelompok teoretisi ketergantungan berpendapat bahwa perekonomian-perekonomian di Asia, Afrika, dan Amerika Latin berada di bagian 'pinggiran' dalam perekonomian global dan mereka bergantung pada negara-negara kapitalis di Eropa Barat dan Amerika Utara yang ada di

'pusat' sistem. Berbagai hubungan dagang dan aliran modal di antara pusat dan pinggiran dalam perekonomian global itu tidak bersifat simetris, pergerakan surplus perekonomian menuju ke pusat dan membahayakan sumber bahan mentah di pinggiran. Negara-negara di pinggiran memproduksi produk-produk primer, seperti bahan-bahan mentah —kapas atau kopi, bukan barang-barang manufaktur, seperti kendaraan bermotor atau barang-barang elektronik. Tingkat spesialisasi atau pembagian tenaga kerja ini makin memperparah kondisi kesenjangan. Surplus mengalir keluar dari pinggiran ke pusat, menguntungkan permodalan internasional. Negara-negara pinggiran (Selatan atau Dunia Ketiga) tidak mampu bersaing dengan pusat dikarenakan ketergantungan mereka —dan eksploitasi oleh— pusat (Barat atau Utara) perekonomian kapitalis internasional. Keterlambatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di pinggiran disebabkan oleh kurangnya teknologi dan investasi yang —sekali lagi hal itu— merupakan konsekuensi ketergantungan mereka terhadap Pusat.

Menurut teoretisi sistem-dunia, kapitalisme digerakkan oleh dorongan akumulasi —dari setiap 'pengusaha' individu ataupun perusahaan besar yang berusaha memaksimalkan keuntungan mereka. Untuk itu, ada suatu kecenderungan mendasar atas volume produksi yang sangat besar di dalam perekonomian dunia untuk memperluas, dengan meningkatnya jumlah produk yang dijual di pasaran lokal, nasional, maupun dunia.

Meski demikian, keuntungan hanya didapat jika ada permintaan efektif terhadap barang dan jasa yang diproduksi dan hal ini merupakan masalah jika upah sedang ditekan. Menurut Wallerstein, dinamika perekonomian dunia men-

jamin bahwa tingkat penawaran dunia terus naik secara stabil, sementara tingkat permintaan dunia relatif tetap untuk periode-periode tertentu. Hal ini menghasilkan berbagai kebuntuan proses akumulasi, yang selanjutnya menghasilkan masa resesi dan stagnasi ekonomi.

Sebagai tanggapan bagi berbagai tekanan tersebut, para kapitalis akan merestrukturisasi jaringan proses produksi dan hubungan sosial yang mendasarinya sebagai upaya untuk mengatasi kesulitan dalam akumulasi modal. Restrukturisasi ini mencakup upaya-upaya untuk mengurangi biaya produksi di negara-negara pusat dengan mengganti tenaga kerja manusia dengan mesin-mesin. Alternatif lainnya, perusahaan-perusahaan kapitalis mungkin pindah ke negara-negara pinggiran untuk mendapatkan tenaga kerja dengan upah lebih murah. Masa-masa restrukturisasi mempunyai pengaruh yang mendalam bagi berbagai hubungan antar-kelas baik di dalam negeri maupun di antara negara-negara di dalam sistem dunia.

Premis utama bahwa perekonomian dan politik itu sangat erat hubungannya, memberikan kaum strukturalis alasan untuk membuat berbagai penjelasan tentang karakteristik dan peran negara dan institusi dalam hubungan internasional untuk 'mengatur' tatanan dunia (hubungan-hubungan global yang kapitalis). Mereka berpendapat bahwa kapitalisme dipelihara dan dilangsungkan oleh serangkaian institusi dan aksi-aksinya serta oleh berbagai ideologi atau sistem kepercayaan dominan yang mengukuhkan tatanan dunia saat ini. Kesenjangan ekonomi mendasar yang ada antara pusat dan pinggiran menentukan karakteristik negara: secara sederhana, negara-negara pusat itu berkuasa dan negara-negara pinggiran itu lemah. Negara-

negara pinggiran mempunyai sedikit otonomi sehubungan dengan posisi mereka dalam perekonomian global, karena kelas-kelas penguasa di negara-negara pinggiran terikat pada kepentingan ekonomi mereka untuk mendapatkan modal internasional dan memainkan peran manajerial atau penghubung bagi permodalan internasional di dalam negara-negara mereka sendiri terhadap modal internasional dengan menggunakan kekuasaan negara untuk melindungi berbagai kepentingan perusahaan atau institusi multinasional tersebut. Kaum strukturalis percaya bahwa institusi-institusi besar, seperti PBB, World Bank, dan IMF serta blok-blok perdagangan, seperti NAFTA, didominasi oleh kelompok-kelompok elit dan/atau negara-negara hegemon. Jadi kita tidak bisa memercayai pernyataan-pernyataan World Bank dan IMF tentang peran mereka dalam mengurangi kemiskinan begitu saja; organisasi-organisasi ini berperan di dalam struktur kapitalis yang membantu memelihara ketidakadilan saat ini.

Kotak Refleksi

Bagaimana Wallerstein akan menjelaskan besarnya kesenjangan yang ada di antara negara-negara kaya Utara, (pusat) yang berkembang dan terindustrialisasi, dengan negara-negara miskin Selatan (pinggiran), yang terbelakang?

Kesenjangan dan Keadilan

Kaum strukturalis dengan jelas melihat kesenjangan sebagai tampilan mendasar dan penderitaan dari berbagai hubungan internasional karena sistem internasional terbagi ke dalam kelompok '*the haves* (baca: orang kaya)' dan '*have-nots* (baca: orang miskin)'. '*The haves*' merupakan (atau ke-

banyakan hidup di) negara-negara kaya, yang umumnya terletak di belahan bumi utara. Kaum strukturalis berpendapat bahwa negara-negara ini, atau elit-elit kapitalis mereka (begitu pun dengan elit-elit lokal di negara-negara dunia ketiga yang lebih kecil jumlahnya), menempati pusat yang kuat di dalam tatanan ekonomi dan politik dunia, atau sistem dunia. *'The have-nots'* merupakan negara-negara yang lebih miskin di selatan atau kelas-kelas tereksploitasi. Mereka lemah dan kurang berkuasa dan mencakup mereka kenal sebagai pinggiran.

Dengan berfokus pada struktur sistem internasional dan ekonomi dunia, teori sistem-dunia melihat pengalaman —dan masalah— di negara-negara dunia ketiga dengan cara yang sangat berbeda dibandingkan dengan optimisme teori modernisasi liberal. Contohnya, akhir kolonialisme (sewaktu negara-negara dunia ketiga diperintah sebagai koloni dari negara-negara lain, seperti Inggris) tidak bisa dilihat sebagai tanda berakhirnya eksploitasi negara-negara dunia ketiga oleh bangsa-bangsa industrialis yang 'kaya-raya'; 'akhir' kolonialisme secara sederhana hanya mengubah karakteristik kolonialisme secara langsung —berdasarkan penguasaan militer— kepada bentuk tidak langsung berdasarkan struktur-struktur ekonomi (yakni neo-kolonialisme).

Menurut pandangan ini, hubungan dunia ketiga dengan pusat-pusat finansial dan kekuasaan komersil di negara-negara dunia pertama yang kaya dilangsungkan dengan jalan yang tidak adil karena negara-negara kaya menggunakan posisi-posisi dominasi ekonomi yang telah mereka miliki sebelumnya —akumulasi modal hasil dari kolonialisasi mereka— guna mengatur perekonomian dunia yang

menguntungkan mereka dan mengekalkan dominasi mereka. Negara-negara dunia ketiga yang mencoba keluar dari sistem tersebut secara ekonomi tidak mampu mengalami sukses dan, sehingga, betapapun tidak adil situasi yang berlangsung— kebanyakan negara-negara dunia ketiga ini menjadi tergantung terhadap (dan terjebak oleh) sistem tersebut. 'Ketergantungan' ini telah menyebabkan banyak negara dunia ketiga tidak mampu mendefinisikan secara efektif tujuan-tujuan pembangunan mereka sendiri —apalagi meningkatkan kesejahteraan penduduk mereka— karena perekonomian mereka disusun dan diatur untuk melayani kepentingan-kepentingan negara-negara industrialis.

Kotak Sejarah

Kasus Kuba

Kuba pernah menjadi salah satu negara yang menjual gula ke Amerika Serikat. Negara ini juga ditandai dengan penindasan dan kemiskinan. Revolusi 1955 berusaha mengakhiri ketidakadilan tersebut. Meski demikian, Amerika Serikat dengan cepat menafsirkan revolusi ini bernuansa komunis dan menolak berdagang dengan Kuba. Dalam konteks Perang Dingin (lihat kotak di bab 1), Kuba beruntung karena Uni Soviet melihat Kuba sebagai sekutu penting (disebabkan karena geografis Kuba berdekatan dengan musuh ideologisnya) sehingga segera menjalin hubungan dagang dengan menawarkan minyaknya untuk ditukar dengan gula Kuba dan dengan penawaran lebih baik dari yang pernah diterima Kuba dari Amerika Serikat. Meskipun demikian, ketika dijatuhkan oleh institusi-institusi finansial internasional, seperti IMF, Kuba tetap menghadapi masalah perekonomian yang cukup serius. Permasalahan ini diperburuk dengan berakhirnya Perang Dingin dan, dengan demikian, berakhirlah subsidi minyak Uni Soviet dan pasar gulanya. Kuba sangat terisolasi dari kinerja normal perekonomian dunia. Meski situasinya masih relatif sama, saat ini kebanyakan barang-

barang kebutuhan dibatasi dan Kuba sedang berjuang untuk mempertahankan keberadaannya saat ini. Kasus Kuba memperlihatkan bahwa dalam beberapa hal ketergantungan merupakan sebuah situasi *'lose-lose'*; negara-negara bisa menderita ketidakadilan karena status tergantung atau kesulitan dalam menyusun suatu alternatif. Mungkin bisa dikatakan bahwa hal yang lebih buruk daripada dieksploitasi oleh kekuatan ekonomi global adalah *tidak* dieksploitasi oleh kekuatan ekonomi global.

Kaum strukturalis yang terinspirasi kritik semacam ini memunculkan pertanyaan normatif, seperti tentang cara mengakhiri eksploitasi semacam itu dan apa yang dapat mendirikan sebuah tatanan ekonomi dan politik internasional yang adil? Hubungan antara kelompok kaya Utara dan kelompok miskin Selatan (pusat dan pinggiran) dikatakan sebagai hubungan yang tidak adil dan eksploitatif. Dengan mengabaikan beragam jenis perbedaan di antara para strukturalis, hal mendasar dalam pernyataan para strukturalis adalah ide bahwa yang kaya tetap kaya karena memanfaatkan si miskin; dengan kata lain, beberapa orang mampu menikmati hidup karena kesengsaraan pihak lain; ini bukan mengenai peluang. Perekonomian global disusun oleh berbagai kepentingan kelas untuk menyenangkan segelintir pihak saja.

Kotak Refleksi

Kaum strukturalis menyangkal konsepsi orang-orang pluralis liberal mengenai interdependensi, dengan berpendapat bahwa interdependensi mengimplikasikan keseimbangan dan keadilan yang tidak pernah ada. Coba Anda pikir dalam hal apakah interaksi hubungan internasional yang kompleks ditandai oleh pertukaran yang saling menguntungkan *atau* hubungan eksploitatif yang tidak adil?

Ketergantungan menjelaskan sebuah jenis hubungan antara si kaya dan si miskin yang memastikan bahwa uang dan sumber-sumber daya dipusatkan di pihak si kaya karena demikianlah perekonomian dunia distrukturkan. Misalnya, negara-negara yang lebih miskin boleh saja mengekspor bahan-bahan mentah seperti misalnya, bauksit dan bahan makanan —seperti kopi dan pisang, sementara negara-negara kaya mengekspor barang-barang manufaktur, seperti misalnya mobil, kapal, dan sebagainya. Bukti statistik menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun harga bahan mentah dan bahan makanan —produk-produk primer— cenderung terus menunjukkan penurunan dibandingkan harga barang manufaktur. Hal ini menempatkan negara-negara yang lebih miskin pada posisi yang secara struktural tidak menguntungkan. Lebih jauh lagi, negara-negara kaya mampu untuk mempertahankan situasi ini karena selain retorika perdagangan bebas yang terus mereka gaungkan, mereka mampu menguasai harga melalui pembatasan-pembatasan perdagangan. Uni Eropa, misalnya, sangat ketat mengontrol impor pisang. Lebih jauh lagi, inovasi-inovasi teknis terus menekan perkembangan produksi menjadi lebih baik, yang bahkan mempunyai tingkatan lebih tinggi sebagai 'nilai tambah'. Tentu saja, hanya beberapa orang, para pemilik perkebunan di Guatemala, misalnya, sangatlah kaya walaupun secara umum kemiskinan mungkin masih terus berlangsung di negara mereka; hal ini menjamin bahwa sistem tersebut akan tetap berjalan karena adanya kesamaan kepentingan antara si kaya di pusat dan si kaya di pinggiran.

Teori sistem-dunia bertujuan untuk menjelaskan sejarah munculnya negara-negara kaya (yang tertuju baik negara-

negara di Utara maupun di Barat), juga terus berlanjutnya kemiskinan di masyarakat-masyarakat non-Barat (Selatan atau dunia Ketiga). Teori sistem-dunia, seperti strukturalisme secara umum, menuntut pembagian yang adil atas kekayaan ekonomi dunia. Agar hal ini bisa tercapai, Teori sistem-dunia memberikan dukungan bagi tatanan ekonomi internasional baru, yang sering diistilahkan dengan akronim NIEO. Penuntutan atas NIEO mencakup keadilan harga bagi produk-produk yang dihasilkan oleh dunia ketiga dan perbaikan terhadap perdagangan dunia secara umum. NIEO bisa dibandingkan dengan tatanan ekonomi yang saat ini sedang berlangsung, yakni Tatanan Ekonomi Internasional Liberal, atau LIEO (LIEO = *Liberal International Economic Order*). Dengan mengetahui doktrin kaum strukturalis seperti ini yang menekankan karakteristik eksploitasi yang sistematik dan memberi penekanan pada perang kepentingan, maka kita bisa berasumsi bahwa si kaya (negara-negara) tidak akan menyerahkan kekayaan dan hak istimewa mereka tanpa adanya perjuangan. Dengan demikian, tantangan bagi si miskin adalah untuk membebaskan diri dari struktur yang menekan mereka. Cara melakukannya, dalam teori atau praktik, adalah hal yang berbeda.

Identitas dan Komunitas

Pengakuan tentang pentingnya diskriminasi gender dan ras merupakan tema utama para pemikir 'post-Marxis' yang muncul pada akhir 1960-an dan awal 1970-an (lihat bab 4-6). Bagaimanapun, umumnya, baik itu para pemikir Marxis awal atau strukturalis generasi selanjutnya yang memberikan perhatian pada aspek identitas dan komunitas tidak ada yang tidak setuju dengan tema besar tatanan global kapitalis

dan ide-ide perjuangan kelas. Dengan mengabaikan pentingnya nasionalisme, baik sebagai ideologi dan kekuatan politik pada abad XIX di Eropa, Marx menghabiskan waktu dan energinya untuk membeberkan tema kesadaran kelas, kepentingan kelas, dan perjuangan kelas.

Seandainya kita mengetahui keberagaman nasional dan etnis yang ada di Uni Soviet barangkali kita akan cukup terkejut dengan adanya fakta bahwa tidak satu pun dari tokoh-tokoh revolusioner Bolshevik, termasuk Lenin dan Trotsky, yang terus-menerus memberikan perhatian pada ideologi nasionalisme. Lebih lanjut, iklim intelektual dan politik USSR selama pertengahan pertama abad ini menunjukkan tidak adanya tantangan yang serius terhadap pandangan Stalin yang simplistik tentang 'komunitas' dunia yang secara mendasar hanya terbagi ke dalam dua blok atau kubu yang berlawanan. Sepanjang abad XIX dan awal abad XX, para pemikir Marxis cenderung menyatakan nasionalisme, atau apa pun bentuk identifikasi lainnya —agama, budaya, etnis, dan sebagainya— sebagai perwujudan dari *'false consciousnes'* (kesadaran palsu), sebagai suatu akibat kebingungan dari struktur politik berdasarkan kelas yang sebenarnya. Pandangan ini selanjutnya bergema pada beberapa karya para pemikir Marxis kontemporer.

Konon pada 1960-an, muncul berbagai gerakan pembebasan nasional di sebagian Afrika dan Amerika Latin yang merupakan sayap-kiri, atau pro-Marxis-Leninis. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mengembangkan pemikiran mengenai perjuangan nasionalis yang tidak menjatuhkan ataupun tidak berkesesuaian dengan anggapan-anggapan dasar strukturalisme. Dengan demikian, dalam pemikiran Wallerstein tentang sistem dunia modern, kita akan temukan

beberapa perhatian terhadap nasionalisme sebagai sumber identifikasi politik yang cukup kuat.

Wallerstein berpendapat bahwa meningkatnya definisi struktur-struktur negara telah membawa pada pembentukan, pembentukan kembali, penciptaan dan penghancuran, serta kebangkitan dari ide tentang 'masyarakat'. Dia percaya bahwa 'masyarakat' mulai melihat diri mereka sendiri (dan yang dilihat oleh yang lain) sebagai struktur yang mengatur negara. Melalui identifikasi 'masyarakat' dengan negara, maka 'bangsa' pun tercipta. Sebaliknya, dalam batasan negara-bangsa, ada berbagai kelompok penting yang tidak dianggap berhak untuk mengontrol struktur negara atau yang menjalankan kekuasaan politik secara langsung. Masyarakat ini mulai dilihat oleh para kaum 'nasional' sebagai 'minoritas'. Meski demikian, hal yang penting untuk disadari adalah bahwa Wallerstein tidak menganggap identitas nasional sebagai berakar dari kesamaan beberapa realita yang berkaitan dengan warisan etnis atau sejarah. Bangsa-bangsa adalah kelompok solidaritas yang batas-batasnya terus-menerus dibentuk, ditentukan dan ditentukan kembali, dan nasionalisme adalah suatu istilah yang digunakan untuk menguatkan dan mengukuhkan kekuasaan negara.

Teori sistem-dunia menyusun analisis tentang kekuatan-kekuatan yang berlawanan dengan sistem, juga dengan yang dominan, yang berbasis kelas, dan struktur. Dengan demikian, terdapat kemungkinan mengenali sejumlah kekuatan oposisi atau anti-sistem yang ada di dalam perpolitikan dunia. Nasionalisme sangatlah beragam. Beberapa bentuk nasionalisme ada yang bekerja untuk mengukuhkan kapitalisme dan menyamarkan kondisi eksploitatif dari sistem-dunia yang kapitalis. Meski demikian, beberapa

gerakan pembebasan nasional jelas anti-sistem. Berbagai kelompok tertarik dalam mendukung dan menentang beberapa definisi 'negara-bangsa' tertentu, sehingga, menurut Wallerstein, nasionalisme harus dilihat sebagai suatu mekanisme imperialisme/integrasi *maupun* perlawanan/kebebasan.

Jelas, di sini kita melakukan analisis nasionalisme yang dipengaruhi oleh teori politik kelas. Pada kenyataaannya, Wallerstein, mengatakan bahwa gerakan-gerakan anti-sistem disusun dalam dua bentuk mengenai dua tema inti: gerakan sosial seputar kelas dan gerakan nasional seputar 'bangsa' atau masyarakat. Gerakan anti-sistem (atau secara revolusioner) muncul pertama kali dalam bentuk yang terorganisir pada abad XIX untuk mendukung kesetaraan manusia dan dengan demikian, berdasarkan istilah, berlawanan dengan fungsi perekonomian dunia yang kapitalis. Struktur politik perekonomian dunia kapitalis —serangkaian negara-negara berkuasa— memaksa berbagai gerakan di dunia untuk melakukan transformasi terhadap sistem-dunia melalui pencapaian kekuasaan politik di dalam negara-negara secara terpisah. Namun, karena sistem-dunia kapitalis sebenarnya berdasarkan pada pembagian kelas dan eksploitatif —yang bersifat transnasional dan global, maka pengorganisasian gerakan-gerakan anti-sistem pada tingkat negara umumnya mempunyai pengaruh-pengaruh tidak seperti yang diharapkan. Nasionalisme menentang pentingnya perjuangan bersama-sama seluruh dunia secara logis dan ideologis atas kebutuhan politik untuk segera mendapatkan kekuasaan dalam suatu negara. Apa pun taktik yang diterapkan suatu gerakan sosial, mereka hanya men-

capai kekuasaan di dalam struktur negara dan kemudian dikuasai oleh logika sistem antar-negara.

Kaum strukturalis juga telah memberikan beberapa pemikiran mengenai rasisme dan seksisme dalam sistem-dunia. Menurut Wallerstein, rasisme merupakan suatu sistem kepercayaan yang berfungsi untuk membenarkan inklusi hanya beberapa kelompok tertentu di dalam dunia kerja dan sistem politik mengenai penghargaan dan status yang sangat rendah bagi kelompok yang lebih besar tersebut. Seksisme mempunyai tujuan yang sama, meski diraih melalui cara yang berbeda. Dengan membatasi perempuan pada model-model pekerjaan tertentu dan dengan menjelaskan beberapa model tersebut sebagai sesuatu yang 'bukan-kerja' (melalui konsep 'ibu rumah tangga'), seksisme berfungsi untuk mengurangi tingkat upah dalam sektor yang lebih luas di dalam perekonomian dunia. Menurut Maria Mies, di dalam perekonomian global kontemporer, penindasan perempuan sebagai 'ibu rumah tangga' tetap menjadi inti bagi suatu sistem yang membiarkan para pekerja laki-laki menjadi warga negara yang bebas.

Bagaimanapun, karena kaum strukturalis telah berusaha menjelaskan sejumlah pengertian tentang identitas, bentuk-bentuk solidaritas dan jenis-jenis komunitas (seperti halnya negara-bangsa dan pergerakan-pergerakan anti-sistem), maka sangatlah adil untuk mengatakan bahwa analisis ini sangat diwarnai oleh kepercayaan-kepercayaan dasar mereka tentang keutamaan kelas sosial dan perjuangan kelas. Pada kenyataannya, secara keseluruhan kaum strukturalis memang cenderung menekankan kelas sebagai identitas dan kepentingan-kepentingan.

Konflik dan Kekerasan

Bagi kaum strukturalis, konflik erat sekali hubungannya dengan kekuatan-kekuatan di dalam kapitalisme global. Hubungan-hubungan ekonomi global sangat penuh konflik disebabkan adanya berbagai kecenderungan di dalam kapitalisme —yang dibentuk berdasarkan dan melanggengkan pembagian-pembagian antara kelas-kelas sosial dan antara negara-negara pusat dan pinggiran. Konflik-konflik antara kelompok-kelompok sosial —dan tentu saja konflik antar-negara— dihasilkan oleh karakteristik sistem kapitalisme. Konflik sebenarnya tidak berasal dari karakteristik sistem antar-negara —seperti yang dikatakan oleh kaum realis, tetapi muncul dari karakteristik eksploitatif kapitalisme. Oleh sebab itu, maksud-baik dari upaya untuk menengahi atau mengakhiri konflik individu ataupun kelompok, tidaklah efektif.

Dalam hal kekerasan fisik secara langsung —seperti perang— hubungan antara kapitalisme dengan konflik bisa dilihat dalam kerangka imperialisme dan penindasan terhadap orang-orang yang menentangnya. Telah diakui, oleh Lenin misalnya, bahwa persaingan kapitalis mengarah pada perang antar-negara, meski pembuktiannya dalam hal ini tidak jelas dan bahkan mungkin kontradiktif (lihat bab 2). Hal yang jelas terbukti adalah bahwa beberapa konflik yang muncul sedikitnya mempunyai motivasi-motivasi ekonomi kapitalis. Contohnya, invasi Indonesia ke Timor Timur diikuti oleh suatu kesepakatan dengan Australia tentang eksploitasi minyak di lepas pantai Timor Leste. Beberapa peneliti menyatakan bahwa tindakan AS/PBB di Teluk tahun 1991 lebih banyak didorong oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomi daripada alasan untuk melindungi demokrasi,

terutama dengan fakta 'demokrasi' negara Kuwait yang meragukan.

Kotak Konsep

Perspektif Realis dan Strukturalis tentang Konflik dan Perjuangan Politik

Pada bagian ini mungkin membantu jika kita mau membandingkan dan membedakan pandangan-pandangan strukturalis dan realis terhadap karakteristik sistem antar-negara dan bentuk-bentuk konflik dan perjuangan politik. Anda mungkin ingat bahwa kaum realis menganggap negara sebagai aktor utama di dalam hubungan internasional. Terlebih lagi, negara adalah aktor otonom —mereka mampu untuk menyusun tujuan-tujuan kebijakan luar negeri dan mengambil tindakan efektif guna mewujudkannya ('kepentingan nasional'). Konflik muncul karena negara-negara selalu mempunyai persaingan kepentingan-kepentingan, dan siap menggunakan kekuatan jika diperlukan untuk mewujudkan tujuan-tujuan mereka dan karena, di dalam sistem yang anarkis, tak ada satu pun yang bisa mencegahnya. Lebih lanjut, kaum realis mengakui bahwa perjuangan politik tidak terbatas pada konflik antar-negara. Di atas semua itu, dari perspektif seorang realis, konflik adalah kondisi yang umum terjadi bagi manusia. Meski demikian, kaum realis cenderung memusatkan perhatian pada konflik antar —daripada di dalam— negara.

Pandangan strukturalis tentang konflik dan kekerasan antar-negara cukup berbeda dari para realis. Kaum strukturalis menganggap sistem antar-negara mencerminkan kepentingan kelompok-kelompok elit (para pemilik modal internasional) dan berfungsi untuk mengatur konflik-konflik yang muncul dari kontradiksi-kontradiksi yang ada di dalam kapitalisme. Perjuangan-perjuangan politik terjadi dalam berbagai bentuk, tetapi bisa diringkas menjadi dua jenis. Jenis pertama adalah konflik dan perjuangan di antara sektor-sektor modal yang berbeda —yang mungkin berbentuk konflik antar-negara (perang) ketika kelas-kelas kapitalis yang berbasis kebangsaan sama-

sama berusaha meningkatkan *market-share* (proporsi total penjualan jenis produk tertentu —Peny.) produk global mereka atau akses mereka terhadap sumber daya. Jenis kedua adalah konflik dan perjuangan antara kelas-kelas yang saling bertentangan —kapital dan tenaga kerja. Jenis perjuangan pertama berupa perdebatan (sering kali bersifat brutal dan berdarah-darah) atas pembagian kekayaan dan sumber daya global, yang sama sekali tidak merusak sistem kapitalis. Bagaimanapun, jenis kedua adalah konflik yang lebih mendasar antara mereka yang mendukung sistem kapitalis dengan mereka yang ingin mengubahnya.

Cara lain dalam memandang kekerasan yakni sebagai sesuatu yang tidak langsung atau struktural. Johan Galtung terkenal lewat karyanya tentang kekerasan struktural, yang telah memberikan kontribusi penting bagi Studi Perdamaian. Seseorang bisa tersakiti, baik secara fisik maupun psikologis, jika tidak terjamin keamanan sosial dan ekonominya. Dalam pandangan ini, 'kekerasan' menjalari struktur-struktur masyarakat, yang menekan kelas pekerja dan kelompok terpinggirkan lainnya. Struktur ekonomi kapitalisme merusak kelompok-kelompok yang berstatus lebih rendah dengan berbagai cara, seperti: mereka mendapatkan pendidikan rendah, buruknya pelayanan kesehatan, dan sebagainya, yang menggiring pada harapan-harapan hidup yang rendah. Kaum feminis telah melangkah lebih jauh dari analisis berbasis kelas dari karya asli Galtung untuk menyatakan bahwa struktur-struktur di dalam masyarakat cenderung berdampak negatif bagi kehidupan perempuan (lihat bab 6).

Perdamaian dan Keamanan

Konsep kekerasan struktural umumnya telah berpengaruh dalam Studi Perdamaian. Secara lebih umum, analisis strukturalis menyatakan bahwa pola-pola organisasi ekonomi yang terkini menghasilkan berbagai ketegangan dan kontradiksi yang sering terwujud dalam konflik secara langsung. Kemungkinan munculnya kekerasan dan perang berarti adanya ketidakamanan bagi sektor-sektor yang lebih besar dalam populasi dunia. Dengan demikian, perdamaian dan keamanan terletak pada pengalihan sistem ke sistem sosio-ekonomi yang tidak eksploitatif sehingga mengurangi berbagai motivasi untuk berperang.

Kesimpulan

1. Strukturalisme merupakan suatu perspektif luas yang merujuk pada pemikiran Marxis, tetapi juga dipengaruhi oleh ide-ide yang tidak secara langsung berasal dari pemikiran Marxis.
2. Mungkin varian strukturalisme yang paling terkenal adalah teori ketergantungan *(Dependensi)* dan Teori sistem-dunia.
3. Dari perspektif strukturalis, tatanan dunia kontemporer dibentuk oleh sistem kapitalis global dan sistem hubungan antar-negara.
4. Ciri-ciri mendasar dari tatanan ini adalah kesenjangan. Kapitalisme itu didasarkan pada eksploitasi si miskin oleh si kaya. Dalam mengejar kepentingan-kepentingan (kelas) mereka, si kaya (orang-orang dan negara-negara) mampu memelihara posisi mereka dengan mengeksploitasi si miskin. Hal ini karena sistem yang pada

dasarnya tidak adil, berdasarkan struktur dan ditandai dengan kesenjangan.

5. Sejalan dengan Marx, kaum strukturalis melihat kelas-kelas sebagai aktor dominan di dalam Hubungan Internasional, di samping juga pentingnya peran negara.
6. Kaum strukturalis belum mengabaikan peran sistem-negara. Kaum strukturalis telah mengembangkan analisis tentang negara sebagai alat yang digunakan untuk melanggengkan kekuasaan kelas-kelas penguasa: yakni alat bagi penindasan kelas, ataupun, di sisi lain, sebagai kesatuan yang relatif otonom yang berperan penting dalam memfasilitasi ekspansi kapitalis dan mendukung tatanan yang tidak adil.
7. Meski dunia terbagi dalam pembagian negara-negara kaya dan miskin, suatu kesimpulan Hubungan Internasional yang akurat perlu melihat cara kelas-kelas mempromosikan kepentingan-kepentingan mereka dan cara mereka menggunakan negara untuk membantu mereka meraih kepentingan mereka.
8. Strukturalisme benar-benar melihat peran dari aktor-aktor internasional seperti World Bank dan IMF dan cara aktor-aktor tersebut membantu melanggengkan dan mempertahankan struktur yang telah ada.
9. Strukturalisme mengklaim bahwa proses-proses akumulasi modal, pengambilan nilai surplus, dan eksploitasi bisa diukur secara objektif. Kita bisa memahami proses-proses kontradiksi, krisis, dan perubahan dengan mengacu pada 'hukum-hukum' ekonomi yang sama ini. Dengan demikian, strukturalisme bisa dilihat sebagai pendekatan yang 'ilmiah' atau 'positivis' di dalam Hubungan Internasional (lihat kesimpulan-kesimpulan).

10. Meskipun terdiri dari beberapa paham, strukturalisme cenderung terpinggirkan di dalam studi Hubungan Internasional, terutama dalam versi disiplin ilmu ini di AS.

Kritik

Mungkin kritik terbesar bagi strukturalisme berkaitan dengan tingkat determinismenya. Hal ini berarti bahwa teori ini menyatakan bahwa posisi aktor-aktor di dalam struktur tertentu menentukan cara mereka bertingkah laku. Negara-negara dikatakan mempunyai otonomi yang kecil dalam mengarahkan diri mereka sendiri untuk menjadi 'pemenang' atau 'pecundang' di dalam perekonomian internasional. Beberapa penulis, seperti Wallerstein misalnya, telah mengembangkan sebuah posisi yang kurang deterministik. Meski demikian, inti pemikirannya secara keseluruhan menyatakan bahwa negara-negara yang lebih miskin mempunyai sedikit kemungkinan untuk meningkatkan posisi mereka. Hal ini seolah-olah menyepelekan berbagai perjuangan yang heroik dan mulia untuk mengatasi tekanan-tekanan seperti itu.

Pemikiran ini memunculkan keluhan bahwa strukturalisme mampu menunjukkan kejahatan kapitalisme internasional tetapi tidak punya cara untuk mengubahnya. Sulitnya posisi seperti itu (yang menolak determinisme Marxis tentang revolusi yang tak terhindarkan) mungkin sangat disesali atau membuat frustrasi, tetapi, sekali lagi, merupakan bagian dari posisi bahwa negara-negara kaya mempunyai kemampuan untuk menjebak segala sesuatu secara efektif. Beberapa kaum strukturalis, terutama Wallerstein, telah mencoba mencari jalan keluar dari keter-

pojokan ini, tetapi kemudian menemukan diri mereka kembali terjebak (teleologi —lihat di bawah ini).

Kritik berikutnya tentang strukturalisme menyatakan bahwa strukturalisme bersifat reduksionis. Dengan kata lain, strukturalisme mereduksi semua fenomena —perang, krisis ekonomi, kesenjangan, aspek-aspek identitas, dan sebagainya— ke dalam dinamika kelas sosial dan perjuangan kelas. Secara praktis hal ini berarti bahwa kaum strukturalis telah gagal mempertanyakan seluruh permasalahan tentang gender, etnisitas, dan identitas lainnya. Mereka telah mereduksi situasi yang sangat kompleks ke dalam sebuah situasi yang dijelaskan oleh kelas, ketika —pada kenyataannya— pola-pola penindasan itu beragam dan saling tumpang tindih dan bahkan ketika kesetiaan kelas tidak selalu mudah untuk dijelaskan dengan cara yang memudahkan untuk memperkirakan tingkah laku dan sikap. Kritik lainnya memusatkan perhatian pada cara memahami ide tentang kepentingan. Benarkah kepentingan-kepentingan itu ditentukan oleh kelas sosial? Apakah kepentingan-kepentingan tersebut benar-benar terbatas pada kelas sosial saja?

Dalam mengadopsi warisan penganut Marxisme, yang menekankan penindasan terhadap kelas pekerja, strukturalisme (meskipun ia tidak mempunyai petunjuk ke arah itu) secara implisit menyatakan akhir dari sejarah. Akhir sejarah yang dimaksudnya adalah sosialisme, yang dengannya kehidupan yang lebih baik akan dinikmati oleh setiap orang. Sangat jauh dari kenyataan bahwa kebanyakan dari yang diperkirakan Marx sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindarkan ternyata belumlah terjadi, posisi teleologis ini bisa dikritisi karena penjelasan tentang yang *sedang* terjadi (dinamika perubahan sejarah dan sosial) diwarnai oleh

sebuah anggapan bahwa masyarakat sosialis pada akhirnya akan muncul —atau, dengan kata lain, bahwa pengajuan hipotesis titik akhir tersebut mewarnai penjelasan tentang kejadian-kejadian masa lampau dan saat ini.

Lebih lanjut, strukturalisme tidak hanya menyatakan bahwa titik akhir tersebut memengaruhi teorinya, tetapi juga mempunyai pengaruh-pengaruh bagi berbagai kebudayaan yang berbeda sebagai tahap-tahap sementara atau hambatan, daripada bahwa kebudayaan yang memiliki nilai intrinsik.

Namun, secara keseluruhan, kita dapat menyimpulkan bahwa banyak kritik yang lebih mendalam terhadap Marx telah mengakui sumbangan kaum strukturalis, sebagaimana juga dengan kelemahannya.

Kesalahpahaman Umum

Jika kelas-kelas (sosial) adalah aktor-aktor penting, maka negara-negara tidaklah memiliki peran penting. Tidak, sebagaimana halnya kaum realis yang tidak menyangkal keberadaan MNCs, *NGOs* (LSM), dan sebagainya, kaum strukturalis juga bukannya tidak menyadari pembagian dunia ke dalam wadah negara-negara. Pada kenyataannya, kaum strukturalis memang telah berusaha menghasilkan teori karakteristik dan fungsi negara dan aktor-aktor lain pada cara mereka mendukung berbagai kepentingan kelas tertentu.

Kaum Strukturalis mempunyai rencana untuk mengakhiri ketidakadilan. Tidak mesti demikian. Pada kenyataannya, kritik utama terhadap beberapa teoretisi strukturalis adalah meski mereka sangat bagus menjelaskan kepada kita tentang segala hal yang salah dengan dunia dan proses terjadinya situasi ini, ternyata mereka tidak cukup baik dalam men-

ceritakan pada kita tindakan tertentu yang bisa diambil dan cara tertentu untuk memperbaiki situasinya.

Strukturalisme adalah Marxisme. Tidak juga. Meski pengaruh Marx sangat jelas pada banyak karya strukturalis, Anda tidak bisa menggunakan strukturalisme dan Marxisme dengan anggapan bahwa keduanya sama sekali tidak memiliki perbedaan. Lebih tepat dikatakan bahwa Strukturalisme terinspirasi oleh —atau berutang pada— Marxisme dalam hal cara-cara untuk melakukan pendekatan terhadap hubungan internasional.

Strukturalisme adalah kesatuan. Pernyataan ini dapat dibenarkan dalam perhatiannya terhadap kemiskinan dan kebodohan di Dunia Ketiga. Memang, terdapat beragam pemikiran dalam literatur strukturalis. Beberapa pendekatan struktural cenderung berkaitan dengan zaman tertentu dan telah dikembangkan untuk tujuan tertentu (misalnya, teori ketergantungan), sedangkan lainnya, seperti karya Wallerstein, berkembang ke arah baru dan menarik, yang mempertimbangkan sejumlah faktor, seperti perlawanan dari counterhegemoni dan isu-isu lingkungan hidup. ✦

Bacaan Lebih Lanjut

Amin, S. (1974), *Accumulation on a World Scale: A Critique of the Theory of Underdevelopment (2 Vols)*, London: Monthly Review Press.

Amin, S. (1990), *Maldevelopment: Anatomy of a Global Failure*, London: Zed Books.

Baran, P. (1957), *The Political Economy of Growth*, New York: Monthly Review Press.

Cardoso, F. dan Faletto, E. (1979), *Dependency and Development in Latin America*, Barkeley: University of California Press.

Chase-Dunn, C. (1989), *Global Formation: Structures of the World Economy*, Oxford: Blackwells.

Escobar, A. (1995), *Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World*, Princeton: Princeton University Press.

Frank, A. G. (1979), *Dependent Accumulatioan and Underdevelopment*, New York: Monthly Review Press.

Galtung, J. (1971), 'A Structural Theory of Imperialism', *The Journal of Peace Research*, Vol. 8, No. 1, hlm. 81-117.

George, S. (1994), *A Fate Worse Than Debt*, London: Penguin.

Harris, N. (1990), *The End of the Third World*, London: Penguin.

Kamrava, M. (1993), *Politics and Society in the Third World*, London : Routledge.

Kolko, J (1998), *Restructuring the World Economy*, London: Random House.

Marx K. dan Engels F. (1965), *The Communist Manifesto*, New York: Washington Square Press.

McLellan, D. (1977), *Karl Marx: Selected Writings*, Oxford: Oxford University Press.

Mies, M. (1986), *Patriarchy and Accumulation on a World Scale*, London, Zed Books.

Prebisch, R. (1964), *Towards a New Trade Policy for Development*, New York: United Nations.

Rodney, W. (1972), *How Europe Underdeveloped Africa*, London: Bogle I'Ouverture.

Rostow, W.W. (1960), *The Stages of Economics Growth: A Non-Communist Manifesto*, Cambridge: Cambridge University Press.

Van der Wee, H. (1986), *Prosperity and Upheaval: The World Economy 1945-1980*, London: Viking Books.

Wallerstein, I. (1974, 1980, 1989), *The Modern World-System (Volume 1 sampai 3)*, San Diego, CA : Academy Press.

Wilber, C. (ed.) (1973), *The Political Economy of Underdevelopment*, New York: Random House.

—✦✦—

Bab 4
Teori Kritis

Pendahuluan

Teori kritis mulai berpengaruh di dalam Hubungan Internasional sejak pertengahan 1980-an. Label 'kritis' sering kali dirujukkan pada sejumlah pendekatan, seperti feminisme dan posmodernisme, meskipun di dalam bab ini konsep 'teori kritis' mengacu khususnya pada aliran pemikiran yang mempunyai akar intelektual pada Marxisme. Oleh karena teori kritis dan strukturalisme dipengaruhi oleh pemikiran Marxis, maka akan kita temukan beberapa kesamaan di antara keduanya, misalnya konsep-konsep kritis tentang tatanan dan institusi-institusi dunia dan karya-karya para pemikir strukturalis seperti pada bab 3. Namun tentunya, teori kritis sangat berbeda dengan strukturalisme dan oleh sebab itu perlu perlakuan berbeda pula.

Seperti halnya semua perspektif 'kritis', awal perjumpaan dengan teori kritis bisa dianggap menakutkan, karena teori ini menuntut kita untuk berpikir mendalam tentang segala yang kita lakukan sehari-hari serta hubungan antara 'teori' kita dengan cara kita bertindak. Paham utama teori kritis, mungkin, bisa terangkum pada kata-kata Karl Marx

yang cukup populer bahwa meski "para filsuf telah memahami dunia, tujuannya adalah untuk mengubahnya". Dalam contoh sederhana, menurut Marx, di dalam semua masyarakat manusia sepanjang sejarah, sampai kini terdapat orang kaya dan berkuasa dan orang miskin, yang tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan hidup mereka. Lebih jauh lagi, di dalam seluruh masyarakat sepanjang sejarah hingga kini masih terdapat ide-ide atau ideologi-ideologi dominan atau berkuasa yang telah digunakan untuk membenarkan kondisi semacam ini. Menurut Marx, para filsuf mempertimbangkan tujuan kehidupan, tetapi terlalu sering menganggap diri mereka sendiri terpisah dari keberadaan rutinitas sehari-hari. Namun, Marx percaya bahwa tidaklah mungkin bagi orang-orang intelektual untuk terpisah atau tidak terpengaruh dari keseharian tersebut. Filsafat-filsafat dan teori-teori tentang dunia tidaklah didasarkan pada 'kebenaran abadi', tetapi merupakan cerminan dari kondisi sejarah dan sosial yang melingkupi waktu tertentu. Para intelektual terlibat di dalam kegiatan menghasilkan pengetahuan atau 'kebenaran' tentang dunia yang berfungsi untuk mendukung hubungan-hubungan sosial atas dominasi ataupun untuk melawan segala bentuk subordinasi. Hal ini mencakup institusi-institusi dan praktik-praktik sosial yang menciptakan dan melanggengkan kesenjangan-kesenjangan. Dalam pengertian ini, maka pengetahuan secara inheren bersifat sosial dan politik. Marx menunjukkan kemarahan moral pada kondisi yang mengerikan yang di dalamnya banyak laki-laki, perempuan ,dan anak-anak hidup 'terkutuk'. Marx percaya bahwa para intelektual harus menjelaskan pendapat-pendapat mereka, lalu berbicara, dengan mengambil sikap terhadap isu-isu kemiskinan dan kesen-

jangan serta dengan merefleksikan cara mereka untuk menghasilkan suatu perubahan sosial yang positif.

Pemikiran bahwa ada hubungan erat antara teori atau ide dengan kegiatan praktik sosial yang aktual tersebut sulit untuk dimengerti, sehingga untuk menggambarkan pemikiran ini, sejenak kita akan kembali pada bahasan kita sebelumnya tentang liberalisme. Kaum liberal menganggap individu itu terpisah dari dan lebih dulu muncul sebelum masyarakat. Dalam pemikiran liberal, masyarakat dipandang sebagai hasil dari berbagai hubungan antara individu yang didasarkan pada berbagai jenis perjanjian secara sukarela, seperti perjanjian pernikahan, perjanjan antara pekerja dan pemilik, serta perjanjian antara penjual dan pembeli di dalam sebuah pasar. Dengan demikian, perekonomian merupakan hasil transaksi antara individu-individu yang dibuat atas dasar pilihan. Dengan terbebas dari tekanan-tekanan atas berbagai tugas dan kewajiban tradisional, individu-individu bebas bersaing di dalam sistem yang terbuka dan kompetitif. Dalam persaingan ini, beberapa di antara mereka ada yang sukses dan gagal, tetapi hasilnya tergantung pada kemampuan individu, bakat, dan kerja keras, sehingga ini merupakan sistem yang adil. Melihat hal ini, negara seharusnya —sejauh mungkin— tidak terjun ke dalam kegiatan kemasyarakatan atau ekonomi.

Yang menjadi perhatian Marx adalah proses dan sebab ideologi dominan ini sangat berpengaruh pada saat kapitalisme, sesungguhnya, sedang menciptakan kesenjangan sosial yang besar. Kelas menengah yang baru muncul memang sangat menikmati kebebasan yang lebih, namun juga meningkatkan jumlah pekerja yang hidup di dalam kemiskinan dan harus menjual tenaga mereka setiap hari agar dapat

bertahan hidup. Hal ini terlihat sebagai sebuah kontradiksi antara ide-ide dominan tentang karakteristik sistem sosial dan ekonomi dengan kondisi aktual, atau material, kehidupan manusia. Dari sudut pandang tentang kemunculan kelas borjuis, liberalisme memang seolah-olah memberikan penjelasan tentang realitas mengenai kehidupan mereka. Namun, jika kelas pekerja yang miskin atau proletar, diminta untuk menggambarkan kondisi hidup *mereka* sehari-hari, tentunya mereka akan memakai kata-kata seperti 'tertindas' atau 'eksploitatif' dan melihat diri mereka sendiri sebagai orang yang hanya mempunyai sedikit pilihan dan kesempatan untuk menjalankan kontrol terhadap apa pun.

Kotak Sejarah

Kondisi Buruh Anak-anak di Victoria, Inggris

Marx banyak menulis karya terbaiknya ketika tinggal di Victoria, Inggris. Pada saat itu, bukanlah hal yang aneh jika menemukan anak-anak —banyak di antaranya berusia sekitar lima atau enam tahun— yang bekerja sampai sembilan belas jam sehari, sehingga, sebagai akibatnya, menderita kesehatan yang buruk. Cerita berikut dari Samuel Coulson adalah salah satu bukti —bagi Komite untuk Anak-anak Pekerja Pabrik pada 1832— yang secara detail menggambarkan buruknya kondisi ribuan anak-anak pekerja tersebut.

Jam berapa di pagi hari gadis-gadis itu pergi bekerja? Saat pagi buta, sekitar enam minggu, mereka sudah berangkat jam tiga pagi dan pulang jam sepuluh atau sekitar setengah sebelas malam.

Berapa jangka waktu yang diberikan untuk beristirahat atau makan minum selama sembilan belas jam bekerja itu? Sarapan seperempat jam dan makan malam setengah jam serta minum seperempat jam.

Adakah dari waktu ini yang diambil untuk membersihkan mesin? Mereka biasanya harus melakukan yang disebut *'dry down'*, kadang-kadang aktivitas ini mengambil seluruh waktu sarapan atau minum dan mereka akan makan malam atau sarapan sesempat mereka.

Apakah Anda mempunyai kesulitan dalam membangunkan anak Anda karena bekerja secara berlebihan ini? Ya, awalnya kami harus mengangkat dan menguncang-guncangkan mereka, sebelum kami memastikan mereka benar-benar pergi bekerja.

Adakah dari mereka yang mendapat kecelakaan akibat dari pekerjaan ini? Anak perempuan saya yang tertua terkena paku di telunjuknya dan menembus ke bawah buku-buku jari, sehingga dia dirawat selama lima minggu di rumah sakit Leeds.

Apakah gajinya dibayar saat itu? Segera setelah kecelakaan terjadi, gaji dihentikan sepenuhnya.

(Cerita ini diambil dari *The Report of the Committee on Factory Labour in 1832*, ditulis ulang dalam H. Allsopp, *The Change to Modern England*).

Dengan demikian, sedikitnya terdapat dua pandangan yang berlawanan dalam melihat karakteristik 'realitas', yang memunculkan penilaian yang berbeda mengenai karakteristik adil atau tidaknya tatanan sosial dan ekonomi saat ini. Berangkat dari pemahaman tersebut, liberalisme tidak menjelaskan 'kebenaran' tentang karakteristik manusia dan masyarakat, namun hanya mencerminkan sudut pandang kelas penguasa. Bagaimanapun, liberalisme telah menempatkan diri mereka sebagai pemahaman atau penjelasan yang dominan tentang dunia—sejenis 'pemahaman umum'—yang dengan sendirinya menjadi faktor penting dalam menguatkan dukungan bagi sistem kapitalisme.

Tentu saja, fokus utama yang berkaitan dengan kesenjangan dan eksploitasi juga mendasari pemikiran strukturalis, jadi bagaimana teori kritis ini berbeda dari turunan pemikiran Marxis lainnya yang 'ortodoks' atau strukturalis, seperti neo-Marxism dan teori ketergantungan? *Pertama*, jika kaum strukturalis memusatkan perhatian pada struktur dan mekanisme aktual sistem kapitalis —suatu proses yang mereproduksi hubungan yang tidak setara antara kelas-kelas sosial dan antar-negara, para pemikir kritis lebih banyak menekankan pentingnya budaya dan ideologi di dalam melanggengkan jenis-jenis hubungan sosial tertentu, atau sebaliknya, menentang hubungan sosial tertentu tersebut.

Kedua, pemikiran para pemikir Marxis ortodoks meyakini bahwa masyarakat dapat dipahami secara ilmiah. Hal ini karena proses eksploitasi dan pengambilalihan yang aktual dalam kapitalisme dengan jelas bisa diamati serta berbagai kesenjangan utama di dalam distribusi kekayaan dan pendapatan yang muncul sebagai konsekuensinya, bisa diukur secara objektif. Lebih lanjut, perubahan dalam pengorganisasian masyarakat dalam hal ekonomi dianggap mendorong atau menentukan perubahan di dalam organisasi beragam masyarakat. Oleh karena itu, bukanlah hal yang tidak mungkin untuk memahami dinamika yang menggerakkan perubahan sejarah dan membuat prediksi-prediksi tentang tatanan ekonomi dan sosial mendatang yang akan muncul dari sisa-sisa masa lalu. Dari perspektif ini, beberapa versi 'kebenaran' lebih baik daripada yang lainnya karena mereka lebih mampu memahami karakteristik eksploitasi kapitalisme dan berbagai kekuatan yang pada akhirnya akan mengarahkan pada keruntuhannya. Sebaliknya, para pemikir kritis menekankan bahwa *semua* penge-

tahuan bersifat ideologis —yang erat hubungannya dengan praktik sosial dan pengejaran kepentingan. Kita hanya bisa mengevaluasi teori-teori berdasarkan berhasil atau tidaknya mereka menangkap semangat jaman pada waktu itu dan pola kekuasaan yang beroperasi dalam masyarakat dan periode sejarah tertentu, serta apakah mereka mendukung atau menentang *status quo*. (Meski demikian, beberapa pemikir kritis meyakini kemungkinan untuk menetapkan 'kebenaran' sesuatu melalui proses dialog inter-subjektif dan negosiasi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama).

Ketiga, para pemikir kritis berpendapat bahwa berbagai teori kita tentang dunia dan berbagai praktik yang didukung dan dilanggengkannya sangat erat hubungannya, sehingga sangatlah tidak bermakna melihat teori dan praktik —atau dikenal sebagai praksis— sebagai aspek yang saling terpisah dalam kegiatan manusia. Pemikiran tentang kesatuan antara teori dan praktik ini sulit dipahami. Pemikiran ini mengungkapkan suatu ide bahwa kita memakai kapasitas kritis kita untuk memahami dunia kita: berdasarkan 'pengetahuan' inilah, kemudian kita bertindak dan tindakan kita kemudian berpengaruh dalam menyetujui 'kebenaran' teori kita. Dalam bahasa sehari-hari, kita kadang berkata, kita bisa 'mewujudkannya', ketika kita mempunyai perhitungan realistis tentang sesuatu yang mungkin terjadi dalam lingkungan atau periode waktu tertentu. Pada saat yang sama, tindakan kita mengubah 'realitas' yang ada, sehingga memengaruhi terhadap sesuatu yang kita dan orang lain anggap sebagai 'hal yang mungkin terjadi'. Para pemikir kritis kontemporer percaya bahwa teori sosial —dan dalam pandangan ini, HI merupakan salah satu jenis teori sosial— berkaitan dengan memahami aktivitas orang yang berpikir

dan berbagai momen refleksi dan pemahaman-diri. Tujuan singkat teori kritis adalah untuk mencapai pemahaman-pribadi secara lebih mendalam tentang kelompok yang berniat melakukan perubahan sosial. Dalam pengertian ini, para pemikir kritis telah mengingatkan para sarjana bahwa pemahaman dan penjelasan domain internasional/global tidak secara sederhana hanya meliputi pengenalan struktur dan proses yang akan menjadi objek studi, tetapi juga mencerminkan secara kritis tentang segala hal yang dianggap termasuk pengetahuan tentang dunia, dan kegunaan pengetahuan kita tersebut. Dengan demikian, teori kritis sangat berkaitan dengan emansipasi manusia.

Keempat, para pemikir teori kritis tidak memercayai pandangan yang kaku atau deterministik mengenai hubungan antara sistem ekonomi dan sosial atau dinamika perubahan sejarah. Mungkin memang benar bahwa ada hubungan yang erat antara organisasi ekonomi (kapitalisme), hubungan sosial (sistem kelas), dan berbagai jenis organisasi politik (negara) yang ada. Juga, tidak diragukan lagi bahwa struktur perekonomian yang luas dan sistem kelas yang ada menempatkan pembatasan-pembatasan penting dalam hal perubahan yang bisa dihasilkan oleh kelompok-kelompok sosial yang saling bertentangan dan melalui proses politik. Bagaimanapun, para pemikir teori kritis memandang masyarakat dan negara mempunyai tingkat otonomi tertentu, yang mencerminkan pola kompleks di antara kekuatan-kekuatan yang beroperasi di dalam masyarakat. Para pemikir teori kritis percaya bahwa meski kapitalisme merupakan sistem yang bersifat eksploitatif dan penindas, sistem ini memberikan kesempatan tertentu bagi perubahan sosial yang bisa digunakan oleh kelompok-kelompok yang saling bertentang-

an untuk keuntungan mereka. Jadi, sebagai contoh, jika poin penting ideologi liberal adalah yang dikenal sebagai kebebasan dan pilihan individu, maka para pemikir kritis, bagaimanapun juga, melihat sejumlah nilai yang bekerja untuk perubahan melalui proses demokrasi dan tentunya dalam nilai-nilai dan praktik demokrasi yang dijelaskan secara lebih luas lagi.

Kelima, beberapa pemikir kritis mengakui bahwa kelas bukanlah satu-satunya bentuk dominasi atau penindasan dalam masyarakat kapitalis. Beberapa feminis berpendapat bahwa pada abad XVIII, ketika kaum liberal merayakan lahirnya dunia baru yang penuh dengan kebebasan, persamaan, dan kesempatan, perempuan tidak diperkenankan memilih dan banyak di antara perempuan tidak diperbolehkan memiliki kekayaan sendiri; perempuan sepenuhnya tergantung pada laki-laki. Jika kita teliti masyarakat di seluruh dunia saat ini, dapat kita temukan bahwa tidak hanya kelas sosial yang menjadi indikator utama dalam kesenjangan masyarakat, tetapi juga nasionalitas, asal usul etnis, ras, dan gender. Oleh karena itu, banyak pemikir teori kritis yang memusatkan perhatian pada berbagai jenis kesenjangan dan eksklusi sosial. Para sarjana ini sering disebut dengan kaum pos-Marxis.

Kami telah mengenalkan cukup banyak ide yang sangat kompleks dan terminologi yang sulit pada bagian ini dan bagian sebelumnya yang baik untuk dibaca lagi. Sayangnya, kekompleksan ini tidak dapat dihindari karena tidaklah mungkin untuk benar-benar memahami pemahaman utama teori kritis, kecuali Anda memahami berbagai konsep, ide, dan istilah kunci yang dijelaskan tadi. Meski demikian, kami akan mencoba menyederhanakan pembahasan tentang teori

kritis dengan merangkum ciri-ciri utama perspektif kritis ini sebagai berikut. (1) Dunia seharusnya dipahami terutama dalam hal kekuatan-kekuatan ekonomi dan sosial utama yang dihasilkan oleh kapitalisme, yang sekarang ini mencakup wilayah internasional atau global; (2) negara-negara dan institusi-institusi seharusnya dipahami terutama dalam hal fungsi-fungsi yang mereka tunjukkan dalam mendukung kapitalisme global; (3) sementara dunia 'nyata' berlangsung, pemahaman kita tentang dunia selalu dimediasi melalui ide-ide, konsep-konsep, dan teori-teori yang merupakan produk dari pemikiran dan refleksi kritis; (4) semua pengetahuan itu bersifat ideologis —pengetahuan adalah cerminan dari nilai-nilai, ide-ide, dan, terutama, berbagai kepentingan dari kelompok sosial tertentu; (5) kebudayaan dan ideologi merupakan kekuatan penting dan berkuasa yang bekerja untuk mendukung atau menentang tatanan ekonomi dan sosial yang ada; (6) hubungan internasional (atau politik) meliputi sebuah perjuangan antara berbagai kelompok dan gerakan sosial —atau kekuatan-kekuatan sosial— yang beberapa di antaranya mempunyai kepentingan dalam mendukung *status quo*, sementara beberapa yang lainnya berjuang untuk mengubahnya.

Asal Usul

Para pemikir teori kritis memanfaatkan pemikiran Marx awal. Oleh karena itu, teori kritis sering kali disebut Marxisme terbuka atau humanisme Marxis. Teori kritis kontemporer juga berutang banyak masukan pada para penulis dari tradisi Mazhab *Frankfurt*, pada seorang pemikir komunis Italia Antonio Gramsci, dan pemikir sosial Jerman Jürgen Habermas.

Karya-karya terakhir Marx umumnya berkaitan dengan hubungan-hubungan ekonomi dan kesalingterhubungan antara 'dasar' ekonomi dengan 'superstruktur' sosial dan politik dalam masyarakat kapitalis. Hal ini sangat penting dalam perkembangan strukturalisme. Tentu saja, terdapat berbagai kontinuitas dalam pemikiran Marxis. Sepanjang hidupnya, ia mendedikasikan seluruh energinya untuk mengembangkan analisis dan kritik terhadap kapitalisme. Namun, Marx muda atau 'awal' secara khusus tertarik pada dampak pengaruh yang disebarkan masyarakat kapitalis kepada seseorang atau subjek manusia, terutama masalah-masalah alienasi (keterasingan) manusia.

Marx percaya bahwa manusia, pada hakikatnya, adalah makhluk sosial, sehingga ia perlu hidup di dalam kelompok-kelompok sosial. Manusia juga makhluk yang kreatif, maksudnya manusia mampu membuat dan menggunakan alat-alat yang membantu mereka untuk menciptakan berbagai 'artefak'. Dalam pengertian yang sesungguhnya, manusia menciptakan dunia sosial mereka sendiri. Lebih lanjut, dalam masyarakat kapitalis, manusia seolah-olah mengalami perasaan kekurangan kasih sayang dan keterasingan dari masyarakat disebabkan oleh pengorganisasian masyarakat tersebut dan metode-metode produksinya. Teori Marx tentang alienasi manusia menyatakan bahwa perasaan kurang kasih sayang dan rasa keterasingan terletak dalam bentuk organisasi sosial tertentu yang ada di bawah sistem kapitalisme. Teori ini juga mengindikasikan bahwa tujuan utamanya adalah memahami cara manusia untuk bisa mengatasi kondisi-kondisi tersebut dan, sekaligus, mencapai emansipasi.

Dalam masyarakat kapitalis, produk-produk tenaga kerja manusia —komoditi— tidak lagi diproduksi untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi untuk dijual guna meraih keuntungan di pasar. Keuntungannya akan diambil oleh para pemilik pabrik, yang mengumpulkan kekayaan dengan cara ini. Tenaga kerja manusia tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang penting secara fisik dan sosial bagi keberlangsungan dan kesejahteraan komunitas, tetapi lebih sebagai 'input' ke dalam proses produksi. Di bawah kapitalisme, seseorang tidak lagi memiliki alat-alat produksi, maupun produk dari kerja mereka sendiri. Tenaga diperas —diambil— oleh orang-orang kapitalis, yang memiliki alat-alat produksi, membayar upah, dan mengaku menjadi pemilik atas segala sesuatu yang diproduksi.

Oleh karena itu, masyarakat tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang menguntungkan dan penting bagi umat manusia, tetapi sebagai hierarki dan penindas. Sistem kelas sangat bersifat eksploitatif yang membiarkan beberapa orang untuk meraih keuntungan dengan memanfaatkan pihak lainnya. Marx berpendapat bahwa kelompok kapitalis bukan hanya memiliki alat-alat produksi, tetapi mereka juga mampu berkuasa melalui kekuatan ide-ide atau ideologi. Marx percaya bahwa penjelasan itulah alasan buruknya kondisi kehidupan masyarakat dan manusia. Umat manusia telah kehilangan rasa kemanusiaannya sebagai fitrahnya umat yang suka bekerja sama dan mengalami sebuah perasaan keterasingan dari orang lain dan akhirnya pada diri mereka sendiri.

Marx tidak puas dengan hanya mengkritik kapitalisme, dia ingin melihat kondisi menyedihkan ini segera berakhir. Karakter manusia, menurutnya, bukanlah tetap atau tidak

berubah. Karakter atau kepribadian seseorang —subjektivitas mereka— terbentuk melalui keterlibatan aktif di dalam hubungan-hubungan sosial. Demikian pula, berbagai bentuk institusi-institusi ekonomi, sosial, dan politik merupakan hasil dari interaksi-interaksi sosial semacam itu, yang mapan pada tiap periode sejarah yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan atau fungsi tertentu. Hal yang biasa kita sebut sebagai 'struktur-struktur' sosial, seperti sistem kelas, atau institusi-institusi, seperti keluarga, juga muncul dalam epos sejarah tertentu dan terus berubah setiap waktu. Oleh sebab itu, bukanlah hal yang tidak mungkin bagi manusia untuk membebaskan diri dari hubungan-hubungan sosial yang represif dan bentuk-bentuk eksploitasi. Dalam karya awal Marx, pemikiran tentang emansipasi ini berhubungan dengan penemuan seseorang akan jati dirinya, kontrol atas kehidupannya sendiri, dan menikmati hubungan yang harmonis dan memuaskan dengan orang lain.

Kotak Konsep

Bagaimana Segala Sesuatu Berubah? Perdebatan Struktur-Agen

Apa yang disebut perdebatan struktur-agen telah menjadi penting dan penuh perdebatan dalam ilmu sosial. Sebenarnya ia tidak sesulit kedengarannya. Bayangkan sebuah sekolah. Ia punya prosedur dan aturan. Hal-hal itulah yang disebut struktur. Dalam struktur ini, guru-guru dan murid eksis dan melakukan tindakan. Guru mempunyai kekuasaan lebih dibandingkan murid-murid disebabkan oleh bentuk hubungan mereka dengan struktur (posisi mereka di sekolah —mereka menegakkan aturan). Murid-murid sangat jarang melanggar aturan yang berlaku. Namun, aturan-aturan sekolah tersebut tidaklah mungkin sama dengan 50 tahun yang lalu. Lingkungan mungkin meng-

ubah aturan, dan aturan mungkin diubah ketika murid-murid memprotesnya, atau ketika aturan itu tidak lagi mencerminkan apa yang sedang terjadi dalam masyarakat luas. Dalam hubungannya dengan sekolah, perdebatan struktur-agen adalah mengenai melihat tindakan-tindakan tertentu dari para murid dengan adanya peraturan tersebut tertentu, atau besar atau tidaknya pengaruh tindakan-tindakan dari murid-murid untuk membentuk aturan-aturan (apakah mereka mempunyai agensi?), atau sedikitnya hubungan di antara kedua hal ini.

Secara sepintas mungkin terdapat suatu jurang yang sangat besar antara sekolah dan 'tatanan dunia' kapitalis. Namun, ide dasar tentang struktur, agensi, dan hubungan antara keduanya tetap sama. Kaum strukturalis dan pemikir teori kritis mempunyai pandangan yang sangat berbeda tentang hubungan antara struktur dan agensi. Kaum strukturalis menganggap struktur secara keseluruhan sebagai penentu ciri atau karakteristik utama 'bagian-bagian', pengaruhnya adalah bahwa struktur menentukan tingkah laku. Pendekatan ini telah dijelaskan sebagai anti-humanis karena orang-orang digambarkan memiliki sedikit atau tidak mempunyai sama sekali kemampuan untuk mengubah lingkungan mereka. Para pemikir teori kritis di sisi lain, mengakui bahwa kesempatan-kesempatan bagi campur tangan atau agensi manusia *dibatasi* oleh lingkungan sejarah, tetapi mereka lebih optimistik tentang kemungkinan-kemungkinan dalam meraih perubahan melalui tindakan politik.

Bagi Marx, tugas menunjukkan cara untuk membebaskan diri dari segala bentuk penindasan dan eksploitasi dengan menganalisis karakteristik tekanan sosial —jenis-jenis struktur yang ada— dan menghasilkan pemikiran mengenai kemungkinan untuk mengubah sistem-sistem sosial, ekonomi dan politik terbebankan ke tangan kaum intelektual radikal (yakni, mereka yang berkomitmen pada prinsip emansipasi manusia. Lihat kotak di atas). Namun demikian, Marx tidak membuat 'desain besar' dari suatu masyarakat

yang sempurna atau mencoba menjelaskan secara rinci jenis tatanan sosial yang pada akhirnya akan menggantikan kapitalisme. Sebaliknya, ia memusatkan perhatian berbagai prospek perubahan yang sedang muncul di dalam tatanan yang ada. Dengan kata lain, Marx percaya bahwa entitas masyarakat selalu mengalami bentuk-bentuk perubahan dan transisi. Contohnya, Marx melihat kecenderungan-kecenderungan dalam kapitalisme yang pada akhirnya akan membawa pada keruntuhan sistem; para pekerja dikelompokkan ke dalam *workshop-workshop* dan pabrik-pabrik dan dengan cara inilah kapitalisme sedang menciptakan berbagai kondisi yang membuat para pekerja akan menyadari dasar eksploitasi dan alienasi mereka dan secara kolektif mampu mengorganisasikan diri untuk melahirkan perubahan sosial yang berskala besar. Jika kecenderungan-kecenderungan ini benar-benar dipahami, maka akan menjadi hal yang sangat mungkin untuk mengintervensi dan memengaruhi arah perubahan tersebut. Dengan demikian, umat manusia bisa menjadi agen-agen perubahan sosial.

Pada abad XX, Mazhab *Frankfurt* terus mengembangkan analisis Marx terhadap kapitalisme sebagai suatu sistem sosial dan ekonomi. Para sarjana Mazhab *Frankfurt* menggabungkan ketertarikan Marx terhadap kapitalisme dengan berbagai proses rasionalisasi karakteristik dunia modern. (Dalam hal ini, Mazhab *Frankfurt* juga berutang pada pemikir sosial Max Weber). Istilah 'modern' yang digunakan di sini mengacu pada saling keterhubungan berbagai perkembangan sejarah, seperti sekularisasi otoritas politik dalam bentuk negara dan perkembangan kapitalisme industri. Marx menemukan bahwa masyarakat modern dicirikan oleh adanya pembagian tenaga kerja yang kompleks dan tingkat-

an diferensiasi sosial yang tinggi. Dalam masyarakat-masyarakat modern —sebagai kebalikan dari masyarakat-masyarakat tradisional— orang menerima status sosial mereka dan status ini kian diidentifikasikan menurut pekerjaan mereka. Orang juga kian melihat diri mereka sebagai individu, daripada sebagai *anggota* keluarga, komunitas, atau kelompok agama tertentu. Modernitas tidak hanya mengubah cara hidup seseorang, tetapi juga cara berpikir seseorang mengenai diri dan kehidupan mereka. Dunia modern merupakan dunia tempat seseorang memercayai kemajuan —bahwa sejarah sedang bergerak ke depan dan mereka sedang akan pergi ke suatu tempat.

Tidak heran jika kemudian ditemukan bahwa periode sejarah ini menghasilkan warisan pemikiran sosial dan politik yang sangat banyak, banyak di antaranya merupakan pemikiran universalis, sekuler, dan anti-otoritarian, yang melihat sumber utama kejahatan sosial dengan prasangka dan tanpa toleransi. Para pemikir *Enlightenment* memusatkan perhatian pada berbagai kemungkinan untuk menghilangkan acuan-acuan kebiasaan dan tradisi dan mengorganisasi masyarakat dengan cara yang lebih rasional, demi kemajuan dan emansipasi manusia. Dalam pengertian ini, Marxisme menjadi sebuah wacana yang sangat modern. Pada kenyataannya, para pemikir Mazhab *Frankfurt* memang mengakui bahwa modernitas dan *Enlightenment* merepresentasikan sebuah terobosan besar dalam perkembangan umat manusia karena merekalah yang mampu membayangkan kemungkinan tentang perubahan dan kemajuan, sehingga, mereka memiliki kekuasaan untuk menentukan nasibnya. Meski demikian, para sarjana Mazhab *Frankfurt* juga melihat 'sisi gelap' modernitas. Mengacu pada karya Weber, Mazhab

Frankfurt mengembangkan analisis tentang pertumbuhan ekonomi dan perusahaan-perusahaan komersial yang berskala besar, ditambah dengan meningkatnya ketergantungan dan kecenderungan terhadap pengetahuan ilmiah dan keahlian teknis, yang menciptakan sebuah situasi yang di dalamnya rasionalitas 'sarana-tujuan' terus-menerus mendominasi wilayah-wilayah kehidupan. Dengan kata lain, pengetahuan manusia tidak digunakan untuk pengembangan kehidupan manusia pada umumnya, tetapi sebagai sebuah alat kekuasaan. Dalam pekerjaan mereka sehari-hari, orang sibuk dibebani dengan berbagai tugas, sehingga hanya punya sedikit waktu untuk merenungi tujuan akhir hidup atau jalur bagi kebahagiaan dan kepuasan manusia. Dalam masyarakat pada umumnya, kapitalisme memproduksi hasrat untuk menjadi pengonsumsi produk, yang berarti bahwa orang didorong untuk membeli sesuatu secara konsumtif dan mencari kepuasan melalui kepemilikan barang-barang. Dalam keadaan yang demikian, kapasitas seseorang untuk berpikir secara kritis dan penuh pertimbangan kian memudar.

Marx juga percaya bahwa kondisi-kondisi sosial yang sedang berlangsung memungkinkan para pekerja untuk mengembangkan kesadaran tentang eksploitasi atas diri mereka dan, melalui proses revolusi, mengambil alih kontrol atas nasib mereka. Para sarjana *Frankfurt* mulai menulis karena terjadinya salah satu krisis besar kapitalisme —depresi dunia tahun 1930-an. Pada 1930-an, di beberapa negara, daripada bergabung dengan kelompok sosialis, kelas pekerja malah memberikan dukungan mereka pada pergerakan gerakan popularis sayap kanan —bahkan fasis. Selain itu di kantung-kantung kejayaan sosialisme —di Uni Soviet, contohnya—

sosialisme terbukti menjadi sesuatu yang tidak seperti yang telah dibayangkan Marx. Daripada merealisasikan kondisi-kondisi bagi emansipasi para pekerja, Stalinisme malah ditandai dengan menyebarnya penindasan dan tirani. Para pemikir Mazhab *Frankfurt* terpaksa menghadapi kenyataan-kenyataan yang tidak menyenangkan ini dan mencoba menjelaskan alasan kegagalan para pekerja untuk melakukan pemberontakan terhadap kapitalisme. Dalam usaha untuk menjelaskan keberlanjutan atau kontinuasi kapitalisme di tengah badai krisis, para pemikir Mazhab *Frankfurt* mengubah perhatiannya pada peran penting yang dimainkan oleh sistem pendidikan dan media massa dalam menguatkan dukungan bagi kapitalisme. Mereka juga menyoroti organisasi-organisasi, seperti polisi yang digunakan untuk menekan pemogokan secara paksa atau demo-demo terbuka lainnya yang memperlihatkan sikap memberontak kepada otoritas dan kekayaan pribadi. Dengan cara ini, para pemikir teori kritis mulai memahami bahwa sementara organisasi masyarakat secara ekonomi itu penting, institusi-institusi sosial lainnya juga berperan vital dalam mendukung kapitalisme. Melalui sistem pendidikan dan media massa misalnya, orang didoktrinasi untuk menerima 'kebenaran yang dipaksakan' tentang dunia yang menahan mereka untuk memahami karakteristik sebenarnya tentang eksploitasi yang mereka alami.

Para sarjana Mazhab *Frankfurt* juga mencatat bahwa berbagai perubahan yang dihubungkan dengan pembangunan di dalam perekonomian kapitalis pada abad XX telah melahirkan perpecahan di antara para pekerja —contohnya, kesenjangan antara pekerja (orang yang bekerja), buruh informal, dan pengangguran. Dikenalnya teknologi-teknologi

yang menghemat penggunaan tenaga kerja melahirkan pengangguran besar-besaran pada 1930-an dan kehidupan orang yang bekerja lebih baik daripada para pengangguran. Para pengangguran hanya mempunyai sedikit, bahkan terlalu sedikit, untuk kehilangan, sehingga mereka lebih berani mengambil risiko. Bagaimanapun, kelompok-kelompok tersebut kurang terorganisir dan kurang memiliki kesadaran. Kesadaran kelas juga kian berkurang sebagaimana tugas-tugas dan pengetahuan menjadi makin terkotak-kotak karena orang mulai lebih melihat diri mereka dalam perspektif peran atau pekerjaan spesialis mereka daripada secara sederhana hanya sebagai pekerja. Setelah dikecewakan dengan berkurangnya potensi revolusioner kelas pekerja, beberapa pemikir Mazhab *Frankfurt* mulai melihat sumber-sumber perlawanan lain dan agen-agen perubahan sosial skala besar yang lainnya. Contohnya, pada masa pasca-Perang Dunia II terjadi ledakan protes para nasionalis yang melanda seluruh tempat di dunia terutama yang sebelumnya mengalami penjajahan. Selanjutnya, pada 1960-an dan 1970-an, seiring dengan bangkitnya gelombang baru radikalisme politik yang melanda seluruh dunia Barat, sejumlah gerakan sosial muncul dengan mengorganisasikan diri pada berbagai permasalahan isu-isu ekologi, rasisme, kekerasan HAM, kebebasan masyarakat sipil, diskriminasi seksual, dan gender. Para pemikir teori kritis kontemporer juga melihat lebih jauh dari perhatiannya ke kelas pekerja industri pada 'kekuatan-kekuatan *counter-hegemony*' yang sering berbentuk pergerakan-pergerakan sosial 'baru' atau 'kritis' dan yang terlibat di dalam berbagai bentuk perlawanan terhadap kapitalisme global dan yang, sebagaimana mereka, merupakan agen-agen perubahan sosial yang potensial.

Karya Gramsci tentang hegemoni juga sangat penting dalam teori hubungan internasional kritis, terutama yang berkaitan dengan studi tentang tatanan dan institusi-institusi dunia. Gramsci menyoroti pentingnya ideologi dalam mempertahankan kekuasaan kelas dan dalam menciptakan perubahan sosial. Gramsci berpendapat bahwa kelompok penguasa mampu melegitimasi aturan mereka dengan meyakinkan orang-orang bahwa aturan tersebut adalah benar dan adil. Dia menekankan bahwa agar tercipta perubahan, maka perlu untuk tidak hanya memenangkan peperangan 'di lapangan', tetapi juga dalam wilayah ide-ide. Dengan demikian, '*counter-hegemony*' mencakup tidak hanya perjuangan sosial dan politik terhadap kapitalisme tetapi juga pengembangan seperangkat nilai-nilai dan, terutama, sejumlah konsep-konsep alternatif sebagai upaya untuk memikirkan dan menjelaskan 'realitas' sosial yang sedang berlangsung dan kemungkinan alternatif-alternatifnya.

Tampaknya para pemikir teori kritis makin kecewa, atau setidaknya *emoh* atau malas memikirkan kemungkinan revolusi kelas pekerja. Lebih lanjut, para pemikir kritis menjadi lebih sensitif terhadap beragam penindasan yang terkandung dalam kapitalisme. Dari perspektif kritis, kapitalisme sedang mengubah dunia secara radikal, tetapi dalam prosesnya kapitalisme juga menghasilkan bentuk-bentuk kesenjangan utama berdasarkan atas kelas, ras, dan gender. Perusahaan-perusahaan kapitalis sedang mencari lebih banyak lagi sumber berharga dunia dalam rangka mempromosikan konsumerisme buta atas nama 'kebebasan memilih'. Lebih-lebih, upaya pencarian pasar-pasar menghancurkan masyarakat tradisional dan cara hidup sebagian besar penduduk di dunia.

Bagaimanapun, meski analisis dampak global kapitalisme yang lebih beragam ini mempunyai penjelasan yang lebih kuat, namun, sekali analisis tentang kapitalisme bergerak menjauh dari fokus utama terhadap kelas, maka apa yang akan terjadi pada proyek emansipasi manusia? Bagaimana bisa para pemikir kritis mengembangkan suatu konsepsi tentang masyarakat yang benar dan adil, jika tidak lagi mempermasalahkan berbagai kesenjangan yang berakar pada kelas sosial? Siapa yang kemudian menjadi agen-agen perubahan radikal? Lebih lanjut, apa yang dimaksud dengan 'emansipasi'? Jürgen Habermas telah menjadi figur berpengaruh dalam pemikiran kritis karena dia rupanya mempunyai jawaban untuk semua pertanyaan tersebut. Dalam sisi yang penting, karya Habermas mewakili sebuah gerak pemisahan yang penting dari analisis Marxis. Habermas berpendapat bahwa hingga kini analisis Marxis gagal memberi perhatian yang memadai terhadap pentingnya komunikasi yang membentuk kesadaran dan mengembangkan pemahaman atas: kedirian seseorang dan hubungan seseorang dengan orang lain. Marx memang benar dalam menekankan karakteristik sosial yang dimiliki umat manusia. Namun, Marx membatasi dirinya untuk menganalisis jenis-jenis organisasi sosial tertentu yang ada. Kemampuan bersosialisasi umat manusia, tentu saja, juga ditunjukkan melalui bahasa. Habermas berpendapat bahwa peran bahasa dan komunikasi telah diabaikan dalam pemikiran kritis. Menurut Habermas, komunikasi —penggunaan bahasa dan manipulasi simbol-simbol— memberikan kesempatan bagi berlangsungnya suatu jenis proses pembelajaran bersama. Melalui bahasa dan komunikasi, umat manusia membangun pengetahuan yang inter-subjektif tentang dunia.

Penekanan tentang pentingnya komunikasi dan pemahaman manusia ini membuat Habermas mendukung terjadinya proses dialog terbuka dan demokrasi demi makin terbukanya kesempatan emansipasi manusia. Habermas merupakan seorang pemikir yang sangat modern karena dia menghargai pencapaian modern yang berhubungan dengan kemampuan mengkritisi, menentang, dan mempertanyakan otoritas dan tugas-tugas serta kewajiban-kewajiban yang ada. Namun demikian, Habermas percaya bahwa kritik-kritik seperti itu hanyalah sebuah pengantar dalam usaha mengembangkan pemahaman yang lebih baik mengenai arti dari hidup di dalam masyarakat bermoral tempat orang diperlakukan secara adil. Dia berpendapat bahwa pembentukan pemahaman-diri, identitas-diri, dan penilaian-penilaian moral berkaitan erat dengan keadilan; kita menyadari kedirian kita, kebutuhan-kebutuhan, serta keinginan-keinginan kita dengan berdialog dengan orang lain dan juga menyadari tentang berbagai kebutuhan, kepentingan, dan keinginan orang lain. Habermas juga keluar dari pemikiran Marxis ortodoks dengan menandaskan bahwa gerakan-gerakan sosial yang mendukung feminisme, atau isu-isu '*Green*' (lingkungan), atau orang-orang pribumi juga menolak penyebarluasan rasionalitas 'teknis' atau 'saranatujuan' ke dalam semua ruang kehidupan sosial, mempromosikan nilai-nilai alternatif, sehingga bisa berkontribusi pada perpolitikan emansipatoris. Namun, perpolitikan emansipatoris ini tidak lagi berlandaskan pada pemikiran mengenai kebebasan buruh dari alienasi. Emansipasi adalah sebuah usaha tentang menyebarluaskan cakupan pemahaman moral dan keadilan dalam kehidupan manusia. Habermas mendedikasikan diri pada proses demokrasi karena demo-

krasi mengembangkan dialog yang diperlukan guna mengembangkan lebih jauh aturan moral dan pemikiran kita tentang keadilan.

Masalahnya adalah, tentu saja, bahwa proses dialog benar-benar terbuka sangatlah sulit dicapai di dalam masyarakat yang terbagi-bagi tempat orang mempunyai berbagai kepentingan yang berbeda-beda—bahkan bertentangan. Habermas mengakui masalah ini, tetapi tetap menekankan bahwa, bagaimanapun juga, dialog itu adalah suatu ideal yang harus diperjuangkan. Oleh karenanya, banyak karya-karya awal Habermas berkaitan dengan kondisi yang memungkinkan untuk menciptakan sebuah 'situasi perbincangan yang ideal'. Dalam sebuah situasi tersebut, semua orang akan mampu berpartisipasi dalam dialog terbuka, berkulit hitam atau putih, kaya atau miskin, Kristen atau Muslim, laki-laki atau perempuan. Dalam situasi seperti itu, orang-orang mungkin 'terpaksa' mempertimbangkan perspektif orang lain, daripada hanya memenuhi kepentingan mereka sendiri.

Asumsi-asumsi

Dari paparan di atas kami bisa menyatakan asumsi-asumsi umum berikut dari berbagai jenis pemikiran kritis, yakni:

1. 'Karakteristik manusia' tidaklah tetap atau esensial, tetapi dibentuk oleh berbagai kondisi sosial yang ada pada periode waktu tertentu.
2. Seorang individu (subjek) bisa dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu yang, bisa dikatakan, mempunyai kepentingan-kepentingan konkret.

3. Tidak ada yang disebut sebagai 'fakta-fakta' tentang dunia. Nilai-nilai kita memengaruhi berbagai penafsiran dan penjelasan kita tentang dunia.
4. Pengetahuan erat hubungannya dengan kepentingan manusia dalam emansipasi.
5. Meskipun berbeda-beda —misalnya, ras, etnisitas, gender, kelas— semua umat manusia sama-sama berupaya mencapai emansipasi. Jadi, teori kritis merupakan suatu doktrin orang-orang universalis.

Tema-tema

Negara dan Kekuasaan

Anda mungkin ingat dalam bab 1, bahwa realisme menganggap karakteristik negara dan sistem-negara sebagai titik tolak bagi pembuatan teori dalam hubungan internasional. Ketertarikan kaum realis terhadap masalah ekonomi hanya sepanjang hal tersebut memengaruhi tingkah laku negara atau menjadi sebuah isu di dalam perpolitikan internasional. Dari perspektif kritis, bukanlah hal yang masuk akal memperlakukan negara sebagai unit analisis dasar dalam hubungan internasional, demikian juga memisahkan ekonomi dari politik. Negara hanyalah salah satu bentuk organisasi politik yang ada di antara umat manusia. Dari perspektif kritis, memahami karakteristik sejarah negara dan sistem-negara itu penting, tetapi pemahaman akan sejarah ini akan hilang, jika kita menerapkan pendekatan 'negara sebagai aktor' dalam hubungan internasional.

Sebagaimana diketahui, teori kritis berorientasi terhadap proyek emansipasi manusia. Oleh sebab itu, ketika para pemikir teori kritis terlibat dalam proses pemikiran

tentang bentuk-bentuk organisasi politik, sosial, dan ekonomi yang ada di dunia, secara eksplisit mereka sedang berusaha menjawab pertanyaan mengenai tingkat batasan atau dukungan yang telah diberikan tatanan yang ada kepada proyek emansipasi manusia? Berkaitan dengan 'tatanan dunia' saat ini, pertanyaan kunci bagi para pemikir kritis adalah sebagai berikut. Apa yang disebut sebagai negara? Mengapa negara menjadi bentuk organisasi politik yang dominan secara global? Jenis tatanan dunia seperti apa yang mungkin ada di masa depan? Kecenderungan-kecenderungan apa yang bisa kita lihat di dalam tatanan yang ada saat ini yang menunjukkan jalan menuju perubahan-perubahan di masa mendatang?

Sebelum dunia tersusun sebagai suatu sistem atau masyarakat negara-bangsa, telah ada berbagai bentuk organisasi politik di seluruh dunia. Kita telah terbiasa menganggap ide negara dan sistem negara sebagai sebuah ciptaan Eropa, tetapi sesuatu yang erat kaitannya dengan hal yang sekarang kita kenal sebagai sistem negara-negara sesungguhnya muncul di Afrika Utara antara tahun 900 dan 1500, yang sangat dekat hubungannya dengan ekspansi perdagangan trans-Sahara. Pada masa yang relatif sama, dunia terbagi-bagi ke dalam berbagai kekaisaran besar, seperti Kekaisaran Mongol (1206-1405) atau Kekaisaran Turki (1301-1520). Di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Eropa Barat, pernah muncul sistem Kerajaan Feodal antara tahun 1154 dan 1314. Hal yang sekarang kita tahu sebagai sistem negara modern sebenarnya berkembang secara bertahap di Eropa Barat antara tahun 1500 dan 1688 dan diperkuat dengan bangkitnya nasionalisme di Eropa antara tahun 1800 dan 1914.

Dulu pada saat sistem-negara muncul, para saudagar dan pedagang Eropa mulai melakoni pelayaran untuk '*discovery*' (penemuan): mencoba mencari berbagai peluang perdagangan baru di berbagai penjuru dunia yang jauh. Hal ini selanjutnya, memperlihatkan kemunculan koloni-koloni Spanyol dan Prancis di Amerika Latin, di sebagian wilayah India, dan di Asia Tenggara antara tahun 1500 dan 1600. Antara tahun 1600 dan 1713, muncul gelombang ekspansi Inggris, Prancis, dan Belanda, yang pada akhirnya melahirkan kolonisasi wilayah-wilayah seluruh Afrika, sub-benua India, Asia Tenggara, dan Kepulauan Karibia (*West Indies*). Oleh karena itu, perdagangan barang-barang berharga, seperti rempah-rempah, sangatlah penting nilainya bagi perluasan perdagangan dunia dan kemunculan bentuk organisasi politik baru di seluruh dunia. Revolusi industri justru menjadi semacam alasan pencarian pasar-pasar baru dan menghasilkan bentuk-bentuk kontrol politik baru, ketika Eropa mulai menguasai berbagai tempat di permukaan bumi selama abad XVIII dan XIX. Kebanyakan koloni-koloni bentukan tersebut tidak mencapai kemerdekaan formal hingga pasca-Perang Dunia II.

Kotak Sejarah

Perdagangan Rempah-rempah

Di Eropa Utara sebelum penemuan bahan makan lembu di musim dingin pada akhir abad XVIII, banyak binatang buas yang dibantai secara besar-besaran setiap musim gugur dan dagingnya diawetkan untuk makanan musim dingin. Kondisi ini mengakibatakan permintaan atas bahan rempah-rempah menjadi tinggi, baik itu untuk pengawetan dan untuk membumbui. Lada tumbuh sebagian besar wilayah Asia Selatan,

kayu manis ditemukan di Sri Langka, dan pala di Pulau Banda. Pada abad XVI, perdagangan barang-barang ini telah diatur dan dibagi-bagi di antara para saudagar Melayu, India, Persia, Arab, dan Portugis. Pada abad XVII, dengan gabungan kekuatan diplomasi dan militer, VOC menguasai sumber berbagai jenis rempah-rempah yang bernilai dan memonopoli perdagangannya di Eropa. VOC merupakan sebuah contoh awal sebuah perusahaan transnasional. (Informasi dari Barraclough, G. (ed.) (1978), *The Times Atlas of World History*, London; Times Books).

Kita tidak akan membahas perkembangan sejarah berbagai jenis 'tatanan dunia' di sini, cukup dikatakan bahwa negara muncul menjadi jenis organisasi politik tertentu, yang muncul di awal kapitalisme di Eropa dan secara bertahap telah diadopsi di seluruh dunia. Di luar masalah perbedaan cara pandang terhadap hubungan antara sistem negara dengan kapitalisme, hubungan di antara kedua menjadi perhatian utama bagi berbagai pendekatan kritis dalam hubungan internasional. Sistem-negara telah berkembang bersamaan dengan, atau seiring dengan, sebuah perekonomian dunia yang kapitalis dan sebuah budaya modernitas yang dominan. Oleh sebab itu, dari sudut pandang (perspektif) kritis, memandang ekonomi dan politik sebagai wilayah aktivitas manusia yang terpisah bukanlah hal yang wajar —karena berbagai bentuk organisasi politik dan ekonomi terkait sangat erat. Lebih lanjut, sebuah konsep kritis yang membicarakan tatanan dunia tidak dimulai dan diakhiri dengan berbagai jenis organisasi politik. Tatanan dunia juga meliputi berbagai bentuk aktivitas ekonomi —pola-pola perdagangan dan perniagaan serta munculnya pasar-pasar— dan konfigurasi kekuatan sosial tertentu —saudagar, para pedagang, para industrialis, dan pekerja— yang semuanya tergabung dalam sistem global ini.

Negara jelas menjalankan serangkaian peran yang vital nilainya bagi perekonomian kapitalis, termasuk ketentuan sistem hukum untuk mengatur berbagai kontrak antara individu-individu dengan perusahaan-perusahaan dan kekuatan polisi untuk menjamin masyarakat tetap taat. Kelompok Marxis ortodoks menyatakan bahwa negara menengahi konflik akibat perjuangan kelas. Dengan cara ini, negara menetapkan dan menjamin keberlangsungan kekuasaan kelas. Negara juga menjaga iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi (atau akumulasi modal, dalam istilah orang-orang Marxis). Meski terdapat beberapa persamaan, ada juga berbagai perbedaan penting di antara pandangan para pemikir kritis dan kelompok Marxis ortodoks tentang karakteristik dan peran negara.

Pertama, para pemikir kritis memberikan perhatian yang lebih dekat pada peran ideologi dalam mempertahankan kekuasaan kelompok yang berkuasa. Konsep hegemoni mengungkapkan ide bahwa kelompok yang berkuasa menetapkan dan melegitimasi kekuasaan mereka melalui budaya dan ide-ide. Dengan kata lain, hegemoni dianggap terletak pada tingkat persetujuan yang luas, meski demikian, berfungsi menurut prinsip dasar yang menjamin berlanjutnya supremasi kelas-kelas sosial yang paling unggul dalam penyelenggaraan negara. Semakin kuat kekuasaan kelompok, maka semakin sedikit kebutuhannya untuk menggunakan kekuatan. Hegemoni merupakan hasil perjuangan kelas dan digunakan untuk menguatkan kekuasaan kapitalis. Kaum Gramscian (pendukung pemikiran Gramsci) menggunakan istilah 'proyek hegemoni' untuk mengacu pada cara-cara yang digunakan oleh kelas-kelas tertentu dalam menghadirkan berbagai kepentingan mereka sebagai kepen-

tingan-kepentingan semua orang —dengan kata lain, kepentingan universal. Dengan cara ini, kelas-kelas tertentu tersebut mampu melanggengkan kekuasaan mereka.

Kedua, hegemoni digunakan dalam teori kritis untuk menggambarkan dominasi negara-negara besar tertentu di dunia. Para pemikir kritis berpendapat bahwa meski kita sekarang hidup di dalam sebuah sistem negara yang secara formal semua anggotanya memiliki derajat yang sama, antara satu negara dengan negara lain menerapkan peran yang berbeda guna memfasilitasi pengaksesan pasar-pasar global dan beroperasinya perusahaan-perusahaan kapitalis, dan mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang juga berbeda. Jadi, misalnya, dalam tatanan dunia saat ini, Amerika Serikat merupakan negara besar dan hegemonik yang bekerja untuk memastikan bahwa dunia 'dibuat aman bagi kapitalisme'.

Ketiga, para pemikir kritis berpendapat bahwa negara tidak mencerminkan kepentingan kelas-kelas sosial yang berkuasa secara terang-terangan. Negara tentu berperan penting dalam mendukung suatu tatanan sosial yang opresif (bersifat menindas). Gramsci berpendapat bahwa hegemoni dijalankan oleh sebuah kelas melalui agensi partai atau melalui negara. Jelas, sejarah kemunculan dan evolusi negara dan sistem-negara telah bekerja untuk menjamin hubungan-hubungan ekonomi dan sosial kapitalis benar-benar tertanam dengan aman di seluruh dunia. Akan tetapi, para pemikir kritis kontemporer menganggap negara sebagai entitas yang relatif otonom. Hal ini berarti bahwa negara mencerminkan kepentingan-kepentingan kapital dan juga berbagai tekanan dari kelompok-kelompok '*counter-hegemoni*'.

Tingkatan pengaruh yang mampu diraih oleh kelompok-kelompok '*counter-hegemoni*' bervariasi sepanjang

waktu. Pada masa kini, globalisasi modal telah melemahkan otonomi negara dan kemampuan negara untuk memenuhi berbagai kebutuhan warga negaranya akan kesejahteraan dan keamanan sosial dan ekonomi. Dengan pengertian ini, istilah 'menurunnya peran negara' (*rolling back of state*) yang telah menjadi fenomena di seluruh dunia industri selama restrukturisasi global harus dilihat sebagai satu sarana melindungi kebijakan ekonomi dari berbagai tekanan masyarakat umum, terutama tuntutan-tuntutan dari kelompok-kelompok miskin. Pada saat yang sama, banyak di antara ikatan dagang telah diperlemah dan posisi modal dalam proses produksi diperkuat secara signifikan.

Contoh Dunia

Tingkat Suku Bunga di Inggris

Salah satu aksi pertama Pemerintah Inggris dari Partai Buruh di musim panas 1997 adalah menyerahkan kontrol tingkat suku bunga pada Bank Inggris. Menurut sejarah, kontrol atas tingkat suku bunga telah memungkinkan pemerintah bisa menjalankan pengaruh terhadap indikator-indikator ekonomi utama, seperti tingkat inflasi. Untuk itu, kontrol tersebut dianggap sebagai suatu alat kebijakan ekonomi yang vital bagi pemerintah mana pun yang sedang berusaha memanipulasi perekonomian guna meraih tujuan-tujuan tertentu, seperti tingkat pengangguran serendah-rendahnya (*full employment*) dan redistribusi kesejahteraan melalui pajak dan pemberian bantuan kebutuhan. Mengenai penyerahan atas kontrol tingkat suku bunga, konselor Gordon Brown mengakui bahwa kontrol pemerintah terhadap perekonomian merupakan hal yang tidak mungkin dalam era globalisasi, dan sejak itu partai-partai demokrat sosial, seperti Partai Buruh Inggris, harus bekerja sama dengan kekuatan kapitalisme global, bukan melawannya. Dari perspektif kritis, tindakan-tindakan seperti ini mewakili suatu pergeseran men-

dasar dalam keseimbangan kekuatan sosial global yang berpihak pada modal dan melawan tenaga kerja. Mereka akan memprediksikan bahwa hasilnya mungkin adalah —menurunnya upah dan kondisi kerja masyarakat umum, serta tumbuhnya kesenjangan sosial.

Dengan melihat bahasan tentang sistem-negara dan tatanan dunia ini, maka kekuasaan tidak bisa dipahami sepenuhnya dalam kerangka militer dan/atau ekonomi negara saja. Jelasnya, kekuasaan dijalankan secara langsung oleh negara-negara dalam beberapa situasi. Dalam usaha 'membuat dunia yang aman bagi kapitalisme', Amerika Serikat telah ikut campur dalam berbagai konflik di seluruh dunia, guna mencoba memengaruhi hasilnya dengan cara yang menguntungkan kapitalisme global. Bagaimanapun, kekuasaan juga dijalankan melalui serangkaian institusi sosial lainnya dan bekerja untuk mendukung suatu jenis tatanan sosial tertentu. Negara mendukung tatanan kapitalis dan, dalam prosesnya, mendukung jenis-jenis hubungan kekuasaan tertentu yang terjadi di antara kelompok-kelompok sosial —kekuasaan bisnis dan perniagaan atas para pekerja, kekuasaan perusahaan-perusahaan multinasional atas komunitas-komunitas pribumi yang tergantung pada lapangan pekerjaan yang dihasilkannya, serta kekuasaan para spekulan mata uang, para investor, dan para pedagang dalam komoditi-komoditi pokok yang membentuk perekonomian global serta distribusi kekayaan di seluruh dunia. Kekuasaan juga dijalankan secara lebih tersembunyi melalui penyebarluasan ide-ide dan kepercayaan-kepercayaan tertentu yang bekerja untuk melegitimasi tatanan yang ada.

Institusi-institusi dan Tatanan Dunia

Tak heran, teori kritis telah memberikan kontribusi besar pada pemahaman kita tentang tatanan dunia dan institusi-institusinya. Kita telah melihat bahwa sebuah konsepsi kritis mengenai negara menuntun kita pada sebuah pandangan khusus terhadap karakteristik tatanan dunia. Pada pengertian ini, teori kritis sangat membantu mengembangkan pemahaman tentang tatanan dunia sedikit lebih jauh dan mencoba menjelaskan caranya membantu kita memahami peranan institusi-institusi internasional, seperti IMF atau World Bank.

Pada masa setelah Perang Dunia II, negara telah terinternasionalisasikan dalam artian bahwa negara telah menjadi bentuk organisasi politik yang dominan di seluruh dunia. Negara juga telah menjadi terinternasionalisasikan dalam pengertian lainnya: fungsi-fungsi tradisionalnya untuk mengontrol kini dijalankan oleh berbagai negara dan organisasi. Jika kita berpikir mengenai negara lebih pada perannya, menerapkan kontrol dan regulasi terhadap kapitalisme, daripada sebagai suatu entitas atau 'aktor', maka kita akan melihat bahwa fungsi-fungsi ini sekarang tersebar di antara berbagai negara di dunia dan pada serangkaian institusi dan rezim-rezim internasional.

Konsepsi kaum Gramscian tentang aliansi-aliansi kelas dan dominasi hegemonik transnasional telah berhasil diterapkan pada konsep tatanan dunia. Para pemikir kritis mengadaptasi ide ini untuk menyatakan bahwa negara yang berkuasa dalam tatanan dunia menciptakan tatanan berdasarkan ideologi. Misalnya, Sistem Bretton Woods (SBW), yang telah dibahas secara lengkap di bab 2, tidak akan pernah mungkin ada tanpa dukungan dari sebuah negara hege-

monik —Amerika Serikat. AS memainkan sejumlah peran krusial dalam menetapkan SBW dan membuatnya bekerja dengan efektif. Hal yang mungkin lebih penting adalah bahwa telah AS menyediakan dukungan ideologi yang vital bagi tatanan dunia baru, dengan berpendapat bahwa perdagangan bebas dan stabilitas moneter akan memudahkan kebebasan dan demokrasi berkembang di seluruh dunia.

Kotak Penulis

Robert Cox (Negara, Kekuatan Sosial, dan Tatanan Dunia)

Tahun 1992, Robert Cox membuat catatan mengenai konsep sangat berpengaruh mengenai 'negara, kekuatan sosial, dan tatanan dunia'. Cox mengatakan bahwa kemajuan dalam komunikasi dan globalisasi keuangan telah melahirkan suatu perubahan radikal dalam pengorganisasian produksi di seluruh dunia. Pada abad XIX dan awal abad XX, produksi barang dan jasa dilakukan hanya oleh negara-negara tertentu dan produk-produk tersebut kemudian diperdagangkan antar-negara. Namun, kini proses produksi telah tersebar di berbagai negara. Contohnya, berbagai ragam komponen mobil mungkin tersebar di sejumlah negara, dan perakitan beragam komponen tersebut menjadi sebuah mobil mungkin berlangsung di tempat lainnya di dunia. Metode produksi semacam ini membawa sebuah model hubungan sosial yang baru yang berdasar pada sebuah struktur produksi pusat-pinggiran, dengan sebuah pusat yang relatif kecil dan memiliki pekerja tetap jumlahnya relatif sedikit di Utara, yang menangani keuangan, riset dan pengembangan, dan teknologi, dengan sebuah pinggiran yang terdiri atas komponen-komponen proses produksi yang dependen. Hal ini memberikan kesempatan pada kapital untuk mengambil keuntungan dari tenaga kerja yang makin dipekerjakan secara buruk yang dikelompokkan menurut etnisitas, gender, nasionalitas, atau agama. Dalam beberapa kasus, kelompok-kelompok ini telah menggantikan kelas sebagai fokus dari perjuangan sosial, tetapi seperti kelas pekerja generasi sebelumnya, mereka

memperoleh kekuatan dari kemarahan yang mereka rasakan atas eksploitasi yang mereka derita. Kelompok-kelompok yang tersingkir harus mengorganisasikan diri mereka sendiri secara transnasional jika mereka ingin menjadi kekuatan oposisi yang efektif. Namun, sejalan perekonomian terus mengglobal, sebagai tanggapannya kelas-kelas ekonomi utama menjadi makin terorganisir secara global dalam rangka mencapai dominasi yang hegemonik, sementara kelompok-kelompok yang dirugikan makin terbagi-bagi dalam batas nasionalitas, etnisitas, kelas, dan gender.

Jika tatanan dunia mengalami perubahan, begitu pula susunan-susunan politik, ekonomi, dan sosial alternatif dapat dan mulai muncul. Para pemikir kritis memusatkan perhatian pada karakteristik perubahan tersebut dan cara kekuatan dan struktur sosial memasuki masa transisi. Tatanan yang ada tidaklah 'tetap' karena struktur-struktur sosial terdiri atas berbagai institusi —suatu bentuk sosio-ekonomi dari organisasi dan ide-ide yang sedang menggejala. Meski tindakan sosial dibatasi oleh struktur-struktur, namun kekuatan-kekuatan sosial bisa ditransformasikan oleh tindakan bersama yang melibatkan berbagai kelompok berpengaruh atau kurang berpengaruh di dalam masyarakat. Stephen Gill berpendapat bahwa ada sumber-sumber konflik dan perpecahan baru yang bekerja secara pelan, namun pasti ke dalam dasar-dasar politik dunia. Kekuatan-kekuatan '*counter-hegemoni*' sedang menentang susunan-susunan institusi dan politik yang sedang berlangsung. Gill juga berpendapat bahwa terdapat kebutuhan yang mendesak bagi '*counter-hegemoni*' yang berbasis pada seperangkat nilai, konsep, dan fokus alternatif, yang diharapkan muncul dari organisasi-organisasi seperti Amnesty Internasional, Oxfam,

dan Greenpeace. Gerakan-gerakan ini muncul di dalam negara, tetapi mereka telah tumbuh di berbagai belahan dunia dan sesungguhnya bersifat transnasional. Kaum intelektual juga berperan dalam menghasilkan perubahan dengan mengembangkan serangkaian konsep dan perhatian yang bersifat *'counter-hegemonic'* pada masalah-masalah militerisme dan kesenjangan ekonomi dan sosial.

Identitas dan Komunitas

Sejauh ini, dalam pembahasan kita tentang tema-tema, kita telah banyak membahas teori kritis kaum Gramscian. Pada bagian ini, perlu dipertimbangkan pula ide-ide kaum Habermasian telah sedemikian berpengaruh dalam Hubungan Internasional. Dalam pembahasan tentang negara di atas, kami cenderung memusatkan perhatian berbagai peran dan fungsi yang dipenuhi negara bagi kapitalisme, meski juga menyatakan bahwa dalam beberapa hal negara juga mencerminkan perjuangan untuk meraih pengaruh politik di antara berbagai kelompok oposisi. Seorang pemikir kritis seperti Linklater sangat tertarik tentang sejauh mana negara dan sistem-negara membuka atau menutup bagi berbagai kemungkinan bagi emansipasi manusia.

Para pemikir *Enlightenment* percaya bahwa negara modern mampu menciptakan kondisi-kondisi yang di dalamnya memungkinkan berlangsungnya hidup di bawah aturan hukum dan menurut prinsip keadilan. Lebih lanjut, orang umumnya—atau sedikitnya beberapa orang—menikmati status sebagai warga negara aktif dan berperan dalam menentukan sistem politik negara mereka di ruang publik, tempat bagi isu-isu hukum, keadilan, dan moralitas diperdebatkan secara terbuka, daripada sebagai subjek yang harus

menuruti penguasa. Sejauh 'emansipasi' erat hubungannya dengan otonomi dan kontrol terhadap kehidupan seseorang, maka ini merupakan kemajuan bagi umat manusia.

Bangkitnya nasionalisme sebagai suatu ideologi yang kuat pada abad XVIII dan XIX, menguatkan klaim bahwa negara adalah satu-satunya representasi warga negara yang diakui —dengan cara— *pertama,* memperluas hak-hak kewarganegaraan dan, *kedua,* menanamkan perasaan ikatan emosional terhadap negara-bangsa. Kaum realis terus menganggap negara sebagai bentuk komunitas yang dominan dan satu-satunya ungkapan atas identitas politik yang paling penting di dunia. Pada abad XX, sentimen kelompok nasionalis mulai menentang otoritas dan legitimasi dari batas-batas negara yang ada. Bagaimanapun, berbagai gerakan nasional yang radikal dan separatis yang bertindak atas nama hak-hak seseorang untuk 'menentukan nasib sendiri' justru menguatkan keterikatan antara individu dan 'bumi pertiwinya' dan justru lebih menguatkan dan demikian mengonsolidasikan —daripada melemahkan— sistem-negara. Dalam beberapa hal, perluasan sistem-negara bisa dilihat sebagai perkembangan positif karena hal tersebut menawarkan prinsip-prinsip determinasi-diri dan kewarganegaraan kepada lebih banyak penduduk di dunia.

Namun, pada saat yang sama, negara bangsa mengandung kontradiksi karena negara-bangsa merupakan sebuah bentuk komunitas politik yang inklusioner sekaligus eksklusioner. Negara-bangsa bersifat inklusioner karena negara-bangsa dibangun berdasarkan ide bahwa semua warga negara itu sama. Ada hak-hak tertentu dari status kewarganegaraan dan hak-hak tersebut harus dapat dinikmati oleh setiap anggota masyarakat tersebut. Semua warga negara,

dengan demikian, mempunyai nilai moral yang sama. Namun, negara-bangsa punya karakteristik eksklusioner. Yakni, Ia mendiskriminasikan 'orang asing' dengan alasan bahwa mereka berbeda. Pembedaan antara *'insider'* dan *'outsider'* dianggap relevan secara moral. Komunitas yang terikat dalam kerangka negara-bangsa mengeksklusikan orang perbedaannya dianggap mengancam identitas tertentu negara. Hukum internasional kini menunjukkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara kepada non-warga negara yang tinggal sementara di dalam batas-batas wilayahnya, terutama, harus dilindungi dari bahaya; dalam kasus-kasus tertentu negara mungkin memperluas hak-hak perlindungan sementara bagi orang-orang asing yang merasa terancam dengan ancaman persekusi di negara asli mereka. Meskipun begitu, ketika berkata bahwa, negara Inggris mempunyai kewajiban tertentu bagi 'orang-orang asing', hal ini jelas tidak sama atau tidak sejajar dengan kewajiban-kewajiban terhadap warga dari negara tertentu. Lebih lanjut, batas-batas tentang komunitas-komunitas selalu dikontrol untuk menjamin keamanan dari 'invasi' *'outsider*/pihak luar', demikian pula, kita menganggap 'orang-orang asing' sebagai ancaman bagi wilayah kita dalam pengertian bahwa kita bahkan bisa memperdebatkan moralitas penggunaan persenjataan nuklir untuk menahan *'oursider*/pihak luar' dari melintasi 'wilayah' kita.

Proyek emansipatori sebagai inti teori kritis secara otomatis akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan tentang batas-batas komunitas politik, tentang penjabaran mengenai pengonstruksian batas-batas antara diri sendiri dengan pihak lain, dan tentang pengaruh moral yang timbul dari hal tersebut. Linklater juga tertarik tentang batas-batas

komunitas yang berubah setiap waktu. Jadi misalnya, menurut sejarah, kelompok-kelompok tertentu, perempuan dan laki-laki kelas pekerja, misalnya, telah ditolak status kewarganegaraannya dengan alasan bahwa mereka 'berbeda' —kurang rasional dan tidak mencukupi dengan ketentuan atas kewarganegaraan aktif. Perempuan, misalnya, dianggap perlu arahan moral yang kuat dari kaum pria mereka. Tentu saja, laki-laki dan perempuan kelas pekerja telah membuat langkah-langkah besar dalam mengatasi berbagai prasangka terhadap mereka tersebut dan kini dapat menikmati hak-hak kewarganegaraan di sebagian besar negara-negara di dunia, meskipun seperti yang akan kita lihat pada bab 6, bentuk-bentuk diskriminasi yang signifikan masih ada.

Sejak PBB didirikan pada 1945, secara bertahap terdapat perkembangan dalam hukum hak asasi manusia yang mengakui persamaan nilai moral setiap umat manusia. Menyebarluasnya komitmen untuk menghormati hak asasi manusia seolah menunjukkan telah adanya keyakinan moral di antara umat manusia bahwa semua individu tidak hanya menjadi bagian dari negara-negara berdaulat, tetapi juga dari sebuah komunitas umat manusia yang lebih inklusif, meskipun dalam praktiknya, hal ini disangkal oleh beberapa kelompok.

Jika diperdebatkan, sekarang kita bahkan sedang menyaksikan makin hilangnya kekuasaan sistem-negara oleh kecenderungan terhadap bentuk-bentuk identitas dan komunitas kosmopolitan. Sebagaimana dapat dilihat dalam uraian sebelumnya tentang tatanan dunia dan makin mengglobalnya karakteristik hubungan-hubungan sosial, ekspresi loyalitas dan solidaritas dapat bersifat sub-negara maupun

transnasional. Berbagai gerakan sosial menunjukkan, atau mencerminkan, bentuk-bentuk identitas, kesetiaan, dan solidaritas yang plural. Kelompok-kelompok ini menunjukkan komitmen pada berbagai komunitas dan, secara bertahap, dan mereka berkarakteristik transnasional.

Kotak Penulis

Andrew Linklater dan Transformasi Komunitas Politik

Berbagai bentuk baru identifikasi dan ekspresi politik dari 'komunitas transnasional', telah mendorong para pemikir kritis untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang penjelasan bahwa manusia lebih dituntut untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya pada masyarakat dunia daripada pada sesama warga negara. Andrew Linklater berpendapat bahwa para pemikir kritis terus berpegang pada ide penciptaan sebuah '*good society*' yang tidak terbatas pada negara-bangsa. Titik pijaknya adalah perlunya untuk kembali pada pemahaman politik klasik yang berorientasi terhadap emansipasi masyarakat. Tahap pertama dari proyek ini adalah memahami cara orang-orang belajar memasukkan dan mengeluarkan mereka yang dianggap 'berbeda' dan yang tereksklusikan dari komunitas moral. Hal yang akan membutuhkan lebih dari 'sekadar' perhatian pemikir Marxis konvensional terhadap kelas sosial adalah terus berlangsungnya diskriminasi terhadap orang-orang dari ras, latar belakang etnis, dan gender yang berbeda.

Hal yang sama penting dengan usaha untuk memahami dinamika eksklusi sosial adalah mengetahui penentangan terhadap ekslusi sosial tersebut oleh kelompok-kelompok yang terlibat dalam aksi-aksi politik nasional maupun transnasional. Lebih lanjut, terdapat banyak arena tempat masyarakat telah mengungkapkan komitmen politik yang penting dan memikirkan maupun memperdebatkan isu-isu moral dan politik. Dengan mempergunakan ide-ide kelompok Habermasian tentang pentingnya komunikasi dan dialog dalam mencapai kondisi politik yang emansipatoris, Linklater menyoroti beragam 'ruang-

ruang publik' tempat berbagai jenis perdebatan ini berlangsung. Dia mengklaim bahwa komunitas-komunitas politik sedang ditransformasi oleh, misalnya, perjuangan-perjuangan atas persamaan, hak, klaim atas sumber daya alam dan konsepsi kewajiban yang dimiliki seseorang terhadap orang lain, dan bagaimana komunitas-komunitas ini dapat berubah secara lebih radikal di masa depan.

Kesenjangan dan Keadilan

Meski terdapat berbagai variasi dan nuansa dalam berbagai cabang teori kritis, semua pemikir kritis mempunyai komitmen dasar yang sama tentang persamaan manusia. Dalam teori kritis kontemporer, bentuk-bentuk kesenjangan dan diskriminasi lainnya, seperti seksisme dan rasisme, penolakan hak-hak asasi manusia bagi beberapa kelompok, juga diakui sebagai sesuatu yang sangat penting. Namun, ketika nanti berbagai sumber penindasan tersebut diketahui, hal tersebut memunculkan pertanyaan tentang cara untuk mewujudkan suatu dunia yang lebih sejajar dan adil.

Para pemikir kritis bersikap skeptis tentang skema-skema liberal karena selain menjamin persamaan formal, tetapi juga menolerir sebuah tatanan sosial dan ekonomi yang menghasilkan kesenjangan-kesenjangan besar dalam kekayaan dan kekuasaan. Meski demikian, mereka juga mengakui bahwa meski berbagai eksperimen dalam sosialisme negara sebagian besar telah berhasil menciptakan sebuah masyarakat yang lebih sejajar, namun sering kali hal tersebut harus dibayar dengan penindasan dan tirani. Tantangan terbesar bagi para pemikir kritis adalah untuk mewujudkan politik yang emansipatoris, yang secara sosial inklusif dan demokratis. Dalam sebuah dunia yang terbagi ke dalam beragam batasan nasionalitas, etnisitas, agama,

budaya, kelas, seksualitas, dan gender, bagaimana tantangan tersebut akan dapat dijawab?

Terdapat sejumlah tanggapan atas pertanyaan ini. Salah satunya adalah penegasan bahwa berbagai kesenjangan dan penindasan berdasarkan kelas sosial tetap lebih mendasar atau lebih signifikan daripada jenis-jenis lainnya. Hal yang paling penting dari posisi ini adalah bahwa meski di dunia saat ini terdapat banyak suara sumbang yang minta didengar, kemiskinan dunia adalah hal yang benar-benar terpinggirkan dan tak pernah tercatat secara statistik. Tanggapan kedua telah menggunakan konsepsi politik dialogisnya Habermas, yang muncul untuk memenuhi berbagai kebutuhan sebuah dunia tempat negara-bangsa masih merupakan aktor penting, meski tidak lagi merupakan satu-satunya arena bagi perdebatan tentang persamaan dan keadilan berlangsung, dan pada waktu visi-visi kaum liberal dan/atau masyarakat Barat tentang persamaan dan keadilan telah menjadi sasaran berbagai kritik.

Diakui bahwa bukanlah hal yang selalu mudah untuk mencapai kesepakatan, terutama di dalam situasi-situasi yang masyarakatnya mempunyai berbagai bentuk pemerintahan dan kecenderungan budaya yang sangat beragam. Dialog tidak selalu juga mencapai konsensus. Fungsi utama dialog komunitas global, menurut Linklater, adalah untuk mencerminkan kualitas heterogenitas (keberagaman) masyarakat internasional. Bagaimanapun, komitmen untuk melakukan dialog mensyaratkan diusahakannya jaringan komunikasi yang lebih luas. Komunitas komunikasi yang berskala universal akan sangat sulit untuk dicapai, tetapi ia tetap menjadi standar kritik sosial paling mutakhir yang harus kita coba meraihnya.

Konflik dan Kekerasan

Dari perspektif kritis ini, konflik manusia tidak berakar pada masalah anarki saja, tetapi pada karakteristik kapitalisme global. Teori kritis versi kaum Gramscian menyetujui, dengan beberapa kualifikasi dan modifikasi, pandangan para pemikir Marxis yang lebih ortodoks yang menyatakan bahwa peperangan besar abad ini telah disebabkan karena pencarian bahan-bahan dan sumber-sumber mentah serta pembukaan wilayah-wilayah dunia secara paksa bagi ekspansi kapitalis. Di sisi lain, banyak perjuangan 'nasional' muncul sebagai tanggapan terhadap berbagai bentuk dominasi yang kolonial dan imperialis. Kapitalisme, dengan karakteristiknya sendiri, menghasilkan konflik dan kekerasan.

Versi kedua teori kritis, yang dipengaruhi oleh Habermas, mengambil konsepsi 'inter-subjektivitas', dialog, dan negosiasi sebagai suatu titik awal dalam mendapatkan pemahaman mengenai cara mempromosikan perubahan damai. Dengan cara ini, para pemikir kritis telah memberi beberapa kontribusi bagi pemahaman kita tentang resolusi konflik.

Perdamaian dan Keamanan

Sebagaimana yang terlihat dalam uraian singkat kami tentang peran Amerika Serikat sejak Perang Dunia II, para pemikir kritis sangat kritis terhadap pemikiran kaum realis dan liberal tentang perdamaian dan keamanan dan cara untuk meraih hal tersebut. Institusi-institusi internasional umumnya mencerminkan kepentingan negara-negara hegemonik yang bertindak untuk menjamin perdagangan dunia tetap stabil, kesepakatan-kesepakatan dihargai, dan pemberontakan yang terjadi diberangus. Bagi para pemikir kritis,

perdamaian dan keamanan sejati hanya bisa dicapai ketika kontradiksi utama kapitalisme yang menghasilkan krisis dan ketidakstabilan ekonomi itu diatasi; ketika orang-orang tidak lagi diperlakukan sebagai sarana (tenaga kerja) untuk mencapai tujuan (keuntungan produksi) di dalam sistem yang sepenuhnya eksploitatif dan menciptakan alienasi, dan ketika sumber-sumber daya bumi tidak lagi dihambur-hamburkan secara tidak bertanggung jawab untuk memuaskan berbagai keinginan, bukannya kebutuhan-kebutuhan, konsumen. Beberapa aliran pemahaman teori kritis menginformasikan berkembangnya aliran studi kritis tentang keamanan dalam Hubungan Internasional.

Kesimpulan

1. Teori kritis pernah tidak dikembangkan dalam Hubungan Internasional tetapi mulai berpengaruh dalam Hubungan Internasional sejak 1980-an hingga sekarang.
2. Seperti halnya strukturalisme, teori kritis juga dipengaruhi oleh Marxisme, terutama oleh Marx 'humanistik' awal, berbeda dengan strukturalisme yang lebih terinspirasi oleh Marxisme 'ekonomistik' dan 'ilmiah'.
3. Para pemikir kritis melihat suatu hubungan erat antara teori dan praktik —atau gabungannya, praxis.
4. Para pemikir kritis menyatakan bahwa pengetahuan adalah ideologi, bukan kebenaran, meskipun sebagian dari mereka percaya bahwa pengetahuan itu memungkinkan untuk membahas atau menyetujui beberapa proposisi.
5. Karena juga berakar pada Marx, teori kritis juga telah berevolusi dari ide-ide Mazhab *Frankfurt* (terutama Jürgen Habermas) dan Marxis Italia Antonio Gramsci.

6. Teori kritis merupakan sebuah proyek yang sangat 'modern' karena ia bertujuan untuk meningkatkan emansipasi manusia. Meski demikian, teori kritis menyadari dan berusaha mengatasi 'sisi gelap modernitas'.
7. Para pemikir kritis mengakui bahwa penindasan berbasis-kelas bukanlah satu-satunya bentuk yang terjadi di dalam masyarakat kapitalis. Penindasan-penindasan lainnya mencakup hal-hal yang berdasar pada etnisitas, gender, nasionalitas dan sebagainya.
8. Para pemikir kritis kontemporer melihat kekuatan '*counter-hegemonic*' (perjuangan untuk menolak kapitalisme global) dalam kerangka gerakan-gerakan sosial baru (perempuan, lingkungan hidup, misalnya) dan mencari agen-agen perubahan sosial yang lebih jauh para kelas pekerja industri.
9. Para pemikir kritis menyadarkan kita tentang beberapa ciri-ciri tertentu kehidupan manusia yang berkarakteristik relatif menurut sejarah dan, dengan demikian, mengingatkan kita bahwa hubungan internasional itu tidaklah bersifat tetap atau tidak berubah.
10. Teori kritis membuat pengakuan atas nama seluruh umat manusia —bahwa teori kritis itu bersifat universalistik. Oleh karena itu, teori kritis mempertanyakan berbagai bentuk eksklusi ataupun diskriminasi yang membuat pembedaan di antara berbagai kelompok masyarakat. Hal ini secara otomatis membangkitkan pertanyaan-pertanyaan tentang cara kita menjelaskan diri kita sendiri, dan membedakan diri kita dengan orang lain, yang membawa pada pemikiran tentang bagaimana batas-batas di antara berbagai komunitas

digambarkan dan konsekuensi-konsekuensi dari hal tersebut.

Kritik

Terdapat sejumlah kritik yang ditujukan pada teori kritis. Pada bagian ini, kita akan secara singkat menguraikan garis besar beberapa kritik yang paling penting. Salah satunya kritik terhadap teori kritis versi kaum Gramscian yang menyatakan bahwa kaum Gramscian terlalu memusatkan perhatian pada pentingnya kelas sosial dan hubungan antarkelas dan, sebagai konsekuensinya, Gramscian buta terhadap bentuk-bentuk kesenjangan dan eksklusi lainnya. Kritik ini tidak sepenuhnya benar karena ada banyak pemikir kritis yang mengakui krusialnya masalah kesenjangan gender atau bahwa orang bisa didiskriminasikan, dieksklusikan, atau diperlakukan secara berbeda dengan lainnya atas sebab jenis kelamin mereka, ras, atau asal etnis. Bagaimanapun, cukuplah dikatakan bahwa terdapat kecenderungan di antara kaum Gramscian untuk terus memusatkan perhatian pada (atau mengutamakan) kelas sosial dalam kerja empiris mereka.

Kritik berikutnya yang masih berhubungan dengan kritik pertama yakni bahwa para pemikir kritis juga mengutamakan kelas dalam konsepsi mereka tentang 'kepentingan'. Kita mungkin menganggap diri kita sendiri sebagai seseorang yang mempunyai kepentingan yang konkret yang muncul dengan dasar gender atau nasionalitas kita. Lebih lanjut, pemikiran kita mengenai basis kepentingan kita mungkin juga mengalami perubahan yang signifikan sepanjang waktu. Bahkan di dalam kelas kapital (kapital: masyarakat kelas pemodal —Peny.), mungkin terdapat perbedaan

kepentingan tergantung pada apakah orang kapitalis itu seorang industrialis atau terlibat dalam perniagaan dan hal ini dalam tingkat tertentu melemahkan pemikiran tentang aliansi-aliansi kelas transnasional.

Berhubungan dengan teori kritis yang terinspirasi oleh Habermas, para kritikus berpendapat bahwa model 'dialogis' adalah sebuah model gagal karena akses —kemampuan untuk didengar— tanpa bisa ditolak dibatasi oleh kesenjangan-kesenjangan yang ada. Sebuah 'situasi percakapan ideal' adalah hal yang tidak mungkin diwujudkan. Pada umumnya, orang-orang miskin —kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan atau akses atas teknologi yang rendah— mungkin menjadi sangat tidak terwakili. Kritik lainnya yakni bahwa model politik dialogis gagal untuk mengingat rentannya titik pandang moral di dalam sebuah dunia yang ditandai dengan kesenjangan yang berskala masif. Dengan kata lain, penguasa tidak mungkin akan menyerahkan keuntungan yang mereka peroleh —menurut tinjauan kritis— bahkan jika 'keadilan' menuntut redistribusi atas berbagai sumber daya dan kekayaan.

Terakhir, aspirasi teori kritis yang universalistik terus mendapatkan tantangan. Misalnya, oleh kaum posmodernis berpendapat bahwa sangatlah kecil kemungkinannya menetapkan sesuatu yang secara moral benar atau adil, bahkan meski melalui proses dialog inter-subjektif, karena tidak akan ada kesepakatan tentang isu-isu yang diperbincangkan tersebut dalam ragam kebudayaan. Hasil yang paling mungkin dari proyek (kritis) semacam ini, dengan demikian, adalah konsepsi 'masyarakat yang baik' yang sangat kebarat-baratan; menurut kelas-menengah dan me-

nurut gender, yang berkedok sebagai sebuah sudut pandang yang 'universal'.

Kesalahpahaman Umum

Para pemikir kritis disebut demikian —kritis— karena mereka mengkritisi perspektif-perspektif lain seperti liberalisme atau realisme. Tidak. Hal yang jelas benar adalah bahwa kritik dan tinjauan atas pemikiran atau karya tertentu merupakan aspek penting dalam teori kritis. Hanya melalui kritik dan tinjauan karakteristik klaim pengetahuan yang penuh dengan kepentingan, bersifat parsial, dan idelogis bisa dibeberkan. Bagaimanapun, para pemikir kritis juga tertarik untuk melakukan lebih dari sekadar tinjauan dan, dengan demikian, memusatkan perhatian terutama pada penggunaan teori untuk memberikan dasar bagi proyek emansipasi.

Teori kritis sama seperti posmodernisme. Tidak. Seperti yang akan Anda lihat dalam bab berikutnya, posmodernisme dan teori kritis berbeda dalam banyak hal penting. Meski demikian, kebingungan yang muncul karena istilah 'teori kritis' sering kali digunakan dalam pengertian umum untuk menjelaskan sejumlah pendekatan post-positivis, seperti Mazhab *Frankfurt*, posmodernisme, feminisme, dan bahkan *Green Thought*.

Para pemikir kritis percaya bahwa runtuhnya kapitalisme dan meluasnya sosialisme adalah hal yang tak terelakkan. Tidak. Jika pandangan tentang sejarah ini banyak ditemukan dalam pemikiran para pemikir Marxis ortodoks atau ilmiah (lihat bab sebelumnya), para pemikir kritis berpendapat bahwa perubahan ekonomi, sosial, dan politik adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Penekanan yang lebih besar, dengan demikian, diletakkan pada perlunya intervensi manusia

—agensi— dan perjuangan politik dalam melahirkan perubahan.

Para pemikir kritis berpendapat bahwa tidak ada 'dunia sejati'. Tidak. Berbeda dengan orang-orang postmodernis (lihat bab berikutnya), para pemikir kritis menekankan keberadaan struktur-struktur yang secara material nyata dan hubungan-hubungan kekuasaan yang nyata. Namun demikian, para pemikir kritis berpendapat bahwa pemahaman kita mengenai karakteristik realitas ini selalu dimediasikan melalui ide-ide dan konsep-konsep, yang memiliki kaitan yang erat dengan berbagai kepentingan konkret.

Para pemikir kritis menyatakan bahwa kelas sosial adalah satu-satunya penggolongan bernilai yang terdapat di dalam masyarakat manusia. Tidak juga. Jelas, para pemikir kritis tertarik pada pembagian kelas dan kesenjangan sosial yang berakar pada kelas sosial. Sebagian dari mereka bahkan percaya bahwa kedua hal tersebut sangatlah berarti. Bagaimanapun juga, banyak para pemikir kritis saat ini telah menerima bahwa terdapat berbagai bentuk kesenjangan sosial, penindasan, diskriminasi, dan eksklusi sosial. ✦

Bacaan Lebih Lanjut

Brown, C. (1992), *International Relations Theory: New Normative Approaches,* Harlow: Prentice Hall.

Cox, R. (1986), 'States, Social Forces and World Order' in Keohane, R. (ed), *Neo-Realisme and Its Critics,* Princeton: Princeton University Press.

Cox, R. (1987), *Production, Power and World Order: Social and Forces in the Making of History,* New York: Columbia University Press.

Devetak, R. (1996), 'Critical Theory', dalam Burchill, S. and Linklater, A. (ed.), *Theories of International Relations,* Basingstoke: Macmillan.

Gill, S. (ed.). (1993), *Gramsci, Historical Materialism and International Relations,* Cambridge: Cambridge University Press.

Gill, S. and Law, D. (1988), *The Global Political Economy: Perspectives, Problems and Policies,* Harlow: Prentice Hall.

Gramsci, A. (1971), *Selections from Prison Notebooks,* London: Lawrence and Wishart.

Habermas, J. (1972), *Knowledge and Human Interests,* London: Heinenmann.

Held, D. (1990), *Introduction to Critical Theory: Horkheimer to Habermas,* Cambridge: Polity Press.

Hoffman, M. (1987), 'Critical Theory and the Inter-paradigm Debate', *Millennium : Journal of International Studies,* Vol. 17, No. 1.

Horkheimer, M. (1972), *Critical Theory: Selected Essays,* New York: Seabury Press.

Linklater, A. (1988), *The Transformations of Political Community,* Oxford: Polity Press.

Linklater, A. (1990), *Beyond Realism and Marxism: Critical Theory and International Relations,* London: Macmillan.

Linklater, A. (1996), 'The Achievements of Critical Theory', dalam Booth, K. and Zalewsky, M. (ed.), *International Theory: Positivism and Beyond,* Cambridge: Cambridge University Press.

—✦✦—

Bab 5
Posmodernisme

Pendahuluan

Para mahasiswa yang baru pertama kali berhadapan dengan pemikiran posmodern akan menemui sejumlah kesulitan. *Pertama,* istilah 'posmodern' menciptakan beberapa kebingungan. Posmodernitas sering diartikan keliru dengan mengacu pada suatu periode sejarah tertentu yang menggantikan modernitas. Kesalahpahaman ini ditambah lagi oleh fakta bahwa banyak para pemikir posmodern pada umumnya memusatkan perhatian pada karakteristik masyarakat jaman modern akhir atau pos-industri. *Kedua,* posmodernisme sangatlah berbeda dan menentang atau menumbangkan banyak ide besar dalam teori Hubungan Internasional. Sehubungan dengan hal tersebut, kesulitan yang *ketiga* terdapat dalam kompleksitas yang terkandung dalam karya posmodernisme. Para mahasiswa perlu memiliki pemahaman yang cukup mutakhir tentang lembaga-lembaga politik, bentuk-bentuk organisasi sosial, dan praktik-praktik sosial yang identik dengan modernitas serta dasar filosofis pemikiran sosial dan politik modern guna memahami sepenuhnya kritik-kritik posmodern terhadap HI. *Terakhir,*

masalah definisi. Apa itu posmodern? Apakah posmodernisme sama seperti teori kritis? Apakah posmodernisme bersinonim dengan pos-strukturalisme? Apakah para sarjana posmodernisme mempunyai pendekatan tersendiri pada studi mengenai perpolitikan dunia? Masalahnya adalah bahwa definisi yang sederhana tentang posmodernisme amatlah tidak mungkin.

Suatu langkah awal yang baik untuk memahami asal mula posmodernisme adalah gelombang radikalisme politik yang melanda dunia Barat pada akhir 1960-an. Seperti halnya Teori Kritis pos-Marxis (lihat bab 4) yang lahir dari politik Kiri Baru (*New Left*), maka asal mula posmodernisme bisa dilihat dengan mengidentifikasi serangkaian kelompok yang tersingkir, seperti para mahasiswa aktivis, kelompok feminis, environmentalis, dan liberasionalis gay. Meski membela radikalisme politik, beberapa orang di kalangan Kiri tidak puas dengan terus berlanjutnya penekanan terhadap pentingnya kelas sosial dalam pergerakan politik sayap-kiri. Mereka percaya bahwa penekanan ini mengesampingkan isu-isu lain, seperti diskriminasi ras atau gender. Selama periode akhir 1960-an kelompok feminis memusatkan perhatian pada represi hubungan sosial yang sebelumnya dianggap sebagai wilayah 'pribadi'. Periode ini juga merupakan masa perjuangan para nasionalis menentang dominasi penjajahan dan imperialis, bersama dengan masyarakat di beberapa bagian Asia, Amerika Latin, dan Afrika menuntut hak untuk menentukan nasib sendiri atas nama 'rakyat', sementara kelompok-kelompok minoritas di negara-negara Barat melaporkan penderitaan atas berbagai bentuk diskriminasi maupun eksklusi yang mereka alami dari masyarakat mayoritas.

Terlebih lagi, terdapat bahaya-bahaya yang sangat nyata dalam usaha untuk memahami politik feminisme, misalnya, atau gerakan-gerakan sosial baru, seperti pemerhati lingkungan, melalui kacamata kelas atau perjuangan kelas. Politik oposisi atau radikal banyak sekali memasukkan berbagai bentuk perjuangan baru atas praktik-praktik dominasi dan eksklusi. Pengalaman tentang persekusi dan kekerasan politik yang menyebar luas di Uni Soviet telah menghasilkan skeptisisme terhadap janji Marxisme, bahkan pada beberapa di antara pemikiran-pemikiran Marxis yang berpihak pada emansipasi manusia. Dalam usaha untuk memahami kesenjangan sosial, para pemikir Marxis telah menunjukkan perpecahan dan karakteristik kapitalisme eksploitatif serta menawarkan sebuah visi tentang masyarakat sosialis sebagai suatu 'obat' bagi penyakit-penyakit kontemporer. Beberapa orang sayap kiri mulai berpendapat bahwa dalam usaha mereka untuk menghasilkan dorongan bagi tersebarluasnya perubahan sosial, para pemikir Marxis telah 'menguniversalkan' kondisi-kondisi emansipasi manusia, dengan harga memarjinalkan dan membungkam sejumlah besar kelompok dan masyarakat.

Kotak Sejarah

Musuh-musuh Rakyat

Ketika kaum Bolshevik memegang kekuasaan di Rusia tahun 1917, mereka berjanji untuk menciptakan suatu kesetaraan masyarakat di seluruh wilayah yang mereka kuasai, tempat rakyat bebas dari kekurangan. Mereka juga berharap mampu memberikan inspirasi dan kepemimpinan bagi rakyat tertindas di seluruh dunia. Dalam waktu yang singkat, visi itu telah berubah menjadi mimpi buruk. Di bawah kepemimpinan Stalin, Uni

Soviet menjadi negeri tempat industrialisasi dipaksakan dan sistem agrikultur yang terpusat. Proses berikutnya para petani kecil dipindahkan dari lahan pertanian atau dibiarkan kelaparan agar tunduk patuh. Selama periode yang sama, kelompok-kelompok keagamaan ditindas karena kepercayaan mereka dan etnis minoritas sering diperlakukan dengan penuh kecurigaan. Salah satu pilar utama sistem teror dan kontrol yang diciptakan Stalin adalah sebuah sistem kekuatan kamp-kamp buruh (paksa) yang sangat terkenal dalam karya Alexander Solzhenitzyn. Pada puncak pemerintahan teror Stalin, sekitar delapan juta orang menjadi tawanan. Sering kali para tahanan itu adalah para intelektual —penulis, ilmuwan, pekerja seni, dan guru. Mereka di-cap sebagai seorang 'penentang-revolusioner' atau 'musuh rakyat' karena berani berbicara lantang menentang komunisme, atau dalam banyak kasus, lebih kurang demikian (karena menyatakan bahwa terdapat berbagai masalah atau kesalahan dalam manifestasi masyarakat sosialis ini, atau hanya karena seseorang telah mengecam mereka —pemerintahan Stalin). Tentu saja, kita tidak bisa menyalahkan Marx atas semua aksi-aksi kejahatan yang dilakukan atas namanya ini. Demikian pula, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa eksperimen atas 'kepemilikan bersama' (kebijakan-kebijakan Uni Soviet menyangkut komunisme) ini membuktikan bahwa komunisme gagal. Bagaimanapun, kaum posmodernis mengklaim bahwa pengalaman Uni Soviet selama masa pemerintahan teror Stallin memberikan ilustrasi yang sangat jelas mengenai penggunaan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dibenarkan atas nama doktrin-doktrin besar yang berpengaruh, seperti Marxisme. Kaum Posmodernis tidak hanya curiga pada Marxisme, tetapi waspada terhadap semua pandangan atau pemikiran yang universalis yang mengaku telah menemukan sebab, konsekuensi, dan solusi atas kesengsaraan manusia serta menawarkan sebuah desain besar (*blueprint*) bagi dunia yang lebih baik. Dengan menyederhanakan sumber dari semua permasalahan menjadi satu sebab, maka tersamarkannya berbagai cara penerapan kekuasaan yang kompleks dan beragam di berbagai masyarakat dan berbagai bentuk kesenjangan dan diskriminasi yang terjadi adalah sebuah hal yang tidak terhindarkan. Terlebih lagi, doktrin-doktrin

seperti itu memberikan pembenaran dan legitimasi yang kuat bagi suatu sistem aturan yang merepresi segala bentuk oposisi atas nama 'kemajuan' atau 'emansipasi' serta yang sering kali disebarluaskan untuk melanggengkan posisi para elit yang mementingkan kepentingan pribadinya.

Setelah secara luas membahas posmodernisme di spektrum politik sisi 'kiri', Anda harus menyadari bahwa posmodernisme telah dijelaskan sebagai pemikiran yang sangat konservatif. Hal ini secara tidak langsung menyatakan bahwa kritik terhadap posmodernisme sering kali tidak beralasan. Bagaimanapun, bukanlah hal yang mudah untuk memahami posmodernisme dalam kerangka dikotomi yang sederhana, seperti kiri/kanan atau radikal/konservatif. Inilah kesulitan lain yang layak dirundingkan oleh para mahasiswa.

Akhirnya, setelah memahami bahwa kaum posmodernis mengungkapkan semacam keraguan terhadap 'metanaratif', seperti Marxism —dengan kata lain, bahwa para pemikir posmodern punya kesulitan untuk memercayai semua teori atau penjelasan yang mencakup semua (*all-encompassing*), maka hal yang akan mengejutkan adalah jika kita menemukan kaum posmodernis yang mendukung sebuah perspektif mengenai dunia yang terkesan komprehensif dan koheren atau visi besar (*grand vision*) mengenai hubungan internasional. Kaum posmodernis justru lebih cenderung terlibat dalam sebuah kritik terhadap proyek-proyek penyusunan perspektif atas hubungan internasional dan lebih berkonsentrasi pada sesuatu yang terkesan lain, unik, dan tampaknya menantang bentuk-bentuk penteorian yang tampak terlalu sempurna. Di sisi lain, kaum posmodernis menyambut baik banyak munculnya berbagai perspektif dan pendekatan dalam HI selama dua dekade ter-

akhir. Jauh dari memandang hal ini sebagai sebuah perkembangan yang melemahkan HI sebagai suatu 'disiplin' yang terpisah, para kaum posmodernis berpendapat bahwa skeptisisme dan ketidakpastian ditambah dengan pluralitas pandangan, visi-visi, dan pendapat mengenai dunia merupakan suatu tanggapan yang memang sepantasnya bagi dunia yang sangat kompleks.

Kotak Konsep

Tujuan Kritik

Melalui analisis kritis atau penyelidikan atas sebuah teks atau tulisan, maka usaha untuk memancing berbagai asumsi tersembunyi yang mendasari berbagai usaha untuk memahami atau menjelaskan peristiwa-peristiwa tertentu menjadi sangatlah mungkin. Fungsi kritik adalah untuk menunjukkan bahwa proses berbagai teori yang mengklaim berbasis pada kategori-kategori universal atau 'kebenaran-kebenaran' mendasar tentang kondisi manusia, mau tidak mau hanya menghasilkan pandangan yang parsial atau bias.

Ambil contoh realisme. Kaum realis mengklaim bahwa negara-negara —seperti halnya 'manusia' (*man*) — merupakan aktor yang mengutamakan kepentingan sendiri. Lebih lanjut, wilayah internasional dikatakan mirip dengan *'state of nature'* (kondisi kemanusiaan tanpa atau sebelum pemerintahan — Peny.). Oleh karenanya, negara-negara harus selalu menjaga keamanan mereka sendiri dan bertindak hati-hati, yang berarti menjamin keamanan 'kepentingan nasional'-nya. Dengan cara ini, realisme membuat klaim-klaim tertentu tentang hal yang bisa mengenai —yang 'nyata' atau aktual— sebuah sistem atas negara-negara, 'perimbangan kekuatan' (*balance of power*) yang berbahaya atau stabil, ancaman-ancaman yang sebenarnya terhadap keamanan, kepentingan-kepentingan nasional yang konkret, dan sebagainya. Kaum realis juga mengaku 'tahu' sesuatu tentang dunia ini. Pengetahuan ini didasarkan pada sebuah

kombinasi dari 'kebenaran' masa lalu tentang kondisi manusia yang telah direkam oleh para filsuf, analisis sejarah (banyaknya peperangan, mungkin, atau perubahan-perubahan dalam perimbangan kekuatan), dan pengamatan empiris (kita bisa melihat banyak orang dan negara berlaku seperti ini dalam kehidupan sehari-hari).

Namun, jika kita uraikan atau dekonstruksi setiap asumsi-asumsi ini, maka akan kita temukan bahwa semua hal tersebut penuh problematika. Contohnya, negara-negara merupakan hal 'nyata' dalam artian bahwa mereka tersusun dari wilayah, pemerintahan, rakyat, dan yurisdiksi kedaulatan yang diakui oleh hukum internasional. Meski demikian, negara tidak benar-benar 'nyata' dalam pengertian sebagai satu kesatuan aktor dengan identitas yang konkret atau satu tujuan. Negara tersusun atas seperangkat lembaga-lembaga dan badan-badan serta di dalam lembaga-lembaga tersebut terdapat banyak sekali pembuat keputusan. Terlebih lagi, dalam wilayah tertentu tersebut mungkin juga terdapat berbagai kelompok ataupun individu yang punya akses terhadap kekuasaan, atau sebaliknya, tidak punya pengaruh. Guna membuat ide tentang negara sebagai satu kesatuan aktor yang nyata, kaum realis harus berpaling pada karakteristik 'manusia' yang mementingkan diri, meski pandangan ini jelas dipengaruhi oleh pemahaman 'karakteristik manusia' di berbagai budaya tertentu dan mungkin dalam periode waktu yang berbeda-beda. Contohnya, para feminis berpendapat bahwa perilaku yang oleh kaum realis diatributkan kepada negara sebagai 'serupa, namun lebih besar dari manusia' —agresif dan mendominasi, umumnya dihubungkan dengan 'karakteristik' laki-laki, bukannya perempuan.

Pengertian tentang karakteristik ancaman, bahaya, dan '*state of nature*' internasional dibangun dengan menggunakan gambaran-gambaran tentang anarki dan metafora-metafora yang menghadirkan dunia yang alami sebagai sesuatu yang penuh permusuhan dan ketidakteraturan. Ketidakamanan muncul dari perasaan takut akan keadaan tanpa aturan atau ketidakmampuan untuk mengontrol lingkungan kita dan, dalam keadaan ini, politik selalu terancam akan adanya penaklukan

atau pendudukan atau setidaknya gangguan-gangguan keamanan. Analogi hubungan internasional sebagai sebuah '*state of nature*' didasarkan pada pandangan gambaran yang khas modernisme tentang hubungan kita dengan alam. (lihat bab 7 untuk bahasan yang lebih dalam tentang hal ini). Di lain pihak, beberapa ahli mungkin berpendapat bahwa individualisme yang terkandung dalam realisme —negara-negara yang otonom, terikat, terisolasi— merupakan sebuah pemahaman yang aneh mengenai cara seseorang (atau negara-negara) berhubungan dengan yang lainnya dan cara mereka bertingkah laku terhadap yang lainnya. Lebih lanjut, kita hanya perlu mengingat kembali diskusi kita sebelumnya tentang pluralisme liberal atau strukturalisme atau teori kritis untuk menyadari bahwa karakteristik tatanan dunia masih terus diperdebatkan —ada berbagai pandangan tentang hal yang bisa dikatakan sebagai sesuatu yang 'benar-benar' ada. Sama halnya, konsep tentang 'kepentingan nasional' masih sulit untuk ditetapkan. Kaum pluralis liberal, contohnya, mengaku bahwa selalu ada persaingan visi-visi tentang penentuan hal-hal yang menjadi 'kepentingan' seseorang atau bangsa, sementara kaum strukturalis berpendapat bahwa negara mencerminkan kepentingan-kepentingan dari kelas-kelas elit.

Pada tahap ini, cukuplah dikatakan bahwa kritik posmodern bertujuan menunjukkan, dalam hal ini realisme, setidaknya sudah menawarkan suatu pandangan yang parsial tentang hubungan internasional. Seburuk-buruknya, bisa kita katakan bahwa klaim mereka mengenai dunia didasarkan pandangan dunia para laki-laki berpengaruh di Barat pada suatu periode sejarah tertentu dan tentu hal itu penuh distorsi dan eksklusi.

Hal ini tidaklah berarti bahwa para sarjana posmodern dengan mudah menolak segala sesuatu sebagai bias, aneh, atau sebuah cerminan dari perspektif orang-orang berpengaruh. Kaum posmodernis juga bukan merupakan orang-orang yang sinis atau nilhilis. Mereka tidak beda dari dengan orang pada umumnya, dalam arti bahwa mereka mempunyai nilai-nilai tertentu dan mungkin saja mendukung kode etika

atau moral tertentu. Meski demikian, kaum posmodernis berbeda, katakanlah, dari kaum liberal atau para pemikir kritis, karena kaum posmodern lebih cenderung mengakui bahwa pada dasarnya tidak mungkin ada landasan yang kukuh atau sumber argumen yang paling mutakhir apa pun, yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan 'kebenaran' (*rightness*) atau 'kesalahan' (*wrongness*) sistem-sistem nilai, kepercayaan-kepercayaan atau pandangan-pandangan dunia tertentu. Mereka tidak pernah mengaku mempunyai suatu pemahaman untuk ditawarkan mengenai 'kebenaran' akan kondisi manusia atau nilai kebajikan dan keburukan yang terkandung dalam tindakan atau kejadian tertentu.

Bagaimanapun, rasanya kita terlalu cepat sampai di sini. Kita akan kembali pada kritik kaum posmodernis tentang perspektif-perspektif yang telah mapan atau cerita tentang HI, dan pernyataan mereka atas nilai pluralisme dan keberagaman ini nanti. Jika nanti dalam pembahasan ini bahasa terasa sulit, Anda dapat menemukan suatu bahasan yang lebih lengkap tentang beberapa istilah kunci dalam 'Daftar Istilah' di bagian akhir buku ini. Sebelumnya, kami mengakui bahwa bagaimanapun, meski sangatlah sulit untuk menghadirkan kumpulan pendekatan-pendekatan, para penulis dan topik-topik ini dalam sebuah kesatuan perspektif teoretis, kami akan berupaya menunaikan janji kami untuk membuat kekompleksan kajian ini tetap dapat diakses atau, dengan kata lain, dipahami. Bukanlah tugas yang mudah untuk merangkum inti posmodernisme. Di pihak lain, para sarjana enggan untuk menerima pengkategorian yang terlalu luas dan pelabelan. Lebih lanjut, terdapat banyak keberagaman dalam karya para sarjana itu yang sering kali dihubungkan dengan pendekatan posmodern.

Meski demikian, kami akan berusaha untuk menjelaskan beberapa tema inti yang sering kali muncul dalam literatur HI posmodern.

Dari perspektif posmodern, studi tentang perpolitikan dunia merupakan sebuah istilah yang lebih sering dipakai daripada Hubungan Internasional karena beberapa alasan yang dijelaskan pada beberapa poin di bawah ini. (1) Studi ini menggabungkan studi tentang serangkaian besar proses-proses, isu-isu, dan kelompok-kelompok; (2) menyelidiki cara-cara penerapan kekuasaan dalam wacana-wacana dan praktik-praktik perpolitikan dunia; (3) memetakan berbagai ragam cara pengonstruksian dan penggunaan ruang politik oleh individu-individu dan kelompok-kelompok; (4) menguraikan proses-proses yang kompleks dalam pengonstruksian identitas-identitas politik; (5) mengakui perbedaan-perbedaan dan keberagaman di antara beragam orang dan lintas budaya; (6) mendorong penyebarluasan berbagai pendekatan dan pandangan dunia karena hal ini akan berakibat penggantian atau pelemahan bentuk-bentuk pengetahuan yang 'ortodoks' dan kekuasaan yang hegemonik; (7) menyoroti isu-isu atau masalah-masalah yang sering kali dianggap remeh atau tidak penting guna mengekspresikan atau mengembalikan kepercayaan diri orang atau kelompok-kelompok yang telah dimarjinalkan dalam studi HI.

Asal Usul

Kajian yang bernama 'posmodern' ini telah memberi sumbangan penting pada studi Hubungan Internasional sejak awal 1980-an. Meski demikian, asal usul intelektual posmodernisme diperkirakan telah ada jauh sebelum periode tersebut. Serangkaian pemikir telah memberikan pe-

ngaruh dan inspirasi bagi para sarjana posmodern kontemporer. Pada bagian ini kita hanya akan berfokus pada ide-ide empat orang tokoh —Nietzsche, Heidegger, Foucault, dan Derrida; kami akan menarik sejumlah tema-tema sentral ini dari karya mereka dan, pada beberapa bagian, membuat beberapa referensi spesifik.

Studi mengenai posmodernisme akan menjadi lebih mudah jika dilakukan dalam pengertian kritik terhadap modernitas dan proyek *Enlightenment*. Filsuf Jerman, Martin Heidegger, mengembangkan sebuah kritik tentang *Enlightenment* yang cukup memengaruhi pemikiran posmodern kontemporer. Kami tidak akan mengupas ide-ide Heidegger secara rinci di sini, tetapi menjabarkan secara umum kritik posmodern yang dikembangkannya.

Tentunya, seseorang mungkin berpikir bahwa jika modernitas dan *Enlightenment* dibangun pada sebuah visi tentang harapan untuk masa depan umat manusia, jadi mengapa kaum posmodernis menjadikan ide-ide ini sebagai sasaran kritik? Kritik terhadap proyek *Enlightenment* ini sebagian merupakan konsekuensi dari kebangkitan fasisme pada 1930-an yang menjatuhkan Eropa ke dalam 'jaman kegelapan' baru yang ditandai oleh perang, kehancuran, dan berbagai tindakan mengerikan lainnya seperti kekejaman dan barbarisme.

Kotak Konsep

Modernitas dan Proyek *Enlightenment*

Istilah modernitas digunakan untuk menunjukkan dua proses yang saling berkaitan. *Pertama*, pada transformasi-transformasi institusional yang berasal dari Barat. *Kedua*, pada suatu trans-

formasi mendasar dalam pemikiran politik dan sosial yang terjadi seiring dengan kemunculan ilmu pengetahuan modern. *Enlightenment* mengacu pada satu periode sejarah Eropa, dari abad XVII hingga XIX, ketika doktrin tradisi dan agama ditantang oleh bangkitnya ilmu pengetahuan modern dan pandangan-pandangan progresif dan 'tercerahkan' tentang kapasitas umat manusia atas pemikiran yang rasional dan perkembangan moral. Para pemikir *Enlightenment* melibatkan diri pada bentuk-bentuk pengetahuan yang ilmiah, logis, dan rasional. Hal ini termanifestasikan pada skeptisisme atas bentuk-bentuk otoritas tradisional.

Secara bersamaan semua perkembangan ini membangkitkan 'Proyek *Enlightenment*' bagi kemajuan dan emansipasi manusia. Perkembangan kapitalisme industri modern diikuti oleh pengorganisasian masyarakat yang lebih rasional, sementara ilmu pengetahuan modern menjanjikan suatu 'pengetahuan mengenai masyarakat', yang akan menghasilkan penemuan 'sistem hukum' yang mengatur dunia sosial. Jenis pemikiran seperti ini secara tidak langsung menentang ide yang menyatakan bahwa keberadaan dunia sosial dan politik mencerminkan suatu kesatuan tatanan moral yang diatur oleh Tuhan. Bagaimanapun, para pemikir *Enlightenment* yakin bahwa perkembangan akal manusia yang terus-menerus dan penghapusan kecurigaan dan kebodohan yang dilakukan secara bertahap akan berpuncak pada penyatuan moral dan politis umat manusia. Proyek *Enlightenment* ini bersandar pada kepercayaan atas kemungkinan penemuan 'kebenaran' universal.

Untuk itu, doktrin-doktrin yang universalis, seperti liberalisme atau Marxisme, bersikukuh menyatakan bahwa membuat batasan-batasan mengenai hak asasi manusia, atau martabat dan kehormatan manusia yang tidak mencakup seluruh ras manusia adalah tindakan yang sama sekali tak mendasar. Singkatnya, mereka menentang penderitaan manusia yang seharusnya tak perlu terjadi di mana pun dan kapan pun itu terjadi. Dengan demikian, para pemikir *Enlightenment* menentang praktik-praktik penindasan kepada masyarakat yang mengatasnamakan tatanan-tatanan yang lebih besar atau demi 'kebaikan bersama' —baik dengan nama kehormatan keluarga,

kebesaran Tuhan, bangsa, atau pemimpin. Hal ini seluruhnya konsisten dengan penolakan doktrin-doktrin seperti 'hak ketuhanan para raja' atau sebuah pandangan heroik terhadap para pejuang besar, yang jelas menempatkan nilai atau keberhargaan yang lebih pada orang yang memiliki kualitas spesial yang menempatkannya jauh dari kita. Padahal sejarah (perubahan sosial) digerakkan oleh trajektori masyarakat tempat kita tinggal dan oleh berbagai kemungkinan yang memberikan kesempatan bagi terjadinya perubahan sosial dan kemajuan manusia.

Salah satu ide yang paling berpengaruh dalam pemikiran *Enlightenment* adalah bahwa kehidupan sehari-hari mempunyai nilai intrinsik. Karena itulah kemudian pemikiran *Enlightenment* sering kali diasosiasikan dengan 'humanisme'. Tanpa ragu Anda akan mengakui ide-ide tersebut sebagai pokok liberalisme. Seseorang atau subjek yang modern pantas dihargai. Hal ini membangkitkan gagasan liberal tentang otonomi moral yang dimiliki setiap individu dan ide bahwa seseorang memiliki hak-hak tertentu yang tak dapat diasingkan. Hal ini disebabkan karena seseorang memahami prinsip-prinsip rasional yang menyatakan bahwa pengaturan masyarakat dalam suatu dasar rasional dan menurut aturan hukum bukanlah suatu hal yang tidak mungkin. Namun, strukturalisme dan teori kritis juga menekankan martabat dan keberhargaan moral dari kehidupan manusia biasa. Dalam Marxisme ortodoks, pandangan *Enlightenment* modern tentang manusia sebagai ukuran dari semua hal ditunjukkan melalui keyakinan akan martabat dari karya. Tentu saja, pekerja biasa bukanlah orang yang tidak penting yang ditakdirkan menjadi kaki tangan untuk bekerja keras, tetapi merupakan aktor utama dalam sebuah drama besar —perjalanan sejarah dan takdir manusia. Seperti yang akan kita lihat pada bab-bab berikutnya, beberapa paham feminisme dan '*Greens Thought*' menganut pandangan *Enlightenment* tentang kemajuan dan emansipasi.

Pengalaman tentang sebuah bangsa modern yang sepertinya rela tunduk pada 'kehendak kuat' sang Führer demi kejayaan ras Arya —pembantaian-pembantaian semasa perang semacam itu berlangsung juga di daerah Kerch di

Crimea (sebuah republik otonom di bawah otoritas Ukraina —Peny.) dan kamp-kamp kematian Nazi di Auschwitz dan Belzec— terlihat seolah-olah bertolak belakang dengan ide tentang sejarah sebagai kemajuan dan menghasilkan keraguan tentang klaim-klaim Barat yang atas kemajuan dan peradaban. Pada masa kini, bayangan perang nuklir, degradasi lingkungan hidup, serta tersebarluasnya perasaan teralienasi dan keputusasaan, yang seolah-olah terlihat mewabah dalam masyarakat-masyarakat kapitalis yang maju, telah menambah kritik-kritik lebih lanjut terhadap Barat yang dianggap sebagai pusat kemajuan.

Kotak Sejarah

Solusi Akhir

Perwujudan yang paling nyata dari kebencian fanatik Hitler terhadap orang-orang Yahudi adalah kebijakannya untuk mengusir mereka dari setiap jengkal wilayah masyarakat Jerman dan setiap aspek kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, kebijakan ini berbentuk emigrasi 'sukarela' atau pengusiran paksa. Namun, ketika kekuatan Nazi makin bertambah besar menduduki tanah-tanah Eropa, orang-orang Yahudi semakin sedikit mempunyai sarana untuk melarikan diri dari ancaman persekusi dan semakin sedikit tempat untuk bersembunyi. Beberapa minggu setelah penguasaan Jerman atas Polandia pada 1939, Reinhard Heydrich, Kepala Pasukan Keamanan Pusat Reich Ketiga, memberikan sebuah instruksi bahwa orang-orang Yahudi dikelompokkan secara bersama-sama sebagai 'sebuah alat bagi tujuan akhir'. 'Tujuan Akhir' atau 'Solusi Akhir' (*Final Solution* —istilah bagi rencana yang konon telah disusun oleh Nazi untuk membantai seluruh kaum Yahudi di Eropa —Peny.) merupakan pembunuhan besar-besaran atas orang-orang Yahudi. Awalnya dikumpulkan dan ditawan di kampung-kampung Yahudi (*ghetto*) di seluruh Eropa, kemudian orang-orang Yahudi dipindahkan ke kamp-kamp jauh di dalam wilayah-wilayah pendudukan. Di

sini jutaan orang mati akibat penyiksaan, kerja paksa, atau kelaparan, atau mati lemas kekurangan oksigen karena diperangkap dalam ruang gas.

Anda mungkin keberatan bahwa, betapapun mengerikannya, pengalaman atas fanatisme Nazi dan momok kamp-kamp pemusatan, merupakan suatu cacat dalam sejarah Eropa dan juga tidak bisa dijadikan sebagai bukti dari tumbangnya proyek *Enlightenment*. Lebih-lebih, bukankah fasisme adalah penolakan dari segala sesuatu yang diperjuangkan *Enlightenment* —nilai intrinsik seorang manusia dan martabat moral? Hal ini tentunya adalah salah satu penafsiran dari berbagai peristiwa. Namun, kaum posmodernis menyatakan bahwa jauh dari suatu penyimpangan, 'Solusi Akhir' merupakan konsekuensi logis dari tren-tren yang dimulai oleh modernitas —pengorganisasian masyarakat yang rasional, populernya instrumentalisme 'alat-tujuan', keberadaan hierarki sosial dan rantai komando, sarana untuk memindahkan orang melintasi wilayah yang luas, dan 'pabrik-pabrik' kematian tempat orang-orang dibunuh secara sistematis dan disingkirkan. Dari perspektif ini, orang-orang Nazi melihat 'Solusi Akhir' hanya sebagai sebuah masalah teknis dan industri dan pengorganisasian masyarakat secara rasional memberikan sebuah solusi teknis.

Anda pasti ingat bahwa realisasi yang sangat kejam dari 'sisi gelap modernitas' ini juga merupakan tema sentral pada 'perubahan penting' dalam Marxisme yang berlangsung pada 1930-an, yang melahirkan kemudian mazhab Frankfurt. Para sarjana mazhab Frankfurt memahami betul bahaya yang ditimbulkan oleh menggejalanya rasionalitas 'sarana-tujuan' —sarana-sarana yang dapat mengakhiri rasionalitas. Oleh karena itu, sangatlah perlu untuk kembali pada visi inti *Enlightenment* —yakni emansipasi manusia— dan merefleksikan secara kritis tentang proses kondisi-kondisi saat ini memfasilitasi atau mengancam realisasi visi ini. Para pemikir kritis percaya bahwa usaha-usaha yang

dilakukan untuk menyelamatkan proyek emansipatoris melalui reformulasi Marxisme masihlah sangat mungkin untuk dilakukan. Kaum *Greens* juga telah banyak berkata tentang keyakinan manusia terhadap kemungkinan atas solusi-solusi teknis (lihat bab 7).

Jadi, apa yang berbeda dari posmodernisme? Para pemikir posmodern sangatlah skeptis terhadap ide-ide seperti itu. Lebih lanjut, para pemikir posmodern telah berpendapat bahwa semua usaha untuk menetapkan kondisi-kondisi yang berlaku universal bagi kebebasan dan emansipasi semua manusia mau tidak mau akan digunakan dalam praktiknya untuk merendahkan dan memarjinalisasi mereka-mereka yang dianggap 'berbeda'. Hal ini karena, seperti yang Foucault nyatakan, hubungan antara kekuasaan dengan pengetahuan —yang akan kita bahas secara lebih mendalam nanti, selalu berlangsung dalam hubungan sosial. Untuk menggambarkan hal ini, kaum posmodernis menunjukkan cara-cara yang di dalamnya ide-ide liberal tentang rasionalitas, peradaban, dan kemajuan berdasarkan pengalaman sejarah telah sering kali digunakan untuk membagi dan menggolongkan masyarakat dunia dalam kategori 'maju' atau 'terbelakang', 'beradab' atau 'barbar' menurut dasar yang sebenarnya merupakan nilai-nilai sosial, politik, dan budaya Eropa (atau Barat). Mereka menunjukkan bahwa periode *Enlightenment* diiringi oleh meluasnya penindasan terhadap jutaan orang dengan alasan demi tersebarluasnya berbagai keuntungan dari berhasilnya usaha-usaha memperadabkan bangsa atau masyarakat lain.

Kotak Sejarah

Beban Orang Kulit Putih

Sebuah perwujudan nyata perasaan superioritas bangsa Eropa yang mengiringi ekspansionisme kolonial pada abad XIX adalah gambaran yang sangat kuat tentang 'gelapnya' benua Afrika dan perlunya menyingkirkan berbagai halangan dalam memimpin orang-orang eksotis dan aneh ini keluar dari barbarisme untuk memasuki masa depan yang berperadaban. Perjuangan untuk Afrika dan subordinasi banyak orang di bawah kekuasaan kolonial dimungkinkan dengan kemajuan yang signifikan, yang memberikan kesempatan aksi-aksi politik yang terorganisasi, pembuatan senjata, teknologi untuk memindahkan barang-barang dan orang-orang ke seluruh dunia, dan juga merupakan sebuah wacana kuat yang membenarkan tindakan-tindakan seperti itu atas nama kemajuan manusia. Pada masa kini, wacana modernitas telah digunakan oleh para elit Barat sebagai pembenaran proyek modernisasi yang berusaha untuk membangun kembali 'dunia ketiga' yang sesuai dengan gambaran Barat. Dalam bahasa kontemporer, istilah 'modernisasi' dipahami secara luas sebagai transisi dari masyarakat sederhana dan homogen menuju bentuk masyarakat yang maju, kompleks, dan sangat mengedepan. Pada kenyataannya, 'negara-negara berkembang' di dunia ketiga telah menjadi sasaran bentuk-bentuk dominasi penjajahan Barat dan neo-kolonial dan beberapa tahun kemudian takkan sanggup lagi mengejar Barat.

Pengaruh dari kritik terhadap *Enlighntenment* yang dikembangkan oleh Heidegger dan yang lainnya adalah bahwa sementara *Enlightenment* telah dihadirkan sebagai suatu periode ketika umat manusia telah terbebas dari kebodohan, wacana tentang rasionalisme yang menandai jaman 'modern' telah menjadi bias. Para pemikir posmodern berpendapat bahwa terdapat beragam bentuk organisasi sosial dan berbagai jenis praktik budaya yang berbeda-beda. Hal-

hal tersebut tidak dapat dikatakan 'baik' atau 'buruk', 'maju' atau 'terbelakang', meski mereka sering dianggap seperti itu berdasar pada model yang dianggap superior —dunia Barat. Sama halnya, model tentang subjek rasional, yang dipercaya sebagai sebuah ciri universal 'manusia', sebenarnya menjelaskan suatu jenis pandangan tertentu tentang 'karakteristik' manusia, atau subjektivitas, yang merujuk pada orang Eropa, borjuis, dan maskulin —kelas elit baru yang muncul setelah runtuhnya masyarakat feodal. Perwujudan apa pun dari manusia dan kehidupannya yang bertentangan dengan pandangan ini, dengan serta-merta telah dicap sebagai aneh, bodoh, dan lebih penting lagi, mengancam.

Para pemikir posmodern banyak merujuk pada karya filsuf Prancis Michael Foucault. Oleh karena karya Foucault cukup luas, di sini kita akan berfokus hanya pada beberapa ide pokok —pandangan Foucault tentang relasi kekuasaan/pengetahuan, ide-idenya tentang wacana dan konsepsinya tentang manusia, atau subjek. Mengikuti Nietzsche, Foucault mengembangkan ide bahwa kekuasaan menghasilkan pengetahuan. Apa yang dimaksud dengan ini adalah bahwa tidak ada 'kebenaran' yang tak diperdebatkan mengenai 'karakteristik' manusia atau kehidupan manusia. Setiap hal yang kita pikir kita 'tahu' dengan pasti hanyalah merupakan sebuah ekspresi dari model-model pemikiran atau penjelasan dominan. Kita 'tahu' karena kita percaya bahwa hal itu benar. Kita percaya hal itu benar karena kita belajar di sekolah, atau diceritakan oleh para ilmuwan, para pakar teknis, birokrat, dan elit pembuat kebijakan. Oleh karena masyarakat selalu diorganisasi dalam kerangka hierarki dan kesenjangan, kita tidak bisa begitu saja menerima bahwa sesuatu yang dianggap sebagai 'pengetahuan' bersifat bebas

dari kepentingan dan netral. Orang yang paling berkuasa dalam masyarakat berada pada posisi sangat lebih baik, sehingga pandangan-pandangan mereka diterima sebagai 'kebenaran', dan mampu untuk mengenyahkan atau mengecilkan pandangan-pandangan alternatif. Tentu saja, fakta bahwa kita sering kali membuat suatu pemisahan antara kanon-kanon 'pengetahuan' yang diajarkan kepada kita di sekolah-sekolah dan universitas-universitas dan mitos-mitos, cerita-cèrita, narasi-narasi, serta 'pemahaman umum' yang diturunkan dalam keluarga dan komunitas-komunitas lokal, merupakan sebuah konsekuensi dari modernitas dan *Enlightenment*. Penolakan dari tradisi, mitos, dan takhayul, sejalan dengan penguatan sebuah kelas penguasa baru dari para laki-laki borjuis yang menggunakan 'pengetahuan' untuk melanggengkan posisi istimewa mereka.

Foucault berpendapat bahwa tidak ada bentuk pengetahuan yang benar-benar murni. Semua pengetahuan tentang dunia dibangun dari sudut pandang tertentu. Berkaitan dengan hal ini, para pemikir posmodern berbagi beberapa persamaan mendasar dengan para pemikir kritis dari tradisi Marxisme. Meski demikian, para pemikir kritis menyatakan bahwa melalui dialog yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan, kita mungkin sedikitnya sampai pada suatu jenis 'kebenaran', meskipun selalu terbuka terhadap munculnya bentuk-bentuk penolakan. Para pemikir posmodernis, di sisi lain, berpendapat bahwa proyek semacam itu hanya akan menggantikan hegemoni dari salah satu 'ke-ortodoks-an' dengan yang lainnya. Kita tidak pernah bisa bebas dari relasi penting (*nexus*) antara kekuasaan/pengetahuan —hubungan tersebut memenuhi semua aspek kehidupan kita sehari-hari. Pengetahuan, dengan demikian, mensyaratkan relasi kuasa,

sehingga kita harus terus menerapkan sikap skeptisisme dan kritik. Dari sudut pandang posmodern, kapan pun kita dihadapkan dengan suatu 'cerita' tentang dunia, maka kita harus bertanya: siapa yang berkuasa? Bagaimana kekuasaan dijalankan? Untuk tujuan apa? Bagaimana susunan-susunan tertentu hubungan kekuasaan bisa memengaruhi pandangan ini?

Menurut Foucault, ide tentang subjek manusia yang otonom dan rasional juga merupakan sebuah fiksi. Dalam karya sebelumnya, Foucault memberikan pandangannya mengenai subjek manusia dalam analogi sebuah badan, suatu bejana kosong, sebuah produk dari relasi kekuasaan yang di dalamnya kita semua dijadikan sasaran sepanjang hidup kita —dalam hubungan seksual, dalam keluarga, di sekolah, melalui pengaruh media dan komunikasi, melalui wajib militer, melalui peraturan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh polisi dan pengadilan, melalui disiplin yang diterapkan di tempat kerja, dan sebagainya. Tak heran, pandangan tentang subjek manusia ini telah dikritik sebagai anti-kemanusiaan dan sangat pesimistik. Jika kita hanya menjadi produk dari disiplin dan hukuman, maka bagaimana pernah kita bisa bebas? Pada akhir hidupnya, Foucault sedikit mengubah pandangan-pandangannya. Tentunya kebanyakan kaum posmodernis kontemporer mengakui kapasitas untuk melakukan perlawanan dan pemberdayaan. Jika ini bukan seperti itu keadaannya, kita tidak akan menemukan contoh-contoh yang bertentangan atau perspektif-perspektif dan 'cerita-cerita' yang berbeda-beda tentang dunia. Tentu saja, kaum posmodernis melihat sesuatu yang bernilai dalam keberagaman pendekatan-pendekatan dan perspektif-perspektif dalam politik dunia bukan karena secara

bersamaan mereka akan menambah simpanan pengetahuan kita dan membawa kita lebih dekat pada kebenaran, tetapi karena mereka membuat kita bisa melihat dunia melalui kacamata yang berbeda-beda, yang memungkinkan kita untuk mendengar beragam pendapat yang mengungkapkan berbagai isu dan masalah, sehingga melemahkan klaim-klaim kebenaran dari berbagai pandangan dunia yang ortodoks atau hegemonik.

Kotak Konsep

Penceritaan Cerita...

Para pemikir Posmodern yang dipengaruhi oleh Jack Derrida mengklaim bahwa dalam satu pengertian kita bisa membayangkan dunia sosial seperti sebuah buku. Kita menggunakan kemampuan kritis kita untuk 'membaca' dan menafsirkan dunia, sama seperti kita membaca sebuah buku. Dunia itu seperti sebuah teks karena ia tidak mempunyai arti yang terbebas dari penafsiran ini. Anda dapat berkeberatan dan mengatakan sebuah buku mempunyai arti. Arti dari sebuah cerita atau sebuah laporan disimpan dalam karya tersebut oleh penulisnya. Contohnya, kami adalah penulis buku ini. Kami sedang berusaha menyampaikan sesuatu mengenai dunia hubungan internasional. Sebagai pembaca, Anda sedang berusaha untuk menemukan sesuatu tentang hubungan internasional dengan menafsirkan arti dari kata-kata, analogi-analogi, dan contoh-contoh yang kami gunakan. Akan tetapi, apakah Anda sedang mempelajari tentang dunia hubungan internasional secara langsung? Tidakkah Anda sedang mempelajari perspektif-perspektif? Penafsiran-penafsiran? Bahkan, mempelajari penafsiran-penafsiran kami terhadap berbagai karya dan perspektif-perspektif? Bukankah penafsiran-penafsiran ini berdasarkan pada sumber-sumber lain —karya-karya para filsuf, pernyataan-pernyataan ilmu pengetahuan, dan sebagainya? Hal ini tidak perlu dipermasalahkan, jika Anda percaya bahwa proses penafsiran 'teks'

ini akan berpuncak pada kebijaksanaan atau pemahaman bersama, sehingga membawa kita lebih dekat pada kebenaran atas dunia. Namun, sekali kita memperkenalkan masalah kekuasaan/pengetahuan dalam persamaan, hal ini menjadi sangat bermasalah.

Para pemikir posmodern menolak teori-teori atau narasi-narasi besar (*grand theory* dan *metanarrative*), termasuk ide tentang Tuhan atau Rasionalitas atau berbagai konsep otoritatif lainnya. Dunia tidak punya 'Pencipta'. Tuhan tidak menciptakan dunia dalam enam hari; ini hanya sebuah cerita tentang dunia yang dikumpulkan dari Injil. Sejarah bukanlah sejarah dari perjuangan kelas; ini adalah suatu penafsiran dari sejarah yang datang kepada kita melalui halaman-halaman *The Communist Manifesto*. Tidak ada arti tersembunyi dari kehidupan yang kita berharap untuk temukan suatu hari nanti. Kaum posmodernis sering membicarakan "matinya sang penulis (*death of the author*)" untuk menyampaikan karakteristik pengetahuan, arti, dan penafsiran yang dapat diperdebatkan. Kita hanya bisa 'membaca' dan menafsirkan dunia atau membaca dan menafsirkan penafsiran-penafsiran orang lain tentang dunia.

Di sini ada beberapa persamaan dengan tradisi pemikiran interpretatif dan hermeneutik. Namun demikian, kaum posmodernis tidak menerima pernyataan bahwa ada satu dunia yang kita semua sedang menafsirnya. Sejauh kita berbagi persamaan pengertian, hal ini harus dipahami sebagai inter-tekstualitas, daripada 'kebenaran' yang dicapai oleh suatu pemahaman bersama atas berbagai peristiwa, proses, dan praktik 'di luar sana' dalam dunia nyata. Ada banyak sekali cerita atau teks yang berbeda, dan ada banyak juga penafsiran yang berbeda-beda atas teks-teks dominan. Tentu saja, makna atau arti berasal dari interaksi antara pembaca dengan 'teks'. Oleh karena dunia sosial dibangun dari penafsiran atau wacana seperti itu, kita bisa katakan bahwa penafsiran merupakan dunia sosial.

Apa yang dinyatakan secara tidak langsung di sini, tentu saja, adalah bahwa apa pun maksud-maksud dan tujuan-tujuannya, kita tidak bisa membuat pembagian antara sebuah karya besar sejarah atau pengetahuan, atau pengetahuan sosial dengan sebuah karya fiksi. Kita mungkin percaya bahwa karya Darwin

Origin of Species atau karya de Beauvoir *The Second Sex* lebih memiliki pemahaman tentang kondisi manusia daripada, katakanlah, *Resevoir Dogs*, meski pada akhirnya kita tidak bisa mengklaim hal ini dengan pasti.

Dalam mengembangkan kritik terhadap *Enlightenment* ini, kaum posmodernis juga mengembangkan suatu kritik terhadap filsafat. Sepanjang para filsuf telah mencari cara untuk memahami kebenaran tentang kondisi manusia dan memperkirakan tentang tujuan kehidupan manusia, maka filsafat ditolak dengan dasar bahwa tidak akan pernah bisa ada satu kebenaran dan tidak bisa ada satu konsepsi tentang kehidupan yang baik.

Derrida sangat kritis terhadap filsafat Barat karena 'phonosentris'-nya —terpusat pada satu suara yang otoritatif. Filsafat Barat juga punya kecenderungan 'logosentris'— menempatkan sebuah kepercayaan pada beberapa kehadiran atau realitas. Derrida berpendapat bahwa hal ini terjadi karena hasrat manusia atas suatu kepastian, kebutuhan untuk menempatkan sebuah kehadiran sentral —sesuatu atau seseorang yang ada pada awal mula waktu dan yang mempunyai ide atau kehendak yang dijalankan sepanjang sejarah. Jika para pemikir *Enlightenment* memusatkan diri untuk menentang suara Tuhan yang tunggal dan otoritatif, mereka tidak akan pernah mampu untuk melepaskan diri dari ide mengenai asal usul dan tujuan akhir —subjek manusia, kemajuan manusia, dan sebuah masa depan yang lebih baik bagi dunia.

Tentu saja, para pemikir posmodern mengkritik gambaran sejarah sebagai 'kemajuan'. Sejarah manusia tidak seharusnya dipandang, sebagaimana yang dinyatakan oleh para pemikir *Enlightenment*, sebagai suatu tahapan perjalan-

an atau bentangan peristiwa-peristiwa yang ditujukan berpuncak pada terciptanya sebuah dunia yang lebih rasional dan bebas bagi ras manusia. Para pemikir posmodern berpendapat bahwa tidak ada pola umum, tidak ada pengertian atau titik akhir atau tujuan dalam sejarah. Foucault juga sangat kritis mengenai ide bahwa sejarah umat manusia yang dilihat dalam kerangka linear —sebagai kemajuan ras manusia yang logis dan perlu. Foucault mengkritisi sejarah tradisional yang menafsirkan peristiwa-peristiwa sejarah dalam kerangka beberapa sistem penjelasan besar, seperti teleologi. Dengan kata lain, mereka berusaha untuk menelusuri dan menafsirkan peristiwa-peristiwa, sesuai dengan beberapa gagasan ide tentang arah maupun pola umum dari sejarah.

Foucault menggunakan sebuah metode yang disebut 'genealogi' untuk menelusuri jejak ketidakterhubungan (*discontinuities*) dan keterputusan sejarah guna menekankan singularitas (bersifat tunggal) peristiwa-peristiwa, bukannya berusaha menjelaskan kecenderungan-kecenderungan sejarah. Akibatnya, dari metode ini dapat diketahui bahwa sejarah telah menjadi penceritaan-penceritaan yang dibuat oleh mereka yang berkuasa. Dengan melakukannya, Foucault juga berusaha menunjukkan segala hal yang telah dimarjinalisasi atau diabaikan dalam cerita-cerita sejarah tradisional. Jika sejarah tradisional memberikan perhatian pada peristiwa-peristiwa besar, atau pahlawan-pahlawan dan penjahat-penjahat, dan, katakanlah, Marxisme memberikan perhatian pada sejarah sebagai sejarah perjuangan kelas, genealogi Foucault disusun untuk menunjukkan sesuatu dan, terutama, pihak yang telah diabaikan dalam cerita-cerita sejarah tersebut dan, dengan demikian, mengingkari sebuah pen-

ceritaan sejarah. Sejauh legitimasi tatanan sosial dan politik saat ini ditanamkan dalam penafsiran-penafsiran atau cerita-cerita tertentu tentang masa lalu, dengan cara sangatlah terbuka kemungkinannya untuk meruntuhkan legitimasi tatanan sosial dan politik yang sedang berlangsung dan membeberkan susunan relasi-relasi kekuasaan di dalamnya.

Kembali pada pembahasan kita tentang penceritaan cerita dan penafsiran, banyak di antara pemikir posmodernis percaya bahwa sebuah ciri utama modernitas adalah bahwa orang-orang mengembangkan sebuah pengertian yang koheren atas diri mereka sendiri sebagai subjek dengan mampu untuk mengingat kembali sebuah narasi atau cerita tentang diri mereka sendiri. Dalam subjek-subjek modern hal ini, biasanya berbentuk sebuah cerita kehidupan yang di dalamnya subjek yang mempunyai sebuah sejarah, mampu menempatkan dirinya sendiri pada masa kini, dan mampu untuk menggambarkan masa depan. Jadi, contohnya, Anda mungkin 'tahu' bahwa Anda adalah seseorang dengan suatu keberadaan yang nyata karena Anda dilahirkan pada tahun tertentu, di lokasi geografis tertentu (katakanlah London), bahwa Anda punya teman-teman dan saudara kandung, Anda punya tanggal lahir, mendapat kemajuan melalui sekolah, Anda sekarang adalah seorang pelajar, tetapi suatu hari nanti Anda mungkin menjadi seorang guru. Konsepsi tentang diri sendiri ini juga telah dibentuk oleh perkataan orang lain tentang Anda dan perlakuan mereka terhadap Anda. Hal ini sama dengan pandangan Habermas tentang identitas. Namun, tidak seperti para Habermasian yang percaya bahwa karakteristik pembentukan identitas yang intersubjektif membuatnya mampu mencapai suatu kesepakatan tentang 'realitas' dan 'kebenaran', kaum posmodernis per-

caya bahwa hubungan kekuasaan selalu berlangsung dalam pertemuan-pertemuan atau dialog-dialog. Foucault tertarik dengan 'penyakit' mental seperti schizophrenia karena ini adalah sebuah contoh nyata dari orang yang menunjukkan subjektivitas yang terbagi atau memiliki banyak kepribadian dan yang sering tidak mampu untuk menempatkan diri mereka sendiri dalam ruang dan waktu, dalam cara yang biasa dilakukan oleh orang London yang kita bahas di halaman sebelumnya atau, mungkin, Anda. Penting untuk dipahami bahwa Foucault tidak menganggap orang-orang ini sebagai 'orang gila' karena konsepsi 'kegilaan' adalah manifestasi lain dari ketidaktoleransian dan nafsu yang oleh orang-orang yang berkuasa untuk memarjinalisasi atau memenjarakan mereka 'yang berbeda'.

Foucault juga penting karena karyanya tentang wacana. Pengertian wacana sangat erat kaitannya dengan *nexus* kekuasaan/pengetahuan. Foucault menyatakan bahwa produksi pengetahuan secara historis berhubungan erat dengan 'rezim kekuasaan' tertentu. Menurut Foucault setiap masyarakat menghasilkan 'kebenaran' mereka sendiri yang mempunyai fungsi-fungsi normalisasi dan pengaturan. Tugas dari para genealogis wacana adalah menelusuri proses wacana-wacana tentang kebenaran ini dilangsungkan dalam hubungannya dengan struktur kekuasaan dominan dalam masyarakat tertentu. Kekuasaan dan pengetahuan sangat erat hubungannya; sehingga Foucault terus merujuk pada hubungan kekuasaan/pengetahuan dalam tulisan-tulisannya. Wacana tidak pernah tak berpihak. 'Kebenaran-kebenaran' dari mereka yang berkuasa mungkin lebih bisa diterima karena mereka berkuasa penuh. Pada saat yang sama, pengetahuan meliputi kekuasaan.

Jika ada berbagai jenis pengetahuan manusia yang berbeda-beda, maka kita perlu secara kritis mempertimbangkan karakteristik pengetahuan, tujuan penggunaannya, dan pengaruh hubungan kekuasaan dalam pengonstruksian teorinya. Dalam hal ini, ide-ide Foucault tentang kekuasaan/pengetahuan dan wacana sejalan dengan pandangan Marxis tentang pengetahuan sebagai ideologi —pandangan dunia atau 'kebenaran' dari penguasa yang disamarkan sebagai 'pemahaman umum'. Meski demikian, para pemikir posmodern tidak mensyaratkan hubungan apa pun antara kekuasaan/pengetahuan dengan kelas sosial. Kekuasaan dilihat sebagai *multi-facet* (banyak-segi) dan, sebagaimana yang dinyatakan Foucault, ada di mana-mana. Juga, seperti bukti dari diskusi di atas, posmodernisme menolak pembagian antara bentuk-bentuk pengetahuan yang benar dan salah.

Kotak Konsep

Wacana

Menurut para pemikir Posmodernis, sebuah wacana bukanlah suatu penceritaan atau suatu cerita tentang sesuatu atau seseorang. Wacana-wacana merupakan praktik-praktik yang secara sistematis membentuk atau menciptakan objek-objek yang mereka bicarakan. Hal ini merupakan sebuah ide yang cukup kompleks, jadi mari kita uraikan sedikit lebih jauh dengan mengambil contoh nyata dari wacana tentang 'perempuan'. Sepanjang sejarah, dalam karya-karya seni dan pornografi, dalam literatur dan cerita rakyat, dalam filsafat dan ilmu, ada banyak tulisan yang berkaitan dengan subjek 'perempuan'. 'Perempuan' telah direpresentasikan secara beragam sebagai dewi yang baik hati atau penyihir jahat, sebagai istri/ibu yang penuh perhatian, atau pelacur-pelacur tersembunyi, sebagai individu-individu otonom yang mempunyai kehendak bebas atau biasa-

nya diposisikan pada posisi lebih rendah dan disesuaikan dengan peran patuh atau menurut. Jadi, apa pendapat kita tentang makhluk yang disebut 'perempuan'? Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa opini publik mengatakan pada kita bahwa perempuan adalah dewi? Atau penyihir? Atau makhluk-makhluk paradoks yang merepresentasikan pribadi-pribadi yang kompleks?

Kaum feminis akan memperingatkan bahwa cerita-cerita tentang perempuan ini tidak mengatakan apa pun tentang 'karakteristik yang sebenarnya' atau 'esensi' perempuan karena gambaran semacam itu biasanya ditulis oleh laki-laki. Hal ini, dengan demikian, bukanlah gambaran yang akurat atau bahkan partial tentang perempuan. Bagaimana mungkin laki-laki bisa benar-benar tahu bagaimanakah yang disebut sebagai perempuan? Namun demikian, para feminis belum lagi berhasil mengidentifikasi 'esensi' perempuan, seperti yang akan kita lihat pada bab berikutnya. De Beauvoir berpendapat bahwa perempuan adalah segala sesuatu yang dia bisa menjadinya, sementara yang lain secara sederhana menyimpulkan bahwa perempuan adalah suatu enigma, sebuah pertanyaan. Bagaimanapun, hanya karena kita tidak bisa mengenali esensi 'perempuan', bukan berarti bahwa wacana-wacana tentang perempuan itu tidak penting. Pendapat-pendapat tentang 'karakteristik yang sebenarnya' dari perempuan telah memberikan bentuk hukum, kebijakan sosial, lembaga, dan praktik sosial sepanjang sejarah, mulai dari, katakanlah, pernikahan dan perceraian, hingga pendidikan dan pelatihan yang layak, tentang siapa-siapa yang bisa atau tidak bisa menaiki pesawat terbang atau memilih dalam sebuah pemilu. Wacana-wacana itu menginformasikan atau menciptakan praktik-praktik nyata, atau mungkin bisa kita katakan bahwa wacana itu sendiri adalah praktik. Sebuah wacana bukanlah tentang 'sesuatu' atau peristiwa-peristiwa atau kategori-kategori nyata dari seseorang, seperti halnya 'perempuan'. Wacana menciptakan sesuatu yang dibicarakannya karena ia menanamkan arti ke dalam sebuah istilah kosong seperti 'perempuan' dan, sekaligus, menciptakan sebuah kategori 'nyata' mengenai orang yang hidupnya akan kemudian sangat dibentuk oleh praktik-praktik nyata yang berasal dari pengertian ini.

Para pemikir posmodernis menggunakan konsepsi 'ke-lain-an' (*otherness*) untuk merujuk pada 'suara yang dibungkam' atau pengalaman yang dimarjinalisasi ketika suatu 'kebenaran' dinyatakan. Konsep 'yang Lain' (*the Other*) dipakai untuk membingungkan konsepsi yang menyatakan adanya kebenaran universal yang berdasar pada konsepsi pemahaman universal, yang menyatakan bahwa berupa pengalaman-pengalaman universal atau nilai-nilai universal. Klaim pengalaman, nilai dan pengetahuan itu selalu bersifat khusus. Secara sederhana, yang terjadi adalah, seperti yang dipercaya Foucault, bahwa beberapa kelompok mempunyai kekuasaan untuk membuat klaim atas nama 'seluruh umat manusia'. Para pemikir posmodernis menggunakan dan menyanjung Ke-lain-an (*Otherness*) karena mereka menghargai perbedaan dari pengalaman manusia dan beragamnya perbedaan yang ada antara satu orang dengan yang lain. Penekanan terhadap sisi positif Ke-lain-an (*Otherness*) ini merupakan tema utama karya Derrida.

Kotak Konsep

Pos-strukturalisme

Karya Derrida lebih sering dirujuk sebagai pos-strukturalis daripada posmodern. Demikian pula, Foucault bisa, dan sering kali, digambarkan sebagai seorang pos-strukturalis daripada pemikir posmodern. Sering kali, istilah posmodern dan pos-strukturalis digunakan saling bergantian. Oleh karena itu, diperlukan adanya sebuah penjelasan untuk menunjukkan perbedaan-perbedaan di antara keduanya dengan menggunakan pengungkapan yang sederhana demi pemahaman yang jelas. Seperti yang telah kita lihat, posmodern pada dasarnya berfokus pada karakteristik dan konsekuensi-konsekuensi dari modernitas dan mengembangkan suatu kritik yang terus-

menerus terhadap proyek *Enlightenment*. Untuk lebih menyederhanakan, kita mungkin dapat mengatakan bahwa pos-strukturalisme lebih berfokus pada karakteristik, peran, dan fungsi bahasa —cara merekonstruksi makna-makna sosial melalui bahasa.

Derrida berpendapat bahwa banyak pemikiran filsafat yang bersifat metafisik. Metafisika merupakan sebuah sistem kepercayaan yang sangat bergantung pada sebuah kebenaran tertinggi atau sebuah dasar yang kuat, sebagai contoh, ide tentang Tuhan atau subjek manusia. Selama bahasa manusia digunakan untuk menyampaikan ide-ide ini, Derrida menyebut 'kebenaran tunggal' ini sebagai penanda transendental. Istilah ini dapat diartikan sebagai sebuah kata (rujukan) terakhir yang memberikan arti pada semua kata lainnya (sebelumnya); dalam analisis terakhir, sistem-sistem kepercayaan metafisika didasarkan pada sebuah fiksi, tetapi keseluruhan hierarki dari arti (signifikasi) kemudian dikonstruksi pada fiksi ini. Derrida menunjukkan bahwa beberapa filsuf telah menggunakan oposisi antara alam/budaya sebagai dasar bagi teori. Konsepsi dari laki-laki kuno yang hidup dalam *state of nature* (kondisi yang di dalamnya semua orang menikmati kebebasan dari pengekangan, namun sebagai konsekuensinya, kehidupan terasa 'keji, kasar, dan singkat —Peny.) dan keinginan untuk menciptakan 'masyarakat', kini, semestinya tidak asing lagi bagi Anda. Struktur dari dikotomi alam/budaya mengulangi dirinya sendiri dalam oposisi biner lainnya: laki-laki/perempuan, nasional/internasional. Istilah pertama dari setiap oposisi mempunyai entitas istimewa, istilah kedua selalu dipandang dengan cara yang lebih rendah (*inferior*).

Oposisi-oposisi biner seperti itu digunakan untuk menggambarkan batasan-batasan kaku antara hal yang diterima dan yang tidak, antara diri-sendiri dan bukan-diri-sendiri, kebenaran dan kesalahan, makna dan tak bermakna, kewarasan dan kegilaan, pusat dan pinggiran. Dari Derrida kita dapatkan konsepsi dekonstruksi —sebuah metode kritis dalam membaca suatu teks untuk memperlihatkan cara-cara pengonstruksian sebuah makna. Pada tahap ini, cukup dicatat bahwa ada tumpang tindih yang sangat besar antara posmodernisme dan pos-struk-

turalisme. Para sarjana posmodern dan pos-strukturalis tidak menghabiskan waktu dengan mempertentangkan istilah-istilah dan label-label dan, begitu pun, seharusnya kita. Saat ini hal yang terpenting adalah memahami kritik umum tentang relasi kekuasaan, bentuk-bentuk pengetahuan yang dominan, dan praktik-praktik sosial yang muncul dari pemahaman-pemahaman pos-struktural maupun posmodern.

Asumsi-asumsi

1. 'Karakteristik' manusia bukan tidak mengalami perubahan. Subjek manusia itu 'terbuka' dan dapat dibentuk (dipengaruhi), sebuah hasil dari praktik-praktik subordinasi dan resistensi.
2. Nilai, kepercayaan, dan tindakan-tindakan manusia beragam, sesuai dengan konteks sosial dan budayanya. Tidak ada ciri atau nilai yang dapat diterapkan secara universal. Sikap/tindakan masyarakat dan nilai-nilai tertentu hanya bisa dipahami dan dinilai dalam kerangka pengertian-pengertian dan konteks-konteks budaya tertentu pula.
3. Demikian juga, kita tidak bisa menunjukkan beberapa teori umum untuk membantu kita membuat 'pengertian' tentang dunia atau menentukan sebuah *blueprint* atau skema bagi emansipasi umat manusia secara universal.
4. Tidak ada fakta-fakta tentang dunia. Kita hanya punya penafsiran-penafsiran dan menafsirkan dari penafsiran-penafsiran orang lain tentang 'realitas'.

Kotak Refleksi

Jika Anda baru mengenal HI dan Anda telah sekilas membaca dari awal, mungkin Anda akan menemukan bahwa posmodernisme itu sulit. Daripada merefleksikan suatu asumsi tersendiri di sini, mengapa tidak membacanya kembali dengan lebih lambat kotak 'Penceritaan Cerita...' atau 'Wacana' untuk melihat benar atau tidaknya Anda memahaminya.

Tema-tema

Jika Anda sedang menerapkan pendekatan posmodern, mungkin Anda telah mengadopsi sebuah skeptisisme tertentu terhadap studi Hubungan Internasional! Mungkin, Anda akan bertanya: bagaimana relasi kekuasaan berimplikasi pada perspektif dan pandangan dunia? Pandangan-pandangan tentang dunia mana yang akan diterima sebagai sesuatu yang benar dan mana yang tidak? Cerita-cerita lain apa yang mungkin bisa kita ceritakan tentang dunia? Anda mungkin juga berkeinginan untuk menguraikan atau mendekonstruksi bahasa, simbol-simbol, dan gambaran-gambaran yang dimunculkan dalam wacana-wacana tertentu. Bahkan, mungkin Anda berkeinginan menentang konsepsi 'hubungan internasional'. Konsepsi tentang negara bangsa tentunya membuat asumsi-asumsi tertentu tentang identitas dan komunitas. Konsepsi ini mengasumsikan bahwa kita pertama kali mengidentifikasi diri dengan anggota-anggota kelompok nasional dan memberikan kesetiaan kita pada negara 'kita'. Mungkin sekarang Anda akan berargumen atas konsepsi 'perpolitikan dunia' yang lebih terbuka, ambigu, dan lebih 'kotor' dengan alasan bahwa hal tersebut lebih merepresentasikan nuansa-nuansa dan kekompleksan dunia

yang sedang Anda coba pahami. Dalam konteks inilah kita bisa fokus pada bagaimana posmodernisme mengkritik perspektif-perspektif yang telah mengupas HI dan memenangkan cara-cara berpikir baru yang radikal tentang 'domain' umum politik dunia.

Negara dan Kekuasaan

Secara sekilas, orientasi *'state-centric'* (berpusat pada negara) dari kebanyakan teori HI itu bukannya tanpa alasan. Negara bangsa telah merupakan bentuk organisasi politik yang dominan di Eropa sejak abad XVII. Pada konteks Eropa, kelahiran negara sebagai sebuah bentuk organisasi politik dihubungkan secara langsung dengan bangkitnya nasionalisme. Kekuatan-kekuatan nasionalisme mempunyai andil yang sangat besar dalam perjuangan poskolonial dan revolusioner demi kemerdekaan nasional, yang kemudian mendorong merebaknya kemunculan negara-negara di seluruh dunia. Lebih lanjut, ciri yang dapat dikenali dari suatu negara adalah kedaulatan —jurisdiksi eksklusif terhadap sekumpulan orang dalam wilayah tertentu dan berhak bertindak sesuai dengan keinginan mereka dalam berhubungan dengan yang lainnya. Dengan demikian, bukankah masuk akal untuk memulai dari posisi bahwa negara adalah aktor dominan dalam hubungan internasional dan bertindak untuk mengamankan kepentingan nasionalnya?

Dari posisi seorang posmodern, kita tidak bisa menjadikan negara sebagai titik awal kita dalam mempelajari HI dengan alasan yang sama seperti para pemikir kritis yang menolak *state sentrisme*. Pada periode terdahulu, ada berbagai tempat/situs kekuasaan dan otoritas yang berbeda-beda yang menuntut kesetiaan orang-orang. Para sarjana

posmodern juga berpendapat bahwa teori utama HI , dalam menganggap negara sebagai sebuah entitas yang telah pasti (*pre-given entity*), lalai untuk mempertanyakan permasalahan mengenai alasan atau dasar adanya pembagian dunia dengan cara ini. Dengan kata lain, pendekatan-pendekatan *state-centric* lalai untuk mempertanyakan pemilikan kedaulatan —otoritas yang terpusat— dan konsekuensi-konsekuensi pembagian ruang politik dengan cara ini. Pada masalah-masalah seputar inilah yang kini sedang sering didiskusikan.

Kaum posmodernis tidak akan menyangkal pentingnya konsep negara dalam HI. Namun, mereka mendorong kita untuk berpikir mengenai negara sebagai aktor dengan cara yang sangat berbeda. Tanpa pernah berpikir bahwa eksistensi sebuah negara sebagai sebuah pemberian, pemikir posmodernis berpendapat bahwa usaha untuk mendirikan sebuah negara sebenarnya membutuhkan waktu dan kerja keras yang tidak sedikit. Negara tidak saja harus terus mengawasi dan menjaga perbatasan, tetapi para elitenya juga harus bekerja keras dalam mempertahankan kesetiaan rakyat mereka.

Terminologi singkat untuk memahami suatu negara adalah *state craft* (seni menjalankan dan mengatur urusan-urusan pemerintahan —Peny.). Dalam sejarah diplomasi konvensional atau penjelasan-penjelasan ortodoks tentang kebijakan luar negeri, *'state craft'* mengacu pada *'statesmanship'* (kenegarawanan) —tinjauan ke masa depan dan kemampuan dalam memerintah dan dalam menjalankan hubungan-hubungan dengan para penguasa asing. Meski kaum posmodernis tidak perlu membantah definisi ini, mereka berpendapat bahwa sebuah pandangan bahwa

diplomasi atau kebijakan luar negeri merupakan ekspresi atau pelaksanaan kepentingan nasional yang telah pasti. *'State-craft'* merupakan proses dinamis yang terus berlangsung, yang padanya identitas negara secara aktif terus diciptakan dan diciptakan lagi. Setiap hari para elit politik terlibat dalam praktik-praktik seperti pembuatan pidato-pidato, penerapan diplomasi, dan pembentukan kebijakan luar negeri yang berfungsi untuk terus menandai batas dan identitas negara. Daripada memandang negara sebagai aktor dengan identitas yang konkret dan kepentingan-kepentingan yang telah pasti, para pemikir posmodern lebih menganggap negara sebagai suatu *performance*. Melalui *performance* —penerapan— dalam bentuk kebijakan dalam dan luar negeri, dengan ikut serta dalam hubungan-hubungan diplomatik dengan badan-badan berdaulat lainnya dan, terkadang, melalui peperangan, batas-batas negara dibangun, dijaga, dan diawasi. Praktik-praktik negara juga dilegitimasi melalui pewacanaan identitas, komunitas, dan kepentingan nasional.

Contoh Dunia

Wacana tentang Kebangsaan dan Identitas Nasional

Ide tentang memberi negara suatu identitas yang konkret sangat sulit dipahami, oleh karena itu mari kita ambil contoh tentang cara penerapan 'ke-Inggris-an' diterapkan dalam keseharian. Para nasionalis sering kali mengklaim bahwa orang-orang dari suatu daratan tertentu —bangsa— telah ada sejak zaman dahulu kala. Terdapat banyak tulisan akademis tentang bangsa dan nasionalisme yang berusaha untuk menelusuri asal usul bangsa pada kelompok etnik tertentu atau melalui pelacakan sejarah yang menjejak hingga ke masa kuno.

Sebuah buku berpengaruh, karya Benedict Anderson, mengklaim bahwa bangsa-bangsa bukanlah entitas 'nyata', tetapi 'komunitas-komunitas imajiner' (*imagined communities*). Dengan kata lain bahwa ide mengenai kebangsaan telah dikonstruksikan melalui simbol-simbol, mitos-mitos, dan metanaratif-metanaratif, yang membuat orang punya bayangan bahwa mereka berbagi ikatan mendalam yang berdasarkan ikatan darah dan/atau sejarah, kepentingan, dan takdir bersama. Anderson mengklaim bahwa bangsa-bangsa sebenarnya merupakan fenomena yang relatif masa kini, bukanlah dari masa yang sangat lampau. Hanya dengan datangnya sistem transportasi modern, pemberlakuan zona waktu bersama, penemuan media percetakan modern, dan sentralisasi otoritas dalam negara, orang mulai membayangkan diri mereka sebagai bagian dari satu komunitas. Proyek-proyek bangunan negara dan peperangan modern telah memanipulasi atau melanggengkan ide 'kebangsaan' ini.

Jika kita mengambil contoh bangsa Inggris, di sini kita mempunyai pulau-pulau yang dihuni oleh lebih dari 60 juta orang. Bahkan, jika kita mengeluarkan provinsi Ulster yang bermasalah, tempat perjuangan ide-ide kebangsaan dan kedaulatan telah menyebabkan konflik yang sengit dan berdarah, dari batasan kita tentang 'Inggris', kita tetap akan menemukan bahwa 'Inggris Raya' merupakan sebuah pulau yang penuh keberagamaan. Ia terdiri dari tiga negara tersendiri: Inggris, Skotlandia, dan Wales. Banyak di antara —meski tidak benar-benar semuanya— orang-orang Skotlandia dan Wales merasa diri mereka berbeda dari orang Inggris dan, tentu saja, mungkin melihat konsepsi 'ke-Inggris-an' hanya sebagai sebuah pemaksaan atas konsepsi 'ke-Inggris-an'. Perasaan 'berbeda' ini dalam konotasi positif maupun negatif tidak diragukan lagi merupakan sebagian alasan dari tuntutan orang-orang Skotlandia dan Wales atas pemerintahan sendiri yang lebih besar beberapa tahun belakangan ini. Namun, desentralisasi kekuasaan pada Majelis orang-orang Skotlandia dan Wales, pada gilirannya meningkatkan tuntutan suatu otonomi yang lebih luas di beberapa wilayah Inggris, seperti bagian Timur Laut dan Barat Daya, yang telah didukung oleh klaim-klaim 'perbedaan budaya'. Tentu saja, kita

tidak bisa membuktikan dengan cara objektif apa pun bahwa klaim-klaim ini mempunyai substansi (isi), atau merasa perbedaan-perbedaan itu didasarkan pada perbedaan-perbedaan yang 'nyata'. Intinya, ide mengenai kebangsaan dan komunitas sedang diperjuangkan. Tambahan pula, sejumlah besar warga negara Inggris tersebar di berbagai wilayah dan region, yang mempunyai orang tua, kakek nenek, partner, atau *relatives* dekat yang dilahirkan di sub-benua India, Karibia, Afrika, negara-negara Baltik, atau beberapa negara Eropa lainnya, dan sebuah gambar tentang masyarakat yang beragam dan multikultur mulai muncul.

Jelas sulit untuk mempertahankan konsepsi sebuah bangsa yang bersatu dan erat dalam konteks keragaman dan identifikasi perasaan yang kompleks mengenai identitas dan kesetiaan, dan, belum lagi, ide ke-Inggris-an diterapkan atau dijalankan di panggung internasional berdasar pada penerapannya sehari-hari. Para politikus memperdebatkan berbagai implikasi pendirian Uni Eropa bagi kedaulatan Inggris, atau 'masalah' para pencari suaka 'palsu'. Pada saat yang sama, para pejabat dan perwakilan negara Inggris terlibat dalam berbagai misi diplomatik, negarawan-negarawan turut ambil bagian dalam konferensi-konferensi internasional, dan angkatan bersenjata Inggris mengawasi laut dan udara, dan menjaga batas-batas wilayah —semuanya atas nama 'kepentingan Inggris'. Dengan semua cara ini, ide tentang sebuah bangsa yang satu dan 'ke-Inggris-an' yang khas dijalankan atau diterapkan.

Jika demikian, bagaimanakah sebuah negara terkesan seperti sebuah entitas dan aktor yang mempunyai ikatan dan tujuan? Kaum posmodernis berpendapat bahwa negara —dalam kasus ini negara Inggris— terkesan layaknya negara tersebut mempunyai esensi melalui pelaksanaan berbagai kebijakan domestik dan luar negeri secara nyata. Melalui pelaksanaan kebijakan luar negeri dan domestik, dengan ikut serta dalam hubungan diplomasi dengan badan-badan berdaulat lainnya, dan kadang, melalui peperangan, batas-batas negara dikonstruksi, dijaga, dan diawasi. Praktik-praktik negara kemudian dilegitimasi melalui artikulasi atau pewacanaan identitas, komunitas, dan kepentingan-kepentingan nasional. Negara

tidak pernah berakhir, *state craft* adalah suatu proses yang terus berlangsung. Demikian pula halnya dengan negara dan cara kita berpikir tentang negara adalah proses-proses yang akan terus mengalami transformasi.

Tentu saja, Anda mungkin menolak bahwa meski berkaitan langsung, konsep-konsep negara dan bangsa sangatlah berbeda. Kaum realis akan berpendapat bahwa, tanpa merujuk pada keberagaman di antara warga negara, konsep kepentingan nasional itu sah karena pada akhirnya negara menjamin keamanan dari warga negaranya. Beberapa kaum realis lebih suka untuk tidak bergantung pada pendapat-pendapat tentang kebangsaan untuk membela posisi mereka dan menyatakan bahwa kita patuh kepada negara karena hal yang demikian memang yang sepantasnya —negara melindungi kita; jika kita mengkhianati negara, maka kita bisa dibunuh. Terlebih lagi dunia terbagi-bagi ke dalam entitas-entitas yang disebut negara dan ciri paling penting dari sebuah negara adalah kedaulatan.

Menilik pada diskusi kita sebelumnya tentang karakteristik wacana, kita akan terkejut menemukan para pemikir posmodern menjadi 'mereda' dalam membicarakan tentang yang disebut sebagai 'ciri-ciri objektif' dari negara atau hal yang paling mendasar dari otoritas yang berdaulat. Perspektif posmodern tentang kedaulatan mengalihkan fokusnya dari ciri-ciri objektif kedaulatan menjadi proses wacana kedaulatan secara mendalam membentuk pemikiran kita tentang kehidupan politik. Dalam konsentrasi fokus ke wacana kedaulatan, tujuannya bukanlah untuk mendefinisikan kedaulatan atau menemukan inti dari kekuasaan berdaulat.

Dengan mengadopsi metode genealogika, usaha untuk menunjukkan fakta bahwa pengertian kedaulatan telah berubah seiring dengan berubahnya periode waktu dalam sejarah dan sesuai dengan konteks tempat istilah tersebut telah dimunculkan. Hal ini menyatakan secara tidak langsung bahwa kita perlu memahami proses pembentukan pemahaman kita tentang kedaulatan oleh berbagai konfigurasi dari kekuasaan/pengetahuan.

Kotak Penulis

Menyimulasikan Kedaulatan

Para pemikir seperti Cynthia Weber sering merujuk pada konsepsi 'menulis' negara, atau mensimulasikan kedaulatan. Kembali pada metafor kita sebelumnya tentang dunia sebagai sebuah teks atau buku, konsepsi 'menulis' ini menyampaikan ide tentang mencatat model-model representasi. Dengan cara ini, makna tercatat dalam teks melalui tindakan menulis —penggunaan kata-kata, arti-arti, simbol-simbol, metafor-metafor, dan gambar-gambar, yang kita baca, tafsirkan, dan, pada beberapa level, pahami. Demikian juga, konsep-konsep, ide-ide, dan fiksi-fiksi —negara, atau keamanan, atau kedaulatan— digambarkan atau ditunjukkan kepada kita sebagai sesuatu yang mempunyai keberadaan nyata atau 'kebenaran'. Menuliskan negara berarti memberikan negara suatu isi atau, lebih tepatnya, suatu kehadiran —suatu identitas atau keberadaan nyata. Setelah menerapkan kehadiran negara, praktik-praktik tertentu kemudian diisi dengan makna dan, dengan demikian, melegitimasi —mengamankan batas-batas, tindakan-tindakan atas nama 'keamanan nasional', pengkhianatan, dan sebagainya.

Perdamaian dan Keamanan

Mengacu pada karya Derrida khususnya, beberapa para pemikir Posmodernis telah berpendapat bahwa 'pendirian' negara membutuhkan konstruksi 'yang Lain' (*Other*)

yang kejam. Wacana ancaman atau bahaya merupakan hal yang penting bagi pembentukan identitas dan pengamanan batas-batas wilayah. Dengan demikian, kesatuan politik Amerika Serikat berlandaskan pada konstruksi beberapa 'yang lain' (*others*) yang jahat atau kejam tadi. Dalam kebijakan luar negeri AS selama Perang Dingin, Uni Soviet dikonstruksikan sebagai seorang aktor yang tersatukan dan padu —sebuah 'ancaman komunis' (*'red menace'*, dalam konteks ini merujuk konotasi *red* dalam dunia politik sebagai sosialis atau komunis —Peny.) yang berhasrat menguasai dunia. Uni Soviet memiliki wilayah geografis yang luas dan memasukkan suatu susunan orang-orang yang banyak yang berbeda kelas, gender, kebangsaan dan budaya, tetapi dipresentasikan sebagai sebuah entitas dengan identitas dan tujuan yang tersatukan —atau subjektivitas.

Dengan mengadopsi posisi posmodern tentang keamanan, kebijakan luar negeri dan diplomasi, kita mendapatkan sebuah pemahaman yang lebih mengalir dan dinamis mengenai politik dan hubungan-hubungan politik yang mendasari wacana-wacana dominan tentang ruang dan identitas politik, daripada yang kita dapatkan dengan mengadopsi perspektif-perspektif *state-centric*. Perspektif *state-centric* ini memberikan kesempatan pada kita untuk melihat bahwa praktik-praktik tadi secara efektif membagi ruang politik dalam skala global dan menentukan segala hal yang dipandang sebagai 'ancaman-ancaman'. Perspektif ini tidak hanya berguna untuk melegitimasi tingginya pengeluaran untuk persenjataan dan kekerasan politik dalam rangka pertahanan bangsa dan batas-batasnya, tetapi juga menyamarkan perpecahan internal dan perbedaan pendapat. Tidak seperti yang sering kali dipercaya bahwa negara adalah

kesatuan unit secara sosial, politik, dan budaya, 'negara-bangsa' terus-menerus dilanda perpecahan internal; secara sah diakui tetapi kekurangan legitimasi domestik. Bagaimanapun, kedaulatan menganugerahi negara kekuasaan penuh terhadap warga negaranya.

Kotak Penulis

David Campbell, *Writing Security*

Buku David Campbell *Writing Security* menunjukkan tentang kebijakan luar negeri AS yang sangat mengandalkan pada sesuatu yang disebut dengan 'wacana bahaya'. Wacana-wacana seperti itu telah mampu 'menciptakan' musuh-musuh secara eksternal maupun mengeksternalisasi ketidaksepakatan/perbedaan internal. Seperti yang diungkapkan Campbell, "kemampuan untuk merepresentasikan segala hal sebagai sesuatu yang asing, subversif (baca: gerakan bawah tanah), kotor, atau apa pun namanya telah menjadi hal yang sangat penting bagi pengalaman orang Amerika" (hlm. 2). Dia berpendapat bahwa hal ini tidak hanya tentang keperluan Perang Dingin tetapi selalu merupakan ciri politik AS; dengan pengertian ini, seperti halnya 'perempuan, orang kulit hitam, orang asing, para radikal, orang 'gila' dan mereka yang secara seksual menyimpang sering menjadi target praktik-praktik diskursif anti-komunis' demikian pula wacana-wacana bahaya anti-narkoba pada masa setelah Perang Dingin 'telah menganggap kelompok-kelompok tadi sebagai targetnya' (hlm. 205).

Di bagian awal dinyatakan bahwa kebutuhan negara atas 'wacana bahaya' ini tidak hanya untuk menjaga identitasnya, tetapi juga untuk melegitimasi kekuasaan negara. Beberapa penulis berpendapat bahwa *state-craft* modern dibangun berdasarkan serangkaian praktik yang bekerja untuk menaklukkan kekuatan perlawanan. Konsekuensi dari hal ini adalah bahwa kewarganegaraan disamakan dengan

kesetiaan total pada negara bangsa dan pemusnahan semua yang dianggap asing. Ancaman-ancaman terhadap keamanan yang dilihat pada wilayah eksternal dan perbedaan internal dihapuskan.

Konflik dan Kekerasan

Dari perspektif posmodern, dengan demikian, kekerasan mewabah pada hubungan internasional bukan dikarenakan kondisinya yang 'anarki' atau dikarenakan negara-negara terus menghadapi ancaman-ancaman nyata bagi keamanan mereka dari musuh-musuh asing. Pengonstruksian 'pihak luar' sebagai musuh dan ancaman melegitimasi adanya kekerasan dalam hubungan internasional. Lebih lanjut, kekerasan sebenarnya merupakan pokok konstitusi negara. Negara, meminjam istilah Max Weber, merupakan lembaga yang memegang monopoli atas sahnya penggunaan kekuatan. Negara menjalankan otoritas melalui sistem politik dan hukum, tetapi hal ini didukung oleh badan-badan pemaksa yang dimiliki kekuasaan negara, yakni kekuatan militer dan polisi. Hal yang pokok dari negara adalah wacana dan praktik kekerasan. Ungkapan ini menyatakan keraguan atas klaim bahwa negara merupakan suatu bentuk organisasi politik yang 'progresif'.

Identitas dan Komunitas

Bagaimanapun, seandainya negara merupakan sebuah 'masalah', bagaimana mungkin kita mengartikulasikan kembali atau memperbaiki konsepsi-konsepsi mengenai komunitas dan rasa memiliki? Para sarjana posmodernis menerima bahwa negara-bangsa merupakan ekspresi penting dari komunitas politik. Namun, mereka juga menunjukkan

bahwa negara-bangsa bukanlah satu-satunya ungkapan penting dari identitas atau komunitas. Permasalahannya adalah bahwa ketika kita mempelajari hubungan internasional, kita perlu mengistimewakan kewarganegaraan di atas ungkapan-ungkapan lainnya tentang identitas dan komunitas. Bahwa ide-ide yang dominan mengenai identitas dan komunitas politik yang dibatasi pada pengidentifikasian terhadap negara-bangsa sangatlah merupakan sebuah konsekuensi dari cara penetapan batas-batas negara di Eropa yang terkait langsung dengan bangkitnya nasionalisme sebagai sebuah wacana besar dan kekuatan politik dan perang sebagai suatu ekspresi yang sangat sering dalam hal ini. Namun, jika kita berfokus sepenuhnya, atau khususnya, pada negara-bangsa, kita mungkin dapat melalaikan ekspresi penting lainnya dari komunitas dan identitas. Model-model *state-centric* dari hubungan internasional memarginalkan secara politis pentingnya dari gerakan-gerakan sosial yang proses pengidentifikasiannya berdasarkan kelas atau gender atau yang bergerak pada isu-isu seputar itu, misalnya lingkungan hidup.

Para sarjana posmodern menganut ide globalisasi bukan karena hal ini menggambarkan proses-proses atau perkembangan-perkembangan material yang nyata, tetapi karena ia mewakili sebuah penentangan yang sangat kuat terhadap *state-centris* dalam HI. Konon dalam semangat Foucaulian (pengikut paham-paham Foucault), kaum posmodernis juga sensitif terhadap relasi-relasi kekuasaan yang mendasari wacana-wacana globalisasi. Dengan kata lain, globalisasi adalah sebuah istilah yang dipertentangkan bagi sebuah proses yang dipertentangkan. Dengan demikian, hal yang penting untuk disadari adalah bahwa kaum

posmodernis melihat adanya nilai pada berbagai ide atau perspektif yang mendorong kita untuk berpikir tentang dunia secara berbeda, meski juga selalu berjaga-jaga terhadap adanya kepentingan-kepentingan dan motivasi-motivasi tertentu yang menstrukturisasi klaim-klaim tentang dunia. Kendati demikian, globalisasi dapat mendorong timbulnya bentuk-bentuk identifikasi dan ekspresi-ekspresi identitas dan solidaritas yang melintasi batas-batas negara. Oleh karena itu, konsep tentang globalisasi membuka berbagai kemungkinan bagi perbaikan ulang atas identitas dan komunitas.

Kotak Refleksi

Hibriditas

Konsepsi hibriditas berarti pencampuran berbagai unsur identitas untuk membentuk sesuatu yang baru. Konsep hibriditas biasanya dikaitkan dengan ide-idenya Homi Bhabba. Guna memperjelas konsep identitas-identitas yang hibrid, pertimbangan yang lebih jauh terhadap penjelasan relevansi antara globalisasi dengan studi tentang identitas. Globalisasi mengindikasikan meningkatnya perjalanan, pertumbuhan media dan komunikasi, dan sebuah dunia yang secara umum 'lebih kecil'. Dalam sebuah dunia yang terglobalkan, dengan demikian, dorongan dan pencampuran budaya akhirnya mungkin menjadi sesuatu yang biasa. Contohnya, ada di suatu tempat di sana seorang perempuan Bangladesh. Dia adalah anak dari seorang laki-laki Banglades dan seorang perempuan Amerika, yang merupakan anak dari Yahudi Jerman yang melarikan diri dari Nazi. Perempuan peranakan Bangladesh ini besar di Turki, meski ia dulu bersekolah di Inggris. Jika orang seperti ini ada, satu-satunya orang yang memiliki percampuran identitas tertentu sepertinya adalah saudara kandungnya, yang kemudian, akan menjadi unik berdasarkan gender, jenis kelamin, dan sebagainya.

Sangatlah menarik membayangkan arti semua ini. Akan tetapi, barangkali hibriditas, percampuran dan transmisi berbagai ide berarti, lebih dari segala sesuatu lain, bahwa stereotipe kian lama kian sulit dipertahankan. Apakah dukungan terhadap ide-ide seperti '*American way*' (gaya hidup orang Amerika) dan pemodelan ide-ide dalam, katakanlah, *Cool Britannia* (Inggris Keren) atau usaha-usaha untuk menolak atau mencegah tren-tren global dengan, katakanlah, 'melindungi' bahasa Prancis dari Anglikisasi merupakan proyek-proyek atau wacana-wacana berharga dari mereka yang berkuasa?

Kaum posmodernis tertarik dalam gerakan-gerakan sosial karena hal ini adalah sebuah politik yang menentang batasan-batasan *inside/outside* kaku dari analisis *state-centric*. Penemuan-penemuan teknologi baru, seperti internet, sering digunakan oleh berbagai gerakan sosial secara luas untuk membangun jaringan, mengampanyekan, dan mengungkapkan perbedaan pendapat dan kekuatan perlawanan. Semua aktivitas politik ini dilakukan dalam 'wilayah' tertentu —*cyberspace*— yang berada di luar dari yuridiksi dan kontrol tiap negara meski, dengan sangat ironis, rawan terhadap *hacking* dan penyebaran virus oleh individu. Para sarjana posmodern kemudian berpendapat bahwa kita perlu memikirkan kembali konsepsi-konsepsi kita tentang ruang politik global secara lebih radikal.

Kotak Penulis

R.B.J. Walker, *One World, Many Worlds*

Walker telah menjadi figur berpengaruh dalam pengembangan pemikiran posmodern/pos-strukturalis dalam Hubungan Internasional. Dalam karyanya ini, Walker menunjukkan cara yang dipakainya dalam melihat pentingnya gerakan-gerakan sosial

baru, dalam hubungannya dengan masalah tentang identitas, solidaritas, dan aksi politik.

> Sangat pentingnya ketiga hal ini terletak pada cara yang mereka kadang lakukan dalam menanggapi tantangan-tantangan yang mereka identifikasi. Mereka menemukan ruang-ruang baru untuk bertindak yang, dengan demikian, menentang topografi kehidupan politik yang sedang berlaku saat itu. Mereka menemukan cara-cara bertindak yang baru yang, dengan demikian, menentang konsepsi mengenai cara seseorang harus bertindak terhadap satu sama lain yang sedang berlaku saat itu. Mereka meluaskan batasan tentang segala hal yang mungkin diketahui dan sebagai makhluk manusia yang, dengan demikian, menentang batasan-batasan berbagai tradisi etika, aestetika, dan filosofi yang sudah ada. Gerakan-gerakan sosial kritis berjuang dalam lingkungan tertentu dan kemudian mereka juga mengakui bahwa perjuangan-perjuangan khusus itu membutuhkan bentuk-bentuk interaksi baru di antara orang-orang, bentuk-bentuk komunitas dan solidaritas manusia baru yang melintasi kategori-kategori sosial dan wilayah yang ditetapkan di bawah kondisi-kondisi sejarah lainnya (hlm. 115).

Kesenjangan dan Keadilan

Perhatian terhadap bentuk-bentuk identifikasi dan ekspresi-ekspresi komunitas yang baru akan selalu memunculkan berbagai pertanyaan tentang cara kita mengarahkan hubungan kita dengan orang lain. Setelah mengetahui perhatian utama kaum posmodern adalah *nexus* kekuasaan/pengetahuan dan skeptisisme umum terhadap wacana *Enlightenment*, kita seharusnya mengetahui bahwa para sarjana posmodernis mengadopsi sebuah pendekatan yang agak sinis terhadap berbagai permasalahan mengenai keadilan dan hak-hak moral. Tidak diragukan, beberapa pemikir posmodernis cenderung skeptis dalam hal ini. Namun, sama

sekali tidak benar bahwa semua kaum posmodernis beroperasi dalam bidang HI. Beberapa sarjana posmodernis berusaha memberikan lebih dari sekadar kritik dan menyatakan bahwa pemahaman-pemahaman posmodernis membantu dalam menunjukkan serangkaian permasalahan dan perhatian manusia. Para pemikir posmodernis tertarik pada masalah keadilan dan kesenjangan yang konkret. Meski demikian, kaum posmodernis cenderung lebih fokus pada implikasi-implikasi moral dan etika dari sebuah dunia yang beragam secara budaya heterogen. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan-pertanyaan mengenai moralitas dan etika dalam perpolitikan dunia.

Masalah-masalah moralitas dan etika tidak bisa dipahami semata-mata dalam batasan negara-bangsa. Para pemikir *Enlightenment* melihat ras manusia sebagai pihak yang terlibat dalam sebuah usaha menuju realisasi-diri moral dan intelektual yang universal dan sebagai subjek pengalaman sejarah yang universal. Negara-bangsa oleh kebanyakan orang dilihat sebagai sebuah ruang politik yang memungkinkan terjadinya perilaku yang beretika. Namun, terdapat suatu paradoks moral pada pokok negara-bangsa —mengeksklusikan 'pihak lain' (*others*) yang tidak dianggap sama dengan warga negaranya. Sebagai akibatnya, 'perbedaan' di sini diselesaikan dengan melalui proses-proses pengeksklusian dan perlakuan yang berbeda.

Kaum realis percaya bahwa kesulitan utama dalam hubungan internasional adalah bahwa di bawah kondisi anarki, etika atau moralitas tidak dan tidak dapat memberikan dorongan dan landasan rasional bagi kebijakan luar negeri; kebijakan tersebut pasti berdasarkan kepentingan-diri sendiri. Ikatan-ikatan moral dan kewajiban-kewajiban

yang menyatukan kelompok nasional tidak terdapat dalam hubungan dengan pihak-pihak eksternal. Untuk itu, hubungan-hubungan dengan pihak luar selalu didasarkan ancaman timbulnya kekacauan.

Hal ini tidak berarti bahwa semua sarjana HI telah menafikan kemungkinan terdapatnya perilaku moral dan etika di antara negara dan aktor-aktor lain dalam hubungan internasional. Kaum liberal berharap terhadap dimungkinkannya realisasi aturan hukum dalam hubungan antar-negara-negara, sementara para pemikir kritis, mengikuti Habermas, berpendapat bahwa dengan terlibat dalam dialog kita mungkin mampu untuk menetapkan standar keadilan dan moral yang bisa dipakai bagi seluruh orang-orang di dunia.

Masalah kedua dengan pendekatan terhadap permasalahan-permasalahan keadilan atau etika dari perspektif *state-centric* adalah, seperti yang akan kita lihat pada bab 7, negara-bangsa tidak memiliki kemampuan untuk berhadapan dengan banyaknya masalah yang sedang dihadapi umat manusia. Negara tidak mampu memberikan perlindungan dari ancaman krisis ekonomi global, polusi lingkungan hidup, atau serangan nuklir. Lebih lanjut, ketika orientasi terhadap yang lain (*the other*) ini digabungkan dengan konsepsi-konsepsi komunitas politik dan ruang politik yang antara satu dengan yang lain mempunyai perbedaan tajam, jelas bahwa tuntutan atas keadilan bisa berasal dari level atas dan bawah negara. Isu-isu dan dilema-dilema etika/moral muncul dalam serangkaian konteks. Dengan ungkapan lain, masalah-masalah keadilan dan etika biasanya muncul dalam, misalnya, praktik-praktik yang dilakukan World Bank, PBB, atau sebuah perusahaan multinasional dan juga berasal dari tuntutan yang diungkapkan oleh, misalnya,

orang-orang minoritas, gerakan-gerakan sosial, atau orang-orang pribumi asli yang merasa tersisihkan.

Kaum posmodernis, tentu saja, berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan bahwa kekuasaan ada di mana-mana dan bahwa hubungan kekuasan tidak pernah bisa sepenuhnya diatasi..Namun, ada tanggapan yang berpendapat bahwa, bagaimanapun juga, kita harus mencoba untuk mengarahkan hubungan kita dengan yang lain dalam kerangka etika. Salah satu pertanyaan penting dalam teori HI tradisional adalah 'warga negara' berutang apa pada yang lainnya? Etika posmodern menolak berangkat dari asumsi bahwa kita berada di atas semua penduduk negara-negara yang muncul tanpa perjuangan (*pre-given state*). Daripada berangkat dari asumsi semacam itu posisi moralitas posmodern menyarankan kita untuk memulainya dari pertanyaan: sebagai subjek (bagaimanapun juga subjektivitas itu dibangun), apa utang saya kepada yang lainnya? Jadi, posmodernisme memulai dari posisi yang Lain (*the Other*). Para pemikir posmodern mempertanyakan: bagaimana pengakuan terhadap, dan penghargaan atas, yang Lain (*the Other*) membuat klaim-klaim tertentu atau menghadapkan kewajiban-kewajiban tertentu pada saya?

Pengetahuan tentang tidak cukupnya negara dan panggilan untuk memikirkan kembali pendekatan kita terhadap masalah identitas dan komunitas memerlukan pemikiran kembali mengenai pengertian dari memiliki solidaritas terhadap pihak-pihak Lain (*Others*) dan dalam dan dari pengertian berperilaku dalam cara yang etis dan adil terhadap yang Lainnya (*Others*). Untuk itu, banyak di antara para sarjana posmodern tertarik pada wacana-wacana tentang kewajiban-kewajiban etika dan moral yang, mungkin, dapat

ditemukan di dalam tulisan-tulisan mengenai hak asasi manusia. Bagaimanapun, hal yang penting untuk disadari adalah bahwa para pemikir posmodern tidak berangkat dari pengertian abstrak tentang logika universal sebagai suatu dasar bagi pengakuan hak-hak. Mereka lebih tertarik pada cara kita untuk mengembangkan suatu etika berdasarkan penghargaan atas pihak-pihak dinyatakan sebagai yang lain (*others*) yang diakui dalam wacana-wacana dan praktik-praktik konkret yang sedang berlangsung. Pada saat yang sama, kaum posmodernis menginginkan kita untuk memikirkan kembali dasar bagi pengakuan hak-hak atau konsepsi moralitas dan etika sehingga hal-hal tersebut dapat lebih sensitif dan responsif pada berbagai perbedaan.

Kesimpulan

1. Posmodernisme itu tidaklah sederhana. Perspektif ini menentang banyak di antara ide-ide besar dalam Hubungan Internasional.
2. Posmodernisme bukanlah sesederhana mengenai periode sejarah yang meneruskan modernitas, tetapi memberikan cara-cara berpikir tentang konsekuensi-konsekuensi dari pemikiran dan praktik-praktik modern.
3. Meskipun sedikit dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran kiri, namun kaum posmodernis dicap sebagai orang-orang yang sangat konservatif. Sikap kritis merupakan salah satu alasan mengapa ia tidak mungkin untuk dikategorisasikan secara politis.
4. Posmodernisme berusaha untuk menguak hubungan kekuasaan/pengetahuan yang beragam.
5. Kaum posmodernis memusatkan perhatian untuk mendorong munculnya asumsi-asumsi tersembunyi

(membuat terlihat yang tidak terlihat) dengan suatu proses kritis.

6. Posmodernisme bukanlah berarti bahwa seseorang tidak dapat mempunyai nilai atau harus tidak mudah memercayai sesuatu, lebih dari itu mereka seharusnya menjadi tidak menaruh keyakinan yang terlalu besar tentang dasar bagi klaim-klaim yang mereka buat berdasarkan hal ini.
7. Umumnya para penulis posmodernis yang berpengaruh adalah Jacques Derrida (b.1930), Michael Foucault (1926-1984), Martin Heidegger (1889-1976) dan Friedrich Nietzsche (1844-1900), tetapi posmodernisme lebih sulit untuk dikategorikan daripada realisme.
8. Posmodernisme menggunakan berbagai jenis metode termasuk genealogi. Metode ini berusaha menyoroti keistimewaan peristiwa-peristiwa daripada tren-tren guna mengungkap ide bahwa semua sejarah itu ditulis oleh mereka yang berkuasa.
9. Dalam melemahkan HI, posmodernisme mungkin lebih baik untuk diajarkan terlebih dahulu sebelum para mahasiswa menanamkan dalam kepercayaannya 'kebenaran' disiplin ilmu ini. Untuk itu, hal tersebut dapat ditemukan dalam buku ini dengan mengabaikan kesulitan-kesulitannya.

Kritik-kritik

Beberapa pengkritik berpendapat, sering kali dengan cara yang sangat keras, bahwa posmodernisme tidak punya 'relevansi' nyata dengan HI. Dengan kata lain, posmodernisme tidaklah berorientasi kebijakan dan, oleh karena itu, tidak bisa digunakan untuk memberi bentuk bagi pelaksa-

naan hubungan internasional. Hal ini dapat diperdebatkan dengan dasar bahwa banyak di antara ide-ide posmodern, contohnya tentang etika, bisa membentuk kebijakan. Lebih lanjut, kritik jenis ini lebih didasarkan pada penjelasan mengenai hal-hal yang termasuk dalam wilayah hubungan internasional atau politik internasional yang terasa agak dangkal.

Kecurigaan posmodern tentang metanarasi dan *grand theory* yang telah menyebabkan beberapa kritikus berpendapat bahwa posmodernisme hanya akan menghasilkan studi-studi empiris tidak pernah berakhir, yang para sarjananya mengaku sedang melakukan tidak lebih dari sekadar 'penafsiran' atau 'penceritaan cerita' tentang berbagai wilayah ketertarikan tertentu. Namun, kritisisme semacam itu melalaikan pentingnya kritik terhadap pemikiran posmodern. Lebih lanjut, ia secara tidak langsung menyatakan bahwa *grand theory* dan metanaratif sebagai perspektif berguna atau mendalam.

Kritik lebih lanjut yang sering ditujukan pada posmodernisme adalah bahwa ia tidak memberikan kita cara-cara dalam membedakan antara bentuk-bentuk pengetahuan yang 'baik' dan 'buruk'. Suatu kritik yang berkaitan adalah bahwa jika kita tidak bisa memahami kehidupan dari satu perspektif, dan kekuasaan ada di mana-mana, pada akhirnya hal ini berarti kita tidak bisa menilai validitas berbagai macam wacana.Contoh yang sangat ekstrem dari hal ini, dalam pengertian yang lebih luas, adalah posmodernisme tidak bisa menilai kebenaran atau membuktikan kesalahan dari sebuah teks seperti *Mein Kampf* (buku karya Hitler — Peny.). Lalu, dengan menolak fondasi akhir atau 'kebenaran' beberapa pandangan, atau nilai-nilai, atau teks-teks tertentu

tentang dunia tidak dengan serta-merta berarti bahwa kita tidak bisa ditentang pada beberapa posisi. Tentu saja, kritik dan dekonstruksi bisa menjadi alat-alat politik penting, yang mengungkapkan keberpihakan dan pembiasaan dari suatu posisi atau doktrin tertentu dan dengan begitu melemahkan klaim-klaim yang diakuinya berdasarkan atas kebenaran.

Kritik terhadap posmodernisme ini, mungkin, didasarkan pada kesalahpahaman atas 'tanggung jawab'. Tanpa memiliki 'kebenaran universal' atau 'agen universal' bukan berarti bahwa kaum posmodernis tidak bertanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka. Lebih lanjut, seseorang bisa mengkritik *Mein Kampf* sebagai 'salah secara moral' atau 'pengeksklusian secara politik' tanpa harus merujuk pada posisi universalis.

Posmodernisme telah dikritik sebagai sebuah posisi yang sangat konservatif. Kritik ini muncul sebagian dikarenakan utang intelektual terhadap Nietzsche yang telah lama dianggap sebagai seorang yang berpengaruh penting dalam pemikiran fasis. Seperti yang kami tunjukkan dalam pendahuluan tentang posmodernisme di atas, tidak mudah untuk mengategorisasikan posmodernisme sebagai 'sayap kanan' atau 'sayap kiri'. Bisa jadi, terdapat beberapa kaum posmodernis yang sangat konservatif. Namun, tidaklah hal tersebut berarti bahwa semua kaum posmodernis ingin mempertahankan status quo. Tentu saja, seperti yang dibuktikan dalam bahasan di atas, beberapa kaum posmodernis mengidentikkan diri sebagai kelompok-kelompok oposisi.

Sebuah kritik lain yang berkaitan adalah kritik yang menyatakan bahwa posmodernisme merupakan suatu cara mudah dalam menghindari permasalahan-permasalahan

politik. Jika tidak ada kebenaran, maka pada akhirnya kita terjebak dalam wacana kita sendiri. Posmodernisme juga tidak memiliki teori tentang kebebasan atau emansipasi, melihat proyek transformasi sosial sebagai kesia-siaan ataupun, lebih menakutkan lagi, sebagai suatu cerminan dari hubungan kekuasaan/pengetahuan dominan.

Posmodernisme juga telah dikritik karena ia menyerang Marxisme, tetapi tidak terlalu memberikan perhatian pada kekerasan dan penindasan yang berlangsung dalam kapitalisme. Dalam pembelaan mereka, kaum posmodernis mungkin menunjukkan bahwa meski Marxisme telah menjadi sasaran dari kritik, beberapa sarjana posmodernis juga telah menyerang neo-liberalisme dan pendekatan-pendekatan kontemporer pada modernisasi karena mereka melegitimasi proyek-proyek ekonomi yang dominan.

Posmodernisme telah dikritik sebagai paham yang menghilangkan pengaruh kekuasaan (*disempowering*) karena ia tidak mempunyai konsepsi agensi yang jelas. Sering kali dikatakan bahwa posmodernisme bahkan berada dalam model 'oposisi'-nya, menolak konsepsi satu subjek dengan satu suara (*a subject with a voice*) dan, dengan demikian, melemahkan kemampuan kelompok-kelompok terpinggirkan untuk mengekspresikan pengalaman-pengalaman mereka. Meski demikian, beberapa kaum posmodernis memiliki simpati terhadap analisis yang berfokus pada (subjek) manusia dan berusaha untuk tetap menyisakan, atau menyimpan sesuatu dari ciri-ciri tradisi humanis *Enlightenment*.

Terakhir, jika kekuasaan ada di mana-mana, tetapi kita tidak bisa mengenali struktur-struktur kekuasaan, contohnya, patriarki atau kapitalisme, maka siapa atau apa yang kita anggap benar untuk menjadi kekuatan perlawanan?

Lebih lanjut, jika kaum posmodernis bersikap skeptis tentang keberadaan dari kepentingan material yang berakar dalam, katakanlah, kelas atau gender, maka alasan apa —jika ada— yang ada bagi tindakan bersama? Kaum Marxis dan beberapa feminis telah menyatakan bahwa posmodernisme menggunakan bahasa tentang ketidaksepakatan, pengasingan, dan marginalisasi, tetapi tidak memiliki apa pun untuk dikatakan tentang tindakan politik apa pun yang bisa digunakan untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. 'Pembelaan' kaum posmodernis yakni bahwa proyek-proyek emansipatoris secara tidak langsung menyatakan suatu rencara yang saling berkaitan; oleh karena hubungan kekuasaan selalu berimplikasi dalam visi-visi dari emansipasi, kita hanya bisa waspada dan bertanya: konsepsi emansipasi siapa ini?

Kesalahpahaman Umum

Posmodernis itu sama seperti pos-strukturalisme. Tidak, tetapi ada beberapa persamaan. Lihat Kotak Konsep 'posstrukturalisme'!

Kaum posmodernis berpikir bahwa tidak ada dunia 'nyata'. Bisa jadi sangatlah *absurd* untuk menyangkal, misalnya, bahwa terdapat peperangan nyata dan bahwa orang-orang benar-benar terbunuh. Meski demikian, kita tidak pernah bisa memahami dunia secara langsung, sehingga kita tergantung pada penafsiran-penafsiran dari peristiwa-peristiwa daripada peristiwa-peristiwa aktual itu sendiri bagi pengetahuan kita tentang dunia. Lebih lanjut, pada zaman kontemporer, sering kali, penafsiran-penafsiran itu mendatangi kita melalui media dan komunikasi massa. Dalam hal ini, kita biasanya menafsirkan gambaran-gambaran dan

cerita-cerita yang mendatangi kita melalui para koresponden asing dan/atau buletin-buletin berita-berita televisi yang selektif dan, mungkin, bias dalam ulasan mereka tentang peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian. Dalam keadaan seperti itu, sangatlah bijak untuk mempertanyakan gambaran dunia apa yang dihadirkan pada kita? Pandangan dunia siapa ini? Jenis penafsiran 'apa yang terjadi' dan 'mengapa' seperti apa yang ditawarkan pada kita di sini? Hal ini tidak berarti bahwa suatu penafsiran bisa dibandingkan dengan kejadian yang sebenarnya. Semua yang kita punya adalah penafsiran-penafsiran yang padanya 'pembaca' memasukkan pada peristiwa-peristiwa atau proses-proses tersebut pengertiannya.

Semua kaum posmodernis adalah relativis. Tidak mesti. Yang jelas, kaum posmodernis mengakui bahwa tidak ada fondasi yang paling mendasar bagi sebuah pengetahuan atau sebuah kepercayaan. Oleh karena itu, kita secara kategoris tidak bisa mengatakan 'buruk' terhadap beberapa nilai dan praktik budaya dan yang lainnya sebagai 'lebih baik' atau 'benar' (tetapi lihat di bawah ini).

Kaum posmodernis adalah nihilis yang tidak mempunyai nilai-nilai. Tidak mesti juga. Kita secara kategoris tidak bisa mengatakan 'buruk' terhadap beberapa nilai dan praktik budaya dan yang lainnya sebagai 'lebih baik' atau 'benar'. Namun, pernyataan ini bukanlah tidak konsisten dengan lebih menyukai seperangkat nilai atas lainnya, secara sederhana hal tersebut hanyalah masalah dasar yang kita gunakan untuk menilai pilihan-pilihan tersebut.

Para pemikir posmodern menyangkal kemungkinan emansipasi manusia, dengan demikian, tidak akan menentang praktik-praktik penindasan atau sistem kekuasaan. Tidak. Para pemikir

posmodern menjauhkan diri dari istilah politik 'emansipatoris', lebih menyukai berbicara tentang 'intervensi' atau 'tempat-tempat perlawanan'. Konsepsi emansipasi terlalu berhubungan dekat dengan bahasa ideologi-ideologi tua seperti Marxisme yang sering kali melakukan penindasan ketika mereka telah berhasil dalam meraih kekuasaan politik. Hal ini tidak kemudian berarti bahwa kaum posmodernis akan diam atau ketakutan menghadapi serangan atau penindasan, seperti yang telah dibuktikan dari diskusi sebelumnya tentang Stalinisme dan pembantaian Nazi terhadap orang-orang Yahudi dan kelompok minoritas lainnya. ✦

Daftar Pustaka

Ashley, R.K. dan Walker, R.J.B. (1990), 'Speaking the Language of Exile', *International Studies Quarterly*, Vol. 34, No. 3, hlm. 259-268.

Campbell, D (1998), *Writing Security: United States Foreign Policy and the Politics of Identity* (edisi revisi), Manchester: University of Manchester Press.

Connoly, W. (1993), *Political Theory and Modernity* (edisi kedua), Ithaca: Cornell University Press.

Der Derian, J. dan Saphiro, M. (ed.). (1989), *International/ Intertextual Relations: Postmodern Readings of World Politics*, Lexington, MA: Lexington Books.

Derrida, J. (1978), *Writing and Difference*, London: Routledge dan Kegan Paul.

Devetak, R. (1996), 'Postmodernisme', dalam Burchill, S. dan Linklater, A. (ed), *Theories of International Relations*, London: Macmillan.

Edkins, J. (1999), *Poststructuralism and International Relations: Bringing the Political Back In*, Boulder, CO: Lynne Rienner.

Foucault, M. (1979), *Discipline and Punish: The Birth of the Prison,* Harmondsworth: Penguin.

Foucault, M. (1989), *The Archaeology of Knowledge,* London: Routledge.

Heidegger, M. (1969), *Identity and Difference,* New York: Harper & Row.

Heidegger, M. (1990), *Basic Concepts,* Bloomington: Indiana University Press.

Nietzsche, F. (1954), *The Portable Nietzsche,* New York: Viking Press.

Nietzsche, F. (1990), *Unmodern Observations,* New Haven: Yale University Press.

Rosenau, P. (1991), *Postmodernisme and the Sosial Sciences Insights, Inroads and Intrusions,* Princeton: Princeton University Press.

Walker, R.B.J. (1987), *One World: Struggles for a Just World Peace,* London: Zed Books.

Walker, R.B.J. (1993), *Inside/Outside: International Relations as Political Theory,* Cambridge: Cambridge University Press.

Weber, C. (1995), *Simulating Sovereignity: Intervention, the State and Symbolic Exchange,* Cambridge: Cambridge University Press.

—◆◆—

Bab 6 Feminisme

Pendahuluan

Kebanyakan definisi-definisi feminisme berpusat pada tuntutan untuk kesetaraan antara jenis-jenis kelamin atau persamaan hak bagi perempuan. Karena itu, para mahasiswa yang baru mempelajari feminisme dan HI sering menganggap bahwa feminisme identik dengan perempuan. Seperti yang akan kita lihat di bawah ini, para kaum feminis banyak membahas topik kesetaraan seksual dan hak-hak perempuan. Akan tetapi, definisi yang dangkal ini tidak sepenuhnya mencerminkan kekayaan dan luasnya pemikiran feminis. Tidak benar bahwa isu-isu kesetaraan dan persamaan hak merupakan satu-satunya pusat perhatian feminisme. Lebih jauh lagi, seperti halnya perspektif-perspektif lain, terdapat perbedaan paham-paham dari pemikiran feminis yang tercermin dalam apa yang secara luas diistilahkan sebagai 'Hubungan Internasional Feminis'.

Pada bab ini, kami tidak bermaksud untuk mengabaikan perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam pemikiran feminis. Sebaliknya, kami justru membeberkan berbagai pemikiran yang mendasari pemikiran feminis di bagian asal

usul dan, sesekali, akan mengalihkan perhatian Anda pada perbedaan-perbedaan yang ada dalam pemikiran feminis itu sendiri di bagian asumsi dan tema-tema —sekiranya hal itu perlu dan berguna saja. Akan tetapi perlu diketahui, seperti pada bab-bab lainnya, tujuan kami di sini adalah mencoba menyederhanakan segala kerumitan yang ada dalam topik feminisme. Pada tahap ini kami hanya akan mencoba memberi Anda kosakata dasar yang akan sangat membantu Anda dalam melakukan kajian yang mendalam (*in-depth study*). Meski ide-ide feminis *standpoint* dan feminis *posmodern* banyak digunakan dalam bab ini, sebagian besar dituturkan dari sudut pandang feminisme liberal dan kritis. Kami berharap bahwa dengan cara ini, di akhir bab ini, Anda akan dapat menyelami nuansa-nuansa pemikiran feminis dan semua kritiknya terhadap pendekatan-pendekatan tradisional dalam HI. Lewat pembelajaran yang lebih jauh lagi, Anda akan mencapai suatu pemahaman yang lebih baik mengenai persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dalam paham-paham pemikiran feminis dan bagaimana hal ini tercermin dalam literatur Hubungan Internasional Feminis.

Meski mengakui bahwa feminisme mirip dengan sebuah 'gereja yang luas' (baca: sesuatu yang dipenuhi dengan aliran dan doktrinasi —Pen.), kami tetap berpendapat bahwa bukanlah hal yang tidak mungkin untuk mengonstruksi suatu 'perspektif' feminis dalam ruang lingkup yang lebih terbatas. Istilah 'perspektif' bisa digunakan untuk menjelaskan suatu cara pandang tentang dunia yang memprioritaskan tampilan, isu-isu, atau proses-proses tertentu. Menurut sejarah, titik *pancal* bagi kaum feminis dalam usahanya mengonstruksi pengetahuan tentang dunia adalah keseharian dan pengalaman-pengalaman para perempuan. Para kaum

feminis mempertanyakan tentang bentuk hubungan internasional dunia jika seandainya kita menjadikan isu-isu tentang perempuan menjadi tema sentral —bersama dengan tema sentral lain— daripada mengesampingkannya? Seperti apakah pemahaman kita tentang kekuasaan ter-revisi ketika kita mau mempertimbangkan cara-cara di mana perempuan mengalami berbagai bentuk penguasaan atau otoritas? Kira-kira apa yang akan kita nilai sebagai sesuatu yang vital dalam tercapainya jaminan keamanan ketika kita memprioritaskan pada hal-hal yang paling ditakuti oleh perempuan? Kaum feminis telah memusatkan perhatian pada perempuan, karena mereka percaya bahwa perempuan telah mengalami diskriminasi dan menerima perlakuan yang tidak setara. Feminisme, dengan demikian, merupakan suatu pandangan dunia yang melakukan perlawanan, yang dikonstruksi dari sudut pandang atau pengalaman-pengalaman suatu kelompok yang termarjinalkan.

Kotak Informasi

Kacamata Kaum Feminis tentang Ekonomi Politik Internasional

Sejak lama, perempuan diabaikan dan dipinggirkan dalam studi Hubungan Internasional. Pada umumnya dipercaya bahwa posisi perempuan berada di luar wilayah studi hubungan internasional karena perempuan dipandang tidak relevan terlibat dalam hubungan antar-negara. Bahkan, disiplin keilmuan Ekonomi Politik Internasional, yang merupakan adik dari studi hubungan internasional, dulu sangat banyak membahas negara dan pasar. Jauh dari anggapan tidak relevan, posisi perempuan, sebaliknya, sangatlah penting dalam studi ekonomi politik internasional.

Contohnya, kebijakan-kebijakan penyesuaian struktural, yang oleh IMF ditetapkan kepada para negara pengutang sering kali mengharuskan para pemerintah di negara-negara tersebut untuk meningkatkan ekspor dan memotong dana sosial dan subsidi (lihat bab 3). Hal ini dibenarkan oleh ideologi ekonomi neo-liberal yang menekankan keefektifan pasar bebas (lihat bab 2). Sebagai penjamin pemenuhan kesehatan dasar dan kesejahteraan sosial, kebijakan utang yang dilakukan negara dan penyesuaian struktural yang mengikutinya sangat berimbas pada perempuan. Ketika negara melalaikan tanggung jawabnya dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan beban biasanya jatuh ke pundak kaum perempuan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan ini. Tenaga kerja perempuan terus ditambah guna sebagai kompensasi terhadap pemotongan subsidi dalam pelayanan-pelayanan publik.

Beban utang dan kebijakan-kebijakan ekonomi, yang dikondisikan oleh perekonomian global dan lembaga-lembaga internasional, memberikan dampak-dampak tertentu terhadap perempuan di negara-negara di seluruh dunia dan, selanjutnya hal ini, berdampak sangat besar terhadap anak-anak dan kesehatan mereka di masa mendatang dan juga kesejahteraan dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan.

Dalam teori feminis kontemporer, perhatian tidak lagi sepenuhnya dipusatkan pada kehidupan perempuan, tetapi mencakup juga suatu analisis gender. Gender menjelaskan hubungan antara jenis kelamin di suatu kelompok masyarakat atau budaya di mana pun. Jika gender ditentukan secara sosial dan budaya, maka sebagai konsekuensinya gender berkaitan dengan, tetapi tidak sama dengan, jenis kelamin secara biologis. Jika tidak ada karakteristik bawaan atau mutlak dari laki-laki atau perempuan yang berakar pada jenis kelamin yang berbeda, maka muncul suatu pertanyaan: mengapa nilai-nilai atau sifat-sifat yang diidentikkan dengan 'maskulin' atau 'feminin' dianggap berhubungan dengan laki-laki dan perempuan secara biologis?

Sementara kaum feminis memiliki perbedaan-perbedaan dalam penekanan, dalam analisis, dan dalam penjelasan-penjelasan yang mereka hasilkan, terdapat juga kesepakatan yang disetujui banyak di antara kaum feminis bahwa gender paling tepat dipahami dalam kerangka hubungan-hubungan kekuasaan. Selama akhir 1960-an dan awal 1970-an, selama 'gelombang kedua' dari aktivisme kaum feminis di Barat, para kaum feminis mengembangkan suatu analisis mengenai gender dan hubungan kekuasaan. Hal ini kemudian menghasilkan suatu bentuk perhatian yang lebih besar terhadap tingkat di mana kehidupan perempuan terhubung dalam seluruh cakupan praktik-praktik sosial dan dibentuk atau ditentukan oleh institusi-institusi sosial dan politik dan menguatnya ide-ide tentang kemurnian atau kebenaran dari kesenjangan jenis kelamin. Jadi, ketika beberapa kaum feminis kontemporer lebih suka memusatkan perhatiannya pada masalah gender daripada tentang perempuan itu sendiri, masalah-masalah kekuasaan dan kesenjangan tetap saja masih menjadi titik fokus dari pemikiran feminis.

Kotak Refleksi

Apakah laki-laki berasal dari Mars?

Dalam pengggunaan sehari-hari, istilah gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan utama antara laki-laki dan perempuan. Anggapan bahwa perbedaan gender berasal dari perbedaan jenis kelamin secara biologis dan merupakan hal yang 'natural' masih terus dipercaya dalam budaya populer. Contohnya, premis dari sebuah buku *best-seller* terkini yang berjudul *Men are from Mars: Women are from Venus*, seolah menegaskan bahwa perbedaan gender berakar dari jenis kelamin berbeda dan bahwa menerima perbedaan itu adalah tahap

pertama dalam mencapai hubungan harmonis. Akan tetapi, karakteristik-karakteristik tersebut yang dipercaya merupakan milik 'laki-laki' atau 'perempuan', contohnya rasionalitas atau emosi, kompetitif atau kecenderungan untuk mengikuti konsensus, ke-agresif-an atau kepatuhan, sangat beragam dalam berbagai masyarakat dan lintas budaya. Pengertian-pengertian sosial yang diidentikkan dengan perbedaan jenis kelamin juga mengalami perubahan dari jaman ke jaman. Oleh karena kepercayaan-kepercayaan yang ada tentang gender sangat beragam di berbagai masyarakat, budaya, dan jaman, maka sangatlah sulit untuk menyetujui alasan bahwa perbedaan gender bagaimanapun juga mencerminkan perbedaan karakteristik. Kaum feminis tertarik pada studi gender karena seolah-olah di berbagai negara dan budaya, nilai-nilai, karakteristik atau peran 'maskulin' cenderung sangat lebih diakui daripada yang dianggap 'feminin'. Ide-ide tertentu tentang gender telah digunakan untuk membenarkan perbedaan dan biasanya perlakuan yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Kaum feminis mempertanyakan: siapa yang berkuasa untuk memutuskan apa yang sebenarnya menjadi ciri atau peran maskulin atau feminin? Siapa yang berkuasa memutuskan penghargaan sosial pada peran-peran tersebut? Mungkin berguna di sini mereflek-sikan asumsi-asumsi Anda tentang bagaimana tingkah laku disebut 'maskulin' dan 'feminin' dan apakah Anda percaya pandangan-pandangan seperti itu benar-benar tepat bagi orang-orang lain yang ada dalam masyarakat lainnya. Bisakah Anda pikirkan contoh-contoh dari perbedaan-perbedaan?

Guna menjaga tujuan kami untuk memberikan suatu pendahuluan bagi setiap perspektif yang dibahas dalam buku ini, pada bab ini kami akan membatasi diri untuk hanya mengggambarkan suatu 'posisi feminis' dalam wilayah-wilayah kunci yang telah lama dikenal sebagai pusat perhatian studi Hubungan Internasional. Para kaum feminis telah menulis tentang subjek dari konflik dan kekerasan; telah memberikan sumbangan pada perdebatan tentang

perdamaian dan keamanan; melancarkan suatu kritik kepada negara; mengonseptualisasikan kekuasaan; menyarankan visi-visi alternatif tentang identitas dan komunitas, dan mengembangkan suatu analisis tentang tatanan dan institusi-institusi dunia. Dalam semua wilayah ini, kami akan coba untuk menunjukkan bahwa dengan memulai dari posisi kehidupan perempuan akan memberikan suatu perspektif yang berbeda terhadap cara kita memahami karakteristik dari, katakanlah, identitas atau permasalahan dalam mencapai keamanan. Akan tetapi, kami juga akan berusaha untuk tidak hanya memusatkan perhatian pada kehidupan perempuan, untuk menggali pemahaman tentang gender dan hubungan gender dalam studi hubungan internasional. Hal ini akan berarti memasukkan juga isu-isu tentang kekuasaan dan ketidaksetaraan.

Sebagai ringkasan, kami menyatakan bahwa suatu perspektif feminis: (1) menggunakan gender sebagai suatu kategori utama dari analisis; (2) menganggap gender sebagai sebuah jenis hubungan kekuasaan tertentu; (3) mencermati penggolongan publik/privat sebagai isu utama dalam pemahaman kita tentang hubungan internasional; (4) menelusuri cara-cara di mana ide-ide tentang gender dapat menjadi sesuatu yang sangat bernilai bagi usaha untuk memfungsikan lembaga-lembaga internasional utama; (5) menyarankan agar gender 'ditanamkan' dalam tatanan internasional; dan (6) menentang asumsi-asumsi dominan yang membagi apa yang penting atau tidak penting, atau apa yang marjinal atau sentral, dalam studi hubungan internasional.

Asal Usul

Perdebatan teoretis yang sangat terbuka mengenai Hubungan Internasional pada akhir 1980-an, menciptakan suatu ruang bagi para sarjana feminis dalam sebuah disiplin yang, hingga saat itu, telah sangat mengabaikan gender. Bagaimanapun, studi Hubungan Internasional bersudut pandang feminis yang mempergunakan suatu tradisi pemikiran feminis yang sangat kaya dan beragam berasal dari jaman delapan belas abad yang lalu.

Kotak Konsep

Kapan seorang Feminis bukan seorang Feminis?

Beberapa pendahulu yang kami sebutkan di sini adalah kaum feminis dalam kerangka bahwa mereka memunculkan isu-isu yang telah memengaruhi kaum feminis berikutnya dan memberikan pemahaman yang 'feminis'. Tapi, seperti halnya Thucydides (lihat bab 1) yang tidak menyebut dirinya sendiri sebagai seorang realis, maka tidak semua para pemikir yang disebutkan di sini menyebut diri mereka sebagai feminis. Tapi, seperti halnya tulisan Thucydides memengaruhi realisme, para pemikir ini bisa dianggap berpengaruh dalam pemikiran feminis.

Terdapat beberapa cara dalam menggolongkan feminisme. Pada bagian ini, kita akan mengikuti suatu bentuk penggolongan konvensional yang membagi feminisme ke dalam paham-paham liberal, Marxis, radikal, *standpoint*, kritis dan posmodernis. Bagaimanapun, kami juga akan mencoba untuk menelusuri sejarah pemikiran dan praktik-praktik feminis dengan membuat sketsa hubungan antara feminisme dengan wacana-wacana *Enlightenment* mengenai kemajuan sosial dan emansipasi manusia. Dengan cara ini,

kami berharap untuk mengemukakan tidak hanya perbedaan-perbedaan utama dalam beragam paham-paham dalam feminisme, tetapi juga beberapa asumsi umum.

Feminisme bisa dilihat sebagai suatu fenomena yang jelas modern. Dalam pengertian ini, mungkin akan sangat membantu jika kita melihat kembali pembahasan sebelumnya tentang modernitas (lihat bab 4 dan 5). Pengertian modern bahwa masyarakat manusia mengalami kemajuan, sejalan dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan, bukannya takhayul dan kepercayaan, mendorong seorang liberal seperti Elizabeth Stanton (1815-1902) berpendapat bahwa 'ilmu sosial' menunjukkan status perempuan merupakan salah satu ukuran kemajuan dan peradaban masyarakat. Meski tidak secara terang-terangan menyebut diri mereka 'feminis' (lihat kotak di atas), perempuan seperti Stanton menyuarakan seperangkat fokus dan tuntutan yang jelas akan kita kenali punya kecenderungan feminis. Sebagai contohnya, dia berpendapat bahwa posisi perempuan tidak diatur oleh Tuhan atau ditentukan oleh alam. Dalam perspektif seorang liberal, kesempatan untuk berpartisipasi dalam ruang publik merupakan kunci atau hal utama dalam usaha meningkatkan status perempuan. Para penganut paham liberal berpendapat bahwa perempuan, seperti halnya laki-laki, mampu untuk mengembangkan kapasitas intelektual dan kemajuan moral. Hal ini berarti bahwa perempuan, seperti halnya laki-laki, adalah juga makhluk yang rasional sehingga mempunyai hak untuk ikut serta dalam kehidupan publik —memberikan sumbangan pada perdebatan tentang isu-isu politik, sosial, dan moral— daripada sebagai makhluk yang terkurung dalam ruang privat di rumah dan keluarga, yang diwakili oleh laki-laki sebagai 'kepala rumah tangga'.

Kotak Penulis

Mary Wollstonecraft

Sebagai seorang pemikir Inggris yang radikal dan penulis Feminisme Mary Wollstonecraft, Wollstonecraft banyak dipandu oleh pengalaman-pengalamannya atas berbagai diskriminasi yang dialaminya. Oleh karena didorong hasratnya yang demikian besar pada masalah pendidikan bagi remaja perempuan, Wollstonecraft menerbitkan sebuah buku mengenai masalah tersebut yang berjudul *Thoughts on the Education of Daughters* pada 1787 dan sangat berperan dalam pendirian sebuah sekolah remaja perempuan di Newington Green. Bagaimanapun, dia menjadi sangat terkenal karena tulisannya yang berjudul *A Vindication of the Rights of Woman* tahun 1972, yang dalam buku tersebut ia menggunakan argumen-argumen liberal untuk memperjuangkan persamaan hak dan kesempatan bagi perempuan. Buku itu sangat menggemparkan pada saat itu, seperti juga gaya hidup tak lazim yang dijalani oleh Wollstonecraft. Pada kenyataannya, Wollstonecraft juga mengalami nasib yang dialami oleh kaum perempuan pada umumnya. Dalam hal ini, karyanya tidak dinilai atau dipahami berdasar kualitas buku tersebut, tetapi dirujukkan juga dalam konteks penampilan dan tingkah lakunya. Dia mendapat julukan, di antara banyak julukan lain yang ditempelkan pada pribadinya, 'A Hyena in Petticoats' (seekor hyena[semacam anjing liar] dalam wujud perempuan —Peny.). Wollstonecraft menolak untuk tunduk pada tekanan-tekanan kepada perempuan untuk berperilaku sesuai dengan pengertian-pengertian konvensional tentang 'feminitas', untuk berlaku sopan, kalem, dan, di atas semua itu, tidak berkelakuan seperti laki-laki. Dia melakoni berbagai petualangan dan percintaan, sebelum pada akhirnya menikah dengan William Godwin, setelah dia hamil. Wollstonecraft meninggal saat melahirkan pada 1797. Anaknya tumbuh dan mencapai popularitasnya sendiri sebagai Mary Wollstonecraft Godwin Shelly, pencipta Frankenstein. (informasi dari : Tuttle, L. (1986), *Encyclopedia of Feminism,* London: Arrow Books).

Akan tetapi, pada saat kaum feminis liberal sedang memperjuangkan hak-hak perempuan, para penganut Marxist malah berpendapat bahwa persamaan hak tidak akan berujung pada emansipasi perempuan. Dari perspektif seorang Marxist, istilah 'hak' berakar pada suatu pandangan tentang sifat asli manusia yang sangat individualistik dan anti-sosial. Lebih lanjut, berakhirnya kepercayaan terhadap agama dan religi tradisional tidak akan begitu saja mengakhiri kesenjangan yang dialami perempuan, karena kapitalisme menciptakan bentuk-bentuk subordinasi sosial yang baru. Pada abad berikutnya, kaum feminis Marxist mengembangkan suatu analisis mengenai hubungan antara kapitalisme, pembagian tenaga kerja berdasarkan jenis kelamin yang sedang berlaku pada saat itu, dan kesenjangan yang dialami perempuan.

Hal terpenting dari posisi feminis-Marxist adalah argumen mereka yang menjelaskan bahwa kemunculan kapitalisme sebagai suatu sistem sosial dan ekonomi melahirkan suatu pembagian yang nyata antara ruang publik di dunia kerja dan ruang privat di rumah dan keluarga. Hal ini menuntun munculnya ide-ide tertentu tentang apa yang dianggap sebagai 'kerja' dan 'produksi' dan dalam proses ini 'pekerjaan perempuan', menjadi diremehkan dan direndahkan. Kerja perempuan dikonstruksi sebagai *'a labour of love'* (suatu kerja atau kegiatan, biasanya sulit dan keras, yang dilakukan bukan karena uang tetapi lebih karena kesenangan —Peny.) yang seolah tidak membutuhkan penghargaan finansial. Laki-laki kepala rumah tangga merupakan 'pencari nafkah' yang memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Analisis Marxist menunjukkan bahwa rumah dan keluarga telah dipandang sebagai wilayah-wilayah 'privat' dari kehidupan

manusia; yang jelas terpisah dan berbeda dari wilayah publik. Di dalam wilayah privat ini hubungan manusia semestinya berdasar pada kasih sayang dan partikularisme. Dengan asumsi tersebut, maka suatu hubungan laki-laki dengan istri dan keluarganya kemudian tidaklah lagi dapat dihubungkan dengan prinsip-prinsip keadilan dan persamaan yang lebih abstrak dan universal yang mengatur seluruh orang di ruang publik.

Akan tetapi, pandangan tentang keluarga yang diidealisasi ini mengaburkan realitas hubungan kekuasaan dan kesenjangan yang terdapat di wilayah publik maupun juga di wilayah privat. Konstruksi pemisahan antara publik/privat secara efektif meletakkan perempuan dan anak-anak, pada posisi kepemilikan pribadi dari kaum laki-laki. Hal itu juga mengakibatkan peran vital para perempuan yang bekerja di rumah tanpa bayaran bagi perekonomian kapitalis menjadi tidak terlihat. Perempuan, yang melahirkan para tenaga kerja, menyediakan pelayanan dukungan yang penting bagi kapitalisme melalui kerja yang mereka lakukan di rumah dan memberikan pengurangan efek buruk dalam dunia kerja laki-laki yang penuh persaingan, rasa keterasingan, tekanan, dan eksploitasi dengan memberikan sebuah 'tempat yang aman dan tenang dalam dunia yang tidak berperasaan'. 'Privatisasi' perempuan memberikan kesempatan bagi pengeksploitasian tenaga mereka, sementara pada saat yang sama mengaburkan eksploitasi ini di balik topeng ide-ide tentang pembagian kerja menurut jenis kelamin yang dianggap wajar dan dependensi perempuan terhadap laki-laki.

Permasalahan-permasalahan ini —kontribusi perempuan terhadap perekonomian global, ide-ide umum tentang kewajaran dari peran gender, dan pemisahan antara ruang

publik dengan privat— merupakan inti dari kritik feminisme dalam HI. Penekanan terhadap sifat eksploitatif kapitalisme ini telah membuat kaum feminis Marxist (dan kaum feminis kritis kontemporer) menyimpulkan bahwa perempuan mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama di luar segala perbedaan yang mereka miliki. Sebagaimana ilustrasi kehidupan pernikahan pada 1950-an ini akan menjelaskan, konstruksi perempuan sebagai seseorang yang mendapatkan kebahagiaan sejati melalui tindakan yang mereka jalankan dalam peran mengasuh, memberi perhatian dan dukungan, masih berlaku dengan baik hingga abad ke-20.

Kotak Literatur

Kehidupan Pernikahan

1. Siapkanlah makan malam. Rencanakan sebelumnya (bahkan semalam sebelumnya) untuk menyiapkan makanan enak tepat waktu. Inilah cara membuatnya tahu kalau Anda memikirkannya dan peduli akan kebutuhan-kebutuhannya. Kebanyakan laki-laki merasa lapar saat mereka pulang ke rumah dan makanan yang enak adalah bagian penyambutan hangat yang sangat dibutuhkannya. 2. Siapkan diri Anda: ambil lima belas menit untuk istirahat sehingga Anda akan segar kembali ketika dia sampai. Pakailah *make up* dan tampillah segar. Dia telah lelah seharian bekerja keras. Jadilah periang dan sedikit lebih menarik. Dorongan semangat adalah hal yang dia butuhkan. 3. Rapikanlah tempat tinggal Anda. Periksalah setiap sudut rumah; bereskanlah buku-buku sekolah, mainan, kertas-kertas dan sebagainya. Lalu, taplaki meja. Suamimu akan merasa singgah di suatu tempat nyaman dan rapi dan hal itu akan juga memberikan diri Anda semangat. 4. Siapkan anak-anak. Ambil beberapa menit untuk mencuci tangan dan wajah mereka jika masih kecil, keramasi rambut mereka dan, jika perlu, ganti baju mereka. Mereka adalah harta yang berharga dan dia akan sangat senang melihat mereka terawat dengan baik. 5. Kurangi kebisingan.

Pada saat dia datang, hilangkan semua kebisingan dari mesin cuci baju, pengering, mesin cuci piring atau penyedot debu. Usahakan anak-anak diam. Senanglah melihatnya. Hadiahi dia dengan senyuman hangat dan senanglah melihatnya. 6. Jangan menyapa dia dengan berbagai masalah dan keluhan. Jangan mengeluh jika dia terlambat makan malam bersama Anda — anggaplah itu hal kecil dibandingkan apa yang mungkin telah ia alami seharian. 7. Buat dia nyaman. Biarkan dia bersandar di kursi yang nyaman atau sarankan untuk berbaring di tempat tidur. Siapkan minuman dingin atau hangat. Susun bantalnya dan bantulah dia buka sepatunya. Bicaralah dengan suara yang rendah, sejuk dan menyenangkan. Biarkan dia tenang dan istirahat. 8. Dengarkan dia. Anda mungkin punya selusin hal yang ingin diceritakan padanya tetapi saat kedatangannya bukanlah waktu yang tepat. Biarkan dia bicara dulu. 9. Biarkan malam untuknya. Jangan protes jika dia tidak mengajak Anda makan malam di luar atau ke tempat hiburan lainnya. Coba pahami dunianya yang tegang dan penuh tekanan, kebutuhannya adalah ada di rumah dan tenang. 10. Tujuan: coba buatlah rumah menjadi tempat singgah dan berlindung di mana suami Anda bisa tenang. (Diambil dari a *Home Economics* Manual, diterbitkan tahun 1950).

Konstruksi perempuan sebagai jenis kelamin yang kalem, lebih lemah, makhluk yang bernaluri pengasuh meremehkan kerja perempuan —memasak makanan, memandikan anak-anak dan membereskan kekacauan— hanya sebagai suatu perpanjangan 'alami' dari peran penjagaan mereka. Lebih jauh lagi, kebutuhan-kebutuhan perempuan jelas telah dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting dibanding laki-laki. Bagaimanapun, pada 1960-an pengertian-pengertian idealistik tentang sifat alami perempuan dan kehidupan keluarga seperti itu menjadi mengalami berbagai kritik yang mendalam dan luas cakupannya selama masa yang disebut sebagai gelombang feminisme kedua; contoh-

nya, karya Betty Friedan, *The Feminine Mystique* mengungkapkan secara mendalam posisi perempuan Amerika dari kelas menengah berpendidikan yang serba tidak terakomodasi, yang dibatasi pada wilayah 'privat' dalam perannya sebagai ibu rumah tangga dan seorang ibu.

Kaum feminis radikal memasukkan pemahaman ini ke dalam sifat dan kepentingan dari pembagian antara publik/privat secara lebih jauh lagi. Mereka berpendapat bahwa sesuatu yang 'personal' pada kenyataannya sangatlah politis. Dengan kata lain, bagi kaum feminis radikal wilayah-wilayah kehidupan yang secara konvensional ditandai oleh partikularisme dan cinta, sebenarnya ditandai oleh proses-proses dari subordinasi dan dominasi. Dari perspektif ini, kebebasan perempuan hanya akan diraih melalui suatu perubahan dalam ruang-ruang yang paling pribadi dan intim dalam hubungan manusia. Bagaimanapun, kaum feminis radikal juga mengembangkan konsep patriarki untuk menjelaskan penginstitusionalisasian dominasi laki-laki terhadap perempuan dan menunjukkan bahwa gender bukan hanya suatu masalah mengenai identitas individu atau seksualitas. Struktur hubungan gender yang ada dalam suatu masyarakat ditentukan, sebagian besar, oleh keberadaan lembaga-lembaga dan praktik-praktik sosial, seperti misalnya, lembaga pernikahan, atau keluarga, atau sistem pendidikan yang ada untuk menguatkan hubungan kesenjangan dan subordinasi.

Kaum feminis kritis akan meneruskan pemahaman ini ke dalam sifat dasar lembaga-lembaga sosial dan politik yang patriarkal. Kaum feminis kritis juga menekankan pentingnya ide-ide tentang gender dalam mengukuhkan dan mengekalkan bentuk kesenjangan sosial semacam yang

dialami kaum perempuan. Kaum feminis radikal mengkritik kaum feminis liberal dan feminis Marxis karena mereka melihat keduanya sebagai pihak yang mendorong perempuan untuk meniru laki-laki atau hal-hal yang menjadi 'nilai-nilai laki-laki'. Aksi peniruan tersebut akan berakibat pada berkurangnya karakter, nilai-nilai dan peran-peran yang 'feminin'. Kaum feminis radikal berpendapat bahwa ke-feminin-an seharusnya dijunjung. Lebih lanjut lagi, pengalaman-pengalaman perempuan dalam peran pemeliharaan dan pemberi perhatian seharusnya dipertimbangkan suatu hal yang penting nilainya dalam proses pembentukan suatu pengalaman feminin tertentu dan, mungkin saja, suatu sudut pandang tersendiri.

Kotak Konsep

Feminisme *Standpoint*

Landasan teori feminisme kontemporer ditarik dari konsep feminis radikal yang berpendapat bahwa perempuan mempunyai karakteristik dan nilai yang berbeda sebagai suatu konsekuensi proses sosialisasi, jika bukan secara alami. Para teoretisi *standpoint* dalam studi Hubungan Internasional memberikan penekanan pada cara-cara yang berbeda dalam memandang dunia, tempat kita di dalamnya dan hubungan kita terhadap yang lainnya yang muncul dari perngalaman-pengalaman laki-laki dan perempuan yang jelas berlainan dan implikasi pengalaman-pengalaman tersebut pada cara kita mengonstruksikan pengetahuan tentang dunia. Hal ini melibatkan usaha memindahkan perempuan 'dari posisi margin ke pusat' sebagai subjek dari pengetahuan. Dalam usaha mengadopsi sebuah landasan berpikir feminis sasaran pertamanya adalah membalik cara pemahaman kita terhadap peristiwa-peristiwa. Kemudian, menguak asumsi-asumsi tersembunyi dalam teori-teori dominan atau pandangan umum tentang dunia. Para pemikir *stand-*

point telah menyatakan, misalnya, kegagalan para ilmuwan sosial untuk menjawab isu-isu tentang seksualitas, perkawinan, pengasuhan, dan praktik-praktik sosialisasi sebagai problematika yang khusus manusia dan berpendapat bahwa kegagalan ini merefleksikan *standpoint* (baca: landasan pikir) 'laki-laki terhadap bias tertentu ini mencerminkan posisi mereka yang menguntungkan. Bagaimanapun, meski feminisme *standpoint* telah terbukti berguna sebagai suatu model kritik, yang membeberkan bias gender dalam banyak teori HI, di dunia masyarakat awam feminisme *standpoint* telah dikritik dengan tidak ada inti 'sifat dasar perempuan' atau pengalaman-pengalaman universal tentang 'keperempuanannya' yang bisa digunakan untuk merekonstruksi teori. Kita kembali pada pembahasan tentang feminisme posmodern di bawah ini.

Sejauh ini, kisah kami tentang sejarah teori dan praktik feminis telah membicarakan banyak mengenai feminisme di dunia Barat. Bagaimanapun, teori maupun praktik dari feminisme telah dibentuk oleh perkembangan-perkembangan yang terjadi di masyarakat-masyarakat non-Barat. Lebih dari dua abad terakhir, masyarakat-masyarakat non-Barat juga telah mengalami perubahan-perubahan sosial, politik, dan budaya yang radikal, yang sebagai akibatnya, telah memengaruhi kehidupan perempuan dan laki-laki dan juga hubungan gender. Pada periode setelah Perang Dunia Kedua kebanyakan masyarakat di seluruh dunia mengadopsi strategi-strategi 'modernisasi', yang memberikan pengaruh kuat terhadap tatanan sosial dan ekonomi serta kehidupan politik di berbagai negara.

Sejak menetapkan *Decade for Women* tahun 1975, agensi-agensi pembangunan PBB memasukkan seksi-seksi yang secara khusus ditugaskan untuk meningkatkan posisi perempuan dalam proses-proses pembangunan. Akan tetapi, strategi-strategi pembangunan, yang terlalu menganut cara-

cara Barat, nilai-nilai liberal, dan bergerak untuk memasukkan strategi-strategi bagi pembangunan perempuan di seluruh dunia telah menciptakan beberapa ketegangan dan kontradiksi. Di satu sisi, kehidupan perempuan dan laki-laki memang telah ditransformasikan oleh modernisasi — atau yang baru-baru ini disebut sebagai globalisasi— tetapi mereka juga terus dijerat dalam serangkaian praktik dan didikte oleh ide-ide umum tentang gender yang ada dalam suatu masyarakat. Sementara kemungkinan bahwa kaum perempuan tidak menerima status yang setara dengan laki-laki di berbagai kelompok budaya ataupun masyarakat semakin tampak benar, posisi tertentu kaum wanita di dalam bagian dari suatu kelompok budaya atau pengertian yang diasosiasikan pada 'feminitas' dalam konteks tersebut memberikan perempuan saluran/akses pada sumber dan sejumlah kekuasaan sosial tertentu. Pada saat yang sama, beberapa negara yang disebut negara-negara berkembang mempunyai sejarah dominasi penjajahan atau imperialisme dan, tak heran, menjadi skeptis tentang ide bahwa kemajuan dan kebebasan akan datang dengan mengikuti model pembangunan sosial dan ekonomi Barat.

Terdapat suatu tema anti-universalis yang kuat dalam feminisme posmodern. Para postmodernis tertarik akan hubungan gender sebagai suatu perwujudan tertentu dari hubungan kekuasaan. Akan tetapi, kaum feminis posmodern tidak bergantung pada beberapa konsep kebebasan atau emansipasi perempuan yang berasal dari pengalaman Barat sebagai sebuah resep atau model bagi emansipasi perempuan. Sebaliknya, kaum feminis posmodern memusatkan perhatian pada beberapa perubahan dan kegiatan maupun strategi yang dikontekstualisasikan secara sosial

yang perempuan gunakan untuk meningkatkan posisi sosial mereka. Jadi, misalnya, seorang sarjana feminis posmodern akan bersedia melepas penetapan teori yang berdasarkan pada ide-ide yang terlalu terburu-buru tentang 'kepentingan perempuan' atau 'emansipasi' dan memusatkan perhatian pada kejadian nyata dari hari-ke-hari dan mekanisme tersumbatnya akses pada sumber yang ada dalam suatu situasi atau masyarakat.

Lebih lanjut, kaum feminis posmodern berpendapat bahwa sangatlah salah menyamakan budaya dengan 'keterbelakangan'. Strategi-strategi yang dijalankan oleh gerakan liberal '*Woment in Development*' (yang telah berjalan dalam sistem PBB untuk meningkatkan status perempuan) sangat dipengaruhi oleh ide-ide Barat tentang apa yang dianggap sebagai kemajuan. Bagaimanapun, menganggap perempuan di dunia yang 'tak berkembang' sebagai kaum tak beradab, tertindas, dan lemah sangatlah bodoh dan arogan. Kita pun tidak seharusnya menganggap perempuan selalu menjadi 'korban' aksi-aksi penindasan. Wacana-wacana gender pun mungkin juga digunakan di lingkungan tertentu untuk menentukan hal yang perempuan (dan tentunya laki-laki) bisa atau tidak melakukannya, tetapi perempuan bukan berarti tanpa kekuasaan. Sering perempuan akan memiliki kekuasaan dan pengaruh melalui peran-peran tradisional yang dianggap berasal dari mereka dalam masyarakat-masyarakat tertentu. Perempuan juga akan menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia untuk mencapai suatu tingkat kekuasaan terhadap kehidupan mereka sendiri dan untuk memengaruhi orang lain.

Suatu peningkatan sensitivitas terhadap gender, budaya, dan perbedaan-perbedaan mempunyai arti bahwa

sejak 1980-an, posmodernisme telah menjadi suatu pengaruh penting dalam pemikiran feminis. Seperti yang kita lihat dalam bab sebelumnya, Postmodernisme bisa dilihat sebagai suatu kritik radikal terhadap semua metanaratif dari kemajuan dan emansipasi manusia yang pada kenyataannya berdasarkan pada suatu pengalaman Barat tertentu. Postmodernisme juga menempatkan begitu banyak penekanan dan penghargaan pada berbagai ungkapan identitas dan budaya yang berbeda-beda. Para pemikir feminis posmodern berpendapat bahwa tidak ada 'pengalaman perempuan' atau '*standpoint*' otentik yang darinya kita bisa mengonstruksikan suatu pemahaman tentang dunia sosial dan politik, karena kehidupan perempuan terikat dalam hubungan sosial dan budaya tertentu. Lebih-lebih, sebuah pemahaman seseorang tentang pemahaman 'maskulin' atau 'feminine' dibentuk melalui bahasa, simbol-simbol, dan cerita-cerita yang dijalin ke dalam susunan kehidupan sehari-hari dalam masyarakat-masyarakat yang berbeda.

Dalam rangka menyimpulkan bagian 'asal-usul' ini, maka penggambaran persamaan-persamaan maupun perbedaan-perbedaan di antara berbagai paham dalam pemikiran feminis akan sangat membantu. Meski kaum feminis liberal, Marxist, dan radikal saling berbeda pendapat tentang cara kaum perempuan bisa melakukan yang terbaik dalam menghadapi dan mengatasi kesenjangan dan subordinasi, mereka masing-masing cenderung mempunyai pandangan yang cukup optimis tentang kemungkinan-kemungkinan dari kemajuan manusia. Terlebih lagi, peranan seseorang untuk menjadi agen yang aktif dalam proses mewujudkan perubahan sosial adalah faktor yang sangat vital. Sebaliknya, kaum feminis posmodern berpendapat

bahwa tak satu kelompok pun memiliki sebuah *blueprint* bagi emansipasi manusia yang universal. Hal ini bukan berarti bahwa kaum feminis posmodern mempertahankan status quo. Relasi kekuasaan meliputi praktik-praktik budaya dan sosial tertentu, sehingga dalam suatu kebudayaan tertentu kelompok-kelompok dominan akan mampu menetapkan batasan-batasan dan menyusun pengertian-pengertian, dan —dalam prosesnya— melegitimasikan kesenjangan-kesenjangan gender. Penelitian tentang proses wacana-wacana yang dominan tentang gender melegitimasikan praktik-praktik sosial tertentu dan —sebaliknya juga— proses perlawanan yang dilakukan terhadap legitimasi tersebut adalah hal yang sangat mungkin dilakukan, asal penekanannya selalu pada konteks yang lokal dan spesifik.

Asumsi-asumsi

1. Kaum feminis tidak menganggap sifat dasar manusia sebagai sesuatu yang tidak berubah.
2. Dari perspektif seorang feminis, kita tidak bisa membuat suatu pembedaan yang jelas antara suatu 'fakta' dan suatu 'nilai'.
3. Ada suatu hubungan erat antara pengetahuan dengan kekuasaan dan antara 'teori-teori' kita tentang dunia dengan kebiasaan kita —cara kita melibatkan diri dengan lingkungan fisik dan sosial di sekitar kita.
4. Kaum feminis posmodern itu tersendiri (para postmodernis menolak klaim universalitas), kaum feminis memiliki suatu komitmen yang sama pada ide kemajuan sosial dan kebebasan atau emansipasi kaum perempuan.

Kotak Refleksi

- Apakah Anda setuju bahwa perempuan dan laki-laki pada dasarnya sama dan merasa bahwa perbedaan-perbedaan itu hanyalah pengaruh dari diskriminasi? (feminisme liberal).
- Bagaimana pendapat Anda tentang implikasi-implikasi utama terhadap pengajuan suatu pandangan tentang gender sebagai: (a) suatu bentuk kesenjangan khusus yang dikonstruksi sebagai perbedaan yang relevan secara sosial? (feminisme kritis) atau (b) suatu istilah yang kurang tepat digunakan untuk menganggap perbedaan-perbedaan yang relevan secara sosial berasal dari laki-laki dan perempuan itu? (feminisme posmodern).

Tema-tema

Negara dan Kekuasaan

Seperti yang dibuktikan dari diskusi tentang asal usul di atas, kaum feminis liberal tertarik dalam meningkatkan status perempuan di seluruh dunia, meningkatkan partisipasi perempuan dalam kehidupan publik dan mendapatkan akses pada kekuasaan. Meski bekerja dalam suatu kerangka kerja liberal yang secara mendasar pluralis, kaum feminis liberal menyoroti ketiadaan perempuan dari analisis *mainstream*. Kaum feminis liberal mempertanyakan: Di manakah para perempuan dalam hubungan internasional? Apakah status kaum perempuan di seluruh dunia? Sejauh mana perempuan terwakili atau tidak terwakili dalam hubungan internasional? Strategi-strategi terbaik apa untuk mengatasi diskriminasi terhadap perempuan dan memberikan perempuan kekuasaan lebih atas kehidupan dan nasib mereka sendiri?

Memperkenalkan perempuan adalah tahap pertama dalam mengembangkan paham-paham feminis ke dalam

lingkungan negara. Melihat dunia melalui 'kacamata' seorang feminis liberal memberikan kita kesempatan untuk melihat bahwa dunia hubungan internasional —politik internasional, keamanan, kebijakan luar negeri, diplomasi dan ekonomi politik internasional— adalah dunianya laki-laki. Perwakilan-perwakilan negara umumnya adalah laki-laki. Perempuan telah lama terusir dari kekuasaan politik dan saat ini masih tetap tidak terwakili dalam politik elit pemerintahan. Dari perspektif seorang feminis, dapatlah terlihat sedikit sekali perempuan yang terlibat dalam pembuatan kebijakan luar negeri atau pertahanan, sehingga 'kepentingan nasional' selalu ditetapkan oleh para laki-laki dalam pemerintahan.

Seperti yang kita lihat pada bab 2, para penganut liberal memandang negara sebagai seorang wasit yang netral di antara persaingan kepentingan-kepentingan dalam suatu masyarakat yang terbuka dan pluralistik. Kaum feminis liberal mengakui bahwa dalam sejarahnya negara belum sepenuhnya adil dan tidak memihak dalam perlakuannya terhadap perempuan. Bagaimanapun, bagi kaum feminis liberal, dominasi laki-laki umumnya dijelaskan oleh lingkungan dan kejadian sejarah. Seandainya diberikan lebih banyak kesempatan, maka perempuan bisa membuktikan bahwa mereka dapat menyetarakan diri dengan laki-laki. Dengan cara ini, perempuan secara bertahap bisa mengatasi prasangka-prasangka yang ditujukan pada mereka. Suatu masalah utama bagi kaum feminis liberal adalah: menyadari bahwa negara merupakan bentuk organisasi politik yang dominan di seluruh dunia, pada tingkatan apa negara bisa dipandang sebagai suatu kendaraan bagi kebebasan perempuan? Bagi para liberal, 'kebebasan perempuan' akan me-

libatkan suatu strategi multi-bidang untuk meraih dukungan suara, lalu meraih kesempatan yang sama dalam pendidikan, dalam institusi-institusi sosial, dan di tempat kerja. Dari sudut pandang ini, negara bisa dipandang sebagai sebuah kendaraan bagi kemajuan perempuan.

Kaum feminis liberal juga berpendapat bahwa dominasi laki-laki dalam kehidupan internasional publik mempunyai implikasi bagi status perempuan sebagai warga negara. Kaum feminis liberal telah memberikan kontribusi bagi suatu perdebatan tentang negara dan kekuasaan dalam hubungan internasional, tetapi hal ini umumnya terbatas pada suatu diskusi tentang implikasi dari berlanjutnya diskriminasi bagi status perempuan sebagai warga negara. Kaum feminis liberal percaya bahwa perluasan hak-hak bagi perempuan berarti memberikan mereka sebuah kesempatan untuk terlibat dalam tatanan politik dan 'komunitas nasional'. Tentu saja, selama gelombang pertama aktivisme kaum feminis pada abad ke-19 gerakan memperjuangkan hak pilih dan kewarganegaraan perempuan, merupakan lini depan dari kampanye-kampanye feminis. Kini, kaum feminis liberal di Amerika Serikat telah menggunakan alasan serupa dalam kampanye mereka memperjuangkan hak untuk dilibatkan dalam peran-peran di peperangan.

Salah satu tanggapan pada tuntutan kaum feminis liberal tentang ketidakterwakilan dan diskriminasi, yakni menyatakan bahwa pada akhirnya fenomena dominasi laki-laki dalam kehidupan internasional dijelaskan oleh tanggung jawab khusus perempuan yang terbatas dalam 'ruang privat' di rumah dan keluarga. Guna menunjukkan hubungan antara gender dengan hubungan internasional dan melawan legitimasi dari tatanan yang ada ini, kita perlu menguraikan

signifikansi pembagian publik/privat dalam mendukung dan mengekalkan dominasi laki-laki. Kemudian, tahap kedua dalam mengembangkan suatu perspektif feminis terhadap negara adalah menyingkap semua tabir yang selama ini menutupi hubungan kekuasaan yang secara khusus hanya memberikan kesempatan pada gender tertentu yang telah menyebar ke seluruh aspek dalam hubungan internasional, tetapi yang telah dibuat 'tidak nampak' oleh ideologi-ideologi atau wacana-wacana yang kuat yang mendukung 'kewajaran' pembagian tenaga kerja berdasarkan jenis kelamin atau pembenaran 'perbedaan yang relevan dalam lingkup sosial' atas kesenjangan gender.

Dalam uraian singkat kita mengenai suatu perspektif feminis dalam Hubungan Internasional kami telah menyatakan bahwa: (1) gender digunakan sebagai kategori utama dalam analisis; (2) gender merupakan suatu jenis hubungan kekuasaan tertentu; dan (3) pembagian publik/privat merupakan hal penting dalam pemahaman kita terhadap hubungan internasional. Bagaimana pernyataan ini mengabarkan suatu analisis feminis yang cukup kritis mengenai negara dan kekuasaan? Feminisme kritis mengambil titik tolaknya dari kesan tentang negara yang patriarkis. Negara bisa dipandang patriarkis pada suatu batasan bahwa negara mendukung lembaga-lembaga seperti pernikahan dan sebuah bentuk yang lebih khusus dari rumah tangga —keluarga— baik itu yang keduanya mencerminkan dan menopang suatu tatanan sosial yang didominasi laki-laki. Negara juga terlibat pada aktivitas ideologis yang berhubungan dengan isu-isu seks dan gender, mulai dari alat kontrasepsi hingga kebijakan yang mengatur seksualitas —misalnya, dukungan penuh bagi pernikahan heteroseksual— hingga bentuk-bentuk

peraturan dan perpajakan tenaga kerja, yang melembagakan hubungan gender. Negara mungkin dapat menyikapi dengan lebih bijak kesepakatan gaji berdasar gender dengan memberikan sanksi atau 'menutup mata' terhadap realitas tersebut.

Kotak Sejarah

Suffragette

Istilah 'suffragette' pertama kali digunakan sebagai sebuah istilah yang kabur terhadap perempuan Inggris yang melakukan aksi radikal untuk memperjuangkan *suffrage* (hak untuk memilih) bagi kaum perempuan. Pergerakan ini lahir pada Juni tahun 1866 ketika Emily Davis (1830-1921) dan Elizabeth Garret (1836-1917) memberikan suatu petisi yang menuntut hak untuk memilih, yang ditandatangani oleh 1499 perempuan, pada John Stuart Mill, yang bersedia menyerahkannya ke Parlemen. Aksi ini tidak berhasil. Antara tahun 1866 dan 1911, sejumlah rancangan undang-undang diajukan ke Parlemen Inggris, tetapi semua dipatahkan. Frustrasi dengan tidak adanya kemajuan, Emmeline Pankhurst (1858-1928) dan putri-putrinya melakukan suatu kampanye militan agar isu tersebut mendapatkan perhatian publik yang lebih luas, yang dalam aksi tersebut mereka merantai diri mereka sendiri di tangga di Downing Street, menolak membayar pajak, dan bahkan melakukan mogok makan. Salah satu anggota pergerakan, Emily Davison (1872-1913) menjadi martir bagi awal hak perempuan untuk memilih ketika dia meninggal setelah melemparkan dirinya sendiri ke bawah kuda yang ditunggangi raja pada balapan kuda Derby, tahun 1913. *Suffragette* mengalami jeda kampanye mereka dengan pecahnya Perang Dunia Pertama tahun 1914. Di Inggris, perempuan di atas 30 tahun diberi hak pilih tahun 1918. Sepuluh tahun kemudian perempuan mendapatkan perlakuan yang sama dengan laki-laki dengan diberikan hak untuk memilih pada usia 21 tahun. (Informasi dari: Tuttle, L. (1986), *Encyclopaedia of Feminism*, London: Arrow Books).

Lebih-lebih, negara-negara dilibatkan dalam mengatur apa yang sering disebut dengan keputusan-keputusan 'pribadi', mencakup contohnya, seseorang tertentu yang bisa dinikahi dan status resmi anak. Meski tampaknya hubungan gender merupakan urusan pribadi, urusan-urusan ini diatur oleh negara modern melalui perpajakan, keamanan sosial, imigrasi, dan hukum tentang kewarganegaraan, yang semuanya itu menyisakan unsur-unsur suami/garis ayah. Konstruksi perempuan sebagai 'anggota keluarga' yang diidentifikasi hanya dalam kerangka hubungan mereka dengan sang laki-laki, sebagai istri atau ibu, memainkan peran dalam membatasi hak kewarganegaraan. Meskipun penerapan hukum menyangkut hak kewarganegaraan sangat beragam di tiap-tiap negara, tetapi pada intinya adalah bahwa semua negara memiliki kepentingan terhadap orang yang dipilih oleh warga negara mereka untuk dinikahi dan implikasi dari memberikan hak kewarganegaraan pada 'orang asing', sehingga keputusan-keputusan ini tidak bisa dianggap sepenuhnya sebagai suatu pilihan dan kecenderungan individu. Kami akan membahas kembali pada kritik tentang negara dan kewarganegaraan ini dalam bahasan kami tentang identitas dan komunitas nanti.

Kotak Konsep

Tekanan dan Suaka berdasarkan Gender

Meluasnya penerimaan ide hak asasi manusia universal sejak Perang Dunia II mempunyai arti bahwa suatu definisi yang dari kejahatan dan bentuk-bentuk penyiksaan yang lebih luas cakupannya telah diakui dengan alasan bagi suaka. Tindakan represif biasanya dilihat sebagai tekanan oleh negara terhadap kelompok sosial tertentu atas alasan, mungkin, identitas etnis atau

kepercayaan agama, atau yang diakui telah dialami kelompok-kelompok masyarakat tertentu tersebut dalam banyak kasus tanpa mendapatkan perhatian atau perlindungan dari negara.

Tekanan-tekanan berdasarkan gender diartikulasikan dalam berbagai bentuk dan terjadi hampir setiap hari di berbagai negara di seluruh dunia, contohnya pernikahan paksa, tekanan untuk melakukan aborsi atau sterilisasi, atau beberapa hukuman atas pelanggaran aturan-aturan dalam doktrin-doktrin agama atau praktik-praktik budaya. Sering kali tindakan represif seperti itu dihukum oleh negara, tetapi tidak jarang pula diabaikan karena masalah-masalah 'privat' atau 'budaya' dianggap berada di luar dari domain campur tangan negara. Konstruksi perempuan sebagai pihak yang tergantung pada laki-laki, daripada sebagai warga negara yang sepenuhnya independen dan bebas untuk menentukan tujuan mereka sendiri, masih ada hingga saat ini. Para penduduk suatu bangsa masih sering diasumsikan sebagai laki-laki. Konsekuensinya, jenis-jenis kekerasan tertentu, ketakutan, atau tekanan yang diderita perempuan umumnya masih sering dianggap sebagai sesuatu yang masuk dalam wilayah budaya atau privat sehingga sangat jarang dianggap sebagai tindak kekerasan, kejahatan hak asasi manusia, atau alasan bagi permohonan suaka. Oleh karena pengertian yang demikianlah, selama tercatat dalam sejarah, perempuan belum dianggap sebagai suatu 'kelompok sosial', untuk bisa mengajukan jaminan suaka.

Mulai tampak beberapa bukti yang mengindikasikan bahwa hal ini mulai berubah, terima kasih banyak bagi usaha-usaha kelompok-kelompok feminis di seluruh dunia yang telah secara aktif membangun jaringan dan melakukan lobi untuk memengaruhi proses politik, dalam kasus ini adalah dengan telah diakuinya hak-hak perempuan sebagai hak asasi manusia. Pada awal 1984, Komunitas negara-negara Eropa mengakui bahwa tekanan berdasarkan gender dapat dimasukkan dalam kategori suatu kelompok sosial tertentu dan Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi dengan cepat mengikutinya pada 1985, meskipun baik Uni Eropa dan UNHCR tidak tergerak untuk mengakui gender sebagai suatu kategori tersendiri. Perkembangan ini memberikan beberapa alasan untuk menjadi optimis, menandai sebagai-

mana juga memberikan, sebuah terobosan penting dalam menentukan status pengungsi atau pencari suaka yang bakal memberikan kaum perempuan perlindungan di bawah hukum internasional.

Penjelasan singkat tentang beberapa perspektif feminis mengenai negara ini, menentang ide bahwa hubungan gender dan wilayah 'privat' tak berkaitan sama sekali dengan politik, apalagi politik internasional. Dalam usaha untuk 'membumikan politik internasional', feminis berangkat dari wilayah-wilayah kehidupan yang biasanya dianggap 'privat'. Hal itu juga menunjukkan bagaimana hubungan kekuasaan meluas ke bawah dari kebijakan-kebijakan negara dan merupakan suatu bagian integral dari proyek pembangunan negara. Bagaimanapun, perlu dicatat bahwa kaum feminis kritis memandang negara sebagai seperangkat hubungan kekuasaan dan proses-proses politik yang dalam dua proses tersebut, patriarki dikonstruksi dan diuji. Dari perspektif ini, kaum feminis dapat berjuang *melalui* negara untuk berusaha menghasilkan perubahan-perubahan positif bagi perempuan.

Identitas dan Komunitas

Beberapa usaha kaum feminis yang paling menarik dalam HI (hubungan internasional) berlangsung dalam wilayah umum dari gender, seksualitas, dan identitas seksual. Wilayah kajian ini adalah sebagian dari suatu area bahasan tentang seksualitas dan identitas yang lebih luas cakupannya dalam wacana hubungan internasional kontemporer, yang tidak secara eksklusif feminis. Kaum feminis telah membahas beberapa karya ini dalam rangka mengem-

bangkan suatu kritik tentang 'bias' gender serta atas penggambaran maskulinitas dan femininitas yang terlalu kaku yang diterapkan dalam wacana HI yang ortodoks (realis). Kami telah mengacu atau memberikan referensi beberapa literatur penting yang berhubungan dengan topik ini pada akhir bab dan akan mendorong Anda untuk membaca bacaan lebih lanjut dalam wilayah ini. Bagaimanapun, pada bagian ini, kita akan memusatkan perhatian pada implikasi perjuangan kaum feminis terhadap negara terutama atas konsep-konsep komunitas dan identitas dalam Hubungan Internasional.

Kita telah melihat dalam diskusi sebelumnya mengenai posmodernisme bahwa perang, kebijakan luar negeri, diplomasi, dan perwujudan-perwujudan penting lainnya , seperti 'identitas nasional' dan 'kepentingan nasional' kesemuanya merupakan tema penting dalam pembatasan dari lingkup 'komunitas'. Pada saat yang sama, ideologi-ideologi para nasionalis telah digunakan untuk menumbuhkan suatu pengertian identitas yang istimewa dan rasa keterikatan atau persatuan terhadap para 'insider' dan menolak pihak yang berasal dari luar. Tentu saja, nasionalisme dan proyek pembangunan Negara tidak membuat penolakan terhadap kaum perempuan. Sebaliknya, di Barat dan di beberapa negara bekas jajahan baru-baru ini, perjuangan bagi kemerdekaan umum (rakyat) dan kemerdekaan nasional telah mendorong tuntutan atas hak-hak kewarganegaraan dan perempuan sering diuntungkan dari hal ini. Lebih-lebih, jelas bahwa perempuan, seperti halnya laki-laki, biasanya mempunyai perasaan identifikasi yang sangat kuat dengan bangsanya. Bagaimanapun, pemakaian perspektif seorang feminis tentang proyek pembangunan negara di seluruh dunia

mengungkapkan bahwa bahkan ketika menjamin hak-hak formal perempuan, nasionalisme dapat beroperasi untuk melembagakan keistimewaan laki-laki dan sehingga berdampak dengan kewarganegaraan perempuan.

Contoh Dunia

Revolusi Nikaragua

Revolusi 19 Juli 1979 merupakan sebuah revolusi yang sangat anti-imperialis dan nasionalis. Pada saat yang sama revolusi ini juga berusaha mengatasi situasi perempuan yang berada dalam suatu kelompok masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh machismo (tingkah laku macho) dan berhasil mendirikan organisasi-organisasi perempuan. Revolusi itu tidak berhasil, tentunya bukan dalam kerangka dari memperbaiki kesenjangan gender yang sangat mendalam dalam masyarakat Nikaragua, tetapi setidaknya telah berhasil merangsang perdebatan tentang isu-isu seperti 'kerja ganda sehari' dan kekerasan rumah tangga yang sebelumnya telah dianggap sebagai sesuatu yang 'normal'.

Seperti yang kita lihat dalam bab sebelumnya, identitas-identitas nasional —seperti misalnya ke-Inggris-an seseorang— bukanlah merupakan sesuatu yang homogen dan stabil, tetapi dikonstruksikan. Hal yang sangat penting dalam proses untuk mulai menumbuhkan semangat identifikasi dengan bangsanya dan menanamkan suatu kesadaran nasionalis adalah penuturan kembali bangsa tersebut dan sejarahnya. Ide-ide tentang gender dan peran-peran kaum perempuan sering menjadi bagian utama dan penting dari 'cerita' yang mengisahkan tentang suatu bangsa, sejarahnya dan identitasnya tersendiri. Ide tentang bangsa dikonstruksi dari suatu tilikan sejarah; suatu 'pemujaan atas asal usul mereka'. Perempuan sering kali ditempatkan sebagai malaikat pelindung dari budaya nasional, agama, dan tradisi-

tradisi lokal. Tradisi-tradisi dan nilai-nilai yang sama ini akhirnya juga digunakan sebagai alasan atau pembenaran penetapan batasan-batasan tertentu atas kegiatan-kegiatan perempuan, yang membatasi kaum perempuan dalam batasan-batasan yang ditentukan oleh para elit laki-laki.

Tingkah laku perempuan mungkin kemudian dijaga dan dikontrol dalam kepentingan pembatasan identitas mereka. Kejadian-kejadian perkosaan dalam konflik bersenjata yang biasanya mengiringi perjuangan-perjuangan kemerdekaan, harus dilihat sebagai tindakan politik yang dengan melakukan aksi tersebut, agresor menyerang kehormatan dari laki-laki lain, dan melalui hal ini terputuslah kontinuitas tatanan sosial yang menjadi tanggung jawab perempuan untuk menjaga keberlangsungannya. Lebih lanjut lagi, seandainya perempuan menentang segala tugas dan peran yang ditetapkan pada mereka, maka mereka akan dianggap sebagai pengkhianat bangsa, nilai-nilai, budaya, dan idealitas bangsanya.

Sejauh ini, bahasan kita mengenai identitas dan komunitas masih tetap dalam batasan wacana feminisme dalam hubungannya dengan negara-bangsa dan proyek pembangunan negara. Bagaimanapun, seperti halnya kaum feminis liberal, kaum feminis pemikir kritis, dan posmodern juga mengenal ekspresi-ekspresi penting lainnya mengenai topik komunitas dan identitas. Pengistimewaan konstruksi identitas yang dikonsepsikan oleh para nasionalis sangat menyulitkan karena para nasionalis terkesan menyembunyikan keragaman identitas yang hadir secara berdampingan satu sama lain di wilayah politik tertentu ini dan dimensi-dimensi identifikasi politik transnasional.

Dalam beberapa pengertian, kita dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi yang jauh dari konteks kehidupan kita sehari-hari. Jaringan-jaringan *NGOs* (*Non-Govermental Organizations* atau dikenal di negara kita sebagai LSM —Peny.) transnasional merebak di mana-mana dan gerakan-gerakan sosial kini mulai terorganisasi secara global. Globalisasi teknologi-teknologi komunikasi telah memfasilitasi pertumbuhan jaringan-jaringan transnasional dari *NGOs* dan gerakan-gerakan sosial. Contohnya, selama lebih dari dua puluh tahun terakhir ini, kelompok-kelompok perempuan telah mendapatkan keuntungan dari dibukanya ruang politik oleh *Decade* PBB dan konferensi-konferensi PBB terkini, kesempatan-kesempatan berjaringan untuk terlibat dalam dialog dengan perempuan dari seluruh dunia yang berbeda latar belakang dan pengalaman budaya. Belakangan ini, perempuan makin memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang disediakan oleh teknologi-teknologi komunikasi, seperti internet, untuk memfasilitasi jaringan transnasional, untuk memberikan kekuasaan lebih jauh pada perempuan, dan untuk meningkatkan pengaruh yang perempuan bisa miliki dalam dunia politik internasional. Kini ada banyak literatur yang menceritakan penggunaan internet oleh perempuan, yang, sekali lagi, akan dimasukkan pada referensi bacaan lebih lanjut dari bab ini. Penggunaan teknologi-teknologi komunikasi seperti internet sangat jelas terlihat pada Konferensi Beijing yang akan dibahas lebih jauh nanti. Dengan melihat pada permasalahan-permasalahan mengenai topik identitas dan komunitas, meramalkan tentang kemungkinan globalisasi, penggunaan teknologi-teknologi komunikasi, dan perluasan jaringan-jaringan gerakan feminis transnasional dapat dijadikan sebagai bukti

kebangkitan kesadaran feminis global dan perasaan 'solidaritas' maupun komunitas yang melintasi batas-batas negara mungkin merupakan suatu kegiatan yang menarik.

Lembaga-lembaga dan Tatanan Dunia

Pergeseran dari hubungan internasional ke transnasional atau global merupakan titik awal yang tepat dalam menguraikan sumbangan-sumbangan yang diberikan kaum feminis pada pemahaman kita tentang lembaga-lembaga dan tatanan dunia. Dari perspektif seorang feminis, sesuatu yang privat tidaklah juga hanya bersifat publik, tetapi kini makin juga bersifat global. Dengan perspektif yang semacam tadi, gender kemudian merupakan faktor utama dalam usaha memahami tatanan dunia, baik yang lama dan baru. Bukanlah sesuatu yang mengejutkan, jika feminisme kritis merupakan suatu aliran dalam gerakan feminisme yang banyak menyoroti soal tatanan dunia dan sifat maupun tujuan dari lembaga-lembaga internasional —dengan mengingat tekanan pemikiran mereka yang memahami gender sebagai bentuk kesenjangan yang didukung dan dikukuhkan oleh lembaga-lembaga atau aturan-aturan sosial dan ideologi-ideologi. Akan seperti apakah tatanan dunia seandainya dilihat dari perspektif seorang feminis? Bagaimana kebijakan-kebijakan dari organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga internasional seperti PBB, World Bank, dan IMF memengaruhi hubungan gender di berbagai negara di seluruh dunia?

Literatur feminis kritis mengenai hubungan-hubungan gender, yang terkompilasikan dan dibahas dalam berbagai analisis tentang "tatanan dunia" baru, terlihat mengalami perkembangan yang cukup pesat. Tentu saja, dalam penjelasan para Marxist, "tatanan dunia" benar-benar diterap-

kan oleh kapitalisme global dan negara-negara serta lembaga-lembaga yang menyediakan suatu kerangka kerja yang di tempat tersebut hubungan ekonomi kapitalis dan hubungan sosial diatur. 'Kerja-kerja yang dilakukan oleh kaum perempuan' sering kali tidak dibayar dan juga tidak dianggap menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan negara, dunia perdagangan, dan lembaga-lembaga internasional yang secara bersama-sama menyusun tatanan dunia. Bagaimanapun, kontribusi tenaga kerja wanita bukan saja memiliki arti yang sangat penting dalam skala nasional, tetapi menjadi semakin penting dalam skala global.

Kotak Penulis

Marianne Marchand dan Ann Sisson Runnyan (Peny.), ***Gender and Global Restructuring***

Kaum perempuan yang semakin memberikan kontribusi penting pada perekonomian global. Teks ini membahas secara panjang lebar dimensi materi dan diskursif yang saling terhubung dalam ekonomi politik global. Para kontributor menghadirkan bukti-bukti yang meyakinkan untuk menyatakan, di antara hal-hal lainnya, bahwa restrukturisasi perekonomian dalam skala global, dan beban utang, memberikan suatu dampak yang cukup berarti kepada kaum perempuan dan hubungan gender di negara-negara di seluruh dunia.

Gender juga merupakan suatu faktor yang dapat diteliti dan cukup menentukan dalam pembagian tenaga kerja global saat ini. Sejak 1970-an dan 1980-an, di seluruh dunia, para pemilik perusahaan telah berusaha melemahkan perserikatan-perserikatan pekerja sebagai salah satu cara untuk memperoleh tenaga kerja yang mudah mereka atur. Beberapa pemilik perusahaan telah memindahkan perusahaan mereka ke luar negeri dengan maksud untuk mendapatkan tenaga

kerja murah —sering kali kekuatan tenaga kerja murah ini terdiri dari perempuan. Beberapa pemilik perusahaan yang tidak bisa memindahkan perusahaannya, telah mengganti tenaga kerja mereka dengan tenaga kerja kaum perempuan. Perempuan dibayar murah, karena kerja perempuan dikonstruksikan sebagai buruh golongan kedua. Hal ini telah terjadi pada suatu waktu ketika sejumlah perempuan yang mengepalai rumah tangga justru sedang meningkat. Dampak dari strategi-strategi pembangunan neo-liberal, semisal program penyesuaian struktural merupakan salah satu contoh tentang bagaimana lembaga-lembaga internasional mencerminkan dan mengekalkan kesenjangan gender. Pembentukan kembali GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) (sekarang berganti WTO) dan privatisasi semuanya telah menjadi isu-isu gender global pada dekade sekarang ini.

Kotak Penulis

Sandra Whitworth, *Feminist Theory and International Relations*

Buku-buku karya Whitworth membahas aspek-aspek material dan ideologis hubungan internasional dengan cara yang dapat menjabarkan kaitannya dengan gender. Ide-ide tentang gender memberitahukan dan direproduksi oleh aksi-aksi yang dilakukan aktor-aktor, lembaga-lembaga dan, tentu saja, organisasi-organisasi internasional. Ideologi memainkan sebuah peran penting dalam naturalisasi dan legitimasi kesenjangan hubungan sosial. Ide-ide dominan tentang kewajaran dari hubungan gender dan memusatkan perhatian pada keluarga sebagai unit dasar dari analisis dalam perekonomian, melegalkan pemberian buruh perempuan dan eksploitasi yang ada dalam tatanan dunia saat ini. Whitworth mempertanyakan pengertian biasa pada

'realitas' yang merupakan gender dan mempertanyakan bagaimana ide-ide tentang gender ditunjukkan lembaga-lembaga sosial dan politik baik dalam skala nasional dan global.

Sebagaimana yang dengan berat hati telah kami tunjukkan, perempuan tidak saja menjadi korban tak berdaya dari kekuatan-kekuatan di luar kontrol mereka. 'Tatanan dunia' juga disusun oleh kekuatan-kekuatan sosial yang saling beroposisi atau *'counter-hegemonic'*. Perempuan sedang mengorganisasikan diri untuk menolak pengurangan hak-hak tenaga kerja, untuk memperjuangkan kondisi-kondisi kerja yang lebih baik, dan, sekaligus, memberikan perhatian pada masalah-masalah tertentu yang mereka hadapi baik sebagai tenaga kerja yang dibayar maupun tidak. Melalui perjuangan politik, perempuan bisa melakukan dan memainkan suatu peran dalam menolak hubungan-hubungan kekuasaan dominan dan membawa ke arah perubahan. Perjuangan-perjuangan perempuan umumnya tidak hanya menyangkut masalah dangkal, seperti tuntutan upah yang lebih tinggi dan kondisi-kondisi kerja yang lebih baik. Mereka juga menekankan masalah-masalah tertentu yang mereka hadapi sebagai perempuan yang harus tidak hanya membagi kapasitas dalam menghadapi tuntutan yang datang bersamaan antara kerja dan keluarga, namun juga harus menghadapi diskriminasi seksis (baca: jenis kelamin).

Sejak permulaan dari program PBB *'Decade for Women'*, perempuan telah mengorganisasikan diri melintasi batas-batas negara untuk mengangkat isu-isu tentang persamaan jenis kelamin dan diskriminasi terhadap perempuan. Pada 1990-an, organisasi-organisasi feminis telah berusaha keras untuk memasukkan isu dan masalah gender ke dalam *main-*

stream pembahasan kebijakan. Pengampanyean isu gender secara bertahap di dalam area kerja PBB lain tampaknya telah membuahkan hasil dengan munculnya suatu rezim perempuan internasional, yang telah melahirkan tekanan-tekanan pada banyak negara, menghasilkan suatu banjir kebijakan yang terlalu berfokus ke masalah gender selama tiga dekade terakhir. Dengan cara ini pula, organisasi-organisasi feminis secara aktif bekerja untuk membentuk pemahaman kita tentang lembaga-lembaga dan tatanan dunia.

Kotak Refleksi

Feminis Kritis

Kaum feminis kritis jelas percaya bahwa ada suatu ketidakleluasaan atau batasan struktural yang penting dalam aktivitas perempuan: (1) Apa kira-kira wujud dari ketidakleluasaan ini? (2) Kemungkinan-kemungkinan apa saja yang muncul bagi orang-orang untuk memengaruhi terjadinya perubahan dalam 'tatanan dunia' yang ada?

Kesenjangan dan Keadilan

Sebagaimana telah ditunjukkan dalam bahasan di atas, isu-isu tentang kesenjangan dan masalah-masalah keadilan telah menjadi tema utama dalam teori feminis, dan dari abad ke-19 hingga sekarang, feminis di Barat telah menyatakan nilai moral dari perempuan dan laki-laki yang sederajat dan menuntut persamaan hak-hak dan keadilan bagi perempuan. Sayangnya, tidak ada ruang pembahasan yang mencukupi di bab ini untuk memasukkan pembahasan rinci mengenai gender dan hak asasi manusia; cukup dikatakan bahwa pada awal abad ke-21, kaum feminis liberal terus melanjutkan usaha memperjuangkan hak-hak perempuan. Dalam proses-

nya, para feminis liberal tidak hanya mempromosikan isu tersebut ke segala belahan dunia, tetapi juga mendorong suatu perdebatan yang terus-menerus atas apa yang seharusnya disebut atau didefinisi sebagai suatu 'hak manusia'.

Tidak semua kaum feminis setuju dengan strategi berdasar hak untuk menunjukkan kesenjangan gender. Wacana tentang hak berasal dari tradisi Barat, didasarkan dalam suatu abstraksi 'universalisme' dan tertanam dengan kuat dalam ide-ide Barat tentang 'kemajuan' dan emansipasi. Para pemikir feminis poskolonial berpendapat bahwa semua kritik kebiasaan budaya —yang rasanya terlalu sering muncul dengan topik tersebut— didasarkan pada kesalahpahaman dan penafsiran yang salah. Perempuan di dunia non-Barat tidaklah pasif dan 'korban' yang tidak berdaya dari masyarakat yang tidak beradab dan kebiasaan budaya yang 'terbelakang', tetapi masyarakat-masyarakat non-Barat telah dipandang melalui kacamata dari nilai-nilai sosial dan politik Barat dan dikecam atas ketidakpedulian dan ke-barbar-an mereka. Lebih jauh lagi, ketika hak telah dihubungkan dengan kepemilikan atas properti —suatu sumber tradisional dari Hukum Eropa yang diekspor melalui kolonialisme, akibatnya bagi perempuan sangatlah besar, yang sering kali berguna untuk menyingkirkan perempuan dari lahan yang mereka kuasai sebelumnya atau dari sumber lainnya yang sebelumnya memberikan sejumlah kekuasaan sosial tertentu bagi perempuan.

Contoh-contoh sejarah ini menggambarkan, mungkin, bahaya-bahaya yang ada dalam mendukung strategi-strategi untuk menyuarakan terjadinya kesenjangan yang telah berkembang dalam suatu konteks sejarah tertentu dan yang

mungkin tidak tepat jika dirujukkan ke konteks sejarah atau budaya di lain tempat. Untuk alasan inilah, beberapa penulis, terutama di negara-negara Islami, berpendapat bahwa lebih tepat untuk kembali pada sumber-sumber otoritas tradisional, seperti, misalnya, Qur'an untuk melihat hal-hal yang berkesesuaian dengan yang dikenal sebagai 'hak asasi manusia' yang mungkin diambilkan dari nilai-nilai dalam Islam yang serupa dengan yang telah diterapkan dalam Hukum Internasional daripada secara membabi-buta menganut tradisi-tradisi Barat. Kaum feminis muslim telah mencoba melakukan pelacakan kembali terhadap hak-hak kaum perempuan sejak 1880-an dengan munculnya buku *Women's Liberation* karya Qasim Amin (dikutip dalam Mernisi, 1987).

Beberapa kaum feminis menolak wacana tentang hak karena mereka meyakini bahwa konsepsi mengenai yang disebut sebagai hak sangatlah individualistik dan berdasarkan pada pengalaman para kaum laki-laki borjuis. Kaum feminis *standpoint* dari sini telah berpendapat bahwa para perempuan perlu mengembangkan suatu konsep baru mengenai keadilan, yang berasal dari pengalaman-pengalaman perempuan, daripada mengembangkan konsepsi mengenai yang disebut sebagai hak yang telah terdapat dalam tradisi untuk memasukkan perempuan. Kaum feminis *standpoint* berpendapat bahwa psiko-sosialisasi perempuan mengarahkan mereka untuk mengadopsi suatu kode moral yang berbeda, meski tidak inferior, dari kode moral yang telah diadopsi laki-laki. Jika laki-laki disosialisasikan untuk menerima suatu etika keadilan atau suatu etika hak-hak berdasarkan konsep abstrak yang berhubungan dengan otonomi dan rasionalitas, maka perempuan cenderung mengadopsi suatu etika kepedulian atau etika tanggung jawab (tugas). Nilai-

nilai atau ideal timbal balik yang terkandung dalam etika kepedulian bisa digunakan untuk menempa hubungan politik yang saling menguntungkan dan menghormati di tengah berbagai perbedaan dan kekhususan dan dalam menjalankannya memfasilitasinya dengan suatu konsep tentang keadilan dan etika yang sangat berbeda dengan yang telah dipraktikkan selama ini.

Konflik dan Kekerasan

Telah dinyatakan di atas bahwa institusionalisasi dari gender merupakan tema utama dalam kekuasaan negara. Dalam runutan sejarah, negara telah memberikan peran penting (*armed*) pada laki-laki dan, sebaliknya, kurang memberikan peran (*disarmed*) kepada perempuan —yang telah sedemikian dikonstruksikan sebagai pihak yang harus dilindungi. Terlebih lagi, kebijakan-kebijakan diplomasi, kolonial, dan militer negara-negara besar telah disusun dalam konteks ideologi-ideologi maskulinitas yang menekankan ketangguhan dan kekuatan. Pada 1980-an, pergerakan feminis yang anti-perang sering menganggap peralatan militer yang dimiliki negara —terutama senjata-senjata nuklir— sebagai suatu ekspresi dari sifat agresif dan merusak yang dimiliki laki-laki. Ruddick berpendapat bahwa di berbagai penjuru dunia laki-lakilah yang berperan sebagai kepala polisi, mata-mata, hakim dan gubernur yang mengonstruksi suatu tatanan masa-damai yang dijamin dengan ancaman. Peran jenderal-jenderal, negosiator, kepala-kepala staf masih merupakan dunia laki-laki, dan biasanya mereka inilah orang-orang yang membuat rencana peperangan, menciptakan senjata-senjata, dan mengawasi pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan yang akrab dengan kekerasan tersebut. Karena alasan inilah,

kaum feminis menolak untuk memandang kekerasan sebagai tindakan-tindakan individu yang diancamkan kepada negara-negara. Hal ini tidak untuk mengatakan bahwa kaum feminis tidak peduli dengan masalah konflik dan perang, tetapi lebih bermakna bahwa mereka melihat kekerasan seperti itu sebagai bagian dari suatu kompleksitas yang melibatkan lembaga-lembaga dan cara mereka diorganisasikan.

Kotak Refleksi

Militerisme dan Kekerasan Struktural

Para sarjana Feminis juga telah menunjukkan bahwa pemahaman kita mengenai 'kekerasan' tidak seharusnya dibatasi pada tindakan-tindakan kekerasan langsung yang terjadi antarnegara (baca: konflik ataupun peperangan —Peny.). Kekerasan bisa berlangsung dalam lingkup struktural, yang menyisip dalam kesenjangan sosial yang menentukan akses untuk menjangkau sumber daya. Seperti halnya kekerasan langsung, kekerasan struktural juga dapat melukai, dan dapat juga menyebabkan kematian dini. Kaum feminis mengklaim bahwa kekerasan militerisme dan struktural saling berhubungan. Jika anggaran pembelanjaan militer bertambah, maka anggaran yang seharusnya dialokasikan bagi bahan pangan dan kesejahteraan akan mengalami pengurangan. Kaum feminis juga berpendapat bahwa pengalihan sumber daya yang dihabiskan militer ke sektor ekonomi sipil akan, di semua negara, menghasilkan keuntungan-keuntungan sosial maupun ekonomi bagi semua orang, terutama sekali kaum perempuan. Sumber daya yang dialokasikan bagi kebutuhan persenjataan akan dapat dimanfaatkan untuk membiayai kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan dengan demikian, banyak orang-orang yang kekurangan akan dapat menikmati keuntungan-keuntungan secara langsung. Dalam pandangan ini, maka daripada menyediakan perlindungan dari ancaman pihak asing (*excluded 'others'*), kompleksitas industri-militer sebenarnya justru sedang melukai atau mengorbankan mereka yang termasuk sebagai golongan lemah atau kekurangan!

Kaum feminis berpendapat bahwa kekerasan tidaklah sedang mengancam hubungan internasional karena kondisi anarki atau karena negara-negara terus-menerus menghadapi ancaman-ancaman nyata terhadap keamanan mereka dari musuh asing —sebagaimana yang sering kali dikemukakan oleh kaum realis. Dengan kata lain, wacana-wacana dan praktik-praktik kekerasan terdapat dalam realitas pokok negara. Tindak-tindak kekerasan sangat tertanamkan dalam kesenjangan kekuasaan dan ideologi-ideologi dari supremasi laki-laki. Wujud yang paling nyata dari hal ini adalah militerisme. Hal yang beda atau khusus dari cara kaum feminis berteori mengenai militerisme adalah bahwa teori mereka menempatkan gender, yaitu konstruksi sosial mengenai maskulinitas dan feminitas, sebagai suatu faktor penting dalam pengonstruksian dan pengekalan dari militerisme dan karenanya mungkin juga pembalikan dari proses tersebut. Cynthia Enloe (lihat Kotak) telah berpendapat bahwa bukan kapitalisme atau negara saja yang berperan dalam proses tersebut, tetapi juga maskulinitas yang terkait dengan militer dan industri. Laki-laki yang bekerja di pabrik-pabrik senjata mungkin bekerja berlawanan dengan kepentingan-kepentingan kelas mereka sendiri, tetapi mereka memandang diri mereka sedang melakukan 'pekerjaan laki-laki' yang bernilai sangat penting. Orang-orang di pemerintahan dan militer dipengaruhi oleh persepsi mereka sendiri tentang 'maskulinitas' dan 'feminitas' dan, kemudian, menyusun kebijakan-kebijakan untuk memastikan bahwa sipil dan tentara berkaitan satu sama lain dalam cara-cara gender yang memudahkan proses-proses militerisasi yang rumit. Asumsi yang patriarkis bahwa mereka benar-benar sedang mengerjakan 'pekerjaan laki-laki' yang kemudian memperkuat

militerisasi dan hegemoni 'kompleksitas industri militer' dengan cara yang mungkin penting sekali bagi pemeliharaan suatu kelompok seperti itu.

Perdamaian dan Keamanan

Kritik feminis terhadap pendekatan-pendekatan konvensional atas masalah peperangan dan konflik dan penekanannya terhadap kekerasan struktural, mengakibatkan konsep-konsep tentang perdamaian dan keamanan yang sangat berubah. Pengadopsian suatu perspektif feminis tidak hanya menantang pandangan mengenai militer sebagai pembela 'kepentingan nasional', tetapi juga menunjukkan bahwa tingkatan orang merasa, atau benar-benar sedang, 'terancam' sangatlah beragam sesuai dengan lingkungan ekonomi, politik, sosial, atau personal mereka. Dalam dunia kontemporer ini, keamanan dan kesejahteraan umat manusia dipengaruhi oleh serangkaian faktor: stabilitas dari perekonomian global, kemiskinan dan malnutrisi, pemanasan global dan perubahan iklim, konflik etnis, tekanan politik, pelanggaran hak asasi manusia, dan pembantaian atas dasar agama, etnisitas, atau gender. Hierarki dan kesenjangan gender dalam kekuasaan merupakan sebuah sumber dominasi yang utama dan halangan atas pencapaian keamanan yang sebenar-benarnya.

Kotak Penulis

Cynthia Enloe

Enloe secara luas dikenal sebagai Penulis pertama yang mencoba untuk membuat 'hubungan internasional yang bersifat feminis'. Dalam bukunya, *The Morning After: Sexual Politics after*

the Cold War, Enloe menunjukkan bahwa pengertian dari Tatanan Dunia Baru (lihat pendahuluan) bisa menyembunyikan keberadaan dari institusi-institusi hubungan yang dilestarikan dan sulit untuk diubah. Sebagaimana yang Cynthia Enloe katakan, "setiap waktu setelah perang selalu dipenuhi dengan berbagai macam pertanyaan". Tahun-tahun setelah Perang Dingin ini juga tidak jauh berbeda. Pertanyaan pertama selalu saja: apa yang telah berubah?... Akhir rivalitas negara adidaya secara formal tidak juga seperti menyingsingnya suatu hari yang baru dalam evolusi politik seksual yang terus saja masih berlangsung... kita masih hidup dalam sebuah masa ketika teori politik dan politik dalam kehidupan sehari-hari sebagian besarnya terus didefinisikan oleh ketakutan-ketakutan dan aspirasi-aspirasi yang muncul dalam Perang Dingin. Kontinuitas ini sangat jelas terlihat dalam keengganan pemerintah dan kebanyakan warga negara biasa untuk membuat kekuatan militer mereka berkurang keutamaannya pada pengertian gender mereka tentang keamanan dan, bahkan, identitas.

Para aktivis liberal sering berpendapat bahwa kita tidak dapat mencapai keamanan yang benar-benar menyeluruh dan global, baik dalam teori maupun praktik, kecuali kita mengakui bahwa keamanan pada dasarnya suatu masalah tentang hak asasi manusia. Dalam era global ini ketika negara-bangsa sebagai bentuk dasar dari komunitas politik diposisikan sebagai pihak yang terus dihadapkan pada tantangan-tantangan, hak asasi manusia, memang, merupakan cara yang paling baik untuk mengusahakan keamanan. Kaum feminis liberal telah menekankan nilai penting dari tidak hanya hak-hak sipil dan politik, tetapi juga hak-hak ekonomi dan sosial untuk mencapai keamanan dan berpendapat bahwa hak asasi perempuan harus diakui sebagai hal utama untuk mencapai keamanan dalam arti yang sebenar-benarnya. Bagaimanapun, tidak sedikit kaum feminis yang akan mendukung pendapat bahwa usaha untuk membangun

keamanan global atas dasar suatu tradisi hak asasi manusia orang-orang borjuis yang berdasarkan kepentingan rasional, egoisme, dan perlindungan atas kekayaan, pada dasarnya cacat. Tentu saja, banyak yang akan berpendapat bahwa tradisi-tradisi non-Barat yang memandang individu sebagai bagian dari keutuhan sosial dan menekankan martabat manusia dan pembangunan merupakan titik awal yang lebih baik untuk mengembangkan konsep-konsep keamanan yang alternatif. Sedangkan beberapa yang lainnya telah menyadari kesamaan antara konsep-konsep yang telah direvisi oleh kaum feminis dan 'pendekatan-pendekatan berorientasi pada individu' yang secara simultan terus berpendapat terhadap pentingnya berbagai macam individu dan semua kebutuhan keamanan mereka yang setara, dan menekankan pentingnya kebersamaan yang di dalamnya orang-orang saling memiliki keterikatan.

Contoh Dunia

Kisah Para Pengungsi Albania

Jalan yang harus ditempuh untuk mencapai keamanan bagi perempuan masihlah amat panjang, seperti yang ditunjukkan oleh menyedihkannya keadaan para perempuan yang dianggap sebagai para pengungsi yang bekerja sebagai pelacur di Italia. Melarikan diri dari kemiskinan di Albania, perempuan seperti itu biasanya dikuasai oleh 'laki-laki' Albania, yang 'dilelang' pada para penawar yang paling tinggi dan 'diputar' dari area ke area untuk menjamin ketersediaan wajah-wajah baru bagi para klien. Perempuan-perempuan seperti itu biasanya menderita ketakutan akan pembalasan para geng yang menguasai mereka terhadap keluarga mereka jika mereka melarikan diri pulang ke rumah.

Tidak akan ada bahasan mengenai kontribusi kaum feminis terhadap bidang Hubungan Internasional yang lengkap tanpa beberapa bahasan pendekatan feminis terhadap perdamaian. Kebanyakan karya feminis tentang perdamaian berasal dari kaum feminis radikal atau *standpoint*. Menurut sejarah, dan dalam berbagai budaya yang berbeda-beda, telah ada suatu hubungan yang panjang antara perempuan dan perdamaian. Contohnya, pergerakan *suffragette* perempuan di Inggris yang berpendapat bahwa naluri keibuan perempuan membuat mereka berbeda dari laki-laki, tetapi kedamaian perempuan merupakan bukti dari superioritas moral daripada inferioritas. (Aktifis perdamaian perempuan sering kali mengklaim suatu kedamaian 'alami' sebagai bagian dari perempuan, pada saat beberapa kaum eko-feminis memperluas pendapat tersebut untuk memasukkan non-kekerasan sebagai bagian dari planet). Beberapa yang lainnya, meski menolak pertimbangan biologis atau esensialis atas perbedaan-perbedaan gender yang nyata, telah menyadari kedekatan hubungan antara perdamaian dengan 'feminitas' dan telah berpendapat bahwa pengalaman menjadi ibu pada sebagian besar perempuan dan sejarah eksklusi perempuan dari kekuasaan publik berarti bahwa perempuan memang mempunyai suatu hubungan yang dekat dengan perdamaian.

Ide ini telah tergaung dalam teriak lantang kaum 'feminis moral' pada 1980-an dan 1990-an yang menyuarakan inklusi perempuan ke dalam elit-elit pemerintahan karena masuknya perempuan akan mengubah kebijakan luar negeri semua negara. Wacana-wacana feminis tentang perdamaian menekankan keterhubungan manusia, dialog-dialog, dan kerja sama atas dominasi dan konfrontasi kekerasan. Dengan

cara ini, dengan mengambil suatu tempat yang lebih baik dalam arena politik, para aktivis perdamaian feminis sedang mengubah istilah-istilah yang dengannya wacana publik diarahkan.

Kesimpulan

1. Feminisme merupakan sebuah cara pandang hidup luas dengan berbagai paham yang berbeda-beda. Terdapat berbagai perbedaan yang penting dalam teori-teori feminis, tetapi tidak sedikit juga persamaan-persamaan yang mereka miliki.
2. Teori feminis kontemporer tidak memusatkan perhatian sepenuhnya pada kehidupan perempuan, tetapi merupakan suatu analisis atas konstruksi kategori 'gender' yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya. Dengan demikian, feminisme menantang pendapat bahwa *Laki-laki dari Mars, Perempuan dari Venus*.
3. Banyak sekali sarjana feminis yang memusatkan perhatian pada perlakuan diskriminasi dan penindasan. Bagaimanapun, kaum feminis tidak menganggap perempuan sebagai 'korban'. Feminisme juga berusaha menyingkap dan menjelaskan cara-cara agar perempuan menambah kekuatan diri dalam rangka meraih perubahan-perubahan positif dalam posisi sosial mereka.
4. Feminisme kontemporer tidak menganggap 'perempuan', atau tentu saja, 'laki-laki' sebagai kategori tersendiri, tetapi sesuatu yang terpengaruh oleh nuansa-nuansa dalam identitas gender. Menilik berbagai beragam pengalaman kaum perempuan dan dalam hubungan gender, jelaslah terlihat bahwa penindasan terjadi dalam berbagai bentuk.

5. Feminisme telah meletakkan pengaruh dalam teori Hubungan Internasional sejak 1980-an, meski para sarjana yang memperkenalkannya telah sejak lama tercatat dalam sejarah.
6. Para sarjana Feminis telah membuat kontribusi bernilai bagi begitu banyaknya wilayah yang sejak lama telah menjadi bagian utama dalam bidang hubungan internasional.
7. Pada saat yang sama, feminisme menantang ide-ide konvensional tentang segala hal yang didefinisikan sebagai pusat atau marginal, penting atau tidak penting dalam wilayah Hubungan Internasional.
8. Pendalaman atau pelajaran utama dari feminisme, mungkin, terletak pada cara yang dengannya konsepsi pembagian privat/publik yang tegas telah mengubah seperangkat hubungan kekuasaan menjadi tak terlihat. Dari perspektif feminis, privat bukan hanya bersifat politis, tetapi juga merambah internasional dan global.

Kritik

Salah satu kritik yang dapat ditujukan kepada feminisme adalah bahwa pada saat seolah-olah memusatkan perhatian pada hubungan gender, kaum feminis cenderung untuk memusatkan perhatian pada perempuan, terutama dalam kerja empiris mereka. Ini mungkin suatu pengamatan yang akurat, meski kerja mereka kini mulai membahas topik maskulinitas dalam HI. Banyak di antara kaum feminis akan membantah bahwa mereka tertarik pada topik hubungan gender karena mereka berusaha menjelaskan tentang terjebaknya kaum perempuan dalam hubungan-hubungan yang tidak seimbang, atau tentu saja, tentang digunakannya

ide-ide tentang gender untuk melegitimasi status tidak setara yang ditujukan kepada kaum perempuan.

Kritik yang potensial lainnya yakni bahwa sementara menawarkan pemahaman penting, kaum feminis telah gagal untuk menyusun suatu penjelasan yang koheren mengenai karakteristik hubungan internasional, seperti halnya, katakanlah, realisme atau liberalisme. Tentunya, tidak ada satu 'paradigma feminis' khusus atau teori feminis tentang HI. Bagaimanapun, banyak di antara feminis posmodern yang bekerja di lapangan akan menyatakan bahwa konstruksi dari satu pandangan dunia yang koheren adalah hal yang tidak mungkin dan, juga, sama sekali tidak menarik (lihat bab 5).

Hal lain yang dapat dinyatakan tentang feminisme adalah bahwa feminisme tidak mempertimbangkan pembagian utama lainnya di antara kaum perempuan berdasarkan, katakanlah, kelas sosial atau etnisitas. Ini adalah suatu kritik yang telah ditujukan terutama pada feminisme liberal dan radikal, dengan beberapa pembenaran. Kebanyakan pendekatan kontemporer tentang gender, mengusahakan suatu analisis yang lebih bernuansa menggali proses yang di dalamnya budaya, kelas, ras, dan sebagainya saling berhubungan dan melintasi divisi-divisi gender.

Kritik lain yang mungkin diajukan adalah bahwa feminisme sangat berpegang pada suatu keyakinan atau ide yang menyatakan bahwa terdapat suatu kategori universal —'perempuan'— dan bahwa kaum perempuan mempunyai pengalaman-pengalaman atau ketertarikan-ketertarikan yang serupa. Dalam kenyataannya, hubungan gender, pengalaman-pengalaman perempuan, dan pengertian sosial yang dihubungkan dengan perbedaan gender sangatlah berbeda-

beda dalam masyarakat satu ke masyarakat lainnya atau satu budaya ke budaya lainnya. Kritik ini menjadi merupakan tema penting dalam kritik poskolonial dan posmodern mengenai feminisme Barat. Sekali lagi dikatakan, tanggapan terhadap kritik semacam ini adalah pengusahaan untuk mengembangkan suatu pemahaman yang lebih bernuansa tentang proses ketika subjektivitas perempuan (dan tentunya laki-laki) dikonstruksikan. Bagaimanapun, meski menerima bahwa perbedaan harus dipandang dengan serius, banyak di antara kaum feminis dalam tradisi kritis dan *standpoint* mengemukakan bahwa perhatian terhadap munculnya berbagai perbedaan tersebut tidak seharusnya membuat kabur perbedaan antara terus berlangsungnya kesenjangan gender sama sekali dengan berbagai tingkatan diskriminasi terhadap kaum perempuan dalam semua budaya dan masyarakat.

Kesalahpahaman Umum

Laki-laki tidak bisa menjadi seorang feminis. Beberapa kaum feminis menyatakan bahwa pada akhirnya identifikasi seseorang dengan feminisme muncul dari pengalaman-pengalaman pribadi atas diskriminasi, suatu perasaan solidaritas, dan kepentingan-kepentingan bersama dengan perempuan lain. Dalam pandangan ini, sangatlah jelas bahwa laki-laki tidak akan bisa menjadi seorang feminis, tetapi hanya akan menjadi simpatisan atau pendukung. Bertentangan dengan pendapat ini, para liberal menyatakan bahwa feminisme adalah suatu tuntutan bagi persamaan hak, dan akan sangat tidak berkeberatan untuk menyematkan label 'feminis' bagi laki-laki yang mendukung perjuangan persamaan hak bagi perempuan.

Gender sama dengan seks (baca: jenis kelamin). Tidak. Jenis kelamin menjelaskan anatomi atau perbedaan-perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki. Gender menjelaskan kepentingan atau pengertian sosial yang dirujukkan terhadap perbedaan-perbedaan itu.

Studi gender dalam HI adalah tentang perempuan. Meski beberapa kaum feminis cenderung memusatkan perhatian pada posisi perempuan (lihat di atas), perhatian utama feminisme kontemporer ada pada identitas gender dan hubungan gender. Posisi dan status perempuan tidak bisa dipahami tanpa merujuk pada ide-ide umum tentang gender dan bagaimana hubungan gender diatur dalam masyarakat-masyarakat secara khusus.

Studi tentang gender dan HI hanya penting bagi perempuan. Tidak. Studi gender dan HI memerlukan laki-laki untuk mempertimbangkan masalah-masalah maskulinitas, identitas maskulin, dan kekuasaan, begitu pun juga dengan identitas perempuan, feminitas, dan kesenjangan. Beberapa kaum feminis akan berpendapat bahwa pelecehan analisis feminis yang sering kali terjadi sebagai analisis 'marjinal' atau sebuah 'isu perempuan' mencerminkan dan pada saat yang sama, juga, memperkuat posisi sosial dominan dari laki-laki dan penolakan mereka untuk terlibat dengan berbagai wacana atau praktik yang mengancam posisi *privileged* mereka.

Feminisme merupakan pandangan atau paradigma tentang dunia seperti juga yang lain. Tidak. Lihat pembahasan di atas.

Semua kaum feminis itu lesbian, para pembenci laki-laki. Kritik ini sering kali diarahkan kepada kaum feminis oleh mereka yang dengan alasan apa pun —ideologi atau ketidakamanan personal mungkin— sangat menentang kepercayaan dan

praktik-praktik feminis. Persamaan semua feminisme dengan separatisme lesbian dan/atau pembenci laki-laki itu adalah sebuah tuduhan tanpa dasar. Feminisme adalah lebih mengenai pemahaman dan perlawanan pada aspek-aspek kekuasaan dan kesenjangan tertentu daripada pengecaman yang berpikiran sempit. ✦

Daftar Pustaka

Enloe, C. (1989), *Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Relations,* London: Pandora.

Enloe, C. (1993), *The Morning After: Sexual Politics after the Cold War,* Barkeley: University of California Press.

Grant, R. dan Newland, K. (1990), *Gender and International Relations,* Milton Keynes: Open University Press.

Harcourt, W. (ed.). (1999), *Women@Internet,* London: Zedbooks.

Marchand, M. dan Runyan, A. (ed.) (1999), *Gender and Global Restructuring,* London: Routledge.

Mernisi, F. (1987), *The Veil and the Male Elite: A Feminis Interpretation of Women's Right in Islam,* New York: Addison Wesley.

Meyer, M. dan Prugl, E. (1999), *Gender Issues in Global Governance,* Oxford: Rowman and Littlefield.

Peterson, V.S. dan Runyan, A. (1993), *Global Gender Issues,* Boulder, CO: Westview Press.

Pettman, J.J. (1996), *Worlding Women: A Feminis International Politics,* London: Routledge.

Robinson, F. (1999), *Globalizing Care: Ethics, Feminist Theory and International Relation,* Oxford: Westview.

Schneir, M. (1972), *Feminism: The Essential Historical Writing,* London: Vintage.

Steans, J. (1998), *Gender and International Relations,* Oxford: Polity Press.

Sylvester, C. (1994), *Feminist Theory and International Relations in a Postmodern Era,* Cambridge: Cambridge University Press.

Tickner, A. (1992), *Gender in International Relations,* New York: Colombia University Press.

True, J. (1996), 'Feminism', in Burchill, S. dan Linklater, A. (ed.), *Theories of International Relations,* London: Macmillan.

Turpin, J. dan Lorentzen, L. (1996), *The Gendered New World Order Militarism, Development and the Environment,* London: Routledge.

Weber, C. (1993), 'Good Girls, Bad Girls and Little Girls', *Millenium: Journal of International Studies,* Vol. 22.

Whitworth, S. (1994), *Feminist Theory and International Relations,* Basingstoke: Macmillan.

Zalewski, M. (1993), 'Feminist Theory and International Relations', in Bowker, M. dan Brown, R. (ed.), *From Cold War to Collapse: Theory and World Politics in the 1980s,* Cambridge: Cambridge University Press.

Zalewski, M. dan Enloe, C. (1995), 'Question about Identity', in Booth, K. dan Smith, S. (ed.), *International Relations Theory Today,* Cambridge: Polity Press.

Zalewski, M. dan Parpart, J. (1998), *The Man Question in IR,* Oxford: Westview.

Bab 7 Green Thought

Pendahuluan

Selama dua dekade terakhir, telah tumbuh kesadaran mengenai masalah-masalah kelangkaan sumber daya, hujan asam, penipisan ozon, dan pemanasan global. Menanggapi hal tersebut, kita telah diangkat pada kesadaran untuk *'think green'* —mempertimbangkan kembali dampak kehidupan dan tindakan kita sehari-hari terhadap lingkungan. Perhatian pada permasalahan lingkungan juga telah mulai merambah Hubungan Internasional. Pada konteks ini, *'thinking green'* dalam HI telah menghasilkan penggabungan perhatian pada permasalahan dalam cabang-cabang teori HI yang telah ada, seperti liberalisme atau strukturalisme. Pada bab ini kami membuat pembedaan antara *'thinking green'* —dalam kerangka bergabungnya isu-isu lingkungan ke dalam perspektif yang telah ada— dengan *Green Thought*, yang dapat dianggap sebagai suatu perspektif terpisah.

Sebelum melanjutkan pembahasan kita mengenai dua konsepsi di atas, sejenak kita perlu melihat pengertian dari beberapa istilah kunci. Pertama-tama, apa yang dimaksud dengan istilah 'lingkungan'? Meskipun istilah ini sepertinya sudah jelas, namun jawaban dari pertanyaan ini tidaklah

sesederhana seperti yang dipikirkan. Istilah 'lingkungan' dapat digunakan dalam lingkup yang umum untuk menggambarkan di mana kita dan apa yang melingkupi kita. Dalam bahasa sehari-hari, 'lingkungan' sering dipakai bergantian dengan istilah 'alam'. Pengertian istilah 'alam' tidaklah jelas dengan sendirinya. *Alam* bisa digunakan untuk menjelaskan karakteristik, inti, atau karakteristik dari suatu hal, seperti frasa *human nature* (baca: karakteristik manusia), atau untuk membedakan kehidupan tanaman, binatang dan kehidupan serangga dari dunia manusia. Alam yang liar dan berbahaya sering kali dipertentangkan dengan tatanan dan jaminan keamanan yang diberikan budaya atau peradaban. Meski mempunyai hubungan yang dekat, istilah 'lingkungan ' dan 'alam' tidaklah bersinonim. Lebih lanjut lagi, pengertian istilah 'lingkungan' dan 'alam' akan menjadi beragam tergantung pada konteks digunakannya istilah-istilah tersebut. Relevansi dari pemisahan seperti itu merupakan nilai yang lahir dalam benak.

Kekhawatiran terhadap lingkungan hidup tidaklah benar-benar merupakan hal baru. Sejarah bencana lingkungan dan hukum-hukum lingkungan untuk mencegah bencana-bencana seperti itu terjadi kembali telah sangatlah panjang. Filsuf Yunani, Plato, mengeluhkan tentang tanah yang menggersang akibat praktik-praktik pertanian, orang-orang di Pulau Paskah (*Easter Island*) yang mengubah tanah di pulau yang bak surga tersebut menjadi mimpi buruk dengan ritus penyembahan yang kanibalistik sementara sejarah Inggris dan AS penuh dengan contoh kepedulian dan berbagai hukum anti-polusi. Mungkin, dengan terjadinya Revolusi Industri abad XIX dan konsentrasi penduduk di perkotaan yang makin tinggi, mulai terlihat munculnya

kesadaran bersama terhadap lingkungan. Kesadaran ini makin berkembang seiring dengan pencapaian teknologi abad XX.

Kita perlu mempertimbangkan sebentar mengenai alasan di balik atau hal yang melatarbelakangi munculnya persepsi tertentu atas suatu 'masalah' dalam dunia kontemporer untuk dapat memahami perlunya bab ini ditempatkan dalam sebuah buku yang berisi teori Hubungan Internasional ini. Akan juga sangat membantu seandainya kita mau berhenti sejenak di sini dan mempertimbangkan proses dibentuknya pendekatan enviromentalis dan ekologi akan lingkungan hidup oleh anthroposentrisme (suatu pandangan yang meyakini bahwa manusia sebagai 'pusat' alam semesta —Peny.), atau sebaliknya, suatu penolakan akan nilai-nilai antroposentris. Anthroposentris (lawan dari ekosentris) adalah suatu label yang terlalu berat atau kompleks untuk menunjuk suatu pendekatan yang berfokus pada manusia atas hubungan manusia-alam. Dengan mendapatkan pemahaman tentangnya —dan juga tentang ekosentrisme yang berfokus pada alam secara lebih rinci, maka kita akan mampu untuk menyatakan beragam cara yang dengannya berbagai cabang atau paham dari *Green Thought* akan menambah pemahaman kita mengenai studi kita tentang hubungan internasional.

Dengan demikian, kita akan membuat suatu pemisahan antara *'thinking green'* dalam pengertian isu-isu atau ketertarikan terhadap lingkungan yang berintegrasi dalam perspektif-perspektif yang ada dengan *Green Thought*. Kita akan menggunakan *Green Thought* dengan suatu cara yang lebih tepat atau sesuai untuk merujuk suatu cara berpikir yang sangat radikal (baca: mendasar) tentang hubungan manusia-

alam, esensi problematis dari bentuk-bentuk kehidupan modern dan kebiasaan sosial kontemporer, dan keterbatasan pengetahuan ilmiah dalam 'memecahkan' masalah-masalah manusia. Pada bab ini, kita akan menggunakan pemahaman ini sebagai titik tolak dalam mengonstruksikan sebuah perspektif *Hijau* dalam Hubungan Internasional. Pembagian antara *'thinking green'* dengan *Green Thought* ini telah dijelaskan oleh beberapa penulis dalam kerangka pemahaman mengenai pembedaan 'environmentalisme' (mengintegrasikan isu-isu lingkungan hidup ke dalam ideologi-ideologi antroposentris) dengan 'ekologisme' (yang dikatakan menjadi sebuah ideologi terpisah dan mungkin bersifat ekosentris atau setidaknya secara radikal bersifat antroposentris).

Meski pengaruh dari berbagai peristiwa, laporan dan buku-buku lingkungan hidup terkesan sangat kuat terhadap masyarakat dari tahun 1960-an hingga sekarang, namun pada saat krisis Perang Dingin semua pengaruh ini mempunyai tidak berdampak penting terhadap Hubungan Internasional yang kala itu didominasi oleh suatu perhatian atas politik kekuasaan (realisme) dan yang kemudian oleh ekonomi internasional (pluralisme liberal dan strukturalisme). Kenyataan yang menunjukkan bahwa HI benar-benar mulai memikirkan isu-isu lingkungan dan filsafat-filsafat mengenai lingkungan hidup secara lebih serius tidaklah muncul sebelum Perang Dingin berakhir. Meskipun beberapa karya bernilai telah dihasilkan, ketertarikan para sarjana HI pada lingkungan hidup dianggap, di beberapa kalangan, sebagai suatu bagian dari tren 1990-an, yang diidentikkan dengan akhir Perang Dingin. Terdapat juga suatu kecenderungan untuk memperlakukan perhatian terhadap lingkungan sebagai sebuah isu dalam hubungan internasional (*thinking*

green) daripada menganggap *Green Thought* sebagai sebuah pendekatan yang dapat diterapkan di berbagai bidang.

Pengintegrasian isu-isu 'lingkungan' ke dalam Hubungan Internasional adalah selayaknya teks-teks pendahuluan yang cenderung akan menyederhanakannya dalam berbagai kemungkinan yang ada. Sebagai contoh dari kemungkinan tersebut, misalnya, para kaum realis lebih cenderung mendahulukan peperangan daripada sumber daya alam. Sering kali, lingkungan dipandang sebagai sebuah aspek dari hubungan Utara-Selatan; dalam kerangka pandangan semacam ini, para sarjana neo-Marxis mungkin saja memusatkan perhatian pada hubungan yang dekat antara kemiskinan, kesenjangan, dan kehancuran ekologi, atau mungkin menyatakan bahwa suatu kepedulian mengenai lingkungan akan memunculkan masalah-masalah tertentu bagi teori ekonomi liberal ortodoks. Para pluralis liberal, di sisi lain, memberikan perhatian pada hubungan-hubungan yang kompleks yang melingkupi sistem environmental. Masalah-masalah lingkungan yang perlu diperhatikan, seperti hujan asam, habisnya sumber daya, erosi tanah, kelangkaan makanan, dan pemanasan global, bahkan ketika diketahui bahwa hal-hal tersebut menjadi sebuah ancaman bagi seluruh planet, bisa jadi hanya akan dilihat sebagai isu-isu yang saat ini sedang giat berusaha untuk masuk ke dalam agenda internasional atau 'masalah-masalah' yang harus dipecahkan lewat kerja sama internasional.

Kotak Konsep

'Thinking Green'

Merunut pada yang kita istilahkan sebagai *'thinking green'*, mungkin asumsi-asumsi umum yang muncul adalah: dunia menghadapi permasalahan lingkungan hidup yang sangat serius; lingkungan hidup sangatlah memiliki arti yang penting karena, dalam beberapa pengertian, terus menipisnya sumber daya alam, pemanasan global, degradasi lingkungan dan polusi, yang semua itu merupakan ancaman bagi kondisi hidup ras manusia; Setelah mengetahui karakteristik global beberapa masalah atau isu lingkungan hidup, maka sangatlah tepat permasalahan ini diperhatikan oleh para sarjana Hubungan Internasional; dan permasalahan lingkungan global bisa dipecahkan, atau sedikitnya diatur, melalui kerja sama lewat forum-forum yang sudah ada atau baru termasuk juga institusi-institusi global.

Dalam suatu pengertian yang luas, semua hal di atas mungkin diartikan sebagai contoh-contoh dari *'thinking green'*. Pada bab ini, kita akan coba menggunakan beberapa waktu untuk mempertimbangkan suatu cara yang dengannya pemusatan perhatian pada lingkungan hidup sebagai sebuah isu dapat memperkaya pemahaman kita terhadap beberapa bidang perhatian yang cukup 'tradisional', seperti negara, kekuasaan, dan sebagainya. Dalam pengertian yang demikian, maka beberapa bagian dari bab ini sangatlah erat keterhubungannya dengan bab-bab sebelumnya. Meski demikian, bahasan kita tentang lingkungan hidup sebagai sebuah isu atau masalah yang mempunyai karakteristik tersendiri, sementara berkaitan dengan pendekatan lainnya yang ada dalam buku, akan relatif singkat. Hal ini karena kita akan menyatakan bahwa meningkatnya permasalahan lingkungan hidup dalam konteks teori Hubungan Inter-

nasional membawa kita pada area pembahasan yang jauh dari sekadar mengenai lingkungan hidup sebagai sebuah 'isu' atau 'masalah'. *'Thinking green'* dalam pengertian yang sebatas berarti memasukkan masalah-masalah atau isu-isu lingkungan hidup ke dalam perspektif teoretis lainnya, tidaklah sama dengan pemikiran dalam *Green Thought.*

Green Thought (ekologisme) merepresentasikan suatu tentangan fundamental pada pendekatan 'isu' atau 'penyelesaian masalah' terhadap lingkungan hidup. Lebih jauh lagi, dari sebuah perspektif semacam ini, sistem-negara kontemporer, struktur utama perekonomian global, dan bahkan institusi-institusi global dilihat sebagai bagian dari permasalahan. Selain itu, ilmu dan teknologi modern yang dimanfaatkan secara ekstensif dalam pendekatan-pendekatan 'penyelesaian masalah' terhadap lingkungan hidup, dalam beberapa hal, dapat dianggap tidak kurang sebagai penyebab dari degradasi lingkungan hidup global ketika menawarkan suatu solusi atas krisis!

Sejak 1960-an mulai muncul suatu kepedulian yang lebih serius terhadap lingkungan hidup, setidaknya di antara para akademisi-akademisi di Barat. Inti dari kepedulian semacam adalah menimbang kembali hubungan 'manusia-alam'. Dalam suatu contoh yang paling sederhana, misalnya, para akademisi yang menaruh simpati terhadap 'gerakan hijau' akan terus menantang sebuah pandangan yang melihat alam sebagai suatu yang eksternal terhadap umat manusia yang kejam dan berbahaya. Sebuah pandangan yang menyatakan bahwa lingkungan alam kita harus ditaklukkan dan dijajah daripada dihormati dan hidup di dalamnya. Dari gerak menimbang kembali hubungan manusia-alam ini, suatu perspektif yang lebih kritis telah muncul.

Untuk tujuan-tujuan kita, maka kita akan menggunakan istilah *Green Thought* untuk membedakan pendekatan-pendekatan kritis semacam ini terhadap hubungan manusia-alam, dari berbagai bentuk pendekatan *'thinking green'* yang lebih sempit dan reformis.

Optimisme yang ada dalam beberapa pendekatan 'pemecahan masalah' ditolak. Mereka yang sependapat dengan yang kita sebut sebagai *Green Thought* berpendapat bahwa hubungan antara manusia dengan alam secara luas menjelaskan krisis lingkungan hidup yang sedang terjadi saat ini dan berbagai fase hubungan ini perlu disusun ulang secara mendasar, jika planet dan semua penghuninya memang ingin menikmati sebuah masa depan yang aman. Kita akan membahas pandangan tentang modernitas, ilmu pengetahuan, dan eksploitasi terhadap alam ini secara lebih mendalam nanti. Para pendukung *Green Thought* mempunyai pemahaman yang sangat khusus tentang karakteristik dari krisis lingkungan hidup saat ini. Inti dari pemahaman ini adalah sebuah kepercayaan bahwa dunia itu terdiri dari serangkaian ekosistem yang saling berkaitan. Untuk itu, tidaklah mungkin untuk membuat suatu pembagian yang nyata antara manusia dan makhluk hidup lainnya. *Green Thought* menawarkan suatu cara pandang 'holistik' yang menyoroti eratnya hubungan antara kehidupan manusia dan ekosistem global. Kemudian, kami akan berusaha menunjukkan cara *Green Thought* mendorong sebuah perubahan yang mendasar dari pemusatan perhatian pada 'wilayah internasional' pada suatu konsepsi global dalam teori kontemporer.

Kotak Sejarah

Foto Bumi dari Ruang Angkasa

Foto-foto bumi yang untuk pertama kalinya diambil dari ruang angkasa memiliki dampak yang mendalam terhadap persepsi orang-orang di planet ini. Dari ruang angkasa bumi terlihat sepenuhnya; sebuah planet biru/hijau. Dalam foto ini batas-batas kekuasaan politik dan wilayah yang tak terlihat menjadi terkesan remeh. Gambar-gambar ini juga menampilkan kepada kita para penduduk bumi karakteristik global dari berbagai permasalahan lingkungan hidup yang tidak memandang batas-batas negara.

Singkatnya, *Green Thought* menuntut perubahan-perubahan radikal (baca: mendasar) dalam hal organisasi sosio-politik dan penghargaan bagi spesies non-manusia. Sebagaimana telah ditunjukkan oleh para pendukung pemikiran ini, *Green Thought* tidak perlu menjadi sebuah posisi yang tetap tetapi secara umum terlibat dalam: (1) suatu penolakan/pembahasan ulang terhadap pandangan-pandangan antroposentris; (2) suatu penolakan terhadap strategi-strategi pembangunan yang terlalu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga jauh di atas kualitas kehidupan; (3) keyakinan bahwa campur tangan manusia dalam hukum alam saat ini sedang mengancam keberlangsungan hidup umat manusia dan spesies lainnya; (4) sebuah desakan atas perlunya perubahan mendasar dalam struktur sosial, ekonomi, dan teknologi dan sistem ideologi/nilai; (5) suatu pemisahan antara kebutuhan-kebutuhan vital dan non-vital; (6) suatu etika yang berdasarkan 'teori tentang nilai yang peduli pada lingkungan' yang menempatkan nilai intrinsik dalam kehidupan non-manusia; dan (7) sebuah komitmen

aktif terhadap penerapan perubahan yang diperlukan untuk mencapai masa depan yang 'hijau', yang mencakup promosi gaya-gaya hidup alternatif, nilai-nilai, dan suatu desentralisasi kekuasaan.

Asal Usul

Setelah melihat semua asal usul berbagai model *green thinking*, kita mulai melihat suatu pencampuran berbagai pengaruh. Meskipun hal ini cukup kompleks dan saling terkait, kita akan membaginya ke dalam tiga area khusus: asal usul ilmiah, asal usul filosofi/etika dan asal usul politik. Asal usul ilmiah/teknologi merujuk pada pengetahuan tentang dan kesadaran atas permasalahan. Di sini, kita akan menemukan kemajuan maupun kemunduran yang ditawarkan oleh ilmu dan teknologi. Asal usul filosofi/etika merujuk pada spekulasi tentang hubungan antara umat manusia dengan fenomena alam. Filosofi telah memberi sumbangan pada masalah-masalah lingkungan hidup maupun membangkitkan kesadaran akan kebutuhan bagi cara berpikir yang berbeda dengan yang sebelumnya. Asal usul politik merujuk pada panduan-panduan bagi pengembangan tindakan untuk mengatasi suatu krisis telah terdeteksi. Meski pembagian-pembagian yang kita buat ini tidak selalu sepenuhnya jelas, kami berharap mereka akan membantu untuk memahami narasi yang ditawarkan di bawah nanti.

Dalam kerangka ketertarikan terkini terhadap lingkungan, seolah telah menjadi kesepakatan untuk menyebut permulaannya pada karya Rachel Carson yang sangat berpengaruh, *Silent Spring* (1962). *Silent Spring* merupakan sebuah novel yang menyoroti bahaya-bahaya dari penggunaan pestisida. Meski buku itu ditulis dan dipublikasikan setelah

terjadinya sejumlah besar permasalahan lingkungan hidup, mulai sejak revolusi industri, dan sebelum munculnya sejumlah besar filsafat ekologi yang cukup serius, namun sejak saat itulah lingkungan hidup mulai dianggap sebagai sesuatu yang vital bagi keberlangsungan kemanusiaan daripada suatu yang tak berbatas, sering kali kejam dan eksternal, sumber daya untuk dieksploitasi untuk produksi bagi kekayaan material manusia. Dengan kata lain, buku ini melakukan banyak hal untuk mendukung pandangan bahwa manusia seharusnya hidup berdampingan dengan alam daripada menaklukkannya.

Kotak Refleksi

Titanic

Dominasi dan subordinasi manusia terhadap alam terangkum dalam filosofi di balik Titanic. Titanic yang dibuat pada tahun-tahun awal abad XX dirasa pada saat itu menjadi kesaksian terdahsyat atas kemampuan manusia yang terus meningkat untuk menaklukkan alam. Pernyataan 'tidak dapat tenggelam' merupakan suatu pernyataan atau pandangan yang cukup umum kerika itu, yang dipertanyakan mulai tahun 1960-an hingga sekarang, bahwa kepintaran manusia selalu bisa menundukkan kekuatan alam yang dahsyat. Kenyataan bahwa Titanic tenggelam, rupanya tidak memberikan pelajaran bahwa hal itu bisa terjadi kapan saja. Kenyataannya, baru sekarang orang-orang mulai berbicara mengenai cara hidup dengan, daripada melawan, alam.

Berbagai faktor telah kemudian memberikan sumbangan bagi kesadaran publik tentang isu-isu lingkungan hidup yang makin tumbuh. Sayangnya, dalam faktor-faktor ini termasuk juga bencana-bencana lingkungan yang diberitakan secara besar-besaran tentang seperti mencairnya reaktor-

reaktor nuklir di Three Mile Island, AS tahun 1979 dan Chernobyl, Ukraina tahun 1986, sama halnya dengan tragedi kemanusiaan yang disebabkan oleh kebocoran gas di pabrik Union Carbide di Bhopal, India tahun 1984. Bagaimanapun, kekhawatiran yang benar-benar dirasakan banyak orang terhadap datangnya ancaman-ancaman lingkungan hidup yang akan segera mengancam keberlangsungan spesies-spesies adalah sesuatu yang relatif baru. Kemanusiaan telah dihadapkan kepada senjata-senjata nuklir, efek rumah kaca dan kebocoran ozon; yang menempatkan ancaman-ancaman lingkungan hidup dengan cakupan mulai dari *nuclear winter* (suatu keadaan setelah terjadinya ledakan nuklir yang sangat besar, sehingga tidak akan terdapat banyak cahaya ataupun panas —Peny.), pemanasan global, hingga kanker kulit.

Kebanyakan orang akan menjawab kemunculan *Green Thought* dari pemberitaan berbagai prediksi pesimistik tentang masa depan, yang paling terkenal adalah laporan *Limits to Growth* karya Roma Klub yang diterbitkan tahun 1972 (lihat kotak). *Limits to Growth* kemunculannya sangatlah penting dalam mendorong diskusi, perdebatan dan penelitian, dan dalam menawarkan suatu alternatif terutama bagi pertumbuhan kemanusiaan yang berorientasi sikap. Pada beberapa tingkatan, argumen *Limith to Growth* yang dikombinasikan dengan suatu penolakan dari anthoposentrisme, dapat dilihat sebagai esensi dari *Green Thought*.

Kotak Literatur

Laporan *Limits to Growth* (1972)

Para peneliti menggunakan teknik-teknik pemodelan komputer untuk 'membuktikan' temuan-temuan mereka bahwa faktor-

faktor lingkungan akan segera akan menolak terus dipaksakannya pertumbuhan dan/atau membawa bencana. Lajunya pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan populasi telah menghasilkan serangkaian krisis yang saling-terkait. Dunia dengan cepat kehabisan sumber daya untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia atau menyediakan bahan mentah bagi industri. Akhirnya, kemampuan lingkungan hidup untuk sepenuhnya menyerap sisa buangan konsumsi manusia dan limbah industri menjadi semakin berkurang. Masyarakat manusia akan hancur sebelum 2100.

Meski bagaimanapun kita memikirkan tentang asal usul dari *'thinking green'*, asal usulnya selalu saja kembali ke masa jauh sebelum lahirnya para penggegas pemikiran tersebut. Filsuf kuno seperti Plato dan Konfusius, yang memiliki fokus pemikiran yang jauh berbeda dengan pemikiran *'thinking green'*, tetap sekali waktu memberikan perhatian mereka pada lingkungan hidup pada beberapa hal. Lebih jauh lagi, ide atau pemikiran pemeliharaan lingkungan hidup dapat ditemukan dalam banyak sistem keagamaan maupun juga hukum di seluruh sejarah peradaban manusia. Pada beberapa tingkatan, Aristoteles, yang oleh banyak orang dianggap sebagai seorang pemikir konservatif, bisa dianggap sebagai seorang yang memiliki perhatian terhadap lingkungan, terutama dalam hal ketertarikannya pada flora dan fauna Yunani.

Pada abad yang lebih baru, kita dapat mengenali suatu cabang pemikiran lingkungan hidup yang sangat reformis yang terpengaruh oleh paham utilitarianismenya Bentham —yang telah dibahas secara lebih mendalam di bab 2. Pendekatan-pendekatan Utilitarian terhadap lingkungan hidup memberikan prioritas pada 'prinsip kepuasan' dan maksimalisasi dari perolehan material individu manusia. Dalam

cara pandang yang sama, kita juga dapat mengenali suatu paham yang agak otoritarian dari pemikiran environmentalisme yang membuat Hobbes menciptakan konsepsi *'green Leviathan'* —suatu kekuasaan terpusat untuk mengatasi kebuasan dari persaingan ekonomi yang 'alami' (lihat bab 1). Beberapa pemikir dan aktivis lingkungan kontemporer tak diragukan lagi mempunyai simpati dan kecenderungan terhadap anarkisme yang berkembang pada abad XIX. Versi anarkisme yang lebih romantis membangkitkan gambaran-gambaran tentang orang-orang yang hidup dalam komunitas-komunitas berskala kecil, yang mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar, namun menghindari materialisme, dan menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam gaya hidup sederhana ini, yang memberikan kesempatan pada mereka untuk hidup secara nyaman tanpa harus merusak lingkungan atau mengeksploitasi kehidupan manusia lainnya. Seperti yang akan kami kemukakan nanti, banyak pendukung gerakan lingkungan mendukung desentralisasi kekuasaan dan pembuatan kebijakan dari struktur-struktur birokrasi pemerintah pusat yang kurang manusiawi, ke tangan komunitas lokal. Di sini kita menemukan gema dari kepercayaan Rousseau pada demokrasi parsipatoris dan langsung.

Tanpa harus menghiraukan asal usul pemikiran lingkungan yang kompleks dan panjang semacam itu, kita sebaiknya mengikuti suatu cara lain guna benar-benar mendapatkan pemahaman tentang krisis kontemporer dan upaya-upaya untuk membuat teori tentangnya. Istilah ekologi dalam satu pengertian, merupakan suatu penemuan abad XIX, yang pertama kali muncul dalam karya Ernst Haeckl. Karya Haeckl itu sangatlah penting karena dari sinilah kita mendapat gambaran tentang ekosistem sebagai

suatu yang saling berkaitan dan tentang alam sebagai sesuatu yang hidup. Sebenarnya, apa perlunya ia akan perlu untuk mengungkapkan suatu pandangan tentang alam atau lingkungan hidup seperti itu sebagai dasar pemahaman? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami pemikiran sosial dan politik Barat dari abad XVI hingga saat ini, dan cara ilmu pengetahuan modern masing-masingnya telah merepresentasikan hubungan antara manusia dan dunia alam. Memang, setelah mengetahui pengaruh begitu banyak pemikir yang berbagai paham *'thinking green'*, mungkin titik awal yang paling berguna untuk memahami asal usul dari Green Thought adalah dalam sebuah kritik terhadap proyek modernitas.

Ide bahwa kecerdasan manusia dan pemikiran ilmiah dapat digunakan untuk menaklukkan alam dan menyelesaikan berbagai masalah, muncul bersama dengan lahirnya modernitas dan, tentunya, setelah zaman Pencerahan (*Enlightenment*). Pada masa sebelum periode zaman modern ini, agama memainkan peran yang sangat penting dalam memahami dan menjelaskan karakteristik kehidupan manusia, bentuk-bentuk organisasi sosial dan hubungan antara umat manusia dengan 'lingkungan' mereka. Contohnya, dalam pemikiran Kristen-Judaeo terdapat kepercayaan bahwa masyarakat manusia itu diperintah oleh Tuhan dan diatur menurut kehendakNya. Hal ini tidak untuk mengatakan bahwa sistem-sistem kepercayaan agama perlu mencegah dominasi alam. Perjanjian Lama, memang, menjelaskan pada beberapa bagiannya merinci hierarki alam yang membenarkan, pada beberapa hal, eksploitasi atas alam. Meski bagaimanapun, pembenaran tersebut dalam konteks filosofi moral menyeluruh yang mengajarkan penghormatan bagi

semua ciptaan Tuhan dan suatu tingkatan kerendahan hati di hadapan kemahakuasaan-Nya.

Seperti yang kita lihat pada bab sebelumnya, salah satu ciri dari modernitas adalah pemikiran sekuler, yang umumnya dilegitimasi oleh argumen rasionalitas dan 'bukti' ilmiah, memainkan suatu peran kunci dalam menentang pengaruh agama dalam kehidupan politik. *Enlightenment* berdasar pada suatu keyakinan bahwa penerapan ilmu pengetahuan pada serangkaian masalah yang dihadapi manusia akan banyak meningkatkan kesejahteraan material umat manusia. Pada saat yang sama, kapasitas umat manusia untuk memahami prinsip-prinsip rasional akan memberikan kesempatan bagi pengaturan kembali kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Secara bersamaan, inovasi-inovasi ini akan memberikan kesempatan umat manusia untuk terus melangkah menuju suatu kehidupan yang 'lebih baik', yang merupakan ekspresi populer yang ditawarkan modernitas, sedang *Enlightenment* menawarkan ide 'kemajuan'. 'Keyakinan' baru pada rasionalitas dan ilmu ini juga mendorong suatu pandangan yang memandang umat manusia sebagai 'master' dari, jika bukan jagat raya, maka bagian tertentu di bumi.

Seperti yang akan kita lihat, masalah-masalah lingkungan hidup yang kita hadapi hari ini banyak berhubungan dengan optimisme semacam itu. Sebelum melihat pada periode kontemporer, sehubungan dengan ini, kita perlu melihat dua tipe manusia yang sangat penting dalam perubahan sikap dari rasa hormat dan takut di hadapan alam menjadi sikap mendominasi dan tidak memiliki rasa takut. Peran Francois Bacon dalam mengubah gambaran mengenai alam dari zaman pre-modern ke zaman modern sangatlah

penting. Bacon membenarkan analisis ilmiah dalam kerangka bahasa yang sesuai dengan agama ortodoks saat itu. Contohnya, ia berpendapat bahwa keengganan untuk meneliti dunia yang Tuhan telah ciptakan sebenarnya merupakan suatu penghinaan pada Tuhan dan metode ilmiah, dengan demikian, merupakan hal yang sangat penting. Dalam menyatakan bahwa ilmu pengetahuan menemukan keajaiban-keajaiban yang rumit ciptaan Tuhan, Bacon mampu mengonstruksikan celah-celah penting dalam doktrin agama yang memberikan kesempatan perkembangan ilmu pengetahuan.

Akan tetapi, secara intelektual, penghargaan yang jauh lebih besar atas proses perkembangan ilmu pengetahuan layak tertuju pada René Descartes. Dari Descartes, kita bisa menyebut pandangan antroposentris tentang hubungan manusia-alam ini sebagai sebuah pandangan Cartesian.

Kotak Pengarang

René Descartes

Descartes menetapkan dua premis yang sangat berpengaruh dalam filsafat Barat. Yang pertama adalah bahwa ada suatu pembatasan yang jelas antara akal dan raga dan kedua, penting dalam konteks ini, bahwa dunia alam adalah sebuah mesin. Sebagai akibatnya, ia berpendapat bahwa pemahaman atas proses-proses alam bisa dicapai dengan menempatkan mereka pada hukum mekanis. Bagi Descartes, dan mereka yang kemudian dipengaruhi olehnya, alam hanyalah materi yang bergerak. Sebagaimana juga mati. Tidak ada dilema moral dalam penggunaan alam bagi tujuan-tujuan kita dan tidak perlu menjaganya dengan perasaan mistik seperti yang sebelumnya dilakukan pada zaman pertengahan. Pandangan bahwa alam ada untuk mencukupi kepentingan umat manusia dan tidak punya nilai intrinsik dikenal sebagai anthroposentrisme dan memberikan karakteristik organisasi dari masyarakat manusia sejak

di Barat. Dengan kata lain, ditemukanlah bahwa umat manusia bisa menggunakan alam untuk keuntungan mereka sendiri; yakni tidak perlu lagi merasa takut terhadap alam dan bahwa ilmu mempunyai potensi untuk mengubah masyarakat.

Penting untuk dicatat bahwa suatu pandangan Cartesian seperti itu tidak sepenuhnya menggantikan nilai-nilai yang telah dipraktikkan. Konsepsi pra-modern tentang hubungan manusia-alam masih dianut antara kelompok-kelompok kecil manusia, namun cukup penting, terutama mereka yang leluhurnya tidak harus dipaksa, dengan berbagai macam cara atau pembenaran, mengalami 'peradaban' Eropa (baca: penjajahan) dan pembebasan dari 'barbarisme'. Bagaimanapun, meski pengaruh-pengaruh dari masyarakat industri telah cenderung mengarah pada proses transformasi mundur, yang akan kita lihat lebih rinci nanti, namun yang terjadi pada saat itu adalah bahwa anthroposentrisme adalah cara berpikir (*mindset*) yang secara umum dianut di antara populasi-populasi Barat (kebarat-baratan). Bagaimanapun, anthroposentrisme sekarang dipertimbangkan kembali secara sadar dan perubahan fisik dari penolakan manusia dan terlupakannya fakta bahwa kemanusiaan merupakan bagian dari, dan disusun oleh, alam kini menjadi kian tampak. Perdebatan tentang: cara mengatasi suatu krisis lingkungan yang mulai tampak ini dengan menggunakan anthroposentrisme yang telah disesuaikan atau menggantikannya dengan ekosentrisme (*Greens Thought* atau ekologisme) merupakan pokok dari argumen dan perdebatan-perdebatan teoretis mengenai lingkungan.

Kotak Literatur

***Radical Ecology* karya Carolyn Merchant**

Buku ini menemukan anthroposentrisme dalam kelahiran modernitas. Anthroposentrisme tak bisa dilepaskan keterikat dengannya dengan kemunculan rasionalitas instrumental, subordinasi atau dominasi terhadap alam (dalam ungkapan Merchant, 'matinya alam') dan institusionalisasi hubungan sosial yang patriarkis.

Mungkin, kita juga harus mencatat pada titik ini bahwa wacana-wacana modern tentang karakteristik manusia sebagai makhluk yang otonom dan rasional, dan tuntutan atas sikap yang lebih rasional atau ilmiah itu, mulai mendapatkan tantangan. Seperti yang telah kami tunjukkan pada bahasan kami tentang feminisme, bahwa *Enlightenment* dihasilkan dari munculnya sejumlah '*counter-discourses*'. Banyak pemikiran utopis pada saat itu yang tidak berkaitan dengan kemajuan materi, tetapi dengan hal-hal yang spiritual. Meski begitu, dengan revolusi ilmu pengetahuan, yang berasal dari pemikiran *Enlightenment,* pencarian manusia akan 'kehidupan yang baik' semakin diidentikkan dengan penaklukan terhadap, dan penguasaan atas, alam untuk memperoleh kemajuan material. Sebagaimana juga, beberapa pemerhati lingkungan saat ini mempercayai bahwa dalam dunia kontemporer ini, konsumerisme global, yang sedang mengancam kelangsungan lingkungan hidup, berakar pada sesuatu, terutama, suatu pandangan yang antroposentris tentang alam.

Kotak Refleksi

Para pemerhati lingkungan menolak rasionalitas *Enlightenment* bukan karena ia tidak rasional tetapi karena hal itu tercerahkan dalam konteks lingkungan hidup. Meski teori dan praktik modernitas melingkupi berbagai dan beragam perhatian, Anda mungkin telah mendeteksi unsur-unsur modernis tertentu dalam *Green Thought*. Kira-kira apa mereka menurut Anda? Dalam kerangka sikap-sikap terhadap dominasi alam untuk tujuan manusia, bagaimanakah —dalam hal apa— *Green Thought* berbeda dari teori kritis?

Seperti yang akan kita lihat berikut, *Green Thought* mempunyai suatu etika begitu pun politik. Hal yang sangat istimewa dalam sikap *Green Thought* terhadap keadilan, moralitas, dan etika, bagaimanapun juga, adalah bahwa pemikiran ini berusaha keluar dari batasan-batasan pemikiran yang dianut kebanyakan wacana, dengan memperluas konsep 'komunitas' agar dapat melibatkan binatang-binatang dan makhluk hidup lain non-manusia lainnya. Dalam banyak kasus, sikap semacam itu pada dasarnya adalah pengadopsian tema egalitarianisme dari filsafat modern lainnya tetapi menerapkannya pada seluruh spesies, seperti dalam wacana tentang hak-hak binatang.

Kutipan di atas mengenai Konfusius tidaklah bermaksud apa-apa karena pembahasan tentang 'asal usul' *Green Thought* dalam buku ini terbatas pada tradisi-tradisi Barat. Akan tetapi, penting untuk dicatat bahwa *Green Thought* merujuk juga pada sejumlah filsafat non-Barat. Argumen-argumen dalam bab ini sering berfokus pada isu-isu mengenai kemajuan yang membawa kerugian besar bagi lingkungan sebagai bagian kebudayaan Barat dan penghargaan atau rasa hormat terhadap alam yang terkandung dalam bebe-

rapa kebudayaan lain. Contohnya, konsepsi Gaia tentang bumi sebagai suatu makhluk hidup, yang kompleks dan menakjubkan, dan tidak hanya sebagai suatu sumber bagi pemuasan keinginan-keinginan yang tidak terbatas membawa pengaruh spiritual dan moral yang berarti. Bukan hanya Gaia (bumi) berhak mendapat perlindungan, tetapi kita mungkin sedang menandatangani surat bunuh diri kita sendiri jika kita masih melanjutkan praktik-praktik pembangunan yang berbasis pada pertumbuhan dan konsumsi yang terus-menerus. Para pemerhati lingkungan telah menghubungkan diri mereka sejumlah filsafat holistik yang berpremis bahwa pengetahuan yang paling baik datang dari pemahaman bahwa yang dinamakan entitas bukanlah beragam bagian, tetapi suatu sistem keseluruhan yang bagian-bagiannya saling berkaitan. Pengakuan terhadap pengaruh-pengaruh non-Barat itu sangatlah penting karena ajakan para pemerhati lingkungan, '*think globally act locally*' (berpikir secara global dan bertindak secara lokal) melibatkan perhatian yang serius tentang sistem pengetahuan lokal asli yang telah membuat umat manusia berhasil hidup berdampingan dengan alam selama bertahun-tahun dan juga terancam oleh apa yang disebut dengan 'kekuatan progresif gerak modernisasi dan globalisasi'.

Asumsi

Dengan mengacu pada *Green Thought*, maka akan sangatlah mungkin mengenali seperangkat asumsi yang saling terkait:

1. Para pemerhati lingkungan menekankan global di atas internasional. Contohnya, Nilai penting komunitas global sama diakuinya dengan hak-hak dari komunitas-

komunitas lokal untuk mengontrol sumber daya mereka sendiri dan keberadaan komunitas-komunitas bio-regional sebagai bangunan dasar dari bumi.

2. Para pemerhati lingkungan berangkat dari pemahaman implisit bahwa kebiasaan-kebiasaan manusia masa kini dalam beberapa pengertian tidak lagi sejalan dengan dunia non-manusia.
3. Para pemerhati lingkungan menekankan bahwa kebiasaan manusia zaman modern, yang didukung oleh sistem kepercayaan filsafat antroposentris , sebagai penyebab utama dari krisis lingkungan hidup.

Kotak Refleksi

Apa implikasi-implikasi yang menentukan dari pendekatan ini?

Apa yang ia sarankan untuk kita lakukan dan apa yang mungkin menjadi konsekuensi dari tindakan seperti itu? Sejauh mana Anda pikir bahwa para pemerhati lingkungan melihat kemungkinan-kemungkinan bagi orang-orang untuk memengaruhi perubahan-perubahan dalam 'tatanan' yang ada dan cara hidup mereka?

Tema-tema

Negara dan Kekuasaan

Apa pengaruh-pengaruh dari masalah-masalah lingkungan hidup global bagi suatu negara? Apakah otonomi/legitimasi akan kemudian dilemahkan oleh kebutuhan mereka akan respons global terhadap mereka? Jika kekuasaan tertinggi harus diberikan pada institusi-institusi global, apakah kerja sama berarti bahwa kita perlu mempertim-

bangkan kembali distribusi kekuasaan antara negara-negara dan aktor-aktor lainnya? Apa pengertian kita tentang kedaulatan sedang mengalami perubahan? Seandainya negara sedang menghadapi beragam tantangan, apakah hal ini harus berarti sesuatu yang bagus?

Pada 1970-an, para pemikir liberal menghubungkan isu-isu lingkungan dengan mulai munculnya interdependensi antara negara-negara, dengan berpendapat bahwa hal ini akan secara mendasar mengubah sistem-negara dengan mengurangi kedaulatan. Kini, beberapa pemikir liberal menyatakan bahwa permasalahan lingkungan hidup, seperti penipisan ozon dan pemanasan global memaksa negara-negara untuk terlibat dalam strategi-strategi kerja sama yang lebih banyak, sehingga melemahkan prinsip kedaulatan. Penyelesaian permasalahan lingkungan akan menyebabkan munculnya standar kedaulatan yang baru.

Liftin berpendapat bahwa respons-respons politik terhadap permasalahan lingkungan global mengubah hak-hak dan kapasitas-kapasitas negara. Banyak di antara Negara Dunia Ketiga kurang memiliki kapasitas untuk menegakkan standar-standar lingkungan; berdirinya lembaga-lembaga lingkungan internasional dan kegiatan-kegiatan dari aktor-aktor lingkungan hidup transnasional; terutama *NGOs* (LSM) dan komunitas epistemik (seperti para ilmuwan), menciptakan bentuk-bentuk baru pemerintahan dan otoritas. Semua ini mungkin tidak menggantikan negara, tetapi mereka mengubah karakter kedaulatan. Juga, wacana-wacana tentang pemeliharaan lingkungan memaksa negara untuk memasukkan dalam sistem mereka beberapa pertanggungjawaban publik yang ekologis. Aktivisme para warga negara yang makin meningkat yang termanifestasikan

merebaknya berbagai macam *NGOs* dan pergerakan sosial memunculkan penawaran kedaulatan untuk diajukan dalam bentuk rezim atau sistem yang menangani permasalahan lingkungan. *NGOs* dan pergerakan sosial, tentunya, berurusan dengan perpolitikan yang berada di atas kekuasaan negara-bangsa, dalam artian bahwa mereka menyediakan saluran-saluran alternatif atas kontrol dan otoritas dan pembentukan kembali pengertian sosial dan kepercayaan-kepercayaan. Pengaruh-pengaruh kumulatif dari semua perkembangan ini akan mungkin untuk mengubah norma-norma dan praktik-praktik dari kedaulatan dan menciptakan saluran-saluran alternatif kegiatan politik yang legal. Lebih lanjut lagi, legitimasi dari lembaga-lembaga negara secara serius bisa dilemahkan oleh berbagai perpecahan dan konflik sosial yang, sebagiannya, merupakan sebuah konsekuensi dari semakin memburuknya kondisi lingkungan hidup.

Meningkatnya kelangkaan sumber daya alam mengakibatkan meningkatnya kelemahan negara karena hal tersebut melemahkan ikatan antara negara dan masyarakat. Pada saat yang sama kegagalan, contohnya, hasil pertanian bisa menyebabkan meningkatnya tuntutan terhadap negara oleh kelompok-kelompok sosial tertentu. Studi terkini dari *Project on Environment, Population and Security* (EPS) menyimpulkan bahwa kelangkaan sumber daya lingkungan meningkatkan tuntutan masyarakat terhadap negara sementara secara terus-menerus menurunkan kemampuan negara untuk memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut.

Para pemikir realis, tentu saja, melihat kedaulatan sebagai suatu karakteristik objektif yang memberi negara hak untuk terlibat dalam hubungan internasional. Para kaum realis tersebut dapat saja mungkin menjawab bahwa apa

pun tantangan-tantangan yang harus dihadapi negara-negara kontemporer, tetap saja negara merupakan satu-satunya entitas yang mempunyai cukup legitimasi, sumber daya, dan kontrol atas wilayah kekuasaannya untuk menegakkan aturan-aturan lingkungan hidup. Hanya negara yang punya kemampuan menyusun kebijakan luar negeri; hukum internasional yang mendukung prinsip kedaulatan, sehingga berbagai kesepakatan lingkungan memperkuat dan mengadaptasi prinsip kedaulatan dan, oleh karenanya, mendukung sistem negara. Lebih lanjut lagi, sistem negara akan dapat berfungsi untuk menahan kekuatan-kekuatan ekonomi yang sedang mendukung penghancuran yang membabi-buta dan tanpa henti terhadap lingkungan hidup.

Contoh Dunia

Negara-negara sering kali menentang aturan-aturan ekonomi yang lazim dengan berusaha membatasi impor ikan tuna yang *dolphin-unfriendly* (penangkapan ikan tuna yang tidak menggunakan jaring khusus yang didesain agar lumba-lumba dapat meloloskan diri jika mereka ikut tertangkap —Peny.) dan kayu-kayu yang ditebang tanpa memedulikan keseimbangan ekologi di area yang dikonservasikan, tetapi tekanan-tekanan dari sistem perdagangan bebas yang liberal membuat penentangan seperti itu menjadi sulit.

Bahkan, jika kita tidak dengan segera didesak oleh 'mandat hijau' —sebagaimana telah dibahas di atas— dari para kaum realis, penting untuk disadari bahwa tidak semua institusionalis (para pendukung sistem atau adat kebiasaan yang telah lama mapan —Peny.) liberal melihat perhatian pada permasalahan lingkungan hidup sebagai sesuatu yang memunculkan aktivitas politik baru di atas

lingkup negara. Negara merupakan pemain kunci dalam kemunculan berbagai institusi baru untuk lingkungan.

Inilah beberapa cara di mana *'thinking green'* menentang pemahaman konvensional tentang konsepsi negara dan kedaulatan dalam HI, tetapi adakah sebuah perspektif *Hijau* (baca: kepedulian lingkungan) yang khusus membahas karakteristik dan peran negara? Jawabannya adalah 'tidak'. Seperti yang kami nyatakan dalam bahasan kami tentang 'asal-usul' pemikiran ini, terdapat pengaruh para anarkis yang cukup kuat dalam *Green Thought*. Pengaruh tersebut diarahkan pada negara karena ia merupakan suatu lembaga hierarkis yang mengonsolidasikan semua lembaga hierarkis. Paterson telah menarik perhatian kita pada negara yang mendukung patriarki dan hubungan sosial yang tidak-egaliter lainnya. Negara juga mendukung perkembangan-perkembangan teknologi dan berbagai bentuk organisasi ekonomi yang membahayakan lingkungan hidup. Tentu saja, ada sebuah paham yang sangat berpengaruh dalam *Green Thought* yang mendukung desentralisasi kekuasaan pada komunitas-komunitas skala kecil atau komunitas-komunitas bio-regional yang lebih besar. Bagaimanapun, dukungan bagi negara akan datang dengan berbagai motif pragmatis; beberapa pemerhati lingkungan berpendapat bahwa negara harus mempertahankan beberapa bagian kekuatan yang dibutuhkan untuk bernegosiasi di tingkat global. Negara dapat juga berperan dalam pendistribusian sumber daya alam dari masyarakat golongan kaya ke daerah-daerah miskin di dunia. Pada kenyataannya, memang, para pemerhati lingkungan berpendapat bahwa, sebagaimana tuntutan reformasi yang terus diteriakkan, krisis lingkungan adalah suatu hal yang penting dan mendesak. Hanya negara yang bisa

mempromosikan tindakan internasional yang efektif. Jadi, sementara memiliki suatu pandangan yang bertentangan terhadap negara, beberapa pemerhati lingkungan tetap menganggap negara sebagai sebuah lembaga penting. Para pemerhati lingkungan ini melihat adanya suatu kebutuhan yang penting dan mendesak untuk mendistribusikan kekuasaan pada komunitas-komunitas lokal dan pada saat yang sama mereka juga melihat pentingnya pemusatan kekuasaan pada tingkatan regional dan global. Negara-bangsa dilihat sebagai sesuatu yang terlalu besar dan juga terlalu kecil untuk mengatasi secara efektif tantangan-tantangan lingkungan hidup dan untuk mengoordinasikan kesepakatan.

Konflik dan Kekerasan

Dengan suatu pandangan instrumental para kaum realis yang *state-based,* lingkungan hidup hanya bernilai sejauh ia bisa digunakan sebagai sebuah senjata atau, sebaliknya, sebagai suatu kekurangan sumber daya yang bisa melemahkan atau menguatkan posisi/potensi kekuatan negara. Dalam berhadapan dengan hubungan antara sumber daya dan kekuasaan, para kaum realis mungkin merasa bahwa mereka telah cukup berurusan dengan lingkungan hidup sebagaimana yang seharusnya dan bahwa mereka lebih suka memusatkan perhatian pada esensi dari politik dunia, meninggalkan masalah lingkungan pada para pakar biologis, ekologis, dan para spesialis lainnya.

Akan tetapi, jika kaum realis telah memperlihatkan sedikit ketertarikan terhadap lingkungan hidup, mungkinkah mereka seharusnya begitu? Proyek EPS seperti yang disebutkan di depan menyatakan bahwa pemanasan global

dan penipisan ozon tidak akan secara langsung menyebabkan timbulnya kekerasan, tetapi setelah melewati periode yang lebih panjang kedua hal tadi sangat mungkin berinteraksi dengan tekanan-tekanan lingkungan hidup dan demografis, dan menambah ketegangan-ketegangan. Contohnya, meski secara global ada lebih dari cukup air bersih untuk memenuhi kebutuhan manusia, beberapa bagian wilayah di dunia telah menghadapi kelangkaan air. Sumber daya air yang kurang meningkatkan risiko penyakit-penyakit yang berasal dari air, seperti malaria. Di beberapa bagian Asia dan Afrika mulai terjadi kelangkaan kualitas lahan pertanian yang baik, sementara di beberapa tempat di seluruh dunia eksploitasi berlebihan dalam bidang perikanan tidak hanya mengancam ekosistem, tetapi juga telah menghasilkan pengangguran dan kesulitan ekonomi. Laporan EPS menyimpulkan bahwa kelangkaan sumber daya lingkungan hidup dapat berinteraksi dengan faktor-faktor seperti itu untuk kemudian menyebabkan efek-efek sosial yang signifikan; kelangkaan sumber daya lingkungan bisa memperburuk perpecahan sosial, menciptakan segmentasi sosial baru, atau juga meningkatkan konflik antar-kelas maupun etnik. Meskipun laporan tersebut membeberkan hubungan antara meningkatnya kelangkaan sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan munculnya konflik kekerasan dalam negara, laporan tersebut mempunyai implikasi yang sangat nyata bagi hubungan antar-negara. Seperti yang akan kita lihat berikut, kelangkaan sumber daya alam dapat menghasilkan konflik antar-negara, terutama di wilayah yang di tempat tersebut sedang berlangsung perselisihan kewilayahan, 'kepemilikan' dan kontrol atas sumber daya. Kemiskinan akan menambah tekanan untuk bermigrasi;

orang-orang akan pindah ke wilayah-wilayah yang memiliki sumber daya lingkungan hidup yang mencukupi, atau ke negara-negara lain. Migrasi dapat menghasilkan ketegangan-etnis, terutama ketika sumber daya alam telah berkurang atau langka. Ketika pencampuran etnik di suatu negara sangat tidak stabil, suatu arus masuk migrasi akan meningkatkan ketegangan dan lebih lanjut juga merusak stabilitas negara.

Tentu saja, seseorang tidak perlu menjadi seorang realis untuk mengetahui keberadaan konflik dan kekerasaan dalam hubungan manusia; perasaan kekerabatan dan kemiskinan yang ekstrem makin mengipasi kobaran konflik. Konflik seperti inilah yang lembaga-lembaga militer sangat kesulitan untuk mengontrolnya, apalagi mengatasinya. Di kebanyakan tempat di dunia berkembang, di mana masyarakat sipil itu demokrasinya lemah dan mudah pecah, dengan kondisi-kondisi lingkungan hidup yang kian memburuk kian lama bisa menghancurkan legitimasi pemerintah dan lembaga-lembaga sosial. Jika ketersediaan kesempatan politik yang memungkinkan masyarakat untuk mengubah situasi mereka makin sedikit, maka kekerasan politik lebih banyak kemungkinannya.

Sangatlah tepat jika kita mengakhiri bagian ini dengan menjelaskan cara *Green Thought* dalam menentang persepsi kita mengenai pengertian dari istilah-istilah, seperti konflik dan kekerasan, meskipun hal ini bukanlah sesuatu yang eksklusif ada pada *Green Thought* saja. Konflik tidak hanya secara langsung mengonotasikan kekerasan fisik; konflik berarti perbedaan-perbedaan sudut pandang yang masing-masing berkomitmen untuk menyelesaikan suatu perbedaan menurut caranya sendiri. Dalam hal ini, muncul suatu

konflik mendasar dalam berbagai kelompok masyarakat manusia antara pendukung masyarakat industri yang cenderung menghancurkan lingkungan (sebuah paradigma pertumbuhan) dan mereka yang menentang cara mengatur masyarakat yang semacam ini (suatu paradigma pembatasan pertumbuhan). Menurut penafsiran itu, hal yang telah disebut dengan 'mega-mesin' dari masyarakat industri (kapitalis atau sosialis) telah menimbulkan kekerasan besar-besaran pada planet; pada tampilan-tampilannya dan makhluk-makhluknya.

Lembaga-lembaga dan Tatanan Dunia

Pada bagian ini kami menguraikan dengan singkat proses mulanya masalah-masalah lingkungan hidup membawa terbentuknya rezim-rezim baru atau telah membuat mereka masuk ke dalam agenda organisasi-organisasi internasional seperti PBB. Kemudian kami akan mencoba dari melangkah di luar masalah-masalah sempit ini mengenai isu-isu dan lembaga-lembaga lingkungan hidup, dan membahas secara ringkas kritik para pemerhati lingkungan terhadap tatanan dunia yang sedang berlaku dan berusaha untuk merevisi suatu cara pandang dunia berdasarkan prinsip-prinsip yang menyuarakan lingkungan hidup.

Dimensi internasional mengenai lingkungan hidup telah muncul ke permukaan depan sejak awal 1970-an. Saat itu Konferensi PBB mengenai Lingkungan Hidup Manusia yang berlangsung di Stockholm secara eksplisit menghubungkan tema lingkungan hidup dan pembangunan untuk kali pertama. Sejak itu, lingkungan hidup telah dianggap sebagai manifestasi lain dari interdependensi (saling ketergantungan) dalam hubungan internasional dan sebuah

sebab perlunya negara-negara terlibat dalam kerja sama untuk 'menyelesaikan' masalah. Secara sederhana, pesan dari Konferensi Stockholm adalah bahwa negara-negara yang makin kaya (atau tetap miskin) tetap bisa memiliki konsekuensi-konsekuensi lingkungan hidup. Hal ini sangat mendorong diadakannya diskusi di antara para sarjana Hubungan Internasional.

Secara relatif hingga kini, solusi bagi masalah-masalah lingkungan hidup masih didasarkan pada suatu keyakinan mendasar akan kemungkinan perkembangan. Para pemikir liberal, contohnya, sangat optimis tentang kemungkinan bahwa pengawasan atau antisipasi terjadinya bencana lingkungan hidup dan perlindungan sumber daya-sumber daya alam merupakan contoh dari kepentingan bersama yang dapat memunculkan kebutuhan kerja sama dalam pencarian solusi-solusinya. Para pemikir liberal merupakan pihak yang pertama kali menyarankan bahwa rezim-rezim internasional dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan skenario *'win-win solution'* guna memperbaiki ketidakseimbangan lingkungan hidup (lihat bab 2). Di sini, secara sederhana kami menjelaskan beberapa lembaga dan rezim-rezim yang telah muncul sebagai respons terhadap masalah-masalah yang bakal timbul dari pembangunan yang terus berkelanjutan.

Kotak Literatur

Pandangan Ben Elton tentang Kemajuan

Seperti dalam menulis novel *Stark* yang menyoroti konsekuensi-konsekuensi yang berpotensi bencana atas dampak kelakuan manusia terhadap bumi, pertunjukannya Ben Elton juga me-

masukkan beberapa materi *eco-conscious* seperti komentarnya bahwa 'berkembang' adalah sebuah kata yang bagus —sebuah eufemisme kuno dari 'merusak atau menghancurkan sesuatu'

Keyakinan bahwa konsekuensi-konsekuensi lingkungan dari pembangunan, industrialisasi, dan pertumbuhan dapat ditangani telah menuai banyak kritik para pemerhati lingkungan yang lebih radikal. Para pemerhati lingkungan ini percaya bahwa kebanyakan konferensi PBB dan rezim-rezim serta lembaga-lembaga yang telah tumbuh —sebagai konsekuensinya dari keyakinan tersebut— semuanya bermula dari premis dasar bahwa pengaruh-pengaruh industrialisasi dapat diatasi, memberikan kesempatan manusia untuk mencapai 'kemajuan' dengan cara yang masih sama seperti yang telah berlangsung. Manajerialisme ini tidak menganggap bahwa pembangunan memiliki permasalahan apa pun, tetapi bahwa modifikasi-modifikasi kecil pada strategi pembangunan sangat diperlukan untuk membuat segala sesuatunya berjalan lebih lancar. Analoginya yang sederhana, misalnya, sebuah mesin mobil yang didesain dengan sempurna, tetapi memiliki suatu kebocoran kecil minyak yang cepat atau lambat akan meledak jika tindakan tidak segera dilakukan untuk memperbaiki kebocoran, tetapi tindakan seperti itu sepenuhnya memungkinkan. Environmentalisme 'dangkal' kerap digunakan untuk membenarkan perubahan bentuk hubungan-hubungan yang ada, sementara beberapa pemerhati lingkungan mengajukan tuntutan bagi sebuah bentuk organisasi sosial non-hierarkis yang bersifat radikal dan terdesentralisasi.

Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan (UNCED, 1992), yang sering kali disebut sebagai

Konferensi Bumi atau hanya 'Rio', merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam konsep 'pemerintahan global'. UNCED berusaha mencari solusi untuk menyelesaikan konflik-konflik yang muncul di antara perkembangan aspirasi manusia dan kebutuhan untuk memelihara sumber daya bumi yang terbatas. Bagaimanapun, konsep 'pembangunan berkelanjutan' yang berasal dari Konferensi Rio juga berpandangan bahwa prinsip-prinsip dasar dari wacana pembangunan tidak perlu dipertimbangkan kembali, tetapi lebih pada pengaturan yang berlainan. Pembangunan berkelanjutan dipopulerkan tahun 1987 ketika Komisi Dunia tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan (Komisi Brundtland) menjelaskannya secara luas sebagai pembangunan yang mempertemukan kebutuhan-kebutuhan yang ada tanpa mengompromikan kebutuhan-kebutuhan dari generasi-generasi mendatang. Penjelasan ini begitu samar, dan terbuka bagi berbagai penafsiran politis, yang berarti bahwa ia adalah 'segalanya' dan 'bukan apa-apa'. Sulit untuk tidak menyetujuinya, meski tidak tepat dan menyembunyikan berbagai cara positif dan negatif yang dengannya istilah semacam itu akan dapat dipahami. Pada saat kebanyakan orang berlaku seolah-olah pembangunan berkelanjutan adalah hal yang sangat baik (hanya metode atau caranya yang dapat diperdebatkan), para politikus juga berlaku seolah-olah mereka dihadapkan dengan cuma sebuah 'lobbi pemerhati lingkungan' dan bahwa lobbi ini sangatlah mendukung pola-pola konsumsi yang sedang berlangsung saat ini, bukan tuntutan untuk melakukan pembatasan.

Mungkin kita harus sedikit bermurah hati dalam penilaian kita terhadap Konferensi Bumi dan berbagai kesepakatan yang telah dihasilkannya. Luasnya cakupan dari

agenda Pembangunan Berkelanjutan Rio telah mengharapkan para pembuat kebijakan untuk memikirkan ulang seluruh jaringan kerja sama yang menghubungkan manusia dengan lingkungan hidup mereka dan dengan lembaga-lembaga lokal, nasional, regional dan internasional mereka. Banyak bagian dari isi Agenda 21 memfokuskan perhatian terhadap isu-isu lingkungan yang bersifat lokal, seperti penggunaan lahan, air minum, dan polusi udara. Lembaga-lembaga internasional bisa berperan dalam merespon berbagai tantangan yang ada pada tingkat lokal maupun global, kapan pun kerja sama internasional dibutuhkan. Lembaga-lembaga internasional mengangkat isu-isu lingkungan hidup dalam menanggapi ancaman-ancaman pada kepentingan global dan alokasi sumber daya bersama, persebaran, eksternalitas, dan disparitas dalam kapasitas finansial dan teknis. Lembaga-lembaga menempati sejumlah gugus tugas, mencakup pengampanyean kesadaran dan penyusunan agenda-agenda, pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi, penyusunan standar-standar dan aturan-aturan internasional, penyediaan pendampingan teknis dan finansial, pencegahan dan penyelesaian perselisihan.

Kotak Informasi

Agenda 21

Hal ini merupakan istilah singkat yang digunakan untuk dokumen kerangka kerja yang ekstensif yang diadopsi dari KTT Bumi Rio untuk mengarahkan para pembuat kebijakan dalam menuju abad XXI. Terdiri dari 800 halaman, sebagian sebagai sebuah akibat dari kompleksitas isu-isu yang dibahas, tetapi juga karena di dalamnya terdapat banyak uraian yang terkesan seolah-olah seperti sebuah daftar pengharapan yang sangat

panjang. Para kritikus telah berpendapat bahwa daripada merupakan sebuah *blueprint* dalam mengambil tindakan, dokumen ini hanya merupakan rincian masalah yang ada dan yang mungkin akan kita selesaikan. Agenda 21 tidak berusaha untuk menjawab isu-isu yang secara politis menimbulkan perdebatan yang beberapa di antaranya merupakan masalah-masalah yang sangat penting dan harus segera diselesaikan dengan cara tertentu.

Sebagai tanggapan atas inisiatif dalam Rio dan Agenda 21 (lihat kotak), telah diusulkankan bahwa akan dibentuk lembaga-lembaga baru. Komisi dari Pemerintahan Global yang terdiri atas 28 pemimpin dunia juga telah memutuskan untuk menetapkan suatu badan tertinggi, sebuah Dewan Keamanan Ekonomi yang akan menyediakan kepemimpinan dalam bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Juga telah ada keputusan bagi sebuah Organisasi Lingkungan Hidup Global. Makin banyak pendekatan-pendekatan pragmatis menunjukkan jaringan hubungan yang tidak lagi terlalu formal, namun cukup ekstensif antara organisasi-organisasi lokal, negara, dan internasional yang telah ada sebagai contoh-contoh dari pemerintahan yang peduli lingkungan hidup. Dengan semua cara ini kita semakin dekat dengan hal yang disebut Werksman sebagai "penghijauan' lembaga-lembaga internasional.

Bagaimanapun, telah dinyatakan juga bahwa UNCED harus dipandang sebagai sebuah kegagalan daripada sebuah keberhasilan. KTT Rio menggunakan kelompok-kelompok lingkungan hidup untuk melegitimasi suatu proyek yang mendukung developmentalisme. MNCs sangat dilibatkan dan menampilkan diri mereka sendiri sebagai pihak yang mempunyai keahlian untuk menyelesaikan

krisis. Environmentalisme yang dangkal ini memanifestasikan dirinya sendiri dalam teori Hubungan Internasional dalam berbagai cara. Contohnya, para ahli ekonomi liberal mengakui bahwa kegagalan mereka untuk memasukkan faktor-faktor lingkungan hidup ke dalam analisis mereka merupakan suatu kelemahan dalam ekonomi klasik. Bagaimanapun, mereka menolak mengakui bahwa kelemahan ini membuat premis-premis dasar mereka tidak berlaku lagi; sederhananya bahwa sebagaimana juga dengan input dan output lain suatu harga harus ditetapkan pada barang kebutuhan yang berasal dari pemanfaatan lingkungan agar barang-barang tersebut digunakan dengan efisien. Liberalisme akan bersifat antroposentris ketika berhadapan dengan lingkungan. Aliran ini tidak mempertanyakan tujuan dari kemajuan manusia, atau bahkan sarana-sarana dasar untuk mencapainya; ia sepenuhnya menyatakan, kembali pada analogi mobil di atas, bahwa kita memperbaiki kebocoran. Juga, beberapa teori liberal kontemporer menganggap bahwa negara-negara dapat meresponsnya secara efektif, melalui penyederhanaan rezim-rezim dan lembaga-lembaga.

Bagi *Green Thought* di sisi lain, terdapat suatu kebutuhan untuk menentang pandangan ini dan memperjuangkan kembali serangkaian keyakinan tentang karakteristik krisis ekologi; untuk menyarankan bahwa perubahan-perubahan radikal itu diperlukan guna menanggulangi berbagai permasalahan yang muncul. Dari *Perspektif Hijau*, tatanan dunia, sebagaimana yang ada saat ini, berdasar pada kapitalisme, industrialisasi, dan suatu budaya konsumer. Bentuk-bentuk dominan dari organisasi-organisasi sosial dan politik ini dibangun atas dan mengekalkan hubungan sosial yang menindas —kesenjangan kelas, patriarki, dan kerusakan dari

komunitas dan orang-orang pribumi asli. Berbagai kebiasaan sosial dan bentuk organisasi di seluruh dunia juga membawa dampak yang membahayakan lingkungan hidup.

Perspektif ekosentris, dalam usaha menyadarkan kita akan keterbatasan fisik yang kita miliki, pada saat yang sama mendorong kita untuk berpikir di luar batas-batas mental dan kecenderungan kita pada 'mega-mesin' masyarakat industri guna menciptakan suatu masyarakat yang secara radikal peduli dengan lingkungan. *Green Thought* mengharapkan suatu dunia yang akan menciptakan rangkaian biokomunitas regional yang diatur secara sangat berbeda dari yang ada saat ini. Sebuah dunia masa depan yang ekologis akan memerlukan, di antara hal-hal lainnya, suatu perubahan mendasar dari spiritualitas kita terhadap planet tempat hidup kita ini. Hal ini akan mengakibatkan suatu pengurangan nilai penting akan hal-hal material dan individu liberal dan suatu penekanan (ulang) atas suatu kehidupan dengan batasan. Seiring waktu, populasi-populasi akan mengalami penurunan dan orang-orang akan hidup dalam komunitas-komunitas yang mempertahankan keseimbangan ekologi yang tersebar secara merata, yang mirip dalam beberapa hal tetapi punya keragaman budaya.

Di atas pendapat-pendapat ini, kita mungkin mempunyai alasan untuk optimis bahwa ekologi yang dangkal maupun yang mendalam tidak perlu dibayangkan seolah seperti suatu kontradiksi yang saling bertentangan antara dunia yang penuh dengan hal-hal remeh dan dunia yang penuh dengan mimpi. Perubahan-perubahan gaya hidup yang 'dangkal' yang dilakukan oleh orang-orang kebanyakan (daur ulang, mobil yang dimuati banyak orang, dan sebagainya) dapat dianggap sebagai bagian dari suatu gerakan yang

lebih luas menuju keterlibatan publik umum dalam politik demikian juga halnya dengan awal mula perkembangan suatu kesadaran ekologi yang lebih mendalam. Inisiatif-inisiatif seperti Agenda 21 bisa memainkan suatu peran penting dalam meningkatkan kesadaran di antara orang-orang pada tingkat lokal dan mereka akan, diharapkan, meneruskan proses untuk membuat hubungan-hubungan penting antara kebiasaan sehari-hari lokalitas mereka dan karakteristik global permasalahan lingkungan hidup.

Para pemerhati lingkungan mengakui bahwa beberapa kemajuan telah dicapai melalui inisiatif-inisiatif seperti Agenda 21. Pada saat yang sama, mereka juga meyakini bahwa sangatlah penting untuk terus mengembangkan suatu kritik terhadap environmentalisme dangkal yang terkandung dalam pendekatan-pendekatan seperti itu. Dengan demikian, para pemerhati lingkungan mengadopsi suatu strategi melobi para elit politik di tingkat lokal, nasional dan global sebagai upaya untuk memengaruhi pembuatan keputusan, meski juga percaya bahwa menghindari kooptasi (baca: penguasaan) dan tetap menjaga jarak untuk tetap kritis dari para elit dan lembaga-lembaga yang ada. Dalam usaha untuk membuat Pembangunan Berkelanjutan sebagai suatu kenyataan yang tampak sangat nyata dan mencitrakan gerakan peduli lingkungan menjadi lebih bersahabat, meski juga menolak anggapan bahwa gerakan peduli lingkungan menjadi gurauan bahwa pergerakan *Hijau* telah kehilangan dari potensi kritisnya.

Perdamaian dan Keamanan

Pada bab-bab sebelumnnya, kami telah menunjukkan suatu perbedaan antara konsepsi-konsepsi positif dan nega-

tif dari perdamaian dan keamanan. Sejak lahirnya Hubungan Internasional sebagai sebuah disiplin, para sarjana telah mengakui bahwa keamanan mencakup lebih dari sekadar keadaan bebas peperangan. Para idealis liberal percaya bahwa keamanan membutuhkan pendirian lembaga-lembaga dan arahan dari hubungan internasional yang berdasarkan pada prinsip bukan kekuasaan. Pada 1970-an dan 1980-an para pemikir liberal ini mendorong perlu adanya suatu usaha penguatan lembaga-lembaga dan forum-forum guna menghadirkan stabilitas yang dibutuhkan dan memfasilitasi kerja sama dalam dunia kita yang secara berbahaya saling bergantung satu sama lain. Dengan mengabaikan periode dominasi yang panjang para kaum realis dalam disiplin, serta skeptisisme, dan pesimisme dari masa Perang Dingin, pandangan mengenai topik keamanan ini telah muncul kembali dari waktu ke waktu. Suatu titik balik dari sejarah hubungan Timur-Barat, contohnya, merupakan seruan Mikhail Gorbachev bagi suatu konsepsi keamanan yang baru yang mengakui interdependensi dari seluruh orang, perekonomian dan lingkungan hidup. Pernyataan interdependensi ini, yang mengindikasikan suatu kebutuhan mendesak untuk bergerak di luar negara-bangsa dan mencapai keamanan global lewat kerja sama yang ekstensif, mengakhiri retorika 'dua kubu' Perang Dingin dan konflik-konflik ideologi, politik, ekonomi, dan militer yang tak terhindarkan antara kapitalisme dan komunisme.

Pada bab sebelumnya kami berpendapat bahwa para pemikir strukturalis maupun feminis telah mengembangkan kritik-kritik penting atas militerisme dan konsep-konsep keamanan 'negatif' yang tak terhindarkan untuk dimanfaatkan militerisme. Kesadaran atas degradasi lingkungan hidup

telah mendorong penelitian yang mengukur pengaruh dari militerisme terhadap lingkungan hidup, dan melingkupi baik itu dampak dari peperangan dan masalah-masalah yang sedang berlangsung yang disebabkan oleh konflik-konflik terkini. Pengalihan sumber daya-sumber daya dari kelompok-kelompok sosial pada militer dapat memperburuk kemiskinan, yang selanjutnya mempunyai suatu dampak negatif tentang bagaimana kelangkaan sumber daya bisa dimanfaatkan secara efektif. Krisis legitimasi yang kini merundung beberapa negara juga melemahkan kestabilan negara. Konflik-konflik yang dipicu perusakan biologis maupun fisik terhadap bumi, seperti uji coba senjata-senjata, termasuk di dalamnya uji coba nuklir di masa damai. Proliferasi teknologi-teknologi nuklir dan pengembangan senjata-senjata kimia semua berpotensi menjadi ancaman bencana-bencana di masa depan.

Bencana-bencana lingkungan hidup yang berasal dari Perang Teluk memasukkan lingkungan hidup sebagai suatu 'isu' keamanan ke dalam agenda keamanan. Melalui hal ini, dan berbagai 'kecelakaan' yang jarang terekspos media, makin jelas bahwa kehidupan dikarakterisasi oleh risiko dan risiko-risiko lingkungan hidup umumnya dikaitkan dengan cara terkini yang dengannya perekonomian global dan masyarakat-masyarakat diatur. Meningkatnya tinggi permukaan laut mengancam banyak negara pulau yang kecil yang tidak memberikan kontribusi apa pun pada penyelesaian masalah! Secara lebih umum kita semua lemah terhadap berbagai macam risiko, termasuk risiko yang berkaitan dengan lingkungan hidup, yang kita tidak punya kuasa atasnya.

Para pemerhati lingkungan kemudian bergabung dengan feminis dan beberapa pemikir liberal dalam mengajukan sebuah konsepsi perdamaian dan keamanan yang positif. Beberapa pemerhati lingkungan secara eksplisit telah memilih menganut prinsip-prinsip non-kekerasan, atau menyatakan bahwa kekerasan muncul dari cara-cara yang destruktif dampaknya terhadap lingkungan dalam mengatur masyarakat. Lebih lanjut, utang dan pembangunan sangat relevan dengan perdebatan tentang keamanan dan, untuk itu, *green thinking* tentang keamanan selalu memasukkan suatu kritik terhadap model ekonomi politik yang dominan. Sejak perekonomian kapitalis mulai menjadi dan membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, hal ini telah sangat berdampak bagi sistem ekologi. Secara singkat bisa dikatakan bahwa tidak akan ada lagi perdamaian kecuali praktik atau kebiasaan sosial yang menindas diakhiri dan ketidakadilan diberantas. Seperti yang bisa Anda lihat, dalam mengembangkan suatu kritik atas kapitalisme, para pemerhati lingkungan berbagai perhatian yang sama dengan para strukturalis, teoretisi kritis dan feminis. Bagi para pemerhati lingkungan, meski perdamaian juga mencakup membangun suatu hubungan yang harmonis antara manusia dengan entitas makhluk hidup lainnya. Dari perspektif *Hijau,* dengan demikian, untuk mencapai 'keamanan' dibutuhkan tidak kurang dari apa pun kecuali sebuah perubahan dalam pandangan dunia.

Kotak Refleksi

(1) Ekonomi Politik dan tema kesenjangan jelas merupakan tema penting dalam *Green Thought*. Bagaimana hal ini dibandingkan dengan pandangan-pandangan para strukturalis tentang kesenjangan, terutama teori Dependensi?
(2) Hubungan antara beberapa karya kaum strukturalis dan kritik *deep green* sangatlah jelas. Contohnya, mereka berbagi perhatian yang sama pada masalah 'konsumsi-sumber daya alam yang berlebih oleh pihak Utara. Dalam cara-cara apa mereka berbeda?

Kesenjangan dan Keadilan

Kita pernah membahas di depan bahwa kesenjangan memperburuk permasalahan lingkungan hidup. Kita juga telah menunjukkan bahwa mengakhiri ketidakadilan dan hubungan yang menindas merupakan prinsip dasar dari *Green Thought*. Akibatnya adalah bahwa ketika bersinggungan dengan *Green Thought* secara otomatis perlu membicarakan juga isu-isu kesenjangan. Berbagai jenis degradasi lingkungan hidup membawa suatu penurunan dalam kualitas kehidupan manusia, tetapi jelas beban kesengsaraan tidak dirasakan sama rata oleh semua orang di seluruh dunia, tetapi dirasakan secara tidak seimbang oleh beberapa kelompok-kelompok sosial di dalam suatu negara; biasanya kebanyakan mereka yang telah dirugikan akan menjadi pihak yang paling menderita kerugian.

Tahun 1992, Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan secara eksplisit menghubungkan lingkungan hidup dan pembangunan, berdasarkan bukti ilmiah bahwa degradasi lingkungan yang terkait dengan kemiskinan yang sangat parah memberikan tekanan pada

lahan marjinal dan mendorong desertifikasi. Berkurangnya hasil pertanian dan produksi ekonomi bisa menjadi suatu penyebab dari kesengsaraan sosial dan meningkatkan kesenjangan-kesenjangan sosial yang telah ada. Pembatasan lahan pertanian selama berlangsungnya proses pembangunan memusatkan sumber daya alam dan kekuasaan terbatas hanya pada beberapa orang. Sejak Rio hubungan antara lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan dan kesenjangan terus ditekankan. Hal ini dengan segera memunculkan pertanyaan-pertanyaan tentang keadilan sosial —bagaimana cara kita memutuskan pendistribusian sumber daya?

Dalam bukunya yang terbaru, Dobson telah berpendapat bahwa kita tidak bisa menganggap bahwa keadilan dan pembangunan berkelanjutan sebagai hal yang saling melengkapi satu sama lain. Dengan kata lain, pemerintah dapat merancang suatu masyarakat yang sangat berkelanjutan tetapi bukanlah suatu rancangan yang berdasarkan kesenjangan-kesenjangan atau suatu masyarakat yang di dalamnya beberapa kelompok sangat kekurangan kebutuhan dasar. Selain itu, kita juga dapat membayangkan gambaran masyarakat yang 'adil' yang sedang menuju kehancuran lingkungan.

Permasalahan keadilan pada tingkat internasional tidaklah jelas. Mari kita ambil contoh pemanasan global. Secara sekilas, hal ini terkesan sebagai suatu masalah yang sangat mudah untuk diidentifikasi dan, dengan kemauan politik yang cukup, akan dapat diatasi. Yang perlu dikerjakan adalah mengindentifikasi pelakunya dan paksa mereka untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan. Apa yang sebelumnya terkesan sebagai sebuah solusi yang gampang ditemukan ternyata, dalam pemeriksa-

an yang lebih mendalam, lebih rumit. *Pertama,* kita perlu memastikan apakah benar ada suatu masalah; beberapa ilmuwan memperdebatkan 'fakta' ini. Bahkan jika kita menganggap bahwa pemanasan global mungkin berdampak pada perubahan iklim, apakah hal itu merupakan suatu masalah? Anggaplah kita setuju bahwa itu sebuah masalah, maka kita perlu memutuskan apakah akhirnya, kita memilih kemakmuran materi di atas risiko-risiko adanya perubahan iklim global atau segera mengatasi konsekuensi-konsekuensi polusi? *Kedua,* jika kita menerima anggapan bahwa bangsa-bangsa kaya di dunia telah banyak berkontribusi pada masalah ini, masih tersimpan pertanyaan apakah mereka seharusnya memperbaiki kerusakan yang telah dilakukan? Apakah keadilan —dalam hal ini— adalah berarti membenarkan yang salah?

Pada saat yang sama, dorongan akan mencari solusi-solusi yang adil berpotensi membangkitkan isu-isu yang memecah-belah. Contohnya, Dobson berpendapat bahwa melindungi lingkungan hidup mungkin pada akhirnya dapat berarti mengurangi laju pembangunan, tetapi hal ini lebih banyak memengaruhi negara-negara miskin di dunia. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah kepentingan-kepentingan yang negara-negara miskin diharapkan mengorbankannya merupakan suatu permintaan yang berbeda dari yang dibebankan pada bangsa-bangsa kaya? Tindakan dalam mengatasi permasalahan lingkungan masih terus diperdebatkan dalam konteks sebuah dunia yang di dalamnya ketimpangan dalam hal kesejahteraan dan kesadaran tentang ketimpangan ini sedang meningkat. Dengan demikian, jelaslah sudah bahwa isu-isu pembangunan, penipisan sumber daya alam, dan kehancuran lingkungan hidup harus dilihat

dalam konteks isu-isu yang lebih mendalam mengenai keadilan yang terdistribusikan dalam lingkup internasional. Pada beberapa dekade terakhir berbagai lembaga, rezim-rezim, dan forum-forum telah berkembang yang, kemungkinan besar, menyediakan beberapa mekanisme untuk mendistribusikan kembali kekayaan, pendapatan, dan sumber daya alam ke seluruh penjuru bumi, tetapi jika ingin mekanisme ini berhasil, maka semua partisipan harus menerima bahwa semua mekanisme itu sah.

Telah ada sejumlah usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar keadilan pada permasalahan lingkungan hidup global. Contohnya, berkaitan dengan pemanasan global, beberapa teoretisi telah menggunakan sistem 'hukum bersama' internasional untuk yang telah ada untuk menentukan tingkat emisi karbon dioksida yang 'adil' dan dapat ditoleransi umum. Kita hanya bisa melihat sekilas yang telah menjadi suatu literatur besar di sini; cukup dikatakan bahwa literatur pemanasan global cenderung menuju suatu pandangan bahwa keadilan membutuhkan kewajiban-kewajiban yang berbeda antara bangsa-bangsa industri yang kaya dan bangsa-bangsa berkembang, dan transfer dari negara-negara di kelompok pertama ke negara-negara di kelompok yang terakhir disebut. Secara bersamaan, literatur tersebut mengindikasikan bahwa sangatlah sulit membenarkan keberadaan adanya tingkatan-tingkatan kesenjangan internasional. Sayangnya, tidak ada kesepakatan nyata tentang cara yang terbaik untuk bergerak menuju ke suatu tatanan internasional yang lebih setara atau adil.

Anda mungkin telah menyadari bahwa sejauh ini pembahasan kita tentang kesenjangan dan keadilan terasa begitu antroposentris. Dengan kata lain, permasalahan keadilan

dibatasi pada hubungan antarmanusia. Tentu saja, para pemerhati lingkungan akan sangat tertarik dengan isu-isu yang berhubungan dengan keadilan yang didistribusikan kembali dalam skala internasional karena mereka menyadari bahwa hasil yang akan diraih tidak akan signifikan kecuali isu-isu yang bersifat memecah-belah ini ditangani tanpa kompromi. Bagaimanapun, *Green Thought* berjalan tidak lagi membahas pertanyaan, 'siapa mendapat apa'. Lingkungan hidup dipandang mempunyai nilai-nilainya sendiri, sehingga para pemerhati lingkungan mungkin mempunyai keinginan untuk memasukkan 'kebutuhan-kebutuhan' lingkungan hidup dan 'hak-hak' makhluk hidup lainnya dalam pertimbangan apa pun mengenai hal yang disebut sebagai suatu tatanan yang adil. Ekosentrisme didasarkan pada suatu etika moral yang mengakui kepentingan-kepentingan komunitas non-manusia, mengakui kepentingan-kepentingan dari generasi manusia dan non-manusia mendatang, dan mengadopsi suatu perspektif yang holistik, sehingga menilai berbagai populasi, spesies, ekosistem dan *ecosphere* sebagai suatu keseluruhan.

Identitas dan Komunitas

Salah satu masalah ketika mencoba memikirkan pertanyaan mengenai keadilan dan tingkah laku yang beretika dalam suatu konteks internasional, adalah bahwa munculnya beberapa konsepsi tentang komunitas. Para pendukung cara hidup berkomunitas (*communitarians*) berkata ide-ide yang beretika berakar dalam komunitas-komunitas yang spesifik, sehingga argumen-argumen tentang keadilan hanya meyakinkan dalam ruang lingkup komunitas. Para pemikir kosmopolitan, di sisi lain, mengatasi permasalahan

ini dengan memperluas pengertian komunitas pada seluruh ras manusia. *Green Thought* tentang komunitas sangatlah berbeda dengan yang lain karena ia, sekali saat, meminta kita berpikir tentang komunitas dalam pengertiannya secara global maupun lokal. Dengan kata lain, seperti yang telah dinyatakan secara tidak langsung oleh banyak di antara bahasan-bahasan sebelumnya tentang kesenjangan dan keadilan, banyak di antara para pemerhati lingkungan sedang mencari cara untuk memperluas batasan pengertian 'komunitas' dengan memasukkan semua orang-orang dunia dan, tentu saja, spesies-spesies non-manusia, tetapi pada saat yang sama, dalam mempermasalahkan masyarakat industri dan pembangunan, pendekatan-pendekatan *Hijau* mendukung perbedaan dan menentang pemusnahan perbedaan yang termanifestasikan di dalam banyak kebudayaan dan komunitas-komunitas.

Para pemerhati lingkungan telah dikritik karena mendorong parokialisme dalam visi-visi mereka tentang komunitas. Beberapa *Green Thought* bisa jadi sangat otoritarian —komunitas-komunitas skala kecil bergerak di jalur yang konservatif dan hierarkis yang bertujuan pada pemenuhan kebutuhan sendiri karena kebebasan dan egotisme menciptakan masalah-masalah. Bagaimanapun, kebanyakan pemerhati lingkungan berpendapat bahwa pergerakan mereka tersebut tidak perlu kemudian menimbulkan kontradiksi; meski masalah-masalah sosial dan ekonomi bersifat global, mereka hanya bisa diatasi secara efektif dengan konstruksi komunitas-komunitas berskala kecil dan perekonomian yang mandiri. Hubungan sosial yang hierarkis dipandang sebagai masalah. Bagaimanapun, pada saat yang sama, kita mungkin memerlukan suatu pemaksaan untuk memenuhi

tanggung jawab ekologi yang mendasar menjamin hak asasi manusia. Meski demikian, paksaan ini tidak akan sekeras kekuatan yang terkonsentrasi dan mampu melakukan paksaan sebagaimana yang dimiliki oleh suatu negara yang berdaulat. Komunitas-komunitas lokal yang sama ini mungkin dapat saling dikaitkan dalam sebuah 'komunitas dari komunitas-komunitas' yang global. Para pemerhati lingkungan membangkitkan gambaran baru tentang 'komunitas' (dalam kerangka etika universal) sebagai sesuatu yang tersebar ke seluruh penjuru dunia, namun secara intim masih terhubung dengan lokalitas.

Dari perspektif para pemikir lingkungan, tentu saja, permasalahan dalam perumusan keadilan dan komunitas menjadi makin menantang dengan tuntutan untuk memasukkan spesies non-manusia. Terhadap *Green Thought* tentang komunitas, buku *Animals and Why They Matter* karya Mary Midgley (1983) merupakan salah satu kontribusi penting. Midgley berpendapat bahwa permasalahan-permasalahan komunitas, moralitas, dan etika dapat diperluas pada binatang jika kita mampu menerima bahwa mereka itu makhluk yang berperasaan. Dengan kata lain, binatang mungkin tidak memiliki kapasitas untuk mendapatkan pemahaman dalam arti seperti ketika kita menggunakan istilah (*to reason*) tersebut, tetapi mereka tetap saja mempunyai perasaan. Bagaimanapun, pandangan tentang komunitas ini tidak membuat hubungan yang berarti antara manusia dan binatang dan ekosistem yang melingkupi mereka. Semua etika didasarkan pada ide bahwa individu merupakan anggota dari suatu komunitas yang bagian-bagiannya saling tergantung satu sama lain. Dari hal ini kita bisa meramalkan kemungkinan suatu 'etika negeri' —kehidupan spesies dan tanaman harus

dijaga karena mereka merupakan suatu cadangan dari keragaman genetik— yang memberikan kepada kita kesempatan untuk melakukan rekreasi, kesenangan-kesenangan estetik, begitu pun juga untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan, meski hal ini tentunya sangat antroposentris. Berkurangnya kedaulatan mungkin terjadi bersama dengan meningkatnya nilai penting dari identitas dan komunitas lokal yang kehidupannya lebih terkait langsung dengan ekosistem tertentu. Untuk memperbaiki komunitas kita harus menjauhkan diri dari pandangan tentang dunia yang terbagi ke dalam berbagai ruang politik, seperti negara dan, cenderung mengonsepsikan bumi dibentuk dari kesatuan berbagai lingkungan biotik. Nasionalitas bumi yaitu satu yang meliputi beragam tempat, satu yang meliputi beragam manusia.

Para pemerhati lingkungan, kemudian, berpendapat bahwa realisasi dari suatu masa depan *Hijau* yang aman bukan hanya masalah merevisi komunitas, tetapi juga memerlukan pemahaman tentang diri sendiri/identitas dan hubungan kita dengan 'yang lain' dalam pemahaman yang secara radikal sangat lain dengan yang kita telah pahami. Ekofeminisme sangatlah berpengaruh dalam *Green Thought*, terutama dalam hubungannya dengan masalah diri dan identitas. Para ekofeminis telah mengembangkan sebuah kritik yang cukup penting mengenai dualisme pikiran/tubuh yang merujuk pada pemikiran Cartesian dan menawarkan suatu konsepsi alternatif yang Freya Mathews mengistilahkannya sebagai 'pribadi yang ekologis' (*the ecological self*).

Kotak Konsep

Pribadi yang Ekologis

Mary Mellor (mengikuti Freya Matthews) berpendapat bahwa melepaskan diri dari dualisme Cartesian mencakup menilai kembali penilaian rendah terhadap jasad, perasaan, emosi, imajinasi, feminin dan alam. Usaha tersebut juga harus mempermasalahkan batasan-batasan kaku dan konsep-konsep identitas yang terpolarisasi yang dihasilkan lewat eksklusi. Pribadi yang ekologis telah melintasi batasan akal/raga, manusia/alam, laki-laki/perempuan, diri sendiri/orang lain, pada suatu konsepsi tentang diri yang ada dalam komunitas-komunitas sosial dan ekologis, yang memiliki solidaritas dengan dan perhatian bagi orang lain serta mengakui nilai intrinsik dari 'yang lain'.

Anda akan ingat dari pembahasan sebelumnya, bahwa Descartes adalah seorang figur sentral dalam cerita modernitas. Hal utama pada konsepsi Descartes tentang diri dan identitas modern adalah suatu pengertian bahwa ada suatu pembedaan yang jelas dan perlu antara wilayah pikiran —rasionalitas dan refleksi kritis— dengan tubuh —yang merupakan wilayah hasrat. Identitas dari subjek modern —yang kita pikir sebagai diri kita dan cara kita berhubungan dengan yang lainnya— secara intim sangatlah terikat dengan baik sekali dengan konsepsi dominasi akal terhadap badan ini. Subordinasi hasrat dilihat sebagai inti dalam pembentukan seorang individu yang rasional dan otonom. Dualisme akal/badan ini juga merupakan dasar dari pandangan dunia modern —subordinasi alam di bawah kontrol rasional untuk kepentingan kemajuan manusia sendiri. Dari perspektif *Hijau*, pengertian dari pembentukan diri ini melalui proses-proes dualisme diri/orang lain, menjadi problematis untuk beberapa alasan. Secara mendasar, pembentukan diri dan identitas.

Kotak Refleksi

Bagaimana kritiknya eko-feminis tentang pandangan dunia Cartesian jika dibandingkan dengan kritik posmodern yang ditunjukkan pada bab 5? Bagaimana pandangannya eko-feminis tentang pribadi yang ekologis dikomparasikan dengan pandangan feminis *standpoint* tentang pembentukan diri dan identitas, seperti yang ditunjukkan pada bab 6?

Kesimpulan

1. Isu-isu lingkungan lingkungan hidup telah dibahas oleh para sarjana HI dalam berbagai cara kajian dan demikian pula '*thinking green*' dan *Green Thought* telah memberikan pengaruh pada disiplin ini dalam berbagai cara.
2. 'Penambahan' isu lingkungan hidup telah berhasil memperkaya berbagai perspektif teoretis yang ada dalam Hubungan Internasional dan memperluas cakupan pemahaman kita atas suatu cakupan wilayah dan pusat perhatian studi seperti negara, konflik, kesenjangan, kerja sama, lembaga, dan pemerintahan.
3. Bagaimanapun, 'penambahan' merupakan suatu pendekatan *problem-solving* terhadap permasalahan lingkungan hidup, yang berdasarkan suatu pandangan dunia antroposentris. Berbagai masalah dan bencana lingkungan hidup kontemporer telah menunjukkan bahaya-bahaya yang ada dalam pengadopsian suatu pandangan antroposentris seperti itu. Perhatian pada bidang lingkungan hidup telah kemudian berkembang sebagai hasilnya, terutama sejak 1960-an.
4. Pengidentifikasian '*Green Thought*' sebagai suatu tradisi tersendiri juga merupakan suatu hal yang memungkin-

kan. Dengan merujuk pada *Green Thought*, pengonstruksian suatu posisi *Green Thought* atau perspektif *Hijau* yang tentu berbeda dari perspektif lain dalam HI adalah hal yang sangat memungkinkan.

5. Inti perspektif *Hijau* adalah suatu perhatian pada hubungan manusia-alam.
6. *Green Thought* menekankan perubahan dari pandangan dunia pra-modern ke modern sebagai sesuatu yang penting bagi pemahaman kita tentang permasalahan lingkungan hidup. Pada masa pre-modern orang-orang menghormati/takut terhadap alam, sedangkan persepsi modern menekankan kemampuan manusia untuk menaklukkan alam.
7. Suatu perspektif *Hijau* menuntut, kemudian, suatu restrukturalisasi radikal dari berbagai aspek organisasi manusia, mulia dari kebiasaan sehari-hari seperti konsumerisme, hingga pada tatanan dunia kontemporer yang dibangun berdasarkan eksploitasi terhadap dunia alam dan penindasan atau marginalisasi terhadap kelompok-kelompok sosial tertentu.
8. Meski kita harus berhati-hati untuk tidak terlalu membesar-besarkan persamaan-persamaan antara *Green Thought* atau perspektif *Hijau* dengan perspektif lain, *Green Thought* memperlihatkan beberapa persamaan dengan feminisme dan posmodernisme.
9. Masalah dalam usaha untuk melampaui kritik *Hijau* yang mendalam (yakni sebenarnya menerjemahkan usulan semacam itu ke dalam dataran praksis) seharusnya tidak dikesampingkan. Meski begitu, kritik *Hijau* telah memberikan suatu kritik yang sangat kuat terhadap organisasi kontemporer masyarakat internasional. Ke-

sadaran tidak hanya menyangkut permasalahan lingkungan hidup tetapi juga dasar-dasar filosofis tentang cara dan motif manusia berhubungan dengan alam.

Kritik

Sama halnya dengan bab-bab lain, pada bagian ini kami akan menunjukkan beberapa kritik dari environmentalisme dangkal (*thinking green*) dengan *Green Thought*. Anda harus sadar bahwa ada suatu perdebatan tentang banyak di antara isu-isu yang dibahas di bawah ini. Kami menawarkan kritik-kritik ini sebagai suatu cara masuk ke dalam perdebatan-perdebatan itu, bukan sebagai kesimpulan tentang kelemahan atau cacat dalam *Green Thought*.

Pertama, dalam tingkatan praktis, environmentalisme dangkal terkesan banyak berurusan dengan wilayah-wilayah yang mungkin; mempertanyakan tindakan apa yang bisa kita ambil untuk meminimalisir dampak dari yang telah dilakukan umat manusia terhadap alam tetapi hanya dalam pola-pola organisasi-organisasi sosial, ekonomi dan politik yang berlaku saat itu. Meski hal ini terlihat seolah-olah cukup baik, muncul kekhawatiran bahwa yang tampak memungkinkan ini (bahkan jika kita mengartikan ini sebagai suatu tatanan ekonomi internasional baru —NIEO) tidak akan mencukupi untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Di Utara, perhatian terhadap lingkungan hidup cenderung kehilangan pengaruh pada 1980-an dan baru muncul kembali pada 1990-an. Sejak itu pelobian gerakan *Hijau* seolah hanya muncul dan tenggelam. Pada akhirnya, pelobian permasalahan lingkungan hidup mungkin hanya untuk mempromosikan *NIMBYism* (Not In My Back Yard —istilah ini dalam bahasa Indonesia dapat diartikan 'apa

pun asal jangan di sini'—Peny.) dan pemecahan masalah yang setengah-setengah.

Kedua, pendekatan-pendekatan dangkal tersebut cenderung mendorong negara-negara dunia ketiga untuk bertindak sebagaimana yang dikatakan negara dunia pertama, bukan yang dilakukan oleh negara-negara dunia pertama tersebut. Dengan kata lain, dalam mendorong suatu pembangunan yang berbeda (atau pembangunan berkelanjutan), pendekatan-pendekatan dangkal ini cenderung mendukung pemeliharaan sumber daya alam yang sangat melimpah di bagian bumi Selatan agar nantinya dapat dimanfaatkan oleh negara-negara di Utara, sedangkan *Green Thought* yang lebih radikal mengakui peran Utara dan kebiasaan konsumsinya yang sangat tinggi sebagai penyebab utama degradasi lingkungan hidup. Dalam konteks ini, protes-protes terhadap pembangunan berkelanjutan mungkin lebih tepat ditafsirkan sebagai suatu usaha untuk melindungi keberadaan cara dalam melakukan sesuatu terhadap terjangan kritik budaya, ekologi dan feminis daripada sebagai perhatian yang nyata terhadap permasalahan lingkungan hidup.

Tentu saja, kritik-kritik ini tidak bisa ditujukan pada gerakan *Hijau* radikal (*Green Thought*). Meski demikian, beberapa pemerhati lingkungan radikal, terutama di Amerika Utara, telah dikritik sebagai penganut konservatisme atau bahkan otoritarianisme. Hal ini karena suatu pemusatan terhadap penindasan alam terhadap berbagai penindasan lainnya. Bagaimanapun, terdapat begitu banyak kesalahpahaman seputar '*deep ecology*' dan tuduhan-tuduhan seperti itu yang disangkal sebagian dengan mengajukan pendapat bahwa dominasi manusia terhadap manusia lainnya merupakan suatu pengaruh dari dominasi manusia terhadap alam.

Lebih lanjut lagi, eko-feminisme, contohnya, merupakan suatu paham yang sangat berpengaruh dari *Green Thought*, yang terlihat seolah-olah menyatakan bahwa para pemerhati lingkungan terbiasa dengan berbagai bentuk kompleks penindasan dan eksklusi sosial yang ada. Pada dasarnya, ketidakmungkinan dari pertumbuhan dalam suatu sistem terbatas dan kurangnya penghormatan yang diberikan kepada dunia non-manusia oleh manusia, mengharuskan perubahan-perubahan yang mendalam dalam semua aspek dari tingkah laku sosial dan politik kita.

Walaupun demikian, terdapat beberapa masalah di tingkat praksis bagi suatu posisi ekosentris. Dalam dunia nyata, peperangan mungkin bermula dari permasalahan air, ikan-ikan paus mungkin diselamatkan melalui perundingan-perundingan suatu regim internasional dan anak-anak mungkin mati disebabkan cadangan-cadangan air yang terkontaminasi —mungkin beberapa perspektif HI yang sudah lebih dulu mapan seperti realisme atau strukturalisme lebih bisa membantu dalam memahami karakteristik dari permasalahan-permasalahan ini. Lebih lanjut, bahaya-bahaya dalam upaya yang sebenarnya untuk membongkar pola-pola organisasi sosial, politik, dan ekonomi terkini mungkin menjadi sangat besar. Untuk mencapai masa depan yang berorientasi lingkungan secara mendalam semacam itu sangatlah problematis; hal itu akan menuntut suatu pembalikan total alur pertumbuhan ekonomi dan suatu perbaikan sistem internasional yang direvisi secara total. Dengan kata lain, resep-resep *'deep ecology'* sering kali cenderung tidak realistis saat ini. ✦

Daftar Pustaka

Adam, W.M. (1990), *Green Development: Environment and Sustainability in the Third World,* London: Routledge.

Brundtland, G. (1987), *Our Common Future,* Oxford: Oxford University Press. (World Commission on Environment and Development, The Brundtland Report).

Carson, R. (1962), *Silent Spring,* Harmondsworth: Penguin.

Conca, K. (et.al.). (1995), *Green: Planet Blues,* Boulder, CO: Westview Press.

Dobson, A. (1995), *Green Political Thought* (2nd edition), London: Routledge.

Dobson, A. (ed.). (1999), *Fairness and Futurity: Essays on Environmental Sustainability and Sosial Justice,* Oxford: Oxford University Press.

Eckersley, R. (1992), *Environmentalism and Political Theory: Towards and Ecocentric Approach,* London: UCL Press.

Elliot, J. (1994), *An Introduction to Sustainable Development: The Developing World,* London: Routledge.

Hayward, T. (1994), *Ecological Thought: An Introduction*, Oxford: Polity Press.

Homer-Dixon, T. dan Blitt, J. (ed.). (1998), *EcoViolence: Links Among Environment, Population and Security*, London: Rowman and Littlefield.

Hurrel, A. dan Kingsburry, B. (ed.). (1992), *The International Politics of the Environment*, Oxford: Oxford University Press.

Imber, M. (1994), *Environmental Security and UN Reform*, Basingstoke, Macmillan.

Liftin, K. (ed.) (1998), *The Greening of Sovereignity in World Politics*, Cambridge, MA: MIT Press.

Matthews, F. (1991), *The Ecological Self*, London: Routledge.

McCornick, J. (1989), *Reclaining Paradise: The Global Environmental Movement*, Indiana: Indiana University Press.

Meadows, D. (et.al.). (1972), *The Limits to Growth*, Washington, DC: Potomac Associates.

Mellor, M. (1972), *Feminism and Ecology*, Oxford: Polity Press.

Merchant, C. (1992), *Radical Ecology: The Search for a Liveable World*, London: Routledge.

Paterson, M. (1996), 'Green Politics', in Burchill, S. dan Linklater, A. (ed.), *Theories of International Relations*, Basingstoke: Macmillan.

Pepper, D. (1996), *Modern Environmentalism: An Introduction*, London: Routledge.

Porrit, J. (1984), *Seeing Green,* Oxford: Blackwell.

Sessions, G. (ed.) (1995), *Deep Ecology for the 21st Century,* London: Shambala.

Susskind, L. (1994), *Environmental Diplomacy: Negotiating More Effective Global Agreements,* Oxford: Oxford University Press.

Thomas, C. (1992), *The Environment in International Relations,* London: Royal Institute of International Affairs.

Werksman, J. (ed.). (1996), *The Greening of International Institutions,* London: Earthscan.

Kesimpulan

Perdebatan Pospositivis dalam HI

Bab kesimpulan ini mempunyai dua tujuan utama. *Pertama,* merangkum tema-tema yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. *Kedua,* mengembangkan lebih jauh pemahaman Anda tentang teori-teori pendukung Hubungan Internasional, melalui suatu bahasan yang disebut perdebatan 'pospositivis'. Sampai pada tahap ini, Anda mungkin merasa telah cukup mempelajari teori dan waktu Anda lebih baik dihabiskan untuk mempelajari lebih jauh tentang praktik dalam dunia perpolitikan. Dalam hal ini, Anda mungkin lebih memilih untuk menyimpan buku ini sementara waktu dan, mungkin, kembali pada bab ini nanti. Bagaimanapun, jika Anda terinspirasi untuk melanjutkan bacaan Anda, ketahuilah bahwa perdebatan ini memunculkan beberapa pertanyaan yang cukup kompleks —berhubungan dengan politik 'klaim atas pengetahuan' dan hubungan antara teori dan praktik—yang tidak mudah dipahami begitu saja.

Apa yang sedang kita pelajari ketika kita mempelajari 'Hubungan Internasional'? Seperti pembahasan sebelumnya, tidak ada jawaban sederhana dari pertanyaan ini. Bagi beberapa sarjana, 'perubahan penting' dalam teori HI sejak

pertengahan dekade 1980-an, dan makin bermunculannya berbagai perspektif, seperti posmodernisme, teori kritis, feminisme dan *Green Thought*, seiring dengan mengaburnya batasan-batasan antara HI dengan wilayah-wilayah lain dari ilmu-ilmu sosial dan teori sosial, merupakan penyebab dari suatu kekhawatiran yang besar. Perkembangan-perkembangan ini bisa dipandang sebagai sesuatu yang melemahkan konsepsi dari Hubungan Internasional sebagai suatu 'disiplin' tersendiri —suatu cabang dari pembelajaran atau bidang studi yang terpisah yang berfokus pada *'high politics'* tentang perang, diplomasi, dan kebijakan luar negeri— dan sehingga melemahkan suatu arahan bagi para pembuat kebijakan untuk melindungi atau memajukan kepentingan nasional, mengasumsikan suatu pembagian kaum realis secara implisit antara wilayah domestik dan internasional. Mungkin hal ini selalu menjadi suatu yang seperti sebuah fiksi. Konsepsi pembagian yang jelas antara domestik dengan internasional/global sulit untuk diteruskan setelah berlangsungnya interdependensi ekonomi, senjata-senjata nuklir, pertumbuhan jaringan telekomunikasi global, dan perubahan-perubahan iklim yang akan memengaruhi semua orang di dunia, dan berada di atas jangkauan kontrol dari negara mana pun. Dengan kondisi yang seperti ini ada kemungkinan bahwa perspektif-perspektif teoretis lainnya akan lebih berguna bagi para pembuat kebijakan.

Lebih jauh lagi, kaum liberal, strukturalis, dan pemikir kritis, dalam istilah yang lebih luas, tanpa ragu akan menyatakan bahwa keluhan ini apa pun bentuknya berangkat dari pandangan yang sempit dan parsial mengenai HI. Seseorang bisa saja berpendapat bahwa tidak pernah akan ada suatu kesepakatan mengenai fokus utama dari disiplin ini.

Meskipun Hubungan Internasional lahir dari tragedi manusia seperti perang, sejak awal, telah muncul berbagai perdebatan mengenai hal yang seharusnya menjadi fokus utamanya, ketidaksepahaman mengenai pemecahan cara dalam mempelajari dunia dan silang pendapat mengenai kemanfaatan yang bisa ditawarkan pengetahuan ini. Lebih jauh, politik tidak hanya tentang aktivitas pemerintah serta penetapan dan penerapan kebijakan, tetapi berkaitan lebih luas dengan pelaksanaan kekuasaan dan sehingga mencakup berbagai 'aktor, proses, dan kepentingan.' Tidakkah seharusnya teori ini juga berguna sebagai 'acuan pelaksanaan' bagi *NGOs* (LSM) atau gerakan-gerakan sosial seperti *Greenpeace, Oxfam, Amnesti Internasional, Jubilee 2000,* atau gerakan perempuan internasional, mungkin? (hal ini telah menjadi subjek dari perdebatan terkini antara Wallace, Booth dan Smith —lihat bacaan lebih jauh).

Bagaimanapun, penolakan realisme sebagai perspektif dominan, diikuti dengan konsekuensi menerima bahwa pada semua level —ontologis, epistemologis, dan metodologis— HI dikompetisikan. Kini kita akan berhadapan dengan setiap wilayah ini secara lebih rinci.

Bagaimanakah Karakteristik Dunia? Apa yang Bisa Dikatakan Eksis?

Dari bahasan-bahasan di atas terdapat suatu kejelasan bahwa perspektif-perspektif teoretis sebenarnya parsial atau tidak komplet, berdasarkan hanya pada asumsi-asumsi tertentu tentang aktor-aktor utama, proses-proses dan isu-isu dalam studi hubungan internasional. Dalam teori HI mungkin terdapat semacam kesepakatan tentang hal yang 'eksis' dalam artian bahwa kita bisa mengenali 'pada aktor'

seperti negara, lembaga internasional, *NGOs*, gerakan sosial dan perusahaan multinasional, meskipun jika para teoretisi tidak setuju dengan peranan, bobot relatif atau pentingnya 'aktor-aktor' ini.

Bagaimanapun, dengan segera kita menghadapi masalah-masalah ketika kita mencoba memahami, katakanlah, karakteristik negara, atau mengidentifikasi adanya kesenjangan-kesenjangan struktural antara berbagai kelompok sosial atau negara. Jelas, dalam semua kasus ini, kita tidak sedang begitu berhadapan dengan 'hal-hal' nyata secara langsung, tetapi dengan konstruk-konstruk intelektual — ide-ide dan konsep-konsep yang membantu kita membaca atau mengonstruksikan 'realitas' dan dengan demikian mendapatkan suatu pemahaman mengenai dunia materi di sekitar kita. Terdapat juga ketidaksepahaman mengenai proses-proses dominan dalam hubungan internasional. Sebagai contohnya, kaum realis berpendapat bahwa konflik antar-negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan karena hal tersebut merupakan karakteristik 'laki-laki' yang mencoba untuk mendominasi dan menekan yang lainnya; liberal mengatakan bahwa kerja sama merupakan suatu aspek utama dalam kehidupan internasional; sedangkan para strukturalis meyakini bahwa suatu proses utama dalam hubungan internasional adalah konflik antara negara dengan kelas-kelas sosial. Hal ini berarti bahwa terdapat pertentangan-pertentangan mengenai mampu atau tidaknya kita dapat secara mendalam berbicara mengenai kesenjangan-kesenjangan struktural, perputaran-perputaran yang dapat diamati dari ledakan-ledakan dan depresi-depresi ekonomi, 'perimbangan kekuatan' yang nyata, atau pola-pola atau jaringan-jaringan kerja sama yang dengan mudah dapat dikenali.

Lebih lanjut, seperti yang telah kita lihat, ada semacam pemisahan antara mereka yang memandang dunia melalui prisma *state-centric* dengan mereka yang berpendapat dengan suatu pendekatan holistik tentang 'hubungan global'. Jadi, ketika kaum realis menawarkan suatu pandangan tentang dunia sebagai sebuah sistem negara-bangsa yang memiliki batas wilayah, para pemikir *Green* memandang 'global' sebagai suatu susunan saling keterhubungan ekosistem-ekosistem yang kompleks yang terdiri dari kehidupan manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Selain menolak keberadaan batasan-batasan politik yang artifisial antara wilayah (tanah/bumi) dengan manusia, para pemerhati lingkungan berpendapat bahwa usaha untuk membuat pembedaan yang kaku antara 'nasional' dan 'internasional' akan membuat tertutupnya pemahaman mengenai karakteristik seluruh kehidupan di planet ini yang saling berhubungan dan tergantung satu sama lain. Jika seandainya kita mengadopsi suatu perspektif posmodern, kita akan mendapatkan suatu pemahaman yang mengalir dan dinamis tentang proses terkaitnya dengan erat wacana-wacana identitas politik dengan praktik-praktik aktual seperti perang dan kebijakan luar negeri, yang melibatkan pembagian ruang-ruang politik dalam skala global. Secara singkat dapat dikatakan bahwa berbagai perspektif teoretis mengonseptualisasikan atau mengonstruksikan lingkup studi hubungan internasional dengan berbagai cara tersendiri dan kontras antara satu dengan lainnya.

Salah satu asumsi yang paling mendasar yang dikonstruksikan oleh berbagai perspektif teoretis tersebut adalah tentang 'karakteristik manusia'. Kita telah menempatkan suatu pengertian tentang 'karakteristik manusia' dalam teks

ini secara cukup sederhana dengan harapan untuk mendorong Anda memikirkan cara untuk memahami dunia (sosial) sekitar kita, yang melibatkan beberapa konsepsi tentang karakteristik/kedirian manusia —siapa dan apa kita— dan cara kita berhubungan dengan yang lainnya. Dalam pengungkapan yang lebih sederhana dapatlah dikatakan bahwa jika kita berpikir bahwa 'laki-laki' (*man*) memiliki kecenderungan untuk mencari kekuasaan, egois dan berperan dominan dalam hubungan dengan yang lainnya, maka kita dapat memahami inti dari hubungan internasional atau politik internasional adalah kekuasaan dan usaha mengejar kepentingan. Sebaliknya, jika kita percaya pada diri kita sendiri dan yang lainnya sebagai makhluk yang rasional, mampu merefleksikan diri dan mengembangkan moral, maka kita mulai memahami kapasitas manusia untuk bekerja sama dalam kepentingan untuk mewujudkan sebuah dunia yang lebih baik dan yang lebih teratur secara rasional. Idealisme liberal sering kali dianggap suatu sistem atau konsep yang agak utopis, optimistik dan, mungkin, naif dalam usaha mengatur urusan-urusan dunia dengan dasar prinsip-prinsip keadilan, hak moral dan aturan hukum. Bagaimanapun, ada sesuatu yang lebih mengenai idealisme daripada pengandaian. Keinginan untuk membangun sebuah tatanan internasional yang adil berakar dari kepercayaan filosofis yang sangat mendalam tentang kapasitas perkembangan personalitas atau kedirian manusia.

Cabang filsafat yang berkaitan dengan karakteristik keberadaan atau kemenjadian (*being*) disebut ontologi. Dalam teks ini, kami secara terus-menerus membahas modernitas dan suatu konsepsi 'manusia' yang secara khusus modern. Dalam pemikiran sosial dan politik Barat yang modern

konsepsi 'manusia yang otonom', yang seharusnya merepresentasikan kita semua, merupakan tema sentral. 'Laki-laki otonom' mengembangkan kesadaran sebagai makhluk yang berpengetahuan, hidup dan sadar dengan membedakan 'dirinya sendiri' dari orang lain dan dari dunia alam sekitar. Orang modern, kemudian, dihadirkan sebagai seorang individu bebas yang memiliki suatu perasaan yang kuat tentang batas dan jarak dari orang lain, binatang, dan dunia 'alam'.

Anda akan ingat bahwa para pemerhati lingkungan mempunyai suatu konsepsi yang sangat berbeda tentang karakteristik (*nature*) kita (subjektivitas atau kedirian kita) dan hubungan kita dengan yang disebut sebagai dunia alam. Inti dari *Green Thought* adalah suatu penilaian kembali hubungan 'manusia-alam'. Para pemerhati lingkungan menolak ide bahwa hubungan manusia dengan alam adalah penaklukan dan penundukan daripada penghormatan dan kehidupan yang berdampingan. 'pribadi yang ekologis' tidaklah dipahami dalam kerangka pemisahan, pembedaan, dan dominasi terhadap alam, tetapi lebih dalam kerangka berhubungan dengan alam. Hal ini memunculkan suatu pandangan dunia yang menekankan karakteristik saling keterhubungan kehidupan manusia, binatang, dan ekosistem di seluruh planet ini. Konsepsi diri sebagai sesuatu yang terkandung atau terhubung bukanlah sesuatu yang asing dalam filsafat non-Barat seperti Buddhisme. Feminis posmodern dan *standpoint* juga mengkritik konsepsi atomistik dari 'manusia yang otonom' ini karena mereka melihat hal ini sebagai sesuatu yang dikonstruksikan secara gender. Karakteristik dari subjek atau diri ini —rasionalitas daripada nafsu atau sentimen, misalnya— dikaitkan dengan kedirian yang maskulin, bukan feminin. Para teoretisi yang terinspirasi

Marxis melihat awal mula pengalaman manusia dalam kerja sosial dan reproduksi spesies secara sosial. Para pemikir kritis kontemporer tidak terlalu mengandalkan pada ide-ide tentang tenaga kerja dan kelas sosial dalam pembentukan kesadaran atau identitas, tetapi cenderung menghubungkan pembentukan psikis manusia dengan kerangka institusional masyarakat. Jadi kita dapat saja menolak ide bahwa 'karakteristik manusia' adalah sesuatu yang tetap dan tidak mengalami perubahan karena manusia mengembangkan suatu identitas dan mengisi hidup mereka berbagai arti melalui bahasa; terutama kapasitas untuk menceritakan suatu sejarah kehidupan yang berkesinambungan.

Ontologi dan hubungannya dengan teori, dengan demikian, merupakan sesuatu yang kompleks dan kita tidak perlu membahasnya lebih jauh di sini, cukup dikatakan bahwa tidaklah mungkin untuk memisahkan permasalahan ontologis —apa dan siapa yang kita pikir ada— dengan cara kita memahami karakteristik dunia di sekitar kita, dan bagaimana kita mengonstruksi pandangan-pandangan dunia atau berbagai perspektif teori dalam hubungan internasional.

Apa yang Bisa Kita 'Tahu'?

> Fakta-fakta tidaklah berarti. Anda bisa menggunakan fakta-fakta untuk membuktikan apa pun yang sedikit benar.
>
> (Honer J. Simpson.)

Konstruksi dari perspektif teori merayu kita kepada isu-isu epistemologi. Epistemologi berkaitan dengan karakteristik dan tujuan pengetahuan manusia. Berkaitan dengan

permasalahan epistemologi, teori HI kontemporer kini sedang menghadapi keadaan yang disebut perdebatan pos-positivis (sering kali dianggap sebagai perdebatan ketiga atau bahkan keempat, lihat bawah). Tentu saja, perdebatan dalam teori HI tidak terjadi dalam suatu kevakuman dan perdebatan pospositivis harus dipahami dalam kerangka hubungannya dengan perdebatan teori sosial yang lebih luas. Untuk itu, kami telah memasukkan dalam bacaan lebih lanjut beberapa teks kunci dari para penulis yang kurang dikenal langsung dalam HI, tetapi ide-ide mereka telah sangat berpengaruh. Bagaimanapun juga sekali lagi, tujuan kami adalah untuk menyederhanakan sebanyak mungkin dan sehingga untuk tujuan ini kami akan membatasi bahasan kami pada HI. Di sini kami akan secara luas dapat mengidentifikasi divisi-divisi atau posisi-posisi utama dalam perdebatan ini yang ada antara mereka yang berpendapat bahwa kemungkinan untuk memahami dunia secara objektif sangatlah terbuka dan mereka yang percaya bahwa kepentingan, nilai, dan hubungan kekuasaan yang dominan memengaruhi tanpa dapat dihindari kegiatan pembuatan teori dan klaim-klaim yang diajukan mengenai dunia 'nyata'.

Positivisme berkaitan dengan metode dan klaim epistemologis mengenai ilmu-ilmu alam. Seorang ahli biokimia, misalnya, mungkin mempelajari fungsi bakteri dalam sistem pencernaan manusia. Dalam hal ini, nilai-nilai sosial, moral atau politik —permasalahan dengan dukungan atau justru mungkin penolakannya terhadap lembaga pernikahan, kepercayaannya bahwa bohong kadang dapat dibenarkan, atau kecenderungannya terhadap Partai Konservatif— tidak akan membawa banyak pengaruh terhadap tugas penelitiannya. Terdapat sebuah mazhab pemikiran yang ber-

pendapat bahwa adalah kemungkinan yang paling besar untuk mendapatkan suatu pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan internasional adalah dengan coba untuk meniru metode-metode ilmu-ilmu alam, menyingkirkan nilai-nilai dan kepercayaan yang kita miliki untuk sementara waktu dalam suatu dorongan yang besar untuk menemukan 'fakta' mengenai dunia. Di sisi lain, dapat dikemukakan bahwa nilai-nilai dan kebiasaan sosial selalu membawa pengaruh bagi penelitian, memengaruhi pilihan kita untuk mempelajari sesuatu dan cara penafsiran kita terhadap bukti-bukti yang ditemukan. Dalam pandangan ini, dunia alam dan dunia sosial merupakan dua dunia yang berbeda karena dunia sosial adalah suatu dunia yang dijejali dengan pengertian-pengertian sosial dan budaya, yang dikonstruksi melalui bahasa yang memunculkan simbol-simbol dan gambaran-gambaran yang sangat kuat. Dari sudut pandang ini, positivisme jadi berbahaya karena ia cenderung secara tidak langsung menyatakan bahwa fenomena tertentu yang terjadi secara 'alami'. Sebagai contoh, jika kita 'menyatakan' bahwa peperangan umumnya terjadi dalam interval yang reguler, atau 'dalam 'perputaran panjang', kita tidak perlu mengetahui motif-motif atau kepercayaan-kepercayaan dari mereka yang terlibat untuk memahami alasan terjadinya perang tersebut. Manusia menjadi 'objek' studi karena terdapat asumsi bahwa suatu fenomena sosial (dalam hal ini perang) dapat dipahami tanpa referensi pada pengertian-pengertian yang sering kali orang mengaitkannya.

Bukanlah hal yang mengejutkan jika para mahasiswa salah memahami positivisme sebagai *state-centricsm*, meski pendekatan-pendekatan *state-centric* tidak harus selalu positivis. Misalnya, Mazhab Inggris (lihat glossary) merupakan

sebuah pendekatan *state-centric* dalam HI, tetapi para pendukung mazhab pemikiran ini tidak menganggap studi hubungan internasional sebagai suatu proyek ilmiah. Malahan, mereka mengusulkan suatu pendekatan yang lebih intuitif (hal-hal yang bisa diketahui tanpa menggunakan logika pikir secara sadar, dengan insting barangkali) dan menggunakan teori filsafat, hukum, sejarah, dan politik dalam studi-studi mereka.

Sering kali positivisme dianggap sama dengan realisme, liberalisme, dan strukturalisme serta pospositivisme disamakan dengan teori-teori kritis seperti Mazhab Frankfurt, feminisme, dan posmodernisme, tetapi sekali lagi, hal ini adalah kesalahpahaman. Contohnya, muncul beberapa ketidaksepahaman mengenai realisme yang diidentikkan sebagai suatu pendekatan positivis. Di sisi lain, kaum realis klasik dengan jelas menyatakan dasar yang mereka gunakan untuk mendukung klaim-klaim mereka, atau pengetahuan yang terkonstruksi tentang dunia. Sebuah cabang realisme yang 'Machiavellian' mengklaim bahwa mereka mewakili pandangan dunia para negarawan atau diplomat yang dipaksa bekerja dalam sebuah dunia yang tak tentu dan berbahaya. Realisme menyediakan suatu arahan untuk bertindak berdasarkan prinsip-prinsip penting mengenai *politik nyata* dengan kepentingan pemeliharaan negara-bangsa. Dalam pandangan ini, 'perimbangan kekuasaan' merupakan sebuah strategi, atau praktik, yang diterapkan dengan cermat yang digunakan oleh para negarawan, para diplomat dan pemimpin militer untuk memelihara perdamaian, atau lebih tepatnya mencegah dominasi dari salah satu kekuasaan dan memaksimalkan otonomi para negara-bangsa yang berdiri sendiri. Jelasnya, kaum realis menanamkan

nilai dalam negara, atau mereka tidak akan begitu mendalam berkaitan dengan masalah-masalah dari 'keamanan nasional' dan otonomi dan pengetahuan mereka dari hubungan internasional dikonstruksi dari sudut pandangan kepentingan-kepentingan dan urusan-urusan dari negara.

Di sisi lain, kaum realis jelas percaya bahwa 'ancaman' benar-benar merupakan ancaman, dunia itu berbahaya dan tidak tentu, kondisi-kondisi ini muncul secara bebas dari yang pernah kita bayangkan atau yang akan kita percaya tentang dunia. Di masa yang berbeda, para penulis berpengaruh, seperti Morgenthau dan Carr, mendesak bahwa studi Hubungan Internasional seharusnya menjauhkan diri dari perhatian-perhatian normatif dengan keadilan atau kebenaran dengan maksud agar lebih banyak lagi menemukan kenyataan-kenyataan mengenai kekuasaan. Hal ini kemudian dibawa selangkah lebih maju di tahun 1960-an, ketika mazhab pemikir tingkah laku Amerika Utara mendesak para peneliti untuk memakai standar-standar analisis dan penelitian ilmiah yang menuntut konsentrasi dan perhatian pada detail dalam studi-studi mereka. Para pemikir tingkah laku mengambil konsep-konsep dasarnya dari realisme —negara dan kekuasaan— tetapi mengembangkan suatu pandangan yang secara lebih positivis dan mekanistik mengenai cara kerja sistem internasional. Positivisme tetap merupakan pengaruh yang kuat dalam studi HI di AS.

Pengaruh-pengaruh Hobbesian terhadap realisme juga dapat dibilang penting. Hobbes dipengaruhi oleh ilmu modern awal. Seperti yang telah kita ketahui dalam berbagai pembahasan di buku ini, munculnya ilmu dikaitkan dengan kontrol, atau subordinasi terhadap alam dalam rangka melayani kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan

manusia. Dari sini pengetahuan dikaitkan dengan subordinasi terhadap alam dan dalam proses ini *'knower'* jelas dianggap berada di luar dari, daripada menjadi bagian dari, dunia alam. Hobbes adalah tipikal paling tepat dari seorang pemikir modern dalam partisipasinya dia mengajukan suatu pembagian yang jelas antara 'logika' dengan 'sentimen' dan mengidentifikasikan 'logika' dengan 'pengetahuan'. Para filsuf feminis seperti Sandra Harding yang telah menentang pembagian antara *'knower'* (akal/subjek) dengan *'knowable'* (alam/objek), berpendapat bahwa hal itu sangatlah berbau gender. Hal yang disebut sebagai 'objektivitas' ilmu mensyaratkan sebuah kerangka pikir yang ilmiah dan model-model pencarian pengetahuan yang secara tegas dipisahkan dari apa yang akan diketahui, yakni alam, yang diidentifikasi secara metafor dengan sesuatu yang 'feminin'. Dengan arti ini, sesuatu yang 'maskulin' dengan pengasosiasian mengonotasikan otonomi pemisahan, dan jarak. Lebih lanjut lagi, semua 'ideologi' ilmiah menggambarkan hubungan antara *'knower'* dengan *'known'* sebagai sesuatu yang berhubungan dengan jarak dan pemisahan. Dengan kalimat lain, dapat dikatakan bahwa positivisme berdasarkan pada premis bahwa pertimbangan-pertimbangan ontologis —siapa dan apa yang kita pikir ada— tidak berhubungan epistemologi —klaim-klaim yang kita ajukan tentang dunia. Banyak di antara para teoretisi sosial (termasuk para teoretisi studi Hubungan Internasional) akan menolak premis ini.

Karena alasan-alasan itulah, realisme biasanya menjadi sasaran dari kritik-kritik pospositivis, tetapi Anda harus sadar bahwa kaum realis tidak berarti selalu tidak merefleksikan nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan yang mendasari pandangan mereka mengenai dunia. Hal yang

bermasalah mengenai realisme bukanlah bahwa aliran pemikiran ini merupakan sebuah konstruksi yang parsial dan tertentu saja dari suatu realitas yang kompleks —semua perspektif teori merupakan konstruksi yang tertentu dan parsial dari realitas— tetapi bahwa aliran pemikiran ini sering ditampilkan sebagai 'kesepakatan umum' atau 'realitas objektif' dan klaim-klaimnya digunakan untuk meminggirkan atau meruntuhkan 'utopianisme' dari teori-teori yang berposisi alternatif terhadapnya (lebih lengkap lihat di bawah).

Dalam pemahaman filsafat, seseorang yang idealis adalah seseorang yang menyatakan bahwa gambaran-gambaran atau bayangan-bayangan yang kita miliki tentang 'realitas' datang kepada kita melalui ide-ide kita tentang dunia. Dengan kata lain, seluruh struktur dari 'realitas' adalah ciptaan akal. Semua yang ada merupakan ide-ide kita, atau konsep-konsep mental, atau bayangan-bayangan mental. Kita mampu mengonstruksikan kategori-kategori atau konsep-konsep yang secara bersamaan memberikan kita suatu gambaran realitas dan membantu kita memahami dunia kita karena kita mampu berpikir secara rasional. Para idealis, dengan demikian, merefleksikan secara mendalam kondisi-kondisi yang dalam kondisi tersebut ia memiliki kemungkinan untuk 'tahu'.

Bagaimanapun, sebagian pemikir liberal lebih dipengaruhi oleh empirisme dibandingkan oleh idealisme. Empirisme menyatakan bahwa seluruh pengetahuan manusia diperoleh melalui pengalaman. Para pemikir empiris tidak mengakui keberadaan intuisi, tetapi lebih berpendapat bahwa kita 'mengetahui' sesuatu karena kita makhluk yang *sentient* (baca: sadar), yang mengamati tindakan-tindakan tertentu, atau

peristiwa-peristiwa, mengalami sensasi-sensasi dan mengalami sensasi-sensasi tertentu dan mempelajari, setiap waktu, cara untuk menafsirkan secara tepat pengalaman-pengalaman ini. Jadi, misalnya, seorang anak kecil mungkin tidak 'tahu' bahwa jika dia meletakkan tangannya ke dalam api maka ia akan terbakar, tetapi seiring waktu dia akan diceritakan bahaya-bahayanya, atau mungkin membiarkan rasa keingintahuan anak itu secara alami memberinya pembelajaran yang lebih baik, atau menyaksikan kemalangan temannya yang terkena api. Jikapun tidak dengan cara-cara tadi, si anak akan belajar dengan sendirinya bahwa api bisa membahayakannya dan harus dihindari. Bagaimanapun, ketika empirisme diterapkan di studi dunia sosial, ada suatu risiko bahwa pendekatan ini bisa membawa pada perekaman bukti-bukti dengan terus-menerus, atau kumpulan data yang dihadirkan sebagai 'fakta-fakta', tanpa banyak menyadari motif-motif khusus yang mungkin menggerakkan suatu proyek penelitian tertentu, atau cara informasi itu ditafsirkan dan tujuan dari keberadaannya.

Kotak Refleksi

Strukturalisme

Apakah strukturalisme adalah suatu pendekatan positivis? Untuk membantu Anda menjawab pertanyaan ini Anda mungkin bersedia membaca kembali bagian 'asal-usul' pada bab 3. Demikian juga, coba pikirkan beberapa konsep kunci dalam pemikiran strukturalis, seperti misalnya, 'nilai surplus', atau 'sistem dunia'. Apakah segala pemikiran itu menyatakan secara tidak langsung bahwa struktur-struktur materi yang nyata memang ada dan dapat dipahami secara bebas terlepas dari nilai-nilai, kepercayaan-kepercayaan atau kepentingan-kepentingan dari '*knower*'?

Kita tidak terlalu mempunyai banyak kesulitan dalam mengidentifikasi sejelas-jelasnya pendekatan-pendekatan pospositivis dalam teori HI. Teori Kritis, posmodernisme, feminisme dan *Green Thought* biasanya dianggap sebagai pendekatan-pendekatan pospositivis. Bagaimanapun, klasifikasi ini tidaklah lagi terasa sesederhana ketika dimunculkan pertama kali. Lebih-lebih, pospositivisme bukanlah semua sama saja, dalam pengertian bahwa ada perbedaan-perbedaan yang penting di antara masing-masing dari pendekatan-pendekatan ini.

Sebagai contoh, perhubungan antara pengetahuan, kekuasaan, dan praktik sosial, tentu saja, merupakan inti dari posmodernisme. Posmodernisme adalah sebuah posisi dalam pospositivis karena ia menolak ide ada fakta-fakta yang objektif tentang dunia yang dapat ditemukan melalui penelitian yang sungguh-sungguh dan pengujian berbagai hipotesis. Klaim yang diajukan ilmu tidak bisa dianggap netral atau tidak terpengaruh oleh kondisi sosial zamannya. Di masa lalu ilmu telah digunakan untuk 'membuktikan' bahwa penduduk asli Asia dan Afrika mempunyai otak yang lebih kecil dan dianggap lebih rendah daripada orang-orang Kaukasia. Demikian juga, beberapa pengikut Darwin telah mengklaim di masa lalu bahwa perempuan tidak memberikan kontribusi sebanyak yang diberikan laki-laki pada evolusi dari spesies manusia. Kita tidak lagi percaya hal-hal seperti ini benar, meski di suatu kurun waktu tertentu mereka diterima sebagai sesuatu yang 'terbukti ilmiah' dan, lebih-lebih, dipakai untuk membenarkan subordinasi atas perempuan, orang kulit hitam, dan orang Asia (menariknya, Darwinisme telah muncul kembali akhir-akhir ini dan hal ini membuka kembali perdebatan tentang perbedaan-per-

bedaan gender). Lebih lanjut lagi, posmodernisme menganggap seluruh proyek *Enlightenment* dipenuhi dengan bias dan berguna untuk menguatkan posisi kelompok-kelompok penguasa.

Di sisi lain, para pemikir kritis itu menjelaskan dengan sangat jelas hubungan-hubungan antara pengetahuan dengan kepentingan, tetapi tidak menolak ideal-ideal yang ditawarkan *Enlightenment* atau kemungkinan perkembangan ilmiah secara total. Habermas terinspirasi untuk membangun teori mengenai masyarakat karena dia ingin hal itu berguna untuk tujuan praktis —emansipasi diri orang-orang dari segala bentuk dominasi. Hal ini tidak berarti bahwa para penganut pemikiran Habermas sepenuhnya menolak konsepsi ilmu dan analisis ilmiah. Untuk alasan apa mereka harus begitu? Jika ilmu bisa membantu kita untuk mencapai sebuah pemahaman yang lebih baik tentang diri kita sendiri, mengapa kita mengalah pada penyakit tertentu misalnya, atau bagaimana kita bisa melewati batas-batas yang ditetapkan pada kita oleh fisik kita, dengan menemukan hukum-hukum aerodinamika, maka mengapa tidak memanfaatkan potensi ilmu? Ada wilayah-wilayah tertentu dalam kehidupan manusia yang di dalamnya usaha-usaha untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman ilmiah sepenuhnya dapat dibenarkan. Permasalahannya bukan terletak pada ilmu itu, tetapi pengaruh dari saintisme (*scientism*), atau positivisme, dalam filsafat dan wilayah-wilayah pemikiran lainnya yang berhubungan dengan arti dan tujuan hidup manusia.

Tidak terdapat kontradiksi di sini. Para pemikir kritis menyatakan bahwa ada berbagai bentuk atau jenis pengetahuan yang berbeda antara satu sama lain karena memang digunakan dalam tujuan dan maksud yang berbeda pula.

Sehingga misalnya, pengetahuan ilmiah dan teknis intinya adalah mengenai objektivikasi alam demi kemajuan manusia, sedangkan ilmu sosial dan ilmu tentang dunia manusia adalah, atau seharusnya, secara langsung berkaitan dengan kondisi-kondisi yang di dalamnya manusia mencapai otonomi, kontrol, dan kebebasan yang lebih besar dalam kehidupan mereka. Para pemikir kritis memandang bahwa pengetahuan tentang dunia sosial memang seharusnya jenis pengetahuan yang berbeda dari pengetahuan tentang dunia alam. Dalam ilmu alam kita mungkin menginginkan pengetahuan guna menguasai atau mengontrol dunia alam, tetapi pengetahuan mengenai dunia kehidupan manusia dicari guna mendorong perkembangan kebebasan yang lebih besar, daripada kontrol yang lebih besar —atau setidaknya sebagaimana yang seharusnya seperti itu. 'Masalahnya' adalah kita tidak lagi menganggap ilmu alam sebagai satu bentuk potensi pengetahuan, tetapi mengidentifikasi pengetahuan hanya dengan ilmu alam. Suatu etos ilmiah juga telah mendominasi filsafat dalam bentuk positivisme dan telah menjadi lebih berpengaruh dalam studi mengenai dunia sosial pada umumnya. Jika emansipasi terus berlanjut menjadi proyek bagi kemanusiaan, maka pengaruh dari saintisme, yang telah memunculkan suatu kecenderungan untuk menganggap semua masalah manusia secara esensi sebagai masalah teknis yang dapat menerima solusi-solusi teknis, harus dilawan. Hal ini hanya bisa dicapai jika subjek epistemologis (*'knower'*) adalah subjek yang reflektif dan secara sadar memahami ketertarikan-ketertarikannya, motif-motifnya, dan menentukan tindakan-tindakannya sendiri. Dengan cara ini, pengetahuan dihasilkan dengan mempertinggi otonomi dan rasa tanggung jawab.

Feminisme bukanlah juga jenis ilmu yang tidak beragam. Seperti yang telah kita lihat, para feminis telah mengkritik perspektif-perspektif HI yang cukup dominan, terutama realisme, dengan alasan bahwa aliran pemikiran ini dipenuhi dengan asumsi-asumsi gender dan bias dari para maskulin. Bagaimanapun, terdapat suatu perbedaan antara para teoretisi feminis *standpoint*, yang berpendapat bahwa kemungkinan untuk mengonstruksikan kembali teori HI dari sudut pandang perempuan, dengan para feminis yang menganut posmodernisme. Kembali pada pembahasan kita sebelumnya tentang hubungan antara ontologi dan epistemologi, beberapa teoretisi *standpoint* berpendapat bahwa pengalaman-pengalaman perempuan dalam membesarkan anak dan memberikan perhatian pada orang lain membangkitkan suatu rasa 'kedirian' yang merupakan bagian penting dalam sebuah jaringan —umumnya kerja sama— keterhubungan. Perempuan pada akhirnya memahami dirinya saat dia berhubungan dengan orang lain, daripada mengembangkan suatu rasa kedirian yang berakar dalam individualisme yang abstrak. Hal ini memiliki beberapa implikasi, tentu saja, pada cara kita memikirkan berbagai aspek dari hubungan internasional, mulai dari keamanan dan kekuasaan, hingga permasalahan identitas dan komunitas. Meski para feminis posmodern tidak menentang ide mengonstruksikan berbagai jenis pengetahuan yang berbeda atau melihat dunia melalui kacamata yang berbeda, mereka menghindari klaim-klaim epistemologi yang dibuat dengan mengatasnamakan 'perempuan' secara umum. Kita tidak akan mengulik habis argumen-argumen epistemologis lebih jauh di sini; hanya harus dipahami bahwa meski kita bisa secara bermanfaat mengelompokkan serangkaian 'teori

kritis' untuk beberapa tujuan, bagaimanapun juga mereka sangat berbeda antara satu sama lain. Pembagian secara sederhana beberapa teori ke dalam positivis/pospositivis bisa menutupi perbedaan yang halus dan penting baik itu dalam dan di antara aliran-aliran pemikiran.

Kotak Refleksi

Ilmu dan *Deep Ecology*

Sampai di sini kita telah mengenal *Green Thought* sebagai suatu pendekatan pospositivis dan alasannya. Para pemerhati lingkungan percaya daripada digunakan menolong umat manusia, pengetahuan ilmiah dan usaha-usaha untuk mendapatkan kontrol yang lebih besar lagi terhadap alam telah memberikan suatu bahaya yang besar pada planet dan semua makhluk yang hidup di dalamnya.Para pemerhati lingkungan juga percaya bahwa munculnya periode modern dan kemenangan ilmu, membantu laki-laki untuk menetapkan kekuasaan mereka atas perempuan dan melegitimasi dominasi Barat atas dunia lainnya. Dengan demikian, pengetahuan tidak bisa dianggap bebas-nilai dan objektif. Para pemerhati lingkungan juga menuntut suatu perubahan mendasar tentang cara kita memahami diri kita sendiri dan hubungan kita dengan alam. Pada saat yang sama, sedikitnya beberapa perspektif *Hijau* memercayai bukti-bukti ilmiah, tentang lubang pada lapisan ozon, misalnya, atau bahaya yang disebabkan oleh hujan asam pada hutan. Menurutmu, dapatkah kedua posisi ini dapat saling cocok?

Apakah yang Dimaksud Teori HI? Apa Fungsinya?

Meskipun kita telah mencatat perbedaan-perbedaan penting antara posmodernisme, teori kritis, feminisme dan *Green Thought*, kita telah setuju menganggap bahwa dalam beberapa hal mereka bisa dikelompokkan sebagai pendekatan-pendekatan 'pospositivis' atau kritis' dalam HI. Hal ini karena mereka semua menyoroti pentingnya konteks sosial

dan sejarah yang melatarbelakangi proses kemunculan suatu teori. Perspektif-perspektif kritis mempertanyakan mengenai karakteristik teori dan, yang paling penting, menguak hal yang diajukan oleh teori tersebut atau kegunaan teori tersebut. Pemahaman utama yang ditawarkan oleh 'perdebatan pospositivis' yakni bahwa pengetahuan itu tidak pernah 'polos'. Suatu teori selalu 'untuk' seseorang, atau, setidaknya, untuk mencapai beberapa tujuan.

Yang disebut sebagai 'perdebatan inter-paradigma' di tahun 1980-an (sering kali disebut 'perdebatan ketiga') pada intinya merupakan suatu perdebatan tentang implikasi-implikasi paradigma yang berkompetisi dalam HI (lihat Kotak). Hal yang muncul dari perdebatan inter-paradigma adalah pemahaman bahwa realisme, pluralisme liberal, dan strukturalisme, yang merupakan tiga perspektif utama dalam HI pada saat itu, tidak begitu berbeda dalam menafsirkan tentang 'dunia nyata', selain dalam konstruk ideologis, yang berakar dalam persaingan sistem nilai dan digerakkan oleh agenda-agenda normatif yang berbeda-beda. Juga diketahui dari perdebatan tersebut bahwa sejak perspektif-perspektif ini membangun —bukan sekadar menjelaskan— realitas secara berbeda, pandangan dunia mereka tidak bisa diperbandingkan secara signifikan.

Kotak Pengarang

Pandangan Thomas Kuhn tentang Karakteristik Paradigma

Sebuah paradigma adalah sebuah pemahaman dan cara pendekatan permasalahan bersama yang diterima oleh suatu komunitas sarjana dan digunakan untuk menanamkan pada para siswa cara-cara mendasar 'mengetahui dunia'. Thomas Kuhn,

seorang sejarawan ilmu alam, percaya bahwa bahkan dalam ilmu, teori tidak bisa dilihat sebagai suatu kegiatan yang didesain untuk menemukan atau menetapkan 'kebenaran'. Paradigma tidak menjelaskan realitas tetapi lebih membangun realitas secara berbeda. Pandangan dunia yang luas ini —asumsi-asumsi mendasar tentang karakteristik dunia dan cara kerjanya— umumnya diterima oleh para sarjana, dan sekali ditetapkan, sangat memengaruhi cara pengidentifikasian dan pelaksanaan suatu proyek penelitian. Untuk periode yang cukup panjang, kepercayaan atau asumsi utama mengenai yang dipahami sebagai paradigma tidak pernah diuji dan bahkan dapat digunakan untuk mendefinisikan suatu bidang sebagai 'tidak dapat didebat'. Bagaimanapun, dalam suatu periode sejarah tertentu paradigma-paradigma dominan mendapat tentangan karena mungkin mereka seolah-olah terlihat tidak mampu menjelaskan fenomena-fenomena baru, atau karena muncul pertimbangan-pertimbangan yang lebih persuasif. Contohnya, aliran fisika Newton telah menjadi paradigma berpengaruh untuk jangka waktu yang lama tetapi pada akhirnya digantikan oleh fisika kuantum yang dipengaruhi oleh Einstein, Bohr, dan yang lainnya pada awal abad ke-20. Sejak pergantian paradigma terus berlangsung dari waktu ke waktu, Kuhn berpendapat bahwa ilmu seharusnya tidak dilihat sebagai suatu pencarian atas 'kebenaran', tetapi lebih sebagai suatu perpindahan bertahap menjauh dari kesalahan.

Ketika pemahaman Kuhn mengenai paradigma diterapkan dalam ilmu-ilmu sosial (lihat kotak), hal itu mengindikasikan bahwa seseorang harus lebih sensitif tentang perkembangan disiplin-disiplin ilmu menurut sejarah, paradigma-paradigma tertentu yang telah diterima secara luas, dan konsekuensi dari hal ini. Paradigma bukanlah benar-benar representasi atau model dari dunia 'nyata', tetapi kepercayaan terbaik kita tentang 'realitas' dalam suatu periode sejarah tertentu. Sebagaimana yang telah kita ketahui pada bab-bab awal, realisme menjadi berpengaruh dalam studi

HI seusai Perang Dunia Kedua dan selama masa Perang Dingin pada suatu tingkatan bahwa hal tersebut hampir-hampir menjadi suatu 'ortodoksi' yang mapan —asumsi-asumsi dan proposisi-proposisi dasarnya secara luas diterima dan dianggap sebagai suatu arahan bagi proyek-proyek penelitian empiris dan konstruksi pengetahuan dalam disiplin ilmunya. Oleh karena sangat besar pengaruhnya hingga untuk masa yang cukup lama, kepercayaan atau asumsi-asumsi utama dari realisme 'tidak pernah diperdebatkan'. Para pemikir kritis melangkah setahap lebih jauh dengan berpendapat bahwa paradigma-paradigma dominan (dalam pengaruh realisme) mencerminkan asumsi-asumsi dan kepercayaan tentang dunia para kelompok yang berkuasa dalam periode sejarah tertentu, dan lebih-lebih, dalam beberapa hal melayani kepentingan dari kelompok-kelompok tersebut. Dengan demikian, realisme bisa dilihat sebagai sebuah pandangan dunia yang berusaha untuk mengenali dan menjelaskan ketergantungan fenomena-fenomena tertentu yang sering muncul dalam perjalanan sejarah, seperti sistem-dunia, anarki, politik kekuasaan —tetapi yang mencerminkan maupun mendukung kepentingan-kepentingan dari negara-negara dominan, atau kelompok-kelompok berpengaruh dalam negara-negara dominan. Dari perspektif ini, ideologi atau wacana mengenai realisme mengonstruksikan sebuah model dunia yang kemudian digunakan untuk membenarkan dan mengekalkan jenis tatanan sosial dan politik yang dijelaskannya.

Jika teori-teori dikonstruksi dari perspektif tertentu dan selalu dikondisikan oleh konteks sosial, politik dan sejarah yang melingkupi para teoretisinya, hal ini menunjukkan bahwa setidaknya ada beragam 'realitas' dan perspektif

dalam dunia. Sangatlah tepat jika kemudian dikatakan bahwa realisme mempertahankan hegemoninya dalam teori HI bahkan dalam kemunculan perspektif-perspektif pesaing seperti pluralisme yang liberal dan strukturalisme. Kemunculan perspektif-perspektif pesaing serta-merta memunculkan pertanyaan tentang alasan dan latar belakang hingga realisme telah menempati suatu posisi dominan seperti itu dalam HI dan, sementara itu, juga mengubah fokus penyelidikan pada hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan.

Di hadapan kemungkinan terjadinya suatu kebuntuan teoretis, Hoffman (lihat bacaan lebih lanjut) berpendapat bahwa HI seharusnya menganut teori kritis karena pendekatan ini materialis sekali, bersifat sejarah, dan reflektif tentang karakteristik ideologis dari klaim-klaim mengenai pengetahuan. Teori kritis diunggulkan sebagai pemenang 'tahap berikutnya' atau masa depan dari HI. Tanggapan-tanggapan posmodern adalah dengan menganut pluralisme teoretis, bukan karena elemen-elemen pandangan dunia yang bisa dikombinasikan untuk memberikan kepada kita pemahaman yang lebih baik tentang hubungan internasional, tetapi karena hal ini akan berefek melemahkan klaim-klaim kebenaran dari kelompok-kelompok penguasa dan menguatkan mereka yang sebelumnya terpinggirkan dalam studi HI. Dengan kata lain mengenali bahwa ada sejumlah cara dalam memandang dunia, berbagai 'kacamata' yang berbeda-beda, yang membuka ruang bagi pendekatan-pendekatan atau perspektif-perspektif lain seperti, misalnya, feminisme. Dalam wilayah-wilayah lain ilmu-ilmu sosial, penyelidikan akademis telah jauh melampaui jenis pemahaman yang ditawarkan dalam perdebatan inter-paradigma. Sejauh ini se-

bagaimana para teoretisi HI kini sedang mulai merefleksikan secara lebih mendalam tentang implikasi-implikasi praktik-praktik sosial, budaya dan, terutama hubungan kekuasaan, dalam konstruksi pengetahuan mengenai dunia, teori HI (seperti apa yang Jim George telah dijuluki sebagai 'disiplin terbelakang') mulai mengikuti tren-tren dalam cabang-cabang teori sosial lainnya.

Apakah jadi Persoalan Pilihan Perspektif Saya?

Jika pengetahuan tidak pernah menarik, netral, atau singkatnya, 'objektif', maka Anda mungkin menarik kesimpulan bahwa semua perspektif sama-sama valid, atau sebaliknya, sama-sama 'salah'. Terlebih lagi, jika pengetahuan dihasilkan hanya dalam kerangka paradigma atau perspektif yang ada, benarkah tidak ada suatu pemahaman yang benar-benar 'benar' atau 'tetap'? Mungkin beralasan jika kemudian Anda mempertanyakan, adakah satu alasan yang baik untuk menerima atau menolak klaim-klaim pengetahuan yang saling bersaing, atau menjadi pentingkah perspektif yang Anda pilih. Jelas, hal ini penting meskipun para sarjana saling tidak setuju tentang mengapa hal ini penting! Berikut ini kami akan mencoba menjelaskan alasan pentingnya teori, dengan menguraikan sedikit banyak tentang sisi politik dari klaim-klaim mengenai pengetahuan dan hubungan antara teori dan praktik.

Pertama, memilih untuk menerima satu posisi atau perspektif daripada permasalahan lainnya karena pemilihan ini mencakup pembuatan keputusan tentang hal yang Anda anggap penting atau tidak penting, pusat atau pinggiran, tetap atau sementara. Seperti yang dibuktikan dari bahasan kami tentang feminisme, pilihan-pilihan ini tidaklah polos,

tetapi sangat politis. Para kaum feminis mengatakan bahwa jika kita memilih untuk fokus sepenuhnya pada dunia negara yang didominasi laki-laki dan kebijakan luar negeri, misalnya, maka kita secara efektif mengesampingkan studi tentang perempuan dalam HI. Terlebih penting lagi, analisis yang semacam itu mensyaratkan sebuah pembagian publik/privat dan dari sini mengaburkan karakteristik politik internasional yang sangat gender. Dari pandangan ini, kegagalan menyoroti isu-isu tentang gender dalam teori maupun praktik dari hubungan internasional lebih jauh mengekalkan kesenjangan hubungan kekuasaan.

Telah dikatakan bahwa, ada beberapa ketidaksetujuan di antara para sarjana feminis tentang apa seharusnya yang menjadi fokus dari pembelajaran feminis. Jadi, misalnya, feminis liberal ingin 'mengangkat' perempuan, dengan lebih berusaha melakukan penelitian empiris tentang status perempuan di seluruh dunia, atau mungkin dengan penyelidikan tentang apakah keterlibatan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri atau negosiasi-negosiasi konflik, akan membuat perbedaan yang penting pada hubungan internasional. Para kaum feminis posmodern melangkah lebih jauh daripada feminis liberal dengan berpendapat bahwa tidaklah cukup hanya dengan memperkenalkan perempuan, kita perlu menguraikan (mendekonstruksi) keberadaan wacana-wacana tentang HI untuk membeberkan bias gender yang tertanamkan dalam konsep-konsep dan kategori-kategori kunci analisis. Akan tetapi, mereka menolak ide 'perspektif perempuan' atau 'perspektif feminist', secara tunggal karena mereka berpendapat bahwa 'perempuan' bukanlah kategori universal yang tunggal. Para sarjana posmodern umumnya punya ketajaman dalam

usaha-usaha menghasilkan pemahaman-pemahaman yang berbeda tentang dunia dengan mengadopsi berbagai kacamata atau perspektif yang berbeda dalam HI. Bagaimanapun, hal ini dilakukan karena dengan cara ini kita meruntuhkan ide bahwa ada satu 'kebenaran' mendasar atas dunia yang mungkin dapat kita temukan. Dari perspektif ini, ada banyak cerita yang bisa kita ceritakan tentang dunia dan hal ini tentunya tidak terbatas pada tujuh perspektif luas yang telah kami tunjukkan dalam teks. Wacana-wacana tentang HI dan keberadaan berbagai klaim atau pendapat yang saling bersaing juga berguna dalam melemahkan relasi antara kekuasaan/pengetahuan yang dominan dan menguatkan, pada dalam beberapa hal, kelompok-kelompok yang sebelumnya terpinggirkan.

Para pemikir kritis, terutama mereka yang mengikuti Habermas, menolak pluralisme teoretis yang didukung oleh posmodernisme, dan memegang teguh kepercayaan bahwa ketika tidak ada 'fakta-fakta' yang valid tentang dunia dan tidak ada posisi-posisi yang bebas dari kepentingan-kepentingan, maka kita tidak pernah memutuskan memilih berbagai klaim yang berbeda satu sama lain. Melalui wacana klaim-klaim yang saling berbeda ini bisa dipertimbangkan kejelasan, kejujuran, dan kebenarannya. Teori tidak bisa, dengan sendirinya, memutuskan dan membenarkan tindakan, tetapi ia bisa menciptakan agen-agen yang mampu berpartisipasi penuh dalam memutuskan tindakan. 'Kebenaran' tergantung pada kekuatan pendapat yang lebih baik dalam kerja sama yang mencari kebenaran. Dengan cara ini, 'kebenaran' dari pernyataan-pernyataan terkait dengan analisis akhir pada perhatian tentang kebaikan dan kebenaran hidup.

Kedua, seperti yang kami sebutkan pada bab pendahuluan, terdapat konsekuensi-konsekuensi praktis yang berasal dari menerima posisi teoretis tertentu. Teori seharusnya tidak dilihat sebagai sesuatu yang terpisah dari dunia hubungan internasional (praktik dari politik internasional, mungkin, atau hubungan ekonomi nasional), tetapi sebagai sesuatu yang terkait sangat erat dengan praktik tersebut. Tindakan dari 'para praktisi', entah mereka adalah diplomat, pegawai pemerintah, atau pegawai *NGOs,* dibentuk oleh kepercayaan dan asumsi-asumsi yang mendasari mereka tentang cara kerja dunia. Juga, implikasi-implikasi yang bersifat menentukan (sebagai akibatnya, rekomendasi-rekomendasi) dari 'teori' kita mungkin revolusioner. Dengan kata lain, kita mungkin terpaksa menyimpulkan bahwa satu-satunya solusi pada permasalahan yang terus mengganggu umat manusia tidak lain adalah perubahan secara mendasar di dalam cara masyarakat —termasuk masyarakat negara-negara—diatur dan suatu perubahan radikal dalam tingkah laku orang-orang. Pada kasus para kaum *Hijau,* misalnya, kita mungkin pada dasarnya perlu mempertimbangkan kembali hubungan kita terhadap dunia alam dan sehingga menimbulkan suatu pengaruh yang kuat terhadap cara kita memikirkan diri kita sendiri, hubungan kita dengan yang lainnya dan kebiasaan kita sehari-hari. Seperti yang dibuktikan dalam bahasan kita sebelumnya, para pemikir posmodern melihat suatu hubungan yang sangat erat antara 'teori-teori' atau, lebih tepatnya wacana-wacana dari hubungan internasional, dengan praktik-praktik aktual. Dengan demikian, kita perlu waspada pada cara di mana wacana-wacana membenarkan dan menguatkan praktik-praktik tertentu dan bagaimana hal ini diuji.

Kotak Konsep

Teori-teori Kritis dan Teori-teori *Problem Solving*

Dalam sebuah artikel yang sangat berpengaruh pertama kali diterbitkan tahun 1982, Robert Cox membuat suatu perbedaan penting antara teori-teori kritis dengan 'teori-teori *problem solving*'. Teori-teori *problem solving* melihat konteks sejarah sebagai sesuatu yang pasti dan berfokus dalam usaha menyediakan solusi-solusi pada masalah-masalah yang muncul dalam 'realitas' tertentu itu. Jadi, misalnya, strategi pertahanan nuklir (*nuclear deterrence*) merupakan suatu usaha untuk memikirkan tentang masalah-masalah khusus tantangan senjata-senjata nuklir atas keamanan negara-negara. Teori *deterrence* menganggap pasti adanya sistem negara dan dilema keamanan yang muncul dalam kondisi-kondisi anarki. Dalam hal ini, realisme bisa dilihat sebagai sebuah 'teori *problem solving*' karena ia mengasumsikan sebuah dunia negara-negara berdaulat dan keberadaan anarki internasional.

Sebaliknya, teori kritis mempertanyakan masalah-masalah yang lebih dalam, tentang latar belakang munculnya 'masalah'. Jadi, teori kritis mempertanyakan bagaimana umat manusia menjadi terbagi-bagi ke dalam negara-negara bangsa? Bagaimana hal ini menciptakan dilema keamanan? Pada kasus khusus tentang pertahanan nuklir, daripada mempertanyakan bagaimana 'ancaman' bisa diatasi, para pemikir kritis mempertanyakan: bagaimana senjata-senjata nuklir bisa muncul pertama kali? Bagaimana dan mengapa mereka dianggap sebagai sebuah 'ancaman'? dan sebagainya.

Para pemikir kritis berpendapat bahwa teori dan praktik harus dilihat sebagai sesuatu yang saling terkait erat. Teori kritis mendorong kita untuk berpikir secara kritis dan mendalam tentang cara penggunaan nilai-nilai, asumsi-asumsi dan konsep-konsep tertentu untuk menjelaskan 'realitas' sosial terkini dan alternatif-alternatif yang mungkin. Teori-teori menentukan apa yang dapat dipikirkan, dan

konsekuensinya, tindakan-tindakan yang dapat diambil dan bisa dipertimbangkan menurut kerangka pemahaman terbuka atau tertutupnya kemungkinan bagi emansipasi manusia. Pada saat yang sama, seperti yang kami tuliskan sebelumnya, tindakan kita mengubah 'realitas' yang ada dan sehingga mempunyai pengaruh terhadap apa yang kita dan yang lainnya akan pikirkan sebagai sesuatu yang 'mungkin'. Dari perspektif ini, pengetahuan dihasilkan melalui refleksi-diri, yang memberikan daya dorong untuk mencapai pemahaman-diri dan kemerdekaan dalam bertindak dan, juga, emansipasi.

Akhir Kata —Apakah Buku Ini Berharga?

Jika, setelah semua diperhitungkan, setelah semuanya ini masih terlihat sulit, Anda mungkin bisa terhibur dengan kata-kata ini bahwa kita benar-benar menjadi 'tercerahkan' hanya ketika kita sepenuhnya menyadari bahwa kita 'mengetahui' tak sesuatu pun! Ketika mempelajari HI (sebuah disiplin yang sering kali muncul untuk membahas banyak hal atau segala hal), bisa jadi, pada suatu saat, Anda merasa bahwa Anda tidak pernah akan mengetahui atau memahami *apa pun;* bahwa hanya ada pertanyaan yang lebih banyak, tetapi bukan satu pertanyaan terakhir. Bagaimanapun, dengan ketekunan, studi HI adalah pembelajaran yang sebanding dengan usahanya. HI memunculkan pertanyaan-pertanyaan tentang, dan menyediakan jendela bagi, beberapa aspek dari kehidupan dan, lebih penting lagi memasukkan semua orang di seluruh dunia sebagai bahan studinya. Kami berharap buku ini membantu untuk membuka sedikit jendela itu, membuat Anda menyadari bahwa kebiasaan Anda berdampak pada dunia ini, dan bagaimana

ide-ide tentang dunia telah berdampak dan memengaruhi Anda. Kata-kata Hommer Simpson, atau siapa pun, tidak akan lagi pernah sama. Pada pendahuluan dari buku ini, kami menyatakan bahwa usaha kami di sini mirip dengan menyediakan sebuah buku bahasa yang mengajari diri Anda sendiri. Teori sangatlah penting karena ia menyediakan kita sebuah bahasa, sebuah kosakata dan seperangkat set konsep yang dengannya kita memahami realitas dan kerangka tindakan-tindakan kita. Kini setelah menjelaskan teori dan konsep dasar yang mendasari HI, sudah saatnya bagi Anda untuk berbicara. ✦

Daftar Pustaka

Banks, M. (1985), 'The Inter-Paradigm Debate', dalam Groom, A.J.R. dan Light, M. (ed.), *International Relations: A Handbook of Current Theory,* London: Pinter, hlm. 7-26.

Barret, M. dan Phillips, A. (1992), *Destabilising Theory: Contemporary Feminist Debates,* Oxford: Polity Press.

Booth, K. (1997), 'Discussion: A Reply to Wallace', *Review of International Studies,* Vol. 23, No. 3, hlm. 371-377.

Booth, K. dan Smith, S. (ed.). (1995), *International Relations Theory Today,* Cambridge: Polity Press.

Bourdie, P. (1997), *Outline of a Theory of Practice,* Cambridge: Cambridge University Press.

Bourdie, P. (1993), *The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature* (edited by Randal Johnson), Cambridge: Polity Press.

Brown, C. (1992), *International Relations Theory: New Normative Approaches,* Harlow: Prentice Hall.

Brown, S. (1988), *'Feminism, International Theory, and International Relations of Gender Inequality', Millenium Journal of International Studies,* Vol. 17, No. 3, hlm. 461-476.

Cox, R. (1986), 'States, Social Forces and World Order' dalam Keohane, R. (ed.), *Neorealism and Its Critics*, Princeton: Princeton University Press.

Foucault, M. (1980), *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings*, 1972-1977 (diedit oleh C. Gordon), Harlow: Prentice Hall.

Gadamar, H. (1977), *Critical Hermeneutics*, Barkeley: University of California Press.

George, J. (1994), *Discourses of Global Politics: A Critical (Re)Introduction to International Relations*, Boulder, CO: Lynne Rienner.

Grimshaw, J. (1987)), *Feminist Philosophers*, Harlow: Prentice Hall.

Habermas, J. (1972), *Knowledge and Human Interest*, London: Heinemann.

Hardings, S. (1990), 'Feminism, Science and the Anti-Enlightenment Critiques', dalam Nicholson, L. (ed.), *Feminism/ Postmodernism*, London: Routledge, hlm. 83-106.

Held, D. (1990), *Introduction to Critical Theory: Horkheimer to Habermas*, Cambridge: Polity Press.

Hoffman, M. (1987), 'Critical Theory and the Inter-Paradigm Debate', *Millenium: Journal of International Studies*, Vol. 16, No. 2, hlm. 231-350.

Hollis, M. dan Smith, S. (1994), 'Two Stories about Structure and Agency', *Review of International Studies*, Vol. 20, No. 3, Juli, hlm. 241-252.

Jaggar, A. (1983), *Feminist Politics and Human Nature,* Harlow: Prentice Hall.

Kourany, J., Sterba, J.P. dan Tong, R. (ed.) (1993), *Feminist Phylosophies,* Harlow: Prentice Hall.

Light, M. dan Groom A.J.R. (ed.) (1985), *International Relations: A Handbook of Current Theory,* London: Pinter.

Linklater, A. (1990), *Beyond Realisme and Marxisme: Critical Theory and International Relations,* London: Macmillan.

Linklater, A. (1992), 'The Question of the Next Stage: A Critical Point of View', *Millenium: Journal of International Studies,* Vol. 21, hlm. 77-98.

Maclean, J. (1981), 'Political Theory, International Theory and Problems of Ideology', *Millenium: Journal of International Studies,* Vol. 10, No. 2, hlm. 102-125.

Matthews, F. (1991), *The Ecological Self,* London: Routledge.

Merchant, C. (1992), *Radical Ecology: The Search for a Liveable World,* London: Routledge.

Rosenau, P. (1991), *Postmodernism and the Sosial Sciences: Insights, Inroads, Intrusions,* Princeton: Princeton University Press.

Scruton, R. (1982), *A Dictionary of Political Thought,* London: Macmillan.

Smith, S. (1996a), 'Positivsm and Beyond', dalam Smith, S., Booth, K. dan Zalewski, M. (eds.), *International Theory: Positivism and Beyond,* Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 1-5.

Smith, S. (1996b), 'Power and Truth: a Reply to William Wallace', *Review of International Studies,* Vol. 23, No. 4, hlm. 507-516.

Smith, S. dan Hollis, M. (1996), 'A Response: Why Epistemology Matters in International Theory', *Review of International Studies,* Vol. 22, No.1, Januari, hlm. 111-116.

Smith, S., Booth, K. dan Zalewski, M. (ed.) (1996), *International Theory: Positivism and Beyond,* Cambridge: Cambridge University Press.

Sylvester, C. (1994), 'The Emperor's Theories and Transformations: Looking at the Field Through Feminist Lense', dalam Sylvester, C. dan Pirages, D. (ed.), *Transformations in Global Political Economy,* London: Macmillan.

Vasquez, J. (1994), 'The Post-Positivist Debate: Reconstructing Scientific Enquiry and International Relations Theory After Enlightenment's Fall', dalam Booth, K., dan Smith, S. (ed.), *International Relations Theory Today,* Cambridge: Polity Press.

Wallace, W. (1996), 'Truth and Power, Monks and Technocrats: Theory and Practice in International Relations', *Review of International Studies,* Vol. 22, No. 3, hlm. 301-321.

Whitworth, S. (1989), 'Gender in the Inter-Paradigm Debate', *Millenium: Journal of International Studies,* Vol. 18, No. 2, hlm. 265-272.

Wittgensten, L. (1969), *On Certainty,* Oxford: Blakwell.

—✦✦—

Daftar Istilah-Istilah Kunci atau Sulit

Catatan Pendahuluan

Daftar definisi-definisi yang disederhanakan ini disusun untuk membantu pemahaman Anda. Meski bagaimanapun daftar ini tidak cukup komprehensif. Beberapa kata tidak dimasukkan karena mereka secara mencukupi dibahas dalam teks itu sendiri; untuk memahami makna dari istilah semacam itu, Anda perlu menggunakan indeks untuk melacak pemahamannya.

Aktor: Jika dunia dianggap sebagai sebuah panggung, maka aktor-aktor dalam hubungan internasional bisa dipahami dengan cara yang sama seperti aktor-aktor dalam teater. Seorang aktor dalam hubungan internasional adalah satu entitas yang dapat dikatakan 'bertindak' (*to act*). Pengertian 'aktor' ini bisa diterapkan pada entitas-entitas yang berada di bawah hukum internasional, sehingga dalam hal ini negara-negara adalah aktor, tetapi bukan individu. Pengertian istilah aktor juga digunakan secara bebas untuk menjelaskan entitas-entitas yang mempunyai pengaruh atau agensi (lihat di bawah); dalam pandangan ini aktor-aktor mungkin

adalah negara, perusahaan multinasional, organisasi internasional, gerakan-gerakan sosial atau, dalam kasus tertentu, individu-individu yang berpengaruh.

Agensi: Seorang aktor (lihat di atas) dikatakan mempunyai agensi ketika mereka mampu memiliki pengaruh, atau memengaruhi hasil dari proses atau peristiwa tertentu dalam beberapa cara. Hal yang mungkin paling mudah membandingkan 'agensi' dengan ide tentang 'struktur' (lihat penyesuaian struktural di bawah). Bagi mereka yang percaya bahwa 'struktur' sangatlah penting dalam hubungan internasional, agensi manusia terbatas; aktor-aktor tidak akan mampu terlalu banyak memengaruhi peristiwa-peristiwa tersendiri atau rentetan peristiwa dalam sejarah karena mereka dibatasi oleh struktur dari sistem internasional atau sistem-dunia.

Alienasi: Sebuah istilah yang sering digunakan oleh Hegel, Marx dan Freud. Istilah alienasi mempunyai pengertian yang sama dengan ide mengenai keterasingan; merasa disisihkan atau seperti merasa terpisah dari orang-orang atau kelompok sosial lainnya. Istilah ini bisa digunakan dalam makna yang lebih kuat untuk menunjukkan suatu perasaan terkesampingkan yang menghasilkan perasaan marah atau benci atau antipati terhadap masyarakat.

Anarki: (Istilah ini dibahas cukup jelas dalam teks sendiri). Sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan sebuah situasi yang dalam situasi tersebut yang pemerintahan pusat tidak memiliki peran sama sekali. Anarki tidak seharusnya disamakan dengan *chaos* atau *disorder*. Para sarjana Mazhab

English (lihat di bawah) berpendapat bahwa dalam hubungan Internasional, tatanan lebih mungkin terjadi, daripada *chaos*, dalam sebuah situasi anarki aturan-aturan informal yang sering kali diterima oleh sebagian besar negara. Aturan-aturan seperti itu sering kali berasal dari hukum internasional (lihat di bawah).

Antroposentrisme: Secara sederhana berarti keterpusatan pada manusia. Dalam konteks perdebatan lingkungan ia mengacu pada pendapat bahwa alam merupakan sumber daya yang ada untuk dieksploitasi oleh manusia bagi kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka. Sehingga, alam tidak mempunyai hak dan dengan demikian dapat digunakan oleh manusia.

Suaka: Sebuah suaka adalah sebuah tempat perlindungan. Dalam hukum internasional/hubungan internasional, ia merujuk pada proses pemberian jaminan suaka oleh suatu negara bagi warga negara dari negara lain yang merasa terancam penindasan mental atau fisik dalam negara asal mereka. Para pencari suaka harus dibedakan dari pengungsi —mereka yang telah berpindah sementara waktu dari tanah air asal mereka (meski pengungsi mungkin pada akhirnya mencoba mencari suaka di negara baru jika mereka merasa takut akan penindasan ketika mereka kembali pulang).

Atomistik: Lihat Holistik.

Otonomi: Kemampuan untuk menyusun dan mengejar tujuan-tujuan secara bebas. Isu-isu mengenai otonomi sering kali muncul dalam hubungannya dengan negara,

tetapi bisa diterapkan pada aktor-aktor lainnya (lihat di atas). Sering kali dikatakan bahwa otonomi adalah hal yang kian jarang ditemukan dalam sebuah dunia yang ditandai dengan interdependensi. Otonomi seharusnya tidak dicampuradukkan dengan konsep kedaulatan (lihat di bawah).

Model Bola Biliar: Ini merupakan sebuah gambaran yang sering digunakan untuk menunjukkan pandangan dunia kaum realis (klasik). Meja bilyar mewakili dunia dan bola-bola adalah negara. Analogi/metafor menyatakan bahwa negara mempunyai batas-batas yang sangat jelas —cangkang/kulit bola tersebut— dan sehingga politik domestik tidak secara langsung dipengaruhi oleh politik internasional. Bagaimanapun, negara-negara saling melakukan kontak satu sama lain, dan sebagaimana sebuah bola biliar yang menembak pada kecepatan yang tinggi, sering kali mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkah laku dari bola lainnya. Dalam pandangan ini, hubungan internasional, pada intinya, adalah tentang interaksi-interaksi seperti itu. Model bola biliar biasanya mengizinkan penggunaan bola-bola dengan ukuran yang berlainan (tidak seperti dalam permainan yang sebenarnya) untuk merepresentasikan fakta bahwa beberapa negara mempunyai kekuasaan yang lebih daripada yang lainnya, dan beberapa negara mempunyai pengaruh yang lebih besar daripada yang lainnya.

Borjuis: Pertama digunakan untuk menjelaskan kemunculan kelas menengah dalam revolusi Prancis yang menentang dominasi politik kelompok aristokrasi (*rezim kuno*). Kini istilah ini lebih dikaitkan dengan pemikiran kaum Marxis. Borjuis adalah sebuah kelas yang terdiri dari para pemilik

alat-alat produksi, yang bertentangan dengan kelas proletar atau kelas pekerja, yang merupakan tenaga kerja yang digaji. Kaum borjuis, entah itu yang tercerahkan (terdidik dan rasional), atau pilantropis (suka memerhatikan orang lain), atau yang sangat suka mendominasi, menurut pemikiran ortodoks Marxis, ditakdirkan untuk jatuh seiring dengan kejatuhan sistem ekonomi dari kapitalisme yang mendukungnya karena kontradiksi-kontradiksi internal dalam sistem tersebut (lihat di bawah).

Kapitalisme: Sebuah sistem sosial dan ekonomi yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip kepemilikan pribadi dan kontrak-kontrak bebas —sukarela. Dalam sebuah masyarakat kapitalis, mekanisme pasar (kekuatan dari penawaran dan permintaan) pada akhirnya menentukan pembagian sumber daya, produksi atas barang dan jasa, dan distribusi 'penghargaan' (upah dan keuntungan). Karakteristik kapitalisme —entah itu menguntungkan dan progresif secara sosial atau memecah-belah dan berbahaya— terus saja diperdebatkan. Contohnya, biasanya kaum liberal mengklaim bahwa meski berdasarkan kepuasan pribadi individu, sistem organisasi sosial dan ekonomi ini pada akhirnya bekerja untuk menjamin keadaan baik bagi jumlah terbanyak. Sebaliknya, kaum sosialis mengeluh bahwa kapitalisme menghasilkan kesenjangan sosial, mendorong materialisme dan konsumerisme besar-besaran dan, pada akhirnya, pemborosan dalam hal sumber daya manusia maupun alam.

Kontradiksi: Sebuah istilah kaum Marxis yang digunakan untuk menunjukkan ide bahwa kapitalisme menghasilkan

kontradiksi-kontradiksi yang pada akhirnya akan menyebabkan ia jatuh. Dalam istilah ekonomi, kontradiksi-kontradiksi kapitalisme adalah suatu kecenderungan terhadap monopoli, dan menekan upah, sementara pada saat yang sama mendorong produksi berlebihan dalam rangka mendorong peningkatan keuntungan. Dalam kerangka sosial dan politik, sementara pura-pura berdasarkan suatu sistem kontrak bebas dan pilihan individu, kapitalisme menuju pada penghapusan kaum proletar secara progresif (lihat di bawah). Sistem organisasi ekonomi juga menciptakan kondisi-kondisi di mana para pekerja mampu bertindak secara kolektif untuk menghentikan rantai penindasan.

Model Pusat-Pinggiran: Ini adalah nama yang diberikan untuk ide yang menyatakan bahwa dunia pada dasarnya terbagi ke dalam orang kaya (*the haves*) dan orang miskin (*the have nots*), diistimewakan dan dikorbankan, berkuasa dan dikontrol. Pada dasarnya model pusat-pinggiran menjelaskan mekanisme struktur kapitalisme global (lihat di atas) sebagai sebuah bentuk dari organisasi ekonomi, sosial dan politik, yang mau tidak mau membagi dunia ke dalam 'Pemenang' dan 'Pecundang'. Sistem ini bekerja dan dikuatkan oleh hubungan-hubungan antara para elit di negara-negara pusat (kaya, industri) dan para elit di negara-negara pinggiran (terbelakang, tergantung), yang telah berbagi kepentingan dalam mendukung suatu sistem yang menjamin posisi istimewa mereka. Model pusat-pinggiran, merupakan suatu pembandingan yang kejam sekali dan, mungkin, suatu penangkal pandangan liberal atas sebuah sistem pasar bebas atau saling ketergantungan dunia (lihat bab 2).

Dekonstruksi: Sebuah pendekatan filsafat yang menyatakan secara tidak langsung sebuah kritik yang terus-menerus dan detail terhadap cara pengetahuan dikonstruksikan. Dekonstruksi mempertanyakan ide atas kebenaran dengan membeberkan asumsi-asumsi dan dugaan-dugaan dalam sebuah 'teks'. Pendekatan ini mempunyai asal usul dalam studi sastra (kritik sastra) dan biasanya dikaitkan dengan karya Jacques Derrida.

***Deep Ecology*:** Juga dikenal dengan '*Deep green*', sebuah pendekatan *deep ecology* merupakan salah satu yang menolak ide antroposentrisme (lihat di atas). Alam dipandang sebagai sesuatu yang hidup dan makhluk hidup dianggap layak dihormati. Beberapa para pemikir *deep green* bahkan berpendapat bahwa kita harus memberikan kepada alam hak-haknya. Hal ini tidak berarti —seperti klaim dari beberapa kritikusnya— bahwa, misalnya, spora anthrax secara moral dapat dianggap sebagaimana manusia. *Deep ecology* merupakan sebuah filsafat yang terikat pada bio-atau ekosentrisme (lihat di bawah).

Deterministik: Sebuah teori dikatakan deterministik ketika ia menyatakan secara tidak langsung bahwa aktor-aktor mempunyai sedikit ruang gerak (agensi); yakni bahwa tingkah laku mereka ditetapkan sebelumnya (seperti dalam determinisme biologis) atau sangat dibentuk atau ditentukan oleh struktur-struktur sosial (seperti dalam determinisme ekonomi). Dari sini, determinisme menunjukkan ide bahwa pilihan-pilihan manusia hanya memiliki sedikit pengaruh pada susunan-susunan sosial dan politik yang mau tidak mau akan terjadi nantinya.

Pembangunan: 'Pembangunan' merupakan sebuah contoh yang baik dari sebuah 'wacana' (lihat di bawah). Pembangunan mulai menarik perhatian dari para ilmuwan sosial pada 1950-an dan 1960-an, pada saat ketika beberapa bekas negara jajahan mulai merdeka dan perlu secara simultan membangun lembaga-lembaga politik yang stabil, dan mencapai pertumbuhan dan diversifikasi ekonomi. Untuk waktu yang lama, konsep 'Pembangunan' menunjukkan ide bahwa semua negara di dunia mengikuti satu pola yang sama terhadap industrialisasi dan modernitas. Negara-negara miskin, jika mereka mengikuti pola atau strategi yang tepat akan melewati serangkaian tahap hingga mereka mencapai posisi yang sama dengan negara-negara maju yang kaya. 'Para Ahli' pembangunan menawarkan nasihat-nasihat untuk mengembangkan negara berdasarkan pada pengalaman dari negara-negara Barat. Pembangunan menuju masyarakat konsumsi besar-besaran jelas tidak berhasil pada beberapa kasus. Belakangan ini, seluruh konsep pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi dan modernisasi telah ditantang oleh pemerhati lingkungan dan posmodernis, dengan alasan bahwa hal ini dapat dilihat sebagai perwujudan lain dari dominasi Barat.

Wacana: Dalam istilah sederhana wacana berarti cara kita menggunakan bahasa untuk membangun pengertian atau cara kita memasukkan pengertian atau nilai penting pada kata-kata. Percakapan sehari-hari tentang dunia merupakan contoh dari wacana. Wacana terkandung dalam dunia sosial maupun inter-subjektif. Dalam pemikiran pos-strukturalis wacana mempunyai pengertian yang lebih tepat. Pos-strukturalis berpendapat bahwa tak ada apa pun yang berada di

luar dari wacana. Dengan kata lain, satu-satunya cara agar kita bisa memahami dunia kita adalah melalui perbincangan mengenainya. Melalui wacana —penggunaan bahasa, simbol-simbol, dan gambaran— kita coba untuk mengonstruksikan suatu pengertian. Bagaimanapun, kita tidak sedang menggunakan bahasa untuk menjelaskan sebuah dunia nyata 'di luar sana', kita sedang membangun 'realitas' itu secara diskursif.

Ekosentrisme: Sederhananya berarti keterpusatan pada alam. Dalam konteks perdebatan lingkungan hidup, ia merujuk pada pendapat bahwa manusia tidak seharusnya bebas berkuasa untuk mengeksploitasi kehidupan planet dan sumber daya-sumber daya yang tak berdaya tepatnya seperti yang mereka inginkan tetapi seharusnya mengakui nilai intrinsik dari dunia non-manusia.

Ekosofi: Sebuah singkatan kata yang tepat yang digunakan oleh seorang *deep* ekologis Norwegia, Arne Naess, dan berarti sebuah filsafat ekologi.

Egalitarianisme: Sebuah kepercayaan pada persamaan sebagai sebuah nilai atau prinsip, yang darinya melahirkan ide bahwa kesenjangan berarti ketidakadilan.

Egoistis: Kata ini muncul biasanya dalam literatur hubungan internasional dan menyatakan secara tidak langsung bahwa negara-negara, seperti halnya umat manusia, sebenarnya mementingkan diri sendiri dan bertindak semaksimal mungkin untuk kesejahteraan atau kepentingan diri mereka sendiri.

Emansipasi: Dalam penggunaan populer, emansipasi berarti bebas atau menyusun kebebasan, seperti dalam kasus bebas dari perbudakan. Dalam filsafat Barat, emansipasi berarti pencapaian otonomi, kemampuan bertindak secara merdeka. Diberikan emansipasi tidak berarti bahwa seseorang bebas dari semua batasan dan kewajiban terhadap yang lainnya, hanya pada apa-apa yang dianggap menindas atau ikatan yang tidak perlu.

Empiris: Empiris adalah kecenderungan terhadap model-model dari penyelidikan atau studi yang muncul dari pengalaman daripada dengan model penyelidikan yang berkaitan dengan analisis dan penjelasan teoretis. Jadi empirisme menunjukkan kepercayaan bahwa semua pengetahuan dunia sepenuhnya muncul dari pengalaman. Model penyelidikan ini harus dibedakan dari positivisme (lihat di bawah).

Empowerment: Empower adalah memberikan seseorang atau kelompok kapasitas untuk bertindak secara efektif untuk menyadari kejelasan tujuan dan objektivitas diri mereka sendiri. Jadi *empowerment* berbeda dari kebebasan, yang berarti lebih dari ketiadaan batasan dan menyatakan secara tidak langsung beberapa bentuk positif dari kemungkinan atau fasilitasi, mungkin melalui akses pada sumber daya atau struktur-struktur pembuat keputusan.

Mazhab *English*: Istilah 'Mazhab *English*' menunjukkan sebuah aliran pemikiran atau kumpulan karya yang membeberkan tentang karakteristik 'masyarakat internasional' (lihat di bawah) atau 'masyarakat bernegara'. Kedua bagian atau aspek Mazhab *English* terangkum dalam frasa 'masya-

rakat anarkis' yang dipopulerkan oleh Hedley Bull, yang ironisnya seorang Australia! Meskipun Mazhab *English* yang sering kali dianggap sebagai sebuah varian dari pemikiran kaum realis (pada dasarnya keduanya cenderung *state*-sentris), pengaruh-pengaruh intelektual yang melingkupinya sebenarnya lebih beragam, dipengaruhi oleh cabang-cabang pemikiran studi HI yang rasional dan liberal maupun disiplin-disiplin lainnya, seperti sosiologi dan hukum internasional.

Enlightenment (Pencerahan): Periode sejarah manusia (sekitar abad ke-18) ketika orang-orang meninggalkan masa medievalisme yang penuh takhayul ke suatu kepercayaan pada logika manusia dan kemajuan moral (dan material).

Epistemologi: Bersangkutan dengan pengetahuan. Bagaimana kita tahu, apa yang kita tahu? Epistemologi bisa dibedakan dari ide ontologi (yang berkaitan dengan wilayah keberadaan) dalam hal bahwa ia fokus pada cara kita mengetahui berbagai hal; dasar yang kita punyai untuk membuat klaim-klaim pengetahuan.

Etnosentris: Jangan dicampuradukkan dengan rasisme. Dalam konteks hubungan internasional yang lebih luas, etnosentrisme mencakup kecenderungan untuk menganggap pengalaman seseorang sebagai sesuatu yang biasa/normal, cara pikir seseorang sebagai sesuatu yang rasional dan benar serta untuk membenarkan bahwa orang atau pihak lain akan berpikir sama dan akan memahami motivasi dan tindakan-tindakan Anda.

Mazhab Frankfurt: Nama yang diberikan pada sebuah mazhab yang berteori secara kritis yang muncul pertama kali di Jerman tahun 1920-an. Mazhab Frankfurt sangatlah penting posisinya dalam melepaskan diri dari aliran pemikiran Marxist yang ortodoks (deterministik) (lebih berpijak pada karya-karya awal Marx yang 'humanistik', daripada karya Marx yang kemudian yang berangkat dari perspektif ekonomi) dan dalam usaha mereka mengembangkan suatu analisis budaya.

Genealogi: Istilah yang dikaitkan dengan karya Michael Foucault. Dalam penggunaan sehari-hari, genealogi berarti menelusuri suatu garis keturunan, keluarga, atau asal usul. Demikian pun, dalam penggunaannya di lingkup pemikiran pos-strukturalisme genealogi diterapkan sama ketika ia menjelaskan suatu metode studi yang menelusuri asal usul sejarah dari ide-ide, konsep-konsep, atau teori-teori. Tidak seperti sejarah, yang menggunakan sumber dan bukti dari masa lalu untuk membangun suatu laporan atau cerita yang koheren tentang masa kini, genealogi menunjukkan mekanisme digunakannya ide-ide dan konsep-konsep dominan untuk membangun hubungan kekuasaan tertentu dan mekanisme diadunya wacana-wacana dominan.

Hermeneutik: Suatu metode yang lebih dekat dengan penafsiran daripada ilmu.

Heuristik: Sebuah sarana heuristik adalah sesuatu yang digunakan untuk membantu pemahaman mengenai hal yang lebih kompleks dengan memberikan kesempatan para pembelajar untuk menemukan pemahamannya sendiri. Sarana

ini mungkin bukanlah suatu penjelasan yang di dalamnya sangat komprehensif, tetapi memberikan kesempatan seseorang jauh melaluinya dengan menggunakan analisis dan logika.

Holistik: Sebuah pendekatan holistik adalah pendekatan lebih yang mempelajari segala sesuatu sebagai sebuah kesatuan daripada membaginya ke dalam bagian-bagian pokok (yang dapat diistilahkan suatu pendekatan individualistik atau atomistik). Suatu pendekatan holistik tentang lingkungan memercayai bahwa ia terkait dengan sejumlah cara yang kompleks dan harus dipelajari seperti itu. Suatu pendekatan atomistik mungkin percaya bahwa mempelajari sebuah masalah, seperti penebangan hutan, tanpa mengacu pada struktur-struktur sosial, ekonomi, politik dan ekologi yang lebih luas adalah sangat mungkin.

Ideologis: Secara literal ideologi berarti ilmu dari ide-ide, tetapi telah menunjukkan semua sistem kepercayaan yang merangkum semua, yang berhubungan dengan karakteristik masyarakat serta hubungan ekonomi dan politik. Ideologi sering kali dibandingkan dengan 'ilmu' atau 'kebenaran' yang mengaku menjelaskan sebuah 'realitas' yang terpisah secara bebas dari kepercayaan kita mengenai dunia. Bagaimanapun, belum tentu juga bahwa ilmu, 'kebenaran', dan ideologi bisa dibandingkan dengan cara ini karena semua klaim kebenaran berasal dari kepercayaan fundamental atau visi-visi normatif (lihat di bawah), sedangkan ilmu tidak juga banyak terdiri dari 'fakta-fakta' sudah tidak diperdebatkan, tetapi lebih pada kepercayaan terbaik kita tentang realitas yang ada pada suatu periode tertentu.

International Law **(Hukum Internasional):** Pada dasarnya hukum internasional tidak jauh berbeda dari hukum domestik. Hukum ini mengatur hubungan antar-negara (dan yang secara internasional diakui sebagai aktor-aktor lainnya) berdasarkan prinsip-prinsip yang disetujui dan menurut aturan-aturan yang mengikat (seperti perjanjian-perjanjian atau kesepakatan-kesepakatan) yang bisa, menurut teori, ditegakkan melalui Pengadilan. Akan tetapi, hukum internasional itu menarik karena dalam ketiadaan otoritas puncak (kondisi anarki) tidak ada pemerintahan efektif atau 'kekuatan polisi' untuk menegakkan aturan hukum. Konsekuensinya, kebanyakan dari yang disepakati masih berada pada takaran kesepakatan atau kerja sama. Terlebih lagi, negara-negara hanya terikat oleh kesepakatan yang mereka susun secara aktif atau oleh prinsip-prinsip yang mereka tampak patuhi dalam hubungan mereka dengan yang lainnya —kebiasaan negara (hukum adat). Para kritikus berpendapat bahwa ketiadaan pemerintah berdaulat berarti bahwa pada akhirnya hukum internasional bukanlah benar-benar hukum (sebuah pandangan kaum positivis tentang hukum sebagai kekuasaan seorang penguasa atau raja) atau bahwa ketiadaan sanksi-sanksi atau penegakan yang efektif berarti bahwa hukum internasional tidaklah efektif. Bagaimanapun, meski terdapat ketiadaan suatu kekuasaan yang berdaulat, kebanyakan negara-negara ternyata masih menaati hukum internasional saat ini. Dengan demikian, hukum internasional bisa dipandang sebagai sebuah cara yang menunjukkan tindakan tertentu yang biasanya negara-negara akan lakukan dalam sebuah situasi tertentu dan sebuah kodifikasi tentang apa yang berguna untuk mereka lakukan (lihat juga Hukum).

***International Society* (Masyarakat Internasional):** Pengertian Masyarakat Internasional harus dibedakan dari ide sistem internasional. Sebuah sistem mungkin dapat digunakan bersinonim dengan 'sistem-negara', pengorganisasian dunia secara politik ke dalam sebuah sistem negara-negara. Sistem internasional juga menunjukkan suatu ide bahwa negara-negara saling berinteraksi dengan berbagai cara. Bagaimanapun, dalam sebuah masyarakat, tingkah laku 'dikontrol dengan aturan'. Aturan dan norma-norma dari tingkah laku berkembang di antara negara-negara dan, akibatnya, negara-negara mempunyai beberapa pengertian tentang kewajiban dan pengharapan atas satu sama lainnya, yang di antaranya hal yang paling mendasar adalah pengakuan kedaulatan.

Intersubjektif: Intersubjektif berarti terbangun (atau terkonstruksikan) melalui interaksi dari berbagai 'subjek' (lihat di bawah). Ide tentang intersubjektif menyatakan secara tidak langsung bahwa suatu 'hal' tidak mempunyai 'arti' yang terbebas dari segala yang dibangun melalui interaksi atau dialog di antara subjek-subjek yang sadar.

***Law* (Hukum):** Kata 'hukum' dapat digunakan dalam kerangka ilmiah maupun hukum. Sebuah hukum ilmiah merupakan sebuah ketetapan perilaku (hukum gravitasi menyatakan bahwa sebuah bola kriket akan jatuh bila dijatuhkan); jenis hukum ini dapat diperdebatkan sebagai suatu 'kebenaran'. Dalam HI hukum sejenis ini amatlah jarang, meskipun proposisi bahwa demokrasi adalah tidak saling menjatuhkan sering kali dianggap dekat dengan suatu 'hukum' yang bersifat tetap. Dalam kerangka hukum,

sebuah hukum melarang, mengizinkan, atau menuntut tindakan atau tingkah laku tertentu (pembunuhan itu ilegal, misalnya, dan bertentangan dengan hukum); jenis hukum ini berdasarkan pada prinsip atau beberapa pengertian yang disepakati secara sosial mengenai perilaku yang dapat diterima secara umum.

Marginalisasi: Proses ketika beberapa hal dianggap kurang penting atau diabaikan; mereka dengan tingkat ekonomi dan kekuatan politik yang kecil, pada tingkatan lokal, nasional, maupun global. Dalam pengertian ini dunia ketiga dipinggirkan dalam perekonomian global dan politik internasional, si miskin dipinggirkan dalam perekonomian nasional, dan perempuan dipinggirkan dalam berbagai cara dalam kerangka sosio-ekonomi dan politik di seluruh dunia.

Material: Suatu material adalah sesuatu yang terbuat dari materi atau yang 'nyata', terlihat/mempunyai isi. Telah ada perdebatan terus-menerus yang telah berlangsung sejak lama dalam teori sosial tentang nilai penting yang relatif dari kekuatan-kekuatan dan ide-ide material dan hubungan antara keduanya. Hal ini berpusat pada tingkatan padanya tingkah laku dan hubungan manusia banyak berakar dari atau ditentukan oleh lingkungan atau kondisi-kondisi material (contohnya, tingkatan yang padanya faktor-faktor material [kurangnya makanan] menentukan [lihat deterministik di atas] kemampuan kita untuk bertindak dan cara kita berhubungan dengan orang lain). Materialisme sering dibandingkan dengan idealisme yang menyatakan bahwa 'realitas' pada dasarnya merupakan sebuah konstruksi pikiran. Sebaliknya, materialisme menyatakan bahwa lingkungan

material nyata membentuk kesadaran (ide-ide) kita atas dunia.

Military-Industrial Complex: Sebuah frasa yang pertama kali digunakan oleh Presiden AS, Eisenhower, untuk menandakan hubungan tertutup yang ada antara para politikus, pebisnis, dan militer yang bekerja untuk menjaga pembelanjaan militer/pertahanan pada tingkat yang tinggi. Hubungan tertutup seperti itu diperkuat oleh 'fenomena pintu putar' yang dengannya para tentara menjadi politikus, politikus menjadi bisnismen, dan sebaliknya.

Misantropik: Seorang misantropik adalah seseorang yang membenci umat manusia; inilah misanthropic. Dalam konteks dari buku ini, beberapa pemerhati lingkungan yang intens telah dianggap misantropik atas 'pengistimewaan' mereka atas dunia alam terhadap dunia manusia. Pendapat sanggahannya, tentu saja, karena umat manusia merupakan bagian alam, maka tindakan pengistimewaan alam tidak bisa dianggap misantropik.

Modernitas: Ini merupakan periode sejarah yang dikaitkan dengan kepercayaan akan kemampuan pemikiran yang logis (dan terutama ilmu pengetahuan) untuk mencapai terobosan yang membawa kemajuan manusia (materi —lihat di atas). Kepercayaan atas kemungkinan dari modernisasi (dan kemajuan) masih sangat umum saat ini, meski luasnya kritik atas pemikiran Barat Modern yang dibuat oleh para kaum posmodern dan pos-struktualis.

Nihilis: Seorang nihilis adalah seseorang yang tidak percaya pada sesuatu. Alasan untuk tidak memercayai sesuatu adalah suatu 'kepercayaan' bahwa masyarakat dibangun di atas kebohongan dan bahwa kebenaran dengan demikian tidaklah mungkin dalam konteks ini.

NIMBYisme: NIMBY merupakan sebuah akronim yang berarti 'not in my back yard'. NIMBYisme dalam suatu konteks lingkungan hidup adalah kecenderungan untuk fokus tentang isu-isu lingkungan hidup hanya jika mereka berdampak langsung pada seseorang; misalnya kampanye untuk atau menentang rencana pembangunan *by-pass*.

Normatif: Dalam penggunaan sehari-hari istilah 'normal' atau 'norma' digunakan untuk menjelaskan sebuah kebiasaan yang sesuai dengan standar-standar suatu masyarakat tertentu. Istilah 'normatif' dapat digunakan untuk menjelaskan kebiasaan-kebiasaan yang mematuhi hukum dari perilaku 'normal', atau yang sesuai dengan norma-norma masyarakat, yang penyimpangan dari hal ini mungkin mendatangkan beberapa bentuk sanksi. Wilayah dari tindakan normatif kemudian meliputi nilai-nilai, idealitas, dan keputusan-keputusan; yakni tentang yang diharapkan dari kita, yang seharusnya kita lakukan. Dalam HI, istilah normatif digunakan seperti pengertian tersebut. Suatu contoh teori HI yang normatif, misalnya, yang berkaitan dengan peran dari kode-kode moral, norma-norma perilaku atau hukum dalam 'masyarakat bernegara'. Sebuah teori bisa juga dianggap normatif jika ia memunculkan, secara eksplisit, masalah-masalah atau pendapat-pendapat yang dibangun berdasarkan ideal atau standar moral tertentu, contohnya, teori-teori

yang berkaitan dengan kesenjangan atau keadilan di antara negara-negara atau kelompok sosial. Kaum realis terus-menerus mengklaim bawa masalah-masalah normatif seharusnya masuk dalam wilayah teori politik dan bukan teori HI. Hal ini karena ketika seseorang mengangkat masalah-masalah tentang hukum dan moralitas, atau kesenjangan dan keadilan, seseorang mengasumsikan keberadaan suatu komunitas politik (contohnya sebuah negara), tempat yang memungkinkan untuk membuat penilaian-penilaian semacam itu dan, terutama, menemukan sanksi-sanksi efektif untuk menghukum para pelanggar. Sebaliknya, kaum realis berpendapat bahwa teori HI adalah sebuah teori tentang bertahan hidupnya negara dalam sebuah dunia yang anarkis, yang di situ 'kekuasaan besar menentukan kebenaran'. Teori normatif juga sering diperbandingkan dengan positivisme yang mengaku hanya menjelaskan tindakan-tindakan, peristiwa-peristiwa, atau tingkah laku tanpa membuat penilaian-penilaian benar atau salahnya suatu hal. Ada atau tidaknya kemungkinan untuk benar-benar 'objektif' atau 'bebas nilai' ketika mempelajari dunia sosial, merupakan suatu perdebatan yang besar (positivisme/pospositivisme).

***Otherness* (Yang Lain):** Dikaitkan terutama dengan pemikiran pos-strukturalis. Yang Lain merupakan sesuatu yang dianggap sebagai lawan dari diri/yakni yang dikeluarkan atau berada di luar.

Patriarkis: Masyarakat patriarkis adalah sebuah masyarakat di mana dominasi laki-laki terhadap perempuan dilembagakan. Dominasi laki-laki terjadi dalam berbagai aspek dan baik yang struktural (termasuk dalam lembaga-lembaga

seperti pernikahan dan keluarga) maupun yang ideologis melalui mungkin penyelenggaraan sifat-sifat dan nilai-nilai maskulin daripada feminin.

Pedagogik: Pedagogi adalah ilmu mengajar, dari sini pedagogik berarti berkaitan dengan teori pengajaran. Dari sini ada suatu alasan atau latar belakang yang masuk akal pedagogik di balik adanya ujian dalam hal pembelajaran yang mereka tunjukkan.

Polemik: Menjadi polemik berarti menjadi argumentatif atau kontroversial. Dalam konteks buku ini penggunaannya menyatakan bahwa suatu perdebatan telah diarahkan pada tingkatan penghinaan dan 'fitnah' daripada sebagai sebuah usaha murni untuk membahas masalah-masalah.

Positivisme/Pospositivisme: Positivisme menyarankan bahwa ada 'fakta-fakta' tentang dunia yang bisa ditetapkan dengan pengamatan dan bahwa pengamatan seperti itu adalah netral/bebas atau 'bebas nilai' (misalnya tidak tergantung pada 'posisi' dari si pengamat sebagai bagian dari dunia sosial). Meski seorang positivis melakukan penelitian yang empiris, positivisme tidaklah sama dengan empirisme (lihat di atas). Para kaum posmodernis (sebuah pendekatan postpositivis —lihat bab 5) menjauhkan diri dari *grand* teori dalam rangka studi empiris masyarakat-masyarakat tertentu. Pada saat yang sama kaum posmodernis ini menolak ide mengenai pengetahuan yang bebas-nilai.

Poskolonial: Jika kolonialisme adalah suatu masa ketika negara-negara seperti Inggris menguasai yang lainnya se-

bagai barang milik, maka masa sesudah negara-negara yang dikuasai ini meraih kemerdekaan (misalnya Zimbabwe) dikenal sebagai poskolonial. Poskolonalisme menyatakan secara tidak langsung tidak hanya pelepasan diri dari kendali kaum imperialis, tetapi juga bahwa dengan cara-cara yang penting masyarakat-masyarakat poskolonial kontemporer terus dipengaruhi oleh pengalaman kolonial. Sejak 1980-an, tulisan poskolonial telah memberikan sebuah kritik yang penting dan berpengaruh terhadap Barat, dan konstruksi dari masyarakat-masyarakat poskolonial sebagai 'Yang Lain', yang berbeda dan lebih rendah dari Barat (lihat Yang Lain di atas).

Praksis: Hubungan erat antara teori dan praktik yang digunakan secara luas dalam tulisan kaum Marxis.

Proletarian: Dalam teori Marxis, kelas buruh di bawah produksi industri kapitalis yang harus menjual tenaga mereka untuk tetap bertahan hidup.

***Realpolitik*:** Sebuah kata Jerman yang dipopulerkan oleh kebijakan dari Konselir Otto von Bismarck. Yang berarti sebuah realisme tentang apa yang mungkin dan sebuah kesiapsiagaan untuk menggunakan kekuatan ketika diperlukan. Dari dua yang disebut di atas, yang belakangan telah menyebabkannya diasosiasikan dengan 'ketiadaan prinsip' atau 'kezaliman'.

Rezim: Istilah rezim telah berlaku dalam teori HI sejak 1970-an dan beberapa definisi klasik telah muncul. Regim mungkin digunakan untuk menunjukkan kepemimpinan

dari sebuah negara (contohnya regim Saddam). Akan tetapi, dalam HI kontemporer, regim kebanyakan digunakan untuk mengacu pada serangkaian aturan dan prosedur-prosedur yang berkaitan dengan wilayah isu tertentu yang mengatur tingkah laku dari sekelompok aktor-aktor tertentu —mereka yang dikatakan membuat regim yang kemudian membuat keputusan-keputusan dalam dasar kesadaran ini. Komisi Penangkapan Ikan Paus Internasional adalah sebuah contoh dari regim lingkungan hidup internasional, meski bukan salah satu yang efektif. Ada suatu yang lebih berkaitan dengan regim internasional yang ditunjukkan dalam WTO.

Second Wave Feminism **(Gelombang Kedua):** Menunjukkan kemunculan kembali feminisme sebagai sebuah pergerakan sosial dan politik yang radikal di Barat tahun 1970-an.

Shallow Environmentalism **(Dangkal):** Ini adalah sebuah pandangan tentang lingkungan yang, sementara Ia membenarkan adanya suatu masalah dan bahwa perlu diambil suatu tindakan, juga menyarankan bahwa solusi kita tidak perlu secara mendasar mengubah cara masyarakat telah diatur. Ia menyarankan, sebagai konsekuensinya, bahwa kita bisa mengubah tingkah laku untuk menjamin bahwa kita hidup selaras dengan alam sehingga alam mungkin terus tersedia bagi kita.

Sovereignty **(Kedaulatan):** Menjadi berdaulat berarti mempunyai kekuasaan atau kontrol. Sering kali, sebuah negara (untuk menjadi berdaulat) perlu kontrol dalam wilayahnya sendiri dan kekuasaan untuk bertindak secara bebas di dalam sistem internasional, meskipun ada sejumlah contoh

dari negara-negara yang tidak mempunyai kapasitas untuk bertindak (karena, katakanlah, konflik sipil), tetapi meskipun begitu tetap berdaulat. Dalam kasus-kasus semacam ini, pengakuan yang terus-menerus dari komunitas internasional sangatlah penting bagi keberlangsungan mereka sebagai aktor-aktor negara yang berdaulat dan bebas.

***Structural Adjusment* (Penyesuaian Struktural):** Nama yang diberikan pada kebijakan-kebijakan 'negosiasi' antara negara-negara berkembang pengutang dengan IMF dan World Bank. Penyesuaian Struktural merupakan suatu kondisi untuk penerimaan uang. Bantuan keuangan sangatlah diperlukan segera sesudah naiknya harga minyak dan krisis utang tahun 1970-an dan 1980-an. Program Penyesuaian Struktural (SAPs) berarti negara-negara mengurangi pengeluaran (pengurangan rumah sakit, pengurangan pekerjaan pemerintah dan sebagainya) dan meningkatkan pendapatan (meningkatkan hasil pertanian untuk ekspor). Efek program SAPs sering kali membawa hasil seperti yang diinginkan dalam hal data ekonomi kasar, tetapi dalam hal memindahkan para petani dari lahan penghidupannya (guna menumbuhkan ekspor) dan pengurangan biaya-biaya sosial, SAPs juga mempunyai dampak kuat atas penderitaan kelompok-kelompok yang sudah miskin.

Subjek: Dalam penggunaan sehari-hari, subjek adalah sebuah penjelasan, cerita, atau narasi tentang 'siapa' atau 'apa'. Dalam teori pos-strukturalis kontemporer, istilah ini digunakan dengan pengertian yang sama. Bagaimanapun, subjek adalah sesuatu atau kesatuan yang 'bertindak'. Subjek dikarakterisasikan sebagai sebuah identitas nyata dan agensi

(kapasitas untuk 'bertindak' —lihat aktor di atas). Dengan demikian, wacana-wacana seperti realisme mengonstruksikan 'negara' sebagai aktor utama yang mempunyai kepentingan yang nyata dan bertindak untuk meningkatkan kepentingan nasional. Studi HI adalah studi mengenai negara. Dengan demikian, dalam wacana kaum realis yang menjadi subjek adalah negara, bukan kelompok atau individu.

Substantif: Berasal dari kata substansi, substantif berarti nyata atau murni. Sebuah pendapat substantif kemudian adalah suatu isu yang sangat nyata dan penting; sebuah pertukaran yang murni atas ide-ide, bukanlah cercaan dan kontradiksi (lihat/bandingkan dengan polemik di atas).

Sustainable Development **(Pembangunan Berkelanjutan):** Sering kali didefinisikan secara kering seperti 'pembangunan yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan generasi masa kini tanpa mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan generasi masa depan', pembangunan berkelanjutan sangatlah kontroversial. Beberapa kritikus telah mengindikasikan bahwa konsep ini adalah sesuatu yang kontradiktif pengistilahannya; sementara itu beberapa yang lain menyatakan bahwa konsep ini membutuhkan perubahan-perubahan yang lebih serius dibandingkan dengan yang pernah diusulkan para politikus kini.

Teleologis: Model pemikiran yang membangun penjelasan atau panduan bagi tindakan yang berdasarkan alasan atas beberapa pengertian dari sebuah tujuan yang tertinggi atau yang paling diinginkan.

Universalisme: Sebuah doktrin itu dapat dikatakan bersifat universal ketika ia mampu diterapkan di seluruh umat manusia tanpa memandang religi, warna kulit, atau nasionalitas, atau perbedaan-perbedaan 'permukaan' lainnya.

Utopian: Sebuah utopia merupakan suatu visi tentang sistem sosial dan politik yang sempurna. Menjadi seorang utopian berarti kemudian menjadi visioner dan percaya pada kemungkinan dalam meningkatkan masyarakat manusia hingga utopia dicapai. Oscar Wilde telah mengatakan bahwa sebuah peta dunia tanpa Utopia bernilai untuk dilihat, meski beberapa sarjana HI akan tidak setuju (lihat bab 1).

World-System Theory **(Teori Sistem-Dunia):** Dikaitkan terutama dengan karya Immanuel Wallerstein, Teori Sistem-Dunia dapat dipertimbangkan sebagai suatu varian dari strukturalisme yang mengonseptualisasikan tatanan dunia sebagai sesuatu yang distrukturkan ke dalam negara-negara Pusat (kaya, berkembang), negara-negara Pinggiran (miskin, terbelakang) dan sejumlah penengah atau negara-negara semi-pinggiran (lihat bab 3).

Zero Sum: Sebuah permainan 'Zero Sum' adalah permainan yang jawabannya selalu NOL. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa jika aku mendapat sesuatu, maka kamu pasti kehilangan sesuatu dengan jumlah yang sama. Jadi misalnya, dalam peperangan, suatu kemenangan dalam atas wilayah oleh satu pihak berarti secara otomatis sebuah kehilangan bagi pihak lainnya. Kebanyakan berkaitan langsung dengan realisme, meski tidak semua hubungan internasional bisa

dikarakterisasikan dengan cara ini. Contohnya, kaum liberal menyatakan bahwa perdagangan membawa keuntungan bagi semua dan kesepakatan-kesepakatan lingkungan hidup menyarankan bahwa semua kemanusiaan akan diuntungkan dari dampak pengadopsian pasal-pasal dalam kesepakatan tersebut. Dalam kasus ini jawabannya lebih dari nol (misalnya perolehan-perolehan seseorang) dan dapat disebut sebagai sebuah permainan *positive-sum*.

Indeks

A

a labour of love, 329
Adolf, Hitler, 45
aerodinamika, 449
Althusser, Louis, 159, 175
amoral, 55
anarkisme, 388
Anderson, Benedict, 294
antroposentris, 391
Aristoteles, 387
autarki, 131

B

Bacon, Francois, 390
balance of power, 116, 264
balance of terror, 2
Bank Dunia, 72
barbarisme, 392
Bartelsen, Hans, 41
Bentham, Jeremy, 101, 102, 387
Bhabba, Homi, 302
Bohr, 454
Bolshevik, 194
Booth, 435
borjuis, 170
bottom up, 149
Buddhisme, 439
Bull, Hedley, 73, 479
Bush, George, 6

C

Campbell, David, 299
captive market, 162, 163
Cardoso, Henrique Fernando, 168
Carr, E.H., 49, 444
Carson, Rachel, 384
check and balance, 108
counter-hegemonic, 243, 228
Cox, Robert, 241, 461

D

Darwin, 280
Darwinisme, 448
Davis, Emily, 344
de Beauvoir, 281, 286
Decade for Women, 335
Derrida, Jacques, 269, 279, 281, 288, 309, 475
Descartes, René, 391
deterrence, 461
disempowering, 312
Dobson, 417, 418, 419
Doyle, Michael, 116
Durkheim, Emile, 158

E

Einstein, Albert, 454
Eisenhower, 485
Ekofeminisme, 423
ekologi, 388
ekosentrisme, 377
ekosistem, 388
eksklusioner, 244
Elton, Ben, 405
Emansipasi, 230
Empirisme, 446
Engels, Friedrich, 153
Enlightenment, 224
Enloe, Cynthia, 361, 362
environmentalisme, 378, 388
EPI, 74
Epistemologi, 440
evolusi, 448

F

Felatto, Enzo, 168
feminisme, 209, 366
Foucault, Michael, 269, 276, 277, 278, 282, 284, 309, 480
Frank, Andre Gunder, 168
Freud, Sigmund, 470
Friedan, Betty, 333
Fukuyama, Francis, 97

G

Galtung, Johan, 200
Garret, Elizabeth, 344
GATT, 77, 354
Gender, 322
genealogi, 282, 309
George, Jim, 457
Gill, Stephen, 242
Gilpin, Robert, 77, 134
Gorbachev, Mikhail, 413
Gramsci, Antonio, 24, 218, 228, 237, 256
green Leviathan, 388
Green Thought, 377

H

Habermas, Jürgen, 218, 229, 251, 306, 449

Haeckl, Ernst, 388; Karya, 388
Hegel, 97, 470
hegemoni, 236
Heidegger, Martin, 269, 309
hibriditas, 302
Hitler, 45, 310
Hobbes, Thomas, 54, 388, 444
Hobson, 162
Hoffman, 456
holistik, 171
human nature, 376

I

IBRD, 77
imagined communities, 294
IMF, 72, 77
immoral ,54
Imperialisme, 163
inklusioner, 244
inter-war, 164
invisible hand, 102

K

Kant, Immanuel, 93, 101, 141
Kapitalisme, 155
Kaum:
    Fungsionalis, 126
    liberal 103
Keynes, John Maynard, 101, 141
Keynesian, 99
Kindleberger, Charles, 76
Kolonialisme, 163
Konfusius, 387
konsep patriarki, 333
konsumer, 410
Kristen-Judaeo, 389
Kuhn, Thomas, 453

L

Labour theory of value, 154
LBB, 95
Lenin, 6, 162, 194
liberalisme 100, 111, 112, 375;
    klasik, 103
LIEO, 199
Liftin, 397
Liga Bangsa-Bangsa, 43
Linklater, Andrew, 243, 247
logosentris, 281

M

Machiavelli, Niccolo, 54
Machiavellian, 54
mainstream, 340
Mansbach, 138
Marx, Karl, 13, 97, 152, 209, 470
Marxis, 151
Marxisme, 209; ilmiah, 151;
    struktural, 151
Mathews, Freya, 423

Mazhab:
Dependensia, 167
English, 47
medievalisme, 479
Mellor, Mary, 424
Metafisika, 288
metode genealogika, 297
Midgley, Mary, 422
Mies, Maria, 197
Mill, John Stuart, 101, 108, 344
Modernisasi', 166
Morgenthau, Hans, 50, 388
Morse, Edward, 120
Mutually Assured Destruction, 2

N

Naess, Arne, 477
Negara, 174
neo-imperialisme, 166
neo-klasik, 99
neo-liberal, 75
neo-marxisme, 151
neo-realisme, 74
Newton, Isaac, 454
nexus, 284
NIEO, 193
Nietzsche, Friedrich, 269, 309
nuclear winter, 386

O

ontologi, 438, 479
ontologis, 445
OPEC, 35, 65
otoritarianisme, 79

P

parokialisme, 421
Paterson, 400
Peloponnesians Wars, 53
pemikiran Marxis, 170
pendekatan holistik, 437
people power, 122
Perang:
Dingin, 6, 51
Dunia II, 6
Korea, 64
Teluk, 6
Perjanjian Westphalia, 47
phonosentris, 281
pilantropis, 473
Plato, 376, 387
pluralisme, 118
posmodernisme, 209, 309, 448
Prebisch, Raul, 168
pressure groups, 96
problem-solving, 425, 461
progresif, 300
proletar, 170
proteksionisme, 103

Q

Qasim Amin, 358

R

rasisme, 197
Realisme, 41
red menace, 298
Revolusi:
    Industri, 234, 376
    Nikaragua, 349
Ricardo, David, 32, 101, 102, 117, 141
Rostow, Walts, 165
Rousseau, 388
Ruddick, 359

S

Sandra Harding, 445
Sassoon, Siegfried, 42
schizophrenia, 284
seksisme, 197
sensitivitas, 131
Sistem Bretton Woods, 77
skeptisisme, 261
Smith, Adam, 101, 102, 103, 117, 141, 435
Stalin, 194, 261
Stalinisme, 315
Stanton, Elizabeth, 327
state:
    craft, 292
    of nature, 288
    centric, 292
status quo, 215, 311, 339
strukturalis awal, 175
strukturalisme, 375
Suffragette, 344

T

teleologi, 161, 282
Teori:
    ekonomi liberal, 169
    ketergantungan, 164
    kritis, 209
    liberal, 93
    Marxisme klasik, 175
    modernisasi liberal, 165
    sistem-dunia, 164
    stabilitas hegemonis, 76
the state of nature, 57
thinking green, 377
Thucydides, 53
top down, 149
topografi, 304
Tressel, Robert, 155
trickle-down, 169
Trotsky, 194

U

UNCED, 407

V

von Bismarck, Otto, 489
vulnerabilitas, 131

W

Walker, R.B.J., 303
Wallace, 435
Wallerstein, Immanuel 170, 184, 180, 186, 197, 493
Waltz, Kenneth, 67
Weber, Cynthia, 298
Weber, Max, 223, 300
Whitworth, Sandra, 354
Wilde, Oscar, 493
Wilson, Woodrow, 6
Wollstonecraft, Mary, 328

Y

yurisdiksi eksklusif, 79

—✦✦—